



PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRHA PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160

Telepon: (021) 3862141

E-mail: ppi.info@ptppi.co.id



Website: www.ptppi.co.id

Bumn UNTUK INDONESIA



PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of ID FOOD



Bergerak Bersama, Menjadi Juara

Move Together,
Become
a Champion



2024

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini, kondisi mendatang, dan lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PPI”, “Perseroan”, dan adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia secara umum yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi PPI www.ptppi.co.id.

This Annual Report contains forward-looking statements regarding the financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company as classified under applicable legislation, except for historical matters. These statements entail risks, uncertainties, and may result in materially different actual developments from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current conditions, future conditions, and the business environment in which the Company operates. The Company does not guarantee that the duly authenticated documents will yield certain results as expected.

This Annual Report contains the terms “PPI,” “the Company,” and occasionally the term “we” is used for convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in general, defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia conducting its primary business activities in domestic and international trade.

References to the currency unit “Rupiah” or “Rp” refer to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Indonesian Rupiah. The report is published in two languages, Indonesian and English. In addition to the printed edition, a similar report can be accessed through the official PPI website www.ptppi.co.id.

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

ABOUT THE ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang mengangkat tema “Bergerak Bersama, Menjadi Juara.”

Laporan Tahunan ini berfungsi sebagai sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PPI pada tahun yang dilaporkan. Dokumen ini memuat data dan informasi material yang menggambarkan profil perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi PPI kepada otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, penyusunan Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang PPI melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, isi laporan ini berasal dari analisis internal serta sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Beberapa bagian dari laporan ini memuat data dan informasi tentang pandangan ke depan, yang bersifat *forward-looking statement*, seperti target, harapan, perkiraan, estimasi, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha PPI di masa mendatang.

Welcome to the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), which carries the theme “Move Together, Become a Champion.”

This Annual Report also serves as a comprehensive documentation source containing information on PPI's performance in the reported year. It includes data and material information depicting the Company's profile; operational, marketing, and financial performance; information about the duties, roles, and structural functions of the Company's organization, applying best practices and corporate governance principles.

The primary objective of preparing this Annual Report is to enhance PPI's information transparency to relevant authorities and other stakeholders, as well as to serve as a yearly book that fosters pride and solidarity among employees. Additionally, the preparation of this Annual Report aims to build understanding and trust among shareholders and other stakeholders regarding PPI through the provision of accurate, balanced, and relevant information.

This report embodies PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's transparency and accountability to present data and material information regarding the Company's performance and governance to stakeholders. Generally, the contents of this report originate from internal analysis as well as reliable document sources and informants. Several sections of this report contain forward-looking statements, such as targets, expectations, estimates, prospects, or projections of PPI's operational performance and business conditions in the future.



PENJELASAN TEMA EXPLANATION OF THEME



Bergerak Bersama, Menjadi Juara Move Together, Become a Champion

Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2024. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, PPI meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang dapat tercapai melalui kerjasama yang *solid* antara seluruh pemangku kepentingan baik internal perusahaan, mitra bisnis, maupun pelanggan.

Tema ini menggambarkan pentingnya kerja tim yang kompak dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dengan langkah bersama, setiap individu dan elemen dalam organisasi dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk mencapai kinerja yang optimal. Perseroan menempatkan semangat gotong royong sebagai dasar dalam melangkah menuju masa depan yang lebih sukses.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk terus tumbuh dan berinovasi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia percaya bahwa dengan bergerak bersama, setiap tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan lebih efektif, dan pencapaian visi perusahaan untuk menjadi juara di industri perdagangan dapat terwujud dengan lebih mudah.

This theme reflects the spirit of collaboration and synergy in addressing business challenges in 2024. In facing the ever-evolving market dynamics, PPI believes that long-term success is attainable through solid cooperation between all stakeholders, including the Company's internal, business partners, and customers.

This theme represents the importance of solid and supportive teamwork in achieving a common goal, namely, to serve as a superior and highly competitive company. With collaborative efforts, every individual and element in the organization can contribute to achieving optimal performance. The Company emphasizes the spirit of mutual cooperation as the basis for moving towards a more successful future.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, a company dedicated to growth and innovation, firmly believes that through collaborative efforts, challenges can be managed more effectively, and the realization of the Company's vision to serve as a leader in the trading industry can be more readily achieved.

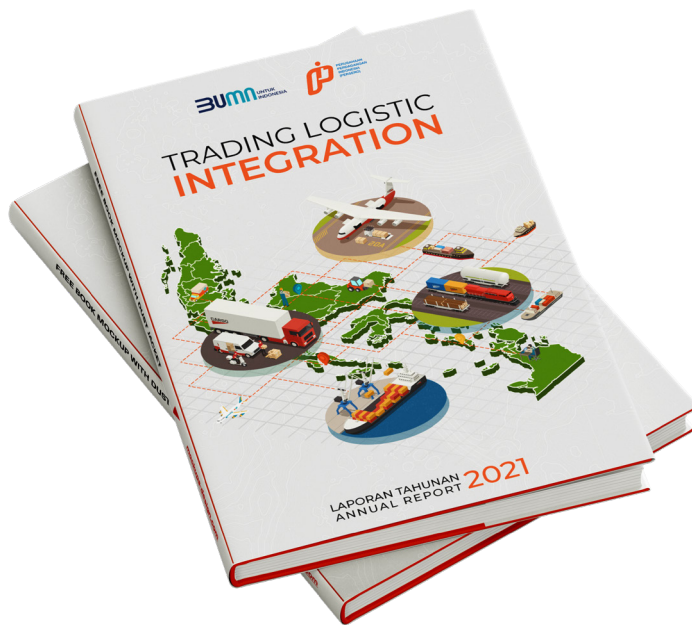
KESINAMBUNGAN TEMA CONTINUITY OF THEMES



2023
**MEMPERKUAT RANTAI PASOK
MENJAGA KETAHANAN
PANGAN**
STRENGTHENING THE SUPPLY
CHAIN
ENSURING FOOD SECURITY



2022
**KOLABORASI PERDAGANGAN
DAN LOGISTIK UNTUK
MEMAJUKAN PANGAN
NASIONAL**
TRADE AND LOGISTICS
COLLABORATION TO ADVANCE
NATIONAL FOOD



2021 TRADING LOGISTIC INTEGRATION



PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation Of Liability	3	Daftar Alamat Kantor Office Address List	86
Tentang Laporan Tahunan About The Annual Report	4	Keanggotaan Asosiasi Association Membership	87
Penjelasan Tema Explanation Of Theme	5	Struktur Organisasi Organizational Structure	88
Kesinambungan Tema Continuity Of Themes	6	Profil Dewan Komisaris Profile of The Board of Commissioners	90
Capaian 2024 Achievements in 2024	10	Profil Direksi Profile of The Board of Directors	94
1 Ikhtisar Kinerja Performance Highlights		Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Employee Demographic and Competency Development	98
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Overview	14	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi Education and/or Training for The Board of Commissioners, Board of Directors, and Supporting Organs For The Board of Commissioners and Board of Directors	112
Ikhtisar Operasi dan Organisasi Operations and Organization Overview	18	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	117
Ikhtisar Saham atau Modal Stock or Capital Overview	19	Daftar Entitas Anak List of Subsidiaries	120
Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya Information on Issuance of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds, and Other Funding	20	Informasi Tentang Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham Serta Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Information on The Chronology of Shares Issuance and Listing and The Chronology of Other Securities Issuance and Listing	124
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	21	Dividen Dividend	124
Kilas Peristiwa 2024 2024 Key Events	23	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	124
2 Laporan Manajemen Management Report		Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institution and Professionals	125
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	30	Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on The Company Website	126
Laporan Direksi Board of Directors Report	40	4 Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
Surat Pernyataan Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024 Statement Letter of Annual Report of PLT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2024	51	Tinjauan Perekonomian Economic Overview	130
3 Profil Perseroan Company Profile		Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review By Business Segment	131
Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Corporate Identity	54	Tinjauan Keuangan Financial Overview	140
Riwayat Singkat Perseroan Corporate Brief History	55	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level	157
Jejak Langkah Milestones	57	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy	158
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Cultural Values	60	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	160
Makna Logo Perusahaan Meaning of Corporate Logo	64	Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Material Commitment on Capital Expenditure	163
Bidang Usaha, Produk, dan Layanan Line of Business, Products, And Services	64	Pencapaian Target Tahun 2024 Target Achievement in 2024	163
Produk dan Komoditi Products and Commodities	66	Prospek Usaha Business Outlook	167
Wilayah Operasi Operational Area	84		



Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	168
Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Perseroan Pada Tahun Buku Terakhir Changes In Accounting Policies Applied By The Company In The Last Fiscal Year	168
Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Report Date	168
Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions With Affiliated/Related Parties	168
Informasi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information on The Realization of Utilization of Proceeds from Public Offering	174
Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara Taxation and Contribution to The State	174
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition and/or Debt/Capital Restructuring	175
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Significant Changes In Legislation And Regulations Affecting The Company	175
Dampak Perubahan Harga Terhadap Perseroan Impact of Price Changes on The Company	176
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by The Company (ESOP/MSOP)	176
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	176

5 Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PPI Development of The Implementation of Good Corporate Governance Within PPI	180
Struktur Dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism	209
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	211
Dewan Komisaris Board of Commissioners	216
Direksi Board of Directors	236
Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi Working Relationship Between The Board of Commissioners and The Board of Directors	275
Remunerasi Dewan Komisaris Dengan Direksi Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors	288
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of The Board of Commissioners	292
Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of The Board Of Directors	322
Komite di Bawah Direksi Committees Under The Board Of Directors	343
Manajemen Risiko Risk Management	347

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	358
Perkara Penting Legal Cases	362
Kode Etik Code of Conduct	362
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	366
Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption and Gratuity Control Policy	372
Kebijakan Kickbacks dan Anti Penyuapan Kickbacks and Anti-Bribery Policy	376
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds For Social and Political Activities	376
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Officials Wealth Reports	377
Transparansi Praktik Bad Governance Transparency of Bad Governance Practices	378
Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan Policy on Company Information Classification and Management	380
Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Governance	381
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	383
Kesesuaian Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Conformity of Implementation Of The General Guidelines of Indonesian Corporate Governance (PUGKI)	388

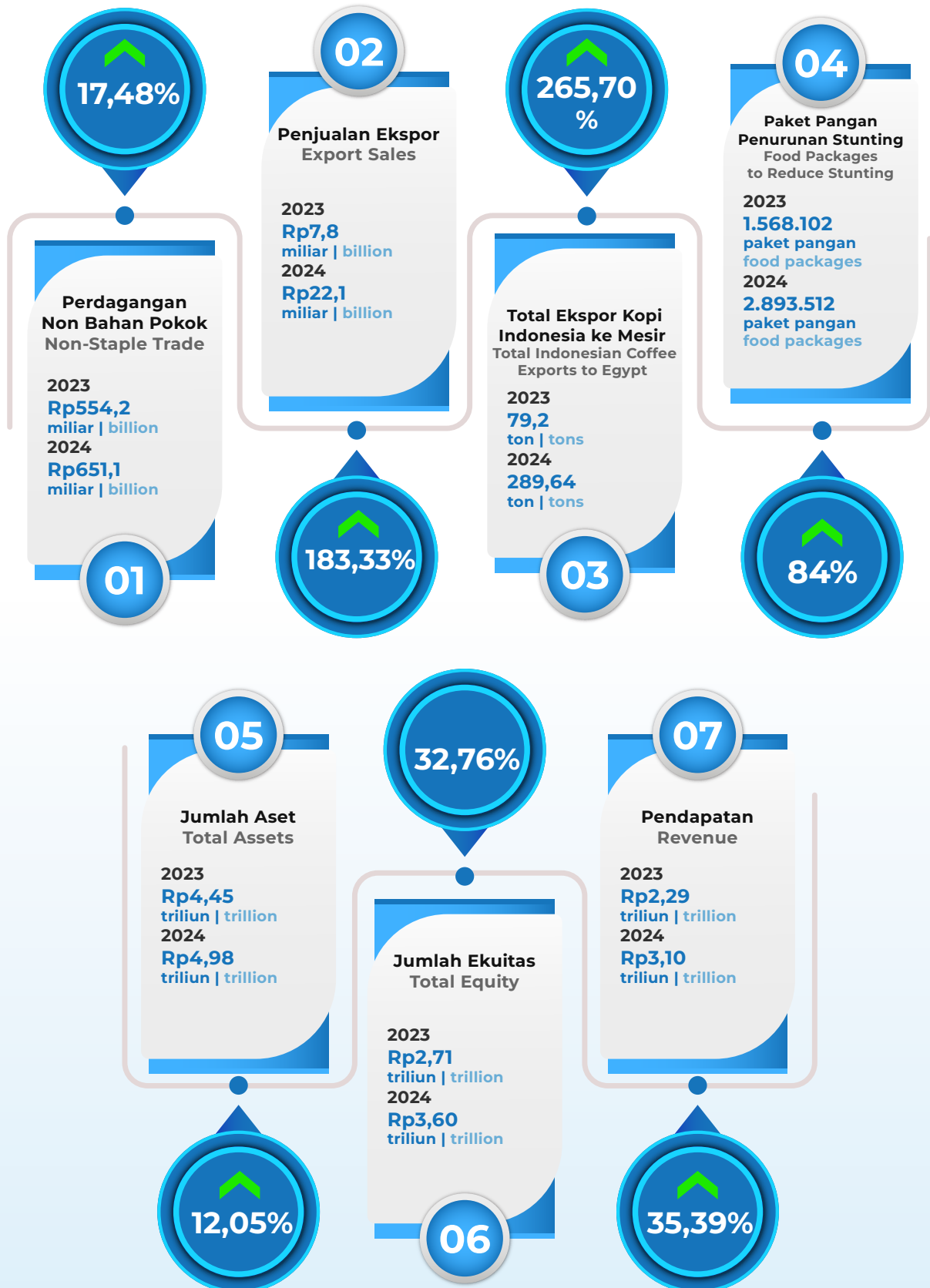
6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	404
Laporan Keuangan Financial Report	408



CAPAIAN 2024

ACHIEVEMENTS IN 2024







01

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL OVERVIEW

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

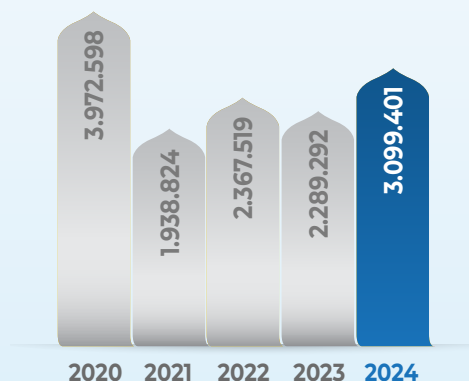
Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Pendapatan Revenues	3.099.401	2.289.292	2.367.519	1.938.824	3.972.598	35,39 ↑
Beban Usaha Operating Expenses	(309.034)	(330.892)	(316.584)	(395.1)	(3.804.021)	(6,61) ↓
Pendapatan (Beban) Non Usaha - bersih Non-operating Income (Expenses) – net	39.008	135.778	(5.206)	(49.094)	(14.326)	(71,27) ↓
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	33.858	(28.550)	81.068	(128.846)	168.575	218,59 ↑
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	25.304	70.420	75.863	(177.940)	154.249	(64,07) ↓
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(4.871)	(19.039)	(26.773)	32.645	(45.48)	(74,42) ↓
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	4.842	46.260	(924)	246.656	(13.129)	(89,53) ↓
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	20.433	51.382	49.089	(145.295)	108.769	(60,23) ↓
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	4.842	46.260	(924)	101.361	95.639	(89,53) ↓
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	20.431	51.379	49.085	(145.290)	106.620	(60,23) ↓
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	2	2	4	(5)	2.149	(0,00) -
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	4.840	46.258	48.132	101.366	93.736	(89,54) ↓
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	2	2	33	(5)	1.903	(0,00) -

*) Disajikan kembali | As restated

Penjualan | Sales

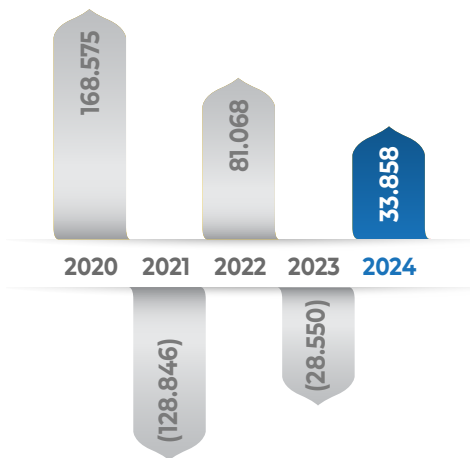
(Rp-juta | Rp-million)





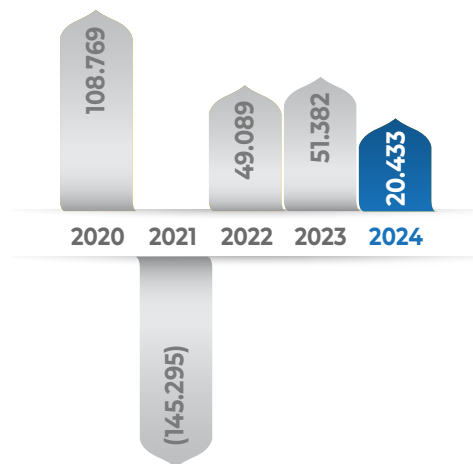
Laba Usaha | Operating Profit

(Rp-juta | Rp-million)



Laba Bersih Tahun Berjalan | Profit for the Year

(Rp-juta | Rp-million)



Posisi Keuangan Financial Position

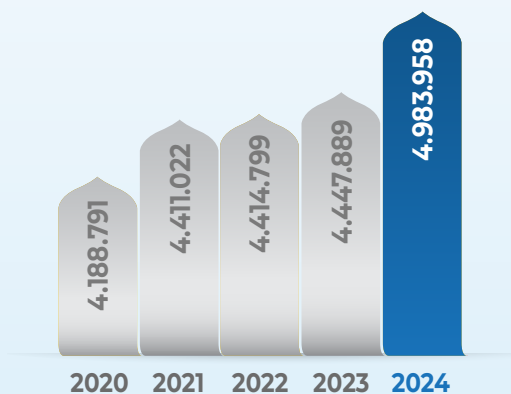
Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022*)	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Aset Assets						
Aset Lancar Current assets	1.204.863	670.805	770.030	823.271	922.092	79,61 ↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.779.095	3.777.083	3.644.768	3.587.751	3.266.699	0,05 ↑
Jumlah Aset Total Assets	4.983.958	4.447.889	4.414.799	4.411.022	4.188.791	12,05 ↑
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.247.557	784.441	754.351	616.102	515.484	59,04 ↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	136.878	952.153	995.413	1.007.482	990.254	(85,62) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.384.435	1.736.594	1.749.764	1.623.585	1.505.739	(20,28) ↓
Ekuitas Equity						
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.599.523	2.711.294	2.665.034	2.787.437	2.683.052	32,76 ↑

*) Disajikan kembali | As restated

Aset | Assets

(Rp-juta | Rp-million)



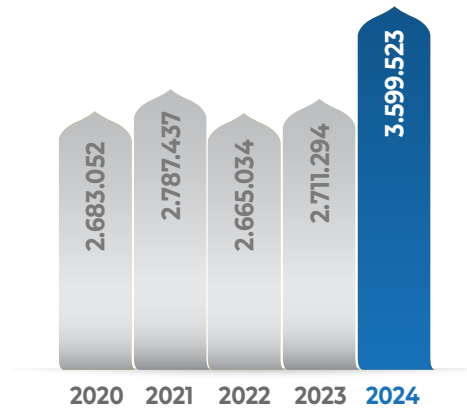
Liabilitas | Liabilities

(Rp-juta | Rp-million)



Ekuitas | Equity

(Rp-juta | Rp-million)



Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

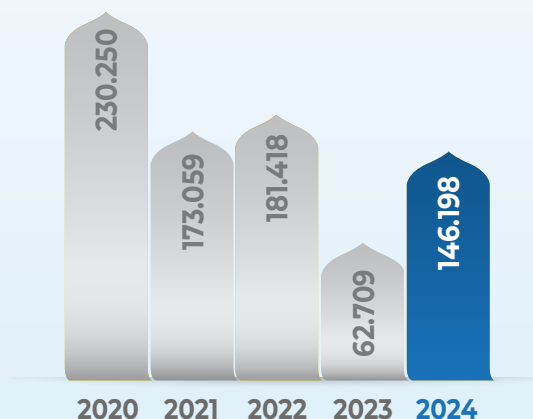
Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flow from Operating Activities	27.486	(171.180)	(19.273)	(74.448)	377.516	116,06 ↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flow from Investing Activities	33.398	(4.463)	5.565	(96.461)	(107.775)	848,33 ↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flow from Financing Activities	23.950	70.938	22.067	113.719	(135.470)	(66,24) ↓
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	83.834	(104.705)	8.359	230.250	95.979	181,02 ↑
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	62.709	181.418	173.059	(57.191)	134.271	(65,43) ↓
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	146.198	62.709	181.418	173.059	230.250	133,14 ↑

*) Disajikan kembali | As restated

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | Cash and Cash Equivalents at End of the Year

(Rp-juta | Rp-million)





Rasio-rasio Keuangan Financial Ratios

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) 2023- 2024 Increase (Decrease) 2023- 2024 (poin point)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio(%)	96,6	84,0	123,50	133,63	178,88	12,60
Rasio Cepat Quick Ratio (%)	66,7	43,5	111,33	87	110,4	24,20
Rasio Kas Cash Ratio (%)	11,7	7,9	22,76	28,09	44,90	3,80
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio						
Rasio Utang Terhadap Aset Debt To Assets Ratio (%)	27,8	39,0	38,16	36,81	35,95	(11,20)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt To Equity Ratio(%)	38,5	64,1	61,71	58,25	56,12	(25,60)
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	79,7	44,8	65	5,7	11,8	36,30
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	60,1	46,2	66,2	12,39	12,95	(6,30)
Perputaran Persediaan (hari) Total Inventory Turnover (days)	8,5	20,5	15	14	10,5	(12,00)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return On Equity (ROE)	0,6	0,6	1,73	(5,21)	4,05	0,00
Imbalan Investasi (%) Return On Investment (ROI)	0,7	(0,8)	3,28	(5,3)	4,8	(0,10)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	11,1	13,2	16,80	13,7	13	(0,10)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	0,7	0,7	2,07	(7,49)	2,74	0,00
Margin EBITDA EBITDA Margin	2,3	3,0	5,53	(4,2)	5,1	(0,70)

Imbal Hasil Ekuitas | Return On Equity (ROE)

(%)

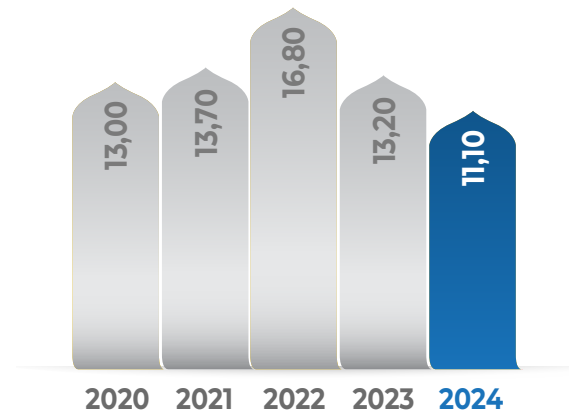


Imbal Hasil Investasi | Return On Investment (ROI)

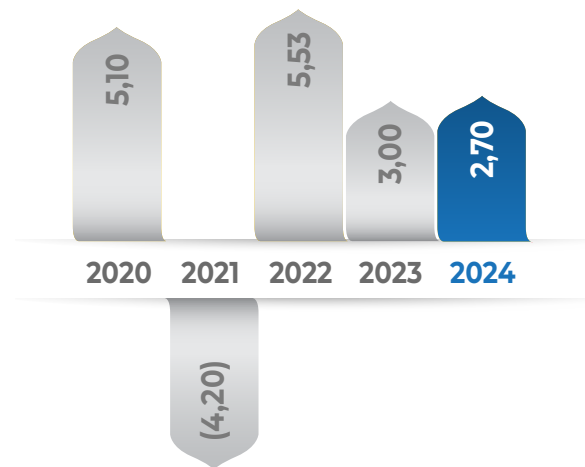
(%)



Margin Laba Kotor | Gross Profit Margin



Margin EBITDA | EBITDA Margin



IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI OPERATIONS AND ORGANIZATION OVERVIEW

Ikhtisar Operasi

Operation Overview

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Komoditi Commodity	2024			2023		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	GPM	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	GPM
Perdagangan Non Bahan Pokok Non-Staple Trade	651,1	39,2	6,0%	554,2	35,2	6,36%
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	414,7	14,7	3,5%	329,5	12,4	3,8%
Pupuk Non Subsidi Non-subsidized Fertilizer	69,8	4,5	6,4%	73,4	3,7	5,1%
Pestisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	31,5	9,0	28,7%	26,1	9,6	36,7%
Pestisida Non-Dharmabrand Non-Dharmabrand Pesticides	3,2	0,2	7,5%	5,0	0,5	10,0%
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Products and Equipment	0,5	0,0	4,5%	0,0	0,0	0,0%
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	58,4	6,5	11,1%	31,9	4,0	12,6%
Bahan Kimia Non B2 Non Hazardous Chemicals	50,8	3,4	6,7%	74,1	4,2	5,7%
Bahan Bangunan Building Materials	22,1	0,9	4,0%	14,1	0,7	5,1%
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	344,9	17,7	5,1%	436,7	31,9	7,31%
Produk Pangan dan Bahan Pokok Food and Staple Products	70,4	2,8	3,9%	243,8	17,3	7,1%
Produk Konsumsi Consumer Products	92,4	4,7	5,0%	94,7	6,6	7,0%
CPP*	182,1	10,3	5,7%	98,3	8,0	8,2%
Produk Strategis Strategic Products	1.145,5	93,2	8,1%	605,4	81,0	13,37%
Produk Pangan dan Hortikultura Food and Horticultural Products	824,7	23,1	2,8%	367,9	20,4	5,5%
Non Pangan Non-Food	320,8	70,1	21,8%	237,5	60,6	25,5%
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	22,1	1,0	4,3%	7,8	0,1	1,1%
Ekspor Export	22,1	1,0	4,3%	7,8	0,1	1,1%
Transisi Bisnis Business Transition	51,2	47,9	93,6%	26,7	20,9	78,2%
Property Property	47,7	47,7	100,0%	25,9	20,8	80,4%



Komoditi Commodity	2024			2023		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	GPM	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	GPM
WIS	3,5	0,2	6,6%	0,8	0,1	9,1%
Anak Perusahaan Subsidiaries	884,5	143,9	16,3%	756,8	141,3	18,67%
TOTAL	3.099,40	342,9	11,1%	2.289,3	302,3	13,2%

*) CPP di Perdagangan Bahan Pokok merupakan pendapatan dari pelaksanaan proyek stunting | CPP in Staple Trade is a revenue generated from the implementation of stunting projects

Ikhtisar Organisasi Organization Overview

KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan KPI and Company Health Level	2024	2023
Skor KPI KPI Score	86,6	90.24
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level	idBBB/Stable	idBBB-/Stable

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada tahun 2024, metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PT PPI menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023.

Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

Good Corporate Governance

In 2024, the method of measuring the implementation of GCG within PT PPI adopted the General Guidelines of Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter of the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024, dated October 15, 2024, concerning the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and the Letter of the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024, concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

According to the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

IKHTISAR SAHAM ATAU MODAL STOCK OR CAPITAL OVERVIEW

Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna/sebesar 0,0001% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar 99,99%.

Share Ownership

The Company's shares are owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs, with 1 Share of Series A Dwiwarna representing 0.0001% and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) holding 99.99%.

Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2024, PPI tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; termasuk informasi tentang penghentian sementara perdagangan saham.

Informasi tentang Aksi Korporasi Lainnya

Di sepanjang tahun 2023 dan 2024, PPI tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan adanya perubahan saham. PPI juga tidak melakukan pembagian dividen saham maupun saham bonus yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham. Adapun pada tahun 2024 terdapat pembayaran dividen kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 16.699.617.326,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Information on Stock Trading and Public Share Ownership

As of December 31, 2024, PPI did not trade its shares to the public. As a result, there is no information related to stock trading that includes market capitalization based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the highest, lowest, and closing stock prices based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the volume of stock trading on the Stock Exchange in which the shares are listed; information in the form of graphs containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed and the volume of stock trading on the Stock Exchange in which the shares are listed; including information on temporary suspension of stock trading.

Information on Other Corporate Actions

Throughout 2023 and 2024, PPI did not undertake any corporate actions resulting in any share changes. PPI also did not distribute stock dividends or bonus shares, which resulted in changes in the composition of share ownership. In 2024, there was a dividend payment to the Owners of the Parent Entity for the 2023 Fiscal Year, amounting to Rp16,699,617,326.00 (sixteen billion six hundred ninety-nine million six hundred seventeen thousand three hundred twenty-six rupiah).

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON ISSUANCE OF BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FUNDING

Hingga akhir tahun 2024, PPI tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya, serta bentuk pendanaan lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, maupun pendanaan lainnya.

As of the end of 2024, PPI has not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities, as well as other forms of funding. Thus, information about outstanding bonds/sukuk/convertible bonds or other funding is unavailable.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan Tahun 2024

2024 Awards



Penghargaan Awards	Kategori Category	Penyelenggara Organizer	Tanggal Diberikan Awarding Date
Company Culture Awards 2024	- Juara 2 Best Culture Leader 2nd Place for Best Culture Leader - Juara 2 Best Culture Booster 2nd Place for Best Culture Booster - Juara 2 Best Culture Squad 2nd Place for Best Culture Squad	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD	10 Januari 2024 January 10, 2024
13 th Anugerah BUMN 2024	Best Corporate in Managing the Accessibility and Affordability of Food and Fertilizer	BUMN Track	14 Maret 2024 March 14, 2024
Pasar Digital (PaDi) UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 Pasar Digital (PaDi) MSME Hybrid Expo & Conference 2024	- Peringkat 2 BUMN dengan Jumlah Seller Terbanyak 2nd Place in SOEs with the Highest Number of Sellers - Peringkat 2 BUMN dengan Jumlah Pengampu Terbanyak 2nd Place in SOEs with the Highest Number of Supervisors - Peringkat 2 Buyer Group dengan Jumlah Seller Terbanyak (PT PPI Cabang Jakarta) 2nd Place in Buyer Group with the Highest Number of Sellers (PT PPI in Jakarta Branch) - Peringkat 2 Buyer Group dengan Jumlah Pengampu Terbanyak (PT PPI Cabang Jakarta) 2nd Place in Buyer Group with the Highest Number of Supervisors (PT PPI in Jakarta Branch) - Peringkat 3 Buyer Group dengan Jumlah Pengampu Terbanyak (PT PPI Kantor Pusat) 3rd Place in Buyer Group with the Highest Number of Supervisors (PT PPI in Head Office)	Kementerian BUMN Ministry of State- Owned Enterprises	28 Agustus 2024 August 28, 2024
Ajang Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024 2024 Apresiasi Mitra BUMN Champion Event	Terbaik 2 Kategori National Champion Distributor/Broker Best in 2 Categories of National Champion Distributor/Broker	Kementerian BUMN Ministry of State- Owned Enterprises	10 Oktober 2024 October 10, 2024
Indonesia Best BUMN Awards 2024	Best BUMN for Strengthening the Synergy of Trading and Distribution Business Development dengan kategori Subsidiary/ Food and Fertilizer Industry Best BUMN for Strengthening the Synergy of Trading and Distribution Business Development in the Subsidiary/Food and Fertilizer Industry category	Warta Ekonomi	1 November 2024 November 1, 2024
Apresiasi Mitra Layanan Zakat Penghasilan Baznas RI Appreciation for Zakat Service Partners of BAZNAS RI	Dukungan Peningkatan Literasi ZIS dan Pelayanan Zakat Penghasilan Karyawan Support for Improving ZIS Literacy and Zakat Services on Employee Income	Baznas RI	12 November 2024 November 12, 2024

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024

Valid Certifications in 2024



Sertifikasi Certification	Deskripsi Sertifikasi Certification Description	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Validity Period
Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Certificate of Occupational Safety and Health Management System	PT PPI telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT PPI has implemented an Occupational Safety and Health Management System	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	9 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2026 June 9, 2023 until June 9, 2026
SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen Mutu - Persyaratan SNI ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirements	PT PPI telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi kriteria sistem manajemen mutu berstandar internasional PT PPI has implemented a quality management system that meets the criteria for an international standard quality management system	Sucofindo International Certification Services	10 Januari 2023 s.d. 9 Januari 2026 January 10, 2023 until January 9, 2026

KILAS PERISTIWA 2024

2024 KEY EVENTS



8 Januari 2024 | January 8, 2024

Pembukaan Gerai Covare Cafe Milik PPI oleh Wakil Menteri BUMN | Opening of PPI's Covare Cafe Outlet by Deputy Minister of SOEs

PPI resmikan pembukaan gerai Covare Cafe di Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono No. 12, Jakarta Timur. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama ID Food, didampingi oleh Direktur Utama PPI. | PPI officially opened the Covare Cafe outlet at Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono No. 12, East Jakarta. The inauguration was marked by a ribbon-cutting ceremony carried out directly by the Deputy Minister of SOEs, Kartika Wirjoatmodjo, and the President Director of ID Food, accompanied by the President Director of PPI.



16 Januari 2024 | January 16, 2024

PPI Raih Reward sebagai Distributor Prioritas Terbaik 1 & Mitra Integrator Terbaik | PPI Won Awards as Best Priority Distributor 1 & Best Integrator Partner

PPI raih reward sebagai Distributor Prioritas Terbaik 1 Wilayah NTB atas kinerja distribusi pupuk dan Mitra Integrator Terbaik atas kinerja di Program Agrosolution melalui gelaran *Assignment & Rewarding Retail Management Pupuk Kaltim 2024*, di Surabaya. | PPI won the Best Priority Distributor 1 award in the NTB Region for its fertilizer distribution performance and the Best Integrator Partner for its performance in the Agrosolution Program through the *Assignment & Rewarding Retail Management Pupuk Kaltim 2024* event in Surabaya.



26 Januari 2024 | January 26, 2024

PPI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Tantrade disaksikan oleh Presiden Republik Persatuan Tanzania | PPI signed a Memorandum of Understanding with Tantrade, witnessed by the President of the United Republic of Tanzania

PPI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Tanzania Trade Development Authority (Tantrade) sebagai langkah awal mengoptimalkan peluang bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, dalam kegiatan Tanzania – Indonesia Investment and Business Forum di Jakarta. | PPI signed a memorandum of understanding with the Tanzania Trade Development Authority (Tantrade) as an initial step to optimize mutually beneficial business opportunities for both parties, and was directly witnessed by the President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, at the Tanzania – Indonesia Investment and Business Forum in Jakarta.



28 Maret 2024 | March 28, 2024

PPI Laksanakan Penyaluran Perdana Bantuan Pangan Stunting Tahap 1 Tahun 2024 di Sumatera Utara | PPI conducted the Initial Distribution of Stunting Food Assistance Phase 1 in 2024 in North Sumatra

PPI melaksanakan Program Penyaluran Bantuan Pangan Stunting Tahap I Tahun 2024 Badan Pangan Nasional bersama PT Pos Indonesia (Persero) di Provinsi Sumatera Utara, berupa 1 kg ayam karkas dan 10 butir telur ayam. Lokasi penyaluran perdana berada di Rumah Dinas Regional PT Pos Cabang Medan, Provinsi Sumatera Utara. | PPI conducted the 2024 Stunting Food Assistance Distribution Program, Phase I of the National Food Agency with PT Pos Indonesia (Persero) in North Sumatra Province, in the form of 1 kg of chicken carcass and 10 chicken eggs. The initial distribution location was at the PT Pos Regional Official Residence, Medan Branch, North Sumatra Province.



10 Juni 2024 | June 10, 2024

Perkuat Ekosistem Ekspor, PPI Tandatangani MoU Kemitraan TJSL Bersama LPEI | Strengthening Export Ecosystem, PPI Signed MoU on TJSL Partnership with LPEI

PPI melakukan *kick off* kerja sama bisnis dengan menandatangani Nota Kesepahaman Penguatan Ekosistem Ekspor melalui Program TJSL PPI dengan LPEI (Eximbank Indonesia) sebagai upaya dalam memperkuat ekosistem ekspor dengan menggandeng UMKM melalui pemberian pelatihan dan pendampingan ekspor. | PPI kicked off the business cooperation by signing a Memorandum of Understanding on Strengthening the Export Ecosystem through the PPI TJSL Program with LPEI (Eximbank Indonesia) as part of its effort to strengthen the export ecosystem by collaborating with MSMEs through export training and assistance.



10 Juni 2024 | June 10, 2024

Tingkatkan Portofolio Bisnis, PPI Lakukan Go Live Kerja Sama Kedistributoran dengan PT Daesang Agung Indonesia | Enhancing Business Portfolio, PPI Conducted a Go Live Distributor Cooperation with PT Daesang Agung Indonesia

PPI melaksanakan Go Live Kerja Sama Kedistributoran PT PPI dengan PT Daesang Agung Indonesia untuk berbagai produk bumbu instan dan bahan makanan milik PT Daesang Agung Indonesia. Penyerahan simbolis produk diwakili oleh Direktur Operasi PT PPI, Noverita Anggraeny dan Regional Manager Area Jakarta Banten PT Daesang Agung Indonesia, Indra Sitorus. | PPI conducted a Go Live Distributor Cooperation between PT PPI and PT Daesang Agung Indonesia for various instant seasoning products and food ingredients of PT Daesang Agung Indonesia. The symbolic handover of the products was represented by the Director of Operations of PT PPI, Noverita Anggraeny, and the Regional Manager of the Jakarta Banten Area of PT Daesang Agung Indonesia, Indra Sitorus.



24 Juni 2024 | June 24, 2024

PPI Jalin Kerja Sama Ekspor dengan Dua Perusahaan India | PPI Established Export Cooperation with Two Indian Companies

PPI melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama dagang untuk komoditi getah damar dengan Raaj Handicraft dan rencana kerja sama dagang untuk komoditi rempah dengan Barath International yang merupakan perusahaan asal India. Penandatanganan nota kesepahaman bertujuan sebagai langkah awal rencana kerja sama ekspor untuk komoditas getah damar dan rempah-rempah. | PPI signed a memorandum of understanding on a trade cooperation plan for dammar gum commodities with Raaj Handicraft and a trade cooperation plan for spice commodities with Barath International, a company from India. The signing of the memorandum of understanding aims to be the initial step in the export cooperation plan for dammar gum and spice commodities.



24 Juni 2024 | June 24, 2024

PPI Terima Kunjungan Duta Besar Pakistan di Graha PPI | PPI Received Visit from Pakistani Ambassador at Graha PPI

PPI menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, H.E Ameer Khurram Rathore dan Minister Trade & Investment Pakistan, Muhammad Naseem Rashed di Graha PPI, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan potensi kerja sama antara kedua belah pihak. | PPI received a visit from the Ambassador of Pakistan to Indonesia, H.E Ameer Khurram Rathore and the Minister of Trade & Investment of Pakistan, Muhammad Naseem Rashed at Graha PPI, Jakarta. This visit aims to establish good relationship and potential cooperation between the two parties.



26 Juni 2024 | June 26, 2024

PPI Cabang Manado Terima Penghargaan Distributor Terbaik Tahun 2024 se-Provinsi Sulawesi Utara dari PT Pupuk Indonesia | PPI Manado Branch Received the 2024 Best Distributor Award for North Sulawesi Province from PT Pupuk Indonesia

PPI Cabang Manado menerima penghargaan distributor terbaik tahun 2024 untuk produk pupuk subsidi dan kios binaan terbaik se-Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kios Fani melalui acara PI Menyapa dengan tajuk Percepatan Penyaluran Pupuk di Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Indonesia di Manado. | PPI Manado Branch received the 2024 best distributor award for subsidized fertilizer products and the best fostered kiosk in North Sulawesi Province, namely Kios Fani, through the PI Menyapa event entitled Acceleration of Fertilizer Distribution in North Sulawesi, held by PT Pupuk Indonesia in Manado.



17 Juli 2024 | July 17, 2024

Dorong Potensi Komoditas Ekspor Hasil Hutan, PPI Lepas Ekspor Perdana Getah Damar ke India | Encouraged the Potential of Forest Product Export Commodities, PPI Waived its First Export of Dammar Gum to India

PPI melepas ekspor perdana komoditas getah damar jenis mata kucing grade ABX asal Lampung sebanyak 30 MT di Tangerang. Estimasi keberangkatan ekspor getah damar tersebut akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju India. | PPI waived the first export of ABX grade cat's eye dammar gum commodity from Lampung, which amounted to 30 MT in Tangerang. The estimated departure of the dammar gum export will be from Tanjung Priok Port to India.



18 Agustus 2024 | August 18, 2024

PPI Lakukan Penandatanganan Kerja Sama dengan PT Luxchem Indonesia | PPI Signed a Cooperation Agreement with PT Luxchem Indonesia

PPI melakukan penandatanganan kerja sama jual beli untuk komoditas bahan kimia dengan PT Luxchem Indonesia. Penandatanganan diwakili oleh Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI, Edhy Rizwan dan Direktur Utama PT Luxchem Indonesia, Joseph Tjendra. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar untuk komoditas bahan kimia melalui sinergi kerja sama yang baik. | PPI signed a sales and purchase agreement with PT Luxchem Indonesia for chemical commodities. The signing was represented by the Commercial and Development Director of PT PPI, Edhy Rizwan, and the President Director of PT Luxchem Indonesia, Joseph Tjendra. This cooperation aims to meet chemical commodity needs and market demand through good cooperation synergy.



6 September 2024 | September 6, 2024

Direktur Operasi PPI Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan Penanganan Stunting 2024 di Jawa Tengah | PPI's Director of Operations Reviewed Food Assistance in Central Java

Dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting, Direktur Operasi PPI, Noverita Anggraeny meninjau penyaluran bantuan pangan penanganan stunting 2024 di wilayah Jawa Tengah dalam agenda monitoring evaluasi (Monev) bersama Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, Jajaran Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Kantor Kelurahan Wonodri, Kota Semarang dan Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang. | To assist in succeeding the government's program to reduce the prevalence of stunting, the PPI's Director of Operations, Noverita Anggraeny, reviewed the distribution of food assistance for handling stunting in 2024 in the Central Java region in the monitoring and evaluation (Monev) agenda with the Director of Distribution and Food Reserves of the National Food Agency, Rachmi Widiriani, the ranks of the Indonesian Ombudsman and the Indonesian Ministry of Law and Human Rights at the Wonodri District Office, Semarang, and the Genuk District Office, Semarang.



11 September 2024 | September 11, 2024

PPI Salurkan Bantuan Pangan Penanganan Stunting 2024 di Sumatera Utara | PPI Distributed Food Assistance for Stunting Handling in 2024 in North Sumatra

PPI bersama PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting berupa satu paket pangan berisi 1 (satu) ekor ayam karkas dan 10 (sepuluh) butir telur ayam kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 33 Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara. | PPI with PT Pos Indonesia distributed food assistance for stunting handling in the form of one food package containing 1 (one) chicken carcass and 10 (ten) chicken eggs to Families at Risk of Stunting (KRS) in 33 Regencies/Cities in North Sumatra.



4 Oktober 2024 | October 4, 2024

PPI Ekspor 26 Ton Kopi dari Malang ke Mesir | PPI Exported 26 Tons of Coffee from Malang to Egypt

PPI kembali melakukan ekspor kopi green bean jenis robusta yang berasal dari Malang sebanyak 26 ton menuju Mesir. Ekspor ini bertujuan untuk memperkuat pasar kopi serta hubungan dagang antar Indonesia dan Mesir melalui produk kopi unggulan Indonesia. Selain itu, ekspor ini juga menjadi komitmen PT PPI dalam memberdayakan petani kopi lokal untuk menembus pasar global. | PPI has re-exported 26 tons of robusta green bean coffee from Malang to Egypt. This export aims to strengthen the coffee market and trade relations between Indonesia and Egypt through Indonesia's superior coffee products. In addition, this export also represents a commitment of PT PPI to empower local coffee farmers to penetrate the global market.



10 Oktober 2024 | October 10, 2024

PPI Tandatangani MoU dengan Perusahaan India dan Lol dengan Perusahaan Filipina | PPI Signed MoU with Indian Company and Lol with Philippine Company

Dalam rangka mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke pasar global melalui gelaran Trade Expo Indonesia 2024 yang digagas oleh Kementerian Perdagangan RI, PPI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Al Ruby Import & Export yang merupakan perusahaan importir rempah-rempah di India. | To promote Indonesian export products to the global market through the 2024 Trade Expo Indonesia, initiated by the Indonesian Ministry of Trade, PPI signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Al Ruby Import & Export, a spice importing company in India.



11 Oktober 2024 | October 11, 2024

PPI Tandatangani MoU dengan Haggag Import Company dalam 39th Trade Export Indonesia 2024 | PPI Signed MoU with Haggag Import Company in 39th Trade Export Indonesia 2024

PPI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Haggag Import Company pada gelaran 39th Trade Expo Indonesia. Penandatanganan ini diwakili oleh Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI, Edhy Rizwan dan Mohamed Sayed Hassan Haggag. | PPI signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Haggag Import Company at the 39th Trade Expo Indonesia. The signing was represented by the PT PPI's Director of Commercial and Development, Edhy Rizwan and Mohamed Sayed Hassan Haggag.



21 Oktober 2024 | October 21, 2024

Dubes RI untuk Mesir Kunjungi Kantor PT PPI, Dorong Peningkatan Nilai Ekspor Produk Indonesia ke Pasar Mesir | Indonesian Ambassador to Egypt Visited PT PPI Office, Encouraged Increase in Export Value of Indonesian Products to Egyptian Market

Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf mengunjungi kantor PPI. Dalam lawatannya Lutfi Rauf berpesan agar PPI dapat mendukung peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Mesir melalui kolaborasi multi pihak dan lintas negara. | The Ambassador of the Republic of Indonesia to Egypt, Lutfi Rauf, visited the PPI office. During his visit, Lutfi Rauf advised PPI to support the increase in the Indonesian export value to Egypt through multi-party and cross-country collaboration.



5 Desember 2024 | December 5, 2024

PPI Ekspor 79,2 Ton Kopi Lampung ke Mesir | PPI Exported 79.2 Tons of Lampung Coffee to Egypt

PPI kembali melakukan ekspor kopi green bean jenis robusta dari Lampung dengan tujuan Mesir sebanyak 79,2 ton dalam rangka meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri. Ekspor ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebanyak 39,6 ton kopi diberangkatkan menuju Mesir pada akhir November dan selanjutnya sebanyak 39,6 ton kopi diberangkatkan pada awal Desember. | PPI has executed the export of 79.2 tons of Lampung Robusta green bean coffee to Egypt to enhance foreign trade performance. This export was conducted in two phases, with the initial consignment of 39.6 tons dispatched to Egypt in late November, followed by the subsequent shipment of 39.6 tons in early December.



10 Desember 2024 | December 10, 2024

PPI Kelola Barang Bekas Milik PT Kereta Commuter Indonesia melalui Layanan Waste Integrated Solution (WIS) | PPI Managed Used Goods of PT Kereta Commuter Indonesia through Waste Integrated Solution (WIS) Service

PPI menjalin kerja sama dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam pengelolaan barang bekas melalui layanan Waste Integrated Solution. Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola barang bekas milik PT KCI secara berkeberlanjutan. | PPI has collaborated with PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) in managing used goods through Waste Integrated Solution service. This activity aims to manage the goods used by PT KCI in an efficient and sustainable manner.



02

Laporan Manajemen

Management Report



LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

“

Selama tahun 2024, perhatian Dewan Komisaris terfokus pada berbagai isu utama yang memengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan, seperti ketatnya persaingan industri, pelaksanaan penugasan strategis dari Pemegang Saham, serta efektivitas penerapan manajemen risiko.

Throughout 2024, the Board of Commissioners focused entirely on various key issues affecting the Company's business continuity, including intense industrial competition, the implementation of strategic assignments from Shareholders, and the effectiveness of risk management implementation.

”

Gigih Guntoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, ijinkan kami mengawali laporan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan bimbingan-Nya, sehingga kita semua dapat menutup tahun 2024 dengan baik. Selaku Dewan Komisaris, kami memandang penting kesempatan ini sebagai wujud akuntabilitas kami dalam menegakkan standar tertinggi penerapan tata kelola perusahaan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Lebih dari sekadar pengawasan, Dewan Komisaris berperan sebagai mitra strategis Direksi, memberikan masukan kebijakan, serta pandangan jangka panjang untuk memastikan Perusahaan tidak hanya mencapai target saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Dewan Komisaris bangga atas pencapaian yang telah diraih, namun kami juga menegaskan kembali komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi yang lebih besar lagi di masa mendatang.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With sincere gratitude and respect, allow us to begin this report by offering praise and gratitude to Almighty God for His blessings and guidance that enabled us to close the year 2024 properly. As the Board of Commissioners, we consider this opportunity as a form of our accountability in upholding the highest standards of corporate governance implementation to shareholders and stakeholders. Apart from supervision, the Board of Commissioners serves as a strategic partner to the Board of Directors, providing policy input and a long-term perspective to ensure that the Company not only achieves current targets but also builds a solid foundation for sustainable growth in the future.

The Board of Commissioners is pleased with its achievements. However, we also reaffirm our commitment to continuously making improvements and maximizing our efforts to achieve greater achievements in the future.



Sekilas tentang kondisi perekonomian dunia dan Indonesia

Perekonomian dunia di tahun 2024 masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks di tengah upaya pemulihan pascapandemi dan ketidakpastian global. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada 22 Oktober 2024, mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 di angka 3,2 persen, sama dengan angka pertumbuhan pada tahun 2023. Proyeksi yang cenderung stagnan tersebut dilandasi tingkat ketidakpastian terhadap prospek ekonomi global yang dinilai masih tinggi.

Ketegangan geopolitik dinilai berisiko menghambat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan jangka panjang. IMF memperkirakan dampaknya bisa menurunkan output global sekitar 0,5 persen pada 2026. Di sisi lain, negara-negara *emerging market* terutama di Asia tetap menunjukkan pertumbuhan stabil di kisaran 4,2 persen pada tahun 2024 dan 2025, terutama didorong oleh kinerja kuat dari negara-negara berkembang di kawasan Asia.

A glance at the world and the Indonesian economic landscape

The global economy in 2024 remained a complex challenge amidst post-pandemic recovery and global uncertainty. The International Monetary Fund (IMF) in its *World Economic Outlook* (WEO) report released on October 22, 2024, maintained its projection for global economic growth for 2024 at 3.2 percent, similar to the growth rate in 2023. The projections tend to stagnate due to the level of uncertainty regarding the global economic outlook, which remained high.

Geopolitical tensions were observed as a risk to hamper trade, investment, and long-term growth. The IMF estimates the impact could reduce global output by approximately 0.5 percent in 2026. On the other hand, emerging market countries, mainly in Asia, continue to demonstrate steady growth in the range of 4.2 percent in 2024 and 2025, primarily driven by strong performance from developing countries in the Asian region.

Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia tetap mampu mempertahankan ketahanan ekonominya. Berbagai langkah reformasi struktural, kesinambungan fiskal, serta kebijakan stabilisasi yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 mencapai 5,03%. Meskipun sedikit melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun 2023 yakni 5,05%, hal ini menunjukkan resiliensi di tengah tekanan eksternal.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas Kebijakan Strategis yang Dijalankan Direksi

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara intensif dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan oleh Direksi. Tugas ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dengan fokus pada kepatuhan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta pencapaian kinerja yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan industri yang dinamis.

Dalam struktur tata kelola Perseroan, Dewan Komisaris berperan sebagai organ pengawas sekaligus pemberi nasihat kepada Direksi. Fungsi ini dijalankan melalui penelaahan dan pemberian persetujuan atas rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta penyampaian laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dilakukan secara proporsional berdasarkan pedoman kerja internal yang berlaku.

Dewan Komisaris juga memastikan bahwa proses pengawasan berlangsung efektif melalui berbagai forum formal dan komunikasi informal bersama Direksi, serta didukung oleh organ pendukung seperti Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu sarana penting dalam menyampaikan masukan, merumuskan kebijakan, dan mengawal pelaksanaan keputusan strategis sesuai mandat Pemegang Saham dan keputusan RUPS.

Selama tahun 2024, perhatian Dewan Komisaris terfokus pada berbagai isu utama yang memengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan, seperti ketatnya persaingan industri, pelaksanaan penugasan strategis dari Pemegang Saham, serta efektivitas penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh langkah Perseroan harus melalui proses evaluasi risiko yang menyeluruh, terutama dalam pengelolaan portofolio investasi.

Despite these global dynamics, Indonesia managed to maintain its economic resilience. Numerous structural reform measures, fiscal sustainability, and a stabilization policy that consistently supports national economic growth. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy in 2024 grew by 5.03%. Although it was slightly slower compared to the 2023 growth of 5.05%, this indicates resilience amidst external pressures.

Implementation of Supervisory Function by the Board of Commissioners on Strategic Policies Executed by the Board of Directors

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out intensive and continuous supervision of the implementation of the Company's strategies and policies by the Board of Directors. This duty was carried out in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable regulations, focusing on compliance, implementation of good corporate governance principles, and achievement of sustainable performance despite dynamic economic and industrial challenges.

In the Company's governance structure, the Board of Commissioners serves as a supervisory body and advisor to the Board of Directors. This function is carried out by reviewing and approving long-term plans, annual work plans and budgets, and submitting reports to the General Meeting of Shareholders (GMS). The division of duties between members of the Board of Commissioners is carried out proportionally pursuant to the applicable internal work guidelines.

The Board of Commissioners also ensures that the supervision process is effective through various formal forums and informal communication with the Board of Directors, and is supported by supporting organs such as the Board of Commissioners Secretary, Audit Committee, and Risk Oversight Committee. Joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors serve as a critical means of delivering input, formulating policies, and overseeing the implementation of strategic decisions in accordance with the mandate of Shareholders and GMS resolutions.

Throughout 2024, the Board of Commissioners' concern was focused on various key issues affecting the Company's business continuity, such as tight industry competition, implementation of strategic assignments from Shareholders, and the effectiveness of risk management implementation. The Board of Commissioners considers that the Company's steps must go through a comprehensive risk evaluation process, specifically in investment portfolio management.

Selain itu, program digitalisasi dan penguatan keamanan teknologi informasi juga menjadi prioritas pengawasan, mengingat pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan prinsip tata kelola yang baik tetap menjadi fondasi utama yang dikawal oleh Dewan Komisaris guna memastikan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan tetap terjaga.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 15 (lima belas) kali rapat internal serta 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Melalui rapat-rapat ini, Dewan Komisaris membahas berbagai hal yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk laporan kinerja rutin bulanan, perkembangan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya dalam aspek manajemen risiko dan pengendalian internal, serta isu-isu strategis lainnya, baik dari sisi operasional maupun pelaporan keuangan.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Perseroan

Dewan Komisaris menilai bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan, Direksi berhasil menavigasikan perusahaan untuk mencapai target-target strategis yang telah dicanangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024.

Kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi Perseroan pada tahun 2024 antara lain:

Pada tahun 2024, strategi Perseroan difokuskan pada enam pilar utama yang saling terintegrasi. Perseroan melakukan penguatan model bisnis dan operasional yang disesuaikan dengan target pasar masing-masing komoditas di tiap wilayah. Sejalan dengan itu, dilakukan penajaman fokus portofolio dan penetapan prioritas pengembangan, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan secara optimal. Perseroan juga membentuk ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan efisien melalui penguatan infrastruktur serta peningkatan efektivitas cabang melalui penataan tata kelola. Di sisi keuangan, langkah restrukturisasi dilakukan guna memastikan ketahanan likuiditas dan struktur permodalan yang sehat. Untuk mendukung kinerja anak perusahaan, Perseroan menerapkan tata kelola hubungan induk dan anak usaha yang lebih solid. Di bidang sumber daya manusia, dilakukan penguatan organisasi dan pengembangan talenta secara berkelanjutan. Seluruh inisiatif ini ditopang oleh digitalisasi proses bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan efisiensi operasional.

In addition, digitalization programs and strengthening information technology security are also a priority for supervision, considering the importance of digital transformation in increasing transparency and operational efficiency. On the other hand, human resource development and strengthening the principles of good governance remain the main basis overseen by the Board of Commissioners to maintain the Company's competitiveness and long-term growth.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. Through these meetings, the Board of Commissioners discussed various matters that require particular concern, including monthly routine performance reports, developments in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), particularly in terms of risk management and internal control, and other strategic issues, both in terms of operations and financial reporting.

The Board of Commissioners' Opinion on the Company's Business Strategy and Performance

The Board of Commissioners considers that despite various challenges faced by the Company, the Board of Directors managed to guide the Company to achieve the strategic targets set out in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP).

Strategic policies adopted by the Board of Directors in 2024 include:

In 2024, the Company's strategy focused on mutually integrated six main pillars. The Company strengthened the business and operational models, adjusted to each commodity's target market in each region. In line with this effort, the portfolio focus was sharpened, and development priorities were determined, allowing resource allocation to be directed to drive optimal revenue growth. The Company also formed a sustainable and efficient trading ecosystem by strengthening infrastructure and increasing branch effectiveness through governance arrangements. On the financial side, restructuring measures were taken to ensure liquidity resilience and a healthy capital structure. The Company implemented a more solid governance of parent and subsidiary relationships to support the performance of subsidiaries. In human capital, organizational strengthening and talent development were carried out on an ongoing basis. These initiatives were supported by the digitalization of business processes oriented towards market demands and operational efficiency.

Keseluruhan strategi ini membuahkan pencapaian antara lain peningkatan pendapatan sebesar 35,39% dari Rp2,29 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp3,10 triliun pada tahun 2024. Perseroan juga berhasil mencatatkan laba sebesar Rp20,43 miliar. Hal ini menurun apabila dibandingkan dengan perolehan laba pada tahun 2023 yakni sebesar Rp51,38 miliar.

Apabila dibandingkan dengan RKAP, pendapatan Perseroan tersebut tercapai sekitar 84% dari target RKAP Annual tahun 2024. Sementara itu dari sisi pencapaian laba, Perseroan mencapai 49% dari target RKAP Annual tahun 2024.

Anggaran Investasi Rutin terserap senilai Rp11,09 miliar atau 6% dari target RKAP Annual tahun 2024, dan menurun sebesar 23% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023.

Total aset per 31 Desember tahun 2024 mencapai Rp4,98 triliun atau sekitar 97% dari asumsi RKAP tahun 2024. Posisi ini mengalami kenaikan sebesar 12,05% bila dibandingkan dengan posisi total aset tahun 2023.

Total kewajiban per 31 Desember tahun 2024 mencapai Rp1,38 triliun atau 108% dari asumsi RKAP tahun 2024. Posisi ini mengalami penurunan 20,28% bila dibandingkan dengan posisi total kewajiban tahun 2023.

Total ekuitas per 31 Desember tahun 2024 mencapai Rp3,60 triliun atau sekitar 93% dari asumsi RKAP tahun 2024. Posisi ini mengalami peningkatan 32,76% bila dibandingkan dengan posisi total ekuitas tahun 2023.

Posisi kas pada per 31 Desember tahun 2024 mencapai Rp146,2 Miliar atau 62% dari target RKAP tahun 2024. Posisi ini mengalami peningkatan sebesar 133% bila dibandingkan dengan posisi kas tahun 2023.

Pandangan atas Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan pertumbuhan jangka panjang PT PPI. Dewan Komisaris meyakini bahwa praktik GCG yang konsisten dan menyeluruh akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi GCG agar selaras dengan standar yang ditetapkan oleh regulator, pemegang saham, dan *best practice* yang berlaku.

This overall strategy has yielded achievements, including an increase in revenue of 35.39% from Rp2.29 trillion in 2023 to Rp3.10 trillion in 2024. The Company also managed to record a profit of Rp20.43 billion. This was a decrease compared to the profit in 2023 of Rp51.38 billion.

Compared to the RKAP, the Company's revenue reached approximately 84% of the 2024 Annual RKAP target. Meanwhile, on the profit achievement, the Company reached 49% of the 2024 Annual RKAP target.

The Routine Investment Budget absorbed was Rp11.9 billion or 6% of the 2024 Annual RKAP target, and decreased by 23% compared to the realization in the same period in 2023.

As of December 31, 2024, total assets reached Rp4.98 trillion or approximately 97% of the 2024 RKAP assumption. This position increased by 12.05% compared to the total assets in 2023.

As of December 31, 2024, total liabilities reached Rp1.38 trillion or 108% of the 2024 RKAP assumption. This position decreased by 20.28% compared to the total liabilities in 2023.

As of December 31, 2024, total equity reached Rp3.60 trillion or approximately 93% of the 2024 RKAP assumption. This position increased by 32.76% compared to the total equity in 2023.

As of December 31, 2024, the cash position reached Rp146.2 billion or 62% of the 2024 RKAP target. This position increased by 133% compared to the cash in 2023.

Opinion on the Development of Good Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as the main basis for PT PPI's sustainability and long-term growth. The Board of Commissioners believes that consistent and comprehensive GCG practices will strengthen accountability and transparency, and increase the trust of shareholders and stakeholders. As a result, throughout 2024, the Board of Commissioners actively strengthened the supervisory function of GCG implementation to align with the standards set by regulators, shareholders, and applicable best practices.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola, Dewan Komisaris bersama Direksi turut mendorong berbagai inisiatif GCG seperti sosialisasi struktur lunak GCG, tindak lanjut hasil *assessment* GCG tahun sebelumnya, serta program induksi bagi anggota Komisaris baru.

Pada tahun 2024, PT PPI melakukan pengukuran penerapan GCG dengan *self assessment* dengan menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asesmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023. Berdasarkan *Self Assessment* tersebut, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

Dewan Komisaris secara aktif meninjau kesesuaian operasional Perseroan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip GCG. Infrastruktur dan mekanisme GCG di lingkungan Perseroan terus disempurnakan untuk menjamin akuntabilitas proses bisnis. Ke depan, Dewan Komisaris berharap seluruh upaya penguatan GCG dapat menjadi landasan kuat bagi Perseroan dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pandangan Dewan Komisaris tentang Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko di PT PPI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Dalam pelaksanaannya, efektivitas pengelolaan profil risiko utama terus ditingkatkan seiring dengan penguatan tata kelola organisasi yang lebih terstruktur dan responsif.

Fungsi pengelolaan risiko korporat diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih proaktif, khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran bisnis Perseroan. Kualitas penerapan analisis akar masalah (*root cause analysis*) atas berbagai eksposur risiko

As a form of its commitment to improving the quality of governance, the Board of Commissioners collaborates with the Board of Directors, also encourages various GCG initiatives such as the dissemination of the GCG soft structure, follow-up of the results of the previous year's GCG assessment, and induction programs for the new Board of Commissioners' members.

In 2024, PT PPI measured the implementation of GCG through self-assessment by adopting the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter from the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, on the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and Letter from the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024, on Notification of the Self-Assessment Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2023. According to the Self-Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

The Board of Commissioners actively reviews the Company's operational compliance with laws and regulations and GCG principles. The Company's GCG infrastructure and mechanisms continue to be improved to ensure accountability of business processes. In the future, the Board of Commissioners expects that all efforts to strengthen GCG will serve as a strong basis for the Company to face challenges and achieve sustainable growth.

Board of Commissioners' Opinion on Risk Mitigation

PT PPI's risk management adheres to the provisions determined by the Ministry of SOEs through the Ministry of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Guideline on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In its practice, the effectiveness of the main risk profile management continues to be enhanced in line with strengthening more structured and responsive organizational governance.

The corporate risk management function is expected to play a more proactive role, particularly in identifying, measuring, monitoring, and mitigating risks that can hinder the achievement of the Company's business targets. The quality of the application of root cause analysis on various main risk exposures is also continuously improved, making

utama juga terus ditingkatkan agar tindakan perbaikan (*corrective action*) yang diambil benar-benar efektif dalam meredam potensi risiko tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, manajemen senantiasa mendorong peningkatan kematangan pengelolaan risiko (*risk management maturity*) di seluruh jenjang organisasi. Upaya ini juga dibarengi dengan penumbuhan budaya sadar risiko (*risk culture*) yang kuat dan menyeluruh di kalangan karyawan, yang selaras dengan penerapan nilai-nilai budaya AKHLAK sebagai landasan perilaku kerja di lingkungan PT PPI.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris terus menjalankan perannya dalam memantau efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di lingkungan PT PPI. Sistem ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga etika, integritas, dan kepatuhan, dengan memberikan ruang bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam aktivitas operasional Perusahaan.

Sistem pelaporan pelanggaran yang berjalan dengan baik mencerminkan pendekatan preventif Perseroan dalam tata kelola dan pengelolaan risiko. Jalur pelaporan yang bersifat rahasia memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan serta penyelesaian masalah secara tepat, sehingga membantu meminimalkan dampak terhadap reputasi dan keuangan Perseroan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris memastikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran dikelola secara profesional dan ditindaklanjuti dengan mekanisme investigasi yang memadai serta langkah perbaikan yang sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan komitmen terhadap budaya transparansi, Perseroan berharap dapat terus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga reputasi sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ke depan, Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk memperkuat sistem ini, termasuk melakukan evaluasi berkala guna mengidentifikasi ruang perbaikan dan memperkuat budaya kepatuhan dan etika di seluruh organisasi.

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk melalui sistem ini. Perseroan tetap berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap insan Perseroan merasa aman dan diberdayakan untuk menyuarakan kekhawatiran tanpa rasa takut akan adanya pembalasan.

the corrective actions taken genuinely effective in reducing the potential risks.

To support this action, management continues to encourage increased risk management maturity at all levels of the organization. This effort is also supported by fostering a strong and comprehensive risk culture among employees, which aligns with the implementation of AKHLAK cultural values as the basis for work ethic within PT PPI.

Board of Commissioners' Opinion on the Whistleblowing System

Throughout 2024, the Board of Commissioners continued to perform its role in observing the effectiveness of the implementation of the whistleblowing system within PT PPI. This system is one of the main instruments in maintaining ethics, integrity, and compliance by allowing employees and other stakeholders to submit reports of alleged violations or criminal acts in the Company's operational activities.

A well-functioning whistleblowing system reflects the Company's preventive approach to governance and risk management. Confidential reporting channels enable early detection of potential deviations and appropriate problem solving, thereby assisting in minimizing the impact on the Company's reputation and financial condition.

As part of its supervision responsibilities, the Board of Commissioners ensures that the whistleblowing system is managed in a professional manner and followed up with adequate investigation mechanisms and corrective measures in accordance with applicable regulations and ethical standards. With ongoing supervision and a commitment to a culture of transparency, the Company expects to continue strengthening stakeholder trust and maintaining its reputation as a responsible and highly integrated business entity. In the future, the Board of Commissioners remains committed to strengthening this system, including conducting periodic evaluations to identify areas for improvement and reinforcing a culture of compliance and ethics throughout the organization.

Throughout 2024, there were no reports of violations received through this system. The Company remains committed to creating a work environment that upholds transparency and accountability, in which all employees feel safe and empowered to express concerns without fear of retaliation.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh dua organ pendukung, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan, kepatuhan, efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi audit internal, serta evaluasi atas auditor eksternal. Sementara Komite Pemantau Risiko berperan memastikan bahwa prinsip manajemen risiko diterapkan secara memadai, termasuk dalam proses pengelolaan investasi dan aset Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai bahwa kedua komite telah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya pada tahun 2024. Komite Audit menunjukkan kinerja yang baik dalam menelaah dan mengevaluasi laporan keuangan Perseroan, termasuk menilai kecukupan informasi yang disajikan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Komite ini juga memberikan perhatian terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal, serta berperan aktif dalam proses pemilihan dan pengawasan auditor eksternal. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan Komite Audit dinilai konstruktif dan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan dan pengendalian risiko operasional Perseroan.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko dinilai telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Komite ini aktif dalam mengkaji profil risiko utama Perseroan, melakukan pemantauan terhadap proses mitigasi risiko, serta menilai kesesuaian pengelolaan investasi dan aset dengan prinsip kehati-hatian. Komite juga memberikan masukan strategis untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh lapisan organisasi.

Pandangan atas Proyeksi Tahun 2025

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih menghadapi tekanan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,3%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2024 yang sebesar 3,2%, namun tetap mencerminkan laju pertumbuhan yang melandai. Kondisi ini sebagian besar dipengaruhi oleh dinamika di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang diperkirakan akan menerapkan kebijakan proteksionisme di bawah pemerintahan baru guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya domestik. Namun demikian, kebijakan proteksionisme ini berpotensi

Performance Appraisal of the Board of Commissioners' Supporting Organs

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is supported by two supporting organs, namely the Audit Committee and the Risk Oversight Committee. The Audit Committee monitors financial reports, compliance, effectiveness of internal control and implementation of internal audit functions, and evaluation of external auditors. Meanwhile, the Risk Oversight Committee is assigned to ensure that risk management principles are implemented adequately, including in the Company's investment and asset management process.

The Board of Commissioners considered that both committees had performed their functions optimally in 2024. The Audit Committee demonstrated good performance in reviewing and evaluating the Company's financial statements, including assessing the adequacy of the information presented and compliance with applicable accounting standards and regulations. This committee also observed the effectiveness of internal control and the implementation of internal audits, and played an active role in the selection and supervision process of external auditors. The findings and recommendations submitted by the Audit Committee were considered constructive and positively contributed to improving the Company's financial governance and operational risk control.

Meanwhile, the Risk Monitoring Committee is considered to have optimally performed its role in supporting the Board of Commissioners to ensure that the implementation of risk management is carried out comprehensively and systematically. This committee actively reviews the Company's main risk profile, monitors the risk mitigation process, and assesses the suitability of investment and asset management with the prudence principle. The committee also provides strategic input to strengthen the risk management system and foster a risk culture across all levels of the organization.

Opinion on 2025 Projections

The global economy in 2025 is expected to continue facing pressure. The International Monetary Fund (IMF) projects that the global economy will grow by 3.3%, slightly higher than in 2024, at 3.2%. However, it remains at a declining growth rate. This condition is mainly affected by the dynamics in developed countries, specifically the United States, which is expected to adopt protectionist policies under the new government to maximize the use of domestic resources. However, this protectionist policy could potentially trigger

memicu perang tarif, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas neraca perdagangan global secara keseluruhan.

Indonesia diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan jangka pendek yang efektif untuk menciptakan mekanisme penahan (*absorber*) terhadap tantangan ekonomi di tahun 2025. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, yang akan didorong oleh sinergi bauran kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan sektor keuangan. Konsumsi domestik diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, seiring dengan upaya menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi kinerja Perseroan untuk tahun 2025 yang tertuang dalam RKAP. Target tersebut diharapkan mampu direalisasikan oleh Direksi beserta seluruh jajarannya, terutama dengan berbagai program strategis yang telah dicanangkan.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Pada tahun 2024 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yakni adanya penambahan satu orang Komisaris Independen.

a tariff war, which could comprehensively disrupt the global trade balance's stability.

Indonesia is expected to formulate various effective short-term policies to create an absorber mechanism against economic challenges in 2025. The government sets a target for economic growth of 5.2%, driven by a synergistic blend of fiscal and monetary policies, as well as strengthening the financial sector. Domestic consumption is expected to remain the primary driver of growth in line with efforts to maintain inflation stability and increase job creation.

The Board of Commissioners welcomes the Company's performance projection for 2025 as stated in the RKAP. The Board of Directors and all its levels are expected to reach the target, specifically with the various planned strategic programs.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2024, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, namely the addition of one Independent Commissioner.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2024

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners Throughout 2024

Periode 1 Januari s.d. 18 Oktober 2024 January 1 to October 18, 2024 Period	Periode 18 Oktober s.d. 31 Desember 2024 October 18 to December 31, 2024 Period	Keterangan Description
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	-
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	-
	Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 dan No. 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Appointed as Independent Commissioner pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 and No. 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 on the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Berikut adalah susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2024.

The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024.

Nama Name	Jabatan Position
Hamli	Komisaris Utama President Commissioner
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner
Gigih Guntoro	Komisaris Independen Independent Commissioner

Pada tanggal 2 April 2025 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama, bapak Hamli, dan belum ditetapkan pengganti beliau hingga diterbitkannya Laporan Tahunan ini. Sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Dewan Komisaris Perseroan menyepakati Bapak Gigih Guntoro sebagai Koordinator Komisaris sampai adanya penunjukan Komisaris Utama oleh Pemegang Saham PT PPI.

On April 2, 2025, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. This was due to the end of the term of office of the President Commissioner, Mr. Hamli. As of the publication of this Annual Report, his replacement had not been appointed. To follow up, the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia agreed to appoint Mr. Gigih Guntoro as Coordinating Commissioner. He will serve until the Shareholders of PT PPI appoint a new President Commissioner.

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atas kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2024. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pemegang saham, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan.

Closing

The Board of Commissioners extends its utmost appreciation to the Board of Directors and all PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's management and employees for their hard work, dedication, and collaboration throughout 2024. We also express our appreciation to the shareholders, business partners, and all stakeholders for their unwavering support and trust.

Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kapasitas organisasi, serta komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan integritas, PT PPI dapat terus memperkuat daya saing dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika tantangan global dan nasional.

The Board of Commissioners believes that strengthening corporate governance, increasing organizational capacity, and committing to the principles of prudence and integrity will enable PT PPI to continue strengthening its competitiveness and achieving sustainable growth amidst the dynamics of global and national challenges.

Jakarta, 12 September 2025
Jakarta, September 12, 2025

Atas nama Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
On behalf of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Gigih Guntoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

“

PT PPI berhasil membukukan pendapatan sampai dengan Desember tahun 2024 senilai Rp3,10 triliun. Capaian pendapatan ini meningkat sebesar 35,39% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 pada periode yang sama.

PT PPI managed to record Rp3.10 trillion in revenue as of December 2024, an increase of 35.39% compared to the number in the same period in 2023.

”

Soegeng Hernowo
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Mengawali laporan tahunan tahun 2024 ini, Direksi menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendampingi langkah Perseroan dalam melewati tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Di tengah kondisi eksternal yang masih belum sepenuhnya stabil, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berhasil menjaga kinerja operasional dan keuangannya secara solid.

Laporan ini tidak hanya memuat pencapaian strategis dan kinerja finansial Perseroan sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Di dalamnya tergambar sinergi dan kerja keras seluruh jajaran Direksi dan karyawan dalam menjaga kesinambungan bisnis serta menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Melalui laporan ini, Direksi juga ingin menunjukkan arah strategis dan langkah-langkah adaptif yang diambil untuk

Our Respected Shareholders and Stakeholders,

To begin this 2024 annual report, the Board of Directors would like to express gratitude to the Almighty God for His blessings that enabled the Company to navigate a year full of challenges and dynamics. Despite unstable external conditions, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia managed to maintain its solid operational and financial performance.

This report not only contains the Company's strategic achievements and financial performance throughout 2024, but also serves as a concrete manifestation of our commitment to upholding the principles of good corporate governance, transparency, and accountability. It depicts the synergy and hard work of all levels of the Board of Directors and employees in maintaining business continuity and creating added value for shareholders and stakeholders.

Through this report, the Board of Directors would also like to present the strategic direction and adaptive measures



memastikan PT PPI tetap tangguh, relevan, dan berdaya saing di tengah perubahan industri yang semakin cepat.

Kondisi Perekonomian Global dan Nasional pada tahun 2024

Indonesia berhasil melalui tahun 2024 dengan performa yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data World Bank menunjukkan pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah.

Secara global, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 tetap stabil namun masih di bawah ekspektasi. Data World Economic Outlook Update dari Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2% pada tahun 2024 dan 2025, nyaris tidak berubah dibandingkan proyeksi pada periode sebelumnya.

Proyeksi pertumbuhan untuk Amerika Serikat mengalami peningkatan, yang mengimbangi penurunan proyeksi untuk

taken to ensure that PT PPI remains resilient, relevant, and competitive amidst increasingly rapid industrial changes.

Global and National Economic Conditions in 2024

Indonesia managed to overcome 2024 with a robust performance. In 2024, Indonesia's economic growth was supported by the sustainability of structural reforms and financial sector stability. World Bank data reported that Indonesia's GDP growth reached 5.1%, indicating economic resilience exceeding middle-income countries' average.

On a global scale, global economic growth in 2024 remained stable despite falling below expectations. The World Economic Outlook Update data from the International Monetary Fund (IMF) projects economic growth of 3.2% in 2024 and 2025, a stagnant growth from the projection in the previous period.

Growth projections for the United States have increased, counterbalancing the declines in projections for several

sejumlah negara maju lainnya, khususnya negara-negara besar di kawasan Eropa. Di sisi lain, pada negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang, gangguan terhadap produksi dan distribusi komoditas, terutama minyak, konflik, kerusuhan sipil, dan bencana alam akibat cuaca ekstrem telah menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan untuk kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, serta Afrika Sub-Sahara.

Di tengah tekanan kondisi perekonomian global, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% (yoy), di atas rata-rata pertumbuhan global. Stabilitas sektor keuangan juga tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB.

Pada 17-18 Desember 2024 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate di level 6,00%, suku bunga Deposit *Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,75%. Keputusan ini sejalan dengan arah kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan

Secara garis besar, strategi Perseroan pada tahun 2024 terdiri dari:

1. **Penguatan Model Bisnis dan Operasional:** Penyusunan Model bisnis dan model operasional yang sesuai dengan *target market* per masing-masing komoditi di masing-masing wilayah
2. **Refocus Portfolio & Development Priorities:** Fokus bisnis masing-masing segmen yang mendorong prioritas pengembangan dan alokasi sumber daya perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan
3. **Sustainable Capability & Cost-Effective Ecosystem:** Pembentukan ekosistem perdagangan yang efektif melalui penguatan infrastruktur dan penguatan efektivitas cabang melalui penatalaksanaan
4. **Financial Restructuring:** Restrukturisasi keuangan yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan likuiditas dan struktur permodalan yang kuat
5. **Governance & Policy Setting (Subsidiary):** Tata kelola hubungan induk-anak yang mendorong pertumbuhan bisnis anak usaha

other developed countries, particularly the major countries in the Euro area. On the other hand, in developing countries and emerging markets, disruptions to the production and distribution of commodities, mainly oil, conflict, civil unrest, and natural disasters due to extreme weather have led to lower growth projections for the Middle East, Central Asia, and Sub-Saharan Africa.

Despite the pressure of global economic conditions, the Indonesian economy grew by 5.03% (yoy), exceeding the global growth average. The financial sector's stability was also reflected in the Jakarta Composite Index (IHSG), which reached a new all-time high of 7,905.39 on September 19, 2024. Inflation was recorded to have increased to 2.8% in May 2024, while the budget deficit is estimated to grow by 2.5% of GDP.

On December 17-18, 2024, the Bank Indonesia Board of Governors Meeting (RDG) decided to maintain the BI-Rate at 6.00%, the Deposit Facility interest rate at 5.25%, and the Lending Facility interest rate at 6.75%. This resolution was in line with the monetary policy to keep inflation under control within the target of $2.5 \pm 1\%$ in 2024 and 2025, and support sustainable economic growth. The monetary policy was focused on strengthening the stability of the Rupiah exchange rate amid increasing global economic uncertainty due to the United States (US) policy and escalating geopolitical tensions in various regions.

Company's Strategies and Strategic Policies

Generally, the Company's strategy in 2024 consists of:

1. **Strengthening Business and Operational Models:** Preparation of business models and operational models that were in line with the target market for each commodity in each region
2. **Refocus Portfolio & Development Priorities:** Focus on the business of each segment that drove the priority of development and allocation of company resources to boost revenue growth
3. **Sustainable Capability & Cost-Effective Ecosystem:** Formation of an effective trading ecosystem through strengthening infrastructure and strengthening branch effectiveness through governance
4. **Financial Restructuring:** Financial restructuring aimed to create liquidity resilience and a strong capital structure
5. **Governance & Policy Setting (Subsidiary):** Governance of parent-subsubsidiary relationships that boosted the growth of subsidiary businesses

6. *Human Capital Management (Org. & Talent):* Penguatan organisasi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan
7. *Digital & Market Driven Process:* Digitalisasi proses bisnis perusahaan yang mendukung kegiatan operasional

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan

Direksi Perseroan memainkan peran strategis dalam mengarahkan serta memimpin pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bekerja secara sinergis dengan Dewan Komisaris, saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan, serta mempertanggungjawabkan perannya masing-masing kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai bentuk perencanaan tahunan, Perseroan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan bisnis selama satu tahun buku. Direksi terlibat secara aktif sejak tahap perumusan RKAP, termasuk dalam koordinasi dan pembahasan bersama Dewan Komisaris. RKAP yang telah disepakati tersebut kemudian diterjemahkan menjadi rencana strategis pada masing-masing Direktorat, dan diimplementasikan melalui program kerja operasional oleh seluruh unit organisasi.

Dalam proses ini, Direksi memiliki peranan kunci, baik dalam memberikan arahan strategis, memberikan persetujuan atas program kerja, maupun dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif. Untuk menjaga konsistensi implementasi strategi, Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat internal dan rapat koordinasi lintas unit kerja. Pada tahun 2024, Direksi telah mengadakan 165 kali rapat Direksi serta 12 (dua belas) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.

Direksi menilai bahwa pelaksanaan strategi selama tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RKAP, serta didukung oleh koordinasi yang kuat dan implementasi yang konsisten di seluruh lini organisasi.

Gambaran Singkat Kinerja Perseroan dan Pencapaian Target RKAP

Kinerja Perseroan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

6. *Human Capital Management (Org. & Talent):* Strengthening sustainable organizations and human capital
7. *Digital & Market-Driven Process:* Digitalization of the Company's business processes that supported operational activities

The Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategies and Strategic Policies

The Company's Board of Directors plays a strategic role in directing and leading the implementation of strategies to achieve the Company's goals and objectives. In carrying out its duties, the Board of Directors performs synergistically with the Board of Commissioners, complementing each other in carrying out management and supervision functions, and being accountable for their respective roles to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

As a form of annual planning, the Company prepares the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which serves as the main guideline in implementing business operations and development for one fiscal year. The Board of Directors has been actively involved since the RKAP formulation, including coordinating and discussing with the Board of Commissioners. The agreed RKAP is subsequently translated into a strategic plan in each Directorate, and implemented through operational work programs by all organizational units.

In this process, the Board of Directors plays a key role in providing strategic direction, approving work programs, and ensuring that all established policies can be implemented effectively. The Board of Directors routinely holds internal meetings and cross-work unit coordination meetings to maintain consistency in strategy implementation. In 2024, the Board of Directors held 165 internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Commissioners.

The Board of Directors considered that the implementation of the strategy during 2024 has run according to the policy direction set out in the RKAP and was supported by strong coordination and consistent implementation across all lines of the organization.

Brief Overview of the Company's Performance and Achievement of RKAP Targets

The Company's performance in 2024 was significantly affected by several factors, including:

- Realisasi produk pangan dan hortikultura sampai dengan Desember 2024 senilai Rp824,72 miliar atau 458% melampaui RKAP s.d. bulan Desember 2024 karena selain adanya penjualan beras khusus impor juga dilakukan penjualan atas daging kerbau impor;
- Penambahan kedistributoran Biofarma pada cabang Surabaya, dan penambahan 2 cabang (Bengkulu dan Palembang) untuk penjualan Satoria;
- Telah teralisasinya ekspor komoditi getah damar ke China, kopi ke Mesir, serta rumput laut;
- Realisasi CPP daging unggas dan telur pada tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara dengan total 2.893.512 Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dan Penjualan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk cabang yang telah mendapatkan alokasi dari BULOG;
- Penambahan alokasi pupuk subsidi ex PT SHS kepada PT PPI yang mempengaruhi pencapaian pupuk subsidi melebihi target sebesar 14% dibandingkan RKAP Annual 2024, dan peningkatan sebesar 26% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meskipun ada pengurangan wilayah pendistribusian pupuk subsidi oleh PT PPI di wilayah kerja Kabupaten Mojokerto di tahun 2024;
- Evaluasi harga jual Dharmabrand telah dilakukan untuk penyelesaian harga tidak kompetitif dengan mitra makloon, telah dilaksanakan program pemasaran Temu Petani untuk meningkatkan pemahaman produk dan keterikatan pelanggan atas produk pestisida Dharmabrand.
- Dari kuota Impor Daging Kerbau sebesar 50.000 MT, telah mencapai penjualan sampai dengan Desember sebesar 13.104 ton senilai Rp774,02 Miliar.
- Penambahan kedistributoran produk *cold chain product* (CCP) dari BioFarma berupa vaksin;
- Kerjasama dengan prinsipal FMCG Daesang untuk Produk Konsumsi sudah *go live* pada Bulan Juni 2024 dengan Wilayah Kedistributoran Jakarta Pusat dan Jakarta Utara;
- Peningkatan kerjasama antar anggota IDFood transaksi komoditas telah dilakukan dengan transaksi sampai dengan Desember 2024 senilai Rp28,78 Miliar yang telah dilakukan oleh PPI Industri dengan PT Perikanan Indonesia, PT Rajawali Nusindo dan PT Rajawali Tanjungsari Engineering;
- The realization of food and horticultural products as of December 2024, amounting to Rp824.72 billion or 458%, exceeded the RKAP until December 2024 due to the sale of imported specialty rice, and sales of imported buffalo meat;
- Addition of Biofarma distributorship at Surabaya Branch, and addition of 2 branches (Bengkulu and Palembang) for Satoria sales;
- Exports of dammar gum commodities to China, coffee to Egypt, and seaweed have been successfully actualized;
- Realization of CPP for poultry meat and eggs in 2024 in the Central Java and North Sumatra regions, with a total of 2,893,512 Families at Risk of Stunting (KRS) and Sales of Rice for the Food Supply and Price Stabilization (SPHP) for Branches that were allocated by BULOG;
- The increase of subsidized fertilizer allocation of PT SHS to PT PPI, which affected the achievement of subsidized fertilizer exceeding the target by 14% compared to the 2024 Annual RKAP, and an increase of 26% compared to the same period in the previous year, despite there was a reduction in the distribution area of subsidized fertilizer by PT PPI in the Mojokerto Regency work area in 2024;
- Dharmabrand's selling price has been evaluated to resolve uncompetitive prices with makloon partners, a "Temu Petani" marketing program has been conducted to enhance product knowledge and customer engagement with Dharmabrand pesticide products.
- From the Buffalo Meat Import quota of 50,000 MT, sales volume reached 13,104 tons or Rp774.02 billion until December.
- Increase in distributors of cold chain products (CCP) from BioFarma in the form of vaccines;
- Collaboration with the FMCG Daesang principle for Consumer Products has gone live in June 2024 with the Distribution Area of Central Jakarta and North Jakarta;
- Collaboration among IDFood members has increased, with commodity transactions amounting to Rp28.78 billion as of December 2024. These transactions were made by PPI Industri with PT Perikanan Indonesia, PT Rajawali Nusindo, and PT Rajawali Tanjungsari Engineering;

PT PPI berhasil membukukan pendapatan sampai dengan Desember tahun 2024 senilai Rp3,10 triliun atau sebesar 84% dari target yang ditetapkan pada RKAP *Annual* Tahun 2024 senilai Rp3,69 triliun. Capaian pendapatan ini meningkat sebesar 35,39% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 pada periode yang sama.

PT PPI managed to record revenues as of December 2024, reaching Rp3.10 trillion or 84% of the target set in the 2024 Annual RKAP of Rp3.69 trillion. This revenue achievement increased by 35.39% compared to the revenue realization in 2023 in the same period.

Kontributor terbesar berasal dari penjualan Produk Strategis, yang terbagi menjadi Produk Pangan dan Hortikultura dan Produk Non Pangan. Segmen ini mencatat penjualan sebesar Rp1,15 triliun pada tahun 2024, atau 206,5% dibanding RKAP 2024. Urutan kedua berasal dari lini bisnis Perdagangan Non Bahan Pokok, yang menyumbang total penjualan Rp651,1 miliar atau sebesar 76,1% dari RKAP 2024. Pada lini bisnis ini penjualan pupuk subsidi merupakan kontributor terbesar yakni menyumbangkan penjualan sebesar Rp414,7 miliar atau sebesar 114,4% dari RKAP 2024 (Rp362,4 miliar). Sementara itu anak perusahaan menyumbangkan penjualan sebesar Rp884,5 miliar, atau 91,9% dari RKAP 2024. Dari sisi margin, produk yang memberikan kontribusi margin tertinggi berturut-turut adalah Pestisida Dharmabrand dengan GPM 28,7% dan Produk Strategis Non Pangan dengan GPM 21,8%.

Kendala yang dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2024 Perseroan menghadapi berbagai dinamika eksternal maupun internal yang memerlukan perhatian dan penanganan strategis. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan kinerja sepanjang tahun, sejumlah permasalahan masih muncul di Triwulan IV yang berdampak terhadap kelancaran operasional dan pencapaian target perusahaan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan saudara di bawah naungan ID FOOD, yang seharusnya dapat menjadi pendorong sinergi usaha dan efisiensi sumber daya. Selain itu, keterlambatan dalam proses perizinan impor daging kerbau, yang baru terbit pada tanggal 3 September 2024 dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2024, menyisakan waktu yang sangat terbatas untuk melakukan kegiatan impor secara maksimal.

Dalam sektor bahan baku, Perseroan juga menghadapi penyesuaian dalam perizinan impor bahan kimia non-B2, seiring adanya perubahan regulasi dan dilibatkannya pihak Sucofindo sebagai *surveyor*, serta kebijakan baru dari Kementerian Perindustrian. Tidak hanya itu, kuota impor bahan kimia berbahaya yang disetujui oleh regulator lebih kecil dari yang diajukan, yang pada akhirnya membatasi kapasitas pengadaan bahan.

Tantangan logistik pun menjadi perhatian, khususnya terkait dengan ketersediaan kapal dan meningkatnya *traffic* pengapalan di akhir tahun yang berdampak pada keterlambatan pengiriman. Sementara itu, pada bulan November, PT BRI (Persero) Tbk tidak dapat melakukan transaksi langsung dengan Perseroan karena kewajiban

The significant contribution was generated from sales of Strategic Products, which are divided into Food and Horticulture Products and Non-Food Products. In 2024, this segment recorded Rp1.15 trillion in sales, or 206.5% compared to the 2024 RKAP. The second place was generated from the Non-Staple Trading business line, contributing to total sales of Rp651.1 billion or 76.1% of the 2024 RKAP. In this business line, sales of subsidized fertilizers were the major contributor, as it reached Rp414.7 billion or 114.4% of the 2024 RKAP (Rp362.4 billion). Meanwhile, subsidiaries contributed sales of Rp884.5 billion, or 91.9% of the 2024 RKAP. Regarding margin, the products that contributed the highest margins successively were Dharmabrand Pesticides with a GPM of 28.7% and Non-Food Strategic Products with a GPM of 21.8%.

Obstacles faced by the Company

Throughout 2024, the Company faced various external and internal dynamics that required strategic concern and handling. Although various efforts to improve and strengthen performance have been made throughout the year, several issues remained in the fourth quarter, impacting the smooth operation and achievement of the Company's targets.

One of the challenges faced was the suboptimal cooperation with sister companies under ID FOOD, which should be able to drive business synergy and resource efficiency. Additionally, delays in the import permit process for buffalo meat, issued on September 3, 2024, and valid only until December 31, 2024, left a severely limited time for maximizing import activities.

In the raw material sector, the Company also faced adjustments in the non-B2 chemical import license, which was in line with changes in regulations, the involvement of Sucofindo as a surveyor, and new policies from the Ministry of Industry. Moreover, the import quota for hazardous chemicals approved by the regulator was less than that proposed, ultimately limiting the capacity for material procurement.

Logistics challenges were also a concern, specifically related to the availability of ships and increased shipping traffic at the end of the year, which impacted shipping delays. Meanwhile, in November, PT BRI (Persero) Tbk was unable to make direct transactions with the Company due to the obligation to comply with POJK No. 42 of 2020, considering

mengikuti POJK No. 42 Tahun 2020, mengingat statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tengah menyusun laporan keuangan *audited* dan harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi.

Sejalan dengan hal tersebut, potensi kerja sama dengan produsen farmasi dan alat kesehatan juga dinilai masih dapat ditingkatkan untuk mendorong utilisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Di sisi lain, masih terdapat tagihan dari eks BGR yang belum terselesaikan secara penuh, meskipun proses rekonsiliasi telah dilakukan.

Perseroan juga tengah menunggu persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas rencana pelaksanaan skema *debt-to-equity swap* kepada PT BLI senilai Rp27,5 miliar. Selain itu, tantangan dalam penagihan piutang yang masih belum tertagih turut menjadi fokus manajemen dalam menjaga likuiditas dan keberlangsungan operasional. Upaya perbaikan arus kas terus dilakukan, di tengah kenyataan bahwa sejumlah aset Perseroan masih dikuasai oleh pihak ketiga dan memerlukan langkah-langkah hukum atau administratif untuk penyelesaiannya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) terus menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Komitmen ini dijalankan secara menyeluruh, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga ke seluruh jajaran karyawan, sebagai bentuk dedikasi bersama untuk menegakkan standar tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Perseroan senantiasa berupaya menyelaraskan setiap kebijakan dan keputusan operasional dengan prinsip-prinsip dasar GCG guna membangun budaya perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan penerapan GCG ditunjukkan dengan dilaksanakannya penilaian penerapan GCG yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, PT PPI melakukan pengukuran penerapan GCG dengan *self assessment* dengan menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara

its status as a public company that is preparing audited financial statements and must adhere to the principle of information transparency.

In line with these challenges, there was potential to enhance collaboration with pharmaceutical and medical device manufacturers to encourage the utilization of the Company's resources. On the other hand, there were remaining bills from the ex-BGR that were unresolved, despite the reconciliation process being executed.

The Company was also awaiting approval from the Series A Dwiwarna Shareholders for the plan to implement a debt-to-equity swap scheme to PT BLI amounting to Rp27.5 billion. In addition, the management also focused on the challenge of uncollectible account expenses in maintaining liquidity and operational continuity. Efforts to improve cash flow persist, although some of the Company's assets remain controlled by third parties and require legal or administrative steps to resolve them.

Implementation of Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles has continuously been an inseparable part of the work culture within the Company. This commitment is implemented comprehensively, from the Board of Commissioners and Board of Directors to all levels of employees, as a form of joint dedication to uphold transparent, accountable, and integrity-based governance standards. The Company always strives to align all operational policies and resolutions with the basic principles of GCG to build a sound and sustainable corporate culture.

The Company's commitment to continuously improving the implementation of GCG is demonstrated by the implementation of GCG assessments, which have increased from year to year. In 2024, PT PPI measured the implementation of GCG through self-assessment by adopting the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter from the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, on the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and

Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023. Berdasarkan *Self Assessment* tersebut, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi didukung oleh Komite Disiplin yang memiliki peran penting dalam membina dan menegakkan kedisiplinan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, baik yang berkaitan dengan aturan internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Komite Disiplin menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap tindakan selaras dengan nilai dan etika perusahaan. Direksi menilai bahwa pelaksanaan tugas Komite Disiplin sejauh ini telah berjalan cukup optimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Perseroan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Dalam menghadapi perubahan industri yang semakin cepat dan kompleks, peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan dan daya saing Perseroan. SDM yang kompeten dan adaptif merupakan fondasi utama dalam mendorong produktivitas serta implementasi strategi bisnis yang efektif. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi yang tepat memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien, responsif, dan terintegrasi.

Sinergi antara penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi penting untuk memastikan Perseroan tetap relevan dan mampu bersaing di tengah lanskap bisnis yang terus berubah. Melalui peningkatan kompetensi pegawai dan transformasi digital yang berkelanjutan, Perseroan menempatkan diri pada posisi yang lebih siap untuk merespons tantangan, menciptakan nilai tambah, dan memanfaatkan peluang baru yang muncul seiring perkembangan zaman.

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat peran SDM dan TI, Perseroan secara konsisten melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas, seperti pelatihan teknis dan kepemimpinan, sertifikasi profesional, serta program coaching dan mentoring yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pegawai.

Letter from the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024, on Notification of the Self-Assessment Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2023. According to the Self-Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by the Discipline Committee, which plays a vital role in fostering and enforcing discipline against violations committed by employees, both those related to the Company's internal rules and applicable laws and regulations. The Disciplinary Committee serves as a main instrument in ensuring that each action aligns with the Company's values and ethics. The Board of Directors considers that the implementation of the Discipline Committee's duties thus far has been optimal in supporting the achievement of the Company's vision and mission.

Human Capital Development and Information Technology

In facing more rapid and complex industrial changes, Human Capital (HC) and Information Technology (IT) play a crucial role in the sustainability and competitiveness of the Company. Competent and adaptive human capital serves as the main basis for driving productivity and implementing effective business strategies. On the other hand, the utilization of appropriate technology allows business processes to run more efficiently, responsively, and integrated.

The synergy between strengthening human capital capacity and utilizing technology is a necessity and a main strategy to ensure that the Company remains relevant and competitive amid a constantly changing business landscape. By improving employee competency and ongoing digital transformation, the Company strives to be more prepared to respond to challenges, create added value, and seize new opportunities that arise over time.

As part of its commitment to strengthening the role of HC and IT, the Company consistently implements various capacity development programs, such as technical and leadership training, professional certification, and coaching and mentoring programs designed to improve employee competence and competitiveness.

Di bidang Teknologi Informasi, Perseroan melakukan modernisasi sistem dan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2024, Perseroan merealisasikan berbagai inisiatif strategis di bidang Teknologi Informasi melalui sentralisasi layanan dukungan IT dengan *helpdesk*, pembaharuan tata kelola TI & ERP seperti pembentukan Komite Pengarah TI, CSIRT, Tim DRP, serta penyusunan kebijakan DRP. Perseroan juga mengintegrasikan sistem ERP dengan aplikasi non-ERP seperti Samantha, Warung Pangan, Arlita VA, dan Salma, serta menyempurnakan ERP melalui pemenuhan ITCR dari pengguna. Digitalisasi gudang *stock point* dilakukan melalui penyediaan infrastruktur IT, sementara aplikasi komersial diperkuat dengan pengembangan aplikasi Woles, Arlita B2, migrasi Warung Pangan, dan sistem manajemen penjualan Salma.

Di sisi operasional, dikembangkan aplikasi rantai pasok terintegrasi (Arlita CPP), pelacakan armada (*myGPS*), dan pengajuan pengadaan (SIOPPA). Aplikasi pendukung juga ditingkatkan, seperti MONALISA, ARLITA VA, website korporat, ITA, SAMANTHA, MySISKA, PPIjar, dan ADINDA. Selain itu, dilakukan pemantauan dan pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur dan sistem, serta pemenuhan kebutuhan DRC melalui pembentukan tim, kebijakan, dan evaluasi risiko. Optimalisasi digitalisasi sistem utama ERP juga dilakukan melalui implementasi Finconsol dan penyusunan CoA konsolidasi serta integrasi data keuangan dan operasional.

Prospek usaha 2025

Memasuki tahun 2025, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

In the field of Information Technology, the Company modernizes digital systems and infrastructure to support smooth operations and increase efficiency and accuracy in the decision-making process.

In 2024, the Company realized various strategic initiatives in the Information Technology sector through the centralization of IT support services with helpdesk, IT & ERP governance updates such as the establishment of the IT Steering Committee, CSIRT, DRP Team, and the preparation of DRP policies. The Company also integrated the ERP system with non-ERP applications such as Samantha, Warung Pangan, Arlita VA, and Salma and improved the ERP by fulfilling ITCR from users. The digitalization of the stock point warehouse was carried out by providing the IT infrastructure. At the same time, commercial applications were strengthened by the development of the Woles and the Arlita B2 application, the migration of Warung Pangan, and the Salma sales management system.

On the operational side, an integrated supply chain application (Arlita CPP), fleet tracking (*myGPS*), and procurement submission (SIOPPA) were also developed. Supporting applications such as MONALISA, ARLITA VA, corporate website, ITA, SAMANTHA, MySISKA, PPIjar, and ADINDA were also improved. In addition, periodic monitoring and maintenance of infrastructure and systems were carried out, as well as the fulfillment of DRC needs through the formation of teams, policies, and risk evaluations. Digitalization optimization of the main ERP system was also carried out by implementing Finconsol, preparing consolidated CoA, and integrating financial and operational data.

2025 Business Outlook

As we move into 2025, the World Bank projects Indonesia's economy will grow by 5.1%. Indonesia's financial potential in 2025 is expected to remain promising, driven by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors. However, the global economy is expected to continue to face several challenges, including sluggish global economic growth. According to the *World Economic Outlook* (WEO) released by the IMF in October 2024, global economic growth in 2025 is projected to reach 3.2%. Risks affecting global conditions include the downturn of the Chinese and US economies, prolonged geopolitical tensions, the impact of climate change, and global interest rate uncertainty.

PPI optimis pada tahun 2025 akan mempertahankan kinerja *surplus*, dengan berlandaskan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi ekonomi makro dan dinamika sektor perdagangan. Strategi Perseroan disusun melalui analisis yang cermat atas berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan tren ketenagakerjaan, sebagai dasar dalam mengantisipasi tantangan sekaligus menangkap peluang yang tersedia.

Selain memperhatikan aspek makroekonomi, PPI juga terus memantau perkembangan industri perdagangan secara intensif. Penilaian terhadap pola permintaan, kestabilan rantai pasokan, serta tingkat persaingan pasar menjadi bagian penting dalam menyempurnakan strategi bisnis, alokasi sumber daya, dan penguatan posisi Perseroan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Dalam pengambilan keputusan strategis, kondisi keuangan Perseroan menjadi komponen utama yang senantiasa dievaluasi. Melalui analisis atas indikator utama seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan rasio likuiditas, PPI berupaya mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset serta sumber daya yang dimiliki. PPI meyakini bahwa Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk menjawab tantangan dan memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan di tahun 2025 dan seterusnya.

Susunan Direksi

Di sepanjang tahun 2024 tidak ada perubahan komposisi Direksi. Berikut adalah susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2024 hingga diterbitkannya Laporan Tahunan ini.

Nama Name	Jabatan Position
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations

Penutup

Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, mitra usaha, dan pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang berkelanjutan sepanjang tahun 2024. Di

PPI is optimistic that in 2025 it will maintain surplus performance, based on a comprehensive understanding of macroeconomic conditions and the dynamics of the trade sector. The Company's strategy is prepared through careful analysis of various economic indicators such as GDP growth, inflation, and employment trends to anticipate challenges and seize existing opportunities.

Apart from taking into account the macroeconomic aspects, PPI also continues to observe the development of the trade industry intensively. Assessment of demand patterns, supply chain stability, and market competition levels is a key to enhancing business strategies, resource allocation, and strengthening the Company's position amidst ever-changing market dynamics.

In the strategic decision-making process, the Company's financial condition is a key component that is constantly evaluated. Through analysis of key indicators such as revenue growth, profit margins, and liquidity ratios, PPI strives to identify areas that require improvement, increase efficiency, and optimize the use of its assets and resources. PPI believes that the Company is on the right track to address challenges and provide optimal value for all stakeholders in 2025 and beyond.

Composition of the Board of Directors

Throughout 2024, there were no changes to the composition of the Board of Directors. The following is the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, until the publication of this Annual Report.

Closing

The Board of Directors extends its utmost appreciation to all shareholders, business partners, and stakeholders for their unwavering support, trust, and cooperation throughout 2024. Amidst the economic dynamics and ongoing

tengah dinamika ekonomi dan tantangan yang terus bergulir, kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan telah menjadi landasan kuat yang memungkinkan Perseroan untuk tetap fokus, adaptif, dan terus bergerak maju mencapai berbagai target strategis.

Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas kerja sama yang erat, pengawasan yang konstruktif, serta komitmen dalam menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Sinergi yang terbangun antara Direksi dan Dewan Komisaris telah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan arah kebijakan Perseroan di tengah perubahan yang cepat dalam lingkungan usaha.

Tak kalah penting, Direksi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tulus kepada seluruh insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang tahun. Performa dan pencapaian yang berhasil diraih tidak terlepas dari kontribusi aktif setiap individu yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemajuan Perseroan. Ketangguhan, inovasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan menjadi modal utama dalam membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Direksi memiliki keyakinan bahwa dengan fondasi yang telah dibangun, strategi yang terus diperkuat, serta kolaborasi seluruh elemen perusahaan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia akan mampu menjawab setiap tantangan, memaksimalkan peluang, dan terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

challenges, the trust and commitment of stakeholders serve as a strong basis that enables the Company to remain focused, adaptive, and continuously advance to achieve various strategic targets.

We also express our deepest appreciation to the Board of Commissioners for their close cooperation, constructive supervision, and commitment to maintaining transparent and accountable corporate governance. The well-established synergy between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a key factor in maintaining the stability and direction of the Company's policies amidst rapid changes in the business environment.

On top of that, the Board of Directors expresses its gratitude and sincere appreciation to all PT Perusahaan Perdagangan Indonesia employees for their dedication, professionalism, and unyielding spirit throughout the year. The performance and achievements are inseparable from the active contribution of each individual who always performs their best for the progress of the Company. Resilience, innovation, and commitment to corporate values are the main capital in building a foundation for sustainable growth.

The Board of Directors believes that the established foundation, continuously reinforced strategy, and the collaboration of all Company elements will enable PT Perusahaan Perdagangan Indonesia to address all challenges, seize opportunities, and continue to create added value for all stakeholders.

Jakarta, 12 September 2025

Jakarta, September 12, 2025

Atas nama Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia,
On behalf of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia,



Soegeng Hernowo

Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN LAPORAN TAHUNAN PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2024

STATEMENT LETTER OF ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA IN 2024

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2024 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2024 has been contained in full, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, 12 September 2025

Jakarta, September 12, 2025

Dewan Komisaris **Board of Commissioners**



Gigih Guntoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris
Commissioner

Direksi **Board of Directors**



Soegeng Hernowo
Direktur Utama
President Director



Wien Irwanto
Direktur Keuangan, Manajemen
Risiko, SDM & Umum
Director of Finance, Risk
Management, HC & General Affairs



Edhy Rizwan
Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development



Noverita Anggraeny
Direktur Operasi
Director of Operations



03

Profil Perusahaan Company Profile



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan
Name of the Company

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia



Status Badan Hukum
Legal Entity Status

Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | Limited Liability Company (PT) / State-Owned Enterprise (SOE)



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

19 Juni 2003
June 19, 2003



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

- Akta Pendirian 04 tanggal 9 Juni 2003 | Deed of Establishment 04 dated June 9, 2003
- Akta Anggaran Dasar Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2008 | Deed of Association Number 33 dated August 29, 2008
- Akta Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2021 | Deed of Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Number 5 dated December 2, 2021
- Perubahan Anggaran Dasar Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024 | Amendment to Articles of Association Number 12 dated March 21, 2024



Bidang Usaha
Line of Business

Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional
Domestic and international trade



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp1.175.877.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
Rp1,175,877,000,000 (one trillion one hundred and seventy-five billion eight hundred and seventy-seven million rupiah)



Ruang Lingkup Usaha
Scope of Business

Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang.
Export, import, inter-island activities, local trade, distribution, representation and agency, retail, and procurement of goods



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp1.826.130.000.000 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah)
Rp1,826,130,000,000 (one trillion eight hundred and twenty-six billion one hundred and thirty million rupiah)



Kepemilikan Saham
Share Ownership

Kepemilikan saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna/sebesar 0,0001% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar 99,99% | The Company's shares are owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs, with 1 Share of Series A Dwiwarna representing 0.0001% and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) holding 99.99%.



Jaringan Kantor
Office Network

- 29 Kantor Cabang | 29 Branch Offices
- 5 Unit Operasional | 5 Operational Units
- *Trading House* di Kantor Pusat | Trading House at the Head Office



Jumlah Karyawan
Number of Employees

1.396 orang | Employees



Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Grha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160



Telepon
Phone Number

(+62 21) 3862141



Surel
E-mail

ppi.info@ptppi.co.id



Situs Web
Website

www.ptppi.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

CORPORATE BRIEF HISTORY

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memiliki riwayat yang bermula pada masa kolonial, ketika Pemerintah Belanda mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari kantor cabang perusahaan asing, perusahaan lokal yang mewakili perusahaan luar negeri, agen tunggal, perusahaan yang telah berdiri dari induknya di luar negeri, serta perusahaan berbadan hukum dengan anak perusahaan yang berdomisili di Hindia-Belanda.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, yang terbesar adalah *The Big Five*, dengan keunggulan manajemen dan jaringan pemasaran yang luas hingga ke seluruh pelosok, dengan tujuan untuk mengeksport rempah-rempah ke Eropa.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan perdagangan tersebut menjadi perusahaan milik negara. *The Big Five* menjadi cikal bakal perusahaan dagang dan dikenal dengan sebutan Niaga pada tahun 1950-an.

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi ini bertanggung jawab untuk perdagangan dan pendistribusian komoditas dasar seperti makanan pokok (beras, tepung, jagung, dan lain-lain) serta rempah-rempah tradisional. Selain itu, mereka juga mengelola perdagangan dan distribusi komoditas produk pertanian (seperti pupuk, pestisida, dan bahan kimia) serta produk konsumen (seperti

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) has a history originating in the colonial period, when the Dutch Government established several trading companies. These companies consisted of branch offices of foreign companies, local companies representing foreign companies, sole agents, companies established from their parent companies abroad, and legally constituted companies with subsidiaries domiciled in the Dutch East Indies.

Among these companies, the largest were The Big Five, known for their management excellence and broad marketing networks extending throughout the region to export spices to Europe.

Following Indonesia's independence, the Indonesian Government nationalized all trading companies into state-owned companies. The Big Five served as forerunners of trading companies known as Niaga in the 1950s.

The nationalized companies were responsible for trading and distributing basic commodities such as staple foods (rice, flour, corn, etc.) alongside traditional spices. They also managed the trade and distribution of agricultural commodity products (such as fertilizers, pesticides, and chemicals) and consumer products (such as textiles and automotive). The government granted special rights for

tekstil dan otomotif). Pemerintah memberikan hak khusus kepada perusahaan-perusahaan ini untuk beroperasi dalam jangka peraturan, modal, dan aset.

Pada bulan Juni 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan tiga perusahaan niaga, yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero), menjadi satu entitas perusahaan niaga yang diberi nama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Penggabungan ini resmi berlaku efektif sejak 31 Maret 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003. Tujuan penggabungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen, memaksimalkan keuntungan, mengintegrasikan bisnis, serta meningkatkan kepemilikan aset.

Pada 2 Desember 2021, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT BGR Logistik Indonesia resmi bergabung berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Nomor 3, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-AH.01.10-0014967 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Saat ini, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan, dan logistik yang terdigitalisasi. PPI terus melakukan inisiatif strategis melalui tahapan-tahapan seperti perbaikan *fundamental* (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) dan seterusnya.

Informasi Perubahan Nama

Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2024, PPI tidak pernah melakukan perubahan nama.

these companies to operate within regulatory frameworks, capital, and assets.

In June 2003, the Indonesian Government decided to merge three trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero), into one trading company, namely PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). This merger was officially effective on March 31, 2003, based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2003, which aimed at enhancing management efficiency, maximizing profits, integrating business, and increasing asset ownership.

On December 2, 2021, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and PT BGR Logistik Indonesia officially merged based on Notarial Deed Aulia Taufani, S.H., Number 3 ratified by the Ministry of Law and Human Rights Number AHUAH.01.10-0014967 concerning the Acceptance of Notification of the Merger of the Limited Liability Company (Persero) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Currently, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) is a company engaged in domestic and international trade, warehousing, and digitized logistics business. PPI continuously conducts strategic initiatives through several stages, including fundamental improvements (2021), Unlock The Value (2022-2023), World Class Company (2024), and beyond.

Information on Change of Name

PPI never changed its name since its establishment until the end of 2024.

JEJAK LANGKAH MILESTONES

19
61

- Perubahan nama PN Bhakti, PN Sedjati, dan PN Sinar Bhakti menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961; | Changes in the names of PN Bhakti, PN Sedjati, and PN Sinar Bhakti to PT Dharma Niaga as stated in PP No.75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Cipta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; dan | Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Cipta Niaga as stated in PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; and
- Perubahan nama PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, dan PN Tulus menjadi PT Aneka Bhakti dan PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961. | Changes in the names of PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, and PN Tulus to PT Aneka Bhakti and PT Pantja Niaga as stated in PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.

19
64

- Perubahan nama PN Budi Bhakti menjadi PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti menjadi PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti menjadi PN Dharma, dan PN Fadjar Bhakti menjadi PN Satya Niaga telah dituangkan di dalam PP 31/1964 dan PP 30/1964; | Changes in the name of PN Budi Bhakti to PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti to PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti to PN Dharma, and PN Fadjar Bhakti to PN Satya Niaga as stated in PP 31/1964 and PP 30/1964;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Aneka Niaga II telah dituangkan di dalam PP No. 30/1964. | Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Aneka Niaga II as stated in PP No. 30/1964.

19
65

Pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan perdagangan menjadi perusahaan milik negara dan disebut sebagai Niaga. | The Indonesian government nationalized all trading companies into state-owned companies and called them Niaga.

19
66

Perubahan nama PT Aneka Niaga II menjadi PN Kerta Niaga, PT Pembangunan menjadi PT Cipta Niaga, dan PT Aduma Niaga III berubah menjadi PT Dirga Niaga. Seluruh perubahan tercantum di dalam PP No. 7/1966. | Change in the name of PT Aneka Niaga II to PN Kerta Niaga, PT Pembangunan to PT Cipta Niaga, and PT Aduma Niaga III to PT Dirga Niaga. All changes are stated in PP No. 7/1966.

19
70

- Perubahan nama PN Kerta Niaga menjadi PT Kerta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 32/1970; | Change in the name of PN Kerta Niaga to PT Kerta Niaga as stated in PP No. 32/1970;
- Perubahan nama PN Dharma menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 22/1970; | Change in the name of PN Dharma to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 22/1970;
- Perubahan nama PT Satya Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam RUPSLB PT Dharma Niaga Tanggal 6 April 1970. | Change in the name of PT Satya Niaga to PT Dharma Niaga as stated in the EGMS of PT Dharma Niaga on April 6, 1970.

19
71

- Perubahan nama PT Aduma Niaga I menjadi PT Aduma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 52/1971; | Change in the name of PT Aduma Niaga I to PT Aduma Niaga as stated in PP No. 52/1971;
- Perubahan nama PN Satya Niaga menjadi PT Satya Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 10/1971; | Change in the name of PN Satya Niaga to PT Satya Niaga as stated in PP No. 10/1971;
- Perubahan nama PT Aneka Niaga I menjadi PT Aneka Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.73/1971; | Change in the name of PT Aneka Niaga I to PT Aneka Niaga as stated in PP No.73/1971;
- Perubahan nama PN Dirga Niaga menjadi PT Dirga sebagaimana tertuang di dalam PP No.36/1971; | Change in the name of PN Dirga Niaga to PT Dirga as stated in PP No. 36/1971;
- Perubahan nama PT Pantja berubah menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.37/1971; dan | Change in the name of PT Pantja to PT Pantja Niaga as stated in PP No.37/1971; and
- Perubahan nama PN Pembangunan Niaga I menjadi PT Pembangunan Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.47/1971. | Change in the name of PN Pembangunan Niaga I to PT Pembangunan Niaga as stated in PP No.47/1971.

**19
92**

Penggabungan PT Dirga Niaga dan PT Pembangunan Niaga menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam Keputusan RUPSLB No. 17/1982. | Merger of PT Dirga Niaga and PT Pembangunan Niaga into PT Pantja Niaga as stated in the EGMS Resolution No. 17/1982.

**19
98**

Perubahan nama PT Kerta Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 28/1998. | Change in the name of PT Kerta Niaga to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 28/1998.

**20
03**

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Niaga atau perusahaan perdagangan, yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero) menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") atau Indonesia Trading Company (ITC). Hal ini tercantum di dalam PP No. 22/2003. | Merger of 3 (three) Commerce Companies or trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero) to become PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") or Indonesia Trading Company (ITC). This is stated in PP No. 22/2003.

**20
15**

Melakukan perubahan logo perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan ITC (Indonesia Trading Company) menjadi Perusahaan Perdagangan Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan dari Kementerian BUMN Nomor S-28/MBU/01/2015 pada tanggal 14 Januari 2015. | Change in the Company logo, previously known as ITC (Indonesia Trading Company) to become Perusahaan Perdagangan Indonesia in accordance with the Approval Letter from the Ministry of SOE Number S-28/MBU/01/2015 on January 14, 2015.

**20
17**

Bekerjasama dengan partner Zhong Ni, PPI meresmikan Representative Office di China. | In collaboration with partner Zhong Ni, the PPI inaugurated a Representative Office in China.

**20
18**

- Pertama kali menerapkan Sistem Information and Communication Technology (ICT) yang dimulai dengan pemberlakuan sistem ERP di tahun 2017. | Implemented the Information and Communication Technology (ICT) System for the first time starting with the implementation of the ERP system in 2017.
- PPI mengekspor komoditi Arang Batok Kelapa ke Sri Lanka dengan sumber pasokan komoditi berasal dari area Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatera Selatan. | PPI exported Coconut Shell Charcoal commodity to Sri Lanka with commodity supply sources coming from West Java, East Java, Sulawesi and South Sumatra.
- PPI memproduksi Dharmafur kemasan 1 kg untuk segmen petani/rumah tangga dengan luasan lahan kecil. | PPI produced Dharmafur packaging in 1 kg size for the small-scale farmer/household segment.
- PPI mengeluarkan produk baru dengan brand sendiri, yaitu Panganesia. Berkolaborasi dengan produsen minyak goreng di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra Utara, dan mulai memasarkan produk minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter dengan brand Minyak Goreng Panganesia. | PPI issued a new product with its own brand, namely Panganesia. Collaborated with cooking oil producers in a number of areas, especially in North Sumatra, and began marketing 1 liter and 2 liter packaged cooking oil products under the Panganesia Cooking Oil brand.
- PPI bekerjasama dengan produsen beras di sejumlah sentra produksi beras dan memasarkan produk beras premium kemasan 5 kg dengan brand Beras Panganesia. | PPI collaborated with rice producers in a number of rice production centers and marketed premium 5 kg packaged rice products under the Panganesian Rice brand.
- PPI merintis peluang bisnis baru berupa pengembangan usaha kopi beserta produk turunannya dan meluncurkan produk KOPI COVARE. | PPI pioneered new business opportunities by developing the coffee business and its derivative products and launching the KOPI COVARE product.
- PPI meresmikan 15 BUMN Shop yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia. | PPI inaugurated 15 SOE Shops operating in a number of regions in Indonesia.

**20
19**

- Bekerjasama dengan partner Elhamd Trading Company, PPI meresmikan Representative Office di Mesir. | In collaboration with partner Elhamd Trading Company, PPI inaugurated the Representative Office in Egypt.
- Bekerjasama dengan partner Ascent Hi-Tech Corp, PPI meresmikan Representative Office di Taiwan. | In collaboration with partner Ascent Hi-Tech Corp, PPI inaugurated the Representative Office in Taiwan.



**20
20**

- Bekerja-sama dengan partner Al Buraq Investment; Hongkong Star Food, PPI meresmikan Representative Office di Dubai. | In collaboration with partner Al Buraq Investment; Hongkong Star Food, PPI inaugurated the Representative Office in Dubai.
- Bekerjasama dengan partner Legacy Singapura Holding Pte Ltd, PPI meresmikan Representative Office di Singapura. | In collaboration with partner Legacy Singapore Holding Pte Ltd, PPI inaugurated the Representative Office in Singapore.

**20
21**

Penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksha ke dalam PT Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2021 dan PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT BGR Logistik Indonesia ke dalam PPI pada 15 September 2021. | Signing of the Deed of Merger of PT Bhanda Ghara Reksha into PPI on December 2, 2021 and PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of PT BGR Logistik Indonesia into the PPI on September 15, 2021.

**20
22**

Pada tanggal 7 Januari 2022 secara resmi terbentuk Holding BUMN Pangan, dengan PT RNI (Persero) sebagai induk holding. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan penandatanganan Akta Inbreng saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam. | On January 7, 2022, the Food SOE Holding was officially formed, with PT RNI (Persero) as the holding parent. This was marked by the signing of the Deed of Inbreng of Government shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs, including PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari and PT Garam.

**20
23**

Merealisasikan ekspor perdana dalam skema Imbal Dagang Indonesia – Mesir | Realizing the first export in the Indonesia - Egypt under Trade Returns scheme

**20
24**

- Pembukaan Gerai Covare Cafe milik PPI oleh Wakil Menteri BUMN di Waskita Rajawali Tower.
- The grand opening of PPI's Covare Cafe outlet by the Deputy Minister of State-Owned Enterprises at Waskita Rajawali Tower.
- PT PPI Lepas Ekspor Perdana Getah Damar ke India.
- PT PPI Waived its First Export of Dammar Gum to India.



**PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA**

member of  **ID FOOD**



VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN CORPORATE VISION, MISSION, AND CULTURAL VALUES



VISI
VISION

“MENJADI PERUSAHAAN PERDAGANGAN NASIONAL BERKELAS DUNIA YANG TERPERCAYA DAN TERKEMUKA.”

“TO BE A TRUSTED AND LEADING WORLD-CLASS NATIONAL TRADING COMPANY.”



MISI
MISSION

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional.
 2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.
 3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.
 4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.
 5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.
 6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.
1. To conduct general and specialized trading for food and non-food products from upstream to downstream targeting domestic and international markets.
 2. Provide quality products, competitive prices, and usefulness to ensure customer satisfaction and establish sustainable partnerships.
 3. Designing an integrated ecosystem that serves to support the main business in trading.
 4. Build operational excellence through the utilization of information technology systems (data analytics) to support efficient and innovative business processes.
 5. Ensure optimal asset utilization and relevant supporting infrastructure development with effective investment.
 6. Improve the productivity, agility and quality of human resource performance through the development of employee capabilities and competencies.



Pernyataan Penetapan Visi dan Misi oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2024 telah meninjau dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya PPI yang digunakan sampai dengan saat ini masih selaras dengan potensi dan perkembangan bisnis PPI.

Perubahan terakhir atas Visi & Misi PPI dilakukan pada tahun 2022 dan telah disetujui perubahannya oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.

Statement of Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and Board of Directors served during the 2024 fiscal year have reviewed and approved that PPI's Vision, Mission & Cultural Values used to date are still aligned with PPI's business potential and development.

The last amendment to PPI's Vision & Mission was made in 2022 and the amendment was approved by the Shareholders through Board of Directors Decree No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.

TAGLINE PERUSAHAAN CORPORATE TAGLINE

“QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE”

NILAI UTAMA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan perubahan nilai-nilai perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK merupakan Core Values yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan anak perusahaannya.

Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

CORE VALUES

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding Guidelines for Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia has changed the Company's values into AKHLAK.

AKHLAK is the Core Values developed by the Ministry of SOEs in the context of the welfare of the community, with general goals for the benefit of the nation and state, and has specific goals for each SOE and its subsidiaries.

The description of these values is as follows:



AMANAH TRUSTWORTHY

Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Panduan perilaku:

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Trustworthy: Adhere to the trust given

Behavior guidelines:

1. Fulfilling promises and commitments.
2. Taking responsibility for tasks, decisions, and actions taken.
3. Adhering to moral and ethical values.



KOMPETEN COMPETENT

Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Panduan perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent: Continue to learn and develop capabilities

Behavior guidelines:

1. Improving self-competence to respond to dynamic challenges
2. Helping others learn
3. Completing tasks of the highest quality.



HARMONIS HARMONIOUS

Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan

Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious: Care for each other and respect differences

Behavior guidelines:

1. Respecting everyone regardless of background.
2. Helping others.
3. Building a conducive work environment.



LOYAL LOYAL

Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Panduan perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

Behavior guidelines:

1. Maintaining the reputation of other employees, leaders, SOEs and the State.
2. Willing to sacrifice to achieve a bigger goal.
3. Obeying the leaders as long as it is not against the law and ethics.



ADAPTIF ADAPTIVE

Adaptif: Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Panduan perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

Adaptive: Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing change

Behavior guidelines:

1. Adapting to be better quickly.
2. Continuously improving following technological developments.
3. Acting proactively.



KOLABORATIF COLLABORATIVE

Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis

Panduan perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Collaborative: Build a synergistic collaboration

Behavior guidelines:

1. Providing opportunities for various parties to contribute
2. Being open to work together to generate added value
3. Mobilizing the use of various resources for common goals.

FILOSOFI PERDAGANGAN TRADE PHILOSOPHY

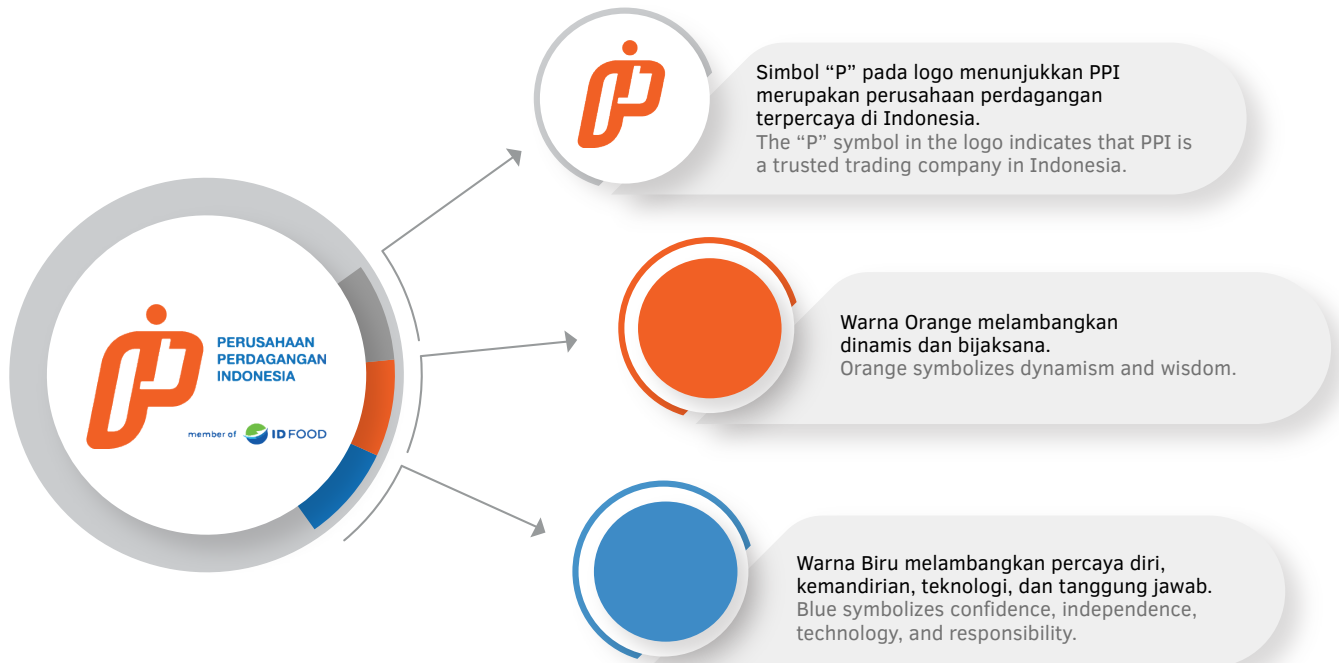
Komersial | Commercial

Sebagai Perusahaan Terbatas, Perseron melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan mewujudkan stabilisasi harga. | As a Limited Liability Company, the Company conducts trading activities prioritizing profits for business growth and achieving price stabilization.

Terukur | Measurable

Setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur termasuk dalam menetapkan margin keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap stakeholder. | Every trade policy and strategy implemented by PPI is carried out in a measured manner, including determining profit margins, to ensure benefits for every stakeholder.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN MEANING OF CORPORATE LOGO



BIDANG USAHA, PRODUK, DAN LAYANAN LINE OF BUSINESS, PRODUCTS, AND SERVICES

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI, maka dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI menjalankan kegiatan usaha utama dan pendukung sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Hasil pertanian serta produk turunannya berikut alat-alat pertanian;
- Hasil kehutanan serta produk turunannya berikut alat-alat eksploitasi hutan;
- Hasil perkebunan serta produk turunannya berikut alat-alat perkebunan;
- Bahan-bahan untuk konstruksi;
- Alat-alat untuk konstruksi;
- Alat-alat kesehatan dan laboratorium.

Business Activities According to the Latest Articles of Association and Business Activities

As stated in the Articles of Association of PPI, in order to achieve the aforementioned aims and objectives, PPI carries out the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

International Trade & Domestic Trade

- Agricultural products and their derivatives including agricultural tools;
- Forestry products and their derivatives including forest exploitation tools;
- Plantation products and their derivatives including plantation tools;
- Construction materials;
- Construction equipment;
- Health and laboratory equipment.

Kegiatan Usaha Pendukung:

Selain menjalankan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi pergudangan, perkantoran, pertokoan, pemanfaatan lahan, transportasi, properti, dan pariwisata, serta melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN DI TAHUN 2024

Dengan memajukan paradigma Perseroan di era modern perdagangan global, PPI secara berkelanjutan menciptakan ekosistem bisnis secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari sumber pasokan (hulu), proses nilai tambah (produksi dan pengolahan), dan secara agresif membuka jaringan distribusi (hilir) baik pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan market share.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PPI Nomor 3 Tahun 2021, perseroan menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Untuk mencapai hal tersebut, PPI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI
- Perikanan
- Pertambangan Batu Bara dan Lignit
- Industri Makanan
- Industri Minuman
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- Pengolahan Air Limbah
- Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
- Konstruksi Bangunan Sipil
- Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- Penyediaan Akomodasi
- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
- Aktivitas Jasa Informasi
- *Real Estate*
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Supporting Business Activities:

In addition to conducting main business activities, the Company may also engage in activities aimed at optimizing resource utilization including warehousing, office space, retail space, land utilization, transportation, real estate, tourism, and carrying out government assignments in accordance with the principles of company management and laws and regulations.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN 2024

By advancing the Company's paradigm in the contemporary era of global trade, PPI continuously creates a comprehensive business ecosystem while considering mutual interests starting from the supply source (upstream), value-added processes (production and processing), and aggressively opening distribution networks (downstream) both in domestic and international markets to increase market share.

Based on Amendment Deed of the Articles of Association of PPI Number 3 of 2021, the Company engages in the fields of Agriculture, Fisheries, Manufacturing Industry, and Wholesale Trade. To achieve this, PPI carries out the following business activities:

- Crop Farming, Animal Husbandry, Hunting, and YBDI Activities
- Fisheries
- Coal and Lignite Mining
- Food Industry
- Beverage Industry
- Chemical Industry and Goods from Chemicals
- Wastewater Treatment
- Collection, Treatment, and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities
- Remediation and Management of Other Waste and Garbage
- Civil Construction
- Trade, Repair, and Maintenance of Cars and Motorcycles
- Wholesale Trade, Except for Cars and Motorcycles
- Warehousing and Transport Support Activities
- Accommodation Provision
- Programming Activities, Computer Consulting, and YBDI Activities
- Information Services Activities
- Real Estate
- Head Office Activities and Management Consulting
- Leasing and Operating Leases without Option Rights

- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya.

- Office Administration Activities, Office Support Activities, and Other Business Support Activities.

PENGUNGKAPAN INFORMASI BIDANG USAHA DALAM LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

DISCLOSURE OF BUSINESS FIELDS INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

Information on the above business activities has also been disclosed in the Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the fiscal year ended December 31, 2024.

PRODUK DAN KOMODITI PRODUCTS AND COMMODITIES

Dalam menjalankan usahanya, PPI menerapkan prinsip integrasi vertikal, yang artinya Perseroan memperluas pengendalian atas berbagai tahap proses produksi dan distribusi dalam industri tertentu, baik ke arah hulu maupun ke arah hilir. Dengan mengintegrasikan secara vertikal ke arah hulu, maka Perseroan dapat mengamankan rantai pasokan, menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas, dan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Sementara integrasi ke arah hilir memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan saluran distribusi yang lebih besar, menangkap mangsa yang lebih besar dari rantai nilai, dan menjaga profitabilitas.

Ke arah hulu, Perseroan bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta produsen-produsen bahan kimia, pestisida dan obat-obatan. Sementara ke arah hilir, Perseroan memberi nilai tambah agar produk akhir memiliki kualitas yang memuaskan sesuai ekspektasi pelanggan sebelum dipasarkan melalui saluran distribusi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan aktivitas logistik dan pergudangan sebagai portofolio anak perusahaan. Kegiatan logistik dan pergudangan ini akan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan sumber daya di seluruh rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan pada akhirnya mendorong keunggulan kompetitif di pasar.

Berikut ini adalah portofolio produk dan komoditi yang diperdagangkan oleh Perseroan:

In conducting its business operations, PPI adheres to the principle of vertical integration, wherein the Company expands its control over various stages of the production and distribution process within specific industries, both upstream and downstream. By vertically integrating upstream, the Company aims to secure the supply chain, maintain price stability, ensure quality, and reduce dependence on external suppliers. Meanwhile, downstream integration enables the Company to control larger distribution channels, capture a greater share of the value chain, and sustain profitability.

Upstream, the Company collaborates with farmers, livestock breeders, fishermen, MSMEs, as well as producers of chemicals, pesticides, and pharmaceuticals. Conversely, downstream efforts focus on adding value to ensure that the final products meet customer expectations before being marketed through distribution channels domestically and internationally.

Furthermore, the Company also conducts logistics and warehousing activities as part of its subsidiary portfolio. These logistics and warehousing activities will optimize the flow of goods, information, and resources throughout the supply chain, enhance operational efficiency, reduce costs, improve customer service, and ultimately drive competitive advantage in the market.

The following is a portfolio of products and commodities traded by the Company:

PESTISIDA

Sebagai wujud komitmen untuk menjadi sahabat petani Indonesia, Perseroan terus berinovasi untuk mengembangkan solusi yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Perseroan telah memiliki rangkaian produk unggulan pestisida, yang terbagi menjadi insektisida dan herbisida, yaitu Dharma Brand.

Produk-produk pestisida Perseroan terdiri dari Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, dan Dharmafur 3G yang merupakan golongan insektisida, serta Dharmapara 276SL, dan Dharmara 480SL sebagai golongan herbisida.

PESTICIDES

As a form of commitment to be the best friend of Indonesian farmers, the Company continues to innovate to develop solutions needed by farmers to increase agricultural production. The Company has a series of pesticide products, which are divided into insecticides and herbicides, namely Dharmabrand.

The Company's pesticide products consist of Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, and Dharmafur 3G which are insecticides, and Dharmapara 276SL, and Dharmara 480SL as herbicides.



Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMASIP 50EC	Insektisida piretroid berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan berwarna kuning muda pucat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kedelai. Pyrethroid insecticide with active ingredient Cypermethrin 50 g/l which functions as a contact and gastric poison, in the form of a pale light-yellow concentrate that can be emulsified to control pests on chili, shallot, cabbage, tomato, and soybean plants.
DHARMASAN 600EC	Insektisida organofosfat berbahan aktif fentoat 600 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning pucat yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai merah, kapas, kedelai, lada, tebu, dan tembakau. Organophosphate insecticide with active ingredient fentoate 600 g/l which functions as a contact poison in the form of a pale-yellow concentrate that can form an emulsion in water to control pests on shallots, red chilies, cotton, soybeans, pepper, sugarcane, and tobacco.
DHARMABAS 500EC	Insektisida karbamat berbahan aktif BPMC 500 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh. Carbamate insecticide with active ingredient BPMC 500 g/l which functions as a contact poison in the form of a yellow concentrate that can be emulsified in water to control pests on rice, shallots, red chili, sugarcane, cocoa, and tea plants.
DHARMAFUR 3G	Insektisida karbamat berbahan aktif karbofuran 3% berbentuk granul yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang sistemik berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman kedelai, bawang merah, dan cabai. Carbamate insecticide with active ingredients 3% carbofuran in the form of granules that functions as systemic contact and stomach poison in purple granular form to control pests on soybeans, shallots, and chilies.

Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMAPA- RA 276SL	Herbisida terbatas berbahan aktif paraquat diklorida 247 g/l bekerja sebagai racun kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Limited herbicide with the active ingredient paraquat dichloride 247 g/l which functions as a post-growth contact poison, in the form of a blue-green solution in water, to control common weeds in oil palm plantations (TBM).
DHARMARA 480SL	Herbisida sistemik purna tumbuh berbahan aktif isopropil amina glifosat 480 g/l setara dengan Glifosat 356 g/l, yang berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan dan tidak selektif terhadap tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) sasaran pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Post-emergence systemic herbicide with the active ingredient isopropyl amine glyphosate 480 g/l equivalent to Glyphosate 356 g/l, which is in the form of a yellowish aqueous solution and is not selective against targeted cultivated plants (weeds) in oil palm plantations (TBM).

PUPUK

PPI sebagai distributor pupuk subsidi dan non subsidi bekerja sama dengan pabrikan pupuk BUMN dan swasta di antaranya PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Tetap Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco dan PT Wilmar untuk menyalurkan kebutuhan pupuk bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. PPI menyediakan kebutuhan pupuk untuk agen, kios dan end-user yang tersebar di setiap kantor cabang seluruh Indonesia

FERTILIZER

PPI as a distributor of subsidized and nonsubsidized fertilizers cooperates with state-owned and private fertilizer manufacturers including PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Tetap Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco and PT Wilmar to distribute fertilizer for agricultural businesses which include Food Crops Farmers, Livestock and People's Plantations. PPI provides fertilizer for agents, kiosks and end-users spread across every branch office throughout Indonesia.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk KCL KCL Fertilizer	Pupuk KCL atau yang sering disebut sebagai MOP (Muriate of Potash) merupakan salah satu jenis pupuk tunggal yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu mengandung 60% K ₂ O sebagai Kalium klorida. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, Pupuk KCL dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah. KCL fertilizer or often referred to as MOP (Muriate of Potash) is a single type of fertilizer that has a high concentration containing 60% K ₂ O as Potassium chloride. This is a fertilizer containing potassium which is very suitable for all types of plants that are tolerant to chloride or soils with low chloride. In addition, KCL fertilizer can be applied to all types of soil.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk NPK NPK Fertilizer	Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur hara Nitrogen (N), Fosfat (P) dan Kalium (K). Pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang mengandung setidaknya 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu N, P, dan K serta 2 unsur hara mikro. Setiap jenis pupuk atau merk memiliki persentase atau komposisi kandungan yang berbeda-beda, yang ditandai dengan angka seperti NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 atau NPK 12-12-12. Angka-angka tersebut adalah persentase kandungan unsur hara makro yang ada di dalamnya, sedangkan kandungan unsur hara mikro sangat sedikit sehingga umumnya tidak ditulis pada kemasan. NPK fertilizer is a type of fertilizer which contains nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium (K) nutrients. NPK compound fertilizer is fertilizer that contains at least 5 nutrients consisting of 3 macro nutrients, namely N, P, and K and 2 micro nutrients. Each type of fertilizer or brand has a different percentage or composition of content, which is indicated by numbers such as NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 or NPK 12-12-12. These numbers are the percentage of macro nutrients in it, while the content of micro nutrients is very small so they are generally not written on the packaging.
Pupuk Urea Urea Fertilizer	Pupuk Urea merupakan zat yang membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea dibuat secara kimiawi dengan kandungan kadar nitrogen yang cukup tinggi. Pupuk Urea membuat daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun (klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis. Pupuk Urea juga mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein di dalam tanaman, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman usaha perkebunan, tanaman di sekitar peternakan dan juga tanaman di sekeliling usaha perikanan. Urea fertilizer is a substance that helps plant growth. Urea fertilizer is made chemically with fairly high nitrogen. Urea fertilizer makes plant leaves greener, lusher, and fresher. Nitrogen also helps plants to have a lot of green leaf substance (chlorophyll). In the presence of abundant leaf green matter, plants will carry out photosynthesis more easily. Urea fertilizer also accelerates plant growth, increases protein content in plants, can be used for all types of plants, including for food crops, horticultural crops, plantation crops, plants around livestock and also plants around fishing businesses.
Fertilizer Pupuk ZA ZA Fertilizer	Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen bagi tanaman. Pupuk ZA mudah menyerap air karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah, pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Pupuk ZA memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain; memperbaiki rasa dan warna hasil panen; tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan); kandungan nitrogennya hanya separuhnya dari pupuk urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanah-tanah yang miskin unsur ini, maka Pupuk ZA merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara belerang. ZA fertilizer is an artificial chemical fertilizer designed to provide additional nitrogen nutrients to plants. ZA fertilizer easily absorbs water because the sulfate ion is very easily soluble in water while the ammonium ion is weaker. This fertilizer has the potential to lower the pH of the soil affected by its application. ZA fertilizer improves quality and increases production and nutritional value of crop yields and animal feed due to increased levels of protein, starch, rice, sugar, fat, vitamins, and others; improve the taste and color of crops; plants are healthier and more resistant to environmental disturbances (pests, diseases, drought); Its nitrogen content is only half that of urea fertilizer, so it is usually given as a source of sulfur nutrient supply in soils that are poor in this element, so ZA fertilizer is the best choice to meet the needs of sulfur nutrients.

BAHAN BERBAHAYA

PPI sebagai importir dan distributor bahan kimia berbahaya di Indonesia melalui harmonisasi *supply and demand* yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok bahan kimia berbahaya. PPI memiliki produk prioritas Bahan Kimia Berbahaya, yaitu:

HAZARDOUS CHEMICALS

As an importer and distributor of hazardous chemicals in Indonesia through harmonization of supply and demand supported by information and communication technology systems for the supply chain of hazardous chemicals. PPI has priority products for Hazardous Chemicals, namely:

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Borax Pentahydrate	Borax Pentahydrate adalah padatan yang berbentuk kristal berfungsi sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas buah dan mempercepat pertumbuhan; sebagai fluxing agent untuk efisiensi pada ruang pembakaran pada industri kaca dan keramik; dan sebagai pengawet dalam industri kayu dan pengolahan kertas. Borax Pentahydrate is a crystalline solid that functions as a fertilizer to improve fruit quality and accelerate growth; as a fluxing agent for efficiency in combustion chambers in the glass and ceramics industry; and as a preservative in the wood and paper processing industries.
Sodium Cyanide	Sodium Cyanide adalah senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air, berfungsi sebagai bahan pembantu ekstraksi emas, perak, dan tembaga, serta sebagai bahan pengikat dalam proses pelapisan logam. Sodium Cyanide is a white solid compound that is soluble in water, and serves as an auxiliary material for the extraction of gold, silver, and copper, as well as a binder in metal plating processes.

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
MDEA	MDEA adalah cairan kuning jernih yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemurnian gas Carbon Dioxide (CO ₂) dan Hidrogen Sulfida (H ₂ S) dalam industri pengolahan gas bumi. MDEA is a clear yellow liquid that functions as an ingredient used for the purification of Carbon Dioxide (CO ₂) and Hydrogen Sulfide (H ₂ S) gases in the natural gas processing industry.
TEA	TEA adalah senyawa kimia organik cair, kental dengan bau amonia yang berfungsi sebagai zat pengemulsi dalam industri consumer goods, pewarna tekstil, dan bahan pelapis anti korosi dan anti karat untuk industri besi dan baja. TEA is a liquid organic chemical compound, thick with ammonia odor, which functions as an emulsifier in the consumer goods industry, textile dyes, and anti-corrosion and anti-rust coating materials for the iron and steel industry.
Potassium Chlorate	Potassium Chlorate adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin dan oksigen yang berbentuk kristal putih, berfungsi sebagai bahan oksidator dalam industri kembang api, korek api, peledak dan antiseptik. Potassium Chlorate is a compound containing potassium, chlorine and oxygen in the form of white crystals, which functions as an oxidizing agent in the fireworks, matches, explosives and antiseptic industries.

BAHAN BANGUNAN

BUILDING MATERIALS

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Semen Cement	PPI mendistribusikan semen Portland Jenis I, semen jenis ini adalah semen hidrolis yang proses pembuatannya mencampurkan beberapa unsur diantaranya terak, gypsum, dan bahan anorganik yang apabila diberi air akan membentuk pasta semen dan kemudian menjadi kaku dan keras. Jenis semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen ini di antaranya untuk konstruksi bangunan rumah pemukiman, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, landasan pacu pesawat terbang, dan lain-lain. Karakteristiknya cocok digunakan di lokasi pembangunan kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat rendah. Semen yang didistribusikan oleh PPI merupakan sinergi dengan hasil produk Semen Indonesia Group (SIG) untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua PPI menghadirkan semen dengan harga yang lebih terjangkau khususnya daerah Pegunungan Tengah Papua. PPI distributes Portland cement Type I. This type of cement is hydraulic cement with manufacturing process mixing several elements including slag, gypsum, and inorganic materials, which when given water will form a cement paste and then become stiff and hard. This type of cement is used for general building construction which does not require special requirements for heat hydration and initial compressive strength. The uses of this cement include the construction of residential houses, high-rise buildings, roads, bridges, airplane runways, and others. Its characteristics are suitable for use in construction sites that are far from the coast and have low sulfate levels. The cement distributed by PPI is a synergy with the products of the Semen Indonesia Group (SIG) for the Indonesian regions. For the Papua region, PPI provides cement at a more affordable price, especially in the Central Highlands of Papua.
Aspal Asphalt	Aspal merupakan salah satu bahan bangunan yang acap kali digunakan dalam sebuah proyek konstruksi jalan atau sirkulasi, yang fungsi utamanya sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain seperti bitumen dan mineral. Aspal akan mengikat batuan dan komponen lain agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Aspal yang didistribusikan PPI adalah jenis asphalt 60/70 yang difokuskan untuk aplikasi konstruksi jalan. Ada dua jenis aspal yang didistribusikan yaitu aspal Pertamina dan aspal Iran. Aspal Pertamina didistribusikan PPI Cabang Yogya, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram, dan Ambon yang meliputi Timika dan Manokwari. Sedangkan aspal Iran didistribusikan Cabang Palu dan Ambon. Asphalt is one of the building materials that is often used in road construction or circulation projects with the main function as a binder and soil surface coating which is used by mixing it with other compounds such as bitumen and minerals. Asphalt will bind rocks and other components so that they are not separated from the road surface. Asphalt distributed by PPI is asphalt 60/70 which is focused on road construction applications. There are two types of asphalt distributed, namely Pertamina asphalt and Iranian asphalt. Pertamina's asphalt is distributed by the PPI Yogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram and Ambon branches which include Timika and Manokwari. Meanwhile, the Iranian asphalt is distributed by the Palu and Ambon branches.

TRANSAMIN

Transamin adalah obat anti pendarahan berbahan baku Asam Traneksamat pertama di Indonesia. PPI merupakan pemegang lisensi dari Daiichi-Sankyo untuk mendistribusikan produk Transamin. Transamin merupakan pilihan yang terbukti aman dan efektif menangani pendarahan dengan menghambat aktivitas dari aktivator plasminogen dan plasmin, mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet dan aktivitas faktor koagulasi serta mencegah kerapuhan dinding pembuluh darah. Transamin memiliki 4 jenis yakni Transamin Kapsul 250 mg, Transamin Tablet 500 mg, Transamin Injeksi 250 mg, dan Transamin Injeksi 500 mg.

TRANSAMIN

Transamin is the first anti-bleeding drug made from Tranexamic Acid in Indonesia. PPI is the licensee of Daiichi-Sankyo to distribute Transamin products. Transamin is a proven safe and effective option to treat bleeding by inhibiting the activity of plasminogen and plasmin activator, preventing fibrin degradation, increasing platelet aggregation and activity of coagulation factors and preventing fragility of blood vessel walls. There are 4 types of Transamin, namely Transamin Capsules 250 mg, Transamin Tablets 500 mg, Transamin Injection 250 mg, and Transamin Injection 500 mg.



FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

PPI sebagai Pedagang Besar Farmasi dengan izin dan sertifikat distribusi oleh Kementerian Kesehatan yang tersebar di 29 Kantor Cabang bekerja sama dalam mendistribusikan produk farmasi dan alat kesehatan dari PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, dan PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribusi merupakan proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat setelah proses pembuatannya. Dalam proses pendistribusiannya, PPI menjamin kualitas produk mulai dari pengadaan, penyimpanan, peraturan dan registrasi produk hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) perlu diterapkan pada fasilitas distribusi termasuk apotek agar mutu obat dapat terjaga sampai obat dikonsumsi oleh pasien.

PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES

PPI as a Pharmaceutical Wholesaler with a license and distribution certificate by the Ministry of Health spread across 29 Branch Offices cooperates in distributing pharmaceutical products and medical devices from PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, and PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribution is an important process in maintaining the efficacy, safety, and quality of a drug after the manufacturing process. In the distribution process, PPI guarantees product quality starting from procurement, storage, regulation and product registration until it reaches consumers in accordance with the Good Drug Distribution Method (CDOB) which needs to be applied to distribution facilities including pharmacies so that drug quality can be maintained until the drug is consumed by the patients.



COVARE

PPI secara aktif mengembangkan strategi pengelolaan kopi Arabika yang bersumber dari wilayah Sumatra dan Papua. Pendekatan yang dilakukan oleh PPI adalah dengan membantu proses panen, mengawasi kegiatan pasca panen, pengadaan biji kopi, dan mempromosikan produk premium. Dalam beberapa kesempatan, Kopi PPI dipamerkan di hadapan publik untuk diserap, dan mendapat tanggapan positif.

Jajaran varietas kopi yang sedang dikembangkan saat ini meliputi Kopi Papua Wamena, Sumatra Toba, Sumatra Mandailing, Aceh Gayo, dan Papua Blend. Setiap jenis memiliki profil rasa yang berbeda. Sebagai contoh, Kopi Papua Wamena memancarkan aroma yang mengingatkan pada madu, cokelat, dan karamel. Sebaliknya, Sumatra Toba menampilkan rasa herbal, cokelat, manis, pedas dengan wangi buah, diikuti dengan rasa cokelat hitam.

Dipersembahkan di bawah merek kopi PPI, Covare, inisiatif ini membangun hubungan yang kuat antara secangkir kopi dan petani, menggarisbawahi komitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik. Konsistensi alami adalah yang terpenting, yang mempengaruhi hasil dari setiap biji kopi. Dengan mensinergikan hubungan petani dengan alam, Covare menjadi platform untuk memperkenalkan biji kopi yang diproses secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon ekspresif dari konsumen berdasarkan kualitas biji kopi yang ditawarkan dan mengembalikan nilai yang dihasilkan dari setiap cangkir kepada petani.

COVARE

PPI is actively advancing strategies for the management of Arabica coffee sourced from the Sumatra and Papua regions. Our approach involves aiding the harvest process, overseeing post-harvest activities, procuring green beans, and promoting premium products. On several occasions, PPI Coffee has been showcased publicly for tasting, receiving positive feedback.

The current lineup of coffee varieties under development includes Papua Wamena Coffee, Sumatra Toba, Sumatra Mandailing, Aceh Gayo, and Papua Blend. Each type boasts distinct flavor profiles. For instance, Papua Wamena Coffee exudes aromas reminiscent of honey, chocolate, and caramel. In contrast, Sumatra Toba features a herbal, chocolatey, sweet, spicy taste with fruity undertones, followed by a dark chocolate after taste.

Presented under the PPI coffee brand name Covare, this initiative establishes a strong connection between a cup of coffee and the farmers, underscoring a commitment to producing the highest quality. Natural consistency is paramount, influencing the outcome of each coffee bean. By synergizing farmer connections with nature, Covare serves as the platform for introducing meticulously processed coffee beans. This aims to elicit an expressive response from consumers based on the offered coffee bean quality and reciprocate the value generated by each cup to the farmers.

Aspirasi mendasar PPI adalah untuk mengembangkan inisiatif kopi ini dengan mengangkat para petani, membina kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, dan tentu saja, memajukan pertumbuhan perusahaan dengan keuntungan yang terukur dan adil.

KOPI

PPI merupakan salah satu eksportir komoditas kopi. Kopi adalah jenis minuman hasil seduhan biji tanaman kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kopi dapat diproses menjadi minuman dan produk-produk dengan segudang manfaat untuk kesehatan, terdapat dua jenis varietas kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta. Adapun perbedaan antara Kopi Robusta dan Kopi Arabika diklasifikasikan berdasarkan tempat hidup, aroma dan cita rasa, proses menanam, perawatan dan ukuran biji kopi. Kopi Arabika tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat dengan bentuk biji kopi yang lonjong. Adapun Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900, idealnya 400-800 meter dari permukaan laut. Rasa Kopi Robusta cenderung lebih pahit dan kasar dengan ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan Arabika dengan bentuk bulat. Berikut ini adalah jenis-jenis kopi yang tumbuh di Indonesia:

PPI's fundamental aspiration is to cultivate this coffee initiative by uplifting farmers, fostering collaboration among all stakeholders, and, certainly, advancing the growth of the Company with measurable and equitable profits.

COFFEE

PPI is one of the exporters of coffee commodities. Coffee is a type of beverage that is brewed from the coffee plant. Indonesia is one of the largest coffee producers in the world. This plant that grows in the tropics is a leading commodity in Indonesia. Coffee can be processed into beverages and products with a myriad of health benefits. There are two types of coffee varieties that are popular in Indonesia, namely arabica and robusta coffee. The differences between Robusta Coffee and Arabica Coffee are classified based on where they grow, the aroma and taste, the growing process, the treatment and size of coffee beans. Arabica coffee grows properly at an altitude of 1000 - 2000 meters above sea level, has a slightly sour taste and a color that is not too thick with an oval shape of coffee beans. The Robusta coffee grows properly at an altitude of 0-900, ideally 400-800 meters above sea level. The taste of Robusta coffee tends to be more bitter and coarse with a smaller bean size than Arabica with a round shape. The following are the types of coffee that grow in Indonesia:



Jenis Kopi Types of Coffee	Keterangan Description
Kopi Aceh Aceh Coffee	Kopi Aceh tersebar di sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera merupakan penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia, dengan kualitas yang baik dengan cita rasa unik, keunikan kopi ini berasal dari karakteristik aroma dan rasa kopinya yang khas. Perkebunan Kopi Aceh berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl. Aceh coffee, spread along the Barisan mountain range in Sumatra Island, is the producer of the finest Arabica coffee in Indonesia, boasting excellent quality with a unique flavor profile. The uniqueness of this coffee stems from its distinct aroma and flavor characteristics. Aceh coffee plantations are situated at elevations ranging from 1000 to 1200 meters above sea level (masl).
Kopi Sumatera Sumatran Coffee	Kopi Sumatra merupakan salah satu varietas kopi yang memiliki tekstur halus dan cita rasa paling berat dan kompleks di antara beragam kopi lainnya. Ketinggian pertumbuhan Kopi Sumatera berada pada 800 - 1500 mdpl. Sumatra coffee is one of the coffee varieties known for its smooth texture and the heaviest and most complex flavor among various coffee types. The growth elevation of Sumatra coffee ranges from 800 to 1500 masl.
Kopi Sulawesi Sulawesi Coffee	Kopi Sulawesi mempunyai karakter rasa unik dengan aroma yang kuat dan rasa yang sedikit gurih, biji buah yang tebal serta keasaman yang rendah. Pertumbuhan kopi ini berada di ketinggian 1500 - 1900 mdpl. Sulawesi coffee possesses a unique flavor profile with a strong aroma, slightly savory taste, thick fruit beans, and low acidity. The growth of this coffee occurs at elevations between 1500 to 1900 masl.
Kopi Jawa Javanese Coffee	Kopi Jawa memiliki ukuran biji yang lebih kecil, dengan kandungan kafein yang rendah, serta rasa dan aroma yang nikmat. Kopi Jawa memiliki karakteristik aroma tipis rempah dengan kekentalan dan keasaman medium dan rasa yang seimbang, dengan ketinggian tanaman 1000 - 1500 mdpl. Javanese coffee features smaller beans, low caffeine content, and delightful taste and aroma. Javanese coffee is characterized by a thin spice aroma with medium thickness and acidity, offering a balanced taste. The plants grow at elevations between 1000 to 1500 masl.
Kopi Papua Papuan Coffee	Kopi Papua terkenal memiliki rasa yang seimbang dan lembut, dengan rasa asam dan aroma yang khas bernuansa cokelat dan floral yang harum. Kopi ini terletak di sepanjang lembah yang mengelilingi Kota Wamena pada ketinggian 1200 - 1600 mdpl yang merupakan tanah vulkanik dengan suhu mencapai 15°C saat malam hari. Papuan coffee is known for its balanced and smooth taste, with a unique acidity and aroma reminiscent of chocolate and fragrant floral notes. This coffee is located along the valleys surrounding Wamena City at elevations of 1200 to 1600 masl, on volcanic soil with temperatures dropping to 15°C at night.

BERAS

PPI kerap diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk membantu menyerap hasil produksi gabah petani dengan tujuan untuk menstabilkan harga beras petani. PPI juga membranding produk beras yang sebelumnya merupakan komoditi non-branded, menjadi produk yang memiliki diferensiasi, eksklusif, dan dengan mengedepankan aspek komersial dan terukur.

RICE

PPI is often assigned by the Government to help absorb farmers' grain production with the aim of stabilizing farmers' rice prices. PPI also brands rice products that were previously non-branded commodities, into products that are differentiated, exclusive, and by prioritizing commercial and measurable aspects.



Branding memungkinkan produsen beras, melalui PPI, untuk membedakan produk mereka dari para pesaing di pasar. Dengan membangun identitas merek yang unik, produsen dapat menonjolkan aspek kualitas, variasi, asal, atau keberlanjutan dari beras mereka, sehingga menonjol di antara produk sejenis.

Selain itu PPI juga turut berperan dalam mendukung stabilitas pangan nasional dengan mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Melalui kegiatan distribusi ini, PPI berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan ketahanan pangan nasional.

OKEMAM

Setiap tetes Okemam sabun pencuci piring mengandung ekstrak jeruk nipis yang ampuh untuk membantu menghancurkan kelebihan lemak dan minyak, aroma jeruk nipis yang kuat mampu menghilangkan bau sisa makanan pada peralatan dapur sekalipun wadah plastik.

Okemam mengandung jenis bahan aktif surfaktan anionic yang dapat larut dalam air sehingga cepat membersihkan dan menghancurkan lemak. Umumnya surfaktan berfungsi membersihkan karena mempunyai sifat yang dapat melebur dengan zat-zat lainnya sehingga dapat membungkus dan menghilangkan kotoran berminyak.

JAGUNG

PPI mendorong volume produksi jagung dari petani lokal untuk diolah sebagai pakan ternak yang mampu memberikan peluang besar bagi pertumbuhan komoditas jagung. Jagung dipilih sebagai pakan utama ternak karena kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya, 70% karbohidrat, 10% protein dan 5% lemak.

Branding allows rice producers, through PPI, to differentiate their products from competitors in the market. By building a unique brand identity, producers can highlight the quality, variety, origin, or sustainability aspects of their rice, thus standing out among similar products.

In addition, PPI also plays a role in supporting national food stability by distributing Stabilization of Food Supply and Prices (SPHP) rice. Through this distribution activity, PPI contributes to maintaining the availability and affordability of rice prices for the community, which aligns with government efforts to control inflation and ensure national food security.

OKEMAM

Every drop of Okemam dishwashing soap contains powerful lime extract to help destroy excess fat and oil. The strong lime aroma is able to remove the smell of food residue on kitchen utensils, even plastic containers.

Okemam contains anionic surfactant active ingredients that can dissolve in water, making it quickly cleans and destroys fat. Generally, surfactants have a cleaning function because they have the property of being able to mix with other substances, enabling them to wrap and remove oily dirt.

CORN

PPI increases the volume of corn production from local farmers to be processed as animal feed which is able to provide great opportunities for the growth of corn commodities. Corn is chosen as the main feed for livestock because of its nutritional content, 70% carbohydrates, 10% protein and 5% fat.



REMPAH-REMPAH

PPI memiliki komoditas ekspor andalan: rempah-rempah, bahan botani yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Bahan-bahan serbaguna ini berfungsi sebagai bumbu penting dalam aplikasi kuliner dan menjadi komponen penting dalam pengobatan tradisional, formulasi kecantikan, farmasi, wewangian, produksi sabun, dan berbagai industri lainnya.

SPICES

PPI boasts a flagship export commodity: spices, botanical ingredients known for their strong aromas and flavors. These versatile ingredients serve as essential seasonings in culinary applications and serve as fundamental components in traditional medicine, beauty formulations, pharmaceuticals, perfumery, soap production, and various other industries.



Jenis Rempah-rempah Types of Spices	Keterangan Description
Pala Nutmeg	Tanaman pala memiliki daun elips yang ramping, buah seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri. Berasal dari: Ternate, Banda, Siau, Manado, dan Halmahera, tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 500- 700 meter, di atas permukaan laut. Nutmeg plant has slender elliptical leaves, fruit like lemon, yellow in color, and has a distinctive aroma because it contains essential oils. It Coming from Ternate, Banda, Siau, Manado, and Halmahera, it grows well in areas that have an elevation of 500-700 meters, above sea level.
Kapulaga Cardamom	Kapulaga disebut sebagai salah satu rempah-rempah termahal di dunia setelah kunyit dan vanila. Berasal dari Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Kapulaga dapat tumbuh pada ketinggian 200- 1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh secara optimal dari 300 hingga 500 m di atas permukaan laut. Cardamom is named as one of the most expensive spices in the world after turmeric and vanilla. It grows in West Java and South Sumatra. Cardamom can grow at an elevation of 200-1000 meters above sea level and can grow optimally from 300 to 500 meters above sea level.
Lada Hitam Black Pepper	Lada hitam adalah buah mentah dari tanaman Piper nigrum yang telah dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, lada hitam telah dikonsumsi turun-temurun untuk mengobati gejala gangguan pencernaan maupun kondisi lainnya, termasuk: perut kembung, sakit perut, anoreksia, ulkus peptikum, nyeri perut, kram, diare, sembelit, bronkitis dan kanker. Black pepper is the unripe fruit of the Piper nigrum plant that has been dried. Apart from being used as a cooking spice, black pepper has been consumed for generations to treat symptoms of indigestion and other conditions, including: flatulence, stomach pain, anorexia, peptic ulcer, stomach pain, cramps, diarrhea, constipation, bronchitis and cancer.
Lada Putih White Pepper	Lada putih adalah rempah-rempah bercita rasa pedas dan mempunyai warna putih. Lada putih biasa dijual dalam bentuk butiran mentah atau sudah ditumbuk, yang didapatkan dari tanaman lada atau piper albi linn dan memberikan efek hangat dan pedas ketika dikonsumsi. Lada putih menjadi primadona dalam berbagai masakan dan menjadi item wajib di dapur. White pepper is a spice that has a spicy taste and white color. White pepper is usually sold in the form of raw or ground granules, which is obtained from the pepper plant or piper albi linn and gives a warm and spicy effect when consumed. White pepper is excellent in various dishes and is a mandatory ingredient in the kitchen.
Cengkeh Clove	Cengkeh adalah kuncup bunga aromatic dari pohon di keluarga Myrtaceae, Syzygium aromaticum. Mereka adalah asli Kepulauan Maluku (dari Maluku) di Indonesia, dan umumnya digunakan sebagai rempah-rempah. Cengkeh tersedia sepanjang tahun karena musim panen yang berbeda di berbagai negara. Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family of Myrtaceae, Syzygium aromaticum. They are native to the Maluku Islands (from the Maluku) in Indonesia, and are commonly used as a spice. Cloves are available all year round due to different harvest seasons in different countries.

KELAPA DAN TURUNANNYA

Kelapa dikenal karena keserbagunaan dan nilai ekonominya, dengan berbagai bagian pohon yang menawarkan sumber daya berharga yang dapat digunakan dalam berbagai industri. Budidaya kelapa tersebar luas di seluruh Indonesia, dengan daerah penghasil utama kelapa termasuk Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, iklim yang mendukung, dan area budidaya yang luas telah mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam produksi kelapa dunia, mengukuhkan statusnya sebagai produsen kelapa nomor satu di dunia.

Kelapa yang dihasilkan telah menjadi salah satu komoditas ekspor PPI. Kelapa memiliki beragam diversifikasi produk, antara lain: Arang Kelapa, Minyak Kelapa, Santan, Sabut Kelapa, dan Gula Kelapa.

COCONUT AND ITS DERIVATIVES

Coconut palm is well-known for its versatility and economic significance, with various parts of the tree offering valuable resources that can be utilized in numerous industries. Its cultivation is widespread across Indonesia, with major coconut-producing regions including Sumatra, Java, Sulawesi, Bali, and the Lesser Sunda Islands. Indonesia's abundant natural resources, favorable climate, and extensive cultivation areas have driven it to the forefront of global coconut production, bolstering its status as the world's number one producer of coconuts.

The Coconuts produced has become one of PPI's export commodities. Coconut has a variety of product diversification, including: Coconut Charcoal, Coconut Oil, Coconut Milk, Coconut Coir, and Coconut Sugar.



MINYAK KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA

Minyak kelapa sawit mentah merupakan salah satu komoditas ekspor PPI. Minyak ini merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia, digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, industri farmasi, dan juga sebagai sumber bahan bakar nabati atau biodiesel.

CRUDE PALM OIL AND ITS DERIVATIVES

Crude palm oil is one of PPI's export commodities. It is one of the most consumed and produced oils in the world, used as raw material for cooking oil, margarine, soap, cosmetics, steel industry, wire, radio, pharmaceutical industry, and also as a source of biofuel or biodiesel.



KAKAO

PPI juga mengekspor biji kakao atau biji coklat. Sebelum diekspor, biji coklat harus melalui proses fermentasi dan pengeringan untuk kemudian diolah lebih lanjut. Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan bubuk kakao (coklat), yang kemudian diolah lagi menjadi kue, es krim, makanan ringan, susu, dan lain-lain.

Indonesia pada tahun 2020, memperoleh predikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Tanaman ini tumbuh dengan baik di bawah matahari tropis Indonesia.

COCOA

PPI also exports cocoa beans or cocoa seeds. Before being exported, cocoa beans must undergo a fermentation and drying process before further processing. Cocoa beans are the primary ingredient in the production of cocoa powder (chocolate), which is then further processed into cakes, ice cream, snacks, milk, and others.

In 2020, Indonesia earned the predicate of being the world's third-largest cocoa producer. This plant thrives well under Indonesia's tropical sun.



TEH

PPI bergerak di bidang ekspor daun teh. Teh merupakan komoditas ekspor utama di Indonesia dan merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global. Daerah penghasil teh yang terkenal di Indonesia termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Teh menyajikan beragam rasa, warna, aroma, dan jenis, di antaranya adalah:

- Teh Putih: Berasal dari daun teh termuda yang ditemukan di bagian atas tanaman teh, teh putih memiliki kandungan antioksidan tertinggi dibandingkan dengan varietas teh lainnya. Teh ini menawarkan profil rasa yang lembut dan segar.
- Teh hitam, yang sangat disukai di kalangan masyarakat Indonesia, juga disebut sebagai teh merah karena warnanya yang terkadang kemerahan. Diproduksi melalui proses oksidasi yang tinggi, teh hitam menghasilkan profil rasa yang kuat yang ditandai dengan rasanya yang lebih kuat, tajam, dan sedikit pahit.
- Teh hijau, yang terkenal sebagai minuman klasik Jepang, mudah didapatkan di pasar. Tidak seperti teh hitam, teh hijau hanya mengalami sedikit oksidasi.

TEA

PPI engages in the exportation of tea. Tea stands as a cornerstone export commodity in Indonesia and ranks as the most consumed beverage globally. Notable tea-producing regions in Indonesia include West Java, Central Java, and North Sumatra. Tea presents a diverse array of flavors, colors, aromas, and types, among which are:

- White Tea: Derived from the youngest tea leaves found at the top of the tea plant, white tea boasts the highest antioxidant content compared to other tea varieties. It offers a fresh and soft flavor profile.
- Black tea, widely favored among Indonesian citizens, is also referred to as red tea due to its occasional reddish hue. Produced through a high oxidation process, black tea yields a strong flavor profile characterized by its stronger, tangy, and mildly bitter taste.
- Green tea, renowned as a quintessential Japanese beverage, is readily accessible in markets. Unlike black tea, green tea undergoes minimal oxidation. With

Dengan kadar kafein yang berada di antara teh hitam dan teh putih, teh hijau menawarkan perpaduan yang seimbang antara rasa ringan dan rasa pahit yang nyata.

caffeine levels falling between those of black and white teas, green tea offers a balanced blend of mildness and pronounced bitterness.



ROTAN

Posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir produk rotan terbesar berakar kuat pada keanekaragaman hayati yang kaya dan tradisi pemanfaatan rotan yang sudah berlangsung lama. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas yang menjadi rumah bagi beragam spesies rotan, menjadikannya lokasi utama untuk budidaya dan pemanenan rotan.

Industri rotan di Indonesia tidak hanya menjadi kontributor utama bagi perekonomian negara, namun juga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan di mana pemanenan dan pengolahan rotan lazim dilakukan. Dari pengrajin terampil yang membuat mebel rotan yang rumit hingga masyarakat lokal yang terlibat dalam praktik pemanenan rotan yang berkelanjutan, industri ini mendukung berbagai mata pencaharian di seluruh negeri.

Sektor rotan Indonesia dicirikan oleh kombinasi antara keahlian tradisional dan teknik produksi modern, menghasilkan beragam produk rotan berkualitas tinggi yang memenuhi pasar domestik dan internasional. Furniture rotan, khususnya, sangat dicari karena daya tahan, estetika alami, dan daya tariknya yang ramah lingkungan.

Selain itu, industri rotan di Indonesia telah mendapat perhatian karena potensinya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan praktik pemanenan yang bertanggung jawab, mempromosikan budidaya rotan di daerah yang terdegradasi, dan

RATTAN

Indonesia's position as one of the largest exporters of rattan products is deeply rooted in its rich biodiversity and longstanding tradition of rattan utilization. The country boasts vast tropical forests that are home to a diverse array of rattan species, making it a prime location for rattan cultivation and harvesting.

The rattan industry in Indonesia is not only a major contributor to the country's economy but also plays a crucial role in providing employment and income for many people, particularly in rural areas where rattan harvesting and processing are prevalent. From skilled artisans crafting intricate rattan furniture to local communities engaged in sustainable rattan harvesting practices, the industry supports a wide range of livelihoods across the country.

Indonesia's rattan sector is characterized by a combination of traditional skill and modern production techniques, resulting in a diverse range of high-quality rattan products that meet both domestic and international markets. Rattan furniture, in particular, is highly sought after for its durability, natural aesthetic, and eco-friendly appeal.

Furthermore, the rattan industry in Indonesia has received attention for its potential to promote sustainable development and environmental conservation. Efforts have been made to implement responsible harvesting practices, promote rattan cultivation in degraded areas, and support local communities in managing rattan resources sustainably.

mendukung masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya rotan secara berkelanjutan.

PPI sebagai *trader* produk furniture dan kerajinan Indonesia melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan material rotan alami dengan berbagai jenis desain kursi dan meja rotan beragam sesuai fungsinya. Industri kerajinan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan pengrajin yang terampil dan kreatif dalam menyesuaikan permintaan pasar dalam dan luar negeri.

PPI as a trader of Indonesian furniture and handicraft products conducts domestic and foreign trade with natural rattan materials with various types of rattan chair and table designs varying according to function. This handicraft industry is spread throughout Indonesia with skilled and creative craftsmen in adjusting domestic and foreign market demand.



IKAN

Perikanan di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu ekosistem laut yang paling luas dan beragam di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas. Sebagai hasilnya, perikanan dan akuakultur merupakan kontributor yang signifikan terhadap PDB, lapangan kerja, dan gizi Indonesia.

PPI sebagai pengambil alih produk perikanan dari BUMN Holding Pangan, menyediakan produk ikan segar dan ikan beku untuk pasar dalam dan luar negeri.

FISH

Fisheries in Indonesia play a crucial role in the country's economy, food security, and livelihoods. Indonesia has one of the most extensive and diverse marine ecosystems globally, with over 17,000 islands and vast ocean territories. As a result, fisheries and aquaculture are significant contributors to Indonesia's GDP, employment, and nutrition.

As fishery product offtaker from SOE Food Holding, PPI provides fresh and frozen fish products for domestic and foreign markets.



RUMPUT LAUT

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati laut berupa spesies rumput laut, juga merupakan negara eksportir terbesar untuk komoditas rumput laut kering.

PPI memiliki komoditas andalan ekspor rumput laut dengan jenis *Seaweed Eucheuma Cottoni* dan *Seaweed Eucheuma Spinosum*. Pemenuhan komoditas ini melalui kerja sama dengan petani lokal rumput laut yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengekspos potensi komoditi Indonesia dalam memenuhi permintaan rumput laut di luar negeri.

PPI memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) Buduran berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan infrastruktur penunjang aktivitas pengolahan rumput laut yang dimiliki oleh PPI untuk menjamin proses pengemasannya.

SEAWEED

Indonesia has a source of marine biodiversity in the form of seaweed species, and is also the largest exporter of dried seaweed commodities.

PPI has a mainstay export commodity for seaweed, namely Seaweed Eucheuma Cottoni and Seaweed Eucheuma Spinosum. Fulfillment of this commodity is through collaboration with local seaweed farmers which aims to encourage national economic growth, exposing the potential of Indonesian commodities in meeting demand for seaweed abroad.

PPI has the Buduran Fish Processing Unit (UPI) located in Sidoarjo, East Java, which is the supporting infrastructure for seaweed processing activities owned by PPI to guarantee the packaging process.



CANGKANG KELAPA SAWIT

Cangkang kelapa sawit adalah salah satu sumber energi biomassa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Komoditas ini merupakan produk ekspor yang memiliki nilai ekonomis dan diminati masyarakat global.

Cangkang kelapa sawit berasal dari limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang mencapai 60% dari produksi minyak. Cangkang ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat karbon aktif. Karbon aktif dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain industri minyak, karet, gula dan farmasi.

PALM OIL SHELLS

Palm oil shells are an environmentally friendly and sustainable biomass energy source. This commodity is an export product that has economic value and is in demand by the global community.

Palm oil shells originate from palm oil processing waste which reaches 60% of oil production. This shell is used as an ingredient to make active carbon. Activated carbon can be used by various industries, including the oil, rubber, sugar and pharmaceutical industries.

WARUNG PANGAN

Aplikasi Warung Pangan adalah aplikasi mobile yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN, dan dikembangkan oleh PPI yang bekerja sama dengan BUMN Holding Pangan, UMKM, serta jaringan supplier lainnya. Warung Pangan hadir sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dengan menyediakan platform digital yang memfasilitasi mereka dalam menawarkan produk pangan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik kepada masyarakat luas.

Fitur yang terdapat dalam aplikasi Warung Pangan meliputi:

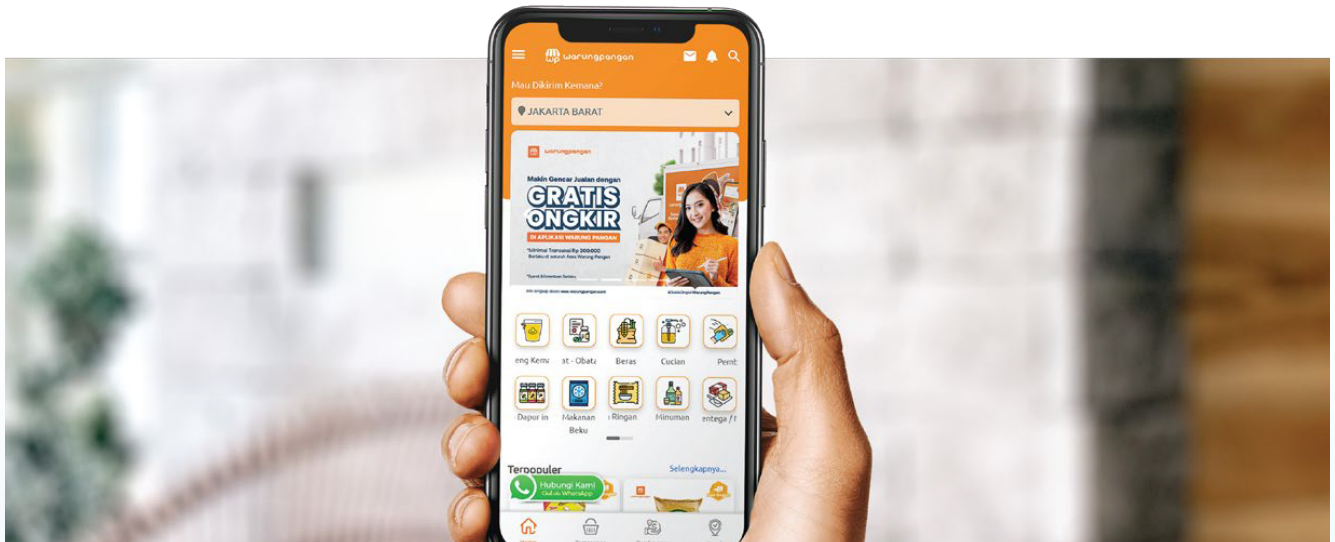
1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP
4. Mitra Get Mitra,
5. Mitra Prioritas,
6. Bayar Nanti.

WARUNG PANGAN

The Warung Pangan Application is a mobile application initiated by the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Ministry of State-Owned Enterprises, and developed by PPI in collaboration with the Food Holding SOE, SMEs, and other supplier networks. Warung Pangan serves as a solution to empower millions of sellers by providing a digital platform that facilitates them in offering food products at competitive prices and the best quality to the wider community.

Features available in the Warung Pangan application include:

1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP
4. Partner with Get Partner,
5. Priority Partner,
6. Pay Later.



PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU

PPI menyediakan layanan terpadu untuk pengelolaan limbah berbahaya B3 yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah Non-B3.

- **Pengelolaan Limbah B3**
Memberikan solusi terpadu penanganan limbah B3 yang terkoneksi dengan Sistem *Manifest* Elektronik (FestTronik) KLHK yang menghubungkan antara penghasil limbah, pengangkut limbah, dan pengelola akhir limbah yang termonitor dan terintegrasi langsung dengan sistem KLHK.
- **Pengelolaan Limbah Non B3**
Menjawab tantangan dari limbah Non B3 yang dihasilkan dari limbah industri dan rumah tangga melalui aplikasi online lapak limbah (ALITA–Angkutan Limbah Logistik Industri dan Rumah Tangga).

WASTE INTEGRATED SOLUTION

PPI provides integrated hazardous waste management services which include collection, transportation, utilization, and management of Non-Hazardous waste.

- **Hazardous Waste Management**
It provides an integrated solution for handling hazardous waste that is connected to the KLHK Electronic Manifest System (Fest Tronik) connecting waste producers, waste transporters, and final waste managers which is monitored and integrated directly with the KLHK system.
- **Non-Hazardous Waste Management**
It responds to the challenges of Non-Hazardous waste generated from industrial and household waste through the online application for waste stalls (ALITA – Transport for Industrial and Household Logistics Waste).

Berikut ini berbagai jenis limbah yang telah dikelola secara terpadu:

1. *Electronic* dan *electric waste* (pembangkit listrik, distribusi listrik, rumah tangga hingga industri).
2. *Fly ash* dan *bottom ash* dari pembangkit listrik atau pabrik pupuk.
3. Daur ulang minyak goreng bekas menjadi Biodiesel 50.
4. Pengolahan oli bekas dan limbah rumah sakit yang bekerja sama dengan mitra terpercaya.

The following are various types of waste that have been managed in an integrated manner:

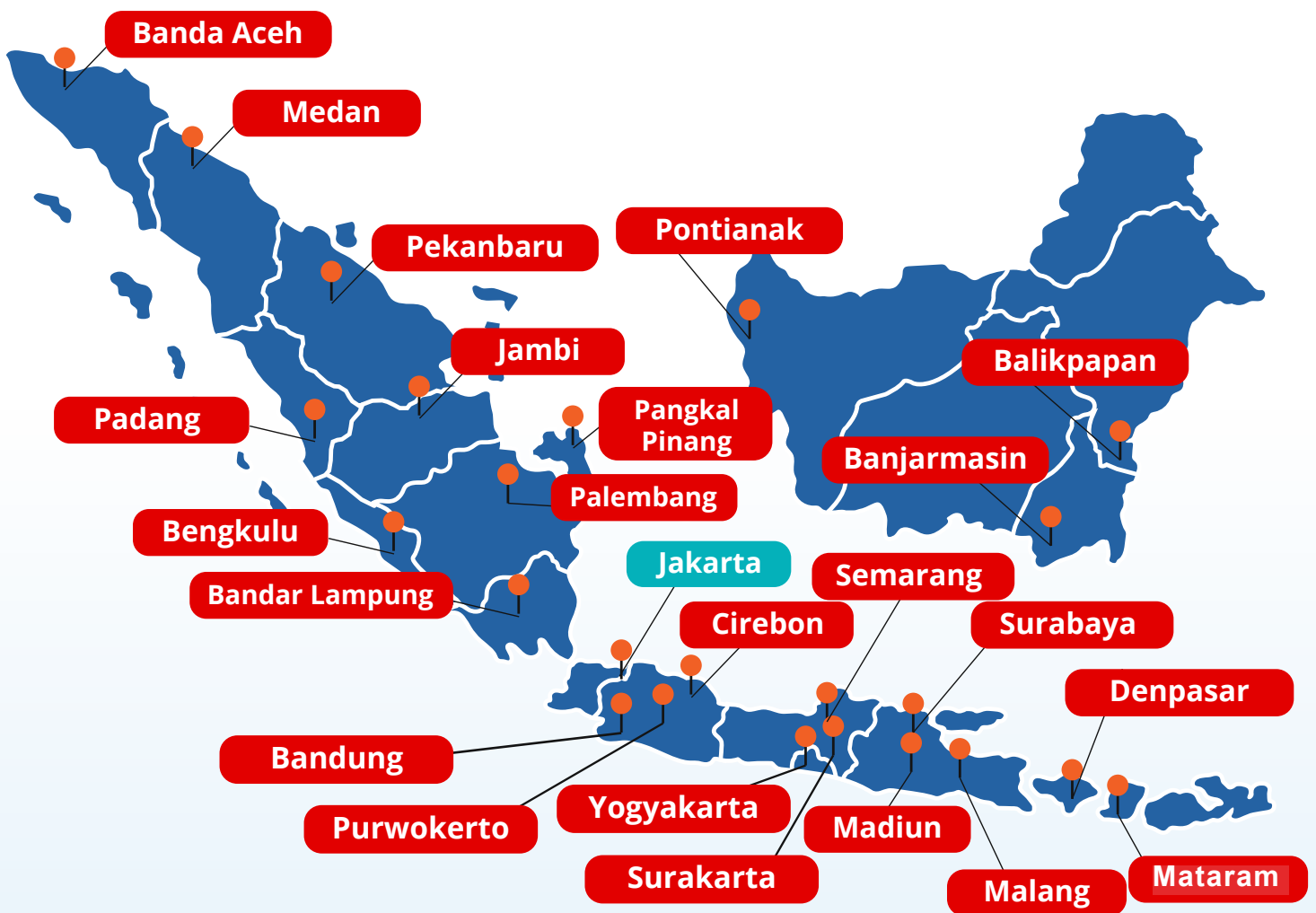
1. Electronic and electric waste (power generation, electricity distribution, household to industry).
2. Fly ash and bottom ash from power plants or fertilizer factories.
3. Recycling used cooking oil into Bio Diesel 50.
4. Treatment of used oil and hospital waste in collaboration with trusted partners.



WILAYAH OPERASI OPERATIONAL AREA

Kantor cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, membentuk jaringan bisnis yang komprehensif. Terus berkembang, Perseroan semakin memperkuat kantor-kantor cabangnya untuk mendukung operasi perdagangan, meningkatkan layanan, dan memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar dalam industri di Indonesia.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's branch offices span across numerous key cities in Indonesia, forming its comprehensive business network. Continuously evolving, the Company enhances these branches to bolster trading operations, enhance services, and seize immense market opportunities within Indonesia's industries.



Kantor Pusat | Head Office

Kantor Cabang | Branch Office



- 29 cabang dan 5 unit operasional di Seluruh Indonesia | 29 branches and 5 operational units throughout Indonesia
- 4 Gudang Stock Point | 4 Stock Point Warehouses
- 2.021 pelanggan | 2.021 costumers
- 2 Cafe Covare | 2 Covare Cafes



DAFTAR ALAMAT KANTOR

OFFICE ADDRESS LIST



Kantor Pusat Head Office

Grha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp. | Phone: (021) 3862141
Fax.: (021) 3862143

Kantor Cabang | Branch Office

No.	Nama Cabang Branch Name	Alamat Address
1	Ambon	Jl. Dr. Apituley 21/31, RT 002/RW 001, Waihaong, Nusaniwe, Maluku 97112. Telp. (0911) 344670, Fax.343897
2	Balikpapan	Jl. Gajah Mada No.22, RT 003, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur 76113. Telp. (0542) 410564, 424493, Fax. 422280
3	Banda Aceh	Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No.181, Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh 23126. Telp. (0651) 22231. 22093. 23080, Fax. 33150
4	Bandar Lampung	Jl. Jend. Sudirman No.22, RT 007/RW 001, Enggal, Bandar Lampung, Lampung 35118. Telp. (0721) 266555, 266959, Fax. 266702
5	Bandung	Jl. Jawa No.12, Babakan Ciamis, RT 004/ RW 006, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Bandung 40117. Telp. (022) 4203696, 4204024, Fax. 4204027
6	Banjarmasin	Jl. R. Soeprapto No. 53 RT 001/RW 001, Antasan Besar, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan 70114. Telp. (0511) 3352095, 3354102, Fax.3352442, 3354157
7	Bengkulu	Jl. A. Yani No.28, Kebun Keling, Teluk Segara, Bengkulu 38116. Telp. (0736) 21024. Fax.22130
8	Cirebon	Jl. Kebumen No.1, Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa Barat 45111. Telp. (0231) 201153, 209765. Fax. 207368
9	Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No.117, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali. 80235. Telp. (0361) 222315, 224104. Fax. 224104
10	Gorontalo	Jl. Cendrawasih No.12, RT 005, Heledulaa Selatan, Kota Timur, Gorontalo 96118. Telp. (0435) 821443, 821042. Fax. 829944
11	Jakarta	Jl. Malaka No.7-9, RT 007/RW 003, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230. Telp. (021) 6927519, 6928030. Fax. 691162
12	Jambi	Jl. Serunai Malam II, No.66, RT 001, Suka Karya, Kota Baru, Kota Jambi 36127. Telp. (0741) 43246, Fax. 40269
13	Kendari	Jl. Jenderal A. Yani, No.218, Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93118. Telp. (0401) 3122425. Fax.3122425
14	Kupang	Jl. Kakatua No.24, RT 003/RW004, Bonipoi, Kota Lama, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85221. Telp. (0380) 833617. 833294 ,Fax. 833294
15	Madiun	Jl. DR Sutomo No.33, RT 023/RW 007, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur 63116. Telp. (0351) 452057, 454470, Fax. 452057
16	Makassar	Jl. Bali No.9, Pattunuang, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan 90173. Telp. (0411) 3635421. Fax. 3635361
17	Malang	Jl. Ahmad Yani Utara No.2, RT 001/RW 001, Polowijen, Sukun, Malang, Jawa Timur 65126. Telp. (0341) 485995, Fax. 491864
18	Manado	Jl. Garuda No.16, Mahakeret Barat, Wenang, Manado, Sulawesi Utara 95111. Telp. (0431) 862066, 862366. Fax. 863221
19	Mataram	Jl. TGH Saleh Hambali No. 88, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361. Telp/Fax. (0370) 631288
20	Medan	Jl. Badur No. 3, Hamdan, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara 20151. Telp. (061) 4530933



No.	Nama Cabang Branch Name	Alamat Address
21	Padang	Jl. Jend. Sudirman No. 37, Padang Pasir, Padang Barat, Padang, Sumatera Barat 25215. Telp. (0751) 23491
22	Palembang	Jl. Kap. A. Rivai No. 41, RT 022/ RW 005, 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, 30134. Telp. (0711) 351164, Fax. 312963
23	Palu	Jl. Sungai Wera No. 4, RT 001/ RW 004, Ujuna, Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah 94222. Telp. (0451) 8204242. Fax. 421397
24	Pekanbaru	Jl. Nuri No.19, RT 004/ RW 008, Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, 286124. Telp. (0761) 25105, Fax. 853823
25	Pontianak	Jl. Kapten Marsan No. 3, Darat Sekip, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat 78117. Telp. (0561) 732119, Fax. 734254
26	Purwokerto	Jl. Jend. Sudirman No.347, RT 004/ RW 007, Kranji, Purwokerto Tumur, Banyumas, Jawa Tengah 53116. Telp. (0281) 636583
27	Semarang	Jl. Mpu Tantular No. 20, RT 001/ RW 011, Bandarharjo, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50175. Telp. (024) 3546161, Fax. 3546161
28	Surabaya	Jl. Rajawali No.54, RT 007/ RW 015, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60176. Telp. (031) 3520041, Fax. 3520041
29	Yogyakarta	Kompleks EMPLS. PT. KAI, Jl. Lempuyangan, RT 037/ RW 007, Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 55212. Telp. (0274) 547533, Fax. 586640

Unit Operasional | Operational Unit

No.	Unit Operasional Operational Unit	Alamat Address
1	Pangkal Pinang	Jl. Hamidah, No. 38, Taman Sari, Bangka Belitung 33121, Telp. 0717 – 432557
2	Parepare	Jl. Atletik, No. 50, Kel. Kampung Baru, Kec. Baeukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111, Telp. 0421 – 25205
3	Surakarta	Jl. Letjend. Sutoyo, No. 52, Jawa Tengah 57136, Telp. 0271 – 852323, 852755
4	Bandar Jaya	Jl. Proklamator LK No.2, Desa Seputih kaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Lampung, Telp. 0726 -750486
5	Tulang Bawang	Jl. Perintis Unit II, Kel.Tri Tunggal Jaya, Kec.Banjar Agung, Kabupateng Tulang Bawang, Lampung, Telp. 0275-25725

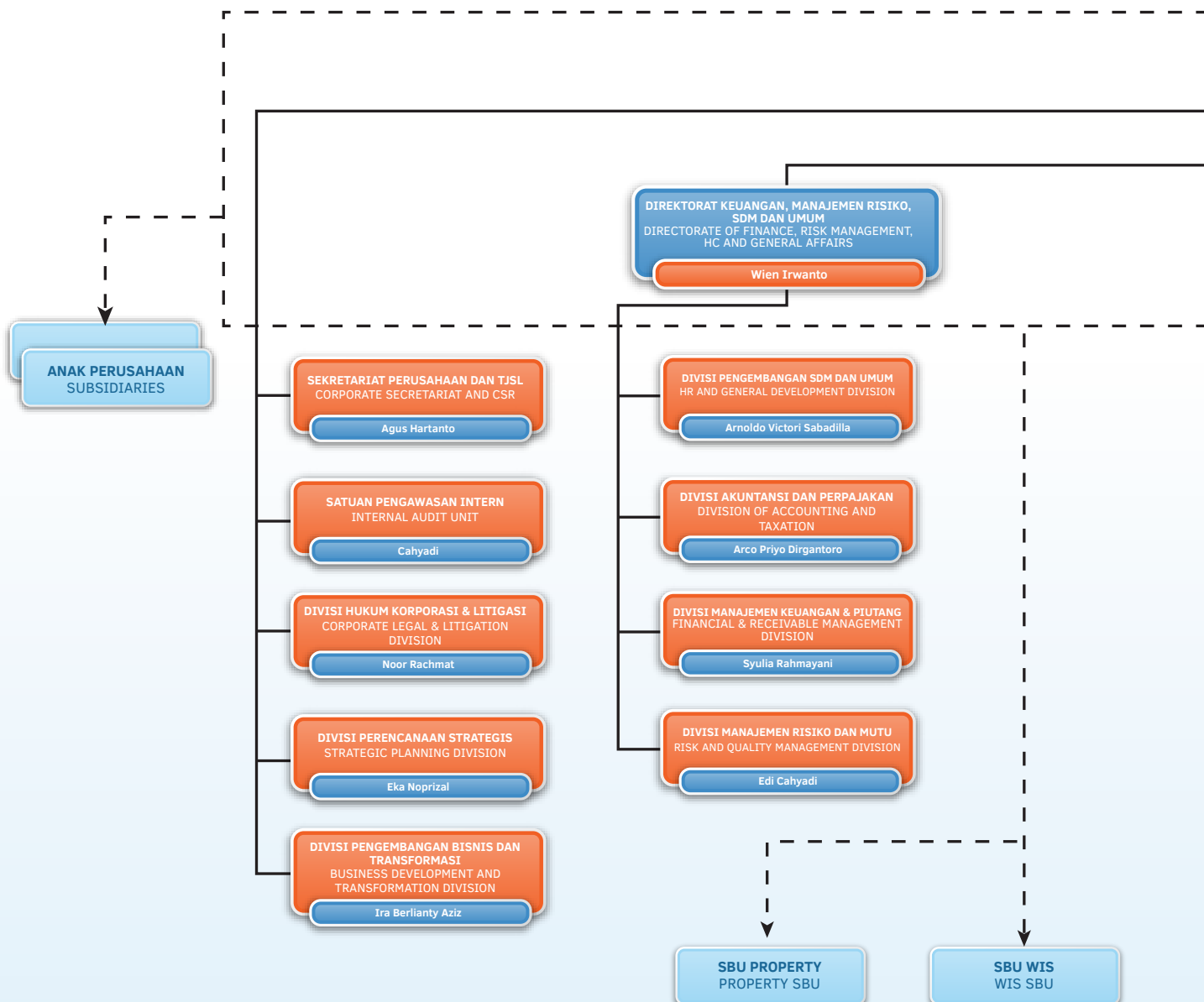
KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP

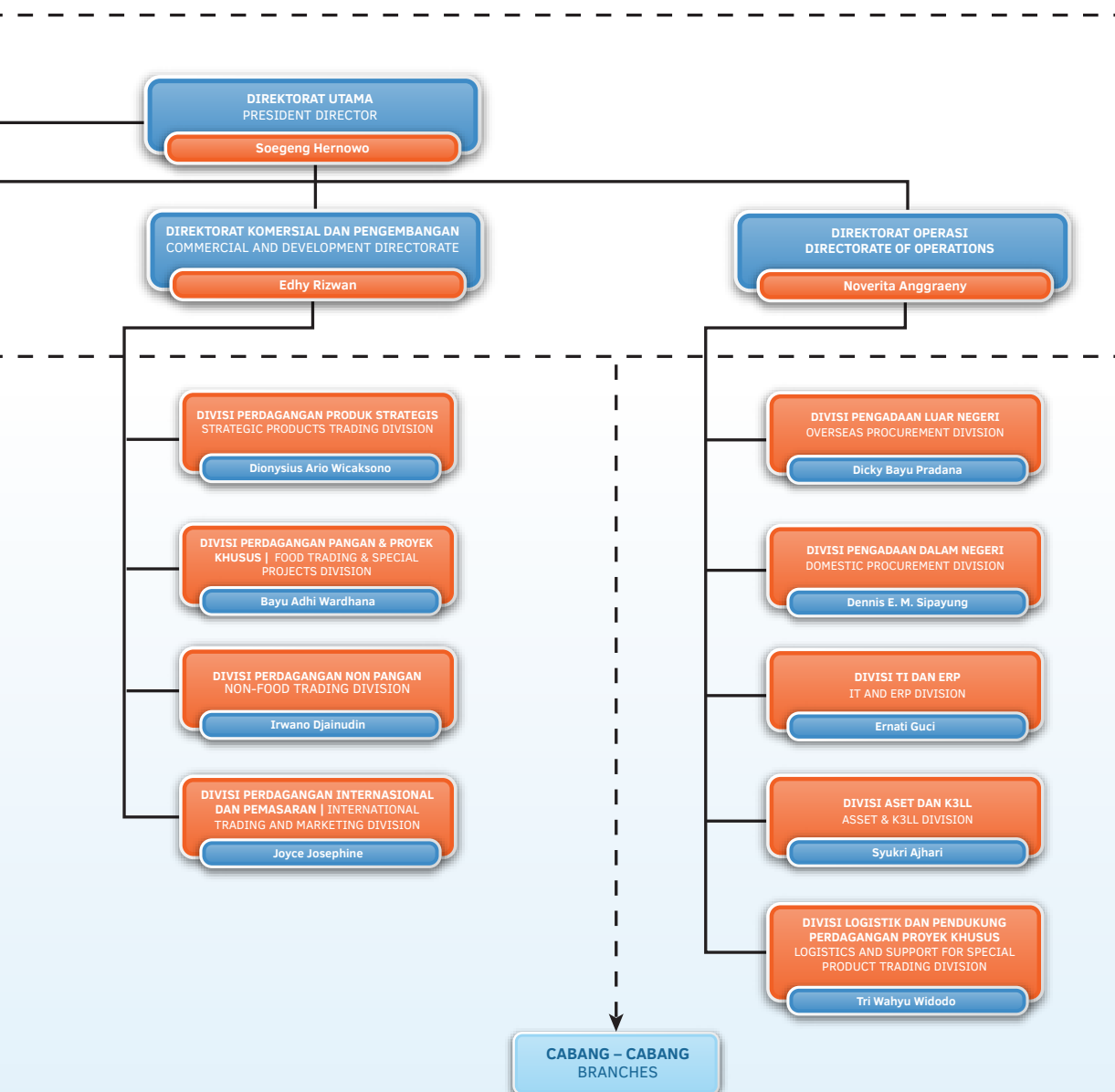
Nama Asosiasi Association	Lingkup Scope	Status
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce and Industry	Nasional National	Anggota Biasa Regular Member
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Mechanical and Electrical Technics Enterprises Association	Provinsi Province	Anggota Member
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Indonesian Supplier and Distributor Association	Provinsi Province	Anggota Member

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi PPI diatur berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The PPI Organizational Structure is regulated pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 on the Organizational Structure of the Head Office and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.





PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2024

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners Throughout 2024

Periode 1 Januari s.d. 18 Oktober 2024 January 1 to October 18, 2024 Period	Periode 18 Oktober s.d. 31 Desember 2024 October 18 to December 31, 2024 Period	Keterangan Description
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	-
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	-
	Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 dan No. 127/Kep. PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Appointed as Independent Commissioner pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 and No. 127/Kep. PS/RNI.01/X/2024 on the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Hamli
Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan:
18 Desember 2023 s.d.
2 April 2025,
Periode Pertama
Term of Office:
December 18, 2023 to
April 2, 2025,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 62 tahun | 62 years old

Kelahiran Sampang, 4 Juli 1962 | Born in Sampang, July 4, 1962

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama melalui No. SK-360/MBU/2023 dan Nomor 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. He was appointed as President Commissioner through Decree No. SK-360/MBU/2023 and No. 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023.

Pendidikan | Education

- Sarjana Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1987) | Bachelor of Engineering, majoring in Chemical Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (1987)
- Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999) | Master of Economics from University of Indonesia (1999)

Riwayat Profesi | Professional History

- Kepala Bidang Fisika Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2010) | Head of Forensic Physics Division, Forensic Laboratory Center, Criminal Investigation Unit of the National Police (2010)
- Kepala Bagian Operasi - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2010-2014) | Head of Operations Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2010-2014)
- Analis Kebijakan Bidang Penindakan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2014-2015) | Policy Analyst for Enforcement - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2014-2015)
- Kepala Bidang Pencegahan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2015-2017) | Head of Prevention Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2015-2017)
- Direktur Pencegahan BNPT (2017 - 2020) | BNPT Prevention Director (2017 - 2020)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: tidak ada | Within the Company: none

Di luar Perusahaan: tidak ada | Outside the Company: none

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



**Setiawan
Wangsaatmaja**
Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan:
2 Desember 2021 s.d. sekarang,
Periode Pertama
Term of Office:
December 2, 2021 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 60 tahun | 60 years old

Kelahiran Bandung, 26 Agustus 1963 | Born in Bandung, August 26, 1963

Domisili | Domicile

Bandung, Jawa Barat, Indonesia | Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

- Sarjana Teknik Lingkungan ITB (1989) | Bachelor of Environmental Engineering, ITB (1989)
- Magister Sanitary Engineering IHE DELFT (1994) | Master of Sanitary Engineering, IHE DELFT (1994)
- Magister Environmental Engineering Asian Institute of Technology (1997) | Master of Environmental Engineering, Asian Institute of Technology (1997)
- Doktor Teknik Lingkungan ITB (2004) | Doctor of Environmental Engineering, ITB (2004)

Riwayat Profesi | Professional History

- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2008 -2013) | Head of the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) - West Java Government (2008 -2013)
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013 – 2020) | Deputy for Apparatus Human Resources – Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2013 – 2020)
- Sekretaris Daerah - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2020 – 2023) | Regional Secretary - Regional Government of West Java (2020 – 2023)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: tidak ada | Within the Company: none

Di luar Perusahaan: tidak ada | Outside the Company: none

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Gigih Guntoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan:
18 Oktober 2024 s.d. sekarang,
Periode Pertama
Term of Office:
October 18, 2024 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 48 tahun | 48 years old

Kelahiran Malang, 6 Januari 1976 | Born in Malang, January 6, 1976

Domisili | Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia | Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: SK-228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

- Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (tahun 1995) | Bachelor of Industrial Engineering, Adhi Tama Institute of Technology, Surabaya (1995)
- Magister jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia (tahun 2006) | Master of Sociology, University of Indonesia (2006)

Riwayat Profesi | Professional History

- Koordinator Riset Provinsi - Dirjen Migas Kementerian ESDM dan PT Koneba (2006 - 2006) | Provincial Research Coordinator - Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Koneba (2006 - 2006)
- Manager Operasional - PT Aviyasa Consulting (2008 - 2012) | Operational Manager - PT Aviyasa Consulting (2008 - 2012)
- Anggota Tim - BNP2TKI (2012 - 2012) | Team Member - BNP2TKI (2012 - 2012)
- Koordinator Tim - Mapping Sosial Politik Dampak Isu Century Gate (2013 - 2013) | Team Coordinator - Socio-Political Mapping of the Impact of the Century Gate Issue (2013 - 2013)
- Koordinator Tim - Riset Pencitraan Calon Kepala Daerah (2013 - 2013) | Team Coordinator - Regional Head Candidate Image Research (2013 - 2013)
- Tenaga Ahli - PT Indonesia Power (2014 - 2015) | Expert Staff - PT Indonesia Power (2014 - 2015)
- Manager Operasional - PT Consolidated Services International Inc. (2017 - sekarang) | Operations Manager - PT Consolidated Services International Inc. (2017 - present)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Di dalam Perusahaan: tidak ada | Within the Company: none

Di luar Perusahaan: tidak ada | Outside the Company: none

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Di sepanjang tahun 2024 Perseroan tidak melakukan perubahan susunan Direksi

Throughout 2024, there were no changes to the composition of the Board of Directors.



Soegeng Hernowo

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan:
26 Juni 2023 s.d. sekarang,
Periode Pertama
Term of Office:
June 26, 2023 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 61 tahun | 61 years old

Kelahiran Jakarta, 21 Juli 1964 | Born in Jakarta, July 21, 1964

Domisili | Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SK-169/MBU/06/2023 dan Nomor 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SK-169/MBU/06/2023 and Number 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

- Sarjana Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) (1989) | Bachelor's Degree in Agricultural Economics and Resources, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (IPB) (1989)
- Magister Manajemen, PPM School of Management (2003) | Master of Management, PPM School of Management (2003)

Riwayat Profesi | Professional History

- Kepala Divisi State Owned Enterprise (SOE) Bisnis 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020) | Head of State Owned Enterprise (SOE) Business Division 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020)
- Kepala Divisi Bisnis Menengah dan Non Agri PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 – 2021) | Head of Medium and Non-Agricultural Business Division, PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 – 2021)
- Komisaris Independen PT BRI Asuransi Indonesia (2021 – 2023) | Independent Commissioner of PT BRI Asuransi Indonesia (2021 – 2023)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. | Has no concurrent positions, either within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Wien Irwanto

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum

Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs

Periode Jabatan:

1 Juli 2021 s.d. sekarang,
Periode Pertama

Term of Office:

July 1, 2021 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 51 tahun | 51 years old

Kelahiran Surabaya, 7 Juni 1972 | Born in Surabaya, June 7, 1972

Domisili | Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan (1996) | Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Parahyangan Catholic University (1996)
- Magister Ekonomi – Jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2009) | Master of Economics – Department of Islamic Economics of the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2009)

Riwayat Profesi | Professional History

- Asisten Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II, Kementerian BUMN RI (2016- 2019) | Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services & Consultants II, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia (2016-2019)
- Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019) | Commissioner of PT Mandiri Sekuritas (2019)
- Asisten Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, Kementerian BUMN RI (2019) | Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I, Ministry of SOEs (2019)
- Direktur Komersil PTPN XII (2019-2020) | Commercial Director of PTPN XII (2019-2020)
- Komisaris PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021) | Commissioner of PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. | Has no concurrent positions, either within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Edhy Rizwan

Direktur Komersial & Pengembangan

Director of Commercial & Development

Periode Jabatan:

26 Juni 2023 s.d. sekarang,
Periode Pertama

Term of Office:

June 26, 2023 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 57 tahun | 57 years old

Kelahiran Malang, 23 Maret 1968 | Born in Malang, March 23, 1968

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 dan No: 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 and No: 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Merdeka (1991)

Bachelor's Degree in Accounting Economics, Merdeka University (1991)

Riwayat Profesi | Professional History

- Dewan Komisaris PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023) | Commissioner of PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023)
- Direktur PT Estika Tata Tiara Tbk (2023) | Director of PT Estika Tata Tiara Tbk (2023)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. | Has no concurrent positions, either within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.



Noverita Anggraeny

Direktur Operasi

Director of Operations

Periode Jabatan:

18 Desember 2023 s.d. sekarang,
Periode Pertama

Term of Office:

December 18, 2023 to present,
First Term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 51 tahun | 51 years old

Kelahiran Jakarta, 28 November 1973 | Born in Jakarta, November 28, 1973

Domisili | Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum | Appointment History and Legal Basis

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SK-362/MBU/12/2023 dan Nomor 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. | Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SK-362/MBU/12/2023 and Number 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pendidikan | Education

- S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti (1998) | Bachelor of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Planning, Trisakti University (1998)
- S2 Program Magister Management, Jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Gajah Mada (2000) | Master of Management Program, Department of Marketing Management, Gajah Mada University (2000)

Riwayat Profesi | Professional History

- VP Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021) | VP of Risk Governance and Strategic Planning Unit, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021)
- VP Departemen Manajemen Risiko, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021 – 2022) | VP of Risk Management Department, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021 – 2022)
- Kepala Sekretariat Perusahaan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2022 – sekarang) | Corporate Secretariat Head, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2022 – present)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. | Has no concurrent positions, either within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali. | He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors, or the major/controlling shareholders.

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan PPI tercatat sebanyak 1.396 orang, yang terdiri dari 511 orang pegawai pada Perusahaan Induk dan 885 orang pegawai Entitas Anak. Hal ini meningkat dibanding tahun 2023 dimana jumlah karyawan Perseroan tercatat 1.298 orang, termasuk 781 orang yang diperbantukan ke anak perusahaan. Jumlah karyawan PPI mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 98 orang.

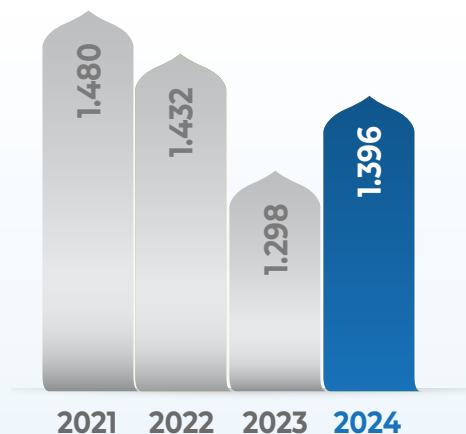
Uraian lengkap mengenai demografi karyawan PPI selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

As of December 31, 2024, there were 1,396 PPI employees, consisting of 511 employees at the Parent Company and 885 employees at Subsidiaries. This number increased compared to 2023 of 1,298 employees, including 781 employees who were seconded to subsidiaries. The number of PPI employees has increased compared to the previous year by 98 employees.

A detailed description of PPI employee demographics over the last 4 (four) years is presented in the following table:

Keterangan Description	2024			2023	2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total			
Jumlah Karyawan Number of Employees	511	885	1.396	1.298	1.432	1.480



Perkembangan Jumlah Karyawan PPI 2021-2024
PPI Number of Employees Development 2021-2024



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan | Employee Composition by Position

(orang | employee)

Keterangan Description	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
Kepala Divisi Head of Division	19	13	32	17	15	32	-	-
Kepala Cabang Head of Branch	23	21	44	30	25	55	(11)	(20,00%)
Deputy	7	-	7	-	-	-	-	-
Fungsional Utama Main Functional	6	-	6	4	-	4	2	50,00%
Spesialis Utama Senior Specialist	-	36	36	-	32	32	4	12,50%
Manager	52	48	100	52	45	97	3	3,09%
Fungsional Madya Intermediate Functional	8	-	8	2	-	2	6	300,00%
Kepala Gudang Head of Warehouse	-	258	258	19	236	255	3	1,18%
Asisten Manager Assistant Manager	58	107	165	106	95	201	(36)	(17,91%)
Supervisor	32	-	32	-	-	-	-	-
Officer	136	384	520	154	315	469	51	10,87%
Fungsional Muda Young Functional	25	-	25	5	-	5	20	400,00%
Salesman	86	-	86	71	-	71	15	21,13%
Apoteker Pharmacist	30	-	30	30	-	30	-	-
Kasir Cashier	29	18	47	26	18	44	3	6,82%
Supir Driver	-	-	-	1	-	1	-	-
Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan | Employee Composition by Position Function

(orang | employee)

Fungsi Jabatan Position Function	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
Komersial Commercial	327	775	1.102	244	555	799	303	37,92%
Non Komersial Non-Commercial	184	110	294	273	226	499	(205)	(41,08%)
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin | Employee Composition by Gender

(orang | employee)

Jenis Kelamin Gender	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
Pria Male	325	749	1.074	327	665	992	82	8,27%
Wanita Female	186	136	322	190	116	306	16	5,23%
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Employee Composition by Education Level

(orang | employee)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
< SMA High School	64	415	479	67	387	454	25	5,51%
Diploma	4	10	14	4	11	15	(1)	(6,67%)
Diploma-2 Diploma	1	2	3	1	2	3	-	-
Diploma-3 Diploma	43	104	147	45	89	134	13	9,70%
Strata-1 Bachelor's Degree	354	334	688	356	274	630	58	9,21%
Strata-2 Master's Degree	45	20	65	43	18	61	4	6,56%
Strata-3 Doctorate	-	-	-	1	-	1	-	-
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian | Employee Composition by Employment Status

(orang | employee)

Status Kepegawaian Employment Status	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
Tetap Permanent	458	796	1.254	449	781	1.230	24	1,95%
Tidak Tetap Non-Permanent	53	89	142	68	-	68	74	108,82%
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia | Employee Composition by Age

(orang | employee)

Usia Age	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
<25 tahun years old	3	18	21	5	1	6	15	250,00%
25-36 tahun years old	224	382	606	239	339	578	28	4,84%
37 – 45 tahun years old	167	267	434	161	236	397	37	9,32%
46 – 50 tahun years old	57	91	148	56	92	148	-	-
51 – 55 tahun years old	54	124	178	55	113	168	10	5,95%
>55 tahun years old	6	3	9	1	-	1	8	800,00%
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja | Employee Composition by Length of Service

(orang | employee)

Masa Kerja Length of Service	2024			2023			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Selisih Difference	Persentase Percentage
<5 tahun years	120	213	333	164	135	299	34	11,37%
5-10 tahun years	179	323	502	142	300	442	60	13,57%
10-15 tahun years	98	199	297	106	190	296	1	0,34%
15-25 tahun years	50	54	104	41	53	94	10	10,64%
>25 tahun years	64	96	160	64	103	167	(7)	(4,19%)
Jumlah Total	511	885	1.396	517	781	1.298	98	7,55%

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan senantiasa menaruh perhatian besar terhadap program pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan berkesinambungan. Program tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan pelatihan dan program sertifikasi karyawan.

Semua model pelatihan yang disiapkan Perusahaan dapat dilaksanakan secara internal (*in-house training*) maupun eksternal. Pelatihan internal berarti pelatihan tersebut dilakukan di dalam lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya, program pengembangan kompetensi karyawan dapat diikuti oleh semua karyawan. Kendati demikian, manajemen tetap memperhatikan analisis kebutuhan program pelatihan atau pengembangan potensi SDM masing-masing karyawan (*training need analysis*) untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syarat diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.

Setelah sesi pelatihan berakhir, manajemen akan mengevaluasi para peserta untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan jenjang karier dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Dengan adanya program pengembangan kompetensi karyawan, Perseroan optimis dapat membentuk generasi karyawan yang memiliki kinerja yang lebih efektif dengan semangat kompetitif, dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi.

EDUCATION AND TRAINING: EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company always takes into account comprehensive and sustainable HR competency development programs. The program is conducted in various forms, including training activities and employee certification programs.

All training models prepared by the Company can be implemented internally (*in-house training*) or externally. Internal training indicates that the training is conducted within the Company.

In principle, all employees can participate in employee competency development programs. However, management still takes into account the analysis of training program needs or the development of each employee's HC potential (*training need analysis*) to ensure that every qualified employee is prioritized to participate in the training provided.

Following the training sessions, management will evaluate the participants to measure the effectiveness of the training implementation. Subsequently, the evaluation results will be used as a basis for management to determine career levels and the level of employee advanced training needs.

With the employee competency development program, the Company is optimistic that it can form a generation of employees with more effective performance, a competitive spirit, and higher loyalty.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PPI memberikan perhatian penuh terhadap program pengembangan kompetensi karyawan untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas sehingga diharapkan dapat mendukung daya saing Perusahaan di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Untuk itu, PPI menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang diselenggarakan setiap tahun dimana subjek pelatihan dan peserta yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan kebutuhan pengembangan organisasi. Dengan adanya program dan kegiatan pelatihan tersebut diharapkan seluruh karyawan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai bidang profesi masing-masing, serta terpacu untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Pelatihan-pelatihan yang dijalankan Perseroan pada tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PPI fully takes into account employee competency development programs to ensure the availability of competent human capital with extensive knowledge. Thus, it is expected to support the Company's competitiveness amidst a highly competitive industrial landscape.

To that end, PPI provides HC competency training and development programs held annually, in which the training subjects and participants are adjusted to each individual's and organizational development needs. With these training programs and activities, all employees are expected to be more motivated to improve their qualifications according to their respective professional fields and to improve their abilities, skills, and knowledge to positively impact the Company's performance.

The training conducted by the Company in 2024 is presented in the following table:

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
1	Training Ekspor, Impor, Kepabeanan dan Pelabuhan, Update Incoterm 2020 Export, Import, Customs and Port Training, Incoterm Update 2020	- Memperlancar proses impor ekspor PT PPI - Memahami prosedur dan peraturan ekspor impor - Memahami pelaku bisnis di berbagai sektor seperti Beacukai, Surveyor, importir, asuransi, perusahaan angkutan, bank, dll - Streamlined the import export process of PT PPI - Comprehend export import procedures and regulations - Comprehend business actors in various sectors such as Customs, Surveyors, importers, insurance, transportation companies, banks, etc.	Public Training	04-05 Januari 2024 January 04-05, 2024	2
2	Building A Confidence In Communication	- Penggalan Data Perilaku: Pertanyaan Perilaku - Pemahaman Kompetensi - Memahami Proses <i>Assessment</i> - Behavioral Data Mining: Behavioral Questions - Competency Comprehension - Comprehend Assessment Process	In-house Training	09 Januari 2024 January 09, 2024	8
3	CHRO Masterclass Innovation Workplace Work Less Produce More	- Knowledge Update dan New Paradigm Human capital Management - Best Practice Human Capital yang diterapkan di BUMN dan Global - lesson learnt dari used cases human capital, baik di BUMN maupun Global - Knowledge Update and New Paradigm Human Capital Management - Best Practice Human Capital applied in SOE and Globally - Lessons learned from used cases of human capital, both in SOE and Globally	Public Training	18 Januari 2024 January 18, 2024	2



No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
4	Gather and Grow Vol. 1 (Gathering BOD-4)	Mempererat kekompakan serta menggali masukan dari BOD-4 untuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, khususnya terkait topik Teamwork & Organization Alignment Strengthened solidarity and sought input from BOD-4 for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, specifically on the topic of Teamwork & Organization Alignment	In-house Training	19 Januari 2024 January 19, 2024	41
5	Onboarding Directorship Program Angkatan 7 Tahun 2024 Onboarding Directorship Program Batch 7 2024	Membekali Direksi BUMN yang baru menjabat agar dapat memahami dan menjalankan peran, tugas, tanggung jawab serta wewenangnya secara efektif untuk menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan dan Indonesia. Equipped newly appointed SOE Board of Directors to understand and perform their roles, duties, responsibilities, and authorities effectively to generate added value for the Company and Indonesia.	Public Training	12, 19,20 Januari 2024 January 12, 19,20, 2024	1
6	Product Knowledge Perbankan - Bank Permata Banking Product Knowledge - Bank Permata	Karyawan mendapatkan <i>product knowledge</i> terkait fasilitas perbankan dari Bank Permata Employees received product knowledge related to banking facilities from Bank Permata	In-house Training	23 Januari 2024 January 23, 2024	137
7	Digital Marketing for Export	Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan digital dalam strategi pemasaran secara global Optimize the utilization of technology and digital in global marketing strategies	Public Training	01 Februari 2024 February 01, 2024	1
8	Manfaat BPJS Kesehatan dan Cara Penggunaannya Benefits of BPJS Kesehatan and How to Use It	Pekerja mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang manfaat BPJS Kesehatan dan Cara Penggunaannya Employees receive education and knowledge about the benefits of BPJS Kesehatan and How to Use it	In-house Training	13 Februari 2024 February 13, 2024	171
9	Engagement PPI Group	- Menemukan <i>value</i> pribadi dan memaksimalkan untuk kepentingan Perusahaan dan Pribadi - Memaksimalkan potensi diri - Mengerti hukum alam semesta dan menggunakannya - Mentransformasi pikiran untuk menaikkan standar dan <i>value</i> - Menyelaraskan <i>value</i> dengan Perusahaan untuk mencapai <i>goal</i> bersama-sama - Mengerti pentingnya komunikasi dan memfasilitasi kekompakan tim - Mengerti pentingnya meningkatkan standar dan <i>value</i> untuk kepentingan Bersama - Discovered personal value and maximized it for the benefit of the Company and Personal - Maximized self-potential - Comprehended the laws of the universe and used them - Transformed thoughts to raise standards and values - Aligned values with the Company to achieve common goals - Recognized the importance of communication and facilitated team cohesion - Recognized the importance of raising standards and values for the common interest	In-house Training	16-17 Februari 2024 February 16-17, 2024	33

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
10	PPIjar - Tata Cara Penyampaian SPT PPIjar - Procedures for Submitting Tax Returns	Peserta pelatihan kompeten dalam melakukan penyampaian SPT tahunan pribadi Training participants were competent in submitting personal annual Tax Returns	In-house Training	19 Februari 2024 February 19, 2024	197
11	Public Training Social Return on Investment (SROI)	● Mengukur dampak dari program TJSL yang dijalankan Perusahaan ● Pengukuran nilai dan menghitung SROI ● Menyusun pelaporan dan rekomendasi SROI ● Measured the impact of the CSR program run by the Company ● Measured value and calculated SROI ● Prepared SROI reporting and recommendations	Public Training	22 Februari 2024 February 22, 2024	2
12	Train The Trainer Angkatan VII tahun 2024 Train the Trainer Batch VII 2024	● Pengembangan produk pestisida Dharmabrand ● Pelatihan teknis aplikasi untuk menunjang pelatihan salesman Cabang ● Pengetahuan terkait mutu dan kualitas pestisida ● Pengetahuan terkait pengawasan peredaran pestisida ● Development of Dharmabrand pesticide products ● Technical application training to support the Branch salesman training ● Knowledge related to pesticide quality ● Knowledge related to pesticide distribution supervision	Public Training	20-22 Februari 2024 February 20-22, 2024	1
13	Workshop Influencer BUMN Kalimantan Kalimantan SOE Influencer Workshop	● <i>Story telling</i> ● <i>Personal branding</i> & tata cara membuat konten ● <i>Mental content creator</i> ● Story telling ● Personal branding & how to create content ● Content creator's mental	Public Training	26-28 Februari 2024 February 26-28, 2024	1
14	ULTRA : Refreshment of PPI Virtual Account (VA) Implementation	Sharing implementasi sistem pembayaran Virtual Account (VA) dalam penerimaan & pencatatan uang masuk Shared the implementation of the Virtual Account (VA) payment system in receiving and recording income	In-house Training	28 Februari 2024 February 28, 2024	199
15	EXTRA (Expert Berbicara) Menjaga Kesehatan Tubuh & Mental di Era Endemi EXTRA (Expert Speak) Maintained Physical and Mental Health in the Endemic Era	Mengetahui cara menjaga kesehatan tubuh dan mental di era endemic Discovered how to maintain physical and mental health in the endemic era	In-house Training	29 Februari 2024 February 29, 2024	174
16	BOD Menyapa (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum) BOD Greetings (Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs)	Mendorong terciptanya ide dan gagasan dari Generasi Milenial dan Gen-Z Encouraged the creation of ideas and concepts from Millennials and Gen-Z	In-house Training	05 Maret 2024 March 05, 2024	12
17	AKHLAK Talk Series Sesi Amanah AKHLAK Talk Series Trustworthy Session	Mengulas core value Amanah Reviewed Trustworthy core values	In-house Training	07 Maret 2024 March 07, 2024	134
18	Smart Financial Habits for Smart People	Mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Gained knowledge related to financial management that can be implemented in daily life.	In-house Training	22 Maret 2024 March 22, 2024	265



No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
19	Empowering Women Entrepreneurs through Digital Transformation	Membekali Direksi BUMN yang baru menjabat agar dapat memahami dan menjalankan peran, tugas, tanggung jawab serta wewenangnya secara efektif untuk menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan dan Indonesia. Equipped newly appointed SOE Board of Directors to understand and perform their roles, duties, responsibilities, and authorities effectively to generate added value for the Company and Indonesia.	Public Training	24-26 April 2024 April 24-26, 2024	1
20	Peran Sertifikasi Mendorong Business Excellence The Role of Certification in Driving Business Excellence	Meningkatkan kinerja dan inovasi model bisnis Perusahaan Improved the performance and innovation of the Company's business model	In-house Training	24 April 2024 April 24, 2024	266
21	AKHLAK TALK SERIES – KOMPETEN AKHLAK TALK SERIES - COMPETENT	Ownership Core Value AKHLAK-KOMPETEN Ownership Core Value AKHLAK-KOMPETENT	In-house Training	30 April 2024 April 30, 2024	286
22	Certified Risk Associate (CRA)	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko berdasarkan arahan Pemegang Saham melalui Sertifikasi Manajemen Risiko Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications based on Shareholders' guidance through Risk Management Certification	Sertifikasi Certification	11 Juni 2024 June 11, 2024	3
23	Certified Risk Professional (CRP)	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko berdasarkan arahan Pemegang Saham melalui Sertifikasi Manajemen Risiko Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications based on Shareholders' guidance through Risk Management Certification	Sertifikasi Certification	11-13 Juni 2024 June 11-13, 2024	1
24	Certified Risk Professional (CRP)	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko berdasarkan arahan Pemegang Saham melalui Sertifikasi Manajemen Risiko Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications based on Shareholders' guidance through Risk Management Certification	Sertifikasi Certification	11-25 Mei 2024 May 11-25, 2024	3
25	Health Talk	Memberikan edukasi Kesehatan Provided health education	In-house Training	20 Mei 2024 May 20, 2024	208
26	Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 Risk Management Certification Test Guidance Level 7	Manajemen Risiko Tingkat 7 Risk Management Level 7	Public Training	21 Mei 2024 May 21, 2024	1
27	Certified Risk Executive Leader (CREL)	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Sertifikasi Certification	03-18 Juni 2024 June 03-18, 2024	2
28	Pendidikan Dasar Penilaian I Bisnis Basic Education Business Assessment I	Analisa bisnis strategis untuk: menunjang kebutuhan guna melakukan analisa bisnis serta monitoring evaluasi Strategic business analysis to: support the need to conduct business analysis and monitoring evaluation.	Public Training	03-24 Juni 2024 June 03-24, 2024	2
29	Cara Distribusi Obat yang Baik dalam Pengawasan Rantai Distribusi Produk Farmasi Good Drug Distribution Methods in Monitoring the Pharmaceutical Product Distribution Chain	Menjadi salah satu syarat pada Apoteker Penanggung Jawab untuk mengikuti pelatihan CDOB sesuai dengan pedoman CDOB Became one of the requirements for the Responsible Pharmacist to take part in CDOB training in accordance with CDOB guidelines.	Public Training	03 Juni 2024 June 03, 2024	1
30	Group Development Program Vol. 1	Strategic Direction ID FOOD ID FOOD Strategic Direction	Public Training	21 Juni 2024 June 21, 2024	82
31	AKHLAK TALK SERIES – HARMONIS AKHLAK TALK SERIES - HARMONIOUS	Membentuk culture harmonis di Perusahaan Fostered a harmonious culture in the Company	In-house Training	24 Juni 2024 June 24, 2024	374

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
32	Pelatihan Salesman Pestisida Pesticide Salesman Training	• Dasar perlindungan tanaman • Dasar pestisida • Dasar pengenalan OPT • Teknik aplikasi, kalibrasi, pencampuran • Kunjungan lapangan/kalibrasi praktik/ demo lapangan • Rekap kunjungan lapangan/teknik pembuatan demo • Product Knowledge Dharmabrand • Prinsip-prinsip dalam menjual • Keberhasilan penjualan • Temani dan GCG • Memahami Kebutuhan Pelanggan • Memenuhi Kebutuhan Pelanggan • Memperoleh Komitmen • Basics of plant protection • Basics of pesticides • Basics of OPT recognition • Techniques of application, calibration, and mixing • Field visits/practical calibration/field demos • Field visit recap/demo making techniques • Dharmabrand Product Knowledge • Principles in selling • Sales success • Temani and GCG • Acknowledged Customer Needs • Met Customer Needs • Obtained Commitment	In-house Training	24-26 Juni 2024 June 24-26, 2024	20
33	Young Talent Development Program Vol. 1	Strategic Direction ID FOOD ID FOOD Strategic Direction	Public Training	5 Juli 2024 July 5, 2024	92
34	Staff Development Program Vol. 1	Strategic Direction ID FOOD ID FOOD Strategic Direction	Public Training	5 dan 12 Juli 2024 July 5 and 12, 2024	191
35	Optimalisasi Pengelolaan dan Evaluasi Aset Sewa: Penentuan Nilai Wajar dan HBU Study Optimization of Leased Asset Management and Evaluation: Determination of Fair Value and HBU Study	• Untuk memberikan keputusan terbaik atas scoring harga sewa/perhitungan nilai sewa/perhitungan nilai sewa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi harga pasar atas aset • Hasil analisa untuk optimalisasi aset yang disewakan • To provide the best decision on rental price scoring/rental value calculation/ rental value calculation in accordance with applicable regulations and market price conditions for assets • Analysis results for optimization of leased assets	Public Training	17-19 Juli 2024 July 17-19, 2024	3
36	Skill Up K3 OHS Skill Up	Meningkatkan hard competency K3LL Improved K3LL hard competency	Public Training	17 Juli 2024 July 17, 2024	2
37	Refleksi Tengah Tahun - Telaah Jejak, Susuri Fajar Baru Mid- Year Reflection - Traced the Trail, Traced the New Dawn	Review perkembangan dan refleksi pencapaian Perusahaan Periode Semester - 1 Tahun 2024 Review of development and reflection of Company achievements for the Semester - 1 Period of 2024	In-house Training	17 Juli 2024 July 17, 2024	395
38	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan ULTRA - Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory	Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory	In-house Training	18 Juli 2024 July 18, 2024	309

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
39	Tata Kelola Terintegrasi: Penerapannya Pada Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Integrated Governance: Its Application to Parent Companies and Subsidiaries	• Meningkatkan kompetensi dengan mempelajari lebih lanjut terkait kebijakan induk-anak Perusahaan • Mendukung dalam pemahaman terhadap rencana strategis Perusahaan • Mendukung dalam pemahaman terhadap corporate action Perusahaan • Improved competence by discovering more about parent-subsidiary company policies • Supported in understanding the Company's strategic plan • Supported in understanding the Company's corporate actions	Public Training	18-19 Juli 2024 July 18-19, 2024	2
40	Group Development Program Vol. 2	Global Business Strategy	Public Training	19 Juli 2024 July 19, 2024	76
41	Certified Branch Manager	• Meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan Cabang secara efektif • Mampu menyusun strategi Cabang yang selaras dengan strategi organisasi • Mengembangkan kemampuan dalam menganalisis keuangan Cabang hingga membuat strategi pelayanan Cabang • Improved participant competency in effective branch management • Was able to develop branch strategies aligned with organizational strategies • Developed the ability to analyze branch finances to create branch service strategies	Sertifikasi Certification	23-26 Juli 2024 July 23-26, 2024	5
42	Staff Development Program Vol. 2	Digital Leadership	Public Training	25 dan 26 Juli 2024 July 25 and 26, 2024	177
43	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha dan Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok Melalui ERP D365 ULTRA - Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities Through ERP D365	Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha & Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok melalui ERP D365 Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities Through ERP D365	In-house Training	26 Juli 2024 July 26, 2024	336
44	Program Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Personil Farmasi Good Drug Distribution Methods (CDOB) Training Program for Pharmacy Personnel	Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Good Drug Distribution Methods (CDOB)	Public Training	30-31 Juli 2024 July 30-31, 2024	1
45	Program Manajemen Risiko (Certified Risk Professional - CRP) Risk Management Program (Certified Risk Professional - CRP)	Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Direksi Risk Management Certification for the Board of Directors	Sertifikasi Certification	31 Juli – 02 Agustus 2024 July 31 – August 02, 2024	1
46	Morning Greeting - Reminder Code of Conduct, PKB, dan WBS PT PPI Morning Greeting - Reminder Code of Conduct, PKB, and WBS of PT PPI	Code of Conduct, PKB, dan WBS Code of Conduct, PKB, and WBS	In-house Training	31 Juli 2024 July 31, 2024	372

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
47	PPIjar - IT Awareness	• Meningkatkan Kesadaran Keamanan Cyber • Pemahaman Penggunaan Teknologi • Kepatuhan terhadap Kebijakan IT • Peningkatan Produktivitas • Increased Cyber Security Awareness • Technology Usage Comprehension • Compliance with IT Policies • Increased Productivity	In-house Training	09 Agustus 2024 August 09, 2024	350
48	ULTRA (Ulas Transformasi) - Jualan Nggak Cerdas Pajak, Untung Jadi Buntung ULTRA (Unfold Transformation) - Tax- Blind Sales, Profit Fails!	Perpajakan Taxation	In-house Training	14 Agustus 2024 August 14, 2024	354
49	Staff Development Program Vol. 3	Developing Business Sense	Public Training	14 dan 15 Agustus 2024 August 14 and 15, 2024	273
50	Uji Kompetensi Humas Angkatan VIII Public Relations Competency Test Batch VIII	Peningkatan kompetensi pejabat humas dan praktisi komunikasi Competency improvement of public relations officers and communication practitioners	Sertifikasi Certification	22 Agustus 2024 August 22, 2024	1
51	AKHLAK TALK SERIES - LOYAL	Internalisasi core value AKHLAK "Loyal" Internalization of the core value of AKHLAK "Loyal"	In-house Training	22 Agustus 2024 August 22, 2024	897
52	Group Development Program Vol. 3	Innovation Leadership	Public Training	23 Agustus 2024 August 23, 2024	111
53	AKHLAK TALK SERIES – ADAPTIF AKHLAK TALK SERIES - ADAPTIVE	Ownership core value AKHLAK – ADAPTIF Ownership AKHLAK core value - ADAPTIVE	In-house Training	12 September 2024 September 12, 2024	539
54	Young Talent Development Program Vol. 2	Business Acumen	Public Training	13 September 2024 September 13, 2024	98
55	Staff Development Program Vol. 4	Innovative Mindset	Public Training	18 dan 24 September 2024 September 18 and 24, 2024	283
56	Cancer & Tumor Awareness, Kenali Kanker Selamatkan Hidup Cancer & Tumor Awareness, Cancer Recognition to Save Lives	Meningkatkan kesadaran terkait kesehatan khususnya pada risiko kanker dan tumor Increased awareness of health, especially regarding the risk of cancer and tumors.	In-house Training	08 Oktober 2024 October 08, 2024	200
57	Bagaimana Mendorong Penjualan dan Menjaga Relasi Pelanggan How to Drive Sales and Maintain Customer Relationships	• Pemahaman produk komoditas unggulan PT PPI • Komunikasi yang baik dengan para mitra PT PPI • Gesit melihat peluang pendapatan • GCG dalam setiap pekerjaan • Understanding of PT PPI's leading commodity products • Good communication with PT PPI partners • Agile in observing income opportunities • GCG in every job	In-house Training	11 Oktober 2024 October 11, 2024	338
58	Managing Mental Health in the Workplace	• Pekerja dapat mengetahui perbedaan stres dan cemas • Pekerja dapat mengetahui sumber dan penyebab stres • Pekerja dapat mengetahui cara mengatasi stres dan cemas • Workers can recognize the difference between stress and anxiety • Workers can recognize the sources and causes of stress • Workers can learn how to cope with stress and anxiety	In-house Training	18 Oktober 2024 October 18, 2024	318
59	Young Talent Development Program Vol. 3	Continuous Improvement: Gemba Kaizen	Public Training	23 Oktober 2024 October 23, 2024	117



No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
60	Skill Up: Pengadaan Skill Up: Procurement	• Meningkatkan <i>hard competency</i> karyawan ID FOOD Group terkait Skill Up Pengadaan Improved the hard competency of ID FOOD Group employees related to Procurement Skill Up	Public Training	24 Oktober 2024 October 24, 2024	14
61	Staff Development Program Vol. 5	Leading Change	Public Training	24 dan 25 Oktober 2024 October 24 and 25, 2024	269
62	Wealth Management - FIRE (Financial Independence Retire Early)	Financial Plan	In-house Training	25 Oktober 2024 October 25, 2024	284
63	Group Development Program Vol. 5	Building a Learning Organization for Organizational Capabilities	Public Training	8 November 2024 November 8, 2024	109
64	Pelatihan Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Training	• Mempelajari fakta-fakta yang menghadang orang-orang yang sudah pensiun • Mempelajari bagaimana mengenali bisnis, mempelajari strategi bisnis • Mempelajari cara mengatur waktu dalam mempersiapkan bisnis • Mempelajari cara menyusun business plan • Mengenal aspek manajemen keuangan • Mempelajari cara mengenali peluang bisnis • Mempelajari cara mengenali money energy, abundance, dan expanding • Learn the facts that encounter retirees • Learn how to recognize business, learn business strategies • Learn how to manage time in preparing a business • Learn how to create a business plan • Learn the aspects of financial management • Learn how to recognize business opportunities • Learn how to recognize money energy, abundance, and expanding	Public Training	12-13 November 2024 November 12-13, 2024	12
65	HACCP Batch 11	• Standarisasi sesuai Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2019 • Pentingnya HACCP sebagai jaminan mutu dan keamanan terhadap produk yang dihasilkan • Standardization according to Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 17/PERMEN-KP/2019 • The importance of HACCP as a guarantee of quality and safety for the products produced	Sertifikasi Certification	14-17 November 2024 November 14-17, 2024	1
66	Skill Up: Logistik Skill Up: Logistics	• Meningkatkan <i>hard competency</i> pelatihan Skill Up Logistik Improved hard competency of the Logistic Skill Up training	Public Training	15 November 2024 November 15, 2024	14
67	EXTRA - Merancang Business Plan untuk Transformasi Berkelanjutan EXTRA - Prepared a Business Plan for Sustainable Transformation	Financial Independence Retire Early	In-house Training	18 November 2024 November 18, 2024	344
68	Skill Up: ISO 37001 2016	Meningkatkan <i>hard competency</i> terkait ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Improved hard competency related to ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	Public Training	19-20 November 2024 November 19-20, 2024	5

No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
69	Pelatihan P3K, Kegawatdaruratan dan Bantuan Hidup Dasar First Aid, Emergency and Basic Life Support Training	• Memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dasar melakukan tindakan kegawatdaruratan di lokasi kejadian secara praktis sesuai kaidah dan protokol medis dasar • Meningkatkan keterampilan teknis tindakan kedaruratan baik kasus medis maupun trauma di lokasi kejadian dengan penuh percaya diri meskipun bukan berlatar belakang Pendidikan medis. • Mampu melaksanakan sistem Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat berada dengan cepat dan tepat kepada orang yang mengalami kecelakaan (cedera) atau sakit. • Provided knowledge, understanding, and basic skills to carry out emergency actions at the incident scene practically according to basic medical rules and protocols. • Improved technical skills in emergency actions for both medical and trauma cases at the incident scene with full confidence, even though they do not have a medical education background. • Was able to implement the First Aid for Accidents (P3K) system at the scene quickly and accurately for people who have had accidents (injuries) or were sick.	In-house Training	21 November 2024 November 21, 2024	257
70	Young Talent Development Program Vol. 4	Developing Organizational Capabilities: Leaders as HR Managers	Public Training	26 November 2024 November 26, 2024	130
71	Skill Up: Manajemen Risiko Skill Up: Risk Management	Meningkatkan hard competency terkait Manajemen Risiko Improved hard competency related to Risk Management	Public Training	28 November 2024 November 28, 2024	5
72	Staff Development Program Vol. 6	Developing Empathy at Workplace	Public Training	02 dan 03 Desember 2024 December 02 and 03, 2024	287
73	Pendidikan dan Pelatihan International Risk Management Standard ERM Fundamentals 2024 Education and Training of International Risk Management Standard ERM Fundamentals 2024	Dalam rangka pemenuhan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, di mana salah satunya diatur bahwa setiap tahun masing-masing anggota komite wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang audit, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau manajemen risiko. To fulfill the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated May 26, 2023, on Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises, one of which is regulated that every year each committee member shall take advanced certification while serving at least one certification including in the fields of audit, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or risk management.	Sertifikasi Certification	02-04 Desember 2024 December 02-04, 2024	1
74	AKHLAK TALK SERIES – KOLABORATIF AKHLAK TALK SERIES - COLLABORATIVE	Internalisasi core value "Kolaboratif" Internalization of the "Collaborative" core value	In-house Training	03 Desember 2024 December 03, 2024	414



No.	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Types of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (employees)
75	Penulisan Rilis Layak Siar Media Massa Writing Newsworthy Press Releases for Mass Media	Meningkatkan kompetensi dalam hal penulisan jurnalistik untuk membuat release korporasi yang akan disebarluaskan pada media massa Improved competence in journalistic writing to create corporate releases to be distributed to the mass media.	Public Training	03-04 Desember 2024 December 03-04, 2024	1
76	Group Development Program Vol. 6	Leading Change in the Digital Transformation Era	Public Training	06 Desember 2024 December 06, 2024	99
77	Standarisasi Formulir Penagihan Piutang Penerimaan Jaminan Piutang Standardization of Accounts Receivable Collection Forms for Receiving Accounts Receivable Guarantees	Internalisasi Standarisasi Formulir Penagihan Piutang Penerimaan Jaminan Piutang Internalization of Standardization of Accounts Receivable Collection Forms for Receiving Accounts Receivable Guarantees	In-house Training	12 Desember 2024 December 12, 2024	255
78	Basic Class Darwis Triadi Photography	• Teknik pencahayaan dalam fotografi • Dasar-dasar komposisi dalam fotografi • <i>Quality of light</i> dalam fotografi • Lighting techniques in photography • Basics of composition in photography • Quality of light in photography	Public Training	14-15 Desember 2024 December 14-15, 2024	1
79	Young Talent Development Program Vol. 5	Leading Change	Public Training	17 Desember 2024 December 17, 2024	139
80	Strategi Menjadi Salesperson Profesional dengan Selling Skill (Sales Andal: Persiapan Lengkap untuk Karier Penjualan) Strategy to be a Professional Salesperson with Selling Skills (Reliable Sales: Complete Preparation for a Sales Career)	Keterampilan dan pengetahuan dasar teori menjual dan mengelola customer Basic skills and knowledge of selling theory and managing customers	Public Training	19 Desember 2024 December 19, 2024	1

Pada tahun 2024 Perseroan merealisasikan biaya sebesar Rp1.112.452.284,00 untuk Biaya Pengembangan dan Pelatihan Kantor Pusat dan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum. Jumlah ini mengalami penurunan 19,76% bila dibandingkan dengan tahun 2023.

“Lebih lanjut tentang pengelolaan aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang merupakan bagian terintegrasi dari Laporan Tahunan ini.”

In 2024, the Company incurred Rp1,112,452,284.00 for the Development and Training Costs of the Head Office and the Human Capital and General Development Division. This amount decreased by 19.76% compared to 2023.

“Further information on the management of employment aspects is available in the Sustainability Report, which serves as an integral part of this Annual Report.”

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, SERTA ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

EDUCATION AND/OR TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND SUPPORTING ORGANS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Setiawan Wangsaatmaja	Sertifikasi Certification	Certified Risk Executive Leader (CREL)	Online dan BPKP, 03, 07, 10, dan 18 Juni 2024 Online and BPKP, June 03, 07, 10, and 18, 2024	BPKP
Direksi Board of Directors				
Edhy Rizwan	Pelatihan Training	Onboarding Directorship Program Angkatan 7 Tahun 2024 Onboarding Directorship Program Batch 7 2024	Kampus Nawa Sena (Wijaya Kusuma), Mandiri University, Jakarta Barat, 12, 19, 20 Januari 2024 Nawa Sena Campus (Wijaya Kusuma), Mandiri University, West Jakarta, January 12, 19, 20, 2024	KBUMN melalui BUMN School of Excellence KBUMN through BUMN School of Excellence
Noverita Anggraeny	Pelatihan Training	Empowering Women Entrepreneurs through Digital Transformation	Bangkok, Thailand, 24-26 April 2024 Bangkok, Thailand, April 24-26, 2024	Asian and Pacific Training Centre for Information Technology for Development (APCICT/ESCAP)
Wien Irwanto	Pelatihan Training	Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 Risk Management Certification Test Guidance Level 7	Online, 21 Mei 2024 Online, May 21, 2024	PT. Efektifpro Knowledge Source
Noverita Anggraeny	Sertifikasi Certification	Certified Risk Executive Leader (CREL)	Online dan BPKP, 03, 07, 10, dan 18 Juni 2024 Online and BPKP, June 03, 07, 10, and 18, 2024	BPKP
Edhy Rizwan	Sertifikasi Certification	Program Manajemen Risiko (Certified Risk Professional - CRP) Risk Management Program (Certified Risk Professional - CRP)	Ashley Hotel, Jakarta, 31 Juli – 02 Agustus 2024 Ashley Hotel, Jakarta, July 31 – August 02, 2024	TAP Kapital
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Agus Hartanto	Pelatihan Training	Building A Confidence In Communication - Penggalan Data Perilaku: Pertanyaan Perilaku - Pemahaman Kompetensi - Memahami Proses Assessment Building A Confidence In Communication - Behavioral Data Mining: Behavioral Questions - Competency Comprehension - Comprehend Assessment Process	PPI Academy, 09 Januari 2024 PPI Academy, January 09, 2024	PT Tri Abisatya Abhinaya



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Agus Hartanto	Pelatihan Training	Engagement PPI Group - Menemukan value pribadi dan memaksimalkan untuk kepentingan Perusahaan dan Pribadi - Memaksimalkan potensi diri - Mengerti hukum alam semesta dan menggunakannya - Mentransformasi pikiran untuk menaikkan standar dan value - Menyelaraskan value dengan Perusahaan untuk mencapai goal bersama-sama - Mengerti pentingnya komunikasi dan memfasilitasi kekompakan tim - Mengerti pentingnya meningkatkan standar dan value untuk kepentingan bersama Engagement PPI Group - Discovered personal value and maximized it for the benefit of the Company and Personal - Maximized self-potential - Comprehended the laws of the universe and used them - Transformed thoughts to raise standards and values - Aligned values with the Company to achieve common goals - Recognized the importance of communication and facilitated team cohesion - Recognized the importance of raising standards and values for the common interest	Citra Cikopo Hotel, 16-17 Februari 2024 Citra Cikopo Hotel, February 16-17, 2024	PT PPI
Agus Hartanto	Pelatihan Training	Refleksi Tengah Tahun - Telaah Jejak, Susuri Fajar Baru Mid-Year Reflection - Traced the Trail, Traced the New Dawn Review perkembangan dan refleksi pencapaian Perusahaan Periode Semester 1 Tahun 2024 Review of development and reflection of Company achievements for the Semester - 1 Period of 2024	PPI Academy dan Online, 17 Juli 2024 PPI Academy and Online, July 17, 2024	PT PPI
Agus Hartanto	Pelatihan Training	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan ULTRA - Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory		
Agus Hartanto	Pelatihan Training	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha dan Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok Melalui ERP D365 ULTRA - Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities Through ERP D365 Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha & Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok melalui ERP D365 Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities through ERP D365	Online, 26 Juli 2024 Online, July 26, 2024	PT PPI
Agus Hartanto	Pelatihan Training	ULTRA (Ulas Transformasi) - Jualan Nggak Cerdas Pajak, Untung Jadi Buntung ULTRA (Unfold Transformation) - Tax-Blind Sales, Profit Fails Perpajakan Taxation	Online, 22 Agustus 2024 Online, August 22, 2024	PT PPI
Agus Hartanto	Pelatihan Training	AKHLAK TALK SERIES - LOYAL	Online, 22 Agustus 2024 Online, August 22, 2024	PT PPI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Agus Hartanto	Pelatihan Training	Bagaimana Mendorong Penjualan dan Menjaga Relasi Pelanggan - Pemahaman produk komoditas unggulan PT PPI - Komunikasi yang baik dengan para mitra PT PPI - Gesit melihat peluang pendapatan - GCG dalam setiap pekerjaan How to Drive Sales and Maintain Customer Relationships - Understanding of PT PPI's leading commodity products - Good communication with PT PPI partners - Agile in observing income opportunities - GCG in every job	Online, 11 Oktober 2024 Online, October 11, 2024	PT PPI
Agus Hartanto	Pelatihan Training	EXTRA - Merancang Business Plan untuk Transformasi Berkelanjutan EXTRA - Prepared a Business Plan for Sustainable Transformation Meningkatkan pencapaian target perusahaan yang tumbuh dan berkelanjutan. Melalui upaya mendorong budaya bisnis yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada hasil sehingga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Enhanced the achievement of Company targets that were growing and sustainable. Through efforts to encourage an adaptive, innovative, and results-oriented business culture to create long-term added value for the Company and stakeholders.	Trading House Grha PPI, 18 November 2024 Trading House Grha PPI, November 18, 2024	PT PPI
Satuan Pengawasan Intern/Audit Internal Internal Audit Unit/Internal Audit				
Cahyadi	Pelatihan Training	PPIjar - Tata Cara Penyampaian SPT PPIjar - Procedures for Submitting Tax Returns Kompeten dalam melakukan penyampaian SPT tahunan pribadi Competent in submitting personal annual Tax Returns	Online, 19 Februari 2024 Online, February 19, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	ULTRA : Refreshment of PPI Virtual Account (VA) Implementation Sharing implementasi sistem pembayaran Virtual Account (VA) dalam penerimaan & pencatatan uang masuk Shared the implementation of the Virtual Account (VA) payment system in receiving and recording income	Online, 28 Februari 2024 Online, February 28, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	Smart Financial Habits for Smart People Mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Gained knowledge related to financial management that can be implemented in daily life	Online, 22 Maret 2024 Online, March 22, 2024	PT PPI dan PT BSI (Tbk) PT PPI and PT BSI (Tbk)
Cahyadi	Pelatihan Training	Peran Sertifikasi Mendorong Business Excellence The Role of Certification in Driving Business Excellence Meningkatkan kinerja dan inovasi model bisnis Perusahaan Improved the performance and innovation of the Company's business model	Online, 24 April 2024 Online, April 24, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	AKHLAK TALK SERIES – KOMPETEN AKHLAK TALK SERIES – COMPETENT	Hybird (PPI Trade House dan Online), 30 April 2024 Hybrid (PPI Trade House and Online), April 30, 2024	PT PPI



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Cahyadi	Pelatihan Training	Health Talk Memberikan edukasi Kesehatan Provided health education	Hybird (Auditorium PPI dan Online), 20 Mei 2024 Hybrid (PPI Auditorium and Online), May 20, 2024	PT PPI bekerjasama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bekerjasama dengan Halodoc PT PPI collaborated with PT Asuransi Takaful Keluarga, which collaborated with Halodoc
Cahyadi	Pelatihan Training	AKHLAK TALK SERIES – HARMONIS AKHLAK TALK SERIES – HARMONIOUS Membentuk culture harmonis di Perusahaan Fostered a harmonious culture in the Company	Online, 24 Juni 2024 Online, June 24, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan ULTRA - Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory Sosialisasi SOP Pengadaan Barang Dagangan dan SOP Manajemen Pergudangan & Persediaan Barang Dagangan Dissemination of SOP for Procurement of Merchandise and SOP for Warehouse Management & Merchandise Inventory	Online, 18 Juli 2024 Online, July 18, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	ULTRA - Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha dan Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok Melalui ERP D365 ULTRA - Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities Through ERP D365 Sosialisasi SOP Pengelolaan Piutang Usaha & Penerapan Batasan Piutang pada Komoditi Non Bahan Pokok melalui ERP D365 Dissemination of SOP for Accounts Receivable Management and Implementation of Accounts Receivable Limits on Non Staple Commodities Through ERP D365	Online, 26 Juli 2024 Online, July 26, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	PPIjar - IT Awareness - Meningkatkan Kesadaran Keamanan Cyber - Pemahaman Penggunaan Teknologi - Kepatuhan terhadap Kebijakan IT - Peningkatan Produktivitas PPIjar - IT Awareness - Increased Cyber Security Awareness - Technology Usage Comprehension - Compliance with IT Policies - Increased Productivity	Online, 09 Agustus 2024 Online, August 09, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	AKHLAK TALK SERIES - LOYAL	Online, 22 Agustus 2024 Online, August 22, 2024	PT PPI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Cahyadi	Pelatihan Training	Bagaimana Mendorong Penjualan dan Menjaga Relasi Pelanggan - Pemahaman produk komoditas unggulan PT PPI - Komunikasi yang baik dengan para mitra PT PPI - Gesit melihat peluang pendapatan - GCG dalam setiap pekerjaan How to Drive Sales and Maintain Customer Relationships - Understanding of PT PPI's leading commodity products - Good communication with PT PPI partners - Agile in observing income opportunities - GCG in every job	Online, 11 Oktober 2024 Online, October 11, 2024	PT PPI
Cahyadi	Pelatihan Training	Bagaimana Mendorong Penjualan dan Menjaga Relasi Pelanggan - Pemahaman produk komoditas unggulan PT PPI - Komunikasi yang baik dengan para mitra PT PPI - Gesit melihat peluang pendapatan - GCG dalam setiap pekerjaan How to Drive Sales and Maintain Customer Relationships - Understanding of PT PPI's leading commodity products - Good communication with PT PPI partners - Agile in observing income opportunities - GCG in every job EXTRA - Merancang Business Plan untuk Transformasi Berkelanjutan EXTRA - Prepared a Business Plan for Sustainable Transformation Meningkatkan pencapaian target perusahaan yang tumbuh dan berkelanjutan. Melalui upaya mendorong budaya bisnis yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada hasil sehingga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Enhanced the achievement of Company targets that were growing and sustainable. Through efforts to encourage an adaptive, innovative, and results-oriented business culture to create long-term added value for the Company and stakeholders.	Trading House Grha PPI, 18 November 2024 Trading House Grha PPI, November 18, 2024	PT PPI

Keterangan: untuk organ di bawah BOD pada bagian ini hanya untuk kepala unit saja. Untuk pelatihan karyawan masing-masing unit akan dibahas di bagian GCG.
Note: for organs under BOD in this section only for unit heads. For employee training for each unit will be discussed in the GCG section.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Kepemilikan saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna/sebesar 0,0001% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar 99,99%. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian di dalam Laporan Tahunan 2024 ini PPI tidak menyajikan informasi mengenai:

1. Pemegang saham berdasarkan klasifikasi institusional;
2. Pemegang saham sampai tingkat individu;
3. Pemegang saham pengendali;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih;
5. Kepemilikan saham oleh Direksi & Dewan Komisaris; dan
6. Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar.

Berikut adalah uraian struktur kepemilikan saham PPI per 31 Desember 2024:

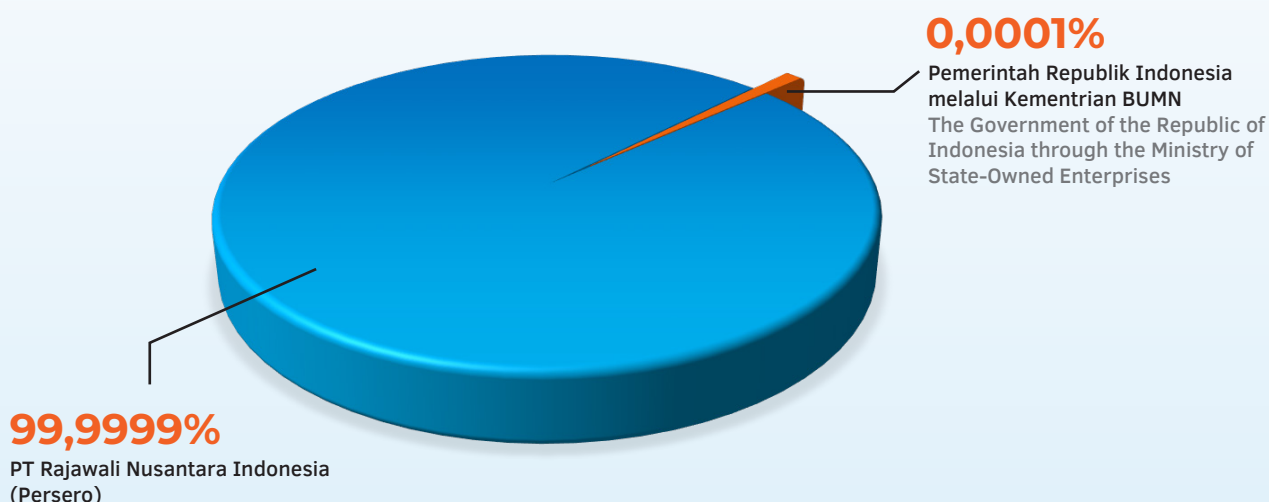
The Company's shares are owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs, with 1 Share of Series A Dwiwarna representing 0.0001% and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) holding 99.99%. The ownership of shares has been recorded and administered in the Shareholder Registry (DPS), managed by the Corporate Secretary.

Therefore, in this 2024 Annual Report, PPI does not provide information regarding:

1. Shareholders based on institutional classification;
2. Shareholders down to the individual level;
3. Controlling shareholders;
4. Shareholders with ownership of 5% or more;
5. Share ownership by the Board of Directors & Board of Commissioners; and
6. List of the 20 Majority Shareholders.

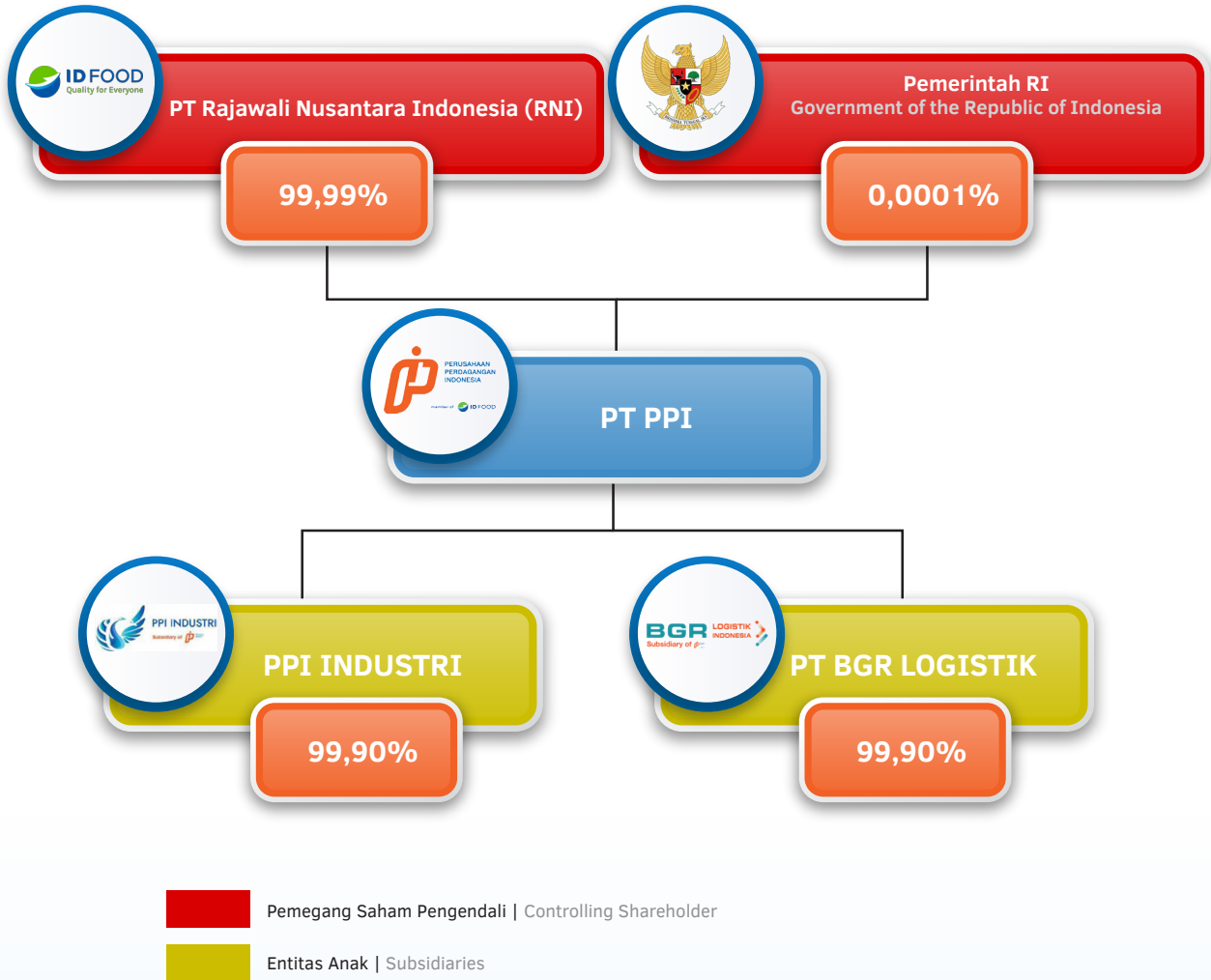
Below is the description of PPI's share ownership structure as of December 31, 2024:

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Shares
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	1.826.130	1.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid



STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUPS



INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Company's major and controlling shareholder is PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).



PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) /ID Food
Pemegang Saham Utama/Pengendali
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food
Major/Controlling Shareholder

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agroindustri, farmasi, perdagangan, dan distribusi.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) is a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the agro-industry, pharmaceutical, trade, and distribution sectors.

Informasi tentang PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

Information on PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

Nama Name	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Nama Brand Perusahaan Company Brand Name	:	ID FOOD
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	12 Oktober 1964 October 12, 1964
Bidang Usaha Line of Business	:	Agroindustri, farmasi, perdagangan, dan distribusi Agroindustry, pharmaceuticals, trade and distribution
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Pemerintah Republik Indonesia, 100% Government of the Republic of Indonesia, 100%
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	:	Waskita Rajawali Tower (WRT) Jalan M.T. Haryono Kav 12-13 Kec. Jatinegara, Kel. Bidara Cina Jakarta Timur 13330
Situs Web Website	:	www.idfood.co.id
Jumlah Aset Total Assets	:	Rp52.399.917.309.597
Jumlah Pendapatan Total Revenues	:	Rp18.313.058.400.613
Laba (Rugi) Bersih Net (Loss) Profit	:	Rp230.943.436.074
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama President Commissioner : Budi Santoso Komisaris Independen Independent Commissioner : Marsudi Wahyu Kisworo Komisaris Independen Independent Commissioner : Arie Sujito Komisaris Commissioner: Sarwo Edhy Komisaris Commissioner: Muhammad Riza Adha Damanik Komisaris Commissioner: Budiono Sandi	
	Direksi Board of Directors Direktur Utama President Director: Sis Apik Wijayanto Direktur Komersial Commercial Director : Nina Sulistyowati Direktur Supply Chain Management & Teknologi Informasi Director of Supply Chain Management & Information Technology : Bernadetta Raras Indah Rosari Direktur Manajemen Risiko & Legal Director of Risk Management & Legal : S. Hidayat Safwan Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Capital : Yossi Istanto Direktur Keuangan & Strategi Director of Finance & Strategy: Susana Indah Kris Indriati	

DAFTAR ENTITAS ANAK

LIST OF SUBSIDIARIES

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal oleh Perseroan Year of Equity Participation by the Company	Kepemilikan oleh Perseroan (%) Ownership by the Company (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)		Status Operasi Operation Status
						2024	2023	2024	2023	
Entitas Anak Subsidiaries										
PT PPI Industri	Manufaktur dan Perdagangan Manufacturing and Trading	Palembang	1986	1986	1986	99,90%	99,90%	59.892	55.187	Beroperasi In operation
PT BGR Logistik Indonesia	Jasa Logistik Logistics Services	Jakarta	1963	1963	1963	99,96%	99,96%	527.154	280.799	Beroperasi In operation

PT PPI INDUSTRI

Pada mulanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) didirikan dengan nama PT Dharma Niaga Putera Steel berdasarkan Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H., No. 33 tanggal 18 September 1986. Selanjutnya, akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan termasuk di antaranya terkait perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PPI Industri sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 13 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang.

Berdasarkan akta perubahan terakhir No. 38 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang, telah disetujui perubahan mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PPI Industri. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHUAH.01.03-0371005 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PPI Industri adalah salah satu entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

PT PPI INDUSTRI

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) was first established under the name of PT Dharma Niaga Putera Steel based on the Notary Deed of Syamsul Hadi, S.H., No. 33 dated September 18, 1986. Subsequently, the deed of establishment was amended several times, including the change in the name of PT Dharma Niaga Putera Steel to PPI Industri as stated in the Deed No. 13 dated August 25, 2009 made before Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notary in Palembang.

Based on the latest amendment deed No. 38 dated October 31, 2022 made before Kurnia Ariyani, S.H., Notary in Tangerang, the amendments to the Circular Resolution of the Shareholders of PPI Industri have been approved. The amendments to the Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights in a decree number AHUAH.01.03-0371005 of 2020 dated August 27, 2020.

PPI Industri is one of the company’s subsidiaries that carries out business activities in the general industrial sector in the manufacture of zinc and other building materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trade in zinc production.



Kedudukan dan Tahun Operasi Komersial Domicile and Years of Commercial Operation	Palembang, 1986
Kegiatan Usaha Business Activities	Manufaktur dan Perdagangan Manufacturing and Trading
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) sebelumnya dikenal sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul Hadi, S.H No. 33 tanggal 18 September 1986 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) formerly known as PT Dharma Niaga Putera Steel was established based on notarial deed of Syamsul Hadi, S.H No. 33 dated September 18, 1986
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia: 99,90% Koperasi Tri Niaga Indonesia 0,10%
Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.000.000.000
Modal Disetor Paid in Capital	Rp1.000.000.000
Status Operasional Operational Status	Beroperasi In operation
Alamat Address	Grha PPI, Jalan Abdul Muis Nomor 8 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Susunan Pengurus Board of Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Commissioner : Wien Irwanto Direksi Board of Directors Direktur/PLT Direktur Director/Acting Director : Wien Irwanto

Kinerja Keuangan Financial Performance	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statements of Consolidated Financial Position				
Jumlah Aset Total Assets	59.892	55.187	4.705	8,53
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	10.163	6.880	3.283	47,72
Jumlah Ekuitas Total Equity	49.729	48.306	1.423	2,95
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
Penjualan Sales	44.847	40.792	4.055	9,94
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	42.205	38.858	3.347	8,61
Laba Bruto Gross Profit	2.641	1.934	707	36,56
Beban Usaha Operating Expenses	3.372	4.049	(677)	(16,72)
Rugi Usaha Operating Loss	(730)	(2.115)	1.385	65,48
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	3.109	4.346	(1.237)	(28,46)
Beban Lain-Lain Other Expenses	(866)	(201)	(665)	330,85
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Revenues (Expenses)	2.165	4.188	(2.023)	(48,30)
Laba sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	1.434	2.073	(639)	(30,82)
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits	88	71	17	23,94
Laba (Rugi) Periode Berjalan Profit (Loss) for the Period	1.522	2.144	(622)	(29,01)

PT BGR LOGISTIK INDONESIA

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963. Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H., No.20 tanggal 13 Oktober 2021 entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/OXI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No 50 tanggal 14 Juli 2022, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Berbagai layanan ditawarkan BLI seperti: *Freight Forwarding, Depo Container, EMKL/PPJK, dan Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Container, dan ke depan yaitu shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring.*

Dalam lima tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi integrated digital logistics provider bagi induk usaha/PPI. Saat ini BLI mempunyai dua kantor cabang, yaitu cabang Belawan & cabang Surabaya, 20 Divisi Regional; 2 UPP dan 2 Depo Yard yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan tersebut didukung dengan sistem penunjang yang akan bermanfaat kepada para pengguna jasa BLI, seperti:

- Warehouse Integrated Application (WINA);
- Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);
- Depot Management and Agency (DENADA).

PT BGR LOGISTIK INDONESIA

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem) was established based on notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No. 49 dated November 19, 1963. Based on notarial deed of Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated October 13, 2021. The entity increased its ownership in PT TSV by purchasing 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk amounting 1,000 shares with a value of Rp1,000,000 per share so that the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. The shares have been valued at market price based on the valuation calculation conducted by Public Appraisal Services Office Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/OXI/20 dated November 30, 2020.

Based on the latest deed of amendment by Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. 50 dated July 14, 2022, PT Trisari Veem changed its name to PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Various services are offered by BLI such as: Freight Forwarding, Container Depot, EMKL / PPJK, and Trucking/Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Container Depot, and in the future, namely shipping line & agency, Logistic Solution, Depot & Consolidation, Port Services & Stevedoring.

In the next 5 years, BLI is projected to become an integrated digital logistics provider for the parent company/PPI. Currently, BLI has two branch offices, namely Belawan & Surabaya branches, 20 Regional Divisions; 2 UPPs and 2 Depot Yards spread throughout Indonesia.

The service is supported by a supporting system that will benefit BLI service users, such as:

- Warehouse Integrated Application (WINA);
- Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);
- Depot Management and Agency (DENADA).



Kedudukan dan Tahun Operasi Komersial Domicile and Years of Commercial Operation	Jakarta, 1963
Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa Logistik Logistics Services
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	PT BGR Logistik Indonesia sebelumnya bernama PT Trisari Veem didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963. PT BGR Logistik Indonesia, previously known as PT Trisari Veem, was established based on a notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No. 49, dated November 19, 1963.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia: 99,96% PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri: 0,04%
Modal Dasar Authorized Capital	Rp5.000.000.000
Modal Disetor Paid in Capital	Rp.2.500.000.000
Status Operasional Operational Status	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Kalibesar Timur No. 5-7 Jakarta 11110 – Indonesia Telp Phone: (021) 691 6666 Fax: (021) 690 3162 Email: info@bgrlogistics.id
Susunan Pengurus Board of Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Independen merangkap PLT Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner : Bernadetta Raras Indah Rosari Direksi Board of Directors Direktur Utama President Director: Syailendra Direktur Komersial & Operasi Director of Commercial & Operations: Indra Iliana Direktur Keuangan, SDM, dan <i>Business Support</i> Director of Finance, HC, and Business Support: Energy

Kinerja Keuangan Financial Performance	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statements of Consolidated Financial Position				
Jumlah Aset Total Assets	527.154	280.799	246.355	87,73
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	454.135	219.658	234.477	106,75
Jumlah Ekuitas Total Equity	73.019	61.141	11.878	19,43
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
Penjualan Sales	901.734	763.406	138.328	18,12
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(756.715)	615.495	(1.372.210)	(222,94)
Laba Bruto Gross Profit	145.019	147.911	(2.892)	(1,96)
Beban Usaha Operating Expenses	(103.482)	(104.523)	1.041	1,00
Laba Usaha Operating Profit	41.538	43.388	(1.850)	(4,26)
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	10.265	9.748	517	5,30
Beban Lain-Lain Other Expenses	(7.848)	(7.085)	(763)	(10,77)
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Revenues (Expenses)	(2.565)	2.018	(4.583)	(227,11)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	38.973	45.406	(6.433)	(14,17)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(25.907)	(22.797)	(3.110)	(13,64)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	13.066	22.609	(9.543)	(42,21)
Jumlah Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak Total Other Comprehensive Loss, Net of Tax	(57)	(476)	419	88,03
Total Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	13.009	22.133	(9.124)	(41,22)

INFORMASI TENTANG KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM SERTA KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

INFORMATION ON THE CHRONOLOGY OF SHARES ISSUANCE AND LISTING AND THE CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Karena status PT Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah anak perusahaan BUMN dan bukan perusahaan publik, maka tidak ada informasi mengenai kronologi pencatatan/pergerakan harga saham yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Due to the status of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia as a subsidiary of SOE and not a public company, there is no information regarding the chronology of listing/share price movements that can be disclosed in this Annual Report.

Sampai dengan 31 Desember 2024, PPI juga tidak melakukan penerbitan obligasi atau efek lainnya. Oleh karenanya, tidak ada informasi yang dapat disajikan terkait dengan hal tersebut dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, PPI has not issued any bonds or other securities. Therefore, information regarding this matter is unavailable in this Annual Report.

DIVIDEN

DIVIDEND

Kebijakan dividen Perseroan berpedoman pada peraturan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembagian dividen juga mempertimbangkan kinerja keuangan serta strategi perusahaan di masa depan.

The Company's dividend policy adheres to internal regulations and applicable laws and regulations. In addition, dividend distribution also takes into account the Company's financial performance and future strategies.

Pada tahun 2024 Perseroan membagikan dividen atau laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp16.699.617.326 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

In 2024, the Company distributed dividends or the Company's net profit for the 2023 fiscal year, amounting to Rp16,699,617,326 (sixteen billion six hundred ninety-nine million six hundred seventeen thousand three hundred twenty-six rupiah).

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As of the end of 2024, the Company did not conduct a share ownership program for employees and/or management (ESOP/MSOP).



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTION AND PROFESSIONALS

Kantor Akuntan Publik		Public Accounting Firm	
Nama KAP:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	KAP Name:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
No. Registrasi:	KMK No.477/KM.1/2015	Registration No.:	KMK No.477/KM.1/2015
Alamat:	Plaza Asia, Level 10, Jl. Jenderal Sudirman No.59, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190	Address:	Plaza Asia, Level 10, Jl. Jenderal Sudirman No.59, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190
Situs Web:	https://www.rsm.global/indonesia/id	Website:	https://www.rsm.global/indonesia/id
Bentuk Jasa:	Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024	Form of Service:	General Audit of Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year
Jasa Lainnya:	Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan capaian Key Performance Indicator (KPI), Audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK)	Other Services:	General audit of compliance with laws and regulations, implementation of agreed procedures for Key Performance Indicator (KPI) achievement reports, General audit of financial statements for micro and small business financing programs (PUMK)
Periode Penugasan:	12 Desember 2024 s.d. 30 April 2025	Assignment Period:	December 12, 2024, to April 30, 2025
Biaya:	Rp750.000.000	Fee:	Rp750,000,000
Akuntan Publik		Public Accountant	
Nama AP:	Dewi Novita Sari	Public Accountant Name:	Dewi Novita Sari
No. Izin:	AP.1154	Permit No.:	AP.1154
Bentuk Jasa:	Termasuk dalam Kantor Akuntan Publik	Form of Service:	Included in Public Accounting Firm
Biaya:	Termasuk dalam biaya Kantor Akuntan Publik	Fee:	Included in Public Accounting Firm fees
Notaris		Notary	
Konsultan Hukum		Legal Consultant	
Nama:	Widyanusa - Widhi & Co Law Firm	Name:	Widyanusa - Widhi & Co Law Firm
Alamat:	Komplek Perkantoran Ciplaz Blok B1 Nomor 5 Jl. I Gusti Ngurah Rai Nomor 8 RT 004/RW 006, Jakarta Timur	Address:	Komplek Perkantoran Ciplaz Blok B1 Number 5, Jl. I Gusti Ngurah Rai Number 8, RT 004/RW 006, East Jakarta
Penugasan:	Pendampingan hukum serta penanganan perkara sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/38/II/RES.1.9/2024/Ditreskrimum, tanggal 5 Februari 2024, yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan Terlapor Sdri. Syulia Rahmayani, dan Bapak Tentrem Prihatin.	Assignment:	Legal assistance and handling of matters pertaining to the investigation conducted by the Regional Police of Metro Jaya, as stated in the Notification of Commencement of Investigation Number: SPDP/38/II/RES.1.9/2024/Ditreskrimum, dated February 5, 2024, addressed to the High Prosecutor's Office of DKI Jakarta, with Ms. Syulia Rahmayani and Mr. Tentrem Prihatin as the reported parties.
Nama:	JW and Partners Law Office	Name:	JW and Partners Law Office
Alamat:	Jln. Panju Nomor 14 RT 009/RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Address:	Jln. Panju Number 14, RT 009/RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Central Jakarta, DKI Jakarta
Penugasan:	Memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Bapak Charles Sitorus (Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia periode Tahun 2015 s/d 2016) sebagai Terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada periode tahun 2015 s/d 2016	Assignment:	Provision of legal aid and assistance to Mr. Charles Sitorus (Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the period of 2015 to 2016) as the Accused in the trial proceedings at the Corruption Criminal Court within the Central Jakarta District Court concerning the alleged Corruption Crime in sugar importation activities at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia during the period of 2015 to 2016.
Nama:	JW and Partners Law Office	Name:	JW and Partners Law Office
Alamat:	Jln. Panju Nomor 14 RT 009/RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Address:	Jln. Panju Number 14, RT 009/RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Central Jakarta, DKI Jakarta
Penugasan:	Pengajuan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata atas putusan pengadilan DKI nomor 538/Pdt/2022/PT. DKI jo Perkara nomor 146/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt. pst tertanggal 3 Maret 2023	Assignment:	Submission of a Cassation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case against the DKI court decision number 538/Pdt/2022/PT. DKI in conjunction with case number 146/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.pst, dated March 3, 2023.

Jasa Penilai	Appraisal Services
Nama: Persekutuan Perdata KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) Alamat: Kindo Office Square A5, Jalan Duren Tiga Raya No. 101, RT 06 RW 01 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan 12760 Penugasan: Penilaian atau taksasi atas Jaminan piutang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Kota Banda Aceh atas transaksi jual beli semen antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan CV Putra Kuta Raja/Firman Saputra	Name: Persekutuan Perdata KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) Address: Kindo Office Square A5, Jalan Duren Tiga Raya No. 101, RT 06 RW 01, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, South Jakarta 12760 Assignment: Appraisal or taxation of the collateral for receivables of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in Banda Aceh City concerning the cement sale and purchase transaction between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and CV Putra Kuta Raja/Firman Saputra.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



PPI memiliki situs web resmi dengan alamat <https://www.ptppi.co.id> sebagai situs web resmi perusahaan yang memuat seluruh informasi korporasi.

PPI has an official website at <https://www.ptppi.co.id>, which contains all corporate information.

Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai PPI kepada para pemangku kepentingan eksternal.

All information on the website is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. This website is optimized as an effective communication medium to convey various information about PPI to external stakeholders.



Pada prinsipnya, pengungkapan seluruh informasi umum perusahaan pada situs web memperhatikan 4 (empat) hal utama yang wajib diungkapkan, yaitu:

1. Informasi Umum Perseroan;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

In principle, disclosure of all general company information on the website takes into account 4 (four) key issues that must be disclosed, namely:

1. General Information of the Company;
2. Information for Capitalists or Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information

PEMENUHAN INFORMASI PADA SITUS WEB PPI

FULFILLMENT OF INFORMATION ON THE PPI WEBSITE

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Description
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholder to the Individual Ultimate Owner	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (over the last 5 years)	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	Tersedia pada situs web Perseroan Available on the Company's website



04

Analisis dan Pembahasan Man Management Discussion and Analysis



najemen
S

TINJAUAN PEREKONOMIAN

ECONOMIC OVERVIEW

Kondisi Perekonomian Tahun 2024

Kondisi makro ekonomi global pada tahun 2024 masih cukup fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari laporan International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3,2% pada tahun 2024 dan 2025.

Di satu sisi terjadi penurunan inflasi secara global. Setelah mencapai puncaknya di 9,4% pada kuartal ketiga tahun 2022, inflasi global diproyeksikan turun menjadi 3,5% pada akhir tahun 2024.

Meskipun ada kabar baik mengenai inflasi, perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Beberapa risiko utama meliputi: eskalasi konflik regional, khususnya di Timur Tengah, yang dapat mengganggu pasar komoditas, pergeseran kebijakan perdagangan dan industri yang tidak diinginkan, berpotensi menekan output ekonomi secara signifikan, penurunan tajam dalam arus migrasi ke negara-negara maju, yang dapat menghilangkan beberapa keuntungan pasokan tenaga kerja yang membantu menurunkan inflasi, dan pengetatan kondisi keuangan global yang tiba-tiba, yang dapat semakin menekan output ekonomi.

Di dalam negeri Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 mencapai 5,03%, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%.

Kementerian Keuangan RI mencatat, sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%. Stabilitas ekonomi dan politik, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh beberapa sektor utama yaitu: (1) Industri Pengolahan: Sebagai kontributor terbesar, sektor ini tumbuh sebesar 4,5%, didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran: Mencatat pertumbuhan 4,8%, sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat;

Economic Conditions in 2024

The global macroeconomic conditions in 2024 remained relatively volatile. This was reflected in the International Monetary Fund (IMF) report, which projects global economic growth of only 3.2% in 2024 and 2025.

On the one hand, there was a decline in global inflation. After peaking at 9.4% in the third quarter of 2022, global inflation is projected to fall to 3.5% by the end of 2024.

Despite the good news on inflation, the global economy remains uncertain. Key risks include: an escalation in regional conflicts, particularly in the Middle East, which could disrupt commodity markets; disfavored shifts in trade and industrial policies, potentially depressing economic output significantly; a significant decline in migration flows to advanced economies, which could remove some of the labor supply advantages that lead to lower inflation; and a sudden tightening of global financial conditions, which could further depress economic output.

Domestically, Statistics Indonesia (BPS) recorded that Indonesia's economy in 2024 grew by 5.03%, slowing down compared to the 2023 achievement, which grew by 5.05%.

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia recorded that throughout 2024, the Indonesian economy demonstrated strong and stable performance. This was reflected in the growth of Gross Domestic Product (GDP) of 5.1%, a slight increase compared to the previous year of 5.0%. Economic and political stability, driven by effective fiscal and monetary policies, has increased investor confidence and encouraged investment realization in various sectors.

In 2024, economic growth was driven by several main sectors, namely: (1) Manufacturing Industry: As the most significant contributor, this sector grew by 4.5%, supported by increased manufacturing production and exports of processed products; (2) Wholesale and Retail Trade: Recording growth of 4.8%, this sector benefited from increasing domestic consumption and people's purchasing



(3) Informasi dan Komunikasi: Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3%, sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas; serta (4) Pengeluaran dan Konsumsi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,9%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,6%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2%, sementara impor meningkat 3,5%. Meskipun demikian, neraca perdagangan tetap terjaga dengan baik.

Tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,8%, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

power; (3) Information and Communication: With the highest growth achieving 9.3%, this sector continues to grow along with ever-expanding digitalization and internet penetration; and (4) Expenditure and Consumption.

On the expenditure side, household consumption remained the primary driver with a growth of 4.9%. Investment or Gross Fixed Capital Formation (GFCF) also showed an increase of 4.6%, reflecting investor confidence in Indonesia's economic prospects.

Despite global challenges, Indonesia's export performance of goods and services grew by 3.2%, while imports increased by 3.5%. Nevertheless, the trade balance remained properly maintained.

Throughout 2024, the inflation rate was recorded at 2.8%, within the target range established by the government and Bank Indonesia. This represents the government's ability to maintain price stability and people's purchasing power.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

PPI memiliki segmentasi produk yang cukup luas yang mencakup berbagai bidang mulai dari perdagangan non bahan pokok, perdagangan bahan pokok, produk strategis, produk penjualan ekspor, transisi bisnis, dan anak perusahaan.

Dari rentang produk tersebut, ada beberapa produk yang cukup terdampak terhadap ancaman resesi makro ekonomi global dimana terjadi peningkatan dari inflasi dan pelemahan kurs, penurunan harga beberapa komoditas minyak mentah, CPO dan logam dasar, ditambah situasi kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar Rupiah yang berpengaruh terhadap kinerja penjualan Bahan Berbahaya pada periode ini. Produk-produk yang terpengaruh kondisi di atas antara lain:

- Harga pupuk global mengalami peningkatan harga seiring meningkatnya harga gas dunia yang berpengaruh juga terhadap peningkatan harga dan ketersediaan bahan baku produksi pupuk PIHC.
- Pelemahan nilai kurs, peningkatan biaya logistik, dan pelemahan daya beli di pasar global menyebabkan kendala pada realisasi potensi ekspor.

PPI has extensive product segmentation that covers various fields, including non-staple trade, staple trade, strategic products, export sales products, business transitions, and subsidiaries.

From the product range, several products are affected by the threat of global macroeconomic recession, in which there is an increase in inflation and weakening exchange rates, as well as a decrease in the prices of several crude oil commodities, CPO, and base metals. Moreover, the Rupiah exchange rate stabilization policy continues to be strengthened to control imported inflation and mitigate the impact of the global financial market uncertainty on the Rupiah exchange rate, affecting the sales performance of Hazardous Materials during this period. Products affected by the conditions as mentioned above include:

- Global fertilizer prices have increased in line with rising world gas prices, which have also affected the increase in prices and availability of raw materials for PIHC fertilizer production.
- The weakening exchange rate, increasing logistics costs, and weakening purchasing power in the global market have led to obstacles in realizing export potential.

Di samping faktor makro ekonomi, beberapa komoditi unggulan PPI juga merupakan komoditi yang memiliki ketergantungan pada kebijakan stakeholders lain seperti Kementerian dan Lembaga. Impor produk Bahan Kimia relatif bergantung terhadap Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Hal tersebut turut menjadi hal yang berpengaruh kepada pencapaian Perseroan dimana sampai dengan Desember tahun 2024 sendiri, transaksi penjualan bahan kimia dengan kuantum besar baru dapat dilakukan penjualan dengan stock dari impor tahun lalu. Di sisi lain ada proses pengadaan bahan kimia yang juga memakan waktu sehingga membuka celah masuknya penjualan bahan kimia ilegal ex-China di pasaran.

Dengan kondisi tersebut, PPI sampai dengan Desember tahun 2024 berhasil mencatat penjualan sebesar Rp3,10 triliun atau 84% dari target RKAP s.d. Desember tahun 2024, dan meningkat sebesar 35,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari aspek detail komoditi pada kinerja sampai dengan Desember tahun 2024, ada beberapa komoditi yang meningkat pencapaiannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu komoditi Pupuk Subsidi, Pestisida Dharmabrand, Farmasi dan Alat Kesehatan, Bahan Bangunan, Produk Pangan dan Hortikultura, Produk Non Pangan, Ekspor, WIS dan Anak Perusahaan. Di sisi lain komoditi Penjualan Pupuk Non Subsidi, Pestisida Non Dharmabrand, Produk dan Alat Pertanian, Bahan Kimia Non B2, Produk Pangan dan Bahan Pokok, Produk Konsumsi, CPP, Property mengalami penurunan dibandingkan sampai dengan Desember tahun 2023.

Berdasarkan kontribusi omzet, pareto dari penjualan sampai dengan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut: Perdagangan Non Bahan Pokok (21%), Perdagangan Bahan Pokok (11%), Produk Strategis (37%), Produk Ekspor (0,7%), Transisi Bisnis (1%), Anak Perusahaan (29%).

Apart from macroeconomic factors, several leading PPI commodities are also commodities that depend on the policies of other stakeholders, such as Ministries and Institutions. Imports of Chemical products depend relatively on the Import Approval Letter (SPI) from the Ministry of Trade.

This also impacts the Company's achievements, in which, as of December 2024, chemical sales transactions with large quantities can only be made with stock from the previous year's imports. On the other hand, there was a time-consuming chemical procurement process, thus opening up a gap for the entry of illegal ex-China chemical sales on the market.

With such conditions, as of December 2024, PPI managed to record sales of Rp3.10 trillion or 84% of the RKAP target until December 2024, and it increased by 35.39% compared to the same period last year.

From the aspect of commodity details in performance until December 2024, several commodities have increased their achievements compared to the same period last year, namely Subsidized Fertilizers, Dharmabrand Pesticides, Pharmaceuticals and Medical Devices, Building Materials, Food and Horticultural Products, Non-Food Products, Exports, WIS, and Subsidiaries. On the other hand, the Sales of Non-Subsidized Fertilizers, Non-Dharmabrand Pesticides, Agricultural Products and Equipment, Non-Hazardous Chemicals, Food and Staple Products, Consumer Products, CPP, and Property have decreased compared to December 2023.

Based on the sales contribution, the Pareto of sales up to December 2024 is as follows: Non-Staple Trade (21%), Staple Trade (11%), Strategic Products (37%), Export Products (0.7%), Business Transition (1%), Subsidiaries (29%).



Pendapatan per Segmen Usaha | Revenue per Business Segment

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Komoditi/Lini Bisnis Commodity/Line of Business	2024			2023		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%
Perdagangan Non Bahan Pokok Non-Staple Trade	651,1	39,2	6,0%	554,2	35,2	6,36%
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	414,7	14,7	3,5%	329,5	12,4	3,8%
Pupuk Non Subsidi Non-subsidized Fertilizer	69,8	4,5	6,4%	73,4	3,7	5,1%
Pertisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	31,5	9,0	28,7%	26,1	9,6	36,7%
Pestisida Non-Dharmabrand Non-Dharmabrand Pesticides	3,2	0,2	7,5%	5,0	0,5	10,0%
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Products and Equipment	0,5	0,0	4,5%	0,0	0,0	0,0%
Farmaasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	58,4	6,5	11,1%	31,9	4,0	12,6%
Bahan Kimia Non B2 Non Hazardous Chemicals	50,8	3,4	6,7%	74,1	4,2	5,7%
Bahan Bangunan Building Materials	22,1	0,9	4,0%	14,1	0,7	5,1%
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	344,9	17,7	5,1%	436,7	31,9	7,31%
Produk Pangan dan Bahan Pokok Food and Staple Products	70,4	2,8	3,9%	243,8	17,3	7,1%
Produk Konsumsi Consumer Products	92,4	4,7	5,0%	94,7	6,6	7,0%
CPP*	182,1	10,3	5,7%	98,3	8,0	8,2%
Produk Strategis Strategic Products	1.145,5	93,2	8,1%	605,4	81,0	13,37%
Produk Pangan dan Hortikultura Food and Horticultural Products	824,7	23,1	2,8%	367,9	20,4	5,5%
Non Pangan Non-Food	320,8	70,1	21,8%	237,5	60,6	25,5%
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	22,1	1,0	4,3%	7,8	0,1	1,1%
Ekspor Export	22,1	1,0	4,3%	7,8	0,1	1,1%
Transisi Bisnis Business Transition	51,2	47,9	93,6%	26,7	20,9	78,2%
Property	47,7	47,7	100,0%	25,9	20,8	80,4%
WIS	3,5	0,2	6,6%	0,8	0,1	9,1%
Anak Perusahaan Subsidiaries	884,5	143,9	16,3%	758,1	141,2	18,67%
TOTAL	3.099,40	342,9	11,1%	2.289,3	302,3	13,2%

*) CPP di Perdagangan Bahan Pokok merupakan pendapatan dari pelaksanaan proyek stunting | CPP in Staple Trade is a revenue generated from the implementation of stunting projects

Berikut uraian kinerja masing-masing segmen usaha Perseroan:

A. PERDAGANGAN BAHAN POKOK

Pada tahun 2024 segmen Perdagangan Bahan Pokok berhasil mencatatkan pendapatan Rp344,9 miliar. Hal ini menurun apabila dibandingkan kinerja tahun 2023 yakni mencapai Rp436,7 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp17,7 miliar rupiah, atau 5,1% dari pendapatan.

Sampai dengan Desember 2024, kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari produk perdagangan bahan pokok adalah CPP dengan kontribusi pendapatan 53% dan 58% untuk laba kotor.

The following is a description of the performance of each of the Company's business segments:

A. STAPLE TRADE

In 2024, the staple trade segment managed to record Rp344.9 billion in revenue. This showed an decrease compared to the performance in 2023 of Rp436.7 billion. From these sales, the Company managed to record a gross profit of Rp17.7 billion, or 5.1% of revenue.

As of December 2024, CPP was the most significant contributor to revenue and gross profit from staple trade products, with a revenue contribution of 53% and 58% for gross profit.

Apabila dibandingkan targetnya pada periode yang sama, maka realisasi penjualan Perdagangan Bahan Pokok tercapai 30% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan dengan Desember 2023, pencapaian pendapatan sebesar 102%.

Untuk lebih detail, faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

1. Produk Pangan dan Bahan Pokok

Produk ini terdapat produk Pangan dan Bahan Pokok dengan pendapatan sebesar Rp70,40 miliar. Salah satu penyumbang pendapatan dari kelompok produk pangan dan bahan pokok adalah dari penjualan Beras SPHP. Perusahaan mengharapkan adanya kenaikan pendapatan karena telah diterbitkan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, yang memberikan tambahan insentif faktor pengali kemasan jika produsen menjual ke BUMN Pangan.

Selain minyak goreng, PPI juga membuka peluang Kerjasama pendistribusian Beras SPHP. Kerjasama tersebut dilakukan dengan mengandeng BULOG dan telah direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2024.

2. Produk Konsumsi

Produk Unilever merupakan produk yang memiliki omset sebesar Rp92,37 miliar. Pendapatan dari Unilever cenderung stagnan berkaitan dengan isu pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, selain itu juga terdapat masalah modal kerja untuk pengadaan Unilever. PPI juga membuka peluang kedistributoran Daesang yang telah *golive* pada Juni 2024 dengan wilayah kedistributoran pada Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Rencana kedepan akan dilakukan penambahan wilayah kedistributoran wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

3. Penugasan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

CPP di produk pangan dan bahan pokok berupa penyaluran bantuan pangan stunting (daging unggas dan telur) yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara senilai Rp182,10 miliar.

Compared to the target in the same period, the realization of Staple Trade sales reached 30% of its target. Meanwhile, compared to December 2023, the revenue reached 102%.

In more detail, the main factors affecting the performance of each commodity are:

1. Food and Staple Products

This product contains Food and Staple Food products with revenue reaching Rp70.40 billion. The sale of SPHP Rice is one of the contributors to revenue from the food and staple product group. The Company expects an increase in revenue due to the issuance of the Minister of Trade Regulation Number 18 of 2024 concerning packaged palm cooking oil and the management of people's cooking oil, which provides additional incentives for packaging multiplier factors in the event that producers sell to BUMN Pangan.

Not only cooking oil, but PPI also creates opportunities for SPHP Rice distribution cooperation. The collaboration was carried out with BULOG and was actualized in the fourth quarter of 2024.

2. Consumer Products

Unilever products generated a sale of Rp92.37 billion. Unilever's revenue tended to stagnate due to the issue of boycotting products affiliated with Israel, in addition there was also an issue of working capital for Unilever procurement. PPI also creates opportunities for Daesang distributors who have been going live in June 2024 with distribution areas in Central Jakarta and North Jakarta. For future plans, there will be added distribution areas in West Jakarta and South Jakarta.

3. Assignment of Government Food Reserve (CPP)

CPP in food and staple products was the distribution of stunting food assistance (poultry and eggs) in the Central Java and North Sumatra regions, amounting to Rp182.10 billion.

B. PERDAGANGAN NON-BAHAN POKOK

Pada tahun 2024 segmen Perdagangan Non Bahan Pokok berhasil mencatatkan pendapatan Rp651,1 miliar. Hal ini meningkat apabila dibandingkan kinerja tahun 2023 yakni mencapai Rp554,2 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp39,2 miliar rupiah, atau 6,0% dari pendapatan.

B. NON-STAPLE TRADE

In 2024, the Non-Staple Trade segment managed to record Rp651.1 billion in revenue. This number increased compared to the performance in 2023 of Rp554.2 billion. From these sales, the Company managed to record a gross profit of Rp39.2 billion, or 6.0% of revenue.

Sampai dengan Desember 2024 kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari perdagangan non bahan pokok adalah pupuk subsidi yang secara pencapaian pendapatan sebesar 64% dan kontribusi laba kotor 37% dari total laba kotor produk non bahan pokok.

Secara total dari perdagangan non bahan pokok, realisasi pendapatan periode berjalan sebesar 76% dan laba kotor 82% dari target pada periode yang sama. Namun jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, pencapaian pendapatan meningkat sebesar 18% dan laba kotor meningkat sebesar 11%.

Untuk lebih detail, faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

1. Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi meningkat sebesar 14% dari target sampai dengan Desember Tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya pengalihan alokasi penyaluran PT SHS kepada PT PPI. Saat ini PPI menjaga hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi.

2. Pupuk Non-Subsidi

Secara umum, pendapatan pupuk non-subsidi mencapai 57% dari target RKAP periode berjalan yang disebabkan antara lain:

- Fluktuasi harga pupuk non subsidi mengakibatkan penurunan daya beli;
- Komoditi pupuk non-subsidi cukup terpengaruh kondisi makroekonomi global dan geopolitik yang menyebabkan tingginya harga bahan baku pupuk yang mayoritas masih impor. Namun, tingginya harga tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan harga jual hasil pertanian;
- Rencana pendistribusian Pupuk NPK Mutiara terdampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga Pupuk NPK Mutiara 16-16-16 merangkak naik dan pasokan barang terganggu dikarenakan pupuk tersebut adalah produk Impor dari Rusia sehingga rencana tersebut tidak terlaksana sementara untuk NPK Petro Nitrat milik PIHC juga memiliki harga yang tinggi di pasar;
- Bahan baku yang dimiliki PIHC saat ini diprioritaskan untuk produksi pupuk subsidi sehingga hasil produksi SP-26, Nitralite, dan NPK Phonska Plus sangat terbatas dan menyebabkan kelangkaan stok pada gudang penyangga dan peningkatan harga;

As of December 2024, the most significant contributor to revenue and gross profit from non-staple trade was subsidized fertilizer, which, in terms of revenue, reached 64%, and gross profit contributed 37% of the total gross profit of non-staple products.

Overall, the realization of revenue for non-staple trade in the current period was 76%, and gross profit was 82% of the target in the same period. However, compared to the previous year, revenue achievement increased by 18%, and gross profit increased by 11%.

In more detail, the main factors affecting the performance of each commodity are:

1. Subsidized Fertilizers

Subsidized fertilizers increased by 14% from the target until December 2024 due to the transfer of distribution allocation from PT SHS to PT PPI. PPI currently maintains relationships with customers to maintain the distribution of subsidized fertilizers according to the allocation.

2. Non-Subsidized Fertilizers

Generally, revenue from non-subsidized fertilizers reached 57% of the RKAP target for the current period, which was mainly due to:

- Fluctuations in the price of non-subsidized fertilizers have led to a decrease in purchasing power;
- Non-subsidized fertilizer commodities were affected by global macroeconomic and geopolitical conditions, which have caused high prices for fertilizer raw materials, the majority of which remained imported. However, the high price was not counterbalanced by an increase in the selling price of agricultural products;
- The distribution plan for NPK Mutiara Fertilizer was affected by the war between Russia and Ukraine, which caused the price of NPK Mutiara 16-16-16 Fertilizer to increase, and the supply of goods was disrupted as the fertilizer was an imported product from Russia, making the plan was unfulfilled while PIHC's NPK Petro Nitrate also has a high price on the market;
- PIHC's raw materials are currently prioritized for the production of subsidized fertilizers, resulting in the production of SP-26, Nitralite, and NPK Phonska Plus being very limited and causing a shortage of stock in buffer warehouses and inflation;

- Harga Tandan Buah Sawit (TBS) mengalami penurunan, sehingga petani menunda/ mengurangi pemupukan;
- Kebijakan terkait komitmen *cash flow* kegiatan trading dengan Holding IDFOOD.

- The price of Fresh Fruit Bunches (FFB) has decreased, making the farmers postpone/reduce fertilization;
- Policy related to cash flow commitment for trading activities with IDFOOD Holding.

3. Dharmabrand

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi sampai dengan Desember 2024 antara lain:

- Adanya penurunan harga komoditi di pasar yang berbanding terbalik dengan kenaikan harga bahan aktif pestisida Dharmabrand;
- Masuknya produk baru pada komoditi pestisida dengan formulasi yang sama dengan harga yang lebih kompetitif;
- Kegiatan promosi, optimalisasi rantai pasok, penataan pola perdagangan, dan product knowledge kepada salesman belum secara optimal dilakukan;
- Pembentukan kedistributoran R1 belum optimal dikarenakan kurangnya stock serta kurangnya promosi baik ke pengguna akhir ataupun insentif kepada distributor;
- Penjualan Dharmabrand melalui e-katalog belum dapat dilakukan dikarenakan belum memenuhi TKDN;
- Belum optimalnya pembentukan strata harga, sehingga ketika ekonomi mengalami kontraksi dan kompetitor menerapkan harga yang lebih murah, harga produk Dharmabrand menjadi tidak kompetitif di pasaran.

3. Dharmabrand

Factors affecting commodity sales performance as of December 2024 include:

- A decrease in market commodity prices, contrasting with an increase in Dharmabrand pesticide active ingredient prices;
- The introduction of new products in the pesticide commodity with the same formulation at more competitive prices;
- Promotional activities, supply chain optimization, trade pattern organization, and product knowledge training for salesmen were not optimally implemented;
- The establishment of R1 distributorship was sub-optimal due to a lack of stock and a lack of promotion to end users or incentives to distributors;
- Dharmabrand sales through e-catalogs cannot be implemented as they have not met the TKDN;
- The suboptimal price stratification has made Dharmabrand products uncompetitive in the market, particularly during economic downturns when competitors offer lower prices.

4. Farmasi & Alat Kesehatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi sampai dengan Desember 2024 adalah proses pemenuhan perizinan di setiap cabang, pemutakhiran model bisnis dengan prinsipal dan *selective customer* produk farmasi untuk menjaga *cash flow*.

Untuk komoditi farmasi dan alat kesehatan, upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan *customer* yang telah terseleksi dan *engagement* dengan prinsipal farmasi melalui kepastian pembayaran.

4. Pharmaceuticals & Medical Devices

Factors influencing commodity sales performance until December 2024 include the licensing process at each branch, updating the business model with principals, and selective customer engagement for pharmaceutical products to maintain cash flow.

For pharmaceutical commodities and medical devices, efforts have been taken to maintain selected customers and engagement with pharmaceutical principals through payment assurance.



5. Produk Non Pangan Lainnya

Usulan pengajuan alokasi SPI Bahan Kimia Non B2 berdasarkan surat minat dari calon *buyer*/pembeli dan percepatan proses perolehan SPI melalui koordinasi dengan para *stakeholder* terkait.

5. Other Non-Food Products

Proposal for submission of SPI allocation for Non-Hazardous Chemical Materials based on letters of intent from prospective buyers and acceleration of the SPI acquisition process by coordinating with relevant stakeholders.

C. PRODUK STRATEGIS

Pada tahun 2024 segmen Produk Strategis berhasil mencatatkan pendapatan Rp1.145,0 miliar. Hal ini merupakan peningkatan signifikan apabila dibandingkan kinerja tahun 2023 yakni mencapai Rp605,4 miliar. Dari penjualan tersebut, Perseroan berhasil menorehkan laba kotor Rp93,2 miliar rupiah, atau 8,1% dari pendapatan.

Sampai dengan bulan Desember 2024 kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari produk strategis adalah dari Produk Pangan dan Hortikultura yaitu kontribusi pendapatan sebesar 72% dan laba kotor sebesar 25%.

Apabila dibandingkan targetnya, maka realisasi Produk Strategis sampai dengan Desember 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 107% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan dengan periode sampai dengan Desember 2023, pencapaian mengalami peningkatan pendapatan sebesar 89%.

Faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian Produk Strategis adalah:

1. Bahan Kimia

Produk bahan kimia merupakan salah satu produk inti yang memiliki kontribusi besar di PPI, namun cukup terpengaruh dari waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) mengingat karakteristiknya yang merupakan produk teregulasi. Selain itu, kondisi makroekonomi dan geopolitik global juga memiliki pengaruh pada ketersediaan dan harga mengingat produk tersebut didapatkan melalui impor.

2. Produk Impor Hortikultura

Pada produk pangan dan hortikultura terdapat realisasi penjualan beras khusus impor senilai Rp70,16 miliar serta CPP daging ruminansia berupa daging kerbau impor sebesar 13.104 MT atau senilai Rp754,6 miliar.

C. STRATEGIC PRODUCTS

In 2024, the Strategic Products segment managed to record Rp1,145.0 billion in revenue. This number shows a significant increase compared to the performance in 2023 of Rp605.4 billion. According to these sales, the Company managed to record a gross profit of Rp93.2 billion, or 8.1% of revenue.

As of December 2024, Food and Horticultural Products were the most significant contributors to revenue and gross profit from strategic products, which contributed revenue of 72% and gross profit of 25%.

Compared to the target, the realization of Strategic Products until December 2024 significantly increased 107% of the target. Meanwhile, compared to the period until December 2023, the achievement experienced an increase in revenue of 89%.

The main factors affecting the performance of Strategic Products are:

1. Chemical Products

Chemical products are one of the core products that significantly contribute to PPI. However, their performance is somewhat affected by the timing of the issuance of Import Approval Letters (SPI) due to their regulated nature. Additionally, global macroeconomic and geopolitical conditions influence availability and pricing since these products are obtained through imports.

2. Horticultural Import Products

In food and horticultural products, there was a realization of sales of special imported rice amounted to Rp70.16 billion and CPP ruminant meat in the form of imported buffalo meat of 13,104 MT or Rp754.6 billion.

D. EKSPOR

Realisasi ekspor kopi dari Lampung ke Mesir senilai 16,93 miliar atau sebanyak 38,6 MT ke Mesir.

Pencapaian ekspor ini sudah meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 184%. Adapun hal-hal yang memengaruhi kinerja ekspor adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas *supplier* untuk produk rumput laut;
- Adanya masalah pengiriman mengingat ketersediaan kapal dan *traffic* pengapalan pada akhir tahun;
- Terjadi pembatasan uang keluar yang mempengaruhi transaksi perdagangan dari negara *buyer* (Mesir) yang menyebabkan belum optimalnya ekspor kopi dikarenakan adanya perubahan regulasi dari pemerintah Mesir terkait pembayaran ke importir dalam bentuk LC sementara kontrak dengan metode *cash against document* (CAD);
- Selain hal tersebut bisnis ekspor juga terpengaruh dari faktor makroekonomi yang menyebabkan peningkatan kurs, faktor geopolitik yang menyebabkan peningkatan biaya *international shipping*.

Terhadap hal-hal tersebut, saat ini Perseroan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mencari sumber baru untuk produk rumput laut kering;
- Melanjutkan pencarian *supplier* untuk minyak goreng yang memiliki standar ekspor;
- Penjajakan dengan *customer* baru untuk kopi antara lain Jepang dan London, mereview skema RO (*Representative Office*) saat ini untuk mendorong untuk perluasan wilayah kerja;
- Mencari beberapa peluang pada negara yang kesulitan mendapatkan pasokan komoditi dengan menganalisa skema aliran uang agar risiko *default* dapat diminimalisir;
- Pengembangan produk ekspor lainnya melalui penguatan *engagement* dengan UMKM.

E. TRANSISI BISNIS

1) SBU Properti

Perubahan regulasi terkait peruntukan penggunaan bangunan di wilayah-wilayah strategis yang diterbitkan Pemerintah Wilayah setempat, sehingga mengharuskan penyesuaian terhadap pencarian mitra dengan peruntukan yang sesuai (layout berbeda dengan peruntukan sebelumnya).

D. EXPORT

The realization of coffee exports from Lampung to Egypt amounted to Rp16.93 billion or 38.6 MT to Egypt.

This export performance has increased significantly compared to the previous year by 184%,. The following are the factors that affect export performance:

- Difficulty in seeking reliable vendors for seaweed products;
- There were shipping issues considering the availability of vessels and shipping traffic at the end of the year;
- There were restrictions on expenditure that affect trade transactions from the buyer's country (Egypt), which led to sub-optimal coffee exports due to changes in regulations from the Egyptian government regarding payments to importers in the form of LC while contracts use the cash against document (CAD) method;
- Moreover, the export business was also affected by macroeconomic factors that increased the exchange rate and geopolitical factors that resulted in a rising international shipping cost.

In response to these matters, the Company has currently taken the following steps:

- Increasing supplier capacity for grass products
- Persisting the search for suppliers for cooking oil with export standards;
- Exploring with new customers for coffee, including Japan and London, reviewing the current RO (*Representative Office*) scheme to encourage expansion of work areas;
- Seeking several opportunities in countries that have difficulty obtaining commodity supplies by analyzing cash flow schemes to minimize the risk of default;
- Developing other export products by strengthening engagement with MSMEs.

E. BUSINESS TRANSITION

1) SBU Property

Regulatory Changes regarding the designation of building use in strategic areas were issued by the local regional government, thereby requiring adjustments to the partner acquisition with the appropriate designation.

Progress komersialisasi aset tetap pada tahun 2024 ditargetkan 204 titik aset potensial, dimana dalam triwulan keempat target terselesaikan, realisasi sampai dengan Desember Tahun 2024 sudah terealisasi sebanyak 199 titik aset terkomersialisasi. SBU Property juga mengelola salah satu bisnis unit PT PPI berupa pengelolaan SPBU yang berada di Kampung Bandan Jakarta Utara dan Cafe Covare yang berada di Graha PPI dan Waskita Rajawali Tower yang baru dibuka pada tahun 2024. Kinerja SPBU saat ini sudah ditutup dari bulan Juni sampai dengan saat ini tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan SPBU dikarenakan adanya piutang atas aset yg disewa oleh ex PT. BGR sehingga pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Patra Niaga tidak dapat dilakukan dan belum adanya bahan bakar subsidi seperti solar, dan pertalite, hal ini dikarenakan adanya persyaratan dari Pertamina terkait izin usaha KBLI dan administrasi lain untuk perdagangan kecil sebagai operator SPBU (Dalam PP No 29 Tahun 2021 bahwa KBLI Perdagangan Besar tidak dapat digabungkan dengan Perdagangan Eceran).

2) SBU WIS

Sampai dengan Desember 2024 realisasi SBU WIS senilai Rp3,51 Miliar (12%) dari target RKAP 2024 dengan penjualan barang bekas milik PT Kereta Commuter Indonesia.

Untuk saat ini PPI sedang menjajaki peluang kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk komoditi B3 yang akan direalisasikan tahun 2025.

F. KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2024, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak usaha yakni, PT PPI Industri (dahulu PT Dharma Niaga Putera Steel) dan PT BGR Logistik Indonesia (dahulu PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPII") sebelumnya dikenal sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul Hadi, S.H., No. 33 tanggal 18 September 1986. Kegiatan utama PPII termasuk manufaktur dan perdagangan dalam rangka menunjang operasional bisnis entitas induk.

In 2024, the commercialization of fixed assets targeted 204 potential asset points. This target was met by the fourth quarter, with 199 commercialized asset points realized by December 2024. SBU Property also managed several business units of PT PPI, including the gas station in Kampung Bandan, North Jakarta, and Cafe Covare, located in Graha PPI and Waskita Rajawali Tower, which just opened in 2024. The gas station's performance has been impacted, as it has been closed since June and was unable to operate. This was due to account receivables on leased assets by former PT BGR, which has prevented the distribution of fuel by PT Pertamina Patra Niaga. Additionally, there was a lack of subsidized fuels, such as diesel and Pertalite. This situation stemmed from Pertamina's requirements regarding KBLI business permits and other administrative permissions for small-scale trade as a gas station operator. (According to Government Regulation No. 29 of 2021, Wholesale Trade KBLI cannot be merged with Retail Trade).

2) SBU WIS

As of December 2024, the realization of SBU WIS amounted to Rp3.51 billion (12%) of the 2024 RKAP target with the sale of PT Kereta Commuter Indonesia's used goods.

Currently, PPI is exploring opportunities for collaboration with PT Dok and Perkapalan Kodja Bahari (Persero) and PT Geo Dipa Energi (Persero) for B3 commodities, which are expected to be realized in 2025.

F. SUBSIDIARY PERFORMANCE

As of December 31, 2024, PPI consists of 2 (two) subsidiary entities, namely, PT PPI Industri (formerly PT Dharma Niaga Putera Steel) and PT BGR Logistik Indonesia (formerly PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPII"), formerly known as PT Dharma Niaga Putera Steel, was established based on notarial deed No. 33 of Syamsul Hadi, S.H., dated September 18, 1986. PPII's main activities include manufacturing and trading to support the parent entity's business operations.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) ("BGRLI") didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963. Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 tanggal 13 Oktober 2021, kegiatan utama PT BGR Logistik Indonesia termasuk jasa logistik dan sewa gudang.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia (formerly known as PT Trisari Veem) ("BGRLI") was established based on notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No.49 dated November 19, 1963. Based on notarial deed of Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated October 13, 2021, PT BGR Logistik Indonesia's main activities include logistics services and warehouse rent.

Kinerja Entitas Anak | Performance of Subsidiaries Entity

Dalam juta Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Pendapatan Revenues					
PT BGR Logistik Indonesia	901.734	763.406	696.082	138.328	18,12
PT PPI Industri	44.847	40.792	81.452	4.055	9,94
Total	946.581	804.198	777.534	142.383	17,70
Laba Kotor Gross Profits					
PT BGR Logistik Indonesia	145.019	147.911	144.797	(2.892)	(1,96)
PT PPI Industri	2.641	1.934	9.024	707	36,56
Total	147.660	149.845	153.821	(2.185)	(1,46)

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

Tinjauan keuangan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, mencerminkan posisi keuangan konsolidasian Grup per 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial overview in this section refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2024, and 2023. The Financial Statements have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm.

The auditor provided an opinion that the Company's consolidated financial statements were presented fairly in all material respects, reflecting the Group's consolidated financial position as of December 31, 2024, and the consolidated financial performance and cash flows for the year that ended in those dates, in line with Indonesian Financial Accounting Standards.



ANALISIS POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

“Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan PPI. Di tahun 2024, Jumlah Aset PPI mencapai Rp4,98 triliun. Sedangkan Liabilitas Perseroan mencapai Rp1,38 triliun dan Ekuitas mencapai Rp3,60 triliun. | Financial Position presents a glance of PPI’s asset and capital strength. In 2024, PPI’s Total Assets reached Rp4.98 trillion. Meanwhile, the Company’s Liabilities reached Rp1.38 trillion and Equity reached Rp3.60 trillion.

Laporan Posisi Keuangan | Statements of Financial Position

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

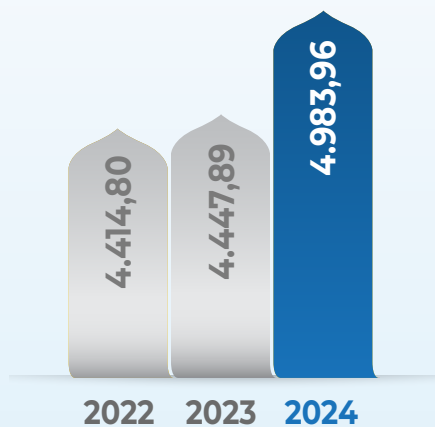
Posisi Keuangan Financial Position	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	1.204,86	670,81	770,03	534,05	79,61
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.779,10	3.777,08	3.644,77	2,02	0,05
Jumlah Aset Total Assets	4.983,96	4.447,89	4.414,80	536,07	12,05
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.247,56	784,44	754,35	463,12	59,04
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	136,88	952,15	995,41	815,27)	85,62)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.384,44	1.736,59	1.749,76	352,15)	20,28)
Ekuitas Equity	3.599,52	2.711,29	2.665,03	888,23	32,76
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.983,96	4.447,89	4.414,80	536,07	12,05

*) Disajikan kembali | As restated

ASET

ASSETS

Total Aset 2022-2024
Total Assets 2022-2024
(Rp-miliar | Rp-billion)



Jumlah Aset PPI tahun 2024 mencapai Rp4,98 triliun, mengalami peningkatan 12,05% dibandingkan tahun 2023.

In 2024, the total PPI assets reached Rp4.98 trillion, an increase of 12.05% compared to 2023.

Total Aset 2022-2024 (Rp-miliar) | Total Assets 2022-2024 (Rp-billion)

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Aset Assets	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	1.204,86	670,81	770,03	534,05	79,61
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.779,10	3.777,08	3.644,77	2,02	0,05
Jumlah Aset Total Assets	4.983,96	4.447,89	4.414,80	536,07	12,05

*) Disajikan kembali | As restated

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2023, Total Aset Lancar tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 79,61%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,05%, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Asset Performance was influenced by Current Assets and Non-Current Assets. Compared to 2023, Total Current Assets in 2024 increased by 79.61%, while Total Non-Current Assets in 2024 increased by 0.05%, as described below.

Aset Lancar | Current Assets

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Aset Lancar Current Assets	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	146,20	62,71	181,42	83,49	133,14
Deposito Berjangka Time Deposits	-	-	3,00	-	-
Piutang usaha – bersih Trade receivables—net					
Pihak Berelasi Related Parties	126,60	92,42	155,70	34,18	36,98
Pihak Ketiga Third Parties	559,36	192,25	110,46	367,11	190,95
Piutang Lain-lain Other Receivables	31,90	1,95	11,71	29,95	1.535,90
Persediaan Inventories	64,92	113,34	97,03	(48,42)	(42,72)
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual Non-current assets held for sale	59,26	-	-	59,26	-
Uang muka Advances	148,20	120,96	113,86	27,24	22,52
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	34,72	57,71	55,84	(22,99)	(39,84)
Biaya dibayar di muka Prepaid expenses	33,69	29,47	41,02	4,22	14,32
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.204,86	670,81	770,03	534,05	79,61

*) Disajikan kembali | As restated

Jumlah Aset Lancar tahun 2024 sebesar Rp1,20 triliun, naik 79,61% atau setara dengan Rp534,05 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp670,81 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Kas dan setara kas, serta piutang usaha, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

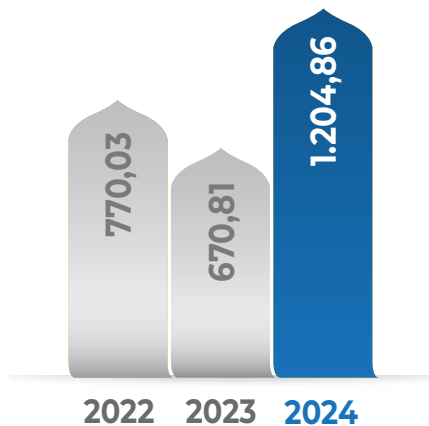
In 2024, total Current Assets amounted to Rp1.20 trillion, increased by 79.61%, equivalent to Rp534.05 billion, compared to Rp670.81 billion in 2023. This increase was mainly due to increases in cash and cash equivalents, as well as trade receivables, as described below.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Current Assets is presented in the chart below.

Aset Lancar 2022-2024 Current Assets 2022-2024

(Rp-miliar | Rp-billion)



Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perseroan tahun 2024 sebesar Rp146,20 miliar, meningkat 133,14.% atau setara dengan Rp83,49 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp62,71 miliar.

Piutang Usaha - Bersih

Piutang Usaha - Bersih tahun 2024 terdiri dari Piutang Usaha – Pihak Berelasi sebesar Rp126,60 miliar, Piutang Usaha – Pihak Ketiga sebesar Rp559,36 miliar dan Piutang Lain-lain sebesar Rp31,90 miliar. Ketiga pos ini meningkat dibanding tahun 2023.

Persediaan

Persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset yang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan tahun 2024 sebesar Rp64,92 miliar, menurun 42,72% atau setara dengan Rp48,42 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp113,34 miliar.

Uang Muka

Uang Muka adalah pengeluaran kas atau bank yang akan digunakan untuk pembayaran atas pengadaan barang, jasa dan kegiatan penunjang operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan sebelum barang, jasa dan kegiatan penunjang operasional Perusahaan tersebut diterima dan dipertanggung jawabkan kepada Perusahaan.

Cash and Cash equivalents

In 2024, the Company's Cash and Cash Equivalents amounted to Rp146.20 billion, increased by 133.14% or equivalent to Rp83.49 billion compared to 2023 of Rp62.71 billion.

Trade Receivables - Net

In 2024, Trade Receivables - Net consisted of Trade Receivable - Related Parties of Rp126.60 billion, Trade Receivable - Third Parties of Rp559.36 billion, and Other Receivables of Rp31.90 billion. These three items increased compared to 2023.

Inventories

Inventories are assets controlled for sale in normal business activities, assets in the production process for such sale, and assets in the form of materials or supplies to be used in the production process or rendering of services.

In 2024, inventory reached Rp64.92 billion, decreased by 42.72% or equivalent to Rp48.42 billion compared to 2023 of Rp113.34 billion.

Advances

Advances are a cash or bank expenditure that will be used for payments related to the procurement of goods, services, and the Company's operational support activities. These payments are made before the goods, services, and operational support activities of the Company are received and accounted for to the Company.

Uang Muka tahun 2024 sebesar Rp148,20 miliar, meningkat 22,52% atau setara dengan Rp27,24 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp120,96 miliar.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka adalah seluruh pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban pajak terkait dan kelebihan pembayaran pajak yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.

Pajak Dibayar di Muka tahun 2024 sebesar Rp34,72 miliar, menurun 39,84% atau setara dengan Rp22,99 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp57,71 miliar.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka adalah pengeluaran yang telah terjadi dan digunakan untuk aktivitas Perusahaan di masa datang yang memiliki masa manfaat satu tahun atau lebih.

Biaya Dibayar di Muka tahun 2024 sebesar Rp33,69 miliar, meningkat 14,32% atau setara dengan Rp4,22 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp29,47 miliar.

In 2024, advances amounted to Rp148.20 billion, an increase of 22.52% or equivalent to Rp27.24 billion compared to 2023 of Rp120.96 billion.

Prepaid taxes

Prepaid taxes are entire tax payments that can be calculated against the related tax liabilities and overpayment of tax that will be reclaimed or compensated against the tax liabilities of the following period.

In 2024, the Prepaid Taxes amounted to Rp34.72 billion, a decrease of 39.84% or equivalent to Rp22.99 billion compared to 2023 of Rp57.71 billion.

Prepaid Expenses

Prepaid Expenses are expenditures made and used for future Company activities with a one-year or longer benefit period.

In 2024, Prepaid Expenses amounted to Rp33.69 billion, an increase of 14.32% or equivalent to Rp4.22 billion compared to 2023 of Rp29.47 billion.

Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Investasi pada Saham Investment in Shares	4,50	7,52	8,37	(3,02)	(40,16)
Aset tetap Fixed assets	1.887,17	1.891,84	1.933,89	(4,67)	(0,25)
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	21,71	31,76	12,96	(10,05)	(31,64)
Properti Investasi Investment Properties	1.279,97	1.285,46	1.121,28	(5,49)	(0,43)
Aset Hak guna Right of Use Assets	13,31	19,58	7,34	(6,27)	(32,02)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	169,20	160,40	159,26	8,80	5,49
Aset lain-lain Other Assets	403,23	380,52	401,65	22,71	5,97
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	3.779,10	3.777,08	3.644,77	2,02	0,05

*) Disajikan kembali | As restated

Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2024 sebesar Rp3,779 triliun, meningkat 0,05% atau setara dengan Rp2,02 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,777 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pada aset pajak tangguhan dan aset lain-lain, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

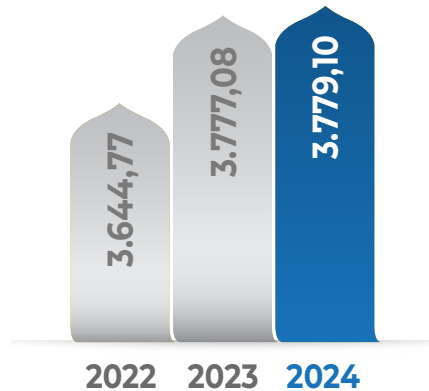
Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

In 2024, total Non-Current Assets amounted to Rp3.779 trillion, an increase of 0.05%, equivalent to Rp2.02 billion compared to 2023 of Rp3.777 trillion. This increase was mainly due to increases in deferred tax assets and other assets, as described below.

The development of the Company's Total Non-Current Assets is presented in the chart below.

Aset Tidak Lancar 2022-2024 Non-Current Assets 2022-2024

(Rp-miliar | Rp-billion)



Investasi pada Saham

Investasi pada Saham tahun 2024 sebesar Rp4,5 miliar, menurun 40,16% atau setara dengan Rp3,02 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7,52 miliar.

Investments in Shares

In 2024, Investment in Shares amounted to Rp4.5 billion, a decrease of 40.16% or equivalent to Rp3.02 billion compared to 2023 of Rp7.52 billion.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Fixed Assets

Fixed Assets are tangible items owned for use in producing or providing goods or services, to rent to third parties, or for administrative purposes and are expected to be used for more than one year.

Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp1,89 triliun, menurun 0,25% atau setara dengan Rp4,67 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,89 triliun.

In 2024, Fixed Assets amounted to Rp1.89 trillion, a decrease of 0.25% or equivalent to Rp4.67 billion compared to 2023 of Rp1.89 trillion.

Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

Intangible Assets

Intangible assets are identifiable non-monetary assets but without physical substance.

Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp21,71 miliar, menurun 31,64% atau setara dengan Rp10,05 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp31,76 miliar.

In 2024, Intangible Assets amounted to Rp21.71 billion, a decrease of 31.64% or equivalent to Rp10.05 billion compared to 2023 of Rp31.76 billion.

Properti Investasi

Properti Investasi tahun 2024 sebesar Rp1,28 triliun, menurun 0,43% atau setara dengan Rp5,49 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,29 triliun.

Investment Properties

In 2024, Investment Properties amounted to Rp1.28 trillion, a decrease of 0.43% or equivalent to Rp5.49 billion compared to 2023 of Rp1.29 trillion.



Aset Hak Guna

Aset Hak Guna tahun 2024 sebesar Rp13,31 miliar, menurun 32,02% atau setara dengan Rp6,27 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,58 miliar.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2024 sebesar Rp169,20 miliar, meningkat 5,49% atau setara dengan Rp8,80 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp160,40 miliar.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp403,23 miliar, meningkat 5,97% atau setara dengan Rp22,71 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp380,52 miliar.

Right of Use Assets

In 2024, Right of Use Assets amounted to Rp13.31 billion, a decrease of 32.02% or equivalent to Rp6.27 billion compared to 2023 of Rp19.58 billion.

Deferred Tax Assets

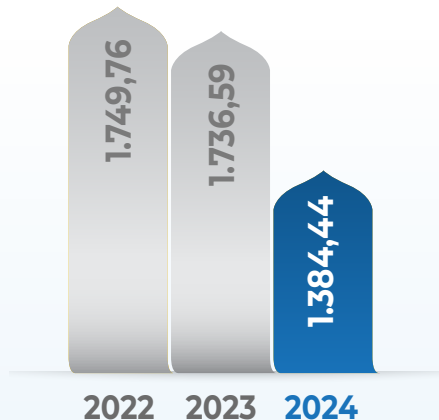
In 2024, Deferred Tax Assets amounted to Rp169.20 billion, an increase of 5.49% or equivalent to Rp8.80 billion compared to 2023 of Rp160.40 billion.

Other Assets

In 2024, Other Assets amounted to Rp403.23 billion, an increase of 5.97% or equivalent to Rp22.71 billion compared to 2023 of Rp380.52 billion.

LIABILITAS

Total Liabilitas 2022-2024
Total Liabilities 2022-2024
(Rp-miliar | Rp-billion)



Jumlah Liabilitas PPI tahun 2024 mencapai Rp1,38 triliun, mengalami penurunan 20,28% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,74 triliun.

In 2024, the Total Liabilities of PPI reached Rp1.38 trillion, a decrease of 20.28% compared to 2023 of Rp1.74 trillion

LIABILITIES

Total Liabilitas 2022-2024 (Rp-miliar) | Total Liabilities 2022-2024 (Rp-billion)

Liabilitas Liabilities	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.247,56	784,44	754,35	463,12	59,04
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	136,88	952,15	995,41	(815,27)	(85,62)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.384,44	1.736,59	1.749,76	(352,15)	(20,28)

*) Disajikan kembali | As restated

Liabilitas Perseroan dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan tahun 2023, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 59,04%, sedangkan Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 85,62%, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

The Company's liabilities were affected by Current Liabilities and Non-Current Liabilities. Compared to 2023, Total Current Liabilities in 2024 increased by 59.04%. In contrast, Non-Current Liabilities in 2024 decreased by 85.62%, as described below.

Liabilitas Jangka Pendek | Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Utang Usaha Trade Payable					
Pihak Berelasi Related Parties	56,36	70,19	52,12	(13,83)	(19,70)
Pihak ketiga Third parties	403,83	184,73	305,19	219,10	118,61
Utang pajak Tax payables	20,01	18,50	7,06	1,51	8,16
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	1,92	0,38	0,66	1,54	405,26
Beban Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	216,75	82,41	69,00	134,34	163,01
Pendapatan Diterima Di Muka – Jangka Pendek Unearned Revenues - Current Portion	186,14	114,24	83,85	71,90	62,94
Utang bank – Jangka pendek Short Term Bank Loan	303,25	258,63	173,80	44,62	17,25
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	0,28	0,28	-	0,00	0,00
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	59,03	31,03	38,60	28,00	90,24
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Current Portion of Long Term Loans:					
Utang Bank Bank Loan	-	15,42	15,42	(15,42)	(100,00)
Utang lain-lain – Pihak Berelasi Other Liabilities – Related Parties	-	8,64	8,64	-8,64	(100,00)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.247,56	784,44	754,35	463,12	59,04

*) Disajikan kembali | As restated

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 sebesar Rp1,25 triliun, meningkat 59,04% atau setara dengan Rp463,12 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2023 sebesar Rp784,44 miliar. Peningkatan ini disumbangkan oleh beberapa pos akun seperti utang usaha pihak ketiga, utang pajak, liabilitas sewa, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka jangka pendek, utang bank jangka pendek, dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya.

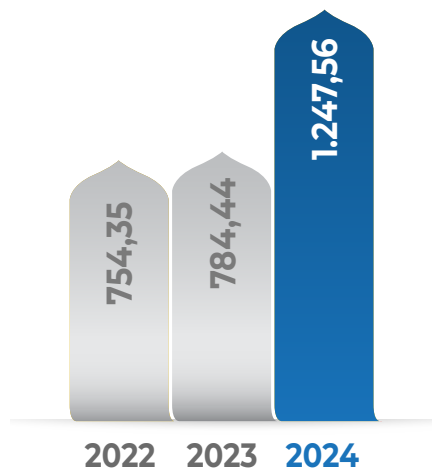
In 2024, Total Current Liabilities amounted to Rp1.25 trillion, representing a 59.04% increase from Rp784.44 billion in 2023, equivalent to Rp463,12 billion. This increase was attributed to several account items, including third-party trade payable, taxes payable, lease liabilities, accrued expenses, unearned revenues - current portion, short-term bank loans, and other current financial liabilities.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Current Liabilities is presented in the chart below.

Liabilitas Jangka Pendek 2022-2024
Current Liabilities 2022-2024

(Rp-miliar | Rp-billion)



Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan tahun 2024 terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp 56,36 miliar, dan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp403,83 miliar. Utang usaha pihak berelasi mengalami penurunan 19,70% dibandingkan tahun 2023 sementara utang usaha pihak ketiga mengalami peningkatan 118,61% dibandingkan tahun 2023.

Utang Pajak

Utang Pajak adalah kewajiban yang timbul dari transaksi yang merupakan obyek pajak yang belum disetor ke kas negara.

Utang Pajak tahun 2024 sebesar Rp20,01 miliar, naik 8,16% atau setara dengan Rp1,51 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18,50 miliar.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa tahun 2024 sebesar Rp1,92 miliar, naik 405,26% atau setara dengan Rp1,54 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp380 juta.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar tahun 2024 sebesar Rp216,75 miliar, naik 163,01% atau setara dengan Rp134,34 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp82,41 miliar.

Trade Payable

In 2024, the Company's Trade Payable consisted of related party trade payable of Rp56.36 billion and third party trade payable of Rp403.83 billion. Related party trade payable decreased by 19.70% compared to 2023. In contrast, third party trade payable increased by 118.61% compared to 2023.

Tax Payables

Tax Payables is an obligation arising from transactions that are taxable objects that have not been paid into the state treasury.

In 2024, Tax Payables amounted to Rp20.01 billion, an increase of 8.16% or equivalent to Rp1.51 billion compared to 2023 of Rp18.50 billion.

Lease Liabilities

In 2024, Lease Liabilities amounted to Rp1.92 billion, an increase of 405.26% or equivalent to Rp1.54 billion compared to 2023 of Rp380 million.

Accrued Expenses

In 2024, Accrued Expenses amounted to Rp216.75 billion, an increase of 163.01% or equivalent to Rp134.34 billion compared to 2023 of Rp82.41 billion.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp59,03 miliar, naik 90,24% atau setara dengan Rp28 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp31,03 miliar.

Other Current Financial Liabilities

In 2024, the other Current Financial Liabilities amounted to Rp59.03 billion, an increase of 90.24% or equivalent to Rp28 billion compared to 2023 of Rp31.03 billion.

Liabilitas Jangka Panjang | Non-Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Liabilitas Jangka Panjang yang Sudah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Long Term Liabilities - Net of Current Portion					
Utang Bank Bank Loan	-	-	15,42	0	0,00
Utang lain-lain – Pihak Berelasi Other Payables - Related Parties	23,69	898,43	898,43	(874,74)	(97,36)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	2,28	-	0,05	2,28	-
Pendapatan diterima di muka Unearned revenues	65,11	22,40	42,72	42,71	190,67
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits liabilities	45,80	31,32	38,79	14,48	46,23
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	136,88	952,15	995,41	(815,27)	(85,62)

*) Disajikan kembali | As restated

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 sebesar Rp136,88 miliar, menurun 85,62% atau setara dengan Rp815,27 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp952,15 miliar. Penurunan ini terutama disumbangkan oleh penurunan yang signifikan pada utang lain-lain pihak berelasi.

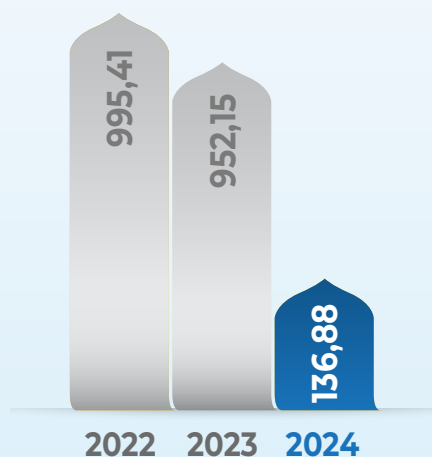
In 2024, Total Non-Current Liabilities amounted to Rp136.88 billion, a decrease of 85.62%, equivalent to Rp815.27 billion, compared to 2023 of Rp952.15 billion. This decrease was mainly due to a significant decrease in other payables - related parties.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Non-Current Liabilities is presented in the chart below.

Liabilitas Jangka Panjang 2022-2024
Non-Current Liabilities 2022-2024

(Rp-miliar | Rp-billion)



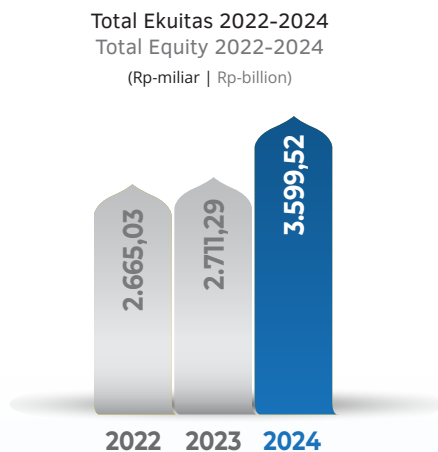
Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka tahun 2024 sebesar Rp65,11 miliar, meningkat 190,67% atau setara dengan Rp42,71 miliar dibandingkan tahun 2023 dimana pendapatan diterima di muka mencapai Rp22,40 miliar.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2024 sebesar Rp45,80 miliar, meningkat 46,23% atau setara dengan Rp14,48 miliar dibandingkan tahun 2023 dimana liabilitas imbalan kerja mencapai Rp31,32 miliar.

EKUITAS



Jumlah Ekuitas PPI tahun 2024 mencapai Rp3,60 triliun, mengalami kenaikan 32,76% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,71 triliun.

In 2024, the Total Equity of PPI reached Rp3.60 trillion, an increase of 32.76% compared to 2023 of Rp2.71 trillion.

Unearned Revenues

In 2024, unearned revenues amounted to Rp65.11 billion, an increase of 190.67% or equivalent to Rp42.71 billion compared to 2023, which reached Rp22.40 billion.

Employment Benefits Liabilities

In 2024, employment benefit liabilities amounted to Rp45.80 billion, an increase of 46.23% or equivalent to Rp14.48 billion compared to 2023, which reached Rp31.32 billion.

EQUITY

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Ekuitas Equity	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Modal Saham Share Capital	1.826,13	942,74	942,74	883,39	93,70
Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	(231,04)	(231,04)	(231,04)	0,00	0,00
Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya Retained Earnings Appropriated					
Cadangan Umum General Reserves	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00
Cadangan Khusus Specific Reserves	1,53	1,53	1,53	0,00	0,00
Belum ditentukan Penggunaannya Unappropriated	1.959,85	1.939,42	1.888,04	20,43	1,05
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	(68,89)	(53,30)	(48,17)	(15,59)	29,25
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Total equity attributable to owner of the Entity	3.599,48	2.711,25	2.665,00	888,23	32,76
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.599,52	2.711,29	2.665,03	888,23	32,76

*) Disajikan kembali | As restated

Dibandingkan tahun 2023, Jumlah Ekuitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 32,76%, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Modal Saham

Modal Saham tahun 2024 sebesar Rp1,83 triliun. Saldo ini meningkat 93,70% dibandingkan tahun 2023

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor pada tahun 2024 sebesar Rp231,04 miliar, jumlah ini sama dengan tambahan modal disetor pada tahun 2023.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas tahun 2024 sebesar Rp3,60 triliun, meningkat 32,76% atau setara dengan Rp888,23 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,71 triliun.

Kepentingan Non Pengendali

Pada tahun 2024 Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp42,75 juta, hampir sama dengan tahun 2023 sebesar Rp41,22 juta

Compared to 2023, Total Equity in 2024 increased by 32.76%, as detailed below.

Share Capital

In 2024, Share Capital amounted Rp1.83 trillion, an increase of 93.70% compared to 2023.

Additional Paid in Capital

In 2024, additional paid in capital amounted to Rp231.04 billion, equivalent to the amount in 2023.

Equity Attributable to Owner of the Entity

In 2024, the total Equity Attributable to Owner of the Entity amounted to Rp3.60 trillion, an increase of 32.76% or equivalent to Rp888.23 billion compared to 2023 of Rp2.71 trillion.

Non-Controlling Interests

In 2024, the Total Equity Attributable to Non-Controlling Interests amounted to Rp42.75 million, nearly equivalent to the amount in 2023 of Rp41.22 million.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

“Di tahun 2024 PPI mencatatkan peningkatan nilai penjualan yang terutama disumbangkan oleh segmen Produk Strategis” | “In 2024, PPI recorded an increase in sales value, mainly contributed by the Strategic Product segment.”

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Ekuitas Equity	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Pendapatan Usaha Revenues	3.099,40	2.289,29	2.367,52	810,11	35,39
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(2.756)	(1.986,95)	(1.969,87)	(769,56)	(38,73)
Laba Kotor Gross Profit	342,89	302,34	397,65	40,55	13,41
Beban Penjualan dan Distribusi Distribution and Selling Expenses	(13,65)	(13,51)	(15,72)	(0,14)	(1,04)
Beban Umum dan administrasi General and Administration Expenses	(295,39)	(317,38)	(300,87)	21,99	6,93
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(309,03)	(330,89)	(316,58)	21,86	6,61
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	33,86	(28,55)	81,07	62,41	218,60
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Income	100,85	242,25	60,50	(141,40)	(58,37)
Beban Non-Usaha Non-Operating Expense	(61,84)	(106,47)	(65,71)	44,63	41,92
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	25,30	70,42	75,86	(45,12)	(64,07)



Ekuitas Equity	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Pajak Final Final Tax	(23,87)	(17,11)	(16,44)	(6,76)	(39,51)
Pajak Kini Curent Tax	(10,12)	(18,74)	(9,03)	8,62	46,00
Pajak Tangguhan Deferred Tax	5,25	11,32	(1,30)	5,55	1.850,00
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	(4,87)	(19,04)	(26,77)	14,17	74,42
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	20,43	51,38	49,09	(30,95)	(60,24)
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be reclassified to Profit or Loss					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Employee Benefits	(16,12)	(5,71)	-	(10,41)	(182,31)
Kerugian yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar Employee Benefits Unrealized loss on Financial assets at fair value	(3,02)	(0,85)	-	(2,17)	(255,29)
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Losses	3,55	1,44	0,63	2,11	146,53
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income For The Year	(15,59)	(5,12)	(0,92)	(10,47)	(204,49)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	4,84	46,26	48,16	(41,42)	(89,54)
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	20,43	51,38	49,08	(30,95)	(60,24)
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,00	0,00	0,00	-	-
Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	4,84	46,25	48,13	(41,41)	(89,54)
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,00	0,00	0,03	-	-

*) Disajikan kembali | As restated

Pendapatan Usaha 2022-2024
Revenues 2022-2024
(Rp-miliar | Rp-billion)

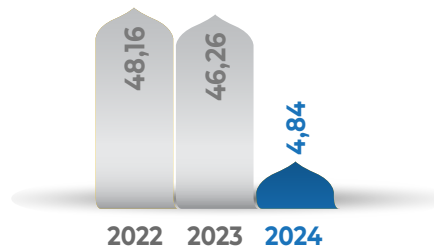


Pendapatan Non-Usaha 2022-2024
Non-Operating Income 2022-2024
(Rp-miliar | Rp-billion)



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 2022-2024 Total Comprehensive Income for the Year 2022-2023

(Rp-miliar | Rp-billion)



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2024 Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp4,84 miliar, menurun 89,54% atau setara dengan Rp41,42 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp46,26 miliar.

Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,84 miliar, menurun 89,54% atau setara dengan Rp41,42 miliar dibanding tahun 2023 dimana Perseroan mencatatkan Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp46,26 miliar.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2024, the Total Comprehensive Income for the Year amounted to Rp4.84 billion, a decrease of 89.54% or equivalent to Rp41.42 billion compared to 2023 of Rp46.26 billion.

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity

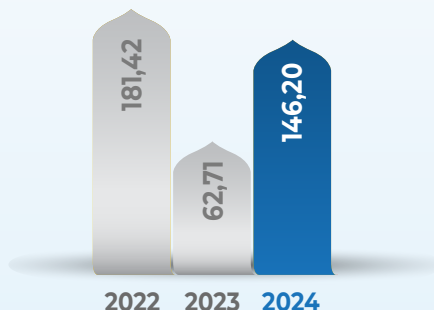
In 2024, total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity was recorded at Rp4.84 billion, a decrease of 89.54% or equivalent to Rp41.42 billion compared to 2023, which recorded at Rp46.26 billion.

ARUS KAS

CASH FLOW

Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2022-2024 Cash and Cash Equivalents at the End of Year 2022-2024

(Rp-miliar | Rp-billion)



Arus Kas menggambarkan jumlah pemasukan dan pengeluaran PPI dalam suatu periode tertentu.
Cash Flow represents the amount of PPI income and expenditures in a specific period.



Laporan Arus Kas | Statements of Cash Flow

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024		
				Nominal	%	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities						
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	2.766,78	2.431,56	2.395,40	335,22	13,79	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payment to vendors and employees	(2.640,37)	(2.455,74)	(2.342,35)	(184,63)	(7,52)	
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya Cash payment to operational expenses and others	(85,89)	(127,14)	(25,76)	41,25	32,44	
Pembayaran Pajak Tax payment	(33,35)	(20,38)	(47,45)	(8,21)	(32,66)	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Net cash used in operating activities	27,49	(171,18)	(20,16)	198,67	116,06	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities						
Pembelian aset tetap Acquisition of fixed assets	(2,97)	(8,61)	(8,58)	5,64	65,51	
Uang Muka Penjualan Aset yang Dimiliki untuk Dijual Advance of Sales on Assets Held for Sale	61,54	-	-	61,54	-	
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Proceed From Sale of Fixed Asset	4,26	0,74	-	3,52	475,68	
Penambahan aset lain-lain Acquisition of other assets	(28,26)	1,27	(2,45)	(29,53)	(2.325,20)	
Penarikan deposito Withdrawal of deposit	-	3,00	18,83	(3,00)	(100,00)	
Penambahan aset tidak berwujud Acquisition of intangible assets	(1,16)	(0,99)	(0,88)	(0,17)	17,17	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash provided from (used in) investing activities	33,40	(4,46)	6,45	37,86	848,88	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows in Financing Activities						
Penerimaan Utang Bank – Jangka Pendek Proceeds from Bank Loan - Current Portion	595,25	351,14	-	244,11	69,52	
Pembayaran Utang Bank – Jangka Pendek Payment Bank Loan - Current Portion	(551,66)	(266,31)	-	(285,35)	(107,15)	
Pembayaran Utang Bank – Jangka Panjang Payment Bank Loan - Long Term	(15,42)	(15,42)	-	0,00	0,00	
Penerimaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds of Financial Liabilities Current Portion	59,41	10,12	-	49,29	487,06	
Pembayaran Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds from Financial Liabilities Current Portion	(53,98)	(8,21)	-	(45,77)	(557,49)	
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	(9,66)	(0,38)	(0,10)	(9,28)	(2.442,11)	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash provided from financing activities	23,95	70,94	22,07	(46,99)	(66,24)	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	84,83	(104,70)	8,36	189,53	181,02	
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	62,71	181,42	173,06	(118,71)	(65,43)	
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	146,20	62,71	181,42	83,49	133,14	

*) Disajikan kembali | As restated

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2024, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, dari *minus* Rp171,18 miliar menjadi Rp27,49 miliar. Hal ini antara lain didorong oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2024, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, dari *minus* Rp4,46 miliar menjadi Rp33,40 miliar. Hal ini antara lain didorong oleh naiknya penerimaan dari penjualan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2024, terjadi penurunan pada arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan, dari Rp70,94 miliar menjadi Rp23,95 miliar. Hal ini antara lain disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Analisis Rasio Keuangan

PPI menggunakan berbagai rasio keuangan dasar berikut ini guna mengukur tingkat kesehatan dan kinerja Perseroan:

Cash Flows from Operating Activities

In 2024, PPI recorded an increase in net cash flow used in operating activities from minus Rp171.18 billion to Rp27.49 billion. This was primarily driven by an increase in cash receipts from customers.

Cash Flows from Investing Activities

In 2024, PPI recorded an increase in net cash flow used for investing activities, from minus Rp4.46 billion to Rp33.40 billion. This was driven, among other things, by the rise in proceeds from the sale of fixed assets.

Cash Flows in Financing Activities

In 2024, net cash flow provided by financing activities decreased from Rp70.94 billion to Rp23.95 billion. This was mainly due to the payment bank loan.

Financial Ratio Analysis

PPI uses the following basic financial ratios to measure the Company's health and performance:

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (poin) Increase (Decrease) 2023- 2024 (points)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar Current Ratio (%)	96,6	84,0	123,50	12,60
Rasio Cepat Quick Ratio (%)	66,7	43,5	111,33	24,20
Rasio Kas Cash Ratio (%)	11,7	7,9	22,76	3,80
Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan Net Working Capital to Sales (%)	(1,4)	(5,6)	7,9	4,20
Rasio Leverage Leverage Ratio				
Rasio Utang Terhadap Aset Debt to Assets Ratio (%)	27,8	39,0	38,16	(11,20)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (%)	38,5	64,1	61,71	(25,60)
Rasio Cakupan Layanan Utang (kali) Debt Service Coverage Ratio (times)	0,30	0,33	0,06	(0,04)
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	79,7	44,8	65	36,30
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	60,1	46,2	66,2	(6,30)
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	8,5	20,5	15	(12,00)



Uraian Description	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 (point) Increase (Decrease) 2023- 2024 (points)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) <i>Return on Equity (ROE)</i>	0,6	0,6	1,73	0,00
Imbalan Investasi (%) <i>Return on Investment (ROI)</i>	0,7	(0,8)	3,28	(0,10)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	11,1	13,2	16,80	(0,10)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	0,7	0,7	2,07	0,00
Margin EBITDA EBITDA Margin	2,3	3,0	5,53	(0,70)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PPI senantiasa melakukan evaluasi dan menganalisis tingkat kesehatan keuangannya secara berkala untuk menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang akan jatuh tempo. Keandalan PPI dalam membayar utang-utangnya setidaknya tercermin dari hasil perhitungan rasio likuiditas berikut ini:

Ability to Pay Short-term and Long-term Debts

PPI consistently evaluates and analyzes its financial health to maintain its ability to fulfill both short-term and long-term obligations that will come due. PPI's reliability in paying its debts is reflected at least in the results of the liquidity ratio calculations below:

Uraian Description	2024	2023	2022
Rasio Lancar Current Ratio (%)	96,6	84,0	123,50
Rasio Cepat Quick Ratio (%)	66,7	43,5	111,33
Rasio Kas Cash Ratio (%)	11,7	7,9	22,76

Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Aktivitas Lainnya

Selain menjaga rasio likuiditasnya, PPI juga mengoptimalkan kemampuannya dalam mengumpulkan piutang. Sepanjang tahun 2024, tingkat perputaran piutang PPI tercatat sebesar 79,7 hari. Sementara perputaran utang PPI pada tahun tersebut adalah sebesar 60,1 hari. Perputaran persediaan sebesar 8,5 kali.

Debt Collection Rate and Other Activity Ratios

Apart from maintaining its liquidity ratio, PPI also optimizes its ability to collect receivables. Throughout 2024, PPI's receivables turnover rate was recorded at 79.7 days. Meanwhile, PPI's debt turnover for that year was 60.1 days. Inventory turnover was 8.5 times.

Uraian Description	2024	2023	2022
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	79,7	44,8	65
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	60,1	46,2	66,2
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	8,5	20,5	15

KEMAMPUAN MENGHASILKAN LABA

Kemampuan menghasilkan laba Perseroan ditunjukkan dengan rasio-rasio berikut ini.

PROFIT GENERATING ABILITY

The Company's profit-generating ability is presented by the following ratios.

Uraian Description	2024	2023	2022
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) <i>Return On Equity (ROE)</i>	0,6	0,6	1,73
Imbalan Investasi (%) <i>Return On Investment (ROI)</i>	0,7	(0,8)	3,28
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	11,1	13,2	16,80
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	0,7	0,7	2,07
Margin EBITDA EBITDA Margin	2,3	3,0	5,53

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal PPI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kebijakan struktur modal PPI bersifat fleksibel serta senantiasa memperhatikan faktor makro ekonomi baik global maupun nasional dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. PPI menilai kebijakan struktur modal yang *solid* sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PPI.

Dalam rangka menjaga fundamental struktur modal yang ada, PPI dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengelola pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menjual aset untuk mengurangi utang. PPI memonitor kualitas permodalannya melalui rasio *debt-to-equity* agar nilai utangnya tidak melebihi aset yang dimiliki.

Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini memperlihatkan komposisi struktur modal PPI dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Management Policy on Capital Structure

The management of PPI's capital structure is conducted in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association. PPI's capital structure policy is flexible and always takes into account macroeconomic factors both globally and nationally, as well as the underlying asset risk characteristics. PPI considers a solid capital structure policy essential in supporting its operational sustainability.

To maintain the fundamental existing capital structure, PPI may adjust the amount of dividends paid to shareholders, manage returns of capital to shareholders, or sell assets to reduce debt. PPI monitors the quality of its capital through the debt-to-equity ratio to ensure its debt does not exceed its assets.

Capital Structure

The table below shows the composition of PPI's capital structure within the last 3 (three) years:

Struktur Modal | Capital Structure

Uraian Description	2024		2023		2022	
	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Million Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset (%) Percentage to Total Assets (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.247.557	25,03	784.441	17,64	754.350	16,45
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	136.878	2,75	952.153	21,41	995.413	21,71
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.384.435	27,78	1.736.594	39,04	1.749.764	38,15
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.599.523	72,22	2.711.294	60,96	2.835.603	61,84
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.983.958	100,00	4.447.889	100,00	4.585.367	100,00

Kesesuaian Pengungkapan dengan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi mengenai struktur modal PPI pada sub-bahasan ini sudah sesuai dengan Laporan Keuangan PPI Tahun Buku 31 Desember 2024.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen di PPI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku agar cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada penerapannya, pembagian dividen ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan nominal yang dibayarkan senantiasa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain namun tidak terbatas pada tingkat kesehatan perusahaan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja, dan pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan lain.

Pada tahun 2024 terdapat pembayaran dividen kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 16.699.617.326,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Compliance of Disclosure with Financial Statements

The disclosure of information regarding PPI's capital structure in this subsection is in line with PPI's Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2024.

Dividend Policy

The dividend policy at PPI is in accordance with applicable laws and regulations, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which companies are required to allocate a certain amount of net profit each fiscal year so that the reserve reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital.

In practice, dividend distribution is determined by the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), with the nominal amount paid always considering several factors, including but not limited to the company's financial health, sufficiency of capital, operational funding needs, working capital, and business development, without diminishing the GMS's right to decide otherwise.

In 2024, a dividend payment was made to the Owners of the Parent Entity for the 2023 Fiscal Year, amounting to Rp16,699,617,326.00 (sixteen billion six hundred ninety-nine million six hundred seventeen thousand three hundred twenty-six rupiah).

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Dalam hal segmentasi pasar PPI mengutamakan B2B sebagai segmen pasar penjualan produk-produk utamanya sebagai pemilik izin perdagangan besar. Kondisi persaingan di lingkup bisnis PT PPI dapat dikatakan cukup ketat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk yang berkembang di pasaran seiring dengan peningkatan dan perkembangan kebutuhan pelanggan atas produk tersebut.

Perseroan juga melakukan berbagai program promosi serta optimalisasi penjualan produk melalui *distribution channel* di antaranya Kantor Cabang PPI, Distributor, Kios/Pengecer, Penjualan Online melalui Aplikasi Warung Pangan, atau peninjauan peluang Kerjasama dengan berbagai Instansi. Tidak hanya di dalam negeri, PPI juga mengoptimalkan penjualan produk ke luar negeri melalui representative office yang berlokasi di Tiongkok, Mesir, dan Taiwan.

Posisi Produk di Pasar

Produk-produk yang diperdagangkan oleh PPI memiliki posisi yang cukup kuat meskipun di beberapa lini produk bukan merupakan pilihan utama di pasaran. Hal tersebut mengingat PPI telah hadir melayani kebutuhan para pelanggan selama puluhan tahun. Untuk itu PT PPI harus terus berkembang dan berinovasi agar terus dapat menjadi pilihan utama para pelanggan.

Positioning Produk terhadap Pasar dan Konsumen

Melalui produk – produk yang diperdagangkan, PPI menyampaikan pesan ke dalam ingatan pelanggan sebagai perusahaan yang memiliki produk yang sudah melayani selama puluhan tahun, dapat menjawab segala kebutuhan serta dekat dengan pelanggan.

Salah satu strategi yang digunakan PPI untuk mencapai *brand image* tersebut adalah dengan optimalisasi penjualan melalui Kantor Cabang, kedistributoran, dan Aplikasi Warung Pangan.

Penjualan melalui kantor cabang memiliki beberapa layanan unggulan seperti *one day service delivery*. Dengan layanan tersebut PPI melalui Kantor Cabang memastikan pasokan stok bahan pokok & pangan, pupuk & pestisida, serta farmasi & alkes selalu tersedia untuk para pelanggan. Kemudian melalui distributor terdaftar B2, PPI memastikan

Market Segments and Competition

Regarding market segmentation, PT PPI prioritizes the B2B market segment for selling its main products, leveraging its status as the holder of a large trading license. The competitive conditions in PT PPI's business environment can be considered quite intense, as evidenced by the numerous products emerging in the market, in line with the increasing and evolving customer demand for these products.

PT PPI also conducts various promotional programs and optimizes product sales through distribution channels including the Branch Offices of PPI, Distributors, Kiosks/Retailers, Online Sales through the Warung Pangan Application, or exploring opportunities for cooperation with various agencies. Not only domestically, PPI also optimizes product sales abroad through representative offices located in China, Egypt and Taiwan.

Product Position in the Market

The products traded by PPI hold a relatively strong position, although in some product lines they are not the primary choice in the market. This is because PPI has been serving customer needs for decades. To that end, PT PPI must continue to develop and innovate to remain the top choice for customers.

Product Positioning in the Market and with Consumers

Through its traded products, PT PPI ingrains a message in the customer's memory, portraying itself as a company with decades-old products capable of meeting all needs and be close to customers.

One of the strategies PPI uses to achieve this brand image is optimizing sales through Branch Offices, distribution channels, and the Warung Pangan Application.

Sales through branch offices offer several premium services, such as one-day service delivery. With this service, PPI, through its Branch Offices, ensures the supply of staple foods, fertilizers and pesticides, as well as pharmaceuticals and medical devices is always available for customers. Subsequently, through registered hazardous

kebutuhan pelanggan akan bahan kimia berbahaya dapat selalu terpenuhi. Di sisi lainnya, pelanggan dimanjakan dengan kemudahan memesan produk-produk PPI. Melalui Aplikasi Warung Pangan, para pelanggan akan merasakan kemudahan memesan Produk PPI secara *online*.

Pangsa Pasar

Berikut disampaikan tabel pangsa pasar beberapa komoditas Perseroan:

material distributors, PPI ensures that customers' needs for hazardous chemicals are always met. Additionally, customers are pampered with the ease of ordering PPI products. Through the Warung Pangan Application, customers will experience the convenience of ordering PPI products online.

Market Share

The following is the table of the market share of the Company's commodities:

No.	KOMODITI COMMODITY	PENJUALAN PPI PPI SALES	MARKET SIZE	UNIT	MARKET SHARE
1	Pupuk Fertilizer	197.738.310	7.167.167.072	KG	2,76%
2	Pestisida Pesticides	722.600	27.037.189	LT	2,67%
3	Borax	1.824.000	2.443.650	KG	74,64%
4	Sodium Cyanide	2.664.000	3.634.000	KG	73,31%
5	Sodium Saccharine	396.950	786.051	KG	50,50%
6	Daging Kerbau Buffalo meat	14.448.000	100.000.000	KG	14,45%
7	Ekspor Kopi Robusta Coffee Robusta Export	289.640	142.243.311	KG	0,20%
8	Farmasi & Alkes Pharmacy & Medical Devices	1.208	33.377	UNIT	3,62%
9	Beras Khusus Impor Special Imported Rice	3.667.860	17.881.383	KG	20,51%

Rincian Strategi Pemasaran PPI tahun 2024

Pada tahun 2024 diperkirakan terdapat kenaikan nilai rata – rata pertumbuhan *market size* komoditi sejumlah 5% - 6%. Di tahun tersebut PT PPI juga menargetkan kenaikan nilai rata – rata *market share* atas komoditas – komoditas yang diperdagangkan oleh PT PPI sejumlah 15%. Sebagai upaya mencapai target tersebut dilakukan beberapa inisiatif strategis antara lain seperti optimalisasi *marketing & sales process*, memperluas jaringan distribusi melalui kerjasama dengan UMKM, penguatan *customer engagement*, optimalisasi penjualan produk non pangan, pengelolaan & transformasi cabang, serta non inisiatif lainnya.

Selama tahun 2024 terdapat kenaikan nilai rata – rata pertumbuhan *market size* komoditi sejumlah 5% - 6%. Di tahun tersebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia juga menargetkan kenaikan nilai rata – rata *market share* atas komoditas – komoditas yang diperdagangkan oleh PT PPI sejumlah 15%. Sebagai upaya mencapai target tersebut dilakukan beberapa inisiatif strategis antara lain seperti:

- Program Optimalisasi *Marketing & Sales*: yaitu strategi komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan *market share* dan penjualan, kemudian mencapai Top of Mind dari customer yang ingin membeli produk pestisida di kala banyaknya kompetitor sejenis.

Details of PPI Marketing Strategy in 2024

In 2024, it was estimated that there would be an increase in the average value of commodity market size growth of 5% - 6%. In that year, PT PPI also targeted an increase in the average value of market share for commodities traded by PT PPI of 15%. Several strategic initiatives have been carried out to achieve this target, including optimizing marketing & sales processes, expanding distribution networks by collaborating with MSMEs, strengthening customer engagement, optimizing sales of non-food products, managing & transforming branches, and other non-initiatives.

Throughout 2024, there was an increase in the average value of commodity market size growth of 5-6%. This year, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia also targeted an increase in the average value of market share on traded commodities by PPT of 15%. To achieve this target, several strategic initiatives were carried out as follows:

- Marketing & Sales Optimization Program: a marketing communication strategy that aims to boost market share and sales and reach Top of Mind from customers who intend to purchase pesticide products when there are many similar competitors.

- Memperluas Jaringan Distribusi: yaitu strategi membangun rantai perdagangan produk dari hulu hingga hilir sehingga produk dapat tersebar secara luas hingga ke tangan konsumen akhir, hal tersebut mendukung strategi Optimalisasi Marketing dan Sales Process.
- Penguatan *Customer Engagement*: yaitu program untuk meningkatkan jaringan komunikasi pemasaran dengan menciptakan hubungan baik melalui komunikasi pemasaran dengan *Customer* sehingga hubungan penjual dan pembeli lebih terjaga, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan sehingga dapat mendukung pelaksanaan *Market Intelligence* guna mengetahui kebutuhan hingga pada ranah end user, menciptakan komunikasi dari mulut ke mulut (*Word of Mouth Marketing*) yang mengandalkan rekomendasi dari percakapan konsumen ke konsumen, serta melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal sehingga tercapainya tujuan dalam membentuk komunitas pelanggan.
- Optimalisasi penjualan produk non pangan pengelolaan: yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada melalui konsep *human centric* melalui pengelolaan, pemeliharaan serta komunikasi dengan para pihak customer produk PT PPI secara langsung untuk optimalisasi penjualan produk hingga pada *end user* sehingga konsumen akan lebih mengenal produk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan memilih menggunakan produk tersebut.
- Expanded Distribution Network: a strategy to build a product trade chain from upstream to downstream. This enables products to be distributed broadly until they reach consumers, supporting the Marketing and Sales Process Optimization strategy.
- Customer Engagement Strengthening; a program to enhance the marketing communication network by establishing good relations through marketing communication with Customers, enabling a more maintained sales and buyer relationship, increasing customer loyalty and satisfaction to support the implementation of Market Intelligence to determine needs up to the end user realm, creating a word of mouth communication (*Word of Mouth Marketing*), which relies on recommendation from consumer to consumer dialogues, and collaborating with an external party to achieve goals in establishing customer community.
- Optimization of non-food product sales management: the utilization of existing resources through the human-centric concept through management, maintenance, and communication with PT PPI product customers directly to optimize product sales to end users, making consumers more familiar with PT Perusahaan Perdagangan Indonesia products and preferring to use these products.

Realisasi dan Capaian Strategi Pemasaran

Realisasi dan capaian strategi Pemasaran yang telah dilakukan di tahun 2024 terbagi menjadi :

- Program Optimalisasi Marketing dan Sales Process
 - Semarak Diskon Dharmabrand Akhir Tahun 2024, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memberikan Diskon atau potongan harga secara langsung dalam rentang waktu penjualan November – Desember 2024 untuk pembelian produk Pestisida.
- Program Awareness
 - Pameran Expo Pengawasan Intern 2024, PT PPI turut serta dalam Expo yang diadakan oleh BPKP dengan turut serta menampilkan produk – produk dari PT PPI.
 - Program Vaksinasi DBD di Kab. Probolinggo, berkolaborasi dengan PT Biofarma, PT PPI sebagai distributor dari produk Biofarma juga turut serta memperkenalkan kepada *stakeholder* bahwa PT PPI sudah turut aktif dalam penjualan serta penyaluran produk – produk Biofarma.

Realization and Achievement of Marketing Strategy

The realization and achievements of the Marketing strategy that has been carried out in 2024 are divided into:

- Marketing and Sales Process Optimization Program
 - Dharmabrand's Spectacular Discounts at the End of 2024, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia provided direct discounts or lower prices in the November – December 2024 sales period for the purchase of Pesticide products.
- Awareness Program
 - 2024 Internal Audit Expo, PT PPI participated in the Expo held by BPKP by displaying products from PT PPI.
 - Dengue Vaccination Program at Probolinggo Regency, collaborated with PT Biofarma, as a distributor of Biofarma's products, PT PPI also participated in introducing to stakeholders that PPT has been actively involved in the sales and distribution of Biofarma's products.

- *Trade Expo Indonesia*, PPI berpartisipasi menampilkan beberapa produk andalannya di pasar Export maupun Domestik, seperti produk Kopi, Pestisida Dharmabrand, dan *Spices*.
- Demonstration Plot, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bekerjasama dengan Petani kunci yang berada di wilayah kerja Jember, Bondowoso, Kecamatan Curahdami pada bulan Juli – November 2024 melakukan pengaplikasian secara langsung produk Pestisida Dharmabrand di lahan tanaman Padi dan Tembakau.
- Program Engagement
 - Program TEMANI (Temu Mitra dan Petani) sebagai kendaraan komunikasi pemasaran pada sektor komoditas Pupuk non subsidi, Pestisida, benih, dan produk lainnya dalam lini bisnis Saprotan. Tahun 2024 program TEMANI sudah dilakukan di 13 (tiga belas) wilayah kerja cabang yaitu di cabang Malang, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, Bandung, Kendari, Palu, Surakarta, Gorontalo, Manado, Makassar, Madiun, dan Purwokerto, dengan total kegiatan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan.
- Trade Expo Indonesia, PPI participated in displaying several of its flagship products, both in the Export and Domestic markets, including Coffee products, Dharmabrand Pesticide, and Spices.
- Demonstration Plot, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia collaborated with key farmers, located at the work area of Jember, Bondowoso, Curahdami District, in July-November 2024, directly applied Dharmabrand Pesticide products in Rice and Tobacco plantations.
- Engagement Program
 - TEMANI (Temu Mitra dan Petani) program as a marketing communication vehicle in the non-subsidized Fertilizer, Pesticide, Seed, and other product commodity sectors in the Saprotan line of business. In 2024, the TEMANI program was carried out in 13 (thirteen) branch work areas, namely in the Malang, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, Bandung, Kendari, Palu, Surakarta, Gorontalo, Manado, Makassar, Madiun, and Purwokerto branches, bringing 24 (twenty-four) activities.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT ON CAPITAL EXPENDITURE

Tidak ada Investasi Barang Modal dan Ikatan Material terkait yang direalisasikan pada Tahun Buku 2024.

There were no Capital Expenditure and related Material Commitments realized in the 2024 Fiscal Year.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2024

TARGET ACHIEVEMENT IN 2024

Asumsi-asumsi yang Digunakan serta Proses Perumusan Target Tahun 2024

Penyusunan RKAP Tahun 2024 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, sebagai berikut:

Berikut disampaikan pencapaian realisasi atas target tahun 2024 dan proyeksi keuangan.

Assumptions Used and the Process of Formulating the 2024 Target

The preparation of the 2024 RKAP refers to the macroeconomic assumptions used in the preparation of the 2024 State Budget, as follows:

The following is the realization achievement of the 2024 target and financial projections.

Indikator Indicator	Outlook 2023	RAPBN 2024 2024 State Budget
Pertumbuhan ekonomi Economic growth (% , yoy)	5,1	5,2
Inflasi Inflation (% , yoy)	3,1	2,8
Nilai Tukar Rupiah Rupiah Exchange Rate (Rp/USD)	15.100	15.000
Suku Bunga Interest Rate (%)	6,8	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia Indonesian Crude Oil Price (USD/Barel)	78	80
Lifting Minyak (ribu barel per hari) Oil Lifting (thousand barrels per day)	614	625
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	985	1.033

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta RKAP 2025

Comparison between Target, Realization, and 2025 Annual Work Plan

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement (%)	RKAP 2025 2025 Annual Work Plan
Jumlah Aset Total Assets	5.157.069	4.983.958	96,6	4.560.898
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.870.713	3.599.523	93,0	3.785.876
Pendapatan Revenue	3.687.313	3.099.401	84	3.600.800
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) For Current Year	41.420	20.433	49	8.102

Key Performance Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator Utama Perusahaan (*Key Performance Indicators*/"KPI") Konsolidasian per 31 Desember 2024 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, di mana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

Berdasarkan pengukuran Indikator Utama Perusahaan, pada tahun 2024 PPI mendapatkan skor 86,6.

Key Performance Indicator (KPI) and Company Health Level

The Consolidated Key Performance Indicators (KPIs) as of December 31, 2024, are reflected in the PPI's KPI assessment matrix, in which the determination of perspectives, indicators, and their weighting has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013, on Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessing the Excellent Performance of State-Owned Enterprises.

Based on the measurement of Key Performance Indicators, in 2024, PPI achieved a score of 86.6.



Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian KPI KPI Achievement	Nilai Skor KPI KPI Score Value
Perspektif Perspective	Indikator Indicator Sub Indikator Sub Indicator								
A	Nilai Ekonomi dan Sosial Economic and Social Values				50,0		39,8		
a.	Finansial Financial								
	1.	EBITDA	Rp miliar Rp billion	Maximize	12,0	128,57	93,30	72,57%	8,7
	2.	Sustainable Financial Position:							
		a. Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	Maximize	7,0	1,22	3,30	37,02%	2,6
		b. Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	Maximize	7,0	3,89%	7,87%	49,43%	3,5
	3.	a. Cashflow Available for Debt Service (CADS)	Rp miliar Rp billion	Maximize	4,0	236,66	823,50	347,97%	4,4
		b. Cash Conversion Cycle	Hari Days	Maximize	4,0	25,07	21,61	110,00%	4,4
		c. Pencapaian AR (Kol 4 dan Kol 5) AR Achievements (Col 4 and Col 5)	%	Maximize	4,0	100%	76%	76,45%	3,1
b.	Sosial Social								
	4.	% Capaian pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Achievements of the implementation of the Government Food Reserves (CPP)	%	Maximize	12,0	100%	127,62%	127,62%	13,2
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				15,0		13,5		
	1.	Perbaikan Sustainability & Competitiveness Anak Perusahaan (Restrukturisasi/ Penyehatan/Merger/Divestasi) Target 26 Cabang Improving the Sustainability and Competitiveness of Subsidiaries (Restructuring/Merger/Divestment) of 26 Branches Target	%	Maximize	2,5	100%	76,92%	76,92%	1,9
		Transformasi EBITDA & Growth: EBITDA & Growth Transformation:	%	Maximize	2,5	100%	62,46%	62,46%	1,6
		a. Ketersediaan Cash Cash Availability							
		b. Program Uplift EBITDA EBITDA Uplift Program							
	2.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Implementation Improvement Roadmap	%	Maximize	5,0	100%	220%	220,00%	5,5
	3.	Implementasi Integrasi Fungsi Trading dan Retail serta Rantai Pasok secara Komprehensif: Implementation of Comprehensive Integration of Trading and Retail Functions and Supply Chain:	%	Maximize	5,0	100%	91%	90,91%	4,5
		a. Nilai Sinergi Rantai Pasok Supply Chain Synergy Value							
		b. Nilai Sinergi Penjualan Sales Synergy Value							
C	Kepemimpinan Teknologi Leadership in Technology				15,00		16,3		
	1.	Optimalisasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama (ERP) Optimization of System Digitalization in Main Functions (ERP)	%	Maximize	3,5	100%	110%	110,0%	3,9
	2.	Implementasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama Implementation of System Digitalization in Main Functions	%	Maximize	3,5	100%	110%	110,00%	3,9

Nomor Number										
Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Sub Indikator Sub Indicator	Uraian Description	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian KPI KPI Achievement	Nilai Skor KPI KPI Score Value
		3.	Pengembangan Dashboard Informasi Komoditas Pangan & Penyerapan CPP Development of Food Commodity Information Dashboard and CPP Absorption	%	Maximize	4,0	100%	110%	110,00%	4,4
		4.	Penyusunan IT Fundamental IT Fundamentals Preparation	%	Maximize	4,0	100%	106%	106,00%	4,2
D			Peningkatan Investasi Increase of Investment			10,00				10,4
		1.	Optimalisasi Aset dan penyelesaian status aset (clean & clear) Asset Optimization and asset status settlement (clean & clear)	%	Maximize	10,00	100%	104%	103,91%	10,4
E			Pengembangan Talenta Talent Development			10,00				10,3
		1.	Rasio Talenta Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent kategori BOD-1 Millennial Talent Ratio (<42 years old) in Nominated Talent in BOD-1 category	%	Maximize	3,5	18%	25%	138,89%	3,9
		2.	Rasio Talenta Perempuan dalam Nominated Talent kategori BOD-1 Female Talent Ratio in Nominated Talent in BOD-1 category	%	Maximize	3,5	16%	25%	156,25%	3,9
		3.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Qualification Fulfillment of Risk Management Organs	% Rasio Ratio	Maximize	3,0	90%	78%	86,96%	2,6
			JUMLAH SKOR TOTAL SCORE			100,0				90,4

Laporan Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level Achievement Report

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Health Level
idBBB(sa) (Triple B; Standalone)	idBBB/Stable (Triple B; Stable Outlook)	Sehat (sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81)
Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.	Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.	Healthy (in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Article 81)
Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (standalone rating).	idBBB/Stable (Triple B; Stable Outlook)	
idBBB(sa) (Triple B; Standalone)	An obligor with an idBBB rating has adequate capability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.	
An obligor with an IdBBB rating has adequate capability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.		
The (sa) sign indicates that the rating is a standalone rating.		

PROSPEK USAHA

BUSINESS OUTLOOK

PPI tetap menjaga optimisme yang tinggi dalam upayanya mencapai kinerja yang positif pada tahun 2025. Optimisme ini dilandaskan pada analisis menyeluruh terhadap perkembangan terkini di bidang ekonomi makro maupun dinamika industri yang relevan. Dengan mencermati indikator-indikator seperti pertumbuhan PDB, stabilitas inflasi, pergerakan nilai tukar, serta tren konsumsi dan investasi, PPI terus menyesuaikan strategi bisnisnya secara adaptif. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi tantangan eksternal maupun internal, sekaligus memaksimalkan peluang pertumbuhan yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan transformasi sektor industri.

PPI remains highly optimistic in its efforts to achieve positive performance in 2025. This optimism is based on a comprehensive analysis of the latest developments in the macroeconomic field and relevant industry dynamics. By observing indicators such as GDP growth, inflation stability, exchange rate movements, and consumption and investment trends, PPI continues to adjust its business strategy adaptively. This step aims to anticipate potential external and internal challenges while maximizing growth opportunities in line with the focus on national development and the transformation of the industrial sector.

Asumsi Makro 2025 | 2025 Macro Assumptions

Indikator Indicator	Nilai Value
Pertumbuhan ekonomi Economic growth	5,2%
Tingkat inflasi Inflation rate	2,5%
Tingkat Suku bunga rata-rata Average Interest Rate	7,0%
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Rupiah Exchange Rate to US Dollar	Rp16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) Oil Lifting (thousand barrels per day)	82
Lifting Minyak (ribu barel per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	600
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	1.055
Bunga CPP tanpa Penjaminan CPP Interest without Collateral	3% - 4,5%
Bunga CPP dengan Penjaminan CPP Interest with Collateral	2% - 3%

Asumsi Mikro 2025 | 2025 Micro Assumptions

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

No.	Keterangan Description	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2024	Prognosa 2024 2024 Prognosis	RKAP 2025
1	Perdagangan Non Bahan Pokok (Rp Miliar) Non Staple Trade (Rp Billion)	554,2	855,10	621,65	625,84
2	Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	436,7	1.164,90	174,7	350,8
3	Produk Strategis Strategic Products	605,4	554,63	1.276,74	1364,09
4	Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	7,8	78,58	13,14	41,17
5	Transisi Bisnis Business Transition	26,7	71,13	29,75	51,1
6	Anak Perusahaan Subsidiaries	756,8	962,98	905,09	1.167,8

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Tidak ada Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi pada tahun 2024 yang dapat/perlu dilaporkan.

There is no Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events in 2024 that can/should be reported.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

Tidak terdapat standar baru, amandemen atau penyesuaian kebijakan akuntansi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tahun buku 2024.

There were no new standards, amendments, or adjustments to accounting policies that have a significant impact on the consolidated financial statements for the 2024 fiscal year.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Pada tanggal 2 April 2025 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris karena berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama, bapak Hamli, dan belum ditetapkan pengganti beliau hingga diterbitkannya Laporan Tahunan ini.

On April 2, 2025, there was a change in the composition of the Board of Commissioners due to the end of the term of the President Commissioner, Mr. Hamli, and his replacement was not appointed until the publication of this Annual Report.

Sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Dewan Komisaris Perseroan menyepakati Bapak Gigih Guntoro sebagai Koordinator Komisaris sampai adanya penunjukan Komisaris Utama oleh Pemegang Saham PT PPI.

As a follow-up to the end of the tenure of the President Commissioner of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the Company's Board of Commissioners agreed to appoint Mr. Gigih Guntoro as the Commissioner Coordinator until the appointment of the President Commissioner by the Shareholders of PT PPI.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/Afiliasi

Dalam aktivitas bisnisnya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang bukan

Material Transactions with Related/Affiliated Parties

In its business activities, the Company engages in various transactions with related parties that do not constitute

merupakan transaksi benturan kepentingan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai persyaratan komersial normal, sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dan sifat transaksi antara Perseroan dengan pihak berelasi tercantum pada tabel sebagai berikut:

conflicts of interest transactions. All transactions with related parties are conducted fairly according to normal commercial requirements, as transactions with unrelated parties.

The nature of the relationships and the nature of transactions between the Company and related parties are listed in the table as follows:

Sifat Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi | Nature of Relationship and Transaction with Related Parties

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Induk Parent Entity	Pemberian Jasa Pergudangan, Logistik dan Dividen Rendering of Warehousing, Logistic Services and Dividend
PT Rajawali Nusindo	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa dan Barang Rendering of Trading
PT Gieb Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Berdikari	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Sang Hyang Seri	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Perikanan Indonesia	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Garam	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Companies under common control	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Jakarta Sereal	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT PLN Nusantara Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pertamina Petrochimal Trading	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
Badan Amil Zakat Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT ASDP Indonesia Ferry	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
Dinas Kesehatan Department of Health	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Pupuk Indonesia Niaga	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Dahana	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Wijaya Karya Beton	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Perdagangan Rendering of Trading
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Adhi Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Petrokimia Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Sriwidjaya	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Iskandar Muda	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
Perum BULOG	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
PT Petrosida Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian Jasa Pergudangan dan Logistik Rendering of Warehousing and Logistic Services
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ministry of National Development Planning	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Perijinan untuk kawasan perumahan Permission for residential area
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito dan Pinjaman Bank Placement Cash and Cash Equivalents, Time Deposits, and Bank Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas Placement Cash and Cash Equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito dan Pinjaman Bank Placement Cash and Cash Equivalents, Time Deposits, and Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito dan Pinjaman Bank Placement Cash and Cash Equivalents, Time Deposits, and Bank Loans
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		Penempatan Kas dan Setara Kas Placement Cash and Cash Equivalents

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

Balances and Transactions with Related Party

In its business activities, the Group entered into transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing of these transactions is the same as for transactions made with third parties. The following are significant agreements/transactions with related parties:



Pihak Berelasi Related Parties	2024	2023
Gaji dan imbalan jangka pendek Salaries and rewards short-term		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4.369.344.559	3.342.056.847
Dewan Direksi Board of Directors	9.824.600.231	7.431.753.090
Jumlah Total	14.193.944.790	10.773.809.937
Pendapatan Revenues		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	182.114.358.256	97.731.349.000
Perum BULOG	162.660.920.478	-
PT Petrokimia Gresik	146.319.325.950	137.870.574.416
PT Pupuk Kalimantan Timur	111.488.589.845	108.748.121.766
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	50.576.388.222	25.059.732.208
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	47.715.731.882	37.655.387.604
PT Pupuk Iskandar Muda	44.059.398.324	30.863.410.188
PT Pupuk Kujang	17.542.891.533	10.853.865.519
PT Jakarta Sereal	16.789.599.100	-
PT Pabrik Gula Rajawali II	11.388.266.605	-
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	8.770.697.500	-
PT PLN Nusantara Power	5.882.571.416	-
PT Rajawali Nusindo	5.810.864.339	1.828.805.150
PT Pertamina Petrochimal Trading	5.144.494.870	-
PT Pabrik Gula Rajawali I	4.838.450.000	-
Badan Amil Zakat Nasional	2.685.618.137	-
PT ASDP Indonesia Ferry	2.003.350.000	-
Dinas Kesehatan Department of Health	3.111.199.518	77.894.843
PT Dahana	1.969.954.858	1.347.366.670
PT Wijaya Karya Beton	722.808.604	2.438.521.973
PT Adhi Karya	686.243.735	2.637.332.313
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	252.600.000	3.073.548.750
PT Perkebunan Nusantara VIII	188.154.546	2.671.213.852
PT Aneka Tambang, Tbk	107.340.000	3.996.000.000
PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)	32.500.000	5.648.394.485
PT Perikanan Indonesia	-	11.199.565.728
PT Pembangunan Perumahan	-	2.179.890.178
Lainnya (di bawah Rp2 milyar) Others (below Rp2 billion)	16.118.532.419	20.246.134.473
Jumlah Pendapatan Pihak Berelasi Total Revenues from Related Parties	848.980.850.137	506.127.109.116
Pendapatan Usaha Revenues	3.099.400.878.060	2.289.292.024.670
Persentase Pendapatan Pihak Berelasi terhadap Pendapatan Usaha Percentage of Revenues from Related Parties to Revenues	27,39%	22,11%
Pembelian Pupuk dan Pestisida Purchase of Fertilizer and Pesticides		
PT Pupuk Kalimantan Timur	179.618.074.503	122.888.167.208
PT Petro Kimia Gresik	103.742.426.093	175.332.691.750
PT Pupuk Kujang	32.850.615.619	27.070.324.428

Pihak Berelasi Related Parties	2024	2023
PT Biofarma (Persero)	29.099.139.166	4.764.248.299
PT Pupuk Sriwidjaya	24.882.353.251	13.217.560.099
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	23.304.924.630	27.923.697.286
PT Pupuk Iskandar Muda	22.446.201.714	2.724.529.300
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.977.139.948	11.834.227.787
PT Petrosida Gresik	2.024.668.000	2.198.665.440
Perum Bulog	1.435.000.000	742.690.580
PT Pupuk Indonesia Niaga	305.166.840	1.145.633.620
PT Pupuk Indonesia	81.862.053	620.944.150
PT Rajawali Nusindo	160.193.110	615.677.294
PT PG Rajawali II	-	305.160.592.520
PT Pupuk Indonesia Pangan	-	1.740.350.016
PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	764.719.000
PT PG Rajawali I	-	392.893.500
PT Semen Padang	-	225.041.441
PT Sang Hyang Seri	-	218.733.000
PT PG Candi Baru	-	202.500.000
Lainnya (di bawah Rp200 juta) Others (below Rp200 million)	-	104.748.957
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi Total Purchases from Related Parties	440.927.764.927	699.783.886.718
Jumlah Pembelian Total Purchases	1.346.103.847.404	1.464.955.027.825
Persentase Pembelian dari Pihak Berelasi terhadap Jumlah Pembelian Percentage of Purchases from Related Parties to Total Purchases	32,76%	47,77%
Management Fee		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	7.978.194.506	3.216.792.194
Total	7.978.194.506	3.216.792.194
Aset Assets		
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents		
Bank		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.388.543.550	35.003.550.579
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29.466.481.049	54.038.816
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.011.319.203	9.732.816.390
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.433.467.961	9.175.659.584
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	198.535.404
Subjumlah Sub Total	135.299.811.763	54.164.600.773
USD		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	185.557.566	385.854.155
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	178.441.733	67.403.839
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	547.730	2.372.368
Subjumlah Sub Total	364.547.029	455.630.362



Pihak Berelasi Related Parties	2024	2023
Deposito berjangka Time deposits		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.040.000	-
Subjumlah Sub Total	79.040.000	-
Jumlah Total	135.743.398.792	54.620.231.135
Piutang usaha Trade receivables		
Dirjen Migas Directorate General of Oil and Gas	88.669.740.008	88.669.740.008
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	34.326.702.928	83.503.400.203
PT Pupuk Kalimantan Timur	32.674.857.542	27.183.298.845
PT Petrokimia Gresik	17.976.810.469	15.071.501.022
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12.960.732.438	6.667.174.084
PT Pupuk Iskandar Muda	11.918.161.330	8.421.582.777
PT Sang Hyang Seri	10.778.763.677	10.687.455.750
PT Pupuk Kujang	8.664.664.076	3.281.777.888
PT Pabrik Gula Rajawali I	4.776.815.000	2.361.377.132
PT Timah Tbk	4.343.125.543	4.675.572.405
PT Pabrik Gula Candi Baru	2.992.968.260	-
Lainnya (di bawah Rp 2 Miliar) Others (below Rp 2 billion)	10.161.266.067	36.715.658.373
Jumlah Total	240.244.607.338	287.238.538.487
Piutang lain-lain Other receivables		
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	34.587.645.138	-
Jumlah Total	34.587.645.138	-
Investasi pada Saham Investments in Shares		
PT Mitra BUMDes Nusantara	4.249.798.487	7.270.672.339
PT Manajemen CBT Nusantara	250.000.000	250.000.000
Jumlah Total	4.499.798.487	7.520.672.339
Jumlah Aset Total Assets	415.075.449.755	349.379.441.961
Persentase Percentage	8,33%	7,85%
Liabilitas jangka pendek Utang usaha Short-term liabilities Trade payables		
PT Nindya Karya	14.575.257.633	10.765.141.982
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	11.355.443.331	3.524.356.183
PT PG Rajawali II	9.215.594.400	9.215.594.400
PT Bio Farma (Persero)	4.658.169.773	-
PT Petrokimia Gresik	2.716.638.718	10.030.752.381
PT Pupuk Kalimantan Timur	2.158.037.383	15.470.476.839
PT Petrosida Gresik	1.615.253.422	4.467.103.932
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	511.710.011	5.979.001.713
Lainnya (di bawah Rp 2 Miliar) Others (below Rp 2 billion)	9.556.678.979	10.734.675.883
Jumlah Total	56.362.783.650	70.187.103.313

Pihak Berelasi Related Parties	2024	2023
Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Current portion of long term liabilities		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	15.417.371.970
Jumlah Total	-	15.417.371.970
Utang Bank - Jangka Pendek Short Term Bank Loan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83.776.640.000	86.351.117.899
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	56.118.465.953	82.239.013.340
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	69.701.999.997	69.841.944.667
Jumlah Total	209.597.105.950	238.432.075.906
Liabilitas jangka Panjang Long-term liabilities		
PT Rajawali Nusantara Indonesia	-	883.386.776.206
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	23.687.544.118	23.687.544.118
Jumlah Total	23.687.544.118	907.074.320.324
Jumlah Aset Total Assets	289.647.433.718	1.231.110.871.513
Persentase Percentage	20,92%	70,89%

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION ON THE REALIZATION OF UTILIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

PPI bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sepanjang tahun 2024.

PPI is not a publicly traded company and has not conducted a public offering, so there is no information regarding the total proceeds, plans for fund utilization, details of fund utilization, or the fund balance of the approval date of the General Meeting of Shareholders regarding the realization of the use of proceeds from a public offering throughout 2024.

PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

TAXATION AND CONTRIBUTION TO THE STATE

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPI berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

The responsibility for tax payment obligations reflects the national obligations in the tax field within national development. Therefore, PPI is committed to fulfilling tax payment obligations as both a Taxpayer and a Tax Withholder.

Selama sampai dengan Desember tahun 2024, Perseroan telah memberikan kontribusi pajak ke Kas Negara sebesar

As of December 2024, the Company has contributed tax to the State Treasury amounted to Rp71.13 billion or 89%



Rp71,13 Miliar atau sebesar 89% apabila dibandingkan dengan kontribusi pajak periode yang sama tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

compared to the tax contribution for the same period in 2023, with the following details:

URAIAN DESCRIPTION	31 Des 2024 Dec 31, 2024	31 Des 2023 Dec 31, 2023
KONTRIBUSI PAJAK TAX CONTRIBUTION		
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	688	498
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	6.705	8.469
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	4.191	7.347
PPh Pasal 22 Import Income Tax Article 22 Import	1.590	7.533
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	457	798
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	6.480	17.534
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	-	-
PPN VAT	19.754	1.837
PPN – WAPU VAT-WAPU	16.498	25.955
JUMLAH KONTRIBUSI PAJAK TOTAL TAX CONTRIBUTION	56.362	69.970
KONTRIBUSI PAJAK LAINNYA OTHER TAX CONTRIBUTION		
Pajak Bumi & Bangunan Property Tax	4.901	4.831
Pajak Kendaraan Vehicle Tax	400	1.070
Bea Masuk Customs	9.472	4.101
JUMLAH KONTRIBUSI PAJAK LAINNYA TOTAL OTHER TAX CONTRIBUTION	14.772	10.002
TOTAL	71.134	79.972

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Pada tahun 2024 Perseroan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal sehingga tidak ada informasi yang dapat diungkapkan pada laporan ini.

In 2024, the Company did not make any investments, expansions, divestments, mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring. Thus, no information is available in this report.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

SIGNIFICANT CHANGES IN LEGISLATION AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

Pada tahun 2024 tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

In 2024, there were no laws and regulations that significantly impacted the Company's business activities.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PERSEROAN

IMPACT OF PRICE CHANGES ON THE COMPANY

Tidak ada perubahan harga yang berdampak signifikan terhadap Perseroan pada tahun 2024.

There were no price changes that significantly impacted the Company in 2024.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERSEROAN (ESOP/MSOP)

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT IMPLEMENTED BY THE COMPANY (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2024 PPI belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise* di dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

As of the end of 2024, PPI has not implemented any employee stock ownership program (ESOP) and/or management stock ownership program (MSOP). Therefore, there is no information regarding the amount of ESOP/MSOP shares, their realization, duration, eligible employees and/or management requirements, and exercise price in this 2024 Annual Report.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Hingga tahun 2024, Perseroan tetap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan usaha di tengah dinamika operasional dan perubahan pasar. Perseroan terus menjaga stabilitas fundamental melalui penguatan struktur keuangan, efisiensi operasional, serta fokus pada pengelolaan aset dan arus kas yang berkelanjutan.

As of 2024, the Company continued to demonstrate a strong commitment to business sustainability amidst operational dynamics and market changes. It continues to maintain fundamental stability by strengthening its financial structure and operational efficiency and focusing on continuous asset management and cash flow.

Manajemen secara proaktif melakukan evaluasi berkala dan telah menetapkan sejumlah inisiatif strategis yang diyakini akan mendorong kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Di antaranya adalah penguatan tata kelola, peningkatan produktivitas, serta pengembangan peluang usaha baru yang sejalan dengan tren industri dan kebutuhan pasar.

Management proactively conducts regular evaluations and has determined several strategic initiatives that are believed to drive better performance in the future, including strengthening governance, increasing productivity, and developing new business opportunities that align with industry trends and market demands.

Penilaian manajemen menegaskan bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan secara bertahap. Dengan berbekal pengalaman operasional, respons adaptif terhadap tantangan eksternal, dan visi jangka panjang yang terarah, Perseroan optimistis dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Management appraisal emphasizes that the Company is on the proper track to gradually capitalize on its growth potential. With operational experience, adaptive response to external challenges, and a focused long-term vision, the Company is optimistic that it can create sustainable added value for stakeholders.



Asumsi dasar atas kelangsungan usaha didukung oleh fondasi operasional yang solid dan langkah strategis yang telah ditempuh sepanjang tahun berjalan. Dengan demikian, Perseroan percaya diri dalam melanjutkan perannya sebagai pelaku usaha yang tangguh, adaptif, dan siap bertumbuh di masa depan.

The basic assumption of business continuity is supported by a solid operational foundation and strategic measures taken throughout the year. Thus, the Company is confident in continuing its role as a resilient, adaptive, and growth-ready business player in the future.





05

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPI

DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN PPI

Tata kelola perusahaan yang baik lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan dan regulasi; namun juga untuk mewujudkan budaya akuntabilitas dan tanggung jawab. Hal ini memerlukan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, demi menjaga kepentingan para *stakeholder*, dan mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Pernyataan Komitmen Penerapan GCG

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten menjadi landasan operasional Perseroan sehari-hari. Penerapan GCG telah mendarah daging dalam setiap aspek di PPI, sehingga menumbuhkan budaya kerja yang kuat yang ditandai dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Bagi PPI, penerapan GCG lebih dari sekedar kepatuhan terhadap mandat hukum, GCG merupakan komitmen yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh seluruh komponen organisasi. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, regulator, mitra kerja, dan lainnya.

Penerapan GCG pada jangka panjang diyakini dapat memberikan imbal ekonomi yang maksimal bagi PPI dan Pemegang Saham, serta dapat mendukung terbentuknya citra dan reputasi positif di mata para Pemangku Kepentingan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha.

Untuk itu, PPI selalu berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya dari waktu ke waktu. Seluruh insan PPI menyatakan kesungguhan dan komitmen kuat untuk selalu mengedepankan standar etika tertinggi dalam membangun relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut setidaknya tercantum dalam Pakta Integritas yang setiap awal tahun wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

Good corporate governance is not merely about adhering to rules and regulations; it embodies a culture of accountability and responsibility. It requires a proactive approach to identifying and mitigating risks, safeguarding the interests of stakeholders, and promoting transparency and fairness in decision-making processes.

Statement of GCG Implementation Commitment

As a state-owned enterprise (SOE), adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) has consistently served as the basis for the Company's daily operations. The implementation of GCG is ingrained within every aspect of PPI, fostering a robust work culture characterized by professionalism, accountability, and responsibility.

For PPI, GCG implementation goes beyond mere compliance with legal mandates, it signifies a commitment undertaken consciously and willingly by all organizational components. This commitment aims to cultivate sustainable added value creation for the benefit of shareholders, wide community, and other stakeholders, including employees, regulators, partners, and beyond.

The long-term implementation of GCG is believed to provide maximum economic returns for PPI and Shareholders, while also supporting the formation of a positive image and reputation in the eyes of stakeholders. Therefore, it can be concluded that the implementation of GCG is one of the decisive factors for business sustainability.

To that end, PPI continually strives to enhance the quality of its GCG implementation over time. Every individual within PPI expresses earnestness and strong commitment to always prioritize the highest ethical standards in building relationships with various parties, both internal and external. This commitment is outlined, at the very least, in the Integrity Pact which is mandatory to be signed by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees at the beginning of each year.

Landasan Penerapan GCG

Penerapan GCG di lingkungan PPI berpedoman pada sejumlah regulasi normatif, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat KBUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Pelaksanaan Asesmen GCG BUMN Tahun 2023 kepada PT RNI (Persero);
5. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023;
6. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Legal Basis of GCG Implementation

The implementation of GCG within PPI refers to several normative regulations, including the following:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) as amended by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2023 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies dated August 16, 2007;
3. The Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. The Minister of State-Owned Enterprises Letter Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, concerning the Implementation of the 2023 SOE GCG Assessment to PT RNI (Persero);
5. PT RNI (Persero) Letter Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation;
6. Guidelines on Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasinya | GCG Principles and Their Implementation

Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di Lingkup PPI Implementation in PPI
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.	• Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs web: www. ptpi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www. ptpi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas terhadap seluruh organ PPI Establishing a clear division of roles, functions and implementation of responsibilities for all PPI Organs.	• Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam <i>Board Manual</i> PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.

Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di Lingkup PPI Implementation in PPI
Pertanggungjawaban Responsibility	Menjamin kesesuaian antara kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensuring conformity between day-to-day business operations and applicable laws and regulations.	● Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ● Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; ● Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial PPI (<i>corporate social responsibility</i>); dan ● Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan. ● Complying with the provisions of PPI's Articles of Association and applicable laws and regulations; ● Carrying out tax obligations properly and on time; ● Carrying out PPI social responsibility activities; and ● Carrying out information disclosure obligations in accordance with the set regulations.
Independensi Independency	Pengelolaan PPI dilakukan secara mandiri dan profesional serta bebas dari segala bentuk tindakan benturan kepentingan dan/atau pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The management of PPI is carried out independently and professionally and free from any form of conflict of interest and/ or influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations.	● Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara Organ PPI; ● Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan perseroan; ● Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengambilan keputusan. ● Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among PPI's Organs; ● Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company; ● The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees always avoid conflicts of interest in decision making process.
Kewajaran Fairness	PPI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. PPI upholds the principles of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business operations.	● Seluruh Pemangku Kepentingan berhak memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlakuan yang setara; ● Membuka kesempatan yang sama dan setara kepada setiap karyawan untuk berkariir dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. ● All Stakeholders are entitled to receive benefits and equal treatment; ● Opening equal and fair opportunities for every employee to have a career and carry out their duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

Pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) tahun 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governansi, nilai dasar TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) mengalami transformasi menjadi empat pilar yaitu ETAK (Perilaku beretika, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan) untuk mengakomodasi beberapa perkembangan terakhir dalam lingkungan bisnis korporasi.

In the 2021 Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy, the basic values of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) have been transformed into four pillars, namely ETAK (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability), to accommodate several recent developments in the corporate business environment.



Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di Lingkup PPI Implementation in PPI
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Berperilaku sesuai dengan nilai moral dan prinsip integritas dalam menjalankan bisnis dimana Perusahaan dan seluruh pihak yang terlibat (manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan) harus menjalankan aktivitas bisnis dengan standar moral yang tinggi. Behaving in accordance with moral values and principles of integrity in conducting business, in which the Company and all parties involved (management, employees, and stakeholders) must operate business with high moral standards.	• Penerbitan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT PPI (<i>Code of Conduct</i>); • Penerbitan Peraturan Tentang Whistle Blowing System (WBS) PT PPI; • Proses penerbitan Pedoman Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) PT PPI; • Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai PT PPI setiap awal tahun. • Issuance of Guidelines on PT PPI Business Ethics and Code of Conduct; • Issuance of Regulations on the Whistle Blowing System (WBS) of PT PPI; • Issuance process of PT PPI's Conflict of Interest Guidelines; • Signing of the Integrity Pact for all PT PPI employees at the beginning of each year.
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai Perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.	• Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs web: www.ptppi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www.ptppi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan, pertanggung- jawaban secara jelas terhadap seluruh organ PT PPI. Establishing a clear division of roles, functions and implementation, responsibilities for all PT PPI Organs.	• Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam <i>Board Manual</i> PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.
Keberlanjutan Sustainability	PT PPI mengelola bisnis secara bertanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang yang memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. PT PPI responsibly manages its business to ensure long-term growth that benefits shareholders, employees, communities and the environment.	• Penerbitan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>). • Issuance of Sustainability Report.

Maksud dan Tujuan Penerapan GCG

Sebagai perusahaan BUMN yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PPI bertujuan untuk:

1. Memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik.

GCG Implementation Purpose and Objective

As a state-owned entity working professionally and responsibly, the implementation of GCG principles in PPI aims to:

1. Providing assurance to all stakeholders that the company is managed and controlled to protect stakeholders' interests in accordance with laws and good governance practices.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja PPI menuju <i>well governed company</i>. Memberikan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perseroan dan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja PPI. | <ol style="list-style-type: none"> Fulfilling or complying with regulations is not only a requirement but also a necessity in enhancing PPI's performance towards becoming a well-governed company. Providing guidance in determining the company's policies and objectives and make a significant contribution to PPI's performance achievements. |
|---|--|

Jejak Langkah (*Milestones*) Penerapan GCG | Milestones of GCG Implementation

2003	Pembentukan organ Sekretaris Perusahaan Establishment of the Corporate Secretary Organ
12 Desember 2013 December 12, 2013	- Pembentukan tim Whistleblowing Establishment of Whistleblowing team - Pengesahan Nilai-nilai Budaya Perusahaan Ratification of Corporate Culture Values - Pengesahan Kebijakan GCG Ratification of GCG Policy
4 Juni 2018 June 4, 2018	Perubahan terhadap Soft structure GCG Changes to GCG Soft Structure
30 September 2018 September 30, 2018	Pengesahan Kebijakan Manajemen Risiko Ratification of Risk Management Policy
	Pengesahan Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko Nomor: 36/PERDIR/PPI/XII/2024. Ratification of Strategic Management Guidelines for Risk Management Number: 36/PERDIR/PPI/XII/2024.
2024	Kebijakan baru terkait adopsi terhadap Permen BUMN yang baru pada tahun 2023 New policy regarding the adoption of the new SOE Ministerial Regulation in 2023 - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG tahun 2024

Berdasarkan Self Assessment yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi. Adapun prinsip/rekomendasi yang tidak terpenuhi atau explain yaitu:

- Prinsip/Rekomendasi 7.1.3: Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.

Prinsip 7.1.3 tidak terpenuhi (explain) dikarenakan PT PPI selaku induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan, belum memiliki prosedur akuisisi. Sedangkan untuk aturan akuisisi perusahaan telah

Efforts to Improve the Quality of GCG Implementation in 2024

Based on the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations. The principles/recommendations that were not fulfilled or explained are:

- Principle/Recommendation 7.1.3: Corporations have established rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and the sale of substantial corporate assets. This ensures such transactions occur transparently and under fair conditions, protecting the rights of all shareholders according to their class.

Principle 7.1.3 was unfulfilled (explain) due to PT PPI, as a parent company with subsidiaries, currently lacks a specific acquisition procedure. Meanwhile, the Company acquisition rules have been outlined

tertuang di dalam Anggaran Dasar PT PPI Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan berikut pengesahannya. Terkait aturan akuisisi tertuang di Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Perubahan bentuk badan hukum, sebagai berikut:

- a) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.
- c) Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- d) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e-h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan Ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.
- f) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan

in the Articles of Association of PT PPI Number 12 dated March 21, 2024, made before Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notary in South Jakarta and its ratification. Regarding the acquisition rules, they are stated in Article 29 on Mergers, Consolidations, Acquisitions, Dissolution, and Changes in legal entity form, outlines the following:

- a) Subject to prevailing laws and regulations, any merger, consolidation, acquisition, dissolution, or change in the Company's legal entity form requires a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, which must be attended by Shareholders representing at least three-quarters ($\frac{3}{4}$) of the total issued shares with valid voting rights, and the decision must be approved by at least three-quarters ($\frac{3}{4}$) of those votes.
- b) In the event that the attendance quorum, as referred to in paragraph (1) of this Article, is not to be met, a Second General Meeting of Shareholders may be held.
- c) The Second GMS, as referred to in paragraph (2) of this Article, shall be valid and entitled to make decisions if at least two-thirds ($\frac{2}{3}$) of the total shares with valid voting rights are present or represented, and the decision is valid if approved by at least three-quarters ($\frac{3}{4}$) of the votes cast.
- d) Any merger, consolidation, acquisition, dissolution, or change in legal entity form must be formalized by a Notarial Deed in Indonesian.
- e) The provisions as referred to in Article 25 paragraph (1) letters e-h (regarding the determination of the quorum by the Court for the Third General Meeting of Shareholders and the deadlines for the Second and Third General Meetings of Shareholders, and decisions outside the General Meeting of Shareholders) mutatis mutandis is applicable to the General Meeting of Shareholders as regulated in this Article.
- f) The Board of Directors shall announce in 2 (two) Indonesian language daily newspapers that are published and circulated widely/nationally in the territory of the Republic of Indonesia regarding the planned merger, amalgamation, acquisition, dissolution and change of the legal

hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

- g) RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Prinsip/Rekomendasi 8.3.1: Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Prinsip 8.3.1 tidak terpenuhi (*explain*) karena Peraturan Direksi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang saat ini telah diterbitkan oleh PT PPI yaitu Peraturan Direksi PT PPI Nomor 5/PERDIR/PPI/II/2023 belum dilakukan pemutakhiran merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Maret 2023 dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023.

entity form of the Company no later than 14 (fourteen) days prior to the summons for the General Meeting of Shareholders.

- g) A GMS for Mergers, Consolidations, Acquisitions, Dissolution, and Changes in Legal Entity Form must be attended by Series A Dwiwarna Shareholders, and the GMS resolution must be approved by Series A Dwiwarna Shareholders.

2. Principle/Recommendation 8.3.1: The Board of Directors shall ensure and disclose that corporate operations reflect the implementation of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation, and ensure that appropriate policies and procedures are in place to respect and comply with stakeholder rights.

Principle 8.3.1 was unfulfilled (*explain*) due to the Board of Directors Regulation on Social and Environmental Responsibility that has currently been issued by PT PPI, namely the Board of Directors Regulation of PT PPI Number 5/PERDIR/PPI/II/2023 has not been revised referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 stipulated in Jakarta on March 3, 2023 and promulgated in Jakarta on March 24, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. Although its practice was based on the Decree of the Board of Directors of PT PPI Number 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 dated November 30, 2023, concerning the Establishment of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Committee has referred to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-1/MBU/03/2023.

Penilaian Penerapan GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola di Perseroan guna mengoptimalkan kinerjanya. Kerangka kerja GCG yang kuat memastikan bahwa Perseroan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta selaras dengan kepentingan terbaik para pemangku kepentingan.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG membantu Perseroan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, sehingga memaksimalkan potensi kinerja. Selain itu, kerangka kerja GCG yang solid mendorong

GCG Implementation Assessment

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) plays a vital role in improving the effectiveness of governance in the Company to optimize its performance. A robust GCG framework ensures that the Company operates with transparency, accountability, and integrity and aligns with the best interests of its stakeholders.

Compliance with GCG principles will enable the Company to improve its operational efficiency and effectiveness, thereby maximizing its performance potential. In addition, a solid GCG framework encourages better decision-making,

pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko yang efektif, serta penerapan perilaku etis di seluruh organisasi.

Selain itu, penerapan GCG yang kuat memfasilitasi penyelarasan dan koordinasi organisasi yang lebih baik, serta merampingkan praktik manajemen perusahaan. Keselarasan ini memungkinkan Perseroan secara efektif mengejar dan mencapai target kinerja, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan menciptakan nilai.

Pada intinya, GCG berfungsi sebagai landasan utama dalam mendorong praktik tata kelola yang baik, memastikan bahwa Perseroan beroperasi secara optimal serta memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PPI menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Sesuai peraturan tersebut, PPI wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG secara berkala setiap 2 tahun sekali. Penilaian GCG dilakukan sebagai salah satu upaya PPI untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga PPI dapat mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan aspek perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dasar Pelaksanaan Penilaian GCG

Penilaian kualitas penerapan GCG di Perseroan mengacu pada sejumlah aturan berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023.
3. Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023.

effective risk management, and the implementation of ethical behavior throughout the organization.

Furthermore, a strong emphasis on GCG implementation facilitates better organizational alignment and coordination, streamlining corporate management practices. This alignment enables the Company to effectively pursue and achieve its performance targets, driving sustainable growth and creating value.

In essence, GCG serves as a basis for fostering good governance practices, ensuring that the Company operates optimally and delivers value to stakeholders in a responsible and sustainable manner.

PPI implements the principles of GCG based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. According to this regulation, PPI is obliged to conduct periodic assessments of GCG implementation once every 2 years. The GCG assessment is conducted as one of PPI's efforts to enhance the quality of GCG implementation, enabling PPI to determine the sufficiency of implementation levels and identify improvement aspects that need to be addressed by management.

Legal Basis for Conducting GCG Assessment

The assessment of GCG implementation quality in the Company refers to several regulations, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Letter from the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors of SOE Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, concerning the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023.
3. Letter from the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024, concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

Kriteria yang Digunakan

Pada tahun 2024, metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PT PPI menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023.

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi.

Skor GCG

Pada tahun 2023 dilaksanakan penilaian GCG dengan metode penilaian oleh pihak eksternal untuk penerapan GCG pada tahun buku 2022.

Criteria Used

In 2024, the method of measuring the implementation of GCG in PT PPI's environment adopted the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter of the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024, dated October 15, 2024 concerning the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and the Letter of the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024 concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

According to the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations.

GCG Score

In 2023, a GCG assessment was carried out using assessment method by external parties for the implementation of GCG in the 2022 fiscal year.

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing Aspects/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2023 Achievements in 2023	
		Skor Score	% Capaian Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	5,041	72,008
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	7,540	83,779
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	27,263	77,893
Direksi Board of Directors	35,000	28,860	82,457
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	7,450	82,778
Subtotal Sub-Total	95,000	76,154	
Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0	
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE	100,000	76,154	BAIK GOOD

Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera dari rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG Perseroan. Terhadap rekomendasi tersebut, Perseroan telah melakukan tindak lanjut hingga akhir tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

Based on the assessment results, there are several issues that require immediate handling from the recommendations that serve as Areas of Improvement for the Company's GCG implementation. Regarding these recommendations, the Company has carried out follow-ups until the end of 2024, with the following explanation:

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year		Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 Follow-up as of December 31, 2024	
No.		Status	Bentuk Tindak Lanjut Follow-up Form
I Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS			
1	Menetapkan pengaturan mengenai jumlah jabatan yang boleh dirangkap oleh anggota Direksi bila tidak konflik kepentingan Established regulations regarding the number of positions that may be held concurrently by members of the Board of Directors if there is no conflict of interest.	✓	Terdapat dalam : 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (Halaman 24, 28, 58 dan 75); 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI) (COI dibahas di halaman 29-30); 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 (Halaman 98-99, 100-103, 238-239, 261, 297). Contained in: 1. Company GCG Policy Guidelines - Board Manual (Pages 24, 28, 58 and 75); 2. Business Ethics and Code of Conduct Guidelines (PT PPI Code of Conduct) (COI is discussed on pages 29-30); 3. 2023 PT PPI Annual Report (Pages 98-99, 100-103, 238-239, 261, 297).
2	Memuat alasan pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Keputusan RUPS/ Pemilik Modal. Included reasons for the termination at any time of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in the GMS/Capital Owner Resolution.	✓	Terdapat dalam: Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>: Bab IV Direksi - Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan, halaman 75) Contained in: Company GCG Policy Guidelines - Board Manual: Chapter IV Board of Directors - Mechanism for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors and Members of the Commissioners of Subsidiaries, page 75)
3	Memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Granted ratification/ approval of the RJPP plan or Revised RJPP.		Terdapat dalam: 1. Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT. PPI (Persero) 2020-2024; 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024; 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024; 4. Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 – 2024. Contained in: 1. President Director's Letter Number: 157/DU.Int/VII/2020 concerning Request for Approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT. PPI (Persero) 2020-2024; 2. Board of Commissioners' Letter Number 23/DK.Int/PPI/VII/2020 concerning the Board of Commissioners' Response to the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT PPI (Persero) 2020-2024; 3. Board of Commissioners' Letter Number: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 concerning the Board of Commissioners' Recommendation to the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT PPI (Persero) 2020 - 2024; 4. President Director's Letter Number: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 concerning Submission of the RJPP Book of PT PPI (Persero) 2020 – 2024.
4	Menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu. Established a Management Contract that comprises individual performance targets for the Board of Directors.	✓	Terdapat dalam: Kontrak Manajemen Tahunan KPI Direksi Secara Kolegial Antara Pemegang Saham PT PPI dan Direksi Tahun 2023. Nomor: 15/S.Pj-Hkm/RNI-01/I/2023 & KPI Direksi PPI Tahun 2023 Contained in: Annual Management Contract of Board of Directors' KPI Collegially Between Shareholders of PT PPI and Board of Directors in 2023. Number: 15/S.Pj-Hkm/RNI-01/I/2023 & Board of Directors' KPI of PPI in 2023

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

5	Memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi (Individu). Provided performance appraisal of Board of Directors members (Individual).	✓	Terdalam dalam: Surat Dewan Komisaris Nomor: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 perihal Penilaian Direksi Eksisting PT PPI Semester 1 Tahun 2023 + Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Direksi PT PPI. Contained in: Board of Commissioners Letter Number: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 concerning Assessment of Existing Board of Directors of PT PPI Semester 1 of 2023 + Recapitulation of the Evaluation of the Board of Directors of PT PPI.
6	Menetapkan besarnya honorarium/imbalance jasa untuk auditor eksternal. Determined the amount of honorarium/service fee for external auditors.	✓	Terdapat dalam: - Berita Acara RUPST - Akta Penunjukan Akuntan Publik (Keputusan Agenda 5); - Perjanjian Kerja Jasa Audit Umum Tahun Buku 2023 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Contained in: - Minutes of the AGMS - Deed of Appointment of Public Accountant (Agenda 5 Resolution); - General Audit Service Work Agreement for the 2023 Fiscal Year of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
7	Menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Established guidelines for preparing reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.	✓	Terdapat dalam: - Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023; - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023. Contained in: - Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year; - Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year.
8	Menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan. Followed up on areas of improvement resulting from the assessment of the implementation of Good Corporate Governance in the company concerned.	✓	Terdapat dalam: Dokumen Kebijakan Perusahaan sepanjang tahun 2024. Contained in: The Company's Policy Documents for 2024.
9	Menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Established a system for receiving reports of symptoms of underperformance from the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	✓	Terdapat dalam: Surat Dewan Komisaris Nomor: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 perihal Penilaian Direksi Eksisting PT PPI Semester 1 Tahun 2023 + Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Direksi PT PPI. Contained in: Board of Commissioners Letter Number: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 concerning Assessment of Existing Board of Directors of PT PPI Semester 1 of 2023 + Recapitulation of the Evaluation of the Board of Directors of PT PPI.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

II Dewan Komisaris | Board of Commissioners

1	Mengintruksikan seluruh pejabat wajib lapor LHKPN menyampaikan Laporan LHKPN tepat waktu. Instructed all officials required to report LHKPN to submit LHKPN Reports in a timely manner.	✓	Terdapat dalam: Sesuai dengan surat dari Wakil Koordinator LHKPN nomor: 0005/LHKPN/EKS/PPI/I/2024 tanggal 29 Januari 2025, perihal Materi Sosialisasi Penyampaian LHKPN dan Kewajiban Penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023. Contained in: In accordance with the letter from the Deputy Coordinator of the LHKPN (State Officials' Wealth Report) Number: 0005/LHKPN/EKS/PPI/I/2024 dated January 29, 2025, concerning the Socialization Material for LHKPN Submission and the Obligation to Submit LHKPN for the 2023 Reporting Year.
2	Menerapkan penegakan aturan sanksi bagi pejabat yang ditetapkan wajib lapor LHKPN tetapi tidak menyampaikan Laporan LHKPN. Implemented enforcement of sanctions for officials who are required to report LHKPN but do otherwise.	✓	Terdapat dalam: Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 28/DU/SKD/POB/PPI/VIII/20219 Tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Contained in: Board of Directors Decree Number: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 concerning the First Amendment to Board of Directors Decree of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 28/DU/SKD/POB/PPI/VIII/20219 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
3	Menandatangani Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Signed the Good Corporate Governance Code (GCG Code) and Code of Conduct.	✓	Sudah ditandatangani Laporan Penerapan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun Buku 2023. The GCG Self Assessment Implementation Report for the 2023 Fiscal Year has been signed.
4	Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Coe yang diperbaharui setiap tahun. The Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee signed a statement of compliance with the CoC, which is updated annually.	✓	Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris The Integrity Pact has been signed by the Board of Commissioners and its committee.
5	Menetapkan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris secara formal. Established the division of duties among the members of the Board of Commissioners formally.	✓	Terdapat dalam: Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (2021) Contained in: Company GCG Policy Guidelines - Board Manual (2021)
6	Rencana Kerja Dewan Komisaris memuat: - Pembahasan transaksi atau tindakan dalam lingkungan kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal; - Pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' Work Plan contains: - Discussion of transactions or actions within the authority of the Board of Commissioners or GMS/ Capital Owners; - Supervise the effectiveness of the implementation of external and internal audits, as well as the implementation of reviews of complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.	✓	Terdapat dalam: Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 Contained in: Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year + Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

- 7 Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui:
- Pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya;
 - Telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan
 - Telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

Conducted assessments on the effectiveness of external audit implementation through:

- Monitoring the conformity of audit progress completion with its work plan;
- Reviewing the conformity of audit implementation with public accountant professional standards; and
- Reviewing external audit results and the quality of external audit recommendations.



Terdapat dalam:

1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI.
4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023.
5. Surat Tanggapan Dekom Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.

Contained in:

1. Letter of the Board of Commissioners Number: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of the 2022 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
2. Letter of the Board of Commissioners Number: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of Semester 1 of the 2023 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
3. Letter of the Board of Commissioners Number: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning: For the Attention of the Performance of the Board of Directors of PT PPI.
4. Letter of the Board of Commissioners Number: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in the First Quarter of 2023.
5. Response Letter of the Board of Commissioners Number 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Management Report of 2023.

- 8 Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui:
- Telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal;
 - Kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan
 - Telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya;
 - Manajemen fungsi SPI.

Conducted assessments on the effectiveness of internal audit implementation through:

- Review of the conformity of audit implementation with internal audit standards;
- Completeness of findings attributes and quality of internal audit recommendations; and
- Review of the supervisory work plan and its implementation;
- Management of SPI functions.



Terdapat dalam:

1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI.
4. Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023.
5. Surat Tanggapan Dekom Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023.

Contained in:

1. Letter of the Board of Commissioners Number: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of the 2022 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
2. Letter of the Board of Commissioners Number: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of Semester 1 of the 2023 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
3. Letter of the Board of Commissioners Number: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning: For the Attention of the Performance of the Board of Directors of PT PPI.
4. Letter of the Board of Commissioners Number: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in the First Quarter of 2023.
5. Response Letter of the Board of Commissioners Number 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Management Report of 2023.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

9 Menetapkan Piagam dan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Established the Charter and Work Program of the Nomination and Remuneration Committee.	✓	Terdapat dalam: SK Pengangkatan Komite Audit - Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit (Mengubah Susunan Komite Audit: Ketua = Hamli, Anggota Komite : Helman Arif dan Reihard Harianja); - Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Hertanta - Anggota Komite Audit); - Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PPI (Persero) (Memberhentikan Antonius Guntur Supriyanto dan Mengangkat Reinhard Harianja- Anggota Komite Audit); - Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PPI (Persero) (Mengangkat Hamli sebagai Ketua Komite Audit). SK Pengangkatan Komite Pemantau Risiko - Surat Dewan Komisaris Nomor: 04/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Direksi terkait Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko + Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI (Pemberhentian Dilza Vierson- Mengangkat Eko Setiawan /Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI); - Keputusan Dewan Komisaris KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT PPI (Persero) (Ketua Komite Pemantau Risiko : Setiawan Wangsaatmaja, Anggota Komite: Dilza Vierson dan Hertanta SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi - Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI; - Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmaja/Anggota Komite). Contained in: Decree on Appointment of Audit Committee - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021 Concerning Changes in the Composition of the Audit Committee (Changed the Composition of the Audit Committee: Chairman = Hamli, Committee Members: Helman Arif and Reihard Harianja); - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-01/DK/PTPPI/II/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of PT PPI (Hertanta - Member of the Audit Committee); - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of PT PPI (Persero) (Dismissed Antonius Guntur Supriyanto and Appointed Reinhard Harianja- Member of the Audit Committee); - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-07/DK/PTPPI/IX/2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of PT PPI (Persero) (Appointed Hamli as Chairman of the Audit Committee).
---	----------	--

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

			Decree on the Appointment of the Risk Oversight Committee - Decree of the Board of Commissioners Number: 04/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 concerning the Submission of the Decree of the Board of Directors regarding the Replacement of Members of the Risk Management Monitoring Committee + Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Oversight Committee of PT PPI (Dismissal of Dilza Vierson- Appointed Eko Setiawan/Member of the Risk Management Committee of PT PPI); - Decree of the Board of Commissioners KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 concerning Changes in the Membership Composition of the Risk Oversight Committee of PT PPI (Persero) (Chairman of the Risk Oversight Committee: Setiawan Wangsaatmaja, Committee Members: Dilza Vierson and Hertanta). Decree on Appointment of the Nomination and Remuneration Committee - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 dated December 27, 2021 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee and the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT PPI; - Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 concerning Changes in the Membership Composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT PPI (Hamli/Chairman of the Committee, Setiawan Wangsaatmaja/Committee Member).
10	Mengintruksikan Komite untuk memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan dalam Laporan Komite Dekom. Instructed the Committee to include a comparison of activity realization with the annual work program in the Board of Commissioners Committee Report.	✓	Terdapat dalam: Laporan Dewan Komisaris, Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 Contained in: Board of Commissioners Report, Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year + Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year.
11	Belum ada kebijakan mengenai Informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. There is no policy regarding information on the business environment and issues that are expected to impact the Company's business and performance that require the consideration of the Board of Commissioners.	✓	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia has stipulated the Board of Directors Regulation No. 36/PERDIR/PPI/XII/2024 dated December 17, 2024, concerning the Strategic Management Guidelines for Risk Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

**Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun
No. Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG
Implementation for the 2022 Fiscal Year**

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

12 Melakukan telaah atas: - Kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis; - Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas (tetapi Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas sistem pengendalian tingkat operasional/aktivitas), dan internal control report; - Master plan TI dan kebutuhan perkembangan TI; - Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan); - Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya; - Kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. Conducted a review of: - The conformity of the Company's vision and mission with changes in the business environment; - Policy/plan and implementation of the internal control system, evaluation results of the effectiveness of internal control at the entity level (However, the Board of Commissioners has conducted a review of the operational/activity level control system), and internal control reports; - IT master plan and IT development needs; - Policy/plan and implementation of human resource management policies (especially regarding career management in the Company, promotion, mutation and demotion systems and procedures in the Company); - Procurement policies and their practice; - Quality and service policies and their practice;	✓	Terdapat dalam: 1. Buku Rencana Jangka Panjang 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2023-2027; 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024 . 2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2023. 3. Laporan Dewan Komisaris & Rapat Gabungan 3.1. Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/DK.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 (Kehadiran Rapat Gabungan (Ragab)); 3.2. Risalah Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dan Direksi; 3.3. Daftar Hadir Fisik Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Akta Anggaran Dasar PT PPI : 4.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2028) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 4.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 4.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 5. Surat RJPP dan RKAP A. Surat terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, diantaranya: - Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT.PPI (Persero) 2020-2024; - Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024; - Surat Dewan Komisaris Nomor: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024; - Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 - 2024; B. Surat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya: - Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 Perihal Pengantar/Penyampaian Buku RKAP PT PPI Tahun 2023; - Surat Dewan Komisaris Nomor 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan Rencana Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT PPI Tahun 2023; - Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Penyampaian Kembali Buku RKAP Tahun 2023; - Surat Direktur Utama Nomor 19/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan RKAP 2023 PT PPI. 6. Laporan Dewan Komisaris yang terdapat dalam Laporan Tahunan PT PPI 2023
--	----------	---

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

**Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun
No. Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG
Implementation for the 2022 Fiscal Year**

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

7. Peraturan Direksi, Surat Edaran Direksi, dan Keputusan Direksi
 - 7.1. Peraturan Direksi Nomor: 14/PERDIR/PPI/V/2023 tentang Prosedur Operasi Baku POB Sistem Manajemen Teknologi Informasi PT PPI (dibahas pada lampiran 01-03 POB/14/PERDIR/PPI/V/2023 - Halaman 5-24);
 - 7.2. Surat Edaran Direksi Nomor: 10/DO/SE/PPI/VII/2022 tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
 - 7.3. Surat Edaran Direksi Nomor: 07/DO/SE/PPI/IV/2022 tentang Kebijakan Umum Tatakelola Teknologi Informasi IT Governance (Halaman 8);
 - 7.4. Keputusan Direksi Nomor: 16/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tentang Prosedur Operasi Baku POB Tata Kelola Teknologi Informasi;
 - 7.5. Peraturan Direksi Nomor: 13/PERDIR/PPI/V/2023 tentang Prosedur Operasi Baku POB Manajemen Akses Teknologi Informasi PT PPI;
 - 7.6. Surat Edaran Direksi Nomor: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi;
 - 7.7. Surat Edaran Direksi Nomor: 03/DO/SE/PPI/II/2022 tentang Penggunaan Aplikasi Helpdesk Dalam Rangka Mendukung Maturity Level dan Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
8.
 - 8.1. Peraturan Direksi Nomor 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan PT PPI;
 - 8.2. Peraturan Direksi Nomor 23/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT PPI.
9. Peraturan Direksi Nomor 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 tentang Pedoman Mutu di Divisi Manajemen Risiko.

Contained in:

1. Long-Term Plan Book
 - 1.1. Company Long-Term Plan Book of PT RNI (Persero) for 2023-2027;
 - 1.2. Company Long-Term Plan Book of PT PPI for 2020-2024.
2. Company Budget Work Plan Book for 2023.
3. Report of the Board of Commissioners & Joint Meeting
 - 3.1. Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/DK.Eks/PTPPI/V/2024 dated May 27, 2024 concerning the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year (Attendance at Joint Meetings (Ragab));
 - 3.2. Minutes of Joint Meetings (Ragab) of the Board of Commissioners and Board of Directors;
 - 3.3. Physical Attendance List of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Deed of Articles of Association of PT PPI:
 - 4.1. Deed of PT PPI Number 33 of 2008 (Dated August 29, 2028) concerning the Articles of Association of PT PPI;
 - 4.2. Deed of PT PPI Number 2 of 2022 (Dated January 7, 2022) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI;
 - 4.3. Deed of PT PPI Number 12 of 2024 (Dated March 21, 2024) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI.
5. RJPP and RKAP Letters
 - A. Letters related to the Company's Long-Term Plan, including:
 - Letter of the President Director Number: 157/DU.Int/VII/2020 concerning the Request for Approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT.PPI (Persero) 2020-2024;
 - Letter of the Board of Commissioners Number 23/DK.Int/PPI/VII/2020 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT PPI (Persero) 2020-2024;
 - Letter of the Board of Commissioners Number: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 concerning the Recommendation of the Board of Commissioners on the Company's Long-Term Plan (RJPP) of PT PPI (Persero) 2020 - 2024;

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

- Letter of the President Director Number: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 concerning the Submission of the RJPP Book of PT PPI (Persero) 2020 - 2024;
- B. Letters related to the Company's Work Plan and Budget, including:
 - Letter of the President Director of PT PPI Number 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 concerning Introduction/Submission of the 2023 PT PPI RKAP Book;
 - Letter of the Board of Commissioners Number 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 concerning the Board of Commissioners' Response to the 2023 PT PPI RKAP and Social and Environmental Responsibility Program Budget Plan (RKA TJSL);
 - Letter of the President Director of PT PPI Number 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 concerning Resubmission of the 2023 RKAP Book;
 - Letter of the President Director Number 19/DU/Eks/PPI/I/2023 concerning Request for Approval and Ratification of the PT PPI's 2023 RKAP.
- 6. Board of Commissioners Report contained in 2023 Annual Report of PT PPI
- 7. Board of Directors Regulation, Board of Directors Circular Letter, and Board of Directors Resolution
 - 7.1. Board of Directors Regulation Number: 14/PERDIR/PPI/V/2023 concerning Standard Operating Procedures for Information Technology Management System POB of PT PPI (discussed in attachment 01-03 POB/14/PERDIR/PPI/V/2023 - Pages 5-24);
 - 7.2. Board of Directors Circular Number: 10/DO/SE/PPI/VII/2022 concerning Issuance of Standard Operating Procedures for Governance of Information Technology Management Work Unit of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
 - 7.3. Board of Directors Circular Number: 07/DO/SE/PPI/IV/2022 concerning General Policy for Information Technology Governance (Page 8);
 - 7.4. Board of Directors Decree Number: 16/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 concerning Standard Operating Procedure for Information Technology Governance POB;
 - 7.5. Board of Directors Regulation Number: 13/PERDIR/PPI/V/2023 concerning Standard Operating Procedures for Information Technology Access Management POB of PT PPI;
 - 7.6. Board of Directors Circular Letter Number: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 concerning Information Technology Policies and Procedures;
 - 7.7. Board of Directors Circular Letter Number: 03/DO/SE/PPI/II/2022 concerning Use of Helpdesk Applications in Order to Support Maturity Level and Information Technology Governance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- 8.
 - 8.1. Board of Directors Regulation Number 10/PERDIR/PPI/IV/2024 concerning Guidelines for Procurement of Trades of PT PPI;
 - 8.2. Board of Directors Regulation Number 23/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for Procurement of Non-Trading Goods and Services of PT PPI.
- 9. Board of Directors Regulation Number 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 concerning Quality Guidelines in the Risk Management Division.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

13 Menyampaikan arahan kepada Direksi mengenai: - Master plan TI dan kebutuhan perkembangan TI; - Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan; - Kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya; Delivered guidance to the Board of Directors regarding: - IT master plan and IT development needs; - Human resource management policies/plans and implementation (especially regarding career management in the company, promotion, mutation and demotion systems and procedures in the Company; - Quality and service policies and their practice;	✓	Terdapat dalam: 1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI 2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 4. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> 5. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - Subsidiary Governance - 2022 Contained in: 1. Deed of PT PPI Number 33 of 2008 (Dated August 29, 2008) concerning the Articles of Association of PT PPI 2. Deed of PT PPI Number 2 of 2022 (Dated January 7, 2022) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI 3. Deed of PT PPI Number 12 of 2024 (Dated March 21, 2024) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI 4. Company GCG Policy Guidelines - Board Manual 5. Level I Policy Book - Guidelines for Business Group Governance - Subsidiary Governance - 2022
14 Memuat Pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris. Discussed policies and implementation of subsidiary/joint venture management in the Board of Commissioners' Annual Work Plan.	✓	Terdapat dalam: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> 2. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - Subsidiary Governance - 2022 Contained in: 1. Company GCG Policy Guidelines - Board Manual 2. Level I Policy Book - Guidelines for Business Group Governance - Subsidiary Governance - 2022
15 Membuat kebijakan mengenai: - Kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. - Pengusulan remunerasi Direksi. Making policies regarding: - Selection criteria for candidates of the Board of Directors and proposing such candidates to Shareholders/Capital Owners. - Proposing remuneration for the Board of Directors.	✓	Terdapat dalam: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 02/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Usulan Kandidat Talent Pool PT PPI Semester 1 Tahun 2023. 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022, dibahas pada: a. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Komite Nominasi dan Remunerasi, halaman 321-325; dan b. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Kebijakan Suksesi Direksi, halaman 326. 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023, dibahas pada: a. Bab VI Tata Kelola Perusahaan - e. Program Suksesi Kandidat Calon Direksi Perseroan, halaman 249; b. Bab VI Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Komite Nominasi dan Remunerasi, halaman 300. Contained in: 1. Letter of the Board of Commissioners Number: 02/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 dated February 27, 2023, concerning the Proposal of PT PPI Talent Pool Candidates for Semester 1 of 2023. 2. PT PPI 2022 Annual Report, discussed in: a. Chapter VI Good Corporate Governance - Nomination and Remuneration Committee, pages 321-325; and b. Chapter VI Good Corporate Governance - Board of Directors Succession Policy, page 326. 3. PT PPI 2023 Annual Report, discussed in: a. Chapter VI Good Corporate Governance - e. Succession Program for Candidates of the Company's Board of Directors, page 249; b. Chapter VI Good Corporate Governance - Nomination and Remuneration Committee, page 300.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

16	Memuat telaah pengusulan remunerasi Direksi dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris. Contained a review of the proposal for remuneration of the Board of Directors in the Annual Work Plan of the Board of Commissioners	✓	Terdapat dalam: - Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2022 (Halaman 321-325 dan 346); - Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 (Halaman 300). Contained in: - PT PPI 2022 Annual Report (Pages 321-325 and 346); - PT PPI 2023 Annual Report (Page 300).
17	Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal. Created an Integrity Pact attached to the Board of Directors' Action Proposal, which must obtain recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS/Capital Owners.	✓	Terdapat dalam: Pakta Integritas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap untuk Pelepasan Aset Milik PT PPI yang terletak di Jl. H.M. Yamin No. 3, Kesawan, Medan Contained in: Integrity Pact for Write-Off and Transfer of Fixed Assets for the Disposal of Assets of PT PPI at Jl. H.M. Yamin No. 3, Kesawan, Medan.
18	Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Monitored the implementation of Good Corporate Governance principles at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	✓	Terdapat dalam: - Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 (Halaman 152-156, 238-242, 250 dan 259-261) - Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2023 (Halaman 23) Contained in: - PT PPI 2023 Annual Report (Pages 152-156, 238-242, 250 and 259-261) - PT PPI 2023 Audited Financial Statement (Page 23)
19	Menindaklanjuti seluruh <i>area of improvement</i> yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris. Followed up on all areas of improvement under the authority of the Board of Commissioners.	✓	Terdapat dalam: Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> Contained in: Company GCG Policy Guidelines - Board Manual
20	Melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris (<i>Self Assessment</i>) dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Evaluated the performance achievements of each member of the Board of Commissioners (Self Assessment) and outlined in the minutes of the Board of Commissioners Meeting.	✓	Terdapat dalam: - Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/DK.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 (Kehadiran Rapat Gabungan (Ragab)); - Risalah Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dan Direksi. Contained in: - Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/DK.Eks/PTPPI/V/2024 dated May 27, 2024, concerning the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year and the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year (Attendance at Joint Meetings (Ragab)); - Minutes of Joint Meetings (Ragab) of the Board of Commissioners and Board of Directors.

III Direksi | Board of Directors

1	Mengintruksikan seluruh pejabat wajib lapor LHKPN menyampaikan Laporan LHKPN tepat waktu. Instructed all officials required to report LHKPN to submit LHKPN Reports in a timely manner.	✓	Terdapat dalam: Surat dari Wakil Koordinator LHKPN nomor: 0003/LHKPN/INT/PPI/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Materi Sosialisasi Penyampaian LHKPN Dan Kewajiban Penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023. Contained in: Letter from the Deputy Coordinator of the LHKPN (State Officials' Wealth Report) Number: 0003/LHKPN/INT/PPI/I/2024 dated January 29, 2024, concerning the Socialization Material for LHKPN Submission and the Obligation to Submit LHKPN for the 2023 Reporting Year.
---	---	---	--

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

- 2 Menerapkan penegakan aturan sanksi bagi pejabat yang ditetapkan wajib lapor LHKPN tetapi tidak menyampaikan Laporan LHKPN. | Implemented enforcement of sanctions for officials who are required to report LHKPN but do otherwise.



Terdapat dalam:

Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 28/DU/SKD/POB/PPI/VIII/20219 Tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Contained in:

Board of Directors Decree Number: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 concerning the First Amendment to Board of Directors Decree of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 28/DU/SKD/POB/PPI/VIII/20219 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

- 3 Memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). | Updated the Good Corporate Governance Code (GCG Code) and Code of Conduct.



Terdapat dalam:

1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - *Board Manual* Tahun 2021
2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI Tahun 2018), dengan ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PT PPI setiap tahun.

Contained in:

1. Company GCG Policy Guidelines - Board Manual 2021
2. Business Ethics and Code of Conduct Guidelines (PT PPI Code of Conduct 2018), with the signing of the Integrity Pact by all PT PPI employees every year.

- 4 Menunjuk seorang anggota Direksi dan ditetapkan dalam SK Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang memuat uraian tugas penanggungjawab tersebut dan dituangkan dalam notulen rapat. | Appointed a member of the Board of Directors and stipulated in the Decree of the President Director as the person responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance, which contains a description of the duties of the party responsible and is outlined in the minutes of the meeting.



Terdapat dalam:

Keputusan Direksi Nomor: 86/DU/SKD/PPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Tim Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Contained in:

Board of Directors Decree Number: 86/DU/SKD/PPI/XI/2024 dated November 6, 2024, concerning the 2023 Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

- 5 Membuat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun. | Prepared a report on the implementation of Good Corporate Governance which is submitted to the GMS/Capital Owners and the Board of Commissioners at least once a year.



Terdapat dalam:

Laporan Penerapan Self Assessment GCG PT PPI Tahun Buku 2023, yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Contained in:

PT PPI GCG Self Assessment Implementation Report for the 2023 Fiscal Year, signed by the Board of Directors and Board of Commissioners.

- 6 Membuat rencana kerja pengendalian gratifikasi. | Developed a work plan for controlling gratuity.



Terdapat dalam:

Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI) Bab *Conflict of Interest*.

Contained in:

Business Ethics and Code of Conduct Guidelines (PT PPI Code of Conduct) Conflict of Interest Chapter.

- 7 Laporan pengendalian gratifikasi agar dituangkan dalam Laporan Triwulanan Perusahaan. | The gratuity control report shall be included in the Company's Quarterly Report.



Draft Peraturan Direksi dalam proses reviu dengan divisi terkait, untuk dapat diterbitkan yang kemudian akan dituangkan laporannya dalam Laporan Triwulanan Perusahaan. | The Draft of the Board of Directors Regulation is in the process of being reviewed with the relevant divisions, to be published, which will be reported in the Company's Quarterly Report.

- 8 Menganggarkan secara terpisah rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi dan untuk karyawan dalam RKAP. | Separately budgeted the work plan and budget for training activities for members of the Board of Directors and for employees in the RKAP.



-

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

9	Melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Conducted training according to the established plan.	✓	-
10	Memperbaharui Struktur Organisasi Perusahaan dengan menambahkan uraian pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dan bidang di bawahnya. Updated the Company's Organizational Structure by providing a description of the division of duties and responsibilities of the Board of Directors and the fields below it.	✓	Draft Peraturan Direksi terbaru terkait Tugas Pokok dan Fungsi Divisi masih dalam proses reviu dengan divisi-divisi untuk kemudian dapat diterbitkan setelahnya. The latest draft of the Board of Directors Regulation regarding the Main Duties and Functions of the Division is still being reviewed with the divisions, allowing it to be issued afterwards.
11	Segara menindaklanjuti hasil temuan SPI terkait pelanggaran SOP dan menginstruksikan bidang/divisi terkait untuk selalu melaksanakan SOP secara konsisten. Immediately followed up on SPI findings related to SOP violations and instructed related fields/divisions to consistently implement SOPs.	✓	Terdapat dalam: Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Internal Audit Charter. Contained in: Board of Directors Decree Number: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 dated December 29, 2023, concerning the Internal Audit Charter.
12	Menginstruksikan kepada Divisi IT untuk memprogram pengukuran kinerja unit kerja agar dapat menggunakan aplikasi komputer. Instructed the IT Division to program work unit performance measurement to use computer applications.	✓	Terdapat dalam: Aplikasi MySiska, yaitu aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, dimana sudah memasukkan pengukuran kinerja unit kerja maupun pegawai ke dalam aplikasi tersebut. Available in: MySiska Application, a Personnel Information System application, includes performance measurements of work units and employees in the application.
13	Menginstruksikan kepada Divisi IT untuk menyusun laporan tersendiri terkait pelaksanaan IT. Instructed the IT Division to prepare a separate report regarding IT implementation.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi Nomor: 33/PERDIR/PPI/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Contained in: Board of Directors Regulation Number: 33/PERDIR/PPI/XI/2024 dated November 11, 2024, concerning the General Policy for Information Technology Governance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
14	Menetapkan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan Mutu dan Kebijakan kompensasi apabila mutu tidak terpenuhi. Established Minimum Service Standards Policy, Quality Policy and Compensation Policy if quality is unsatisfied.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi No: 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 tentang Pedoman Mutu di Divisi Manajemen Risiko Contained in: Board of Directors Regulation No. 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 concerning Quality Guidelines in the Risk Management Division
15	Memutakhirkan pedoman pengadaan barang dan jasa bukan barang dagangan. Updated the procurement guidelines for non-trade goods and services.	✓	Terdapat dalam: 1. Peraturan Direksi Nomor 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan PT PPI; 2. Peraturan Direksi Nomor 23/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT PPI. Contained in: 1. The Board of Directors Regulation Number: 10/PERDIR/PPI/IV/2024 concerning Guidelines for Procurement of PT PPI's Merchandise; 2. The Board of Directors Regulation Number: 23/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for the Procurement of Non-Trade Goods and Services of PT PPI.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

16	Menetapkan Kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Established regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and joint ventures, including: appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors, determining performance targets and performance assessments, and incentives for the Board of Commissioners and Board of Directors.	✓	Terdapat dalam: - Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - Subsidiary Governance - 2022; - Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI; - Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; - Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Contained in: - Level I Policy Book - Business Group Governance Guidelines - Subsidiary Governance - 2022; - Deed of PT PPI Number 33 of 2008 (Dated August 29, 2008) concerning the Articles of Association of PT PPI; - Deed of PT PPI Number 2 of 2022 (Dated January 7, 2022) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI; - Deed of PT PPI Number 12 of 2024 (Dated March 21, 2024) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI.
17	Memutakhirkan Kebijakan Akuntansi. Updated Accounting Policies.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi Nomor 26/PERDIR/PPI/XII/2023 Tentang Pedoman Akutansi untuk Penetapan Nilai Residu Aset Tetap. Contained in: Board of Directors Regulation Number 26/PERDIR/PPI/XII/2023 concerning Accounting Guidelines for Determining Residual Value of Fixed Assets.
18	Menginstruksikan SPI untuk melakukan evaluasi/ penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat entitas. Instructed SPI to conduct an evaluation/ assessment of the effectiveness of entity-level internal control.	✓	Terdapat dalam: Keputusan Direksi No: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Contained in: Board of Directors Decree No. 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 concerning the General Guidelines for the Internal Control System of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
19	Menerbitkan internal control report. Issued internal control reports.	✓	Terdapat dalam: - Surat Dewan Komisaris Nomor: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. - Surat Dewan Komisaris Nomor: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. - Surat Dewan Komisaris Nomor: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal: Untuk Menjadi Perhatian Kinerja Direksi PT PPI. - Surat Dewan Komisaris Nomor: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Triwulan I tahun 2023. - Surat Tanggapan Dekom Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tentang Laporan Manajemen Tahun 2023. Contained in: - Letter of the Board of Commissioners Number: 05/Dk.Eks/PTPPI/V/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of the 2022 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. - Letter of the Board of Commissioners Number: 13/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Management Report of Semester 1 of the 2023 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. - Letter of the Board of Commissioners Number: 11/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning: For the Attention of the Performance of the Board of Directors of PT PPI. - Letter of the Board of Commissioners Number: 16/Dk.Int/PTPPI/IV/2023 concerning the Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in the First Quarter of 2023. - Response Letter of the Board of Commissioners Number 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Management Report of 2023.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

20	Menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal. Followed up on SPI and external audit recommendations/findings.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi No: 12/DU/PERDIR/PPI/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penerbitan POB Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit dan Pemberian Jasa Consulting Auditor Satuan Pengawas Intern PT PPI dengan nomor dokumen: 2/POB/PPI/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Contained in: Board of Directors Regulation No. 12/DU/PERDIR/PPI/VII/2022 dated July 1, 2022, concerning the Issuance of the SOP for Monitoring Follow-Up on Audit Findings and the Provision of Auditor Consulting Services for the Internal Audit Unit of PT PPI, document number 2/POB/PPI/VII/2022, dated July 1, 2022, concerning the Standard Operating Procedure (SOP) for Monitoring Follow-Up on Audit Findings.
21	Menginstruksikan Divisi Rantai Pasok untuk Menyusun laporan pelaksanaan survey kepuasan pemasok. Instructed the Supply Chain Division to prepare a report on the implementation of the supplier satisfaction survey.	✓	Sudah dilakukan proses mencari, memilih dan menilai pemasok untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan non pangan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh Divisi Komersial The process of searching, selecting and evaluating suppliers has been carried out to meet the needs of non-food merchandise according to the specifications required by the Commercial Division.
22	Menetapkan metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan. Established assessment methods to measure employee satisfaction.	✓	Sudah dilaksanakan survey kepuasan karyawan di tahun 2024 An employee satisfaction survey was conducted in 2024
23	Memenuhi aspirasi pemegang saham dengan konsisten terhadap pertumbuhan modal bersih perusahaan, pembagian dividen dan realisasi capaian KPI sesuai target. Fulfilled shareholder aspirations by consistently achieving the Company's net capital growth, dividend distribution, and KPI achievement according to target.	✓	Terdapat dalam: Akta Anggaran Dasar PT PPI : 1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2028) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Contained in: Deed of Articles of Association of PT PPI: 1. Deed of PT PPI Number 33 of 2008 (Dated August 29, 2028) concerning the Articles of Association of PT PPI; 2. Deed of PT PPI Number 2 of 2022 (Dated January 7, 2022) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI; 3. Deed of PT PPI Number 12 of 2024 (Dated March 21, 2024) concerning Amendments to the Articles of Association of PT PPI.
24	Menandatangani Pakta Integritas atas usulan tindakan Direksi yang perlu persetujuan Dewan Komisaris/ Pemegang Saham. Signed the Integrity Pact on proposed actions by the Board of Directors that require approval from the Board of Commissioners/ Shareholders.	✓	Terdapat dalam: Pakta Integritas Direksi : 1. Surat Pernyataan/Pakta Integritas S Hernowo 2. Surat Pernyataan/ Pakta Integritas Direksi 2023 (Wien Irwanto dan Tri Wahyundo Hariyatno) 3. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Edhy Rizwan 4. Surat Pernyataan/Pakta Integritas - Noverita Anggraeny 5. Surat Pernyataan/Pakta Integritas - Nina Sulistyawati 6. Surat Pernyataan/Pakta Integritas - Andry Tanudjaja Contained in: Board of Directors Integrity Pact: 1. Statement Letter/Integrity Pact of S Hernowo 2. Statement Letter/Integrity Pact of the Board of Directors 2023 (Wien Irwanto and Tri Wahyundo Hariyatno) 3. Statement Letter/Integrity Pact of Edhy Rizwan 4. Statement Letter/Integrity Pact - Noverita Anggraeny 5. Statement Letter/Integrity Pact - Nina Sulistyawati 6. Statement Letter/Integrity Pact - Andry Tanudjaja

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

25 Menyampaikan Laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Submitted Quarterly and Annual Reports to the Board of Commissioners prior to submission to Shareholders.	✓	Terdapat dalam: 1. Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2023 2. Buku Laporan Manajemen Triwulan I PT PPI Tahun 2023 3. Buku Laporan Manajemen Semester I PT PPI Tahun 2023 4. Buku Laporan Manajemen Triwulan III PT PPI Tahun 2023 5. Buku Laporan Manajemen Audited PT PPI Tahun 2023 6. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> 7. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI) Contained in: 1. 2023 Audited Financial Statement of PT PPI 2. 2023 Management Report Book for the First Quarter of PT PPI 3. 2023 Management Report Book for Semester I of PT PPI 4. 2023 Management Report Book for the Third Quarter of PT PPI 5. 2023 Audited Management Report Book of PT PPI 6. Company GCG Policy Guidelines - Board Manual 7. Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct (Code of Conduct of PT PPI)
26 Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk melakukan penilaian/ <i>reviu (assessment)</i> internal secara berkala untuk menilai: 1. Kepatuhan terhadap charter audit internal; 2. Kepatuhan terhadap standar; 3. Kepatuhan terhadap kode etik; 4. Efisiensi dan efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders; 5. Assessment yang dilakukan oleh asesor independent sekurang kurangnya sekali dalam 5 tahun; 6. Tindak lanjut atas hasil <i>reviu</i>. Instructed the Head of SPI to conduct periodic internal assessments/reviews to assess: 1. Compliance with the internal audit charter; 2. Compliance with standards; 3. Compliance with the code of conduct; 4. Efficiency and effectiveness of the Internal Audit Function in meeting the needs of various stakeholders; 5. Assessments conducted by independent assessors at least once every 5 years; 6. Follow-up on review results.	✓	Terdapat dalam: 1. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - Subsidiary Governance - 2022, dibahas pada: a) Bab II - Tata Kelola Kelompok Usaha - d. Manajemen Risiko, halaman 24-26; b) Bab II- Tata Kelola Kelompok Usaha - e. Audit Internal, halaman 26-27. 2. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Persero, dibahas pada Bab II Visi, Misi, Fungsi dan Bab III Struktur dan Kedudukan dalam Perusahaan, halaman 1-2. 3. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023), dibahas pada : a) Bab I Pendahuluan, Fungsi Satuan Pengawasan Intern halaman 6; b) Bab II Struktur dan Kedudukan, Kedudukan Dalam Organisasi halaman 9. 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI), Prinsip 1.1.3 dibahas di Bab II Prinsip-Prinsip GCG. Contained in: 1. Level I Policy Book - Business Group Governance Guidelines - Subsidiary Governance - 2022, discussed in: a) Chapter II - Business Group Governance - d. Risk Management, pages 24-26; b) Chapter II- Business Group Governance - e. Internal Audit, pages 26-27. 2. Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 concerning the Internal Audit Charter of PT PPI (Persero, discussed in Chapter II Vision, Mission, Functions and Chapter III Structure and Position in the Company, pages 1-2. 3. Decree of the Board of Directors Number: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 concerning the Internal Audit Charter of PT PPI (IAC Ratification on December 29, 2023), discussed in: a) Chapter I Introduction, Function of the Internal Audit Unit page 6; b) Chapter II Structure and Position, Position in the Organization page 9. 4. Business Ethics and Code of Conduct Guidelines (Code of Conduct of PT PPI), Principle 1.1.3 is discussed in Chapter II GCG Principles.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

27 Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>) dan menyampaikan rencana PKPT kepada Dewan Komisaris c.q Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran. Instructed the Head of SPI to prepare an Annual Supervisory Work Program with a risk-based auditing approach and submit the PKPT plan to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee to obtain consideration and advices.	✓	Terdapat dalam: 1. Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PPI Tahun 2025 2. Surat kepada Komite Audit Nomor 0019/SPI/EKS/PPI/XII/2024 tentang Permohonan Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PPI Tahun 2025. Contained in: 1. Report on the Annual Supervisory Work Program of the Internal Supervisory Unit (SPI) of PT PPI for 2025 2. Letter to the Audit Committee Number 0019/SPI/EKS/PPI/XII/2024 concerning the Request for Approval of the Annual Supervisory Work Program (PKPT) of the Internal Audit Unit (SPI) of PT PPI for 2025.
28 Memutakhirkan/memperbaharui pedoman penyusunan RJPP. Updated/revised the RJPP preparation guidelines.	✓	Terdapat dalam: Keputusan Direksi Nomor 14/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Penyusunan RJPP, RKAP dan KPI PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Contained in: Board of Directors Decree Number 14/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for the Preparation of RJPP, RKAP and KPI of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
29 Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, rancangan disampaikan 21 Januari 2022 seharusnya paling lambat disampaikan tanggal 15 September 2021 (sebelum RKAP tahun berjalan). Submitted the RKAP draft to the Board of Commissioners in a timely manner, the draft submitted on January 21, 2022, shall be submitted no later than September 15, 2021 (prior to the current year's RKAP).	✓	Terdapat dalam: 1. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 Perihal Pengantar/Penyampaian Buku RKAP PT PPI Tahun 2023; 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan Rencana Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT PPI Tahun 2023; 3. Surat Direktur Utama PT PPI Nomor 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Penyampaian Kembali Buku RKAP Tahun 2023; 4. Surat Direktur Utama Nomor 19/DU/Eks/PPI/I/2023 Perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesahan RKAP 2023 PT PPI. Contained in: 1. Letter of the President Director of PT PPI Number 0291/DU/Eks/PPI/XI/2022 concerning Introduction/Submission of PT PPI's 2023 RKAP Book; 2. Letter of the Board of Commissioners Number 01/Dk.Eks/PTPPI/I/2023 concerning the Board of Commissioners' Response to the RKAP and Budget Plan for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) of PT PPI for 2023; 3. Letter of the President Director of PT PPI Number 0017/DU/Eks/PPI/I/2023 concerning Resubmission of the 2023 RKAP Book; 4. Letter of the President Director Number 19/DU/Eks/PPI/I/2023 concerning Request for Approval and Ratification of PT PPI's 2023 RKAP.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024
Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year
Status
Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

30	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham secara tepat waktu paling lambat disampaikan tanggal 31 Oktober sebelum tahun berjalan. Submitted the RKAP draft to Shareholders in a timely manner, no later than October 31 prior to the current year.	✓	Terdapat dalam: Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023. Contained in: Letter of the Board of Commissioners to Shareholders (Minister of SOEs and President Director of PT RNI (Persero)) Number: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 concerning the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of PT PPI for the 2023 Fiscal Year.
31	Menetapkan mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. Established a mechanism for the Board of Directors to respond to business opportunity proposals from management under the Board of Directors/ Board of Directors members/Board of Commissioners/ Supervisory Board.	✓	-
32	Menetapkan mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan. Established a mechanism for the Board of Directors to promptly discuss current issues on changes in the business environment and issues that significantly impact the Company's business and performance.	✓	Terdapat dalam: Risalah Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dan Direksi. Contained in: Minutes of Joint Meeting (Ragab) of the Board of Commissioners and Board of Directors.
33	Memberikan alasan ketidakhadiran jika tidak hadir rapat serta menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk menuangkan dalam risalah rapat. Provided reasons for absence if unable to attend the meeting and instructed the Corporate Secretary to record it in the meeting minutes.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi No: 14/PERDIR/PPI/V/2024 tentang Manual Book Sekretariat Perusahaan PT PPI Contained in: Board of Directors Regulation No. 14/PERDIR/PPI/V/2024 concerning the PT PPI Corporate Secretary Manual Book.
34	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. Evaluated the implementation of resolutions resulting from the previous meeting.	✓	Terdapat dalam: Surat Dewan Komisaris Nomor: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 perihal Penilaian Direksi Eksisting PT PPI Semester 1 Tahun 2023 + Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Direksi PT PPI. Contained in: Board of Commissioners Letter Number: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 concerning Assessment of Existing Board of Directors of PT PPI Semester 1 of 2023 + Recapitulation of the Evaluation of the Board of Directors of PT PPI.
35	Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya dan menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk mencantumkan dalam Risalah Rapat. Followed up on the results of the previous meeting and instructed the Corporate Secretary to record them in the Minutes of the Meeting.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi No: 14/PERDIR/PPI/V/2024 tentang Manual Book Sekretariat Perusahaan PT PPI Contained in: Board of Directors Regulation No. 14/PERDIR/PPI/V/2024 concerning the PT PPI Corporate Secretary Manual Book.

Tindak Lanjut per 31 Desember 2024 | Follow-up as of December 31, 2024

No. Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 | Assessment Recommendations of GCG Implementation for the 2022 Fiscal Year

Status

Bentuk Tindak Lanjut | Follow-up Form

36	Laporan Tahunan memuat tanda tangan Dewan Komisaris dan Direksi pada lembaran tersendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap Laporan Tahunan Tahun 2022. The Annual Report contains the signatures of the Board of Commissioners and Board of Directors on a separate sheet as a form of management accountability for the 2022 Annual Report.	✓	Terdapat dalam: Peraturan Direksi No: 14/PERDIR/PPI/V/2024 tentang Manual Book Sekretariat Perusahaan PT PPI Contained in: Board of Directors Regulation No. 14/PERDIR/PPI/V/2024 concerning the PT PPI Corporate Secretary Manual Book.
37	Laporan tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mencantumkan penjelasan mengenai penawaran umum yang memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (S) perubahan penggunaan dana (jika ada). The Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia contains an explanation regarding the public offering which consists of a description of: (1) total funds obtained; (2) planned use of funds; (3) details of use of funds; (4) balance; (S) changes in use of funds (if any).	✗	Karena PT PPI bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo, dan perubahan dana, tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sepanjang tahun 2023 (berdasarkan Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023). As PT PPI is not a public company and has not conducted a public offering, there is no information regarding the total funds obtained, planned use of funds, details of the use of funds, balances, and changes in funds, or the date of approval of the GMS for the realization of the utilization of proceeds from the public offering throughout 2023 (based on PT PPI's 2023 Annual Report).
38	Memuat informasi tentang Komite nominasi dan remunerasi dalam Laporan Tahunan yang mencakup antara lain: 1) Uraian tugas dan tanggung jawab; 2) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi. Contains information about the nomination and remuneration committee in the Annual Report, which includes among others: 1) Description of duties and responsibilities; 2) Description of the implementation of the nomination and remuneration committee activities.	✓	Terdapat dalam: Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2023 terkait Tugas dan tanggung jawab, dan pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi. Contained in: PT PPI's 2023 Annual Report on Duties and responsibilities, and implementation of nomination and remuneration committee activities.
39	PT PPI agar ikut serta dan berupaya untuk mendapatkan penghargaan dalam Annual Report Award (ARA). PT PPI to participate and strive to obtain an Annual Report Award (ARA).	✓	PT PPI telah melakukan Submit Data Keikutsertaan ARA 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) PT PPI has Submitted its Participation Data for the 2023 ARA, held by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

✓: telah ditindaklanjuti | has been followed up

✗: belum ditindaklanjuti | has not been followed up

Asesment GCG yang dilakukan pada tahun 2024

PT PPI telah melaksanakan *Self Assessment* dengan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) untuk penerapan GCG pada tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

GCG assessment conducted in 2024

PT PPI has conducted a Self-Assessment using the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method for the implementation of GCG in 2023, with the following results:

TABEL TINGKAT PEMENUHAN TABLE OF FULFILLMENT LEVEL						
TERPENUHI (APPLY) FULFILLED (APPLY)			TERPENUHI (APPLY) FULFILLED (APPLY)			
			JUMLAH REKOMENDASI TOTAL RECOMMENDATIONS		(%) PEMENUHAN FULFILLMENT	
Prinsip 1 Principle 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	30	dari from	30	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 2 Principle 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	11	dari from	11	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 3 Principle 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	5	dari from	5	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 4 Principle 4	Perilaku Etis Ethical Behavior	4	dari from	4	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 5 Principle 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	6	dari from	6	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 6 Principle 6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	7	dari from	7	rekomendasi recommendation	100.00%
Prinsip 7 Principle 7	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	8	dari from	9	rekomendasi recommendation	88.89%
Prinsip 8 Principle 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan Stakeholder Rights	3	dari from	4	rekomendasi recommendation	75.00%
TOTAL		74	dari from	76	Rekomendasi Recommendation	97.37%

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Infrastruktur GCG

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas dalam pengambilan keputusan dan operasi. GCG berfungsi sebagai tulang punggung praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, memfasilitasi kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan.

Salah satu aspek mendasar dari infrastruktur GCG adalah pembentukan struktur dan peran organisasi yang jelas. Hal ini mencakup pendefinisian tanggung jawab dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan utama lainnya, untuk memastikan penggambaran yang jelas mengenai wewenang dan akuntabilitas. Dengan memiliki struktur yang transparan, organisasi dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan dan mendorong pengawasan yang efektif.

Organ-organ utama PPI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ memiliki peranan penting di dalam struktur dan mekanisme GCG serta menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan PPI.

Selain organ utama, PPI juga memiliki sejumlah organ pendukung, di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Manajemen Risiko
2. Organ pendukung Direksi:
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawasan *Intern*

GCG Infrastructure

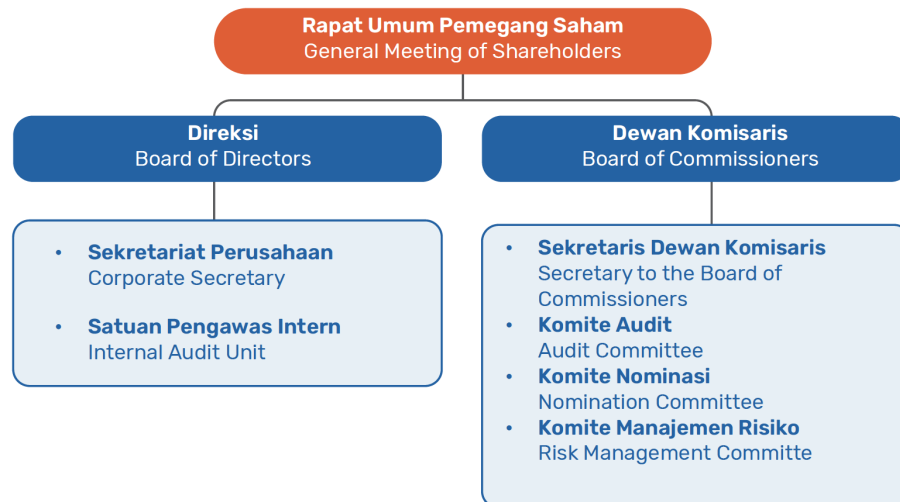
The infrastructure of Good Corporate Governance (GCG) encompasses the frameworks, policies, procedures, and mechanisms put in place within an organization to ensure transparency, accountability, fairness, and integrity in decision-making and operations. It serves as the backbone for ethical and responsible business practices, facilitating trust and confidence among stakeholders.

One fundamental aspect of GCG infrastructure is the establishment of clear organizational structures and roles. This involves defining the responsibilities of the board of directors, management, and other key stakeholders, ensuring a clear delineation of authority and accountability. By having transparent structures, organizations can minimize the risks of conflicts of interest and promote effective oversight.

The main organs of PPI consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Each organ plays a crucial role in the structure and mechanism of GCG and carries out its functions, duties, and responsibilities for the benefit of PPI.

In addition to the main organs, PPI also has several supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Supporting organs of the Board of Commissioners:
 - a. Secretary of the Board of Commissioners
 - b. Audit Committee
 - c. Risk Management Committee
2. Supporting organs of the Board of Directors:
 - a. Corporate Secretary
 - b. Internal Audit Unit



Soft Structure GCG

Sebagai bagian dari upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh lini usaha, PPI telah menyusun dan mengesahkan sejumlah *Governance Soft Structure*, antara lain:

GCG Soft Structure

As part of efforts to consistently implement GCG principles across all business lines, PPI has developed and ratified several Soft Structure Governance, including:

Perangkat Kebijakan Policy Instruments	Pengesahan dan/atau Pembaruan Ratification and/or Amendment
Anggaran Dasar Perseroan Articles of Association of the Company	Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, Mkn Notaris di Jakarta beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 12 dated March 21, 2024, made before Notary Nanda Fauz Iwan, SH, Mkn, Notary in Jakarta, with the approval of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Panduan Perilaku (Code of Conduct) Code of Conduct	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Code of Conduct, Whistleblowing System dan Pedoman GCG. Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policy on Company Information Classification and Management, Policy on Acceptance and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Policy on Whistleblowing System	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 59/DK/PT.PPI/XII/2013 dan Nomor 40/DU/SKD/PPI/XII/2013 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) dan terakhir diperbarui melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Code of Conduct, Whistleblowing System dan Pedoman GCG. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 59/DK/PT.PPI/XII/2013 and Number 40/DU/SKD/PPI/XII/2013 concerning the Whistleblowing System Policy and last revised through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policy on Company Information Classification and Management, Policy on Acceptance and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

Perangkat Kebijakan | Policy Instruments
Pengesahan dan/atau Pembaruan | Ratification and/or Amendment

Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah Policy on Acceptance and Giving of Gifts	Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 24/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia The Board of Directors Regulation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 24/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Kebijakan Anti-Penyuapan Anti-Bribery Policy	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 concerning the Anti-Bribery Policy of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Guidelines for Gratuity Control	Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 24/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia The Board of Directors Regulation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 24/PERDIR/PPI/VII/2024 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
<i>Board Manual</i>	Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang <i>Board Manual</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 concerning the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi PPI, yang mempunyai hak dan wewenang melebihi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Dasar PPI. Penyelenggaraan RUPS setiap tahunnya, berfungsi sebagai *platform* akuntabilitas kepada pemegang saham.

Pada dasarnya RUPS merupakan wadah formal bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan atas kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, dan memperoleh informasi mengenai kinerja PPI.

Terdapat dua jenis RUPS yang diselenggarakan Perseroan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

1. Rapat Umum Tahunan (RUPST)

Diselenggarakan setahun sekali sesuai amanat undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPST terutama fokus pada pembahasan dan persetujuan laporan keuangan tahunan, pemilihan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, penetapan pembayaran dividen, dan penyelesaian hal-hal lain yang berkaitan dengan tata kelola dan kinerja perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the supreme body of PPI, endowed with rights and authorities beyond those granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified by laws, regulations, and PPI's Articles of Association. The GMS organizes annually, serving as a platform for accountability to shareholders.

Fundamentally, the GMS acts as a formal avenue for shareholders to exercise their rights, express opinions, make decisions on strategic policies pertaining to the Company's management, and acquire information regarding PPI's performance.

There are two types of GMS held by the Company, namely Annual GMS and other GMS or Extraordinary GMS.

1. Annual General Meeting (AGM)

Held once a year as mandated by law or the Company's Articles of Association. The AGMS is primarily focused on discussing and approving annual financial statements, electing members of the Board of Directors or Board of Commissioners, determining dividend payments, and addressing other matters related to corporate governance and performance.

2. Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB diselenggarakan setiap waktu selain RUPST untuk menangani hal-hal yang mendesak atau luar biasa yang tidak dapat ditunda hingga RUPST berikutnya. Hal-hal tersebut dapat mencakup perubahan signifikan terhadap struktur permodalan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, merger atau akuisisi, atau keputusan penting lainnya yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki saham suatu perusahaan. Per 31 Desember 2024, kepemilikan saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna/sebesar 0,0001% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar 99,99%. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (RoS) yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Hak-Hak Pemegang Saham

Berikut ini adalah hak-hak pemegang saham yang harus dan wajib dilindungi oleh PPI, antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
2. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;
5. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perusahaan dilikuidasi;
6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);
7. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perusahaan; dan
8. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

2. Extraordinary General Meeting (EGM)

EGMS is held at any time other than the AGMS to address urgent or extraordinary matters that cannot wait until the next AGMS. These matters may include significant changes to the company's capital structure, amendments to the Articles of Association, mergers or acquisitions, or other critical decisions requiring shareholder approval.

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of a company. As of December 31, 2024, the Company's shares are owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs, with 1 Share of Series A Dwiwarna representing 0.0001% and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) holding 99.99%. The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (RoS) which is managed by the Corporate Secretary.

Shareholder Rights

The following are the rights of shareholders that must be protected by PPI, including:

1. Attending the GMS and voting in accordance with the classification and number of shares owned;
2. Receiving distribution of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares owned;
3. Obtaining material information about the Company in a timely and regular manner;
4. Granting power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them in the GMS;
5. Receiving proportionally the remainder of the liquidation calculation if the Company is liquidated;
6. Filing a lawsuit to the District Court against a member of the Board of Directors whose mistake or negligence has caused a loss to the Company (Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights);
7. Viewing the Register of Shareholders and the Special Register during the Company's office hours; and
8. Holding a GMS in the event that the Board of Directors fails to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan pemilik akhir adalah Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun tidak memiliki struktur kepemilikan saham hingga pemilik individu, PPI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pemegang saham sebagai bentuk kesadaran penuh atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Kewenangan RUPS

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun yang menjadi area kewenangan RUPS, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan RUPS tahun 2024

Pada tahun 2024 Perseroan menyelenggarakan satu kali RUPS pada tanggal 30 Januari 2024.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024

Equal Treatment for Shareholders

The Company's shareholders are PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), with the ultimate owner of the Government of the Republic of Indonesia. Although it does not have a share ownership structure to individual owners, PPI still upholds the principles of equality and fairness for shareholders as a form of full awareness of the implementation of GCG principles.

GMS Authority

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the GMS is a Company Organ that has authority that cannot be given to either Board of Commissioners or Board of Directors.

The areas of authority of the GMS include:

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Providing decisions needed to protect the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
3. Giving approval to the Annual Report including ratifying the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
4. Making decisions through an open, fair and accountable process; and
5. Implementing Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Implementation of the 2024 GMS

In 2024, the Company held one GMS on January 30, 2024.

- General Meeting of Shareholders (GMS) on January 30, 2024 on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2024

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 30 Januari 2024 Tuesday, January 30, 2024
Waktu Time	:	Pk 14.36 WIB At 14.36 WIB
Tempat Venue	:	Waskita Rajawali Tower, Jakarta Selatan, Indonesia
Kehadiran Attendance	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham: PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as Shareholder: - Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama President Director - Nina Sulityowati, Direktur Komersial Director of Commercial
	:	Dewan Komisaris Board of Commissioners: - Hamli, Komisaris Utama President Commissioner - Setiawan Wangsaatmaja, Komisaris Commissioner
	:	Direksi: Board of Directors - Soegeng Hernowo, Direktur Utama President Director - Wien Irwanto, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum Director of Finance, Risk Management, HC, and General Affairs. - Edhy Rizwan, Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development - Noverita Anggraeny, Direktur Operasi Director of Operations

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 16 tanggal 30 Januari 2024.

The results of the GMS Resolution have been outlined in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders for the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2024 of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 16 dated January 30, 2024.

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The results of the GMS resolutions, with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2024, are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat | Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-up on Meeting Resolution Results

Agenda 1:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 | Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), as well as the 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA)

Keputusan Agenda 1: | Agenda 1 Resolution:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024. | Ratified the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), as well as the 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: | Follow-up on Resolutions:

Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. RKAP 2024 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. | The results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The ratified 2024 RKAP serves as a work guideline for the company's management by the Board of Directors and as a means of monitoring and overseeing for the Board of Commissioners.

Agenda 2:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024 | Ratification of the 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL)

Keputusan Agenda 2: | Agenda 2 Resolution:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Perseroan Tahun 2024. | Ratified the 2024 Company Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: | Follow-up on Resolutions:

Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. RKA-TJSL 2024 menjadi pedoman kerja program TJSL Perseroan di sepanjang tahun 2024. | The results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The 2024 RKA-TJSL serves as a guideline for the Company's TJSL program throughout 2024.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat | Meeting Agenda, Resolutions, and Follow-up on Meeting Resolution Results

Agenda 3:

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2024. | Determination of the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) Target of the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2024.

Keputusan Agenda 3: | Agenda 3 Resolution:

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rapat ini. | Determined an Annual Management Contract containing the Key Performance Indicators (KPI) Target of the Board of Directors collegially and the Board of Commissioners for 2024 between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders, which serves as an integral part of this Meeting Resolution.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: | Follow-up on Resolutions:

Hasil keputusan ini telah dilembagakan dalam Akta Berita Acara RUPS. Direksi telah menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan KPI yang telah ditentukan. | The results of this resolution have been institutionalized in the GMS Deed of Minutes. The Board of Directors has carried out the management of the Company in accordance with the pre-determined KPIs.

Pelaksanaan RUPS tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yakni pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 26 Juni 2023, yang keduanya dilaksanakan secara *hybrid*.

Kedua RUPS tersebut dihadiri oleh para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi PPI, dan telah memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

Keputusan dan hasil RUPS 2023 diuraikan sebagai berikut:

Implementation of the 2023 GMS

In 2023, the Company held two General Meetings of Shareholders (GMS), on January 30 and June 26, both of which were hybrids.

Both GMS were attended by shareholders, members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors of PPI, and have fulfilled the quorum to make binding decisions.

The resolutions and results of the 2023 GMS are outlined as follows:

Tanggal dan Tempat Date and Venue		Agenda	Status Pelaksanaan Implementation Status
RUPS Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 GMS Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL)			
Jakarta, 30 Januari 2023 Jakarta, Januari 30, 2023		Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2023. Approval and Ratification of the 2023 Work Plan and Budget and 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program	Sesuai Complied
		Persetujuan dan penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi tahun 2023. Approval and determination of the 2023 Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI).	Sesuai Complied
		Persetujuan dan penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris tahun 2023. Approval and determination of the 2023 Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI).	Sesuai Complied
		Persetujuan dan penetapan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023. Approval and determination of the 2023 Operational Aspect Indicators.	Sesuai Complied
RUPS Tahunan Annual GMS			
Jakarta, 26 Juni 2023 Jakarta, June 26, 2023		Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022. Approval of the Annual Report of the Company for the 2022 Fiscal Year, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility and Environmental Responsibility Program, as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.	Sesuai Complied

Tanggal dan Tempat Date and Venue	Agenda	Status Pelaksanaan Implementation Status
	Pengesahan Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Approval of the Micro and Small Business Financing (PUMK) Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.	Sesuai Complied
	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 Determination of the Appropriation of the Company's Consolidated Net Income for the 2022 Fiscal Year	Sesuai Complied
	Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022. Determination of Salaries/Honorarium along with facilities and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year, as well as Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2022 Fiscal Year.	Sesuai Complied
	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. Appointment of Public Accountants Office to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year.	Sesuai Complied
	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI: 1. No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Pogram Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 2. No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. 3. No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Confirmation of the implementation of the Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises: 1. Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises 2. Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. 3. Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.	Sesuai Complied

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memastikan penerapan GCG PPI telah berjalan efektif dan berkelanjutan pada setiap tingkatan organisasi.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris PPI dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. *Level Performance*: Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta menyampaikan masukan/rekomendasi kepada RUPS.

The Board of Commissioners is the principal organ of the company collectively responsible for overseeing the general and/or specific management functions of the company in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations. Additionally, the Board of Commissioners also advises or recommends to the Board of Directors regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, and ensures that the implementation of GCG at PPI has been effective and sustainable at every level of the organization.

The supervisory function of the PPI Board of Commissioners is carried out in two (2) levels, namely:

1. *Performance Level*: The Board of Commissioners provides guidance and instructions to the Board of Directors and conveys input/recommendations to the General Meeting of Shareholders (GMS).

2. *Level Conformance*: Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat yang diberikan telah dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan telah dipatuhi dengan baik.

Dasar Hukum

Keberadaan dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait pemisahan tugas dan wewenang secara jelas, maka Dewan Komisaris senantiasa menjadikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Secara umum, isi pokok *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan

2. *Conformance Level*: The Board of Commissioners conducts advanced supervisory activities to ensure that the advice given has been implemented and that the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been properly complied with.

Legal Basis

The existence and procedures for the appointment or dismissal of PPI Board of Commissioners refer to several applicable regulations, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. PPI's Articles of Association;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

Board of Commissioners' Manual

To uphold the principles of GCG, especially regarding clear separation of duties and authorities, the Board of Commissioners consistently refers to the Manual of the Board of Commissioners in carrying out its duties. The Manual of the Board of Commissioners is regulated in the Board Manual established based on Board of Directors Decree No. 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Policies on Receipt and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In general, the content of the Board Manual as guidelines and rules of the Board of Commissioners' work regulates the following:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Requirements for the Board of Commissioners
3. Composition and Membership
4. Term of Office

5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Komisaris Independen
7. Etika Jabatan Dewan Komisaris
8. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
9. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

5. Introduction and Capability Enhancement Program
6. Independent Commissioners
7. Board of Commissioners' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
9. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners' Meetings
11. Board of Commissioners' Performance Evaluation
12. Supporting Organs of the Board of Commissioners
13. Board of Commissioners' Accountability.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

Di tahun 2024 terdapat perubahan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris. Berikut disampaikan kronologi perubahan susunan Dewan Komisaris, dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024.

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office for members of the Board of Commissioners is five (5) years from the date set by the General Meeting of Shareholders (GMS) that appoints them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after their appointment date, but this provision does not diminish the GMS's right to dismiss Board of Commissioners members at any time before their term ends.

For members of the Board of Commissioners whose terms have ended, they may be reappointed by the GMS for one (1) subsequent term.

In 2024, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. The following is a chronology of changes in the composition of the Board of Commissioners, and the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2024 | Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners Throughout 2024

Periode 1 Januari s.d. 18 Oktober 2024 January 1 to October 18, 2024 Period	Periode 18 Oktober s.d. 31 Desember 2024 October 18 to December 31, 2024 Period	Keterangan Description
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	-
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	-
	Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 dan No. 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Appointed as Independent Commissioner pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. SK-228/MBU/10/2024 and No. 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dapat disampaikan sebagai berikut.

Thus, the composition of the Board of Commissioners is presented as follows.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Hamli	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	2 April 2020 s.d. 2 April 2025. April 2, 2020 to April 2, 2025.	Ke-1. First.
Komisaris Commissioner	Setiawan Wangsaatmaja	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises with number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	2 Desember 2021 s.d. 2 Desember 2026. December 2, 2021 to December 2, 2026.	Ke-1. First.
Komisaris Independen Independent Commissioner	Gigih Guntoro	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: SK-228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Oktober 2024 s.d. 18 Oktober 2029. October 18, 2024 to October 18, 2029.	Ke-1 First

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each member of the Board of Commissioners is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal, antara lain:

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

As stated in the Board Manual of the Board of Commissioners, the following is a description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners collegially, including:

Tugas | Duties

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. | Supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.
2. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. | Complying with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
3. Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perusahaan. | Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably in the Company.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan. | Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, policies.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. | Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HC management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation of these policies.
6. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya. | Supervising the policies on the management of subsidiaries/joint ventures that have been determined by the Board of Directors, including providing input on these policies and their implementation.
7. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS. | Conducting an assessment by providing written responses related to the appointment process of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/ Joint Ventures to be further submitted to the GMS.
8. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. | Ensuring that the Board of Directors has disclosed important company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
9. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab | Responsibilities

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan. | Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi. | Researching and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP. | Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan. | Keeping abreast of the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. | Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta. | Researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report including providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested.
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). | Preparing the annual work plan and budget for the Board of Commissioners and including it in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
8. Membentuk Komite Audit. | Establishing an Audit Committee.
9. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut; | Proposing the determination of the External Auditor to the GMS based on the proposal from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the proposed amount of honorarium/ remuneration for the External Auditor;
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; | Making the minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping a copy thereof;
11. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada PPI maupun perusahaan lain; | Making a Special Register which contains information regarding the share ownership of Members of the Board of Commissioners and their families in PPI and other companies;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; | Providing a report on the supervisory duties that have been carried out during the previous fiscal year to the GMS;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. | Carrying out other obligations to carry out the function of supervision and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka telah disepakati pembagian kerja internal anggota Dewan Komisaris sebagai berikut.

Division of Scope of Duties Between the Board of Commissioners

To ensure the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners, the internal division of work for members of the Board of Commissioners has been agreed upon as follows.

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Lingkup Tugas Scope of Duties	
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)		Koordinator atas seluruh bidang pengawasan. Coordinator for all areas of supervision.	
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)		Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Committee	
Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)		Koordinator Bidang Teknik, Umum dan Pengembangan dan Anggota Pengawasan 3 (tiga) bidang lainnya, serta Ketua Komite Audit. Coordinator for Engineering, General Affairs and Development and Supervisory Members for 3 (three) other fields, as well as Chairman of the Audit Committee.	

Hak dan Kewenangan

Secara garis besar, Dewan Komisaris PPI memiliki hak dan wewenang untuk:

- Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan, melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan.
- Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perseroan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- Menetapkan pembagian kerja dan keanggotaan komite di antara para Anggota Dewan Komisaris dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan komite-komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- Dewan Komisaris melalui keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perusahaan.

Rights and Authorities

In general terms, the PPI Board of Commissioners has the rights and authority to:

- Enter the premises, buildings, and offices used by the Company, inspect books, documents, and other papers, examine cash for verification purposes, and other valuable securities, as well as inspect the Company's assets.
- If deemed necessary, the Board of Commissioners may, at the Company's expense and for a limited period, seek assistance from experts to conduct examinations in accordance with their duties and authorities.
- Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to the management of the Company.
- Determine the division of duties and committee membership among the Members of the Board of Commissioners, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners, may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and committees appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.
- The Board of Commissioners, through decisions made in accordance with the procedures for decision-making by the Board of Commissioners, has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if they act contrary to the Company's Articles of Association, or if there are indications of causing losses to the Company, or neglecting their duties, or if there are urgent reasons for the Company.
- If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have any Board of Directors, then temporarily the Board of Commissioners is obliged to manage the Company. In such cases, the

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan dan kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar PPI.

Kriteria Dewan Komisaris PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PPI; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris PPI mengacu pada Pasal 14 Anggaran Dasar PPI ayat 14 hingga ayat 20.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham

Board of Commissioners has the right to temporarily delegate authority to one or more of its members, at the expense of the Board of Commissioners.

7. Each Member of the Board of Commissioners is entitled to receive remuneration and allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the General Meeting of Shareholders, taking into account the provisions stipulated in the Company's regulations and applicable laws and regulations.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

All members of the PPI Board of Commissioners have met the provisions and qualifications as individuals to serve as Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI.

The criteria for PPI's Board of Commissioners include:

1. Competent/able to perform legal actions.
2. Within 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Served as a member of the Board of Directors or Member of the Board of Commissioners or Supervisory Board deemed guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of crimes detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
3. Committed to compliance with laws and regulations;
4. Have knowledge and/or expertise in the fields required by PPI; and
5. Meet other requirements as stipulated in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

Mechanism For Appointment, Dismissal, And Resignation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). The procedures for the appointment, dismissal, and resignation of the PPI Board of Commissioners refer to Article 14 of the PPI Articles of Association, paragraphs 14 to 20.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, with due observance of the provisions in the Articles of Association, in which the General Meeting of Shareholders is attended

Seri A Dwiwarna dan Keputusan rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.

Di samping alasan di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengenal seluruh aktivitas bisnis PPI dari hulu ke hilir. Untuk itu, Perseroan menyediakan Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Komisaris baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik, proses bisnis, serta kondisi-kondisi yang terjadi di PPI.

Dengan begitu, PPI berharap setiap anggota Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana diuraikan di dalam *Board Manual*. Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, meliputi:

- a. Program Pengenalan
Mempertimbangkan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham dan stakeholders, maka sangat dimungkinkan di antara Anggota Dewan Komisaris tersebut belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya.

by Series A Dwiwarna Shareholders, and the meeting resolutions must be approved by Series A Dwiwarna Shareholders. This provision also applies to the General Meeting of Shareholders held to revoke or strengthen the decision to temporarily dismiss members of the Board of Commissioners.

Dismissal of members of the Board of Commissioners is executed if based on existing reality, the members of the Board of Commissioners concerned, among others:

1. Unable to perform his/her duties properly;
2. Not implementing the provisions of laws and/or provisions of the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Carrying out actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise;
5. Being found guilty by a court decision with permanent legal force;
6. Resigning.

In addition to the reasons above, the General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Commissioners for other reasons deemed appropriate for the Company's interests and objectives.

Orientation/Introduction Program for New Commissioners

As the main body overseeing the management of the company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is required to understand all of PPI's business activities from upstream to downstream. Therefore, the Company provides an Orientation/Introduction Program for new Commissioners so that they gain a deeper and comprehensive understanding of the characteristics, business processes, and conditions in PPI.

In this way, PPI is expected that each new Commissioner can fulfill their duties and responsibilities to the best of their ability as outlined in the Board Manual. The Orientation Program for new Commissioners includes:

- a. Introduction Program
Considering the diverse backgrounds of the Board of Commissioners' members representing shareholders and stakeholders, it is highly likely that these members may not know each other or have never worked together before. Thus, the Company considers the existence of an Introduction (Orientation) Program crucial.

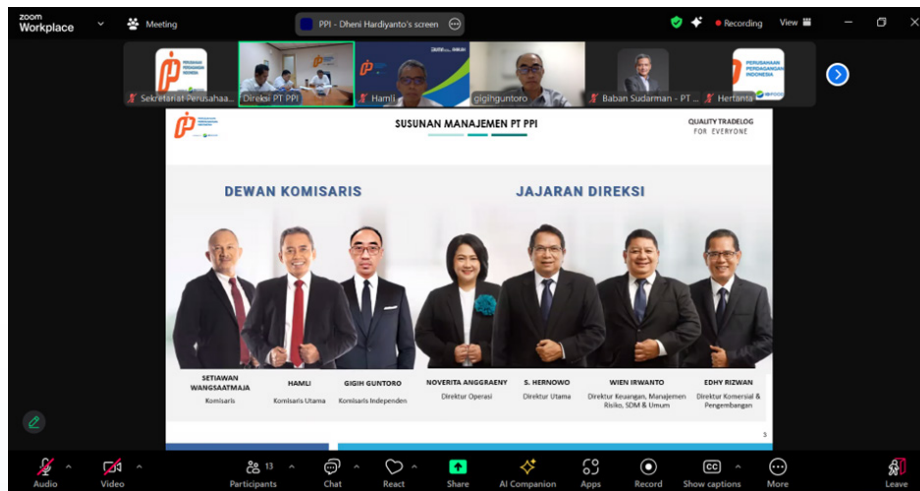
Dengan demikian, Perseroan menilai keberadaan Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan.

- b. Program Peningkatan Kapabilitas, merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, terdapat seorang Anggota Dewan Komisaris Baru, yaitu Gigih Guntoro yang diangkat pada 18 Oktober 2024. Program orientasi/pengenalan yang diberikan kepada Gigih Guntoro dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 secara online melalui zoom meeting dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Kepala Sekretariat Perusahaan & TJSL.

- b. The Capability Enhancement Program is essential to ensure that Board of Commissioners members are always updated on the latest developments in the Company's business activities and other relevant knowledge related to their duties.

In 2024, there was a new Member of the Board of Commissioners, Gigih Guntoro, who was appointed on October 18, 2024. The orientation/introduction program provided to Gigih Guntoro was carried out on October 28, 2024, online via zoom meeting and was attended by the entire Board of Commissioners, Board of Directors, Committee, Head of Corporate Secretary & CSR.



Kebijakan Rangkap Jabatan

Merujuk pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 32, anggota Dewan Komisaris PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Policy on Holding Concurrent Positions

Referring to Article 13 of the PPI Articles of Association paragraph 32, members of the PPI Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Membership in the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and
3. Other positions that may cause conflicts of interest.

Disclosure of information regarding concurrent positions held by all members of the PPI Board of Commissioners has been made in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection, in this Annual Report.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

PPI melarang setiap insan Perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis Perseroan yang berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial.

Dewan Komisaris diamanatkan untuk menjaga profesionalisme dan independensinya sehingga wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan saat melaksanakan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Mengacu pada kebijakan *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan PPI yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang dapat memengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota

Management of Conflicts of Interest by the Board of Commissioners

PPI prohibits any individual within the Company from being in a situation that creates a conflict of interest, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company defines a conflict of interest as a conflict between personal economic interests and the Company's economic interests that affect objectivity and commercial considerations.

The Board of Commissioners is mandated to maintain professionalism and independence, thus requiring the management of conflicts of interest while performing oversight functions.

Therefore, the Board of Commissioners should always avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future. Referring to the Board Manual policy, members of the Board of Commissioners are not allowed to hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and
3. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by PPI regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to hold concurrent positions as stipulated by the applicable laws and regulations in an effort to avoid potential conflicts of interest.

Independency of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners carries out their supervisory function independently or free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties. This commitment is reflected in the Board of Commissioners' independence statement, which is regularly updated. Members of the Board of Commissioners are obligated to report any changes in status that may affect their independence.

Throughout 2024, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of

Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris tahun 2024.

Commissioners as stated in the Board of Commissioners' independence statement for 2024.

Aspek Independensi Aspect of Independency	Hamli	Setiawan Wangsaatmaja	Gigih Guntoro
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham utama yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan terbaik perusahaan.

Melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: SK-228/MBU/10/2024 dan Nomor: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perseroan mengangkat Gigih Guntoro sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan demikian, PPI telah memenuhi ketentuan UU PT yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen PPI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi perseorangan sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PPI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PPI pada periode berikutnya;

Independent Commissioner

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or major shareholders that could affect their ability to act independently in the best interests of the Company.

Through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholder of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: SK-228/MBU/10/2024 and Number: 127/Kep.PS/RNI.01/X/2024 concerning the Appointment of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the Company appointed Gigih Guntoro as the Independent Commissioner.

As a result, PPI has fulfilled the provisions of the Company Law, which requires that every company shall position at least one Independent Commissioner or at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.

Criteria For Determining Independent Commissioners

All members of the Independent Commissioners of PPI have met the individual requirements and qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not being a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PPI in the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PPI in the following period;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PPI;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama PPI; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PPI.

Profil Komisaris Independen

Profil lengkap Gigih Guntoro selaku Komisaris Independen PPI dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menghindari benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak.

Komisaris Independen senantiasa menjaga reputasi Perseroan melalui penerapan prinsip GCG yang benar, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan kebijakan yang diambil baik secara individual maupun mufakat. Komisaris Independen juga berkewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan), serta Rapat Dewan Komisaris bersama komite-komite.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Mengacu pada Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar PPI, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan mengikuti rapat, maka rapat tetap dapat berlangsung dan Ketua Rapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling lama atau anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam hal usia.

2. Does not own shares, either directly or indirectly, in PPI;
3. Does not have any affiliation with PPI, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of PPI; and
4. Does not have any direct or indirect business relationships related to PPI's business activities.

Profile of Independent Commissioners

The complete profile of Gigih Guntoro as the Independent Commissioner of PPI is available in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.

Statement of Independence of Independent Commissioners

Independent Commissioners are committed to upholding independence, objectivity, and fairness in carrying out their duties and responsibilities by avoiding conflicts of interest or preferences for the interests of any party.

Independent Commissioners always maintain the Company's reputation through the application of correct GCG principles, reflected in their attitudes, actions, and policies taken individually or collectively. Independent Commissioners also have an obligation to report any changes in their status that affect their independence.

Meeting of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' meetings consist of Internal Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with invited the Board of Directors (Joint Meetings), and Board of Commissioners meetings with committees.

Board of Commissioners Meeting Policy

Referring to Article 16 Paragraph (7) of PPI's Articles of Association, Board of Commissioners meetings must be held at least once every month and chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend or is unable to participate in the meeting, the meeting may still proceed, and the Chairmanship shall be replaced by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and/or the member of the Board of Commissioners with the longest tenure or the oldest member of the Board of Commissioners in terms of age.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan mekanisme tersebut disebut keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menggelar 15 kali rapat. Agenda dan tingkat kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris disampaikan dalam tabel berikut:

The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting provided that all members of the Board of Commissioners have given written approval to the proposed motion and have signed such approval. Decisions made using this mechanism are called circular resolutions. Decisions made in this manner have the same force as decisions made validly in a Board of Commissioners meeting.

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 15 meetings. The agenda and attendance of the Board of Commissioners' Internal Meetings are presented in the following table:

Tanggal dan Tempat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons	
23 Januari 2024 melalui zoom January 23, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d bulan Desember 2023; 2. Rancangan RKAP 2024. 1. Performance Discussion until December 2023; 2. Draft 2024 RKAP.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
15 Februari 2024 melalui zoom February 15, 2024 via zoom	Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPI Discussion of Proposed Changes to PT PPI Organizational Structure	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
21 Februari 2024 melalui zoom February 21, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2024; 2. Lain-lain 1. Performance Discussion until January 2024; 2. Others	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
21 Februari 2024 melalui zoom February 21, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2024; 2. Lain-lain 1. Performance Discussion until January 2024; 2. Others	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
21 Maret 2024 melalui zoom March 21, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2024 2. Lain-lain 1. Performance Discussion until February 2024 2. Others	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
25 April 2024 melalui zoom April 25, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024); 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until March 2024 (First Quarter of 2024); 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
10 Mei 2024 melalui zoom May 10, 2024 via zoom	Pembahasan Permasalahan PT PPI Discussion of PT PPI Issues	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
22 Mei 2024 melalui zoom May 22, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan April 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until April 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
26 Juni 2024 melalui zoom June 26, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Mei 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until May 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-

Tanggal dan Tempat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons	
8 Juli 2024 melalui zoom July 8, 2024 via zoom	Pembahasan Sewa Aset PPI oleh PT BGRLI Discussion on PPI Asset Lease by PT BGRLI	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
23 Juli 2024 melalui zoom July 23, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juni 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until June 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
21 Agustus 2024 melalui zoom August 21, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until July 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
24 September 2024 melalui zoom September 24, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until August 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
23 Oktober 2024 melalui zoom October 23, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan September 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until September 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
25 November 2024 melalui zoom November 25, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until October 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-
18 Desember 2024 melalui zoom December 18, 2024 via zoom	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan November 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until November 2024; 2. Others.	Seluruh Dewan Komisaris Entire Board of Commissioners	-	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris | Recapitulation and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran Attendance
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	15	15	0	100%
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	15	15	0	100%
Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)*	3	3	0	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				100%

*) Gigih Guntoro menjabat sejak 18 Oktober 2024 | Gigih Guntoro has been serving since October 18, 2024

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Dewan Komisaris dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait perkembangan Perseroan, Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Tentang kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

To ensure that the Board of Commissioners always keeps abreast of matters related to the Company's development, the Board of Commissioners participates in competency development programs, such as seminars, workshops, or other activities that can improve knowledge and competence.

The competency development program activities participated by the Board of Commissioners throughout 2024 are available in the Company Profile chapter in this annual report.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi mengenai kinerja PT PPI setiap bulannya. Dewan Komisaris menyampaikan pertanyaan dan saran/nasihat kepada Direksi dalam forum tersebut guna menjadi masukan Direksi dalam meningkatkan kinerja Perusahaan untuk mencapai target Tahun 2024.

Kegiatan Rutin Dewan Komisaris

Kegiatan Rutin Dewan Komisaris berupa rapat internal Dewan Komisaris yang diselenggarakan sebanyak 15 (lima belas) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun 2024.

Kegiatan Non-Rutin Dewan Komisaris

Kegiatan yang dijalankan Dewan Komisaris pada tahun 2024 antara lain:

Perjalanan Dinas Dewan Komisaris:

1. Kantor Cabang Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 s.d 28 Maret 2024 yang diwakili oleh Bapak Setiawan Wangsaatmaja (sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko).
2. Kunjungan kerja ke Cabang Solo pada tanggal 15-17 Mei 2024 yang diwakili oleh Bapak Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris) dan Bapak Eko Setiawan (anggota Komite Pemantau Risiko)
3. Kantor Cabang Denpasar pada tanggal 22-24 Agustus 2024 yang diwakili oleh Bapak Hamli (Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit), Bapak Helman Arief dan Bapak Reinhard Harianja (anggota Komite Audit) serta Bapak Arie Wijaya (Sekretaris Dewan Komisaris).
4. Kantor Cabang Jakarta pada tanggal 11 September 2024 yang diwakili oleh Bapak Hamli (Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit), Bapak Reinhard Harianja (anggota Komite Audit) serta Bapak Arie Wijaya (Sekretaris Dewan Komisaris).
5. Kantor Cabang Aceh pada tanggal 13 September 2024 yang diwakili oleh Bapak Setiawan Wangsaatmaja selaku Komisaris dan Ketua Komite Pemantau Risiko.
6. Kantor Cabang Medan pada tanggal 14 September 2024 yang diwakili oleh Bapak Setiawan Wangsaatmaja selaku Komisaris dan Ketua Komite Pemantau Risiko.
7. Kantor Cabang Palembang pada tanggal 19 s.d 21 November 2024 yang diwakili oleh Bapak Gigih

Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2024

In carrying out its supervisory duties and functions, throughout 2024, the Board of Commissioners and its Organs held monthly discussions with the Board of Directors on PT PPI's performance. The Board of Commissioners submitted questions and suggestions/advice to the Board of Directors in the forum to improve the Company's performance to achieve the 2024 target.

Routine Activities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' routine activities include 15 (fifteen) internal meetings and 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024.

Non-Routine Activities of the Board of Commissioners

Activities carried out by the Board of Commissioners in 2024 include:

Board of Commissioners' Business Trip:

1. Bandung Branch Office on March 26, 2024 to March 28, 2024 represented by Mr. Setiawan Wangsaatmaja (also as Chairman of the Risk Oversight Committee).
2. Working visit to Solo Branch on May 15-17, 2024 represented by Mr. Setiawan Wangsaatmaja (Commissioner) and Mr. Eko Setiawan (member of the Risk Oversight Committee)
3. Denpasar Branch Office on August 22-24, 2024 represented by Mr. Hamli (President Commissioner and Chairman of the Audit Committee), Mr. Helman Arief and Mr. Reinhard Harianja (members of the Audit Committee) and Mr. Arie Wijaya (Secretary of the Board of Commissioners).
4. Jakarta Branch Office on September 11, 2024 represented by Mr. Hamli (President Commissioner and Chairman of the Audit Committee), Mr. Reinhard Harianja (member of the Audit Committee) and Mr. Arie Wijaya (Secretary of the Board of Commissioners).
5. Aceh Branch Office on September 13, 2024 represented by Mr. Setiawan Wangsaatmaja as Commissioner and Chairman of the Risk Oversight Committee.
6. Medan Branch Office on September 14, 2024 represented by Mr. Setiawan Wangsaatmaja as Commissioner and Chairman of the Risk Oversight Committee.
7. Palembang Branch Office on November 19-21, 2024 represented by Mr. Gigih Guntoro as Independent

Guntoro sebagai Komisaris Independen bersama Anggota Komite Pemantau Risiko.

Commissioner with Members of the Risk Oversight Committee.

Pelatihan Dewan Komisaris:

Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024

Board of Commissioners Training:

Training attended by the Board of Commissioners throughout 2024

Jenis Sertifikasi Types of Certification	Peserta Participant	Jadwal Pelaksanaan Implementation Date	Keterangan Description
Certified Risk Executive Leader (CREL)	Bp.Setiawan Wangsaatmaja Mr. Setiawan Wangsaatmaja	3-7 Juni 2024 & 18 Juni 2024 June 3-7, 2024 & June 18, 2024	Berdasarkan penetapan hasil uji kompetensi, dinyatakan "KOMPETEN" Based on the determination of the competency test results, it is declared "COMPETENT"

Surat-Surat Dewan Komisaris

- Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Int/PTPPI/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Persetujuan Penghapusbukuan Barang Ex-Gudang Toko Grosir Desa di Sukabumi dan Tasikmalaya;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 2/Dk.Int/PTPPI/I/2024 hal 5 Januari 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Pendayagunaan Aset dengan Skema Persewaan Aset Milik PT PPI kepada PT BGR Logistik Indonesia dengan Jangka Waktu sampai dengan 5 (lima) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 3/Dk.Int/PTPPI/I/2024 hal 12 Januari 2024 hal Persetujuan atas Usulan Kepala Sekretariat Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 4/Dk.Int/PTPPI/III/2024 hal 13 Maret 2024 hal Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset Tetap di Gedung CTC Jalan Kramat Raya 94/96 Jakarta dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 3 (Tiga) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Int/PTPPI/III/2024 hal 13 Maret 2024 hal Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset Tetap Jalan Kebalen Timur No. 98 Surabaya dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 5 (Lima) Tahun;

Board of Commissioners Letters

- Board of Commissioners Letter Number 1/Dk.Int/PTPPI/I/2024 dated January 5, 2024, regarding Approval for Write-Off of Goods Ex-Village Wholesale Store Warehouse in Sukabumi and Tasikmalaya;
- Board of Commissioners Letter Number 2/Dk.Int/PTPPI/I/2024 dated January 5, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Request for Asset Utilization with a Lease Scheme for PT PPI's Assets to PT BGR Logistik Indonesia for a period of up to 5 (five) years;
- Board of Commissioners Letter Number 3/Dk.Int/PTPPI/I/2024 dated January 12, 2024, regarding Approval of the Proposal from the Head of Corporate Secretary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 dated January 26, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Social and Environmental Responsibility Program Budget (RKA TJSL) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 4/Dk.Int/PTPPI/III/2024 dated March 13, 2024, regarding Board of Commissioners' Approval for the Plan to Utilize Fixed Assets in CTC Building, Jalan Kramat Raya 94/96 Jakarta, with a Lease Scheme for a period of up to 3 (three) years;
- Board of Commissioners Letter Number 5/Dk.Int/PTPPI/III/2024 dated March 13, 2024, regarding Board of Commissioners' Approval for the Plan to Utilize Fixed Assets at Jalan Kebalen Timur No. 98 Surabaya, with a Lease Scheme for a period of up to 5 (five) years;

- Surat Dewan Komisaris Nomor 6/Dk.Int/PTPPI/III/2024 hal 22 Maret 2024 hal Persetujuan Mengagunkan Kembali Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 2/Dk.Eks/PTPPI/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Usulan Kandidat Talent Pool PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada Holding Pangan Talent Komite Tahun 2024.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 7/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 tanggal 17 April 2024 hal Persetujuan Penghapusbukuan Barang Rusak di Gudang PT PPI Cabang Cirebon dan Malang;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 tanggal 17 April 2024 hal Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset Tetap Jalan Kalimas Barat No 63 Surabaya dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 5 (Lima) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 9/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 tanggal 17 April 2024 hal Persetujuan Mengagunkan Kembali Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 hal Rencana Pendayagunaan Aset Armada, Aset Inventaris dan Aset Gudang oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 5 (lima) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 13/Dk.Int/PTPPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset Tetap di Gedung Graha PPI Jalan Abdul Muis No. 8-10 Jakarta, dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 2 (dua) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 6/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 6/Dk.Int/PTPPI/III/2024 dated March 22, 2024, regarding Approval to Re-mortgage Fixed Assets for the Extension of Working Capital Loan at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Board of Commissioners Letter Number 2/Dk.Eks/PTPPI/III/2024 dated March 28, 2024, regarding Proposed Talent Pool Candidates of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the Food Holding Talent Committee in 2024.
- Board of Commissioners Letter Number 7/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 dated April 17, 2024, regarding Approval for Write-Off of Damaged Goods in PT PPI Branch Warehouses in Cirebon and Malang;
- Board of Commissioners Letter Number 8/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 dated April 17, 2024, regarding Board of Commissioners' Approval for the Plan to Utilize Fixed Assets at Jalan Kalimas Barat No. 63 Surabaya, with a Lease Scheme for a period of up to 5 (five) years;
- Board of Commissioners Letter Number 9/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 dated April 17, 2024, regarding Approval to Re-mortgage Fixed Assets for the Extension of Working Capital Loan at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Board of Commissioners Letter Number 10/Dk.Int/PTPPI/IV/2024 dated April 25, 2024, regarding the Plan for Utilization of Fleet Assets, Inventory Assets, and Warehouse Assets by PT BGR Logistik Indonesia with a Lease Scheme for a period of up to 5 (five) years;
- Board of Commissioners Letter Number 13/Dk.Int/PTPPI/V/2024 dated May 14, 2024, regarding Board of Commissioners' Approval for the Plan to Utilize Fixed Assets at Graha PPI Building, Jalan Abdul Muis No. 8-10 Jakarta, with a Lease Scheme for a period of up to 2 (two) years;
- Board of Commissioners Letter Number 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 dated May 27, 2024, regarding the Board of Commissioners' Oversight Report for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the 2023 Fiscal Year;
- Board of Commissioners Letter Number 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 dated May 30, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Management Report for the 2023 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 6/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 dated May 30, 2024, regarding Proposal for the Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2024;

- Surat Dewan Komisaris Nomor 7/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 hal Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun Buku 2024;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 9/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris s.d Triwulan I 2024.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 12/Dk.Int/PTPPI/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 15/Dk.Int/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 hal Peningkatan Penerapan Strategi Anti-Fraud dan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 16/Dk.Int/PTPPI/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset PT PPI oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan skema sewa;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 17/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Persetujuan atas Usulan Rancangan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 19/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Persetujuan atas Usulan Rancangan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 20/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tanah dan Bangunan Milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 21/Dk.Int/PTPPI/IX/2024 tanggal 2 September 2024 hal Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 11/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 tanggal 4 September 2024 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris s.d Triwulan II 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 7/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 dated June 4, 2024, regarding Proposal for Public Accountant Firm (KAP) for the 2024 Fiscal Year Audit;
- Board of Commissioners Letter Number 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 dated June 6, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the First Quarter of 2024 Management Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 9/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 dated June 6, 2024, regarding Board of Commissioners' Oversight Report up to the First Quarter of 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 12/Dk.Int/PTPPI/V/2024 dated May 6, 2024, regarding Board of Commissioners' Response;
- Board of Commissioners Letter Number 15/Dk.Int/PTPPI/VI/2024 dated June 6, 2024, regarding Improvement of Anti-Fraud Strategy Implementation and Internal Control System within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 16/Dk.Int/PTPPI/VII/2024 dated July 9, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Plan for Utilization of PT PPI Assets by PT BGR Logistik Indonesia with a lease scheme;
- Board of Commissioners Letter Number 17/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 dated August 5, 2024, regarding Approval of the Proposed Organizational Structure Plan of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 dated August 21, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Second Quarter of 2024 Management Report;
- Board of Commissioners Letter Number 19/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 dated August 26, 2024, regarding Approval of the Proposed Organizational Structure Plan of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 20/Dk.Int/PTPPI/VIII/2024 dated August 28, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Plan for Write-Off and Transfer of Land and Building Assets Owned by PT Perusahaan Perdagangan Indonesia to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Board of Commissioners Letter Number 21/Dk.Int/PTPPI/IX/2024 dated September 2, 2024, regarding Approval to Mortgage Fixed Assets for the Extension of Working Capital Loan at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Board of Commissioners Letter Number 11/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 dated September 4, 2024, regarding Board of Commissioners' Oversight Report up to the Second Quarter of 2024;

- Surat Dewan Komisaris Nomor 22/Dk.Int/PTPPI/IX/2024 tanggal 13 September 2024 hal Persetujuan atas Rencana Pendayagunaan Aset Inventaris dan Inventaris Software PT PPI oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan Skema Sewa.
- Surat Dewan Komisaris Nomor 12/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 tanggal 27 September 2024 hal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 13/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 tanggal 30 September 2024 hal Usulan Top Talent PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada Holding Pangan Talent Committee Periode Semester 2 Tahun 2024;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 26/Dk.Int/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 hal Persetujuan Mengagunkan Kembali Aset Tetap Untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja Non Cash Loan di PT Bank Permata, Tbk;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 15/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 18 November 2024 hal Penyampaian Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPI;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 27/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Persetujuan atas Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 28/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Rencana Pendayagunaan 4 (empat) Titik Aset Bangunan dan Gudang oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan Skema Persewaan sampai dengan 3 (tiga) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 16/Dk.Eks/PTPPI/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris s.d Triwulan III 2024;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 29/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Cabang Rugi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 31/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 hal Persetujuan Mengagunkan Kembali Aset Tetap Untuk Kredit Modal Kerja Jangka Pendek Jointly and Severally Liable Borrowers di PT Bank Central Asia, Tbk;
- Board of Commissioners Letter Number 22/Dk.Int/PTPPI/IX/2024 dated September 13, 2024, regarding Approval for the Plan to Utilize Inventory Assets and Software Inventory of PT PPI by PT BGR Logistik Indonesia with a Lease Scheme.
- Board of Commissioners Letter Number 12/Dk.Eks/PTPPI/IX /2024 dated September 27, 2024, regarding Submission of the Board of Commissioners' Decree of PT PPI.
- Board of Commissioners Letter Number 13/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 dated September 30, 2024, regarding Proposed Top Talent of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the Food Holding Talent Committee for the Second Semester in 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 26/Dk.Int/PTPPI/XI/2024 dated November 6, 2024, regarding Approval to Re-mortgage Fixed Assets for the Extension of Non-Cash Loan Working Capital Loan at PT Bank Permata, Tbk;
- Board of Commissioners Letter Number 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 dated November 6, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Third Quarter of 2024 Management Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- Board of Commissioners Letter Number 15/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 dated November 18, 2024, regarding Submission of the Board of Commissioners' Decree of PT PPI;
- Board of Commissioners Letter Number 27/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 3, 2024, regarding Approval of the Strategic Management Guidelines for Risk Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 28/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 3, 2024, regarding Response to the Request for Approval of the Plan for Utilization of 4 (four) Points of Building and Warehouse Assets by PT BGR Logistik Indonesia with a Lease Scheme for up to 3 (three) years;
- Board of Commissioners Letter Number 16/Dk.Eks/PTPPI/XII/2024 dated December 3, 2024, regarding Board of Commissioners' Oversight Report up to the Third Quarter of 2024;
- Board of Commissioners Letter Number 29/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 5, 2024, regarding Monitoring and Evaluation of the Performance of Loss-Making Branches of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Board of Commissioners Letter Number 31/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 10, 2024, regarding Approval to Re-mortgage Fixed Assets for Short-Term Working Capital Loan, Jointly and Severally Liable Borrowers, at PT Bank Central Asia, Tbk;

- Surat Dewan Komisaris Nomor 34/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Rencana Pendayagunaan 3 (tiga) Titik Aset Bangunan dan Gudang oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan Skema Persewaan sampai dengan 3 (tiga) Tahun;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 35/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penyeragaman Logo Perusahaan ID FOOD Group;
- Surat Dewan Komisaris Nomor 36/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Rancangan Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2025.

- Board of Commissioners Letter Number 34/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 24, 2024, regarding Response to the Request for Approval of the Plan for Utilization of 3 (three) Points of Building and Warehouse Assets by PT BGR Logistik Indonesia with a Lease Scheme for up to 3 (three) years.
- Board of Commissioners Letter Number 35/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 24, 2024, regarding Board of Commissioners' Response to the Plan for Alignment of the ID FOOD Group's Company Logo;
- Board of Commissioners Letter Number 36/Dk.Int/PTPPI/XII/2024 dated December 24, 2024, regarding Submission of the Work Plan and Budget of PT PPI's Board of Commissioners for 2025.

Penilaian Atas Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite penunjang di bawah organ Dewan Komisaris, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris menggunakan kriteria dan indikator penilaian yang telah disepakati bersama dengan komite-komite dalam memberikan penilaian tahunan, seperti efektivitas pelaksanaan rapat komite, peran dan dukungan komite-komite terhadap implementasi tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana disebutkan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2024.

Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Commissioners

The execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is supported by 2 (two) supporting committees under the organ of the Board of Commissioners, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Oversight Committee

The Board of Commissioners utilizes criteria and assessment indicators agreed upon with the committees in providing annual evaluations, such as the effectiveness of committee meeting implementations, the roles and support of the committees towards the implementation of corporate governance, and compliance with applicable regulations.

Referring to the assessment criteria as mentioned above, the Board of Commissioners considers that the committees under the Board of Commissioners have performed their duties and responsibilities properly throughout 2024.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ utama GCG yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan, dan demi kepentingan terbaik Perseroan, serta bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib menjalankan keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan PPI sehingga visi, misi dan sasaran yang telah digariskan di dalam Anggaran Dasar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi wajib mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Masing-masing anggota Direksi memikul tugas dan tanggung jawab secara kolektif, akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pembedaan tugas dan kewenangannya.

Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;

The Board of Directors is the main GCG organ authorized and fully responsible for managing the Company in accordance with the aims, objectives, and best interests of the Company, as well as representing the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws.

The Board of Directors is required to carry out resolutions taken at the General Meeting of Shareholders (GMS), and is responsible for the implementation and management of PPI, so that the vision, mission, and objectives outlined in the Articles of Association can be realized effectively.

In carrying out their duties and obligations, the Board of Directors must devote all their energy, thoughts, attention, and dedication fully while considering the interests of shareholders and other stakeholders.

Each member of the Board of Directors bears collective duties and responsibilities, but they are still allowed to perform duties and make decisions according to their assigned responsibilities and authorities.

In principle, the execution of duties performed by each Director remains a collective responsibility.

Legal Basis

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs);
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (SOEs);
4. Articles of Association of PPI;
5. Minister of State-Owned Enterprises Decree/Head of the State-Owned Enterprises Supervisory Body No. KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Company's Management Report for State-Owned Enterprises;
6. Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;

7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi wajib bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan independen dengan mengindahkan *Board Manual* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang *Board Manual* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pada prinsipnya, *Board Manual* mengatur tentang tata laksana kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Direksi
2. Persyaratan Direksi
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan Direksi
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
12. Rapat Direksi
13. Organ Pendukung Direksi
14. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
15. Pertanggungjawaban Direksi

7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 jo PER- 09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (SOEs);
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs); and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs).

Board of Directors' Manual

All members of the Board of Directors are required to act and carry out their duties and responsibilities in a professional, accountable, and independent manner, adhering to the Board Manual, established based on the Board of Directors Decree Number 35/DU/KEPDIR/ PPI/X/2021 dated October 28, 2021 concerning the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

In principle, the Board Manual regulates effective work procedures between the Board of Commissioners and the Board of Directors, explaining structured, systematic, easily understandable, and consistently executable activity stages, serving as a reference for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission.

The Board Manual, among other things, regulates the following:

1. Function of the Board of Directors
2. The Board of Directors Requirements
3. Composition and Membership
4. Term of Office
5. Introduction and Capability Enhancement Programs
6. Independence of the Board of Directors
7. Board of Directors' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Board of Directors Meetings
11. Delegation of Authority Among the Board of Directors Members
12. Board of Directors Meetings
13. Supporting Organs of the Board of Directors
14. Relationships with Subsidiaries and Affiliated Companies
15. Accountability of the Board of Directors

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Periode menjabat Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah dan komposisi Direksi PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah mempertimbangkan kebutuhan dan skala bisnis PPI demi terealisasinya visi, misi, dan rencana strategis PPI.

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, sehingga susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Directors

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years starting from the date set by the General Meeting of Shareholders (GMS) that appointed them and ending at the closure of the 5th Annual GMS after their appointment date, without prejudice to the right of the GMS to dismiss member of the Board of Directors at any time before their term expires.

Member of the Board of Directors whose terms have ended may be reappointed for 1 (one) subsequent term according to the resolution of the GMS.

The number and composition of the PPI Board of Directors comply with applicable laws and regulations and have taken into account the needs and business scale of PPI to realize the vision, mission, and strategic plans of PPI.

In 2024, there were no changes to the composition of the Board of Directors. Thus, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:

Susunan Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Soegeng Hernowo	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SIC-I69/M8U/06/2023 dan Nomor GS PS/1.01/V1/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SIC-I69/M8U/06/2023 and Number GS PS/1.01/V1/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	26 Juni 2023 s.d. 26 Juni 2028 June 28, 2023 to June 26, 2028	Ke-1 First
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Wien Irwanto	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	1 Juli 2021 s.d 1 Juli 2026 July 1, 2021 to July 1, 2026	Ke-1 First

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Edhy Rizwan	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 dan No: 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 and No: 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	26 Juni 2023 s.d. 26 Juni 2028 June 26, 2023 to June 26, 2028	Ke-1 First
Direktur Operasi Director of Operations	Noverita Anggraeny	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SK-362/MBU/06/2023 dan Nomor 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SK-362/MBU/06/2023 and Number 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Desember 2023 s.d. 18 Desember 2028 December 18, 2023 to December 18, 2028	Ke-1 First

Profil singkat masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each member of the Board of Directors is available in the Board of Directors Profile section, in the Company Profile chapter.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolektif telah diamanatkan di dalam *Board Manual* dan Pasal 11 Anggaran Dasar PPI, antara lain:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The collective description of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been mandated in the Board Manual and Article 11 of the Articles of Association of PPI, including:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the Company's interests and in accordance with the aims and objectives of the Company, and representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.
2. Endeavoring to ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.

- Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan.
- Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan rincian dan tugasnya.

- Preparing the Company's Long-Term Plan.
- Devoting full energy, thoughts, attention, and dedication to the duties, obligations, and goals of the Company.
- Adhering to the Company's Articles of Association and laws and regulations, and obliged to uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
- Preparing the complete organizational structure of the Company with details and its duties.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing anggota Direksi diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara individu dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors is entrusted to carry out individual duties and responsibilities considering their background of experience and competencies, including but not limited to:

Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Direktur Utama President Director	Melaksanakan koordinasi tugas anggota-anggota Direksi lainnya dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satuan Pengawas Intern, Legal, Sekretaris Perusahaan, <i>Strategic Planning</i> , <i>Business Development</i> dan staf ahli/penasihat Perusahaan. Coordinating the duties of other members of the Board of Directors and being responsible for the activities of the Internal Audit Unit, Legal, Corporate Secretary, Strategic Planning, Business Development and expert staff/advisors of the Company.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Menangani Pengembangan Bisnis dan mengembangkan strategi pemasaran dan outsourcing yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling Business Development and developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Menangani bidang Produksi, Pengembangan Bisnis, mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling the Production, Business Development, developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Operasi Director of Operations	Melakukan bidang IT, Manajemen Aset dan pengendalian operasional PPI Carrying out IT, Asset Management and operational control of PPI.

Hak dan Kewenangan

- Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PPI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rights and Authorities

- Establishing management policies of the Company.
- Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more Directors to make decisions on behalf of the Board or represent the Company in and out of court.
- Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more employees of PPI, either individually or jointly, or to others, to represent the Company in and out of court.
- Regulating provisions regarding Company personnel, including the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations.

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Memberi penghargaan dan sanksi (reward and punishment) Pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
8. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempergunakan saran profesional.
11. Menerima gaji berikut tunjangan/fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
12. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
13. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan orang perseorangan sebagai anggota Direksi sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI.

Kriteria Direksi PPI, antara lain:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit; atau
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

5. Appointing and dismissing Company employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations.
6. Appointing and dismissing the Corporate Secretary.
7. Granting awards and imposing sanctions (rewards and punishments) on Company employees based on Company employment regulations.
8. Engaging in activities outside the Company that are not directly related to the Company's interests, such as teaching, serving on business association boards, and similar activities, within reasonable time and with the knowledge of the President Director or other Directors.
9. Taking leave according to applicable regulations.
10. Utilizing professional advice.
11. Receiving salary along with allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the GMS.
12. If the Company achieves a profit, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their performance, the amount of which is determined by the GMS.
13. Carrying out all other actions and deeds regarding the management or ownership of Company assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

Criteria For Board of Directors Members

All members of the Board of Directors have fulfilled the individual requirements as Board of Directors members as stipulated in the Articles of Association of PPI.

Criteria for the PPI Board of Directors include:

1. Capable of performing legal acts.
2. Within the last 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt; or
 - b. Served as a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners or Supervisory Board who has been found guilty of causing a Company or State-Owned Enterprise (SOE) to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of offenses detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector.

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan; dan
- Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri Direksi

Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi PPI mengacu pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 13 hingga ayat 22.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Direksi Baru

PPI memiliki kebijakan orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat agar mereka mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai Perseroan, aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, serta panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi baru. Program Orientasi/ Pengenalan bagi anggota Direksi baru PPI, meliputi:

- Program Pengenalan**
Dalam rangka membentuk suatu tim kerja yang solid, maka Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat lebih saling mengenal.
- Program Peningkatan Kapabilitas**
Program Peningkatan Kapabilitas ditujukan agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan di bidang perdagangan dan selalu siap mengantisipasi perubahan di industri demi menjaga keberlangsungan dan kemajuan usaha Perseroan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Merujuk pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 34, anggota Direksi PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

- Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;

- Committed to complying with laws and regulations;
- Possesses knowledge and/or expertise in fields required by the Company; and
- Meets other requirements as determined in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

Mechanism of Appointment, Termination, And Resignation of the Board of Directors

The procedures for the appointment, termination, and resignation of PPI Board of Directors refer to Article 10 of PPI's Articles of Association, paragraphs 13 to 22.

Orientation/Induction Program for New Board of Directors

PPI has an orientation/induction policy for newly appointed Directors to provide them with a comprehensive understanding and knowledge of the Company, its business activities, future company plans, and the guidelines and responsibilities of the Board of Directors.

The Corporate Secretary is in charge of implementing the orientation/induction program for newly appointed Directors. The orientation/introduction program for new PPI Directors includes:

- Introduction Program**
To form a cohesive team, the Introduction Program is crucial to enable all Directors from various backgrounds to get to know each other better.
- Capability Enhancement Program**
The Capability Enhancement Program aims to ensure that the Board of Directors are always updated on the latest developments in the Company's core business in the trading sector and are prepared to anticipate industry changes for the Company's sustainability and progress.

Policy on Holding Concurrent Position for the Board of Directors

Referring to Article 10, paragraph 34 of the Articles of Association of PPI, PPI Directors are allowed to hold concurrent position, except for the following criteria:

- Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
- Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs);

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi PPI telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi wajib menjaga profesionalisme dan independensinya agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa demi kepentingan terbaik PPI. Berpedoman pada *Board Manual* PPI, Direksi hendaknya menghindari kegiatan atau aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka anggota Direksi PPI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memegang jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Independensi Direksi

Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar masing-masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara

3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;
4. Other positions as stipulated in laws and regulations, party officials and/or legislative candidates and/ or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

Information on concurrent position of all PPI Directors has been disclosed in the Company Profile section, the Board of Directors Profile subsection, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest for the Board of Directors

The Board of Directors are obliged to maintain professionalism and independence so that all strategic actions and decisions taken are always in the best interests of PPI. Guided by the PPI Board Manual, the Board of Directors should avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future.

To prevent conflicts of interest, PPI Directors are not allowed to hold other positions as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs);
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;
4. Other positions as stipulated in laws and regulations, party officials and/or legislative candidates and/ or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Board of Directors to comply with the regulations determined by the Company regarding the prohibition on holding concurrent positions in accordance with applicable laws and regulations to avoid potential conflicts of interest.

Independence of the Board of Directors

Independence of the Board of Directors is a crucial factor that must be preserved so that each member of the Board can carry out their duties and responsibilities independently,

independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain.

Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Direksi yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Direksi berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Dalam rangka menjaga independensi Direksi, maka PPI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus perusahaan.
4. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.
5. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap Anggota Direksi juga membuat Daftar Khusus yang di dalamnya dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi beserta keluarganya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi di dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Direksi tahun 2024.

free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties.

This commitment is outlined in the statement of independence of the Board of Directors, which is regularly updated. Members of the Board of Directors are obligated to report any changes in their status that may affect their independence.

To maintain the independence of the Board of Directors, PPI establishes the following provisions:

1. Apart from the Directors, any other party is prohibited from interfering in the management of the Company.
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest, and free from any pressure from any party.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that may disrupt their independence in managing the Company.
4. Each Director is required to make a conflict of interest declaration and report any changes in their status that may affect their independence.
5. All members of the Board of Directors do not hold positions that are prohibited by applicable laws and regulations.
6. Each Director also creates a Special Register that includes information about the share ownership by members of the Board of Directors and their families in the Company and other companies, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

As of the end of 2024, there were no situations with potential conflicts of interest faced by the Board of Directors members in the decision-making process, as stated in the statement of independence of the Board of Directors for 2024.

Aspek Independensi Aspect of Independency	Soegeng Hernowo	Wien Irwanto	Edhy Rizwan	Noverita Anggraeny
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓	✓

Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai salah satu mekanisme formal bagi sesama anggota Direksi untuk berdiskusi, merencanakan, dan memantau penerapan strategi dan kebijakan PPI.

Kebijakan Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun dalam hal Direktur Utama berhalangan menghadiri rapat maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Pengambilan keputusan di dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat.

Selain melalui rapat Direksi, Direksi juga dapat mengambil keputusan strategis melalui keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Direksi.

Meeting of the Board of Directors

The Board of Directors meetings must be held regularly at least 1 (one) time every month. The Board meetings serve as a formal mechanism for fellow Directors to discuss, to plan, and to monitor the implementation of PPI's strategies and policies.

Board of Directors Meeting Policy

Board meetings can be held at any time deemed necessary by one or more Directors, upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon a written request from 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total voting shares.

The Board meetings are chaired by the President Director, but in the event that the President Director is unable to attend the meeting, one of the Directors designated in writing by the President Director shall lead the meeting. If the President Director does not make any designation, then the longest serving Director shall lead the meeting. In the event that there is more than 1 (one) Director who has served the longest as a member of the Board of Directors, then the Director who has served the longest and is the oldest in terms of age will act as the meeting chairperson.

The notice of the Board of Directors meeting is provided in writing to each Director at least 3 (three) days before the meeting is held, or in a shorter period if urgent, without considering the notice date and meeting date.

Decisions at the Board of Directors meeting are made based on consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by a majority vote. If the number of votes in favor and against is equal, the decision of the meeting is the same as the opinion of the meeting chairperson.

In addition to the Board of Directors meetings, the Board of Directors can also make strategic decisions through circular resolutions. Decisions made in this manner have the same force as decisions made validly in a Board of Directors meeting.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2024, rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 165 kali dengan uraian sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2024, the Board of Directors held 165 meetings with the following description:

Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2024

Details of Meeting Implementation, Agenda and Attendance of the Board of Directors at the Board of Directors Meeting in 2024

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
1	2 Januari 2024 January 2, 2024	001/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Pembahasan Kandidat Kepala Sekretariat Perusahaan Discussion of Candidates for Head of Corporate Secretary	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
2	5 Januari 2024 January 5, 2024	002/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Penjualan Persediaan Kurma Dates Inventory Sales	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
3	5 Januari 2024 January 5, 2024	003/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Pelepasan dan Penghapusbukuan Aset Tanah dan Bangunan Ruko Plaza Gajah Mada, Jalan Simpang Lima/ Jalan Gajah Mada Blok C/19, Semarang Disposal and Write-off of Land and Building Assets of Shophouse at Gajah Mada Plaza, Simpang Lima Street/Gajah Mada Street Block C/19, Semarang	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
4	10 Januari 2024 January 10, 2024	004/Ris. Radir/ PPI/I/2024	1. Penurunan Harga Pupuk a. Pupuk ZA Eks Wilmar Cabang Padang b. Pupuk KCL Eks Wilmar Cabang Padang c. Pupuk NPS Kemasan @25 Kg Cabang Aceh 2. Lain-lain: Pembahasan Pupuk NPK Eks Petro Cabang Palembang 3. Prospek Distribusi Garam Pro Analisa dan Pharmaceutical 1. Fertilizer Price Decrease a. ZA Fertilizer (Ex-Wilmar, Padang Branch) b. KCL Fertilizer (Ex-Wilmar, Padang Branch) c. NPS Fertilizer (25 Kg Packaging, Aceh Branch) 2. Others: Discussion on NPK Fertilizer (Ex-Petro, Palembang Branch) 3. Outlook for Distribution of Pro Analysis and Pharmaceutical Salt	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
5	10 Januari 2024 January 10, 2024	005/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Penyesuaian nama Tunjangan pada Penyesuaian Gaji Pokok Pekerja PT PPI Adjustment of the name of the Allowance in the Adjustment of the Basic Salary of PT PPI Employees	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
6	10 Januari 2024 January 10, 2024	006/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Persetujuan Kredit Modal Kerja Bank BCA Approval of BCA Bank Working Capital Loan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
7	17 Januari 2024 January 17, 2024	007/Ris. Radir/ PPI/I/2024	Bisnis Waste Integrated Solution (WIS) Waste Integrated Solution (WIS) Business	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
8	23 Januari 2024 January 23, 2024	008/Ris. Radir/PPI/I/2024	1. Tindak Lanjut Temuan KAP a. Progres Pembaharuan Sertifikat Aset b. Progress Penyelesaian Pengosongan Aset 2. Tindak Lanjut Temuan BPK a. Sewa Menyewa Gudang antara PT PPI dan PT PKTJ/JOTRC b. Temuan terkait Laporan Progress Pekerjaan Renovasi dan Compliance Perjanjian Sewa Aset Tetap 3. Penentuan Notaris dalam Pelepasan Aset Semarang 1. Follow-up of KAP Findings a. Progress of Asset Certificate Renewal b. Progress of Asset Disposal Completion 2. Follow-up of BPK Findings a. Warehouse Lease between PT PPI and PT PKTJ/JOTRC b. Findings related to the Progress Report of Renovation and Compliance with Fixed Asset Lease Agreement 3. Determination of Notary in Semarang Asset Disposal	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
9	23 Januari 2024 January 23, 2024	009/Ris. Radir/PPI/I/2024	Evaluasi Posisi BOD-1 Evaluation of BOD-1 Position	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
10	23 Januari 2024 January 23, 2024	010/Ris. Radir/PPI/I/2024	1. Audit Tepung 2. Penjualan Cut loss Minyak Goreng Mamamia 1. Flour Audit 2. Cut loss sales of Mamamia Cooking Oil	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
11	23 Januari 2024 January 23, 2024	011/Ris. Radir/PPI/I/2024	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT PPI Tahun 2024 Discussion of the Proposed Organizational Structure of PT PPI Head Office in 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
12	29 Januari 2024 January 29, 2024	012/Ris. Radir/PPI/I/2024	1. Pembahasan turunan atas KPI Perusahaan Tahun 2024 yang telah ditetapkan Holding 2. Tindak Lanjut atas Arahan Manajemen Perihal Pembobotan/Persentase Aspek Financial Pada KPI Pekerja 1. Discussion of derivatives of the Company's KPI for 2024 set by Holding 2. Follow-up on Management's Directions concerning Weighting/Presentation of Financial Aspects in KPI Workers	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
13	29 Januari 2024 January 29, 2024	013/Ris. Radir/PPI/I/2024	Kontrak Manajemen PT BGR Logistik Indonesia dan PT PPI Industri Management Contract of PT BGR Logistik Indonesia and PT PPI Industri	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
14	2 Februari 2024 February 2, 2024	014/Ris. Radir/PPI/II/2024	Persiapan rapat penyelesaian permasalahan PT Perusahaan Perdagangan Table_1 dan PT Nindya Karya sehubungan dengan proyek UPP Medan dan Lampung Ex BGR Preparation of the meeting to resolve the issues of PT Perusahaan Perdagangan Table_1 and PT Nindya Karya related to the UPP Medan and Lampung Ex BGR project	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
15	2 Februari 2024 February 2, 2024	015/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Update Kurma 2. Harga Pokok Penjualan Minyak Goreng Mamamia 1. Date Update 2. Cost of Goods Sold of Mamamia Cooking Oil	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
16	2 Februari 2024 February 2, 2024	016/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pembahasan Pencatatan Aset <i>Off Balance Sheet</i> ke <i>On Balance Sheet</i> Discussion of Recording Off Balance Sheet Assets to On Balance Sheet	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
17	2 Februari 2024 February 2, 2024	017/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Sewa Gudang Kimia 2. Pengelolaan Kegiatan Operasional Pergudangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia oleh PT BGR Logistik Indonesia 1. Chemical Warehouse Rental 2. Management of Warehouse Operational Activities of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia by PT BGR Logistik Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
18	5 Februari 2024 February 5, 2024	018/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Pemutakhiran Peraturan Direksi tentang Pengelolaan Piutang 2. SOP Perluasan Penggunaan Penempatan Modal Kerja Mandiri (PMKM) 3. Pedoman Strategis Pemasokan dan Permintaan serta SOP Rantai Pasok ID FOOD Group & Peraturan Direksi Pengadaan Barang Dagangan PT PPI 4. Pemutakhiran SOP Penjualan Barang Dagangan dan Perbaikan Data Customer, Vendor & Credit Limit di Sistem ERP D365 PT PPI 1. Update of the Board of Directors Regulation on Management of Receivables 2. SOP for Expansion of the Use of Independent Working Capital Placement (PMKM) 3. Strategic Guidelines for Supply and Demand and SOP for Supply Chain ID FOOD Group & Board of Directors Regulation on Procurement of Merchandise at PT PPI 4. Update of SOP for Sales of Merchandise and Improvement of Customer, Vendor & Credit Limit Data in PT PPI's D365 ERP System	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
19	12 Februari 2024 February 12, 2024	019/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pembahasan Tindak Lanjut PT PPI Property Discussion on Follow-up of PT PPI Property	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
20	15 Februari 2024 February 15, 2024	020/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Atas Sisa Stock Tepung Gatotkaca Discussion of Follow-up Plan for Remaining Gatotkaca Flour Stock	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
21	15 Februari 2024 February 15, 2024	021/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Tindaklanjuti Permasalahan Kontrak dengan Perumnas 2. Tindaklanjuti Permasalahan Aset Setiabudi Tengah 3. Persewaan Aset 1. Follow-up on Contract Issues with Perumnas 2. Follow-up on Setiabudi Tengah Asset Issues 3. Asset Leasing	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
22	20 Februari 2024 February 20, 2024	022/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Progress Monoethylene glycol (MEG) dan Diethylene glycol (DEG) 2. Skema Transaksi Bisnis DOP & DINP antara PT PPI dan PT Luxchem 1. Progress of Monoethylene glycol (MEG) and Diethylene glycol (DEG) 2. DOP & DINP Business Transaction Scheme between PT PPI and PT Luxchem	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
23	20 Februari 2024 February 20, 2024	023/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Opsi Penurunan Harga Jual Stock Mendekati Kadaluaarsa 2. Progress Penjualan Kurma 1. Options for Price Reduction of Near-Expired Stock 2. Date Sales Progress	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
24	20 Februari 2024 February 20, 2024	024/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pembahasan terkait pemberian Tunjangan Sekretaris Direksi Discussion on the provision of allowances for the Secretary of the Board of Directors	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
25	29 Februari 2024 February 29, 2024	025/Ris. Radir/PPI/II/2024	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Non Cash Loan PT Bank Permata, Tbk Approval of Extension of Non-Cash Working Capital Loan of PT Bank Permata, Tbk	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
26	29 Februari 2024 February 29, 2024	026/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pembahasan Case Cabang Balikpapan Discussion on Balikpapan Branch Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
27	29 Februari 2024 February 29, 2024	027/Ris. Radir/PPI/II/2024	1. Permasalahan Hukum (Kasus Bantuan Sosial Ex PT BGR) 2. Pembahasan Lawyer dan Gugatan Aset Setiabudi 1. Legal Issues (Social Assistance Case of Ex PT BGR) 2. Lawyer Discussion and Setiabudi Asset Lawsuit	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
28	29 Februari 2024 February 29, 2024	028/Ris. Radir/PPI/II/2024	Pencatatan Aset Pada Laporan Keuangan Recording Assets in Financial Statements	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
29	7 Maret 2024 March 7, 2024	029/Ris. Radir/PPI/ III/2024	- Perubahan Logo PT BGR Logistik Indonesia - Kerja Sama Aset 18 Titik Aset (PMO Property) - Lain-Lain: - Kantin di Graha PPI - Pengelolaan Parkir - Update Optimalisasi Aset di Banjarmasin - Update Kerja Sama Aset dengan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta/PT PKTJ - Update Kerja Sama Aset dengan Pemerintah Kota Semarang - Update Kerja Sama Aset Jalan Mataram Nomor 78 Yogyakarta dengan PT Cheval Mandiri Global	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
30	8 Maret 2024 March 8, 2024	030/Ris. Radir/PPI/ III/2024	- Change of PT BGR Logistik Indonesia Logo - Asset Cooperation of 18 Asset Points (PMO Property) - Others: - Canteen at Graha PPI - Parking Management - Update on Asset Optimization in Banjarmasin - Update on Asset Cooperation with PT Pembangunan Kota Tua Jakarta/PT PKTJ - Update on Asset Cooperation with Semarang City Government - Update on Asset Cooperation of Jalan Mataram Number 78 Yogyakarta with PT Cheval Mandiri Global	- Soegeng Hernowo - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Wien Irwanto berhalangan hadir karena dinas Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs, Wien Irwanto, was unable to attend due to business trip.
31	8 Maret 2024 March 8, 2024	031/Ris. Radir/PPI/ III/2024	- Update Progress PMN Non Tunai - Pembahasan Bisnis Rumput Laut	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
32	13 Maret 2024 March 13, 2024	032/Ris. Radir/PPI/ III/2024	- Pembahasan Tagihan Sewa Gedung Wisma Dharma Niaga - PIC PMO Penguatan Perdagangan dan Supply Chain ID FOOD dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - Pengakhiran Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional dan PT PPI/PT BGR (Persero)	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
33	13 Maret 2024 March 13, 2024	033/Ris. Radir/PPI/ III/2024	- Discussion of Wisma Dharma Niaga Building Lease Invoice - PIC PMO Strengthening Trade and ID FOOD Supply Chain from PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - Termination of Cooperation between the National Housing Development Public Company (Perum) and PT PPI/PT BGR (Persero)	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
34	18 Maret 2024 March 18, 2024	034/Ris. Radir/PPI/III/2024	Penetapan 20% Top Talent PT PPI pada Holding Pangan Talent Committee (HPTC) 2024 Determination of 20% of PT PPI's Top Talents in the Food Holding of Talent Committee (HPTC) 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
35	18 Maret 2024 March 18, 2024	035/Ris. Radir/PPI/III/2024	Pembahasan Aset ex BGR di Jalan Basuki Rahmat KM 9, Sorong Discussion of ex BGR Assets on Jalan Basuki Rahmat KM 9, Sorong	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
36	19 Maret 2024 March 19, 2024	036/Ris. Radir/PPI/III/2024	Pembahasan Aset PT PPI yang terletak di Jalan Proklamasi dan Jalan Blitar Jakarta Pusat Discussion of PT PPI Assets on Jalan Proklamasi and Jalan Blitar, Central Jakarta	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
37	19 Maret 2024 March 19, 2024	037/Ris. Radir/PPI/III/2024	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Approval of Extension of Working Capital Loan of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
38	22 Maret 2024 March 22, 2024	038/Ris. Radir/PPI/III/2024	Penyampaian Kembali Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tanah dan Bangunan Milik PT PPI kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Resubmission of Request for Written Response to the Plan for Write-off and Transfer of Land and Building Assets owned by PT PPI to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
39	22 Maret 2024 March 22, 2024	039/Ris. Radir/PPI/III/2024	Penyampaian Hasil Audit Atas Dugaan Pelanggaran Terperiksa Sdri. Ayu D Rahmawan Eks Branch Manager PT PPI Cabang Balikpapan Submission of Audit Results on Alleged Violations Examined by Ms. Ayu D Rahmawan, Former Branch Manager of PT PPI in Balikpapan Branch 039/Ris.Radir/PPI/III/2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
40	25 Maret 2024 March 25, 2024	041/Ris. Radir/PPI/III/2024	1. Update Stunting Tahun 2024 2. Paket Ramadhan Tahun 2024 3. Pembahasan Representative Office (RO) Belanda 1. 2024 Stunting Update 2. 2024 Ramadhan Package 3. Discussion of the Dutch Representative Office (RO)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
41	25 Maret 2024 March 25, 2024	042/Ris. Radir/PPI/III/2024	Pembahasan Status Pekerja Lulusan RBB, Kepala Divisi Direktorat Operasi dan STO Gudang Cabang Discussion of the Status of RBB Graduate Workers, Head of the Operations Directorate and STO Division of the Branch Warehouse	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
42	28 Maret 2024 March 28, 2024	043/Ris. Radir/PPI/III/2024	1. Pembahasan Tunjangan Hari Raya (THR) 2. Kebijakan Penggunaan Laba 1. Discussion of Holiday Allowance (THR) 2. Policy on Profit Utilization	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
43	28 Maret 2024 March 28, 2024	044/Ris. Radir/PPI/III/2024	1. Hasil Audit dan Tindak Lanjut UPP Medan dan Lampung 2. Hasil Audit dan Tindak Lanjut Case Balikpapan 1. Audit Results and Follow-up of UPP Medan and Lampung 2. Audit Results and Follow-up of Balikpapan Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
44	01 April 2024 April 01, 2024	045/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pelaksana Harian (PLH) Direktur Operasi selama Perjalanan Dinas Acting Director of Operations during Business Trip	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
45	01 April 2024 April 01, 2024	046/Ris. Radir/PPI/IV/2024	1. Pembahasan Sewa Tangki Minyak PT BLI Cabang Semarang dengan PT Pelindo Energi Logistik 2. Tagihan lawyer Kasus Daging 1. Discussion of Oil Tank Lease of PT BLI Semarang Branch with PT Pelindo Energi Logistik 2. Lawyer Invoice for Meat Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
46	01 April 2024 April 01, 2024	047/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Bank BCA oleh PT PPI Industri untuk Penebusan Gula Kristal Putih (Gulavit 1 kg) ke PT Triboga Pangan Raya Approval of Use of BCA Bank Credit Facilities by PT PPI Industri for Redemption of White Crystal Sugar (Gulavit 1 kg) to PT Triboga Pangan Raya	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
47	04 April 2024 April 04, 2024	048/Ris. Radir/PPI/IV/2024	1. Update Permasalahan Aset Setiabudi Tengah 2. Tindak Lanjut Piutang PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (PT PKTJ) 3. Tindak Lanjut Rencana Pengakhiran Kerjasama Perumnas dengan PT PPI 4. Tindak Lanjut Piutang Ditjen Migas 1. Update on Setiabudi Tengah Asset Issues 2. Follow-up on Receivables of PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (PT PKTJ) 3. Follow-up on the Plan to Terminate Perumnas Cooperation with PT PPI 4. Follow-up on Receivables of the Directorate General of Oil and Gas	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
48	04 April 2024 April 04, 2024	050/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pembahasan Case SDM Discussion on Human Capital Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
49	05 April 2024 April 05, 2024	051/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Tindak Lanjut Notisi Audit Tahap 1 atas Audit Kepatuhan Proyek Revitalisasi Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Divre Medan dan Divre Lampung di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Follow-up to the Stage 1 Audit Notification on the Compliance Audit of the Fertilizer Bagging Unit (UPP) Revitalization Project for Medan and Lampung Divisions at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
50	17 April 2024 April 17, 2024	052/Ris. Radir/PPI/IV/2024	1. Kajian Penugasan Pengadaan Daging Kerbau dari Luar Negeri (LN) Tahun 2024 2. Update Surat Perumnas ke BPKP (Tindak Lanjut Rencana Pengakhiran Kerjasama Perumnas dengan PT PPI) 1. Study of the Assignment of Procurement of Buffalo Meat from Abroad (LN) in 2024 2. Update of Perumnas Letter to BPKP (Follow-up on the Plan to Terminate Perumnas Cooperation with PT PPI)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
51	22 April 2024 April 22, 2024	053/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Tindak Lanjut Usulan Perubahan Dewan Komisaris PT BGR LI Follow-up to the Proposed Changes to the Board of Commissioners of PT BGR LI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
52	24 April 2024 April 24, 2024	054/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Bank BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia untuk: a. Reimbursement pembayaran kepada vendor yaitu PT Samudera Tangguh Abadi dan PT Wicaksana Satya Brata b. Rencana pembayaran kepada vendor yaitu PT Pelindo Multi Terminal dan PT Continental Cargo Carrier Indotrans Approval of the Use of BCA Bank Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia for: a. Reimbursement of payments to vendors, namely PT Samudera Tangguh Abadi and PT Wicaksana Satya Brata b. Payment plan to vendors, namely PT Pelindo Multi Terminal and PT Continental Cargo Carrier Indotrans	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan	Direktur Operasi Noverita Anggraeny berhalangan hadir karena dinas. Director of Operations, Noverita Anggraeny, was unable to attend due to business trip.
53	30 April 2024 April 30, 2024	055/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Evaluasi Kinerja Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri/PT PPI Industri Performance Evaluation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri/PT PPI Industri	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
54	30 April 2024 April 30, 2024	056/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum selama Cuti Acting Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs during Leave	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
56	30 April 2024 April 30, 2024	057/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pembahasan status Pekerja Lulusan RBB Batch 2 Discussion of the status of RBB Batch 2 Graduate Workers	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
57	30 April 2024 April 30, 2024	058/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pembahasan lanjutan indikator dan bobot KPI untuk masing-masing unit kerja Further discussion of KPI indicators and weights for each work unit	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
58	30 April 2024 April 30, 2024	059/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pembahasan Rangkaian Kegiatan HUT PT PPI Ke-21 Discussion of the Series of Activities for the 21st Anniversary of PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
59	30 April 2024 April 30, 2024	060/Ris. Radir/PPI/IV/2024	Pembahasan Usulan Kemasan & Label dan Daftar Calon Mitra Supplier Daging Kerbau dari Luar Negeri Tahun 2024 Discussion of Proposed Packaging & Labels and List of Prospective Buffalo Meat Supplier Partners from Abroad in 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
60	30 April 2024 April 30, 2024	061/Ris. Radir/PPI/IV/2024	1. Tindak Lanjut Surat Minat Membeli Tanah dari PT Sungai Budi. 2. Pembahasan Kerjasama Aset (11 Titik Aset). 3. Rencana Pendayagunaan Aset Armada, Aset Inventaris dan Aset Gudang oleh PT BGR Logistik Indonesia dengan Skema Persewaan Jangka Waktu sampai dengan 5 (lima) Tahun. 4. Kerja Sama Aset dengan PT Indigo Mandiri Sejahtera (IMS) 5. Permohonan Koperasi Pegawai PT PPI atas aset Ruko di belakang Graha PPI 6. Rencana Kerja Sama dengan Agen Property 7. Rencana Kerja Sama dengan Konsultan Jasa Penilai Publik 8. Persewaan CTC oleh Bank Mandiri 9. Penyewaan Ruangan Graha PPI oleh PT Bira Semesta	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
61	02 Mei 2024 May 02, 2024	062/Ris. Radir/PPI/V/2024	Pejabat Penandatanganan Salinan Keputusan Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri tentang Penugasan Rangkap Jabatan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri Official Signatory of the Copy of the Shareholders' Resolution of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri concerning the Assignment of Concurrent Position as Acting (PLT) Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri.	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
62	03 Mei 2024 May 03, 2024	063/Ris. Radir/PPI/V/2024	Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan selama Cuti Ibadah Haji Acting Director of Commercial and Development during Hajj Leave	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
63	03 Mei 2024 May 03, 2024	064/Ris. Radir/PPI/V/2024	Pembahasan Case Balikpapan Discussion on Balikpapan Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
64	03 Mei 2024 May 03, 2024	065/Ris. Radir/PPI/V/2024	Lelang Kendaraan PT PPI Tahap Ketiga PT PPI Vehicle Auction Stage Three	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
65	03 Mei 2024 May 03, 2024	066/Ris. Radir/ PPI/V/2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Aset di Jalan H.M. Yamin No. 3, Medan 2. Tagihan BRI life 3. Pembahasan Klasifikasi Intensitas Risiko PPI 4. Aset Jalan Setiabudi Tengah 5. Update Permasalahan hukum 1. Discussion of Follow-up on Asset on Jalan H.M. Yamin No. 3, Medan 2. BRI life Invoice 3. Discussion of PPI Risk Intensity Classification 4. Jalan Setiabudi Tengah Assets 5. Update on Legal Issues	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
66	08 Mei 2024 May 08, 2024	067/Ris. Radir/ PPI/V/2024	1. Pembahasan Aset Jl Yos Sudarso, Tarakan 2. Pembahasan Rencana Pengosongan Aset Jalan Opak, Surabaya 3. Pencatatan Aset Off Balance Sheet di PT PPI 1. Discussion of Assets on Jl Yos Sudarso, Tarakan 2. Discussion of Plan to Asset Disposal on Jalan Opak, Surabaya 3. Recording of Off Balance Sheet Assets at PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
67	14 Mei 2024 May 14, 2024	068/Ris. Radir/ PPI/V/2024	1. Update Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2022 dan Keberatan Pajak Tahun Pajak 2021 2. Update Hasil Audit UPP Medan dan Lampung 3. Update Kunjungan Kerja Komisi IV DPR 4. Update Rutin Harian Cash Flow PT PPI 1. Update on 2022 Tax Audit Results and 2021 Tax Objections 2. Update on UPP Medan and Lampung Audit Results 3. Update on Commission IV DPR Working Visit 4. Daily Routine Update on PT PPI Cash Flow	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
68	15 Mei 2024 May 15, 2024	069/Ris. Radir/ PPI/V/2024	1. Grading Jabatan 2. Penugasan Pegawai di Lingkungan PPI Group 1. Position Grading 2. Employee Assignment within PPI Group	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
69	22 Mei 2024 May 22, 2024	070/Ris. Radir/ PPI/V/2024	1. Pembahasan Materi Persiapan Pra-RUPS 2. Pembahasan Cashflow 3. Kuasa kepada Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum untuk Menandatangani Perjanjian antara PT Nindya Karya dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban pada Revitalisasi dan Pembangunan Gudang Unit Pengantongan Pupuk di Wilayah Medan dan Lampung PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) 1. Discussion of Pre-GMS Preparation Material 2. Discussion of Cashflow 3. Power of Attorney to the Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs to Sign the Agreement between PT Nindya Karya and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia concerning the Settlement of Rights and Obligations in the Revitalization and Construction of Fertilizer Bagging Unit Warehouses in the Medan and Lampung Regions of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
70	22 Mei 2024 May 22, 2024	071/Ris. Radir/ PPI/V/2024	Kerjasama dengan Vendor/Supplier dalam Pelaksanaan Project Kopi, Jahe dan Damar Cooperation with Vendors/Supplier in the Implementation of Coffee, Ginger and Damar Projects	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
71	22 Mei 2024 May 22, 2024	072/Ris. Radir/PPI/V/2024	Agenda SDM - Pembahasan Case Klaim Fiktif Kacamata dan Rawat Inap HC Agenda - Discussion of Fictitious Claim Case for Glasses and Hospitalization	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
72	22 Mei 2024 May 22, 2024	073/Ris. Radir/PPI/V/2024	Agenda SDM - Penambahan Tunjangan Grade dan KPI HC Agenda - Addition of Grade and KPI Allowance	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
73	31 Mei 2024 May 31, 2024	074/Ris. Radir/PPI/V/2024	1. Update Progress Ganti Nama Sertifikat 2. Biaya Pengosongan Aset Jalan Opak, Surabaya 1. Update on Certificate Name Change Progress 2. Asset Disposal Costs for Jalan Opak, Surabaya	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
74	4 Juni 2024 June 4, 2024	075/Ris. Radir/PPI/VI/2024	1. Permohonan Persetujuan Kerjasama Aset 2. Sewa Sebagian Aset Jalan Kalimas Nomor 41 Surabaya untuk Digunakan Sebagai Gudang Bahan Kimia Berbahaya (B2) 3. Penawaran Aset Yamin Medan 1. Application for Asset Cooperation Approval 2. Lease of Part of the Asset of Jalan Kalimas No. 41 Surabaya to be Used as a Hazardous Chemical Warehouse (B2) 3. Offer of Yamin Medan Assets	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
75	13 Juni 2024 June 13, 2024	076/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk Pembayaran Vendor kepada PT Pelindo Multi Terminal Approval of the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Vendor Payments to PT Pelindo Multi Terminal	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
76	13 Juni 2024 June 13, 2024	077/Ris. Radir/PPI/VI/2024	1. Update Temuan Cabang Gorontalo 2. Update Temuan Cabang Madiun 3. Update Temuan Cabang Palembang 4. Update Temuan Cabang Kupang 5. Update Temuan Cabang Surabaya 6. Update Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Salah Transfer Dalam Transaksi Pengadaan Sodium Syanida 1. Update on Findings from Gorontalo Branch 2. Update on Findings from Madiun Branch 3. Update on Findings from Palembang Branch 4. Update on Findings from Kupang Branch 5. Update on Findings from Surabaya Branch 6. Update on Follow-up to BPK Findings regarding Incorrect Transfer in Sodium Cyanide Procurement Transaction	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
77	13 Juni 2024 June 13, 2024	078/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Pemberian Kuasa dari Direksi kepada Kepala Divisi Aset dan K3LL untuk Menandatangani Dokumen Negosiasi Harga Pembelian Aset Medan Granting of Proxy from the Board of Directors to the Head of Asset and K3LL Division to Sign Medan Asset Purchase Price Negotiation Documents	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
78	14 Juni 2024 June 14, 2024	079/Ris. Radir/PPI/VI/2024	1. Perubahan RKAP 2. Pembahasan Tanda Tangan Elektronik 3. Perkara Aset Setiabudi Tengah 1. Amendment to RKAP 2. Discussion on Electronic Signature 3. Setiabudi Tengah Asset Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
79	25 Juni 2024 June 25, 2024	080/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI Approval of BCA Credit Facility Usage by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
80	26 Juni 2024 June 26, 2024	081/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Tagihan Atas Koreksi Selisih Stok Penyaluran Pupuk Subsidi dari Kios ke Petani (Case pada PT PPI Cabang Kupang) Invoice for Correction of Stock Discrepancy in Subsidized Fertilizer Distribution from Kiosks to Farmers (Case at PT PPI Kupang Branch)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
81	27 Juni 2024 June 27, 2024	082/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Persetujuan Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT BGR Logistik Indonesia Approval of GMS Agenda and Resolutions of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year of PT BGR Logistik Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
82	27 Juni 2024 June 27, 2024	083/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Persetujuan Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT PPI Industri Approval of GMS Agenda and Resolutions of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year of PT PPI Industri	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
83	27 Juni 2024 June 27, 2024	084/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Pembahasan Insentif Retensi Tahun 2024 Discussion on 2024 Retention Incentive	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
84	27 Juni 2024 June 27, 2024	085/Ris. Radir/PPI/VI/2024	Keikutsertaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam tender pengadaan komoditi pupuk di PT Minamas Plantation Participation of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in the fertilizer commodity procurement tender at PT Minamas Plantation	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
85	4 Juli 2024 July 4, 2024	086/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Agenda SDM - Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) Tahun 2023 HC Agenda - Granting of 2023 Year-End Allowance (TAT) 086/Ris.Radir/PPI/VII/2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
86	10 Juli 2024 July 10, 2024	087/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Persetujuan Penandatanganan Pakta Integritas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./Bank BRI Approval of Integrity Pact Signing from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./Bank BRI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
87	15 Juli 2024 July 15, 2024	088/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bank Garansi BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI Approval of BCA Bank Guarantee Facility Usage by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
88	16 Juli 2024 July 16, 2024	089/Ris. Radir/PPI/VII/2024	1. Hutang PT PPI kepada PT Inti Nabati Lestari 2. Hutang PT PPI kepada PT Mitra Intertrans Forwarding 3. Rencana kerjasama jual beli komoditas pangan dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri 4. Recruitment Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Cabang Pontianak 1. PT PPI's Debt to PT Inti Nabati Lestari 2. PT PPI's Debt to PT Mitra Intertrans Forwarding 3. Planned cooperation for buying and selling food commodities with PT Agrobisnis Banten Mandiri 4. Recruitment of Responsible Pharmacist (APJ) Pontianak Branch	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Noverita Anggraeny	Direktur Komersial & Pengembangan Edhy Rizwan berhalangan hadir karena sedang cuti haji Director of Commercial & Development, Edhy Rizwan, was unable to attend due to hajj leave
89	22 Juli 2024 July 22, 2024	090/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Pembahasan Minyak Goreng Discussion on Cooking Oil	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
90	22 Juli 2024 July 22, 2024	091/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT PPI Tahun 2024 Discussion on Proposed PT PPI Head Office Organizational Structure for 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
91	25 Juli 2024 July 25, 2024	092/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Pembahasan Komite Disiplin Case Madiun Discussion on Disciplinary Committee of Madiun Case	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
92	29 Juli 2024 July 29, 2024	093/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Pembahasan Pekerja BOD-1 Discussion on BOD-1 Employees	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
93	29 Juli 2024 July 29, 2024	094/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Usulan Bisnis Penjualan Minyak Jelantah - PMO WIS Used Cooking Oil Sales Business Proposal - PMO WIS	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
94	31 Juli 2024 July 31, 2024	095/Ris. Radir/PPI/VII/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk Reimbursement kepada Vendor yaitu PT Mitra Gemilang Pasifik, Pelindo Multi Terminal dan PT Samudera Tangguh Abadi Approval of BCA Credit Facility Usage by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors, namely PT Mitra Gemilang Pasifik, Pelindo Multi Terminal and PT Samudera Tangguh Abadi	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
95	6 Agustus 2024 August 6, 2024	096/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Penetapan Jabatan Pjs Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan Appointment of Acting Head of Accounting and Taxation Division	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
96	7 Agustus 2024 August 7, 2024	097/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan SDM - Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT PPI Tahun 2024 HC Discussion - Discussion on Proposed Organizational Structure for PT PPI Head Office and Branch Offices for 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
97	12 Agustus 2024 August 12, 2024	098/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	1. Update posisi tawar PPI terkait kerjasama dengan Perumnas 2. Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Jalan Raya Bekasi KM 17, Jakarta Timur 3. Aset yang beralamat di Komplek Sakura Anpan Blok F No.6 Nagoya, Batam 4. Persewaan Aset PPI 5. Renovasi Aset PT PPI 6. Update PMO Property 1. Update on PPI's bargaining position regarding cooperation with Perumnas 2. Safeguarding Fixed Assets, Land and Buildings, Jalan Raya Bekasi KM 17, East Jakarta 3. Asset at Komplek Sakura Anpan Blok F No.6 Nagoya, Batam 4. PPI Assets Lease 5. Renovation of PT PPI Assets 6. Update on PMO Property	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
98	14 Agustus 2024 August 14, 2024	099/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	- Pembahasan Tindak Lanjut Pelepasan Aset Medan - Update Hasil Pertemuan dengan tim JAMDATUN RI - Tindak Lanjut Meeting dengan BPKP terkait Notisi Aset Medan - Rencana Penggunaan Dana Hasil Penjualan Aset - Tindak Lanjut Meeting dengan BPKP terkait Perumnas - Discussion on Follow-up to Medan Asset Disposal - Update on Meeting Results with JAMDATUN RI team - Follow-up Meeting with BPKP regarding Medan Asset Notice - Plan for Use of Asset Sale Proceeds - Follow-up Meeting with BPKP regarding Perumnas	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
99	14 Agustus 2024 August 14, 2024	100/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan Komite Disiplin Case Pengadaan Barang dan Jasa Non Barang Dagangan, Case Cabang Gorontalo, dan Case Cabang Pekanbaru Discussion on Disciplinary Committee Case for Goods and Services Procurement (Non-Merchandise), Gorontalo Branch Case, and Pekanbaru Branch Case	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
100	22 Agustus 2024 August 22, 2024	101/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan Notisi BPKP atas Rencana Penjualan Aset Tanah dan Bangunan di Jalan HM Yamin Medan Discussion of BPKP Notification on Planned Sale of Land and Building Assets on Jalan HM Yamin Medan	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
101	22 Agustus 2024 August 22, 2024	102/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	- Pembahasan Selisih Kurs Kopi - Peminjaman Dana untuk Pelaksanaan Program Bantuan Pangan atas Pembiayaan Jasa Transporter - Update Pelaksanaan Bantuan Pangan Pemerintah Penanganan Stunting 2024 - Hibah Saham PT Agung Niaga Gunungkidul - Rencana Property Fund - Discussion of Coffee Exchange Rate Differences - Borrowing Funds for the Implementation of the Food Assistance Program for the Financing of Transporter Services - Update on the Implementation of Government Food Assistance for Handling Stunting 2024 - PT Agung Niaga Gunungkidul Stock Grant - Property Fund Plan	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
102	26 Agustus 2024 August 26, 2024	104/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan Penempatan Pekerja BOD-1 s.d BOD-4 pada Struktur Organisasi Kantor Pusat PT PPI Tahun 2024 dan Penempatan Pekerja BOD-1 dan Discussion on the Placement of BOD-1 to BOD-4 Workers in the Organizational Structure of the PT PPI Head Office in 2024 and the Placement of BOD-1 and BOD-4 Workers	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
103	26 Agustus 2024 August 26, 2024	105/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan PMO Property Discussion on PMO Property	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-
104	30 Agustus 2024 August 30, 2024	106/Ris. Radir/PPI/VIII/2024	Pembahasan Perubahan Rancangan Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024 Discussion of Changes to the Organizational Structure Plan of the Main Branch Office of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2024	- Soegeng Hernowo - Wien Irwanto - Edhy Rizwan - Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
105	03 September 2024 September 03, 2024	107/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Persetujuan Penandatanganan Nota Kesepahaman Rencana Kerja Sama Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi antara PT PPI dengan PT Rajawali Nusindo Agreement on the Signing of the Memorandum of Understanding on the Cooperation Plan for the Development of Trade and Distribution Business between PT PPI and PT Rajawali Nusindo	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
106	05 September 2024 September 05, 2024	108/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Pembahasan Penempatan Pekerja BOD-2 sampai dengan BOD-4 pada Struktur Organisasi Kantor Cabang PT PPI Tahun 2024 dan Rancangan Ruangan Divisi sesuai STO Kantor Pusat PT PPI Tahun 2024 di Grha PPI Discussion of the Placement of BOD-2 to BOD-4 Workers in the Organizational Structure of the PT PPI Branch Office in 2024 and the Design of Division Rooms according to the STO of the PT PPI Head Office in 2024 at Grha PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
107	10 September 2024 September 10, 2024	109/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Pembahasan Tanda Tangan Elektronik Discussion on Electronic Signature	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
108	10 September 2024 September 10, 2024	110/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Pembahasan Lanjutan atas Hasil Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo PT PPI Cabang Surabaya Further Discussion on the Results of the Special Audit of Receivables and Inventories of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizers in the Mojokerto and Probolinggo Districts of PT PPI Surabaya Branch	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
109	23 September 2024 September 23, 2024	112/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Pembahasan SDM HC Discussion	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
110	24 September 2024 September 24, 2024	113/Ris. Radir/PPI/IX/2024	- Kerjasama Aset dengan PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa - Property Fund (Pemindahan Kantor) - Property Expose - Kerjasama 3 Titik Aset - Kerjasama Aset Jl. Pesapen 1-3, Surabaya dan Aset Jl Kutilang No.1, Surabaya - Renovasi Aset Jl Gatot Subroto No. 905, Denpasar - Pendayagunaan Aset PT PPI oleh PT BGR Logistik Indonesia - Permohonan Persetujuan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus - Pembahasan Aset yang terletak di Komplek Sakura Anpan Blok F 35, Batam	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
			- Asset Cooperation with PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa - Property Fund (Office Relocation) - Property Expose - Cooperation of 3 Asset Points - Asset Cooperation on Jl. Pesapen 1-3, Surabaya and Asset Jl Kutilang No.1, Surabaya - Renovation of Asset on Jl Gatot Subroto No. 905, Denpasar - Utilization of PT PPI Assets by PT BGR Logistik Indonesia - Request for Approval of Signing of Special Power of Attorney - Discussion of Assets in Sakura Anpan Complex Block F 35, Batam		

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
111	24 September 2024 September 24, 2024	114/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Progress Izin Alat Kesehatan Medical Device Permit Progress	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
112	24 September 2024 September 24, 2024	115/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Rencana Kerjasama Bisnis Alat Kesehatan antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan PT Rajawali Nusindo (Nusindo) Medical Device Business Cooperation Plan between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and PT Rajawali Nusindo (Nusindo)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
113	24 September 2024 September 24, 2024	116/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Pembahasan Bisnis Minyak Jelantah – SBU WIS Discussion on Used Cooking Oil Business – SBU WIS	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
114	27 September 2024 September 27, 2024	117/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk Reimbursement kepada Vendor yaitu PT Karina Yanicha Approval of Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendor, PT Karina Yanicha	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
115	27 September 2024 September 27, 2024	118/Ris. Radir/PPI/IX/2024	Penempatan Sdr.Edwin Lawrence di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Placement of Mr. Edwin Lawrence at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
116	1 Oktober 2024 October 1, 2024	119/Ris. Radir/PPI/X/2024	Pembahasan Jabatan Trainee Discussion of Trainee Positions	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
117	1 Oktober 2024 October 1, 2024	120/Ris. Radir/PPI/X/2024	1. Pembahasan Tagihan Damri (dahulu PERUM Pengangkutan Penumpang Jakarta) terkait Pekerjaan Pengadaan 100 Bus Bukan Baru Eks Jepang Tahun 2003 2. Panggilan Kejaksaan Negeri Gunungkidul terkait Pembahasan Penyelesaian Kasus/Perkara atas Tanah di Kalurahan Kelor (eks Pabrik Mete) untuk Melakukan Negosiasi tentang Penanganan Pemulihan/Penyelamatan Aset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 3. Penagihan Piutang Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap Debitur a.n PT Cipta Niaga 1. Discussion of the Damri Invoice (formerly PERUM Pengangkutan Penumpang Jakarta) related to the 2003 Procurement of 100 Used Japanese Buses. 2. Summons from the Gunungkidul State Prosecutor's Office regarding the discussion of resolving a land case/dispute in Kalurahan Kelor (formerly the Cashew Factory) to negotiate the handling of the recovery/salvage of Gunungkidul Regency Government Assets. 3. Collection of State Receivables for Bank Indonesia Liquidity Assistance Funds from Debtor of PT Cipta Niaga.	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
118	2 Oktober 2024 October 2, 2024	121/Ris. Radir/PPI/X/2024	Pemusnahan Barang ex DT B2 PT Merck Tbk Destruction of ex DT B2 Goods of PT Merck Tbk	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
119	2 Oktober 2024 October 2, 2024	122/Ris. Radir/PPI/X/2024	Kelanjutan Kerjasama Jual Beli Rumput Laut CV Delton Continuation of Seaweed Sale and Purchase Cooperation of CV Delton	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
120	4 Oktober 2024 October 4, 2024	123/Ris. Radir/PPI/X/2024	Perubahan Ketentuan Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja Bagi Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Changes to Leave and Absence Permit Provisions for Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
121	9 Oktober 2024 October 9, 2024	124/Ris. Radir/PPI/X/2024	1. Update Pembahasan Business Plan Tahun 2025-2029 PT PPI 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Atas Kepatuhan Pengelolaan Dana Pinjaman Pemegang Saham, Aset Tetap dan Properti Investasi Tahun Buku 2021 s.d. Semester I 2023 1. Update on Discussion of PT PPI's 2025-2029 Business Plan 2. Report on Audit Results of the Republic of Indonesia's BPK on Compliance with the Management of Shareholder Loan Funds, Fixed Assets, and Investment Properties for the 2021 Fiscal Year to First Semester of 2023	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
122	10 Oktober 2024 October 10, 2024	125/Ris. Radir/PPI/X/2024	Pembayaran Hutang kepada PT Industri Nabati Lestari (PT INL) Debt Payment to PT Industri Nabati Lestari (PT INL)	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
123	10 Oktober 2024 October 10, 2024	126/Ris. Radir/PPI/X/2024	Tindak Lanjut atas Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset PT PPI yang berlokasi di Jalan HM Yamin No.3, Medan Follow-up on the Approval of Write-off and Transfer of PT PPI Assets on Jalan HM Yamin No.3, Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
124	11 Oktober 2024 October 11, 2024	127/Ris. Radir/PPI/X/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT PPI Industri/PPII untuk Penebusan Sodium Cyanide ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Approval of Use of BCA Credit Facility by PT PPI Industri/PPII for Redemption of Sodium Cyanide to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
125	15 Oktober 2024 October 15, 2024	128/Ris. Radir/PPI/X/2024	Tindak Lanjut Pertemuan dengan Bank BRI perihal Rencana Penjualan Aset PT PPI yang berlokasi di Jalan HM Yamin No.3, Medan Meeting Follow-up with BRI Bank regarding the Plan to Sell PT PPI Assets on Jalan HM Yamin No.3, Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
126	15 Oktober 2024 October 15, 2024	129/Ris. Radir/PPI/X/2024	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selama Direktur Utama Cuti Tahunan Appointment of Acting (Act.) President Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia during the President Director's Annual Leave	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
127	15 Oktober 2024 October 15, 2024	130/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Pemberian Persetujuan dan Kewenangan kepada Direktur Utama untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja PT Bank Negara Indonesia, Tbk Granting of Approval and Authority to the President Director for Extension of Working Capital Loan of PT Bank Negara Indonesia, Tbk	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
128	21 Oktober 2024 October 21, 2024	131/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT PPI Industri/PT PPII untuk Penebusan Ayam Boneless Dada ke Supplier Approval of Use of BCA Credit Facility by PT PPI Industri/PT PPII for Redemption of Boneless Chicken Breast to Supplier	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
129	21 Oktober 2024 October 21, 2024	132/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Pembahasan Rencana Outbound dan Rapat Kerja RKAP 2025 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Discussion of Outbound Plan and 2025 RKAP Work Meeting of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
130	21 Oktober 2024 October 21, 2024	133/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja <i>Non Cash Loan</i> PT Bank Permata, Tbk Approval of Extension of Non-Cash Working Capital Loan of PT Bank Permata, Tbk	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
131	28 Oktober 2024 October 28, 2024	134/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Pembayaran Jasa <i>Event Organizer</i> Kegiatan Outbound dan Rapat Kerja Rancangan RKAP 2025 PT PPI Payment for Event Organizer Services for Outbound Activities and Work Meetings for the 2025 RKAP Plan of PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
132	28 Oktober 2024 October 28, 2024	135/Ris. Radir/ PPI/X/2025	1. Persetujuan Perpindahan Gudang Farmasi dari Gudang di Jalan Badur Nomor 3, Medan ke Gudang di Jalan Rumah Potong Hewan Nomor 136, Medan 2. Persetujuan biaya renovasi Gudang di Jalan Rumah Potong Hewan Nomor 136, Medan 1. Approval of the Relocation of the Pharmaceutical Warehouse from the Warehouse at Jalan Badur Number 3, Medan to the Warehouse at Jalan Rumah Potong Hewan No. 136, Medan 2. Approval of the renovation costs of the Warehouse at Jalan Rumah Potong Hewan No. 136, Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
133	28 Oktober 2024 October 28, 2024	136/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Pemberian Tunjangan Kinerja (<i>Pay For Performance</i>) Triwulan III Tahun 2024 untuk Pekerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Provision of Performance Allowance (<i>Pay For Performance</i>) for the Third Quarter of 2024 for Head Office and Branch Office Employees of PT Perusahaan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
134	29 Oktober 2024 October 29, 2024	137/Ris. Radir/ PPI/X/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk <i>Reimbursement</i> kepada Vendor yaitu Koperasi BGR Approval of Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors, BGR Cooperative	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
135	29 Oktober 2024 October 29, 2024	138/Ris. Radir/PPI/X/2024	1. Perpanjangan Penyewaan Aset di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Makassar 2. Penyewaan Aset Komplek Pergudangan Kelapa Gading oleh PT Davina Celine Abigail 3. Perubahan Termin Pembayaran Kerjasama Aset di Jalan Pasar Ilir Palembang 4. Update Gudang Farmasi Cirebon 5. Update List Pengembangan Aset RKAP 2025 PT PPI 1. Extension of Asset Lease on Jalan Tentara Pelajar No. 1 Makassar 2. Lease of Kelapa Gading Warehouse Complex Assets by PT Davina Celine Abigail 3. Changes in Payment Terms for Asset Cooperation on Jalan Pasar Ilir Palembang 4. Update on Cirebon Pharmaceutical Warehouse 5. Update on List of 2025 RKAP Asset Development of PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
136	29 Oktober 2024 October 29, 2024	139/Ris. Radir/PPI/X/2024	Pembahasan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Discussion of Pharmacist in Charge of Pharmacy	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
137	30 Oktober 2024 October 30, 2024	140/Ris. Radir/PPI/X/2024	Penempatan Pekerja Employee Placement	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
138	01 November 2024 November 01, 2024	141/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Keputusan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Kerja RKAP 2025 dan <i>Outbound</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Follow-up Decision on 2025 RKAP Work Meeting and Outbound Activities of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
139	06 November 2024 November 06, 2024	142/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Aset PT PPI di Jalan HM Yamin No.3, Medan Approval of Signing of Sale and Purchase Agreement (PPJB) for PT PPI Assets on Jalan HM Yamin No.3, Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
140	08 November 2024 November 08, 2024	143/Ris. Radir/PPI/XI/2024	1. Pemberian Insentif Khusus Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja PT PPI Tahun Buku 2023 2. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PPI Tahun 2024 serta Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 3. Pemberian Bonus/Jasa Produksi bagi Pekerja PKWTT dan PKWT Tahun Buku 2023 PT PPI 1. Provision of Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of PT PPI in the 2023 Fiscal Year 2. Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PPI Subsidiaries in 2024 and Special Incentives for Performance in the 2023 Fiscal Year 3. Provision of Bonuses/Production Services for Permanent and Contract Employees in the 2023 Fiscal Year of PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
141	08 November 2024 November 08, 2024	144/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Persetujuan Penandatanganan Dokumen terkait Pelepasan Aset PT PPI di Jalan HM Yamin No.3, Medan Approval of Signing of Documents related to the PT PPI Asset Disposal on Jalan HM Yamin No.3, Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
142	15 November 2024 November 15, 2024	145/Ris. Radir/PPI/XI/2024	1. Pembahasan Aset Tetap Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Program Badan Gizi Nasional 2. Permohonan Persetujuan Kerjasama Aset 3. Tindak Lanjut Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pendayagunaan Aset Inventaris Dan Inventaris Software PT PPI Oleh PT BLI Dengan Skema Sewa 1. Discussion of Land and Building Fixed Assets to Support the National Nutrition Agency Program 2. Request for Asset Cooperation Approval 3. Follow-up to the Board of Commissioners' Approval of the Plan for Utilization of Inventory Assets and Software Inventory of PT PPI by PT BLI with a Rental Scheme	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
143	21 November 2024 November 21, 2024	146/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Tindak Lanjut PT PPI Property Follow-up of PT PPI Property	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
144	21 November 2024 November 21, 2024	147/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Rencana Penggunaan Dana Hasil Penjualan Aset PT PPI di Jalan H.M Yamin No. 3 Medan Planned Use of Proceeds from Sale of PT PPI Assets on Jalan H.M Yamin No. 3 Medan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
145	21 November 2024 November 21, 2024	148/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Persetujuan Perpanjangan Kredit Modal Kerja PT Bank Central Asia Tbk Approval of Extension of PT Bank Central Asia Tbk Working Capital Loan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
146	21 November 2024 November 21, 2024	149/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) No. LHP: 24/LHP/IX-XX.3/8/2024 Tanggal 30 Agustus Follow-up on the Audit Result Report of the Audit Board of Indonesia (BPK RI) No. LHP: 24/LHP/IX-XX.3/8/2024 Dated August 30	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
147	29 November 2024 November 29, 2024	150/Ris. Radir/PPI/XI/2024	1. Persewaan Aset Gudang Kelapa Gading oleh BULOG 2. Persewaan BLI 3. Renovasi Aset di Bandung 4. Tindak Lanjut atas Penyertaan Dana PPI di Sejumlah Investasi 1. Kelapa Gading Warehouse Asset Lease by BULOG 2. BLI Lease 3. Asset Renovation in Bandung 4. Follow-up on PPI Fund Participation in Several Investments	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
148	29 November 2024 November 29, 2024	151/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Bantuan Hukum dalam Kasus Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 oleh Eks Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Legal Aid in the Sugar Importation Case at the Ministry of Trade from 2015 to 2017 by the Former Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
149	29 November 2024 November 29, 2024	152/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Komersial dan Pengembangan dan Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selama Cuti Tahunan Appointment of Acting Director of Commercial and Development and Director of Operations of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia during Annual Leave	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
150	29 November 2024 November 29, 2024	153/Ris. Radir/PPI/XI/2024	1. Melanjutkan Rapat Direksi yang sebelumnya dilakukan pada Jumat, 8 November 2024 dengan nomor radir 143/Ris.Radir/PPI/XI/2024; 2. Pengali Pemberian Bonus/Jasa Produksi Tahun Buku 2023; 3. Pemberian Insentif Bagi Tenaga Alih Daya Non Tenaga Dasar Tahun Buku 2023; 4. Pemberian Bonus/Jasa Produksi Bagi Pekerja Tetap, Pekerja Tidak Tetap dan Insentif Bagi Tenaga Kerja Alih Daya Non Tenaga Dasar Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1. Continuing the Board of Directors Meeting previously held on Friday, November 8, 2024, with meeting number 143/Ris.Radir/PPI/XI/2024; 2. Bonus/Production Services Multiplier for the 2023 Fiscal Year; 3. Provision of Incentives for Non-Core Outsourced Personnel for the 2023 Fiscal Year; 4. Provision of Bonuses/Production Services for Permanent Employees, Contract Employees and Incentives for Non-Core Outsourced Personnel for the 2023 Fiscal Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
151	29 November 2024 November 29, 2024	154/Ris. Radir/PPI/XI/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Kredit BCA oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI untuk Reimbursement kepada Vendor yaitu Koperasi BGR Logistik Indonesia, Pelindo Multi Terminal, CV Dakita Sejahtera, PT Mitra Bandar Niaga dan CV Gemilang Mitra Solusindo Approval for the Use of BCA Credit Facilities by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI for Reimbursement to Vendors, namely Koperasi BGR Logistik Indonesia, Pelindo Multi Terminal, CV Dakita Sejahtera, PT Mitra Bandar Niaga and CV Gemilang Mitra Solusindo	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
152	3 Desember 2024 December 3, 2024	155/Ris. Radir/PPI/XII/2024	1. Update Pelaksanaan Importasi Daging 2. Pembahasan Pembayaran Importasi Daging 1. Update on Meat Importation Implementation 2. Discussion of Meat Importation Payments	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
153	5 Desember 2024 December 5, 2024	156/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Penetapan Jabatan Pjs Kepala Divisi Perencanaan Strategis Appointment of Acting Head of Strategic Planning Division	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
154	5 Desember 2024 December 5, 2024	157/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Uang Muka Pembelian pada CV Delton, PT Kebula Raya Bestari, PT Pilar Group Indonesia, dan PT Pilar Agro Nusantara Advances for CV Delton, PT Kebula Raya Bestari, PT Pilar Group Indonesia, and PT Pilar Agro Nusantara	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
155	10 Desember 2024 December 10, 2024	158/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Penyerahan SK Keputusan Pemegang Saham Direksi PT BLI Submission of Shareholder Decision Letter for the Board of Directors of PT BLI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Absence, and Their Reasons
156	13 Desember 2024 December 13, 2024	159/Ris. Radir/PPI/XII/2024	1. Rencana Pelepasan Aset ex.BGR di Jalan Jogja-Nanggalan, Sentolo, Kulonprogo terkait Proyek Tol Solo-Kulonprogo 2. Update Laporan Kunjungan Aset di Palembang 3. Update Laporan Kunjungan Aset di Makassar 1. Plan for Divestment of ex. BGR Assets on Jalan Jogja-Nanggalan, Sentolo, Kulonprogo related to the Solo-Kulonprogo Toll Road Project 2. Asset Visit Report Update in Palembang 3. Asset Visit Report Update in Makassar	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
157	13 Desember 2024 December 13, 2024	160/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Kepemilikan Saham PT Multi Bintang Indonesia, Tbk oleh PT PPI Share Ownership in PT Multi Bintang Indonesia, Tbk by PT PPI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
158	13 Desember 2024 December 13, 2024	161/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selama Cuti Tahunan Appointment of Acting Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia during Annual Leave	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
159	18 Desember 2024 December 18, 2024	162/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bank Garansi PT Bank Central Asia Tbk oleh PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI Approval for the Use of Bank Guarantee Facility of PT Bank Central Asia Tbk by PT BGR Logistik Indonesia/PT BLI	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
160	19 Desember 2024 December 19, 2024	163/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Pembahasan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Discussion of Sales Invoices and Tax Invoices	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
161	19 Desember 2024 December 19, 2024	164/Ris. Radir/PPI/XII/2024	1. Penetapan Kurs pada Nilai PraKal dan NaKal 2. Finalisasi Konsolidasi Laporan Keuangan sampai dengan Desember 2024 1. Exchange Rate Determination for PreKal and NaKal Values 2. Finalization of Financial Statement Consolidation as of December 2024	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-
162	19 Desember 2024 December 19, 2024	165/Ris. Radir/PPI/XII/2024	Pembahasan Rencana DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Pekerja Discussion of Employee DPLK (Financial Institution Pension Fund) Plan	1. Soegeng Hernowo 2. Wien Irwanto 3. Edhy Rizwan 4. Noverita Anggraeny	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi | Recapitulation and Attendance Rate of the Board of Directors in the Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran Attendance
Soegeng Hernowo (Direktur Utama President Director)	161	161	0	100%
Wien Irwanto (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs)	161	157	4	98%
Edhy Rizwan (Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development)	161	145	16	90%
Noverita Anggraeny (Direktur Operasi Director of Operations)	161	160	1	99%
Rata-rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				97%

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2024

Informasi mengenai daftar kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2024

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2024, Direksi telah menjalankan agenda sebagai berikut:

- Menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meliputi profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan efisiensi dalam seluruh aspek operasional.
- Menetapkan dan menyesuaikan strategi bisnis Perseroan dengan kondisi ekonomi global dan nasional, termasuk menghadapi tantangan fluktuasi nilai tukar, inflasi global, serta kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi dan ekspor.
- Mengembangkan dan memperkuat jaringan distribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Kluster BUMN Pangan.
- Menjamin kelangsungan usaha dan pencapaian target Perseroan, termasuk realisasi pendapatan sebesar Rp3.099,40 miliar atau 104,94% dari target RKAP 2024.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan, serta menyimpan dan memelihara dokumen penting seperti Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi.
- Menyusun dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tepat waktu untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
- Melaksanakan pengembangan SDM melalui pelatihan, manajemen kinerja, serta penataan organisasi agar selaras dengan tujuan strategis Perseroan.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan digitalisasi (ERP dan CRM) untuk efisiensi operasional dan peningkatan layanan.

Board of Directors Competency Development Program in 2024

Information on the list of training and competency development activities attended by members of the Board of Directors throughout 2024 is available in the Company Profile Chapter.

Report on the Implementation of the Board of Directors' Duties in 2024

Regarding the implementation of duties in 2024, the Board of Directors has implemented the following agendas:

- Managed the Company in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), covering professionalism, transparency, accountability, integrity, and efficiency in all operational aspects.
- Established and adapted the Company's business strategy to global and national economic conditions, including addressing the challenges of exchange rate fluctuations, global inflation, and government policies related to subsidized fertilizer and exports.
- Developed and strengthened the distribution network to support national food security as part of the Food SOE Cluster.
- Ensured business continuity and achieved the Company's targets, including revenue realization of Rp3.099.40 billion, or 104.94% of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) target.
- Held General Meetings of Shareholders (GMS) in accordance with regulations, and stored and maintained important documents such as GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes, and Board of Directors Meetings.
- Prepared and submitted the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company Work Plan and Budget (RKAP) in a timely manner to support the achievement of strategic objectives.
- Implemented human capital development through training, performance management, and organizational restructuring to align with the Company's strategic objectives.
- Developed and implemented information technology and digitalization systems (ERP and CRM) for operational efficiency and service improvement.

- Melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkontribusi terhadap 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG), termasuk kemitraan dengan pelaku UMK.
- Melakukan manajemen risiko secara aktif melalui stress test, skenario planning, dan penilaian risiko untuk memastikan keberlangsungan usaha.
- Implemented Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs that contribute to the 8 Sustainable Development Goals (SDGs), including partnerships with Micro and Small Enterprises.
- Actively conducted risk management through stress tests, scenario planning, and risk assessments to ensure business continuity.

Keputusan Direksi Tahun 2024 | Board of Directors Resolution in 2024

No	Tanggal Kebijakan Policy Date	Jenis Type	No Kebijakan Policy Number	Judul Title
1	11/11/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	35/PERDIR/PPI/XI/2024	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengiriman Produk Daging Kerbau/Sapi Impor PT PPI Standard Operating Procedure (SOP) for Shipping Imported Buffalo/Beef Meat Products from PT PPI
2	11/11/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	34/PERDIR/PPI/XI/2024	Disaster Recovery Plan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Disaster Recovery Plan of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
3	10/4/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	31/PERDIR/PPI/X/2024	Pedoman Penempatan Modal Kerja Mandiri (PMKM) dan Penempatan Modal Kerja Terbatas (PMKT) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Guidelines for Independent Working Capital Placement (PMKM) and Limited Working Capital Placement (PMKT) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
4	10/4/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	30/PERDIR/PPI/X/2024	Standar Operasional Prosedur (SOP) Registrasi Produk Hewan Daging Kerbau/Sapi Impor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Standard Operating Procedure (SOP) for Registration of Imported Buffalo/Beef Meat Products of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
5	12/31/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	37/PERDIR/PPI/XII/2024	Pedoman Ketentuan Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja Bagi Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Guidelines to Leave and Absence Permit Provisions for Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
6	12/17/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	36/PERDIR/PPI/XII/2024	Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Strategic Management Guidelines for Risk Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
7	12/20/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	15/DKMRSU/SE/PPI/XII/2024	Surat Edaran Tentang Cuti Bersama Hari Raya Natal Tahun 2024 Circular Letter on Joint Holiday for Christmas 2024
8	11/29/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	014/DKMRSU/SE/PPI/XI/2024	Standarisasi Formulir Penagihan Piutang dan Penerimaan Jaminan Piutang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Standardization of Accounts Receivable Collection Forms and Collateral Receipt of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
9	10/2/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	29/PERDIR/PPI/X/2024	Jabatan Trainee PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Trainee Position of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
10	11/25/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	13/DKMRSU/SE/PPI/XI/2024	Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional Implementation of the 2024 Regional Head Election Voting Day as a National Holiday
11	11/11/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	87/DU/SKD/PPI/XI/2024	Tim Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) Tahun 2024-2029 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Long Term Work Plan (RJP) Preparation Team for 2024-2029 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
12	11/21/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	08/DU/SE/PPI/XI/2024	Ketentuan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Provisions for Playing the National Anthem Indonesia Raya in the Head Office and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia



No	Tanggal Kebijakan Policy Date	Jenis Type	No Kebijakan Policy Number	Judul Title
13	11/11/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	33/PERDIR/PPI/XI/2024	Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia General Policy on Information Technology Governance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
14	10/8/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	79/DU/SKD/PPI/X/2024	Perubahan Tim Counter Part Pelepasan Hak (Penjualan) Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Jl H.M Yamin Nomor 3, Kesawan, Medan Changes to the Counterpart Team for the Disposal of Rights (Sale) of Assets of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia at Jl H.M Yamin Number 3, Kesawan, Medan
15	11/5/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	86/DU/SKD/PPI/XI/2024	Tim Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2023 of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
16	10/30/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	12/DKMRSU/SE/PPI/X/2024	Kepatuhan terhadap Peraturan dan Mitigasi Risiko atas Penugasan Pemerintah dan Kegiatan Komersial di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Compliance with Regulations and Risk Mitigation for Government Assignments and Commercial Activities within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
17	10/30/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	07/DU/SE/PPI/X/2024	Pengendalian Informasi Terkait Penetapan Tersangka Perkara Impor Gula Information Control Related to the Determination of Suspects in Sugar Import Cases
18	9/9/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	28/PERDIR/PPI/IX/2024	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan dan Pendistribusian Daging Kerbau/Sapi Impor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Standard Operating Procedure (SOP) for Procurement and Distribution of Imported Buffalo/Beef Meat of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
19	9/9/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	27/PERDIR/PPI/IX/2024	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembayaran Cadangan Pangan Pemerintah Bantuan Pangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Standard Operating Procedure (SOP) for Payment of Government Food Reserves for Food Assistance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
20	10/8/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	32/PERDIR/PPI/X/2024	Pedoman Tata Naskah Dinas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Guidelines for Official Document Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
21	10/8/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	78/DU/SKD/PPI/X/2024	Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Establishment of the Procurement Committee for Non-Trade Goods and Services of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
22	10/3/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	06/DU/SE/PPI/X/2024	Himbauan Menjalin Hubungan Baik dengan Stakeholder di Wilayah Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Appeal to Establish Good Relations with Stakeholders in the Branch Area of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
23	9/27/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	77/DU/SKD/PPI/IX/2024	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT PPI Establishment of the 2025 PT PPI Company Work Plan and Budget (RKAP) Preparation Team
24	9/4/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	51/DU/SKD/PPI/IX/2024	Pembentukan Tim Disaster Recovery Plan (DRP) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Establishment of the Disaster Recovery Plan (DRP) Team of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
25	8/30/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	31/DU/SKD/PPI/VIII/2024	Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Establishment of the Computer Security Incident Response Team (CSIRT) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
26	8/30/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	30/DU/SKD/PPI/VIII/2024	Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Determination of the Organizational Structure of the Head Office and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

No	Tanggal Kebijakan Policy Date	Jenis Type	No Kebijakan Policy Number	Judul Title
27	9/10/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	05/DU/SE/PPI/IX/2024	Aturan Penerimaan Tamu dan Prosedur Memasuki Ruang Direksi di Lingkungan Kantor Pusat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Grha PPI) Guest Reception Rules and Procedures for Entering the Board of Directors' Room at the Head Office of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Grha PPI)
28	8/27/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	04/DU/SE/PPI/VIII/2024	Himbauan Penggunaan Cap Dinas/Stempel Perusahaan Appeal for Use of Official Stamp/Company Stamp
29	7/30/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	27/DU/SKD/PPI/VII/2024	Pembentukan Tim PMO-3 Subtim Penguatan dan Integrasi Perdagangan PT PPI Establishment of PMO-3 Team, Sub-Team for Trade Strengthening and Integration of PT PPI
30	8/20/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	26/PERDIR/PPI/VIII/2024	Ketentuan Penerimaan Pekerja PT PPI Terms and Conditions for Hiring Employees at PT PPI
31	7/30/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	26/DU/SKD/PPI/VII/2024	Pelepasan Hak (Penjualan) Aset Tanah dan Bangunan Milik PT PPI H.M Yamin No.3 Medan The Disposal of Rights (Sale) of Land and Building Assets owned by PT PPI on H.M Yamin No.3 Medan
32	7/30/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	25/DU/SKD/PPI/VII/2024	Pembentukan Tim Counter Part Pelepasan Hak (Penjualan) Aset PT PPI H.M Yamin Medan Establishment of Counterpart Team for Disposal of Rights (Sale) of PT PPI Assets on H.M Yamin Medan
33	6/28/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	20/PERDIR/PPI/VI/2024	Pedoman Strategis Pemasokan dan Permintaan PT PPI Guidelines on PT PPI Supply and Demand Strategy
34	7/8/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	24/PERDIR/PPI/VII/2024	Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PPI Guidelines on PT PPI Gratuity Control
35	7/30/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	25/PERDIR/PPI/VII/2024	Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT PPI Procedures for Write-off and Transfer of PT PPI's Fixed Assets
36	7/18/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	03/DU/SE/PPI/VII/2024	Reminder atas Pelaksanaan Pedoman Etika Usaha dan Perilaku (Code of Conduct) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Reminder on the Implementation of Guidelines on Business Ethics and Code of Conduct and Collective Labor Agreement (PKB)
37	6/28/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	21/PERDIR/PPI/VI/2024	SOP Identifikasi Kebutuhan Kapasitas Transportasi dan Gudang PT PPI SOP for Identification of Transportation and Warehouse Capacity Needs of PT PPI
38	7/5/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	22/PERDIR/PPI/VII/2024	Penambahan Tunjangan Jabatan Struktural PT PPI Additional of Structural Position Allowances for PT PPI
39	7/5/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	20/DU/SKD/PPI/VII/2024	Pemberian Insentif Retensi Pekerja PT PPI Provision of PT PPI's Employee Retention Incentives
40	7/5/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	23/PERDIR/PPI/VII/2024	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT PPI Guidelines for Procurement of Non-Trade Goods and Services of PT PPI
41	7/8/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	21/DU/SKD/PPI/VII/2024	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT PPI Establishment of the 2025 PT PPI Company Work Plan and Budget (RKAP) Preparation Team
42	6/10/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	16/PERDIR/PPI/VI/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations SOP Pengelolaan Piutang Usaha PT PPI SOP for Accounts Receivable Management of PT PPI
43	6/28/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	02/DU/SE/PPI/VI/2024	Larangan Perjudian dan Melalaikan Pemenuhan Kewajiban terhadap Pinjaman Kepada Bank maupun Lembaga Non Bank Prohibition of Gambling and Neglecting to Fulfill Obligations on Loans to Banks and Non-Bank Institutions
44	6/27/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	19/PERDIR/PPI/VI/2024	SOP Pengadaan, Penerimaan (inbound), dan Pengeluaran (outbound) Barang Dagangan Larangan Terbatas Impor PT PPI SOP for Procurement, Inbound, and Outbound of Restricted Import Merchandise of PT PPI

No	Tanggal Kebijakan Policy Date	Jenis Type	No Kebijakan Policy Number	Judul Title
45	6/27/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	18/PERDIR/PPI/VI/2024	SOP Pengurusan Perizinan dari Kementerian/Lembaga dan Dokumen Kepabeanaan PT PPI SOP for Managing Permits from Ministries/Institutions and Customs Documents of PT PPI
46	6/27/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	17/PERDIR/PPI/VI/2024	Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT PPI Guidelines on PT PPI's Public Information Management
47	3/27/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	09/PERDIR/PPI/III/2024	Pembaharuan atas Peraturan Direksi 20/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 POB K3LL PT PPI Amendments on Board of Directors Regulation 20/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 POB K3LL of PT PPI
48	4/1/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	12/PERDIR/PPI/IV/2024	SOP Pengadaan dan Pendistribusian Daging Kerbau/Sapi Impor PT PPI SOP for Procurement and Distribution of Imported Buffalo/Beef Meat of PT PPI
49	4/1/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	11/PERDIR/PPI/IV/2024	Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pergudangan dan Persediaan Barang Dagangan PT PPI Standard Operating Procedure (SOP) for Warehouse Management and Merchandise Inventory of PT PPI
50	4/1/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	10/PERDIR/PPI/IV/2024	Pedoman Pengadaan Barang Dagangan PT PPI Guidelines for Procurement of PT PPI's Merchandise
51	6/6/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	01/DU/SE/PPI/VI/2024	Hari dan Jam Kerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Working Days and Hours of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
52	5/20/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	15/PERDIR/PPI/V/2024	Grade Individu Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Individual Grade of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's Employees
53	5/31/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	10/DKMRSU/SE/PPI/V/2024	Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 H Tanggal 18 Juni 2024 Joint Holiday for Eid al-Adha 1445 H on June 18, 2024
54	5/17/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	14/PERDIR/PPI/V/2024	Manual Book Sekretariat Perusahaan PT PPI Manual Book of PT PPI's Corporate Secretary
55	5/16/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	09/DKMRSU/SE/PPI/V/2024	Penggunaan Fasilitas Sewa Tempat Tinggal dari Perusahaan Use of housing rent facilities from the Company
56	5/15/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	13/DU/PERDIR/PPI/V/2024	Penilaian Kinerja Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Employee Performance Appraisal of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
57	3/27/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	12/DU/SKD/PPI/III/2024	Perubahan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) PT PPI Changes to the PT PPI Domestic Product Use Acceleration Team (P3DN Team)
58	4/16/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	02/DKP/SE/PPI/IV/2024	Pembaharuan Penetapan Biaya Cabang dan Laba Bersih Pupuk Bersubsidi Update on Branch Cost Determination and Net Profit of Subsidized Fertilizer
59	4/19/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	08/DKMRSU/SE/PPI/IV/2024	Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus dan Hari Raya Waisak 2568 BE Public Holidays and Joint Holidays on the Ascension of Jesus Christ and Vesak Day 2568 BE
60	3/27/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	11/DU/SKD/PPI/III/2024	Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL) PT PPI Policy on PT PPI's Health, Safety, and Environment (HSE)
61	2/28/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	05/PERDIR/PPI/II/2024	SOP Pelaksanaan Program Temani PT PPI SOP for Implementing the "Temani PT PPI" Program
62	3/27/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	08/PERDIR/PPI/III/2024	SOP Biaya yang Dikeluarkan dari Penempatan Modal Kerja Mandiri (PMKM) Pupuk Bersubsidi SOP for Costs Incurred from Independent Working Capital Placement (PMKM) for Subsidized Fertilizer
63	4/5/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	07/DKMRSU/SE/PPI/IV/2024	Penggunaan Fasilitas Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Use of Health Insurance Facilities from the Company
64	4/4/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	06/DKMRSU/SE/PPI/IV/2024	Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H Public Holidays and Joint Holidays for Eid al-Fitr 1445 H

No	Tanggal Kebijakan Policy Date	Jenis Type	No Kebijakan Policy Number	Judul Title
65	3/28/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	01/DKP/SE/PPI/III/2024	Penetapan Biaya Cabang dan Laba Bersih Pupuk Bersubsidi Determination of Branch Costs and Net Profit for Subsidized Fertilizer
66	3/27/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	09/DU/SKD/PPI/III/2024	Tim Pelaksana Program Penugasan Pengadaan Daging dan Telur Unggas Paket Bantuan Pangan Pemerintah Tahun 2024 Tahap I Implementation Team of Assignment Program for Procurement of Poultry Meat and Eggs for the Government's Food Assistance Package in 2024 Phase I
67	3/21/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	08/DU/SKD/PPI/III/2024	Pembentukan Pengurus Kegiatan Olahraga dan Kesenian PT PPI Establishment of Sports and Arts Activity Management of PT PPI
68	2/28/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	06/PERDIR/PPI/II/2024	SOP Tata Kelola Distribusi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PT PPI SOP for Governance of Medical Device Distributor (PAK) Distribution of PT PPI
69	3/6/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	05/DKMRSU/SE/PPI/III/2024	Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan 1445 H Regulation of Working Hours During the Holy Month of Ramadan 1445 H
70	2/28/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	07/DU/SKD/PPI/II/2024	Internal Audit Charter PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Internal Audit Charter of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
71	3/5/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	04/DKMRSU/SE/PPI/III/2024	Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 tanggal 12 Maret 2024 Joint Holiday for Bali's Day of Silence and Hindu New Year (Nyepi), Saka New Year 1946, on March 12, 2024
72	1/25/2024	Keputusan Direksi Board of Directors Resolution	05/DU/SKD/PPI/I/2024	Komite Pengarah TI (IT Steering Committee) IT Steering Committee
73	2/7/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	03/DKMRSU/SE/PPI/II/2024	Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional Circular Letter on the Implementation of the 2024 General Election as a National Holiday
74	1/31/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	04/PERDIR/PPI/I/2024	Pedoman Tata Naskah Dinas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Guidelines for Official Document Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
75	1/12/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	03/PERDIR/PPI/I/2024	Pedoman Perolehan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Komersialisasi Aset Tetap Serta Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Guidelines for Acquiring Cooperation Partners in the Framework of Fixed Asset Development and Commercialization, and Business Development of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
76	1/31/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	02/DKMRSU/SE/PPI/I/2024	Penggunaan Fasilitas Pakaian Kerja Use of Workwear Facilities
77	1/8/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	02/PERDIR/PPI/I/2024	Prosedur Operasi Baku (POB) Kedistributoran Unilever PT PPI Standard Operating Procedures (SOP) for Unilever Distributorship of PT PPI
78	1/4/2024	Peraturan Direksi Board of Directors Regulations	01/PERDIR/PPI/I/2024	Pedoman Pinjaman Modal Kerja dari Perbankan/Lembaga Keuangan PT PPI Guidelines for Working Capital Loans from Banks/Financial Institutions of PT PPI
79	1/9/2024	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	01/DKMRSU/SE/PPI/I/2024	Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tanggal 9 Februari 2024 Joint Holiday for Chinese New Year 2575 Kongzili on February 9, 2024

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memikul tanggung jawab penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang operasional Perseroan. Bersama-sama, Dewan Komisaris dan Direksi berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja tata kelola yang kuat, mendorong transparansi, dan menjunjung tinggi standar etika di seluruh organisasi. Dengan menjalankan perannya masing-masing secara efektif, mereka berkontribusi dalam menjaga ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan Perseroan di tengah lanskap bisnis yang terus berkembang. Hal ini akan tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
5. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Rapat Gabungan

Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk koordinasi guna membahas isu dan hal-hal strategis terkait pengelolaan Perseroan, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi.

Di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi umumnya membahas laporan kinerja PPI, mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan Dewan komisaris, serta mendiskusikan masalah atau isu terkini yang sedang dihadapi PPI.

Kebijakan Rapat Gabungan

Pelaksanaan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat gabungan dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

According to their specific roles and responsibilities, both the Board of Commissioners and the Board of Directors bear the crucial responsibility of ensuring the long-term continuity and success of the Company's operations. Together, the Board of Commissioners and the Board of Directors collaborate closely to establish a robust governance framework, promote transparency, and uphold ethical standards throughout the organization. By fulfilling their respective roles effectively, they contribute to maintaining the Company's resilience, competitiveness, and sustainability in the ever-evolving business landscape. This will be reflected :

1. Implementation of good internal control and risk management;
2. Achievement of reasonable returns for shareholders;
3. The interests of Stakeholders are reasonably protected;
4. Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
5. Fulfillment of GCG implementation.

Joint Meeting

The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors periodically as a form of coordination to discuss issues and strategic matters related to the management of the Company, as well as a form of implementation of the direct supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors.

In the joint meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors generally discuss PPI's performance reports, make strategic decisions that require the approval or consideration of the Board of Commissioners, and discuss current problems or issues facing PPI.

Joint Meeting Policy

The implementation of the joint meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the joint meeting is chaired by another Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

The decision-making mechanism in the joint meeting is carried out by deliberation for consensus.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan bersama Direksi. Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di dalam rapat gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The agenda and attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the joint meetings are as follows:

Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024

Details of the Implementation of Meetings, Agendas and Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors in 2024

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners and Board of Directors Absence, and Their Reasons for Absence
1	Online dan Offline, 25 Januari 2024 Online and Offline, January 25, 2024	01/Ris. Ragab/PPI/I/2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Desember 2023; 2. Rancangan RKAP 2024 1. Performance Discussion until December 2023; 2. Draft RKAP 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
2	Online, 22 Februari 2024 Online, February 22, 2024	02/Ris. Ragab/PPI/II/2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Januari 2024; 2. Pembahasan Struktur Organisasi 1. Performance Discussion until January 2024; 2. Discussion of Organizational Structure	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
3	Graha PPI, 22 Maret 2024 Graha PPI, March 22, 2024	03/Ris. Ragab/PPI/III/2024	Pembahasan Kinerja s.d Februari 2024 Performance Discussion until February 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
4	Online, 26 April 2024 Online, April 26, 2024	04/Ris. Ragab/PPI/IV/2024	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Maret 2024 (Triwulan I 2024) Discussion of PT PPI Performance until March 2024 (First Quarter of 2024)	Dewan Komisaris: - Bpk. Hamli [Komisaris Utama] - Bpk. Setiawan Wangsaatmaja [Komisaris] Direksi: - Bpk. Soegeng Hernowo [Direktur Utama] - Bpk. Wien Irwanto [Dir. Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum] - Bpk. Edhy Rizwan [Dir. Komersial & Pengembangan] Board of Commissioners: - Mr. Hamli [President Commissioner] - Mr. Setiawan Wangsaatmaja [Commissioner] Board of Directors: - Mr. Soegeng Hernowo [President Director] - Mr. Wien Irwanto [Director of Finance, Risk Management, HC, and General Affairs] - Mr. Edhy Rizwan [Director of Commercial & Development]	Ibu Noverita [Dir. Operasi] – Perjalanan Dinas Mrs. Noverita [Director of Operations] – Business Trip



No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners and Board of Directors Absence, and Their Reasons for Absence
5	Online dan Offline, 29 Mei 2024 Online and Offline, May 29, 2024	05/Ris. Ragab/PPI/V/2024	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d April 2024 Discussion of PT PPI Performance until April 2024	Dewan Komisaris: 1. Bpk. Hamli [Komisaris Utama] 2. Bpk. Setiawan Wangsaatmaja [Komisaris] Direksi: 1. Bpk. Soegeng Hernowo [Direktur Utama] 2. Bpk. Wien Irwanto [Dir. Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum] 3. Ibu Noverita [Dir. Operasi] Board of Commissioners: 1. Mr. Hamli [President Commissioner] 2. Mr. Setiawan Wangsaatmaja [Commissioner] Board of Directors: 1. Mr. Soegeng Hernowo [President Director] 2. Mr. Wien Irwanto [Director of Finance, Risk Management, HC, and General Affairs] 3. Ms. Noverita [Director of Operations]	Bpk. Edhy Rizwan [Dir. Komersial & Pengembangan] – cuti haji Mr. Edhy Rizwan [Director of Commercial & Development] – Hajj leave
6	Online dan Offline, 27 Juni 2024 Online and Offline, June 27, 2024	06/Ris. Ragab/PPI/VI/2024	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Mei 2024 Discussion of PT PPI Performance until May 2024	Dewan Komisaris: 1. Bpk. Hamli [Komisaris Utama] 2. Bpk. Setiawan Wangsaatmaja [Komisaris] Direksi: 1. Bpk. Soegeng Hernowo [Direktur Utama] 2. Bpk. Wien Irwanto [Dir. Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum] 3. Ibu Noverita [Dir. Operasi] Board of Commissioners: 1. Mr. Hamli [President Commissioner] 2. Mr. Setiawan Wangsaatmaja [Commissioner] Board of Directors: 1. Mr. Soegeng Hernowo [President Director] 2. Mr. Wien Irwanto [Director of Finance, Risk Management, HC, and General Affairs] 3. Ms. Noverita [Director of Operations]	Bpk. Edhy Rizwan [Dir. Komersial & Pengembangan] – cuti haji Mr. Edhy Rizwan [Director of Commercial & Development] – Hajj leave

No.	Tanggal dan Tempat Date and Venue	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners and Board of Directors Absence, and Their Reasons for Absence
7	Online dan Offline, 24 Juli 2024 Online and Offline, July 24, 2024	07/Ris. Ragab/PPI/VII/2024	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Juni 2024 Discussion of PT PPI Performance until June 2024	Dewan Komisaris: - Bpk. Hamli [Komisaris Utama] - Bpk. Setiawan Wangsaatmaja [Komisaris] Direksi: - Bpk. Soegeng Hernowo [Direktur Utama] - Bpk. Wien Irwanto [Dir. Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum] - Ibu Noverita [Dir. Operasi] Board of Commissioners: - Mr. Hamli [President Commissioner] - Mr. Setiawan Wangsaatmaja [Commissioner] Board of Directors: - Mr. Soegeng Hernowo [President Director] - Mr. Wien Irwanto [Director of Finance, Risk Management, HC, and General Affairs] - Ms. Noverita [Director of Operations]	Bpk. Edhy Rizwan [Dir. Komersial & Pengembangan] – cuti haji Mr. Edhy Rizwan [Director of Commercial & Development] – Hajj leave
8	Online dan Offline, 26 Agustus 2024 Online and Offline, August 26, 2024	08/Ris. Ragab/PPI/VIII/2024	Pembahasan Kinerja PT PPI s.d Juli 2024 Discussion of PT PPI Performance until July 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
9	Online dan Offline, 26 September 2024 Online and Offline, September 26, 2024	09/Ris. Ragab/PPI/IX/2024	Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2024 Performance Discussion until August 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
10	Online dan Offline, 28 Oktober 2024 Online and Offline, October 28, 2024	10/Ris. Ragab/PPI/X/2024	Pembahasan kinerja perusahaan s.d September 2024 Discussion of company performance until September 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
11	Graha PPI, 26 November 2024 Graha PPI, November 26, 2024	11/Ris. Ragab/PPI/XI/2024	Pembahasan kinerja perusahaan s.d Oktober 2024 Discussion of company performance until October 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-
12	Online dan Offline, 19 Desember 2024 Online and Offline, December 19, 2024	12/Ris. Ragab/PPI/XII/2024	Pembahasan kinerja perusahaan s.d November 2024 Discussion of company performance until November 2024	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Entire Board of Commissioners and Board of Directors	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan | Recapitulation and Attendance Rate of the Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meetings

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	12	12	0	100%
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	12	12	0	100%
Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)*	2	2	0	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				100%
Direksi Board of Directors				
Soengeng Hernowo (Direktur Utama President Director)	12	12	0	100%
Wien Irwanto (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs)	12	12	0	100%
Edhy Rizwan (Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development)	12	9	3	75%
Noverita Anggraeny (Direktur Operasi Director of Operations)	12	11	1	92%
Rata-rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				92%

*) Gigih Guntoro menjabat sejak 18 Oktober 2024 | Gigih Guntoro has been serving since October 18, 2024

Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2024

- Meningkatkan kinerja komoditas yang diperdagangkan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan kapabilitas dan sumber daya perusahaan. Selain itu, akselerasi segala perizinan yang dibutuhkan (perizinan importasi, pergudangan dan lainnya) agar penjualan dapat didorong kencang dari awal tahun 2025.
- Memastikan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat, tingkat likuiditas yang aman, senantiasa menjaga rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang menjadi *financial covenant* dari kreditur.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan piutang khususnya piutang usaha dan piutang lain-lain serta menindaklanjuti penyelesaian *dispute* yang telah berlarut-larut (antara lain dengan Perumnas dan PT PKTJ/JOTRC) berkoordinasi dengan holding, Kementerian BUMN maupun melalui pihak independen apabila dibutuhkan.
- Melakukan pengaturan yang lebih baik dalam pembayaran hutang usaha dengan renegosiasi dan komunikasi dengan mitra usaha agar gap antara *Account Payable turnover* dan *Account Receivable turnover* dapat berkurang.
- Meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola *exposure* hutang khususnya Kredit Modal Kerja serta melakukan evaluasi secara menyeluruh efektivitas pemanfaatan pinjaman Bank, sehingga peruntukannya dan

Recommendations and Direction from the Board of Commissioners at the Joint Meeting in 2024

- Enhance the performance of traded commodities by prioritizing based on the Company's capabilities and resources. Additionally, accelerate all necessary permits (importation, warehousing, etc.) to significantly boost sales from early 2025.
- Ensure the Company maintains a healthy financial condition with safe liquidity levels, continuously preserving financial ratios and other requirements stipulated by creditors' financial covenants.
- Improve accounts receivable management performance, specifically for trade and other receivables, and follow up on the resolution of long-standing disputes (e.g., with Perumnas and PT PKTJ/JOTRC) in coordination with the holding company, the Ministry of SOEs, or through independent parties if necessary.
- Better manage accounts payable through renegotiation and communication with business partners to reduce the gap between Accounts Payable turnover and Accounts Receivable turnover.
- Increase prudence in managing debt exposure, particularly Working Capital Loans, and conduct a comprehensive evaluation of the effectiveness of bank loan utilization. This ensures that the allocation and

pemanfaatan kredit modal kerja bank tersebut benar-benar berdampak kepada peningkatan profitabilitas PT PPI.

- f. Identifikasi risiko strategis dari seluruh wilayah, utamanya atas pelaksanaan inisiatif strategis sesuai RKAP, proses administrasi dan perizinan, kesiapan sistem infrastruktur, efisiensi dan efektifitas proses, serta dukungan dari kantor pusat untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh setiap wilayah/cabang.
- g. Melakukan evaluasi serta pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang. Evaluasi ini harus berfokus pada kualifikasi SDM yang memiliki wawasan luas dan kreativitas tinggi, sehingga mampu menghadirkan inovasi serta terobosan strategis dalam menangkap peluang bisnis yang ada di wilayahnya. Di samping itu, pemenuhan tenaga pemasaran yang kompeten dan responsif menjadi hal yang krusial (antara lain kebutuhan *spotwalker* di seluruh Kantor Cabang) untuk meningkatkan penjualan produk yang berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja Kantor Cabang maupun Perusahaan secara keseluruhan.
- h. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris atas implementasi struktur organisasi baru PT PPI yang sudah *redeploy* sejak bulan September 2024 untuk memastikan efektivitas struktur organisasi baru tersebut dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai RKAP 2025 dan langkah-langkah perbaikannya ke depan.
- i. Meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan untuk memastikan perbaikan *exposure* profil risiko PT PPI yang masih dominan berada pada zona *moderate to high risk*, di antaranya dengan *monitoring* program mitigasi risiko yang lebih intensif di setiap unit kerja baik di Kantor pusat maupun Wilayah/Cabang.
- j. Menjalankan penugasan pemerintah dengan penuh kehati-hatian dan perencanaan/kajian yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan beban biaya lain-lain yang mungkin timbul. Dalam transaksi dan kontrak PT PPI dengan mitra *supplier* dan *buyer* agar dilakukan dengan cermat dan direksi agar memastikan posisi *legal standing* PT PPI dalam setiap kontrak/perjanjian kuat dan aman.
- k. Melakukan finalisasi Rencana Jangka Panjang (RJP) 5 tahunan PT PPI serta anak perusahaan, dan diselaraskan dengan RJP PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai *Holding* BUMN Pangan.
- l. Menindaklanjuti temuan internal dan eksternal secara tuntas setiap temuan, memonitor tindakan aksi perbaikannya (*corrective actions*) sesuai tenggat waktu sekaligus memastikan agar tidak terjadi temuan

use of these working capital loans truly contribute to an increase in PT PPI's profitability.

- f. Identify strategic risks across all regions, particularly concerning the implementation of strategic initiatives in accordance with the RKAP, administrative and permitting processes, infrastructure system readiness, process efficiency and effectiveness, and headquarters support to resolve challenges faced by each region/branch.
- g. Evaluate and fulfill Human Capital (HC) needs at both Headquarters and all Branch Offices. This evaluation must focus on HC qualifications that possess broad insights and high creativity, enabling them to introduce innovation and strategic breakthroughs in seizing existing business opportunities within their respective regions. Furthermore, meeting the need for competent and responsive marketing personnel (including the demand for *spotwalkers* in all Branch Offices) is crucial to increasing product sales that significantly contribute to the overall performance of both Branch Offices and the Company.
- h. Evaluate and report results to the Board of Commissioners on the implementation of PT PPI's new organizational structure, which has been redeployed since September 2024. This is to ensure the new structure's effectiveness in supporting performance achievement according to the 2025 RKAP and future improvement measures.
- i. Enhance the effectiveness of risk management implementation within the Company to improve PT PPI's risk profile exposure, which remains dominant in the moderate to high-risk zone. This includes more intensive monitoring of risk mitigation programs in each work unit, both at Headquarters and in Regions/Branches.
- j. Execute government assignments with prudence and comprehensive planning/assessment to avoid incurring potential miscellaneous costs. In PT PPI's transactions and contracts with supplier and buyer partners, exercise due diligence, and the board of directors must ensure that PT PPI's legal standing in every contract/agreement is strong and secure.
- k. Finalize PT PPI's 5-year Long-Term Plan (RJP) and its subsidiaries, aligning it with the RJP of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the Food SOE Holding.
- l. Thoroughly follow up on all internal and external findings, monitor corrective actions according to deadlines, and ensure no recurring findings, while reporting regularly to the Board of Commissioners.

berulang dan melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

- m. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Selain itu, Direksi agar melakukan evaluasi atas efektivitas *Whistleblowing System* (WBS), menyusun dan menerapkan program anti *fraud*, khususnya dalam rangka pencegahan dan deteksi potensi terjadinya perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai/pejabat PPI termasuk anak perusahaan.
- n. Memastikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 dapat disampaikan tepat waktu sebagaimana target dalam *Key Performance Indicator* PT PPI Tahun 2025 (30 Maret 2025).
- o. Mengevaluasi kinerja seluruh anak perusahaan dan memastikan portofolio bisnis dimaksud telah dikelola secara profesional serta menciptakan peluang sinergi antar perusahaan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar serta menciptakan nilai perusahaan yang lebih tinggi.
- p. Optimalisasi aset yang melibatkan pihak ketiga, senantiasa mengacu dan memperhatikan secara seksama POB Aset yang telah dimiliki perusahaan serta peraturan-peraturan lain yang terkait sehingga terpenuhi aspek *governance* dan terhindar dari risiko hukum di kemudian hari.

m. Enhance the effectiveness of the internal control system to support the achievement of company goals and objectives. Additionally, the Board of Directors should evaluate the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS), and develop and implement an anti-fraud program, specifically for the prevention and detection of potential fraudulent acts committed by PPI employees/officials, including its subsidiaries.

- n. Ensure the 2024 Audited Financial Statements are submitted on time, as targeted in PT PPI's 2025 Key Performance Indicators (March 30, 2025).
- o. Evaluate the performance of all subsidiaries and ensure that their business portfolios are managed in a professional manner, creating synergy opportunities between companies for greater efficiency and higher corporate value creation.
- p. Optimize assets involving third parties, consistently referencing and carefully adhering to the Company's Asset POB and other relevant regulations to ensure governance aspects are met and to avoid future legal risks.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan keberagaman komposisi dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman berkarier dari masing-masing kandidat, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompleksitas pengembangan bisnis perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan pemahaman mengenai sistem manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang cakap pada bidang yang dibutuhkan PPI serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman komposisi menjadi hal penting karena berperan besar dalam mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya latar belakang keberagaman tersebut diharapkan

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors consistently considers diversity in composition, taking into account the expertise, knowledge, and career experiences of each candidate, as well as the organizational needs and business development complexity of the Company.

The appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is made considering integrity, dedication, understanding of corporate management systems, expertise in fields required by PPI, and the ability to dedicate sufficient time to fulfill their duties, as well as other requirements based on legal regulations.

Diversity in composition is essential as it significantly contributes to supporting the management, administration, departmentalization, and execution of duties of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. With diverse backgrounds, it is expected that decision-making alternatives and perspectives will consider

alternative dan perspektif pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan solutif bagi Perseroan.

broader aspects, leading to well-informed and solution-oriented decisions for the Company.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Berikut disampaikan keberagaman latar belakang Dewan Komisaris dan Direksi yang memungkinkan pengambilan keputusan di lingkup Perusahaan berdasarkan berbagai sudut pandang.

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

The following is the diversity of backgrounds of the Board of Commissioners and Board of Directors, which allows decision-making within the Company based on various perspectives.

Nama Name	Warganegara Citizen	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Hamli (Komisaris Utama President Commissioner)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Ekonomi Master of Economics	Berkarier di Bareskrim Polri, Densus 88 Anti Teror, dan Direktur Pencegahan BNPT He worked at the Criminal Investigation Unit of the National Police, Densus 88 Anti-Terrorism, and BNPT Prevention Director	Teknik dan Ekonomi Engineering and Economics	62	Laki-laki Male
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris Commissioner)	Indonesia Indonesian	Doktor (S3) Teknik Lingkungan, Magister Environmental Engineering Doctorate in Environmental Engineering, Master of Environmental Engineering	Berkarier di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat He worked at the West Java Government, Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform, and Regional Government of West Java	Teknik Lingkungan Environmental Engineering	60	Laki-laki Male
Gigih Guntoro (Komisaris Independen Independent Commissioner)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Sosiologi Master in Sociology	Berkarier di Dirjen Migas Kementerian ESDM dan PT Koneba, PT Aviaya Consulting, BNP2TKI, PT Indonesia Power, dan PT Consolidated Services International Inc. He worked as Directorate General of Oil and Gas, the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Koneba, PT Aviaya Consulting, BNP2TKI, PT Indonesia Power, and PT Consolidated Services International Inc.	Teknik Industri dan Sosiologi Industrial Engineering and Sociology	48	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors						
Soengeng Hernowo (Direktur Utama President Director)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Manajemen Master of Management	Berkarier di BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT BRI Agroniaga, Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia He worked at the BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT BRI Agroniaga, Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia	Manajemen Management	61	Laki-laki Male
Wien Irwanto (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Ekonomi Master of Economics	Berkarier di lingkungan Kementerian BUMN, pernah menjabat Direktur Komersial PTPN XII dan Komisaris PT Mandiri Sekuritas He worked at the Ministry of State-Owned Enterprises and once served as the Commercial Director of PTPN XII and the Commissioner of PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi Economy	51	Laki-laki Male

Nama Name	Warganegara Citizen	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Edhy Rizwan (Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development)	Indonesia Indonesian	S1 Ekonomi Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting Economics	Pernah menjabat sebagai Direktur PT Estika Tata Tiara Tbk dan Dewan Komisaris PT Gendis Multi Manis Previously served as Director of PT Estika Tata Tiara Tbk and Board of Commissioners of PT Gendis Multi Manis	Ekonomi Economy	57	Laki-laki Male
Noverita Anggraeny (Direktur Operasi Director of Operations)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Manajemen Master of Management	Berkarier di PPI sejak tahun 2021. Pernah menduduki berbagai jabatan antara lain VP Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra, VP Departemen Manajemen Risiko, dan Kepala Sekretariat Perusahaan. She has been working at PPI since 2021. She held various positions, including VP of Risk Governance and Strategic Planning Unit, VP of Risk Management Department, and Head of Corporate Secretary.	Manajemen Management	51	Perempuan Female

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris merupakan hasil capaian dari rencana kerja Dewan Komisaris yang terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu: 1) Aspek Perencanaan 2) Aspek Pengawasan dan Nasihat; 3) Aspek Pelaporan; dan 4) Aspek Dinamis. Capaian KPI Dewan Komisaris sebagaimana dalam tabel.

Capaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2024 | Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI) Achievement in 2024

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners Performance Appraisal is the result of the Board of Commissioners' work plan, consisting of 4 assessment aspects, namely: 1) Planning Aspect 2) Supervisory and Advisory Aspect; 3) Reporting Aspect; and 4) Dynamic Aspect. Achievement of the Board of Commissioners' KPI as presented in the table.

NO.	ASPEK DAN PARAMETER ASPECTS AND PARAMETERS	PERIODE PERIOD	SATUAN OUTPUT OUTPUT UNIT	BOBOT WEIGHT	RENCANA OUTPUT OUTPUT PLAN	PENCAPAIAN S.D SEM II 2024 ACHIEVEMENTS UNTIL THE SECOND SEMESTER IN 2024	SKOR dari BOBOT SCORE from WEIGHT
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Aspek Perencanaan Planning Aspects							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2025 Preparing the Work Plan and Budget and KPI of the Board of Commissioners for 2025	Tahunan Annual	Dokumen Document	10	1	1	10,00
Sub Total I				10			10,00
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat Supervisory and Advisory Aspects							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide feedback/recommendations to Shareholders regarding:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan and Budget	Tahunan Annual	Surat Letter	5	1	1	5,00
	b. Laporan Tahunan Annual report	Tahunan Annual	Surat Letter	5	1	1	5,00
	c. Analisis kinerja triwulanan Quarterly performance analysis	Triwulanan Quarterly	Surat Letter	5	3	3	5,00

NO.	ASPEK DAN PARAMETER ASPECTS AND PARAMETERS	PERIODE PERIOD	SATUAN OUTPUT OUTPUT UNIT	BOBOT WEIGHT	RENCANA OUTPUT OUTPUT PLAN	PENCAPAIAN S.D SEM II 2024 ACHIEVEMENTS UNTIL THE SECOND SEMESTER IN 2024	SKOR dari BOBOT SCORE from WEIGHT
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners	Setahun A year	Surat/ Risalah Letter/ Minutes	10	12	6	5,00
3	Rapat Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya rapat dengan Direksi Board of Commissioners Meeting, including meetings with the Board of Directors						
a.	Jumlah Rapat Number of Meetings	Setahun A year	Kali Times	5	12	12	5,00
b.	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Setahun A year	%	5	100	100	5,00
c.	Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Meeting Minutes	Setahun A year	Risalah Minutes	5	12	12	5,00
4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Meeting	Setahun A year	Risalah Minutes	5	36	36	5,00
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite Working Visit of the Board of Commissioners and Committees	Setahun A year	Kali Times	5	12	7	2,92
6	Realisasi rencana kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' work plan	Setahun A year	%	10	100	100	10
Sub Total II				60			57,92
III. Aspek Pelaporan Reporting Aspects							
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the realization of the implementation of the Board of Commissioners' KPI	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5	3	3	5,00
2	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners' supervisory duties report	Tahunan Annual	Laporan Report	10	1	1	10,00
Sub Total III				15			15,00
IV. Aspek Dinamis Dynamic Aspects							
1	Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Public Accounting Firm Proposal to Shareholders	Tahunan Annual	Surat Letter	5	1	1	5,00
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, dll Competency development through seminars, workshops, etc.	Setahun A year	Kali Times	5	3	1	1,67
3	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan Auditor/SPI Response to follow-up on Auditor/IAU findings	Setahun A year	Surat Letter	5	1	1	5,00
Sub Total IV				15			11,67
TOTAL (I+II+III+IV)				100			94,58

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi.

Dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024, Dewan Komisaris telah menetapkan rencana kegiatan secara umum untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas kinerja Direksi.

Board of Directors Performance Appraisal

The Board of Commissioners carries out the Board of Directors' performance appraisal as part of its duties and responsibilities in carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

In the 2024 Board of Commissioners Work Program, the Board of Commissioners has established a general activity plan to evaluate and provide an assessment of the Board of Directors' performance.



Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegal berdasarkan evaluasi atas kinerja perusahaan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RKAP di antaranya sebagaimana tergambar dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PPI" Tahun Buku 2020 (*Audited*).

Penilaian kinerja Direksi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, analisis Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta melalui kunjungan langsung Dewan Komisaris ke cabang. Di samping itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek terkait kegiatan usaha perseroan. Hal tersebut tercermin di dalam laporan-laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

In its practice, the Board of Commissioners collegially assesses the performance of the Board of Directors based on an evaluation of the Company's performance and the achievement of targets set in the RKAP, including as outlined in the Board of Commissioners' Letter Number: 08/DK.Eks/PPI/IV/2021, dated April 30, 2021, concerning the Board of Commissioners' Response and Advice on the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PPI" for the 2020 Fiscal Year (*Audited*).

The Board of Commissioners also carries out an indirect performance appraisal of the Board of Directors through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, analysis by the Board of Commissioners of reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and through direct visits by the Board of Commissioners to branches. In addition, through the Audit Committee and the Risk Oversight Committee, the Board of Commissioners also assesses various aspects of the Company's business activities. This is reflected in the Audit Committee and Risk Oversight Committee reports submitted to the Board of Commissioners.

Capaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2024 | Board of Directors' Key Performance Indicator (KPI) Achievement in 2024

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian KPI KPI Achievement	Nilai Skor KPI KPI Score Value
Perspektif Perspective	Indikator Indicator Sub Indikator Sub Indicator								
A	Nilai Ekonomi dan Sosial Economic and Social Values				50,0				39,8
a.	Finansial Financial								
	1.	EBITDA	Rp miliar Rp billion	Maximize	12,0	128,57	93,30	72,57%	8,7
	2.	Sustainable Financial Position:							
		a. Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	Maximize	7,0	1,22	3,30	37,02%	2,6
		b. Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	Maximize	7,0	3,89%	7,87%	49,43%	3,5
	3.	a. Cashflow Available for Debt Service (CADS)	Rp miliar Rp billion	Maximize	4,0	236,66	823,50	347,97%	4,4
		b. Cash Conversion Cycle	Hari Days	Maximize	4,0	25,07	21,61	110,00%	4,4
		c. Pencapaian AR (Kol 4 dan Kol 5) AR Achievements (Col 4 and Col 5)	%	Maximize	4,0	100%	76%	76,45%	3,1
b.	Sosial Social								
	4.	% Capaian pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Achievements of the implementation of the Government Food Reserves (CPP)	%	Maximize	12,0	100%	127,62%	127,62%	13,2
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				15,0				13,5
	1.	Perbaikan Sustainability & Competitiveness Anak Perusahaan (Restrukturisasi/Penyehatan/ Merger/Divestasi) Target 26 Cabang Improving the Sustainability and Competitiveness of Subsidiaries (Restructuring/Merger/Divestment) of 26 Branches Target	%	Maximize	2,5	100%	76,92%	76,92%	1,9

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian KPI KPI Achievement	Nilai Skor KPI KPI Score Value
Perspektif Perspective	Indikator Indicator								
		Transformasi <i>EBITDA & Growth</i> : EBITDA & Growth Transformation:	%	<i>Maximize</i>	2,5	100%	62,46%	62,46%	1,6
		a. Ketersediaan Cash Cash Availability							
		b. Program <i>Uplift EBITDA</i> EBITDA Uplift Program							
	2.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Implementation Improvement Roadmap	%	<i>Maximize</i>	5,0	100%	220%	220,00%	5,5
	3.	Implementasi Integrasi Fungsi Trading dan Retail serta Rantai Pasok secara Komprehensif: Implementation of Comprehensive Integration of Trading and Retail Functions and Supply Chain:	%	<i>Maximize</i>	5,0	100%	91%	90,91%	4,5
		a. Nilai Sinergi Rantai Pasok Supply Chain Synergy Value							
		b. Nilai Sinergi Penjualan Sales Synergy Value							
C		Kepemimpinan Teknologi Leadership in Technology			15,00				16,3
	1.	Optimalisasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama (ERP) Optimization of System Digitalization in Main Functions (ERP)	%	<i>Maximize</i>	3,5	100%	110%	110,0%	3,9
	2.	Implementasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama Implementation of System Digitalization in Main Functions	%	<i>Maximize</i>	3,5	100%	110%	110,00%	3,9
	3.	Pengembangan Dashboard Informasi Komoditas Pangan & Penyerapan CPP Development of Food Commodity Information Dashboard and CPP Absorption	%	<i>Maximize</i>	4,0	100%	110%	110,00%	4,4
	4.	Penyusunan IT Fundamental IT Fundamentals Preparation	%	<i>Maximize</i>	4,0	100%	106%	106,00%	4,2
D		Peningkatan Investasi Increase of Investment			10,00				10,4
	1.	Optimalisasi Aset dan penyelesaian status aset (<i>clean & clear</i>) Asset Optimization and asset status settlement (<i>clean & clear</i>)	%	<i>Maximize</i>	10,00	100%	104%	103,91%	10,4
E		Pengembangan Talenta Talent Development			10,00				10,3
	1.	Rasio Talenta Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent kategori BOD-1 Millennial Talent Ratio (<42 years old) in Nominated Talent in BOD-1 category	%	<i>Maximize</i>	3,5	18%	25%	138,89%	3,9
	2.	Rasio Talenta Perempuan dalam Nominated Talent kategori BOD-1 Female Talent Ratio in Nominated Talent in BOD-1 category	%	<i>Maximize</i>	3,5	16%	25%	156,25%	3,9
	3.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Qualification Fulfillment of Risk Management Organs	% Rasio Ratio	<i>Maximize</i>	3,0	90%	78%	86,96%	2,6
		JUMLAH SKOR TOTAL SCORE			100,0				90,4

Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

Hasil penilaian (*assessment*) kinerja Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pemberian skema kompensasi bagi Dewan Komisaris dan

The Board of Commissioners and Board of Directors Appraisal

The results of the assessment of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors are used as a basis for consideration in providing compensation

Direksi, serta untuk menentukan keputusan pengangkatan kembali ataupun pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Pada tahun 2024, metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PT PPI menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asessmen GCG BUMN Tahun 2023 dan Surat Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2023. Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) memenuhi 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) prinsip/rekomendasi. Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi semua rekomendasi penerapan GCG sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan salah satu kriteria untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi.

Tabel di bawah ini mengungkapkan hal-hal berikut ini:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

schemes for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as to determine decisions regarding reappointment or termination of the respective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In 2024, the method of measuring the implementation of GCG within PT PPI adopted the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method in accordance with the Letter of the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia to the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024, dated October 15, 2024 concerning the Implementation of SOE GCG Assessment in 2023 and the Letter of the Director of Risk Management and Legal of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to the Subsidiary of PT RNI (Persero) Number 1/SPMB/CG.02.02/RNI.04/25/X/2024 dated October 25, 2024 concerning Notification of Implementation of 2023 Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation. According to the Self Assessment, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) has fulfilled 74 (seventy-four) of the 76 (seventy-six) principles/recommendations. The Board of Commissioners and Board of Directors have fulfilled all recommendations for implementing GCG in accordance with the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI).

Disclosure of Affiliate Relationships of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

The affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders is one of the criteria for measuring the independence of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The table below discloses the following:

1. Affiliation relationships among members of the Board of Directors;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders;
4. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and
5. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/ pengendali.

In the table of disclosure of affiliation relationships below, it can be seen that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI do not have family relationships and financial relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and major/controlling shareholders.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders
Hamli	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Setiawan Wangsaatmaja	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gigih Guntoro	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Soegeng Hernowo	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Wien Irwanto	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Edhy Rizwan	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Noverita Anggraeny	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ : ada | exist ✗ : tidak ada | none

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pada periode tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2024, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors did not own any shares in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum.

Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris terlebih dahulu mengajukan rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk ditinjau dan diputuskan dalam RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/ MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Policy and Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

The determination of remuneration schemes for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is the authority of shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) while adhering to applicable guidelines and procedures.

In its practice, the Board of Commissioners first submits their recommendations regarding the structure and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reviewed and decided upon in the GMS.

The Indicators for Remuneration Determination refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

Indikator utama dalam penentuan remunerasi Direksi, yaitu:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, antara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya; dan
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PPI, adalah sebagai berikut:

The main indicators in determining director remuneration are:

1. Scale of business factors;
2. Complexity of business factors;
3. Inflation rate;
4. Company financial condition and capability;
5. Other relevant factors, and must not contradict laws and regulations.

In addition to referring to the above regulations, the provision of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors also considers several of the following indicators, among others:

1. Remuneration is given when the company makes a profit in the respective fiscal year;
2. Remuneration is given based on market developments in the trading industry;
3. Remuneration is given through the measurement of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of Key Performance Indicators (KPIs) of the Company;
5. Individual work performance;
6. Fairness compared to peer companies; and
7. Consideration of long-term goals and strategies of PPI.

Structure of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises (SOEs), the structure of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Directors
• Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama • The salary of the President Commissioner is 45% of the President Director • The salary of the Commissioner is 90% of the President Commissioner	• Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama • Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama • The salary of the President Director is as the main reference • The salary of the Director is 90% of the President Director
Tunjangan: Allowance: Rp300.270.522,00	Tunjangan: Allowance: Rp1.320.000.000,00
Fasilitas: Facility: Asuransi Kesehatan Health Insurance	Fasilitas: Facility: Asuransi Kesehatan Health Insurance

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Tantiem: | Tantiem:
Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. | Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

Struktur Remunerasi Direksi

Remuneration Structure of the Board of Directors

Tantiem: | Tantiem:
Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. | Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Pada tahun 2024, PPI telah membagikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan uraian sebagai berikut:

Transparency on the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

In 2024, PPI provided remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (dalam 1 tahun) Monthly Remuneration (in 1 Year)		Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2023 (Bersih) Tantiem for the 2023 Fiscal Year (Net)	Remunerasi Total tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance			
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Halim	Komisaris Utama President Commissioner	Rp 720.900.000	Rp 144.180.000	Rp 60.075.000	Rp 37.473.130	Rp 962.628.130
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	Rp 648.810.000	Rp 129.762.000	Rp 54.067.500	Rp 38.358.205	Rp 870.997.705
Gigih Guntoro (*)	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp 131.642.609	Rp 26.328.522	-	-	Rp 157.971.130
Direksi Board of Directors						
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	Rp 1.602.000.000	-	Rp 105.702.740	Rp 48.397.238	Rp 1.756.099.978
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Rp 1.361.700.000	-	Rp 113.475.000	Rp 79.705.383	Rp 1.554.880.383
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Rp 1.361.700.000	-	Rp 89.847.329	Rp 41.686.850	Rp 1.493.234.179
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	Rp 1.361.700.000	-	Rp 35.441.507	Rp 3.021.337	Rp 1.400.162.844

*) Gigih Guntoro diangkat sebagai Komisaris Independen per 18 November 2024 | Gigih Guntoro was appointed as Independent Commissioner as of November 18, 2024

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar More than Rp1 billion – Rp2 billion	-	4
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar More than Rp500 million – Rp1 billion	3	-
Rp500 juta ke bawah Less than Rp500 million	-	-

Bonus Kerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/ MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut:

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - b. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - i. Laba Setelah Pajak;
 - ii. Pencapaian KPI;
 - iii. BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - iv. BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
 - v. Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
 - b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
3. Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
 - b. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

Incentive

Provision of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Regulation of Minister of SOE No.PER-04/ MBU/2014 as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/11/2020. The conditions are as follows:

1. Tantiem/Incentives can be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners if:
 - a. Realization of the lowest soundness level score of 70;
 - b. Minimum KPI achievement of 80% (eighty percent);
 - c. The opinion issued by the auditor is at least Qualified (WDP);
 - d. The condition of the Company is not losing more than the previous year for the Company in a loss condition, or the Company is not at a loss than before in a profit condition. The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.
2. Calculation of Tantiem/Incentives uses internal guidelines set by the Minister of SOEs with the following provisions:
 - a. The determination of Tantiem takes into account:
 - i. Profit After Tax;
 - ii. Achievement of KPIs;
 - iii. SOEs that make aggressive long-term investments;
 - iv. SOEs that carry out government assignments; and/or
 - v. Other factors that can be accounted for in a professional manner.
 - b. Determination of Performance Incentives takes into account the improvement of PPI's performance and financial capability.
3. The composition of the amount of Tantiem/Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the position factors as follows:
 - a. Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director;
 - b. President Commissioner: 45% of the President Director; and
 - c. Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat dan membantu jalannya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan jalannya pengurusan PPI oleh Direksi dan segenap jajarannya serta melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Sekretaris Dewan Komisaris PPI diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut ini:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Periode jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam masa waktu tertentu namun akan berakhir apabila Dewan Komisaris memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau bila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to facilitate the smooth execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established a Board of Commissioners Secretariat, accountable to the Board of Commissioners to assist in the smooth implementation of their duties. The Secretary of the Board of Commissioners assists the Board in providing advices and in facilitating supervisory functions related to the management of PPI by the Board of Directors and all its staff, as well as carrying out administrative and secretarial duties related to the activities of the Board of Commissioners.

Legal Basis

The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners at PPI is based on the following applicable regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
5. Company Articles of Association.

Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is not specified for a specific period but will end if the Board of Commissioners dismisses the Secretary of the Board of Commissioners and/or if the person concerned resigns as Secretary of the Board of Commissioners.

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners Number: 001/DK/PTPPI/VII/2018 dated July 20, 2018, concerning the Dismissal and Appointment of the

Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, posisi Sekretaris Dewan Komisaris dipercayakan kepada Arie Wijaya.

Secretary of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the position of Secretary of the Board of Commissioners is assigned to Arie Wijaya.



Arie Wijaya

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Periode Jabatan:

Mei 2021 s.d. April 2024,
Periode ke-2 : Mei 2024 – April 2026

Term of Office:

May 2021 to April 2024,
2nd Period: May 2024 – April 2026

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 42 tahun | 42 years old

Kelahiran Wonosobo, 18 Juni 1982 | Born in Wonosobo, June 18, 1982

Domisili | Domicile

DKI Jakarta

Pendidikan | Education

D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

D3 State College of Accountancy (2005)

Riwayat Profesi | Professional History

- Sekretaris Dewan Komisaris PPI (2021 - sekarang)
- Subkordinator (Desember 2020 - Sekarang)
- Pengendali Subfungsi (Juni 2020 - Desember 2020)
- Kepala Subbidang Sinergi BUMN (Januari 2019 - Juni 2020)
- Analis Keuangan (Oktober 2015 - Januari 2019)
- Analis Akuntabilitas Kinerja (Oktober 2014 - Oktober 2015)
- Administrasi Keuangan (Mei - Oktober 2014)
- Secretary of the PPI Board of Commissioners (2021 - present)
- Sub-Coordinator (December 2020 - Present)
- Sub-function Controller (June 2020 - December 2020)
- Head of SOE Synergy Sub-Sector (January 2019 - June 2020)
- Financial Analyst (October 2015 - January 2019)
- Performance Accountability Analyst (October 2014 - October 2015)
- Financial Administration (May - October 2014)

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, Sekretaris Dewan Komisaris PPI memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, antara lain:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.

Duties and Responsibilities

Based on Board of Commissioners Decree No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, the Secretary of the Board of Commissioners has primary duties and responsibilities, including:

1. Providing information for the needs of the Board of Commissioners for the purpose of decision-making.
2. Preparing necessary materials related to routine reports of the Board of Directors in managing the Company such as RKAP, Annual Reports, Quarterly Reports, Internal Audit Inspection Reports, and other required reports.
3. Preparing materials or content related to matters requiring decisions from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities conducted by the Board of Directors and all its staff.
4. Preparing and coordinating meeting agendas with attendees.

5. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
 6. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
 7. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.
 8. Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non-rutin Dewan Komisaris.
 9. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 10. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
 11. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
 12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitennya.
 13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.
 14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan atau lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya.
 - b. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris, baik internal maupun rapat bersama Direksi.
 - c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
5. Preparing and sending meeting invitations to attendees.
 6. Confirming the time, place, attendance, and other necessary aspects for the smooth conduct of meetings.
 7. Organizing Board of Commissioners meetings, both internal meetings and with the Board of Directors and their staff, as well as other parties.
 8. Documenting meeting minutes for both routine and non-routine Board of Commissioners meetings.
 9. Distributing meeting minutes to relevant parties.
 10. Preparing considerations, opinions, recommendations, and other decisions from the Board of Commissioners for Shareholders, the Board of Directors, and related parties regarding Company management.
 11. Following up on every decision of the Board of Commissioners as follows:
 - a. Recording every decision made in decision-making forums and their responsibilities.
 - b. Monitoring and checking the progress stages of implementing meeting decisions/considerations, recommendations, opinions, and other decisions of the Board of Commissioners.
 - c. Encouraging the implementation of follow-up actions from meeting decisions, considerations, opinions, recommendations, and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant responsible parties.
 12. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, both for the Board of Commissioners' needs and its committees.
 13. Conducting and coordinating document management and archiving activities.
 14. Conducting and coordinating data and document security within the scope of the Board of Commissioners' control or work, as follows:
 - a. Administering meeting results within the Board of Commissioners, both with the Board of Directors and other parties.
 - b. Administering Board of Commissioners meeting minutes, both internal and joint meetings with the Board of Directors.
 - c. Coordinating the scheduling of Board of Commissioners activities to fulfill the required functions and necessities for carrying out those activities.

- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris.
- e. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/dokumen/laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Hak dan Kewenangan

Berdasarkan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persurutan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Dewan Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
5. Memasuki pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perusahaan.
6. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan.
9. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat-pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/ pihak-pihak di luar Perusahaan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
10. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

- d. Leading, directing, and coordinating the implementation of existing systems and procedures within the Board of Commissioners' work environment.
- e. Administering documents/materials/reports provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

Based on the approval and assignment from the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners is delegated the following rights and authorities:

1. Establishing letter and archive systems and procedures within the Board of Commissioners' environment.
2. Reviewing records, meeting minutes of the Board of Directors, Company documents, and reports for the provision of necessary information to the Board of Commissioners.
3. Requesting data/information /explanations needed by the Board of Commissioners from relevant parties within or outside the Company for the performance of the Board of Commissioners' duties.
4. Reminding and requesting explanations from relevant units/parties about delays in providing materials/reports/documents needed by the Board of Commissioners.
5. Accessing the Company's premises and buildings.
6. Representing the Board of Commissioners in dealing with external and/or internal parties according to the assigned duties and policies set by the Board of Commissioners.
7. Proposing work plans/programs for the Board of Commissioners regarding secretarial functions within the Company.
8. Proposing meeting agendas for Board of Commissioners meetings with parties within or outside the Company.
9. In accordance with the direction of the Board of Commissioners, invite the Board of Directors/other Company officials (with the knowledge of the Board of Directors), Board of Commissioners Committees/ parties outside the Company to attend meetings held by the Board of Commissioners.
10. Attending meetings with parties inside or outside the Company in accordance with policies previously determined by the Board of Commissioners.
11. Using the secretarial facilities of the Board of Commissioners to carry out its duties.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Sekretaris Dewan Komisaris selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait perkembangan Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pasal 128 yang mengatur bahwa:

- (1) Penghasilan sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan memperhatikan kemampuan BUMN yang bersangkutan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji direktur utama BUMN yang bersangkutan;
 - b. tunjangan terdiri dari:
 1. tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium per bulan; dan
 2. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
 - c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
 - d. jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa produksi (bonus) terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi BUMN.
- (3) Selain besaran dan jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan asuransi

Competency Development Program

In order for the Secretary of the Board of Commissioners to always keep abreast of the Company's development, the Secretary of the Board of Commissioners participates in a competency development program, such as seminars, workshops, or other activities that improve the knowledge and competency of the Secretary of the Board of Commissioners.

The competency development activities participated in by the Secretary of the Board of Commissioners throughout 2024 are available in the Company Profile chapter in this annual report.

Remuneration of the Secretary of the Board of Commissioners

The remuneration of the Secretary of the Board of Commissioners refers to the Ministry of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, article 128, which stipulates:

- (1) The income of the secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and the Secretariat staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board is determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs by taking into account the capabilities of the SOE concerned.
- (2) The amount and type of income of the secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a SOE, as referred to in paragraph (1), consists of:
 - a. honorarium at maximum of 15% (fifteen percent) of the SOE President Director's salary concerned;
 - b. the allowance consists of:
 1. transport allowance by 20% (twenty percent) of honorarium per month; and
 2. religious holiday allowance paid once a year of 1 (one) honorarium.
 - c. health facilities in the form of inpatient, outpatient, and medication for the person concerned, excluding family; and
 - d. production service (bonus) may be granted to the secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE, with the amount not exceeding the amount of the lowest production service (bonus) received by an official 1 (one) level below the Board of Directors of SOE.
- (3) In addition to the amount and type of income as referred to in paragraph (2), secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE may be

purna jabatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan fasilitas pakaian kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMN yang bersangkutan.

- (4) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang menerima penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya.

Pajak atas penghasilan sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN ditanggung BUMN yang bersangkutan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan jasa produksi (bonus) bagi staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Di sepanjang tahun 2024 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan, melakukan koordinasi pelaksanaan Rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi termasuk di dalamnya bahan-bahan yang dibutuhkan Dewan Komisaris serta risalah rapat, melakukan koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris, serta melakukan administrasi persuratan maupun laporan-laporan dalam rangka tugas pengawasan Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan.

provided an unemployment insurance of up to 25% (twenty five percent) of the honorarium of secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and workwear facilities by taking into account the SOE's financial capabilities concerned.

- (4) Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE is prohibited from receiving any income other than that referred to in paragraph (2) and paragraph (3).
- (5) The amount and type of income for staff of the Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE as referred to in paragraph (1) as determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE, provided that the total annual income does not exceed the income of other Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE concerned.

Tax on the income for the secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and staff of Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE is borne by the SOE concerned, except for production services (bonus) for the secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and production services (bonus) for the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE.

Brief Report on the Implementation of Duties in 2024

Throughout 2024, the Secretary of the Board of Commissioners has carried out several activities, including providing information for the needs of the Board of Commissioners in decision-making, coordinating the implementation of internal meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors including materials required by the Board of Commissioners and minutes of meetings, coordinated the implementation of work visits by the Board of Commissioners, and administered correspondence and reports in the Board of Commissioner's supervisory duties.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners tasked with assisting in the implementation of supervisory duties and responsibilities, particularly related to financial reporting processes, internal control systems, audit processes, GCG implementation, and monitoring compliance with applicable laws and regulations in the Company.

Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dasar Hukum

Komite Audit PPI dibentuk dengan mengacu peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Piagam Komite Audit

Komite Audit PPI bekerja mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Piagam Komite Audit, di mana mengatur Dasar Hukum, Visi dan Misi, Pembentukan dan Struktur, Persyaratan Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Rapat, Masa Tugas Anggota Komite Audit dan Kode Etik Kerahasiaan.

Structurally, the Audit Committee is directly accountable to the Board of Commissioners and its position is equal to other committees under the Board of Commissioners. However, in carrying out its duties, the Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit (IAU).

Legal Basis

The PPI Audit Committee is established in accordance with the following regulations:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning State- Owned Enterprises;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PPI;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State- Owned Enterprises;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK- 16/S.MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Audit Committee Charter

The PPI Audit Committee serves in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 dated March 26, 2021 concerning the Audit Committee Charter, which regulates the Legal Basis, Vision and Mission, Establishment and Structure, Membership Requirements, Duties and Responsibilities, Authority, Rights and Obligations, Meetings, Term of Office of Audit Committee Members and Confidentiality Code of Conduct.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI.

Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Saat ini, Komite Audit PPI terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan Perseroan.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Di tahun 2024 terdapat pergantian keanggotaan Komite Audit, dengan keterangan sebagai berikut.

Qualifications and/or Criteria of the Audit Committee

All members of the PPI Audit Committee have met the requirements or qualifications of individuals as members of the Audit Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and capable of communicating effectively.
2. Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
3. Having knowledge of PPI's business processes.
4. Having sufficient time to carry out their duties.
5. Not being an insider of an External Auditor, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Composition and Term of Office

The term of office of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of PPI.

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Audit Committee who concurrently hold positions as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their tenure as members of the Board of Commissioners.

Currently, the PPI Audit Committee consists of 3 (three) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) others who are independent or external parties (non-Commissioners) with backgrounds, experience, and other qualifications required by the Company.

Composition and Profile of Audit Committee Members

In 2024, there were changes in the composition of the Audit Committee, with the following explanation.

Tabel kronologi perubahan Komite Audit | Table of Changes Chronology to the Audit Committee

Periode 1 Januari s.d. 27 September 2024 January 1, to September 27, 2024 Period	Periode 27 September s.d. 18 November 2024 September 27, to November 18, 2024 Period	Periode 18 November s.d. 31 Desember 2024 November 18, to December 31, 2024 Period
Hamli (Ketua Komite Audit/Komisaris Utama Chairman of the Audit Committee/President Commissioner)	Hamli (Ketua Komite Audit/Komisaris Utama Chairman of the Audit Committee/President Commissioner)	Gigih Guntoro (Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of the Audit Committee/ Independent Commissioner)
Helman Arif (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)	Baban Sudarman (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)	Baban Sudarman (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)
Reinhard Harianja (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)	Reinhard Harianja (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)	Reinhard Harianja (Anggota Komite Audit Audit Committee Member)

Sehingga susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Thus, the composition of the Audit Committee is as follows:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024 | Audit Committee Composition as of December 31, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner	Gigih Guntoro	KEP-03/DK/PTPPI/XI/2024	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners	Ke-1 First
Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Baban Sudarman	KEP-02/DK/PTPPI/IX/2024	27 September 2024 s.d. 27 September 2027 September 27, 2024 to September 27, 2027	Ke-1 First
Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Reinhard Harianja	KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020	02 Juni 2020 s.d. 02 Juni 2023 02 Juni 2023 s.d. 02 Juni 2026 - June 02, 2020 to June 02, 2023 - June 02, 2023 to June 02, 2026	Ke-2 Second

Gigih Guntoro

Ketua Komite Audit /Komisaris Independen

Chairman of the Audit Committee/
Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Gigih Guntoro dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan. | The profile of the Chairman of the Audit Committee, Gigih Guntoro, is available in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter.

Baban Sudarman

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Periode Jabatan:
27 September 2024 s.d. 27
September 2027, Periode ke-1
Term of Office:
September 27, 2024 to September
27, 2027, First term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 59 tahun | 59 years old

Kelahiran Jakarta, 8 Desember 1965 | Born in Jakarta, December 8, 1965

Domisili | Domicile

DKI Jakarta

Pendidikan | Education

S1 Statistika Institut Pertanian Bogor

Bachelor's Degree in Statistics of Bogor Agricultural University

Riwayat Profesi

- Direktur Manajemen Risiko, PT Mandiri Manajemen Investasi (2021 - 2024)
- Chief Risk Officer (Senior Executive Vice President), PT Mandiri Manajemen Investasi (2020 - 2021)
- Anggota Dewan Pengawas, Perkumpulan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) (2020 - 2023)
- Senior Vice President - Chief Auditor (Group Head), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale and Corporate Center Audit Group (2015-2020)
- Vice President - Risk Manager, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Hongkong (2010 - 2014)
- Vice President - Department Head, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Market & Operational Risk Group - Trading Risk Dept. (1999 - 2010)
- Senior Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Kantor Cabang Paris (1996 - 1999)
- FX Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Biro Pengelolaan Dana, Bagian Bina Dana (Treasury) (1991 - 1996)

Professional History

- Director of Risk Management, PT Mandiri Manajemen Investasi (2021 - 2024)
- Chief Risk Officer (Senior Executive Vice President), PT Mandiri Manajemen Investasi (2020 - 2021)
- Member of the Supervisory Board, Bank Internal Auditor Association (IAIB) (2020 - 2023)
- Senior Vice President - Chief Auditor (Group Head), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale and Corporate Center Audit Group (2015-2020)
- Vice President - Risk Manager, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hong Kong Branch Office (2010 - 2014)
- Vice President - Department Head, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Market & Operational Risk Group - Trading Risk Dept. (1999 - 2010)
- Senior Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Paris Branch Office (1996 - 1999)
- FX Dealer, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, Fund Management Bureau, Fund Development Department (Treasury) (1991 - 1996)

Reinhard Harianja

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Periode Jabatan:
02 Juni 2023 s.d. 02 Juni 2026,
Periode ke-2
Term of Office:
June 02, 2023 to June 02, 2026,
Second term

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 61 tahun | 61 years old

Kelahiran Tarutung, 12 April 1963 | Born in Tarutung, April 12, 1963

Domisili | Domicile

DKI Jakarta

Pendidikan | Education

S2 Manajemen Perbankan Universitas Gadjah Mada

Master of Banking Management, Gadjah Mada University

Riwayat Profesi | Professional History

- Asesor Kompetensi Ikatan Bankir Indonesia (April 2023-sekarang)
- Pengajar Program Branch Manager dan Sespi Bank Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2018-sekarang)
- Anggota Komite Audit PT PPI (2021-Sekarang)
- Competency Assessor of the Indonesian Bankers Association (April 2023-present)
- Lecturer of the Branch Manager Program and Sespi Indonesian Banking Development Institute (2018-present)
- Member of the PT PPI's Audit Committee (2021-present)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Hak dan Kewenangan

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perseroan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perseroan bila diperlukan.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with and in charge of:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor and internal auditor's duties;
2. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring that adequate evaluation procedures exist for all information issued by the Company; and
5. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Audit Committee is authorized to:

1. Access documents, data, and information on employees, funds, assets, and Company resources as needed.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties responsible for internal audit functions, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Obtain necessary information from the Company's internal and external auditors.
4. Conduct special examinations of the Company's internal and external audit results when necessary.
5. Involve independent parties outside of the Audit Committee members to assist in carrying out its duties (if necessary).
6. Propose to the Board of Commissioners the Public Accounting Firm to be selected to perform external

fungsi audit eksternal.

7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit | Declaration of Independence of Audit Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Gigih Guntoro	Baban Sudarman	Reinhard Harianja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Audit selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait perkembangan Perusahaan, Komite Audit mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit.

Pada tahun buku 2024 tidak ada program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 21 kali rapat, dengan penjabaran sebagai berikut.

audit functions.

7. Exercise other authorities delegated by the Board of Commissioners based on a mandate letter from the Board of Commissioners.

Independence of Audit Committee Members

All members of the PPI Audit Committee are independent parties who do not have financial, managerial, shareholding, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or relationships with the Company. They also do not hold concurrent positions either within or outside the Company in accordance with the provisions of laws and regulations.

Competency Development Program

In order for the Audit Committee to always keep abreast of the Company's development, the Audit Committee participates in a competency development program, such as seminars, workshops, or other activities that improve the knowledge and competency of the Audit Committee.

In the 2024 fiscal year, the Audit Committee members did not attend any competency development programs.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee shall hold regular meetings at least once a month. In 2024, the Audit Committee held 21 meetings, with the following details:

Risalah Rapat Komite Audit | Meeting Minutes of the Audit Committee

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (people)	Komite Audit yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Audit Committee Absence and Their Reasons for Absence
22 Januari 2024 January 22, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Desember 2023; 2. Rancangan RKAP 2024. 1. Performance discussion until December 2023; 2. Draft 2024 RKAP.	3	-
7 Februari 2024 February 7, 2024	Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPI Discussion of Proposed Changes to PT PPI's Organizational Structure	3	-
19 Februari 2024 February 19, 2024	Pembahasan Kinerja s.d Januari 2024 Performance Discussion until January 2024	3	-
18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Februari 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until February 2024; 2. Others.	3	-
25 Maret 2024 March 25, 2024	Pembahasan Aset Medan Discussion on Medan Assets	3	-
23 April 2024 April 23, 2024	Pembahasan dengan komite Komisaris mengenai kerja sama aset dengan PT BGRLI Discussion with the Commissioners committee on the asset corporation with PT BGRLI	3	-
06 Mei 2024 May 6, 2024	Pembahasan tindak lanjut dugaan fraud Discussion of follow-up actions on alleged fraud	3	-
21 Mei 2024 May 21, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d April 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until April 2024; 2. Others.	3	-
25 Juni 2024 June 25, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Mei 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until May 2024; 2. Others.	3	-
05 Juli 2024 July 5, 2024	Rapat Komite Pembahasan Surat Permohonan Persetujuan Dekom Sewa Aset oleh PT BGRLI Committee Meeting to Discuss the Board of Commissioners' Letter of Application for Approval of Asset Lease by PT BGRLI	3	-
18 Juli 2024 July 18, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Juni 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until June 2024; 2. Others.	3	-
20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Juli 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until July 2024; 2. Others.	3	-
23 September 2024 September 23, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Agustus 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until August 2024; 2. Others.	3	-
22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d September 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until September 2024; 2. Others.	3	-
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Pembahasan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2025 dan Evaluasi Program Kerja Pengawasan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024 Discussion on the 2025 Annual Supervision Work Program (PKPT) and Evaluation of the 2024 Internal Audit Unit's Supervisory Work Program	3	-
10 Desember 2024 December 10, 2024	Pembahasan kinerja Cabang Aceh dan Pekanbaru Performance discussion of the Aceh and Pekanbaru Branches	3	-

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (people)	Komite Audit yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Audit Committee Absence and Their Reasons for Absence
11 Desember 2024 December 11, 2024	Pembahasan Komite Audit Kinerja Cabang Kupang Audit Committee's Discussion on the Kupang Branch Performance	3	-
12 Desember 2024 December 12, 2024	Pembahasan Komite dengan Regional II Committee Discussion with Regional II	3	-
13 Desember 2024 December 13, 2024	Pembahasan Komite Audit dengan Kantor Cabang Mataram Audit Committee's Discussion with Mataram Branch Office	3	-
20 Desember 2024 December 20, 2024	Pembahasan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2025 dan Evaluasi Program Kerja Pengawasan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024 Discussion on the 2025 Annual Supervision Work Program (PKPT) and Evaluation of the 2024 Internal Audit Unit's Supervisory Work Program	3	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit | Recapitulation and Attendance Rate of Audit Committee at Audit Committee Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran Attendance
Hamli (Ketua Chairman)*	16	16	0	100%
Gigih Guntoro (Ketua Chairman)*	5	5	0	100%
Helman Arif (Anggota Member)**	14	14	0	100%
Baban Sudarman (Anggota Member)**	7	7	0	100%
Reinhard Harianja (Anggota Member)	21	21	0	100%
Rata-rata Kehadiran Average Attendance				100%

*) Hamli menjabat dari tanggal 1 Januari hingga 18 November 2024. Beliau digantikan oleh Gigih Guntoro. | Hamli served from January 1 to November 18, 2024. He was replaced by Gigih Guntoro.

**) Helman Arif menjabat dari tanggal 1 Januari hingga 27 September 2024. Beliau digantikan oleh Baban Sudarman. | Helman Arif served from January 1 to September 27, 2024. He was replaced by Baban Sudarman.

Remunerasi Komite Audit

Besaran honorarium bagi Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Audit Committee Remuneration

The honorarium for Audit Committee members who do not serve as members of the Board of Commissioners amounts to 20% of the salary of the President Director, as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku mencakup kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Rutin Komite Audit meliputi:

- 1) Membahas dan memberi pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI, yang tujuannya agar

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2024

In 2024, the Audit Committee carried out its duties in accordance with applicable provisions, including the following activities:

A. Routine Activities of the Audit Committee, which include:

- 1) Discussing and providing views on the Annual Work Plan of the Internal Audit Unit (IAU) to ensure

Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI, yaitu agar komite audit memahami pelaksanaan pekerjaan SPI yang akan dilakukan selama setahun ke depan

- 2) Kegiatan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI;

Tujuan :

1. Melakukan pembahasan dan penilaian terhadap kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
2. Melakukan pembahasan terhadap RJPP, RKAP, Laporan Semester, Laporan Triwulan dan laporan rutin lainnya dalam rangka memberikan masukan kepada Dewan Komisaris;
3. Mempersiapkan materi-materi yang penting yang perlu dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
4. Memperoleh klarifikasi maupun penjelasan dari manajemen terkait dengan pengendalian manajemen perusahaan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Perseroan;
5. Mempersiapkan laporan rutin pelaksanaan tugas Komite Audit secara berkala sesuai dengan Peraturan Bapepam, Peraturan Menteri Negara BUMN, serta Piagam Komite Audit.

Sasaran :

1. Terlaksananya fungsi pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris secara efektif;
 2. Terlaksananya tugas-tugas Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Piagam Komite Audit;
 3. Tercapainya pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan SPI sesuai dengan standar yang berlaku;
 4. Diperoleh informasi yang akurat dan komprehensif terhadap penerapan pengendalian intern Perusahaan;
 5. Tersedianya materi-materi penting untuk dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
 6. Tersedianya masukan dan saran-saran perbaikan kepada manajemen yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.
- 3) Kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Manajemen, SPI dan KAP;

that the SPI's Annual Work Plan is aligned with the oversight directives from the Board of Commissioners, and as part of the audit function performed by the Audit Committee regarding the duties of the IAU, to ensure that the Audit Committee understands the implementation of IAU's work for the coming year.

- 2) The activity of reviewing the Internal Audit Unit's Audit Report, followed by a Coordination Meeting of the Audit Committee and IAU;

Objectives:

1. To discuss and evaluate the activities and audit results conducted by the Internal Audit Unit (IAU) based on the Audit Report (LHP);
2. To discuss the Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), Semester Reports, Quarterly Reports, and other routine reports to provide input to the Board of Commissioners;
3. To prepare important materials that require discussion in the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors;
4. To obtain clarification and explanations from management regarding the company's management controls and the Company's ongoing issues;
5. To prepare routine reports on the implementation of the Audit Committee's duties on a regular basis in accordance with Bapepam Regulations, Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises, and the Audit Committee Charter.

Targets:

1. The Board of Commissioners effectively carries out the Company's oversight function;
 2. The Audit Committee's duties are implemented, as outlined in the Audit Committee Regulations and Charter;
 3. Implementation and reporting of IAU activities are achieved in accordance with applicable standards;
 4. Accurate and comprehensive information is obtained regarding the Company's internal control implementation;
 5. Maintaining important materials to be discussed in the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors;
 6. Input and suggestions for improvement are provided to management, delivered through the Board of Commissioners.
- 3) Oversight activities on the performance achievements of external auditors (KAP), followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee, Management, IAU, and KAP;

Tujuan :

1. Memastikan bahwa Auditor Eksternal bekerja dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya pada aspek independensi dan obyektivitas;
2. Pemantauan, tinjauan dan analisis atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal meliputi perencanaan audit, pelaksanaan, penerapan standar akuntansi, diskusi hasil pemeriksaan, pembahasan draft laporan keuangan;
3. Berkomunikasi dan diskusi dengan Manajemen, Auditor Internal, Auditor eksternal tentang permasalahan material yang timbul selama masa audit sebagai dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sebelum laporan dipublikasi.

Sasaran :

1. Terlaksananya fungsi pengawasan Komite Audit terhadap pelaksanaan pekerjaan KAP sesuai kontrak;
2. terselesaikannya permasalahan-permasalahan yang timbul selama masa audit secara baik dan cepat;
3. Tersajinya laporan keuangan perusahaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- 4) Kegiatan penelaahan hasil capaian kinerja Perseroan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Tujuan : Meningkatkan fungsi pengendalian manajemen dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perseroan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Sasaran :

1. Diperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan laporan manajemen yang memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Diperoleh Hasil tinjauan, analisis dan rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, laporan-laporan Manajemen dan informasi lainnya;
3. Diperoleh rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau penggantian auditor eksternal yang meliputi ruang lingkup dan ketepatan penugasan auditor eksternal yang berkaitan dengan kewajaran biaya audit, pengalaman, independensi dan obyektivitasnya.
4. Tersedianya hasil tinjauan, analisis dan rekomendasi

Objectives:

1. Ensuring that the External Auditor works in accordance with relevant professional standards, particularly regarding independence and objectivity;
2. Monitoring, reviewing, and analyzing the audit process conducted by the External Auditor, including audit planning, implementation, application of accounting standards, discussion of audit results, and discussion of financial statements;
3. Communicating and discussing with Management, Internal Auditors, and External Auditors regarding material issues that arise during the audit period, as a basis for providing an independent professional opinion to the Board of Commissioners prior to the report's publication.

Targets:

1. The Audit Committee's oversight function is implemented in accordance with the contract for the Public Accounting Firm's work;
2. Issues arising during the audit are resolved in an effective and timely manner;
3. The Company's financial statements are presented according to the planned schedule.
- 4) The activity of reviewing the Company's performance achievements, followed by an Internal Audit Committee Meeting and the Audit Committee's contribution in the Internal Meeting of the Board of Commissioners or Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Objective: To enhance management control functions to achieve effective and efficient management of the Company's resources for optimal results.

Targets:

1. Obtaining financial statements in accordance with applicable accounting standards and management reports that comply with the principles of transparency, accountability, and responsibility;
2. Obtaining reviews, analyses, and recommendations on the Company's Work Plan and Budget, Long-Term Plan, Management reports, and other information;
3. Obtaining recommendations regarding the appointment and/or replacement of external auditors, including the scope and appropriateness of the external auditor's assignment, related to the reasonableness of audit fees, experience, independence, and objectivity.
4. Obtaining reviews, analyses, and recommendations

Komite Audit tentang kondisi perusahaan dari rangkuman laporan Manajemen periodik sebagai bahan Dewan Komisaris dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fungsi pengawasan Perusahaan.

B. Kegiatan Non Rutin Komite Audit meliputi:

Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa menginap.

Tujuan :

1. Melakukan pemeriksaan baik fisik maupun non fisik terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT PPI dan anak perusahaan bersama Tim SPI;
2. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung proses pengawasan terhadap perseroan.

Sasaran:

1. Diperolehnya data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan PT PPI dan anak perusahaan;
2. Mendukung terlaksananya kegiatan Komite Audit PT PPI secara optimal.

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit atas penugasan Dewan Komisaris dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain di luar wilayah Republik Indonesia. Perjalanan Dinas luar negeri sifatnya insidental dan hanya dapat dilaksanakan apabila memang memenuhi unsur urgensi serta mendapat penugasan dari Dewan Komisaris.

C. Pendidikan dan Pelatihan Komite Audit

Diperuntukkan bagi Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit.

Tujuan: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Komite Audit atau anggotanya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sasaran: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Komite Audit atau anggotanya sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsinya masing-masing.

from the Audit Committee on the Company's condition from a summary of periodic Management reports as material for the Board of Commissioners in resolving issues related to the Company's oversight function.

B. Non-Routine Activities of the Audit Committee, which include:

Domestic business trip refers to travel undertaken in terms of official duties carried out by the Audit Committee, from the workplace to another destination within the territory of the Republic of Indonesia, with or without an overnight stay.

Objectives:

1. To conduct both physical and non-physical examinations of activities carried out by PT PPI and its subsidiaries with the Internal Audit Team;
2. To conduct other activities to support the Company's oversight process.

Targets:

1. Obtaining data and information on the progress of PT PPI and its subsidiaries' activities;
2. Supporting the optimal implementation of PT PPI's Audit Committee activities.

An overseas business trip refers to travel undertaken in terms of official duties carried out by the Audit Committee, as assigned by the Board of Commissioners, from the workplace to another destination outside the territory of the Republic of Indonesia. An overseas business trip is incidental and may only be undertaken if it is deemed urgent and assigned by the Board of Commissioners.

C. Audit Committee Education and Training

Intended for the Audit Committee to support the implementation of its duties.

Objective: To improve the capabilities and competencies of the Audit Committee or its members to support the implementation of their respective duties and functions.

Target: To improve the capabilities and competencies of the Audit Committee or its members to support the effective implementation of their respective duties and functions.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Hingga akhir tahun 2024 tidak ada Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI.

Komite Pemantau Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di Perseroan.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko PPI bekerja mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko, di mana mengatur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan,

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

As of the end of 2024, there was no Nomination and Remuneration Committee at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. The Nomination and Remuneration function is carried out by the Board of Commissioners.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Risk Oversight Committee is one of the committees formed by and directly accountable to the Board of Commissioners, and plays a role in supporting the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to the effectiveness of implementing risk management principles and policies within PPI's scope.

The Risk Oversight Committee is authorized to fully, freely, and without limitation access any company policies related to risk management in the Company.

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Risk Oversight Committee includes:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PPI;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

Charter of the Risk Oversight Committee

The PPI Risk Oversight Committee serves in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 dated March 26, 2021 concerning the Risk Oversight Committee Charter, which regulates the

Remunerasi dan Kode etik, Peran dan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang, Hak dan Kewajiban, Mekanisme Kerja, Anggaran dan Penilaian Kinerja.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Periode menjabat Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Pemantau Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

Organization, Membership, Term of Office, Remuneration and Code of Conduct, Roles and Functions, Duties and Responsibilities and Authorities, Rights and Obligations, Work Mechanisms, Budget and Performance Appraisal.

Qualifications and/or Criteria for the Risk Oversight Committee

All members of the PPI Risk Oversight Committee have met the requirements or qualifications as individual members of the Risk Oversight Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and good communication skills.
2. Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
3. Having knowledge of PPI's business processes.
4. Having sufficient time to perform their duties.
5. Not being an insider of External Auditors, Legal Consultant Offices, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a person with authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Composition and Term of Office

The term of office for the Risk Oversight Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI. The term of office for members of the Risk Oversight Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Risk Oversight Committee who concurrently serve as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their term of office as members of the Board of Commissioners.

The Risk Oversight Committee shall consist of at least 3 (three) members, of which 1 (one) member is a Commissioner and 2 (two) others are independent or external (non-Commissioner) parties who have the expertise, experience, and other qualifications required by PPI.

Susunan dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2024 tidak terdapat perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sehingga susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana berikut ini.

Composition and Profile of Risk Oversight Committee Members

In 2024, there were no changes to the composition of the Risk Oversight Committee. Thus, the composition of the Risk Oversight Committee is as follows.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 | Risk Oversight Committee Composition as of December 31, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Chairman of the Risk Oversight Committee/Commissioner	Setiawan Wangsaatmadja	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners	Ke-1 First
Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Hertanta	KEP-01/DK/PTPPI/II/2021	02 Februari 2021 s.d. 02 Februari 2024 February 02, 2021 to February 02, 2024	Ke-2 Second
Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee	Eko Setiawan	KEP-01/DK/PTPPI/V/2023	02 Mei 2023 s.d.02 Mei 2026 May 02, 2023 to May 02, 2026	Ke-1 First

Setiawan Wangsaatmadja

Ketua Pemantau Risiko/Komisaris

Chairman of the Risk Oversight Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Setiawan Wangsaatmadja dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan. | The profile of the Chairman of the Risk Oversight Committee, Setiawan Wangsaatmadja, is available in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter.

Hertanta

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Oversight
Committee

Periode Jabatan:
02 Februari 2021 s.d. 02 Februari
2026, Periode ke-2
Term of Office:
February 02, 2021 to February 02,
2026, 2nd Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 59 tahun | 59 years old

Kelahiran Yogyakarta, 19 Januari 1965 | Born in Yogyakarta, January 19, 1965

Domisili | Domicile

DI Yogyakarta

Pendidikan | Education

S2 Keuangan Universitas Padjajaran

Master of Finance, Padjajaran University

Riwayat Profesi | Professional History

- Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI (2021 – sekarang) | Member of the Risk Oversight Committee of PT PPI (2021 – present)
- Senior Management di BTN (2015-2021) | Senior Management at BTN (2015-2021)
 - Kadiv Enterprise Risk Management | Head of Enterprise Risk Management Division
 - Kadiv Commercial Credit Risk | Head of Commercial Credit Risk Division
 - Kadiv Human Capital Strategy | Head of Human Capital Strategy Division
 - Kepala SPI | Head of Internal Audit

Eko Setiawan

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Oversight
Committee

Periode Jabatan:
02 Mei 2023 s.d. 02 Mei 2026,
Periode ke-1
Term of Office:
May 02, 2023 to May 02, 2026,
1st Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 52 tahun | 52 years old

Kelahiran Jakarta, 30 April 1972 | Born in Jakarta, April 30, 1972

Domisili | Domicile

Tangerang Selatan | South Tangerang

Pendidikan | Education

S2 Hukum Universitas Indonesia

Master of Law, University of Indonesia

Riwayat Profesi | Professional History

- Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI (2023-sekarang)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Garam (2021-2023)
- Dir Komersial PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-Maret 2021)
- Member of the Risk Oversight Committee of PT PPI (2023-present)
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Garam (2021-2023)
- Commercial Director of PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-March 2021)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kemampuan manajemen risiko perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
10. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Pemantau Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

The Risk Oversight Committee is assigned with the following responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in developing, assessing, and improving the structure, mechanisms, processes, and practices of sustainable good corporate governance (GCG);
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing risk management governance, including the legal risks of the Company;
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the implementation of risk management processes by the Company;
4. Assisting the Board of Commissioners in assessing the Company's risk management capabilities;
5. Assisting the Board of Commissioners in identifying the relationship between the Company's established risks;
6. Providing input to the Board of Commissioners for the improvement and development of risk management governance, including legal risks and the Company's risk management processes;
7. Assisting the Board of Commissioners in assessing key risks, including the legal risks faced by the Company, and ensuring that the Board has taken necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
8. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the uncertainty elements of risks arising from various external environmental changes impacting the Company;
9. Assisting the Board of Commissioners in identifying risks related to proposals from the Board of Directors regarding investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, divestment of company assets, and other company activities for analysis and evaluation by the Board of Commissioners to provide recommendations and approval for such proposals from the Board of Directors;
10. Providing reports, both written and oral, to the Board of Commissioners on matters related to the assignment.

In addition to performing the above duties, the Risk Oversight Committee also carries out specific assignments assigned by the Board of Commissioners.

Hak dan Kewenangan

Komite Pemantau Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit-Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perseroan (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.

Rights and Authorities

The Risk Oversight Committee has rights and authorities, including:

1. Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other resources owned by the Company related to the performance of its duties.
2. In carrying out its authority, the Risk Oversight Committee may collaborate with other Board Committees, relevant teams at the Management level, especially functions handling Risk Management, and Company Units related to following working procedures and in accordance with applicable regulations.
3. The Risk Oversight Committee may engage experts and/or consultants/independent parties to assist in the performance of its duties with the written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense (if necessary).
4. Carrying out other authorities granted by the Board of Commissioners based on a letter of assignment from the Board of Commissioners.

Independence of Risk Management Committee

Each member of the Risk Oversight Committee is required to maintain professionalism and independence while carrying out their duties and responsibilities as stipulated in the Risk Management Committee Charter. To that end, each member of the Risk Oversight Committee has stated their independence in the integrity pact that has been mutually agreed upon.

Pernyataan Independensi Anggota Pemantau Risiko | Declaration of Independence of Risk Oversight Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Hertanta	Eko Setiawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Pemantau Risiko selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait perkembangan Perseroan, Komite Pemantau Risiko mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko.

Program peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Competency Development Program

To ensure the Risk Oversight Committee remains abreast of developments related to the Company's development, the Risk Oversight Committee participates in competency development programs, including seminars, workshops, and other activities that enhance the Risk Oversight Committee's knowledge and competency.

Throughout 2024, the competency development programs participated in by Risk Oversight Committee members are presented in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Hertanta, anggota Komite Pemantau Risiko member of the Risk Oversight Committee	Sertifikasi Certification	Pendidikan dan Pelatihan International Risk Management Standard ERM Fundamentals 2024 2024 International Risk Management Standard ERM Fundamentals Education and Training	Daring, 02-04 Desember 2024 Online, December 2-4, 2024	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Pada tahun 2024 Komite Pemantau Risiko mengadakan 32 rapat sebagai berikut.

Risk Oversight Committee Meeting

The Risk Oversight Committee shall hold regular meetings at least once a month. In 2024, the Risk Oversight Committee held 32 meetings as follows.

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko | Meeting Minutes of Risk Oversight Committee

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (people)	Komite Pemantau Risiko yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Risk Oversight Committee Absence and Their Reasons for Absence
19 Januari 2024 January 19, 2024	Pembahasan Profil Risiko PPI per Desember 2023 Discussion on PPI's Risk Profile as of December 2023	3	-
22 Januari 2024 January 22, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Desember 2023; 2. Rancangan RKAP 2024 1. Performance discussion until December 2023; 2. Draft 2024 RKAP.	3	-
7 Februari 2024 February 7, 2024	Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPI Discussion of Proposed Changes to PT PPI's Organizational Structure	3	-
19 Februari 2024 February 19, 2024	Pembahasan kinerja s.d Januari 2024 Performance discussion until January 2024	3	-
20 Februari 2024 February 20, 2024	Pembahasan Profil Risiko PPI per Januari 2024 Discussion on PPI's Risk Profile as of January 2024	3	-
18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Pembahasan kinerja s.d Februari 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance discussion until February 2024; 2. Others.	3	-
20 Maret 2024 March 20, 2024	Pembahasan Profil Risiko PPI per Februari 2024 Discussion on PPI's Risk Profile as of February 2024	3	-
25 Maret 2024 March 25, 2024	Pembahasan Aset Medan Discussion on Medan Assets	3	-

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (people)	Komite Pemantau Risiko yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Risk Oversight Committee Absence and Their Reasons for Absence
23 April 2024 April 23, 2024	Pembahasan dengan komite komisaris mengenai kerja sama aset dengan PT BGRLI Discussion with the commissioners committee on the asset corporation with PT BGRLI	3	-
25 April 2024 April 25, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Maret 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in March 2024	3	-
06 Mei 2024 May 6, 2024	Pembahasan tindak lanjut dugaan fraud Discussion of follow-up actions on alleged fraud	3	-
21 Mei 2024 May 21, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d April 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until April 2024; 2. Others.	3	-
21 Mei 2024 May 21, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI April 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in April 2024	3	-
25 Juni 2024 June 25, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Mei 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until May 2024; 2. Others.	3	-
25 Juni 2024 June 25, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Mei 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in May 2024	3	-
05 Juli 2024 July 5, 2024	Rapat Komite Pembahasan Surat Permohonan Persetujuan Dekom Sewa Aset oleh PT BGRLI Committee Meeting to Discuss the Board of Commissioners' Letter of Application for Approval of Asset Lease by PT BGRLI	3	-
18 Juli 2024 July 18, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Juni 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until June 2024; 2. Others.	3	-
18 Juli 2024 July 18, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Juni 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in June 2024	3	-
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Pembahasan Aset BGRLI Discussion on BGRLI Asset	3	-
20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Juli 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until July 2024; 2. Others.	3	-
20 Agustus 2024 August 20, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Juli 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in July 2024	3	-
20 September 2024 September 20, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Agustus 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in August 2024	3	-
23 September 2024 September 23, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d Agustus 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until August 2024; 2. Others.	3	-
22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Pembahasan Kinerja s.d September 2024; 2. Lain-lain. 1. Performance Discussion until September 2024; 2. Others.	3	-
04 November 2024 November 4, 2024	FGD Profil Risiko Tahun 2025 FGD on Risk Profile for 2025	3	-
25 November 2024 November 25, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI Oktober 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in October 2024	3	-
29 November 2024 November 29, 2024	Pembahasan Pedoman Manajemen Risiko Discussion on Risk Management Guidelines	3	-
10 Desember 2024 December 10, 2024	Pembahasan Kinerja Cabang Aceh dan Pekanbaru Performance Discussion of the Aceh and Pekanbaru Branches	3	-

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat (orang) Meeting Participants (people)	Komite Pemantau Risiko yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Risk Oversight Committee Absence and Their Reasons for Absence
11 Desember 2024 December 11, 2024	Pembahasan Komite Audit Kinerja Cabang Kupang Audit Committee's Discussion on the Kupang Branch Performance	3	-
12 Desember 2024 December 12, 2024	Pembahasan Komite dengan Regional II Committee Discussion with Regional II	3	-
13 Desember 2024 December 13, 2024	Pembahasan Komite Audit dengan Kantor Cabang Mataram Audit Committee's Discussion with Mataram Branch Office	3	-
16 Desember 2024 December 16, 2024	Pembahasan Profil Risiko PT PPI November 2024 Discussion on PT PPI's Risk Profile in November 2024	3	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko | Recapitulation and Attendance Rate of the Risk Oversight Committee in the Risk Oversight Committee Meeting

Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absences	% Kehadiran Attendance
Setiawan Wangsaatmadja (Ketua Chairman)	32	32	0	100%
Hertanta (Anggota Member)	32	32	0	100%
Eko Setiawan (Anggota Member)	32	32	0	100%
Rata-rata Kehadiran Average Attendance				100%

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Besaran honorarium bagi Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT PPI secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non Rutin.

A. Kegiatan Rutin Komite Pemantau Risiko meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap: bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi Blueprint/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan layanan, peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Risk Oversight Committee Remuneration

The honorarium for members of the Risk Management Committee who do not serve as members of the Board of Commissioners amounts to 20% of the salary of the President Director, as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 concerning the Risk Management Committee Charter of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Brief Report on the Implementation of Risk Oversight Committee Activities in 2024

The activities of the Board of Commissioners' Risk Oversight Committee of PT PT PPI are generally divided into 2 (two), namely Routine Activities and Non-Routine Activities.

A. Routine Activities of the Risk Oversight Committee include:

- 1) Assisting the Board of Commissioners to carry out supervision of: the areas of supervision of the Board of Commissioners, namely: implementation of the Blueprint/RJPP, implementation of the RKAP, company internal control system, company risk management, company information technology system, human resource policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies, quality and service policies, laws and regulations and agreements with third parties.

Tujuan :

1. Melakukan pembahasan dengan Manajemen yang terkait implementasi Blueprint/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan, peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Mempersiapkan materi-materi penting yang perlu dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Memperoleh klarifikasi maupun penjelasan dari manajemen terkait dengan kegiatan operasi perusahaan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Perseroan;
4. Mempersiapkan laporan rutin bulanan dan triwulanan atas bidang fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Sasaran :

1. Terlaksananya tugas-tugas Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Piagam Komite Pemantau Risiko;
 2. Terlaksananya fungsi pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris secara baik;
 3. Diperoleh informasi yang akurat dan komprehensif terhadap kegiatan operasional Perusahaan;
 4. Tersedianya materi-materi penting untuk dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
 5. Memperbaiki kinerja perusahaan dengan memberikan masukan dan saran-saran perbaikan kepada manajemen yang disampaikan melalui Dewan Komisaris;
- 2) Kegiatan Koordinasi Komite Pemantau Risiko dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa: Rapat Internal Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris.

Penjelasan:

- a. Rapat yang dilaksanakan hanya untuk internal Komite Pemantau Risiko yaitu Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko;
- b. Tujuan dari Rapat ini adalah untuk melakukan koordinasi antara ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, melalui :

Objectives:

1. To hold discussions with management related to the implementation of the Blueprint/RJPP, implementation of the RKAP, company internal control system, company risk management, company information technology system, human resource policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies, quality and service policies, laws and regulations and agreements with third parties.
2. To prepare important materials that need to be discussed in the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors;
3. To obtain clarification and explanations from management related to the Company's operational activities and the the Company's ongoing issues;
4. To prepare routine monthly and quarterly reports on the oversight function of the Board of Commissioners.

Targets:

1. Implementation of the duties of the Risk Oversight Committee as outlined in the Risk Oversight Committee's Regulations and Charter;
2. Implementation of the Company's oversight function by the Board of Commissioners properly;
3. Obtaining accurate and comprehensive information on the Company's operational activities;
4. Maintaining important materials to be discussed in the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors;
5. Improving the Company's performance by providing input and suggestions for improvements to management, delivered through the Board of Commissioners;

- 2) The Coordination Activities of the Risk Oversight Committee in the context of the Implementation of its Duties and Functions are in the form of:

Internal Meeting of the Board of Commissioners' Risk Oversight Committee

Explanation:

- a. A meeting held only for the internal Risk Oversight Committee, namely the Chairman of the Risk Oversight Committee and its members;
- b. This meeting aims to coordinate between the chairman and members of the Board of Commissioners' Risk Oversight Committee in order to increase the effectiveness of the implementation of the oversight function and the provision of advice by the Board of Commissioners on the Company's operational activities carried out by the Board of Directors, through:

- 1) Evaluasi bersama atas Kegiatan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris;
- 2) Koordinasi dalam rangka pemberian nasehat, masukan, rekomendasi, atau saran yang dituangkan dalam bentuk surat atau memo Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris maupun pihak lain yang terkait dengan tetap memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran :

- a. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai mengenai permasalahan tertentu maupun kondisi perusahaan terkini;
- b. Meningkatkan kualitas pemberian nasehat, masukan, rekomendasi, atau saran kepada Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris;
- c. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas hal-hal di lingkungan organisasi Dewan Komisaris;

- 3) Kegiatan Monitoring Kegiatan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG berupa Pemberian Masukan, Pendapat, Rekomendasi, atau Saran atas Permohonan Persetujuan dari Direksi.

Penjelasan:

- a. Pemberian masukan, pendapat, rekomendasi, atau saran kepada Dewan Komisaris terkait permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris khususnya yang menyangkut aspek manajemen resiko dan aspek ketaatan pada ketentuan peraturan baik internal dan eksternal PT PPI.
- b. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan referensi dan pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak terkait permohonan dari Direksi, seperti: pembentukan konsorsium, perjanjian dengan pihak ketiga, persetujuan pinjaman, persetujuan investasi, dll.

Sasaran:

- a. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai mengenai permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris;
- b. Meningkatkan kualitas pemberian pendapat, masukan, rekomendasi, atau saran kepada Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi

- 1) Joint evaluation of the Activities of the Board of Commissioners' Risk Oversight Committee;
- 2) Coordination in the context of providing advice, input, recommendations, or suggestions in the form of a letter or memo from the Risk Oversight Committee to the Board of Commissioners or other related parties while still paying attention to applicable procedures and regulations.

Targets:

- a. Obtaining complete and adequate data, information and analysis results and evaluations on certain issues and the Company's current condition;
- b. Improving the quality of providing advice, input, recommendations, or suggestions to the Board of Commissioners on certain issues faced by the Company and increasing the effectiveness of the implementation of the supervisory duties and advice provision by the Board of Commissioners;
- c. Improving the quality of decision-making by the Board of Commissioners on matters within the Board of Commissioners' organization;

3. Monitoring Activities of Company Activities to be in line with GCG principles, such as Providing Input, Opinions, Recommendations, or Suggestions on Requests for Approval from the Board of Directors.

Explanation:

- a. Providing input, opinions, recommendations, or suggestions to the Board of Commissioners related to requests for approval from the Board of Directors to the Board of Commissioners, especially those concerning aspects of risk management and aspects of compliance with internal and external regulations of PT PPI.
- b. This activity aims to provide references and considerations to the Board of Commissioners in making a decision to grant or not grant approval related to a request from the Board of Directors, such as: consortium formation, agreements with third parties, loan approvals, investment approvals, etc.

Targets:

- a. Obtaining complete and adequate data, information and analysis results and evaluations on requests for approval from the Board of Directors to the Board of Commissioners;
- b. Improving the quality of providing opinions, input, recommendations, or suggestions to the Board of Commissioners on certain issues;

4) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perusahaan yang menekankan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2024;

Penjelasan:

- Dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan hasil usaha setiap bulannya yang merupakan agenda rutin dalam Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Pemantau Risiko akan melakukan evaluasi atas capaian kinerja tersebut baik dari sisi capaian kinerja keuangan maupun dari ketaatan perusahaan dalam merealisasikan RKAP tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bulanan dari Komite Pemantau Risiko dan akan dilaporkan setiap triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan referensi dan pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka melakukan evaluasi atas laporan hasil usaha perusahaan setiap bulannya.

Sasaran:

- Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai mengenai laporan hasil usaha setiap bulannya;
- Meningkatkan kualitas pemberian pendapat, masukan, rekomendasi, atau saran kepada Dewan Komisaris khususnya berkaitan dengan laporan hasil usaha setiap bulannya;
- Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas hal-hal di lingkungan organisasi Dewan Komisaris.

B. Kegiatan Non-Rutin Komite Pemantau Risiko meliputi:

1) Kegiatan Review terhadap Ketentuan Internal PT PPI seperti Prosedur Operasi Baku (POB), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dll.

Penjelasan:

- Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik salah satunya diwujudkan dengan adanya aturan internal yang mengatur suatu mekanisme kegiatan usaha agar selalu comply terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertahankan kinerja perusahaan yang baik.
- Kegiatan ini akan me-review ketentuan internal seperti POB atau pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk selalu dapat update sesuai kondisi yang ada dan perkembangan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Company Performance Evaluation Activities that emphasize the implementation of the Company's Work Plan and Budget or the 2024 RKAP;

Explanation:

- In terms of the evaluation of monthly business results reports which is a routine agenda in the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Risk Oversight Committee will evaluate the achievement of this performance both from the perspective of financial performance and from the Company's compliance in realizing the set 2024 RKAP.
- This activity is a monthly routine activity of the Risk Oversight Committee and will be reported quarterly to the Board of Commissioners as a part of accountability for the duties and functions of the Risk Oversight Committee.
- This activity aims to provide references and considerations to the Board of Commissioners in the context of evaluating the Company's monthly business results reports.

Targets:

- Obtaining complete and adequate data, information and analysis results and evaluations on monthly business results reports;
- Improving the quality of providing opinions, input, recommendations, or suggestions to the Board of Commissioners, especially regarding monthly business results reports;
- Improving the quality of decision-making by the Board of Commissioners on matters within the Board of Commissioners' organizational environment.

B. Non-Routine Activities of the Risk Oversight Committee, which include:

1) Review Activities of PT PPI's Internal Regulations such as Standard Operating Procedures (SOP), Implementation Guidelines, etc.

Explanation:

- The implementation of good corporate governance principles is one of which is realized by the existence of internal regulations that regulate a business activity mechanism to always comply with applicable laws and regulations while maintaining good company performance.
- This activity will review internal regulations such as SOP or company activity implementation guidelines to always be up-to-date according to existing conditions and the development of applicable laws and regulations.

- c. Tujuan kegiatan ini adalah untuk perbaikan proses bisnis internal perusahaan agar lebih governance terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sasaran:

- a. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai mengenai POB atau pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan yang memerlukan updating sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kualitas pemberian pendapat, masukan, rekomendasi, atau saran kepada Dewan Komisaris khususnya berkaitan dengan laporan hasil usaha setiap bulannya;

2) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko melalui Diklat, Workshop atau Seminar terkait Implementasi GCG

Penjelasan: Pendidikan dan Pelatihan Komite Pemantau Risiko adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko untuk menunjang peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian masukan kepada Dewan Komisaris.

Kegiatan yang termasuk dalam kategori Pendidikan dan Pelatihan Komite Pemantau Risiko antara lain: Seminar, Workshop, Kursus dan Sertifikasi, serta Keanggotaan Profesi.

Sasaran : Meningkatnya kemampuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko sehingga mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat/masukan kepada Dewan Komisaris.

3) Perjalanan Dinas Komite Pemantau Manajemen Risiko
Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa menginap.

Tujuan:

1. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan baik fisik maupun nonfisik terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT PPI dan anak perusahaan bersama Tim Manajemen Risiko;
2. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung proses pengawasan terhadap perseroan.

- c. This activity aims to improve the Company's internal business processes to be more governed by applicable laws and regulations.

Targets:

- a. Obtaining complete and adequate data, information and analysis results and evaluations on SOPs or company implementation guidelines that require updating in accordance with applicable regulations.
- b. Improving the quality of providing opinions, input, recommendations, or suggestions to the Board of Commissioners, especially regarding monthly business results reports;

2) Activities to Improve the Competence of the Risk Oversight Committee through Training, Workshops or Seminars related to GCG Implementation

Explanation: Training and Education of the Risk Oversight Committee are activities carried out by the Risk Oversight Committee in order to improve the abilities, knowledge, and competence of the Risk Oversight Committee to support the increase in the effectiveness of the implementation of the supervisory duties and advice to the Board of Commissioners.

Activities included in the category of Training and Education of the Risk Oversight Committee include: Seminars, Workshops, Courses and Certifications, and Professional Membership.

Targets: Increased abilities and competence of the Risk Oversight Committee to support the increase in the effectiveness of the implementation of supervisory duties and advice to the Board of Commissioners.

3) Business Trips of the Risk Management Oversight Committee

Domestic business trip refers to travel undertaken in terms of official duties carried out by the Risk Oversight Committee, from the workplace to another destination within the territory of the Republic of Indonesia, with or without an overnight stay.

Objectives:

1. To conduct both physical and non-physical examinations and checks of activities carried out by PT PPI and its subsidiaries with the Risk Management Team;
2. To conduct other activities to support the Company's oversight process.

Sasaran:

1. Diperolehnya data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan PT PPI dan anak perusahaan;
2. Mendukung terlaksananya kegiatan Komite Pemantau Risiko PT PPI secara optimal.

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko atas perintah Dewan Komisaris dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain di luar wilayah Republik Indonesia. Perjalanan dinas luar negeri sifatnya insidental dan hanya dapat dilaksanakan apabila memang memenuhi unsur urgensi serta mendapat penugasan dari Komisaris.

Targets:

1. Obtaining data and information on the progress of PT PPI and its subsidiaries' activities;
2. Supporting the optimal implementation of PT PPI's Risk Oversight Committee activities.

An overseas business trip refers to travel undertaken in terms of official duties carried out by the Risk Oversight Committee, as assigned by the Board of Commissioners, from the workplace to another destination outside the territory of the Republic of Indonesia. An overseas business trip is incidental and may only be undertaken if it is deemed urgent and assigned by the Commissioners.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang mengatur operasi dan proses tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan biasanya berperan sebagai penasihat utama bagi Direksi dan Manajemen Senior dalam hal tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan urusan regulasi.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi vital sebagai penghubung (*liasion*) antara Perseroan dengan pihak eksternal. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Sekretaris Perusahaan wajib menjaga persepsi publik atas citra perusahaan, menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan Sekretaris Perusahaan setingkat dengan Kepala Divisi.

Dasar Hukum

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada :

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a senior executive who is responsible for ensuring that the Company complies with all legal and regulatory requirements governing its operations and governance processes. Corporate Secretary typically serve as a key advisor to the Board of Directors and Senior Management on matters of corporate governance, compliance, and regulatory affairs.

In addition, the Corporate Secretary also has a vital function as a liaison between the Company and external parties. In relation to this duty, the Corporate Secretary shall maintain public perception of the Company's image, ensure the fulfillment of corporate responsibilities and ensure the Company's compliance with laws and regulations relevant to the Company's line of business.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director. The position of Corporate Secretary is at the same level as the Head of Division.

Legal Basis

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to:

- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/ MBU/2011 concerning the

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

- PER-03/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Direksi PT PPI Nomor:14/PERDIR/PPI/V/2024 tentang Manual Book Sekretariat Perusahaan PT PPI
- Peraturan Direksi 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI

Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.

- PER-03/MBU/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
- Regulation of the Board of Directors of PT PPI Number: 14/PERDIR/PPI/V/2024 concerning the Manual Book of the Corporate Secretary of PT PPI
- Regulation of the Board of Directors 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 concerning Guidelines for the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program of PT PPI

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Sesuai struktur organisasi, Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*) berada di bawah koordinasi Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan membawahi:

1. Humas, Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan;
2. Sekretariat Direksi dan BOD Support.

Organizational Structure of the Corporate Secretary

In accordance with the organizational structure, the Corporate Secretary is under the coordination of the President Director and directly responsible to the President Director. The appointment of the Corporate Secretary is made by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Based on the organizational structure, the Corporate Secretary oversees:

1. Public Relations, Institutional and Social & Environmental Responsibility;
2. Secretary of the Board of Directors and BOD Support.



Humas, Kelembagaan & TJSL

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Perusahaan.

Bagian Humas, Kelembagaan & TJSL mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Diseminasi informasi internal dan eksternal perusahaan
2. Meningkatkan citra positif dan penghubung komunitas antar lembaga
3. *Liaison Officer*
4. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola bagi Perseroan

Public Relations, Institutions and CSR

This department is led by a Manager who reports directly to the Head of the Corporate Secretary.

The Department of Public Relations, Institutions, and CSR carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Dissemination of internal and external company information
2. Enhance positive image and community liaison between institutions
3. *Liaison Officer*
4. Provide benefits for economic, social, environmental, as well as legal and governance development for the Company

5. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah
6. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri

5. Contribute to the creation of added value
6. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent

Sekretariat Direksi

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Perusahaan.

Bagian Sekretariat Direksi mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya :

1. Mengatur ketertiban administrasi perusahaan.
2. Pemutakhiran dokumen Perseroan dan administrasi perizinan berusaha melalui system Online Single Submission.
3. Memastikan terlaksananya agenda rapat rutin Perseroan.

Secretary of the Board of Directors

This section is led by a Manager who reports directly to the Head of Corporate Secretary.

Secretary of the Board of Directors carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Managing the Company's administrative order.
2. Updating Company documents and business licensing administration through the Online Single Submission system.
3. Ensuring the implementation of the Company's regular meeting agendas.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 02/DU/SKD/PPI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, Sekretaris Perusahaan dipercayakan untuk dijabat oleh Agus Hartanto

Corporate Secretary Profile

Pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 02/DU/SKD/PPI/I/2024 dated January 19, 2024, the Corporate Secretary was entrusted to Agus Hartanto

Agus Hartanto

Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL
Head of Corporate Secretary and CSR

Periode Jabatan:
Sejak Januari 2024
Term of Office:
Since January 2024

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens
Usia 46 tahun | 46 years old
Kelahiran Banyuwangi, 18 Agustus 1979 | Born in Banyuwangi, August 18, 1979

Domisili | Domicile

Depok, Jawa Barat | Depok, West Java

Pendidikan | Education

- 2012 : Master of Business Administration, Sharia Banking and Finance, School of Business and Management (SBM), Institut Pertanian Bogor | Master of Business Administration, Sharia Banking and Finance, School of Business and Management (SBM), Bogor Agricultural University
- 2003 : Engineering Physic, Instrumentation and Control, Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya | Engineering Physics, Instrumentation and Control, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku | Valid Professional Certification

1. Corporate Finance Institute - Certified : Business Valuation, Fixed Income, Financial Modeling, Corporate Finance, Financial Statements
2. Certification of Risk Management Level I, II, III
3. Credit Skill Analysis (CSA), Certification Level I, II, III

Bergabung di PPI | Joined at PPI

2021

Riwayat Profesi | Professional Experience

- 2024 - sekarang 11 Mei 2025 : Kepala Sekretariat Perusahaan & TJSL PT PPI
- 2023 - sekarang 11 Mei 2025 : Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPII)
- 2021 - 2024 : Kepala Divisi Manajemen Keuangan PT PPI
- 2024 - May 11, 2025: Head of Corporate Secretary & CSR of PT PPI
- 2023 - May 11, 2025: Audit Committee of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPII)
- 2021 - 2024: Head of Financial Management Division of PT PPI

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekretariat Perusahaan

Kepala Sekretariat Perusahaan mengemban tugas pokok yang berkaitan dengan jalannya kesekretariatan perusahaan dan administrasi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, promosi dan kemitraan perusahaan.

Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan divisinya.
2. Membuat rencana program TJSL.
3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
4. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
5. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
6. Memastikan Perseroan mematuhi ketentuan tentang keterbukaan dan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan (Annual Report).
7. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
8. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perseroan serta peng-administrasiannya.
9. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan komersil dan non-komersil.
10. Menyelenggarakan database dan penyimpanan dokumen perusahaan.
11. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholder*.
12. Mengkoordinasikan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
13. Mengkomunikasikan kebijakan Perseroan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi.
15. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi termasuk menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
16. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
17. Melakukan update website Perseroan.
18. Membina hubungan baik dengan media massa.
19. Melaksanakan kegiatan *sponsorship* perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Head of Corporate Secretary

The Head of Corporate Secretary is tasked with responsibilities related to the Company's secretarial and administrative functions, as well as other activities associated with community engagement, corporate promotion, and partnerships.

In general, the Corporate Secretary is responsible for:

1. Creating the division's annual work plan and budget.
2. Developing the Corporate Social Responsibility (CSR) program plan.
3. Periodically creating and updating the Special List.
4. Periodically creating and updating the Shareholder List.
5. Overseeing the organization of General Meetings of Shareholders (GMS).
6. Ensuring the Company complies with regulations regarding disclosure and information transparency in the Annual Report.
7. Conducting meetings within the Directorate environment, both routine and non-routine.
8. Organizing secretarial activities within the Board of Directors and the Company, including their administration.
9. Coordinating the processing of commercial and non-commercial business permits.
10. Managing the Company's database and document storage.
11. Establishing mutually beneficial partnerships with various stakeholders.
12. Coordinating the development process of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), Management Reports, and Annual Reports.
13. Communicating corporate and/or government policies to internal and external parties.
14. Coordinating report materials for the Board of Directors' Meetings.
15. Ensuring the smooth execution of the Board of Directors agendas, including attending the Board of Directors Meetings and drafting the Board of Directors Meeting Minutes.
16. Conducting corporate secretarial activities.
17. Updating the Company's website.
18. Maintaining good relations with the mass media.
19. Implementing corporate sponsorship activities.

Hak dan Kewenangan

Sekretaris Perusahaan memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persurutan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perseroan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh person in charge.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perseroan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perseroan dan atau di dalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perseroan.
9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Di sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Rights and Authorities

The Corporate Secretary has the rights and authority to:

1. Establish systems and procedures for correspondence and archiving within the Board of Directors and the Company.
2. Access records, meeting minutes, company documents, and reports to provide necessary information to the DirectorateBoard of Directors.
3. Request a progress report on the implementation of the Board of Directors' decisions carried out by the person in charge.
4. Request data/information/explanations needed by the Board of Directors from relevant parties within and outside the Company for the purpose of carrying out the Board of Directors' duties.
5. Improve and request explanations from responsible parties within the Company experiencing delays in the implementation process of the Board of Directors' decisions.
6. Remind and request explanations from departments/related parties for delays in providing materials/information/data required by the Board of Directors.
7. Represent the Board of Directors in dealings with parties outside the Company and/or within the Company as assigned and according to established policies.
8. Propose meeting agendas with parties within/outside the Company.
9. Attend meetings with parties within/outside the Company according to previously established policies.
10. Utilize secretarial facilities to perform its duties.

Training and Competency Development Programs for the Corporate Secretary

A complete description of the list of competency training and development programs participated in by the Corporate Secretary in 2024 is available in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Brief Report on the Implementation of Corporate Secretary Duties in 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary has conducted several activities as follows:

1. Melaksanakan pengelolaan fungsi kesekretariatan Perusahaan dalam hal pengelolaan BOD support, pengelolaan dokumentasi keputusan rapat direksi, dewan komisaris dan RUPS sesuai tata kelola Perusahaan, pengelolaan administrasi persuratan, pemeliharaan dan pengamanan arsip serta dokumen Perusahaan, dan pemutakhiran dokumen Perusahaan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA);
2. Menyusun dan mengelola aktivitas strategi komunikasi korporasi, termasuk dalam mendukung keterbukaan informasi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan/stakeholder, menyusun dan mendistribusikan informasi aktivitas Perusahaan kepada publik termasuk melalui laporan tahunan dan media;
3. Menyusun dan mengelola fungsi strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan sesuai dengan roadmap jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan dan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun kebijakan komunikasi korporasi [DM1] dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang mendukung tata kelola Perusahaan, keterbukaan informasi, dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
5. Menyusun dan mengelola kebijakan mengenai Environment, Social, and Good Governance (ESG) yang terintegrasi dengan strategi bisnis utama Perusahaan, menyusun perencanaan implementasi hingga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan mematuhi regulasi dan standar ESG yang berlaku.

Akses Data dan Informasi Perusahaan

Pengelolaan informasi korporasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Sekretaris Perusahaan guna mencegah terjadinya *misleading information* yang dapat berdampak negatif bagi citra perusahaan. Dalam hal ini, PPI membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan keterbukaan informasi dalam batasan yang diatur oleh perundang-undangan dan kebijakan internal perseroan.

Situs Web PPI

PPI telah menyediakan kanal informasi melalui situs web www.ptppi.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan investor. PPI mengoptimalkan pemanfaatan situs web tersebut sebagai media komunikasi dengan pihak

1. Carried out the management of the Company's secretariat function in terms of managing BOD support, managing documentation of decisions of the board of directors, board of commissioners and GMS meetings in accordance with the Company's governance, managing correspondence administration, maintaining and securing the Company's archives and documents, and updating Company documents through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system;
2. Prepared and managed corporate communication strategy activities, including supporting information disclosure and good relations with stakeholders, prepared and distributed information on Company activities to the public, including through annual reports and the media;
3. Prepared and managed the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) strategy function in accordance with the Company's long-term and short-term roadmaps and applicable regulations and provisions;
4. Prepared corporate communication policies [DM1] and Corporate Social Responsibility (CSR) that support Company governance, information disclosure, and good relations with stakeholders;
5. Prepared and managed policies on Environment, Social, and Good Governance (ESG) integrated with the Company's primary business strategy, prepared implementation plans and monitored and evaluated to ensure that all Company activities comply with applicable ESG regulations and standards.

Access to Company Data and Information

The management of corporate information at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is carried out professionally under the supervision of the Corporate Secretary to prevent the dissemination of misleading information that could negatively impact the Company's reputation. In this regard, PPI provides access to information as widely as possible to the public while still adhering to confidentiality requirements and information transparency within the limits set by laws and internal company policies.

PPI Website

PPI has provided an information channel through the website www.ptppi.co.id, which can be easily accessed by the public and investors. PPI optimizes the use of this website as a communication medium with external parties,

eksternal yang memuat berbagai informasi umum mengenai Perseroan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Laporan Keuangan, dan informasi korporasi lainnya. Seluruh informasi tersebut disajikan secara faktual, serta ditinjau dan diperbaharui secara berkala relevansinya untuk meningkatkan kualitas distribusi informasi PPI. Sementara untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai PPI, publik ataupun investor dapat mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi ataupun mengunjungi kantor pusat secara langsung yang beralamat di:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160

Tel : +6221 3862141

E-mail: ppi.info@ptppi.co.id

Media Lainnya

Selain mengkomunikasikan kebijakan dan informasi penting melalui situs web, penyebaran informasi Perseroan juga dilakukan melalui buletin PPI, *press release*, media sosial, dan papan-papan pengumuman yang terdapat di lingkungan Perseroan. Selain itu, PPI juga mengadakan pertemuan (*gathering*) bersama *stakeholders* yang diselenggarakan secara berkala.

Siaran Pers Tahun 2024

Penyebarluasan informasi Perseroan kepada publik salah satunya dilakukan melalui siaran pers. Selama tahun 2024, siaran pers yang telah diterbitkan Perseroan, antara lain:

containing various general information about the Company, such as Company Profile, Organizational Structure, Financial Statements, and other corporate information. All such information is presented factually and is regularly reviewed and updated for relevance to enhance the quality of PPI's information distribution. For more comprehensive information about PPI, the public or investors can submit written requests addressed to the Board of Directors or visit the headquarters directly at:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160

TelPhone: +6221 3862141

E-mail: ppi.info@ptppi.co.id

Other Media

In addition to communicating policies and important information through the website, the dissemination of Company information is also carried out through PPI bulletins, press releases, social media, and notice boards located within the Company premises. Furthermore, PPI also holds gatherings with stakeholders regularly.

Press Releases in 2024

The dissemination of Company information to the public is done through press releases. Throughout 2024, press releases issued by the Company, including:

No	Tanggal Rilis Release Date	Headline
1	08 Januari 2024 January 08, 2024	Wakil Menteri BUMN Resmikan Pembukaan Gerai Covare Cafe Milik PPI di Waskita Rajawali Tower Deputy Minister of SOEs Inaugurates Opening of Covare Cafe Outlet Owned by PPI at Waskita Rajawali Tower
2	12 Januari 2024 January 12, 2024	PPI Gelar Pertemuan dengan Seluruh Insan PPI Group Tumbuhkan Culture Perusahaan melalui Agile Mindset PPI Holds Meeting with All PPI Group Personnel to Foster Company Culture through Agile Mindset
3	25 Januari 2024 January 25, 2024	PPI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Tantrade disaksikan Presiden Republik Persatuan Tanzania PPI Signs Memorandum of Understanding with Tantrade witnessed by the President of the United Republic of Tanzania
4	30 Januari 2024 January 30, 2024	PPI Melaksanakan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 PPI Holds General Meeting of Shareholders for Ratification of 2024 RKAP and RKA TJSL
5	31 Januari 2024 January 31, 2024	PPI Bersama Berdikari Bagikan Bahan Makanan Bergizi untuk Cegah Stunting di Kelurahan Petojo Selatan PPI with Berdikari Distributes Nutritious Food Ingredients to Prevent Stunting in Petojo Selatan Urban Village
6	17 Februari 2024 February 17, 2024	PPI Berpartisipasi dalam Pelaksanaan GPM di Surabaya dan Ambon PPI Participates in the Implementation of GPM in Surabaya and Ambon
7	21 Februari 2024 February 21, 2024	Antisipasi Hama, PPI Berikan Edukasi Petani di Jember Anticipating Pests, PPI Provides Farmer Education in Jember
8	22 Februari 2024 February 22, 2024	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Bersama PT PPI Berikan Sosialisasi di Sukoharjo Cooperative, SMEs and Trade Office with PT PPI Provide Dissemination in Sukoharjo

No	Tanggal Rilis Release Date	Headline
9	06 Maret 2024 March 06, 2024	Antisipasi Hama, PPI Berikan Edukasi Petani di Malang dan Banjarmasin Anticipating Pests, PPI Provides Farmer Education in Malang and Banjarmasin
10	07 Maret 2024 March 07, 2024	Sambut Ramadan, PPI Gelar Tradisi <i>Munggahan</i> dan AKHLAK Talk Series Sesi Amanah Sekaligus Donor Darah Bersama Welcoming Ramadan, PPI Holds Munggahan Tradition and AKHLAK Talk Series Amanah Session as well as Joint Blood Donation
11	13 Maret 2024 March 13, 2024	PT PPI Raih Penghargaan pada Ajang Anugerah BUMN 2024 Tahun ke-13 PT PPI Wins Award at the 13th Anugerah BUMN 2024 Event
12	21 Maret 2024 March 21, 2024	Selama Bulan Ramadan, PPI Ikuti Gerakan Pangan Murah di Berbagai Wilayah During Ramadan, PPI Participates in the Affordable Food Movement in Various Regions
13	28 Maret 2024 March 28, 2024	ID Food melalui PPI Laksanakan Penyaluran Perdana Bantuan Pangan Stunting Tahap 1 Tahun 2024 di Sumatera Utara ID Food through PPI Carries out the First Distribution of Stunting Food Aid Phase 1 for 2024 in North Sumatra
14	16 April 2024 April 16, 2024	Pererat Silaturahmi, PPI Gelar Halalbihalal Idul Fitri 1445 H Strengthening Fraternity, PPI Holds Halalbihalal Eid al-Fitr 1445 H
15	21 Mei 2024 May 21, 2024	Kembangkan UMKM, TJSL Kolaborasi PPI dan ID Food Berikan Pelatihan Developing MSMEs, TJSL Collaborates with PPI and ID Food to Provide Training
16	05 Juni 2024 June 05, 2024	Berikan Edukasi Pertanian pada Kelompok Tani, PPI Gelar TEMANI di Kendari Providing Agricultural Education to Farmer Groups, PPI Holds TEMANI in Kendari
17	09 Juni 2024 June 09, 2024	Jelang HUT ke-21, PPI Gelar Jalan Sehat Ahead of its 21st Anniversary, PPI Holds a Healthy Walk
18	19 Juni 2024 June 19, 2024	Bertepatan dengan HUT ke-21, PPI Laksanakan Penandatanganan MoU dengan Dua Perusahaan India Coinciding with its 21st Anniversary, PPI Signs MoU with Two Indian Companies
19	09 Juli 2024 July 09, 2024	PPI Siap Ekspor 39,6 Ton Kopi ke Mesir PPI Ready to Export 39.6 Tons of Coffee to Egypt
20	18 Juli 2024 July 18, 2024	Dorong Potensi Komoditas Ekspor Hasil Hutan, PPI Lepas Ekspor Getah Damar ke India Encouraging Potential of Forest Product Export Commodities, PPI Releases Damar Resin Exports to India
21	25 Juli 2024 July 25, 2024	Berikan Pendampingan Pelatihan Ekspor, PPI Gelar Kegiatan UMKM Level Up Providing Export Training Assistance, PPI Holds MSME Level Up Activity
22	09 Agustus 2024 August 09, 2024	PPI Ekspor 26 Ton Kopi ke Mesir PPI Exports 26 Tons of Coffee to Egypt
23	06 September 2024 September 06, 2024	Direktur Operasi PT PPI Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan Penanganan Stunting 2024 di Jawa Tengah Director of Operations of PT PPI Reviews the Distribution of 2024 Stunting Handling Food Aid in Central Java
24	03 Oktober 2024 October 03, 2024	Dorong Peningkatan Daya Saing Komoditas Lokal di Pasar Global, PT PPI Ekspor 79,2 Ton Kopi ke Mesir Encouraging the Increase of Local Commodity Competitiveness in the Global Market, PT PPI Exports 79.2 Tons of Coffee to Egypt
25	10 Oktober 2024 October 10, 2024	PT PPI Berhasil Raih Penghargaan Ajang Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024 PT PPI Successfully Wins the 2024 BUMN Champion Partner Appreciation Award
26	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Ekspansi Pasar Global, PT PPI Tandatangani Kesepakatan dengan Perusahaan India, Mesir dan Filipina Global Market Expansion, PT PPI Signs Agreements with Indian, Egyptian and Philippine Companies
27	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Wujudkan Aksi Bersih-Bersih BUMN, PPI Dukung Proses Hukum Kejaksaan Agung Realizing BUMN Clean-up Action, PPI Supports Attorney General's Legal Process
28	05 Desember 2024 December 05, 2024	Tingkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri, PPI Kembali Ekspor 79,2 Ton Kopi Lampung ke Mesir Increasing Foreign Trade Performance, PPI Re-exports 79.2 Tons of Lampung Coffee to Egypt
29	12 Desember 2024 December 12, 2024	Beri Pemahaman Ekspor, PT PPI dan LPEI Latih 56 UMKM di NTB Providing Export Knowledge, PT PPI and LPEI Train 56 MSMEs in NTB
30	14 Desember 2024 December 14, 2024	PT PPI Berikan Bantuan PIPANISASI dan Rumah Pompa di Kabupaten Bandung PT PPI Provides Pipelining and Pump House Assistance in Bandung Regency

SATUAN PENGAWASAN INTERN

PPI memiliki organ Satuan Pengawas Internal (SPI) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap unit-unit kerja lainnya. SPI menjalankan fungsi pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan.

INTERNAL AUDIT UNIT

PPI has an Internal Audit Unit (IAU) which structurally reports directly to the President Director and operates independently from other units. IAU performs assurance and consulting functions independently and objectively to management in order to enhance the quality of risk management processes, internal controls, management systems, and corporate governance.

Dasar Hukum

Keberadaan, pembentukan, dan komposisi SPI di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang *Internal Audit Charter* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kedudukan SPI dalam Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, SPI merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, sehingga Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun pada praktiknya, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Audit Charter*.

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 39/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Kepala Satuan Pengawasan Intern dipercayakan untuk dijabat oleh Cahyadi.

Legal Basis

The establishment, formation, and composition of IAU in the Company refer to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero);
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
4. Decree of the Board of Directors Number: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 dated February 28, 2024, concerning the Internal Audit Charter of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Position of IAU in the Organizational Structure

In terms of organizational structure, IAU is a functional unit that operates under the direct supervision of the President Director, with the Head of IAU reporting directly to the President Director. However, in practice, IAU also coordinates with the Audit Committee in carrying out its duties as outlined in the Board Manual and Audit Charter.

Flow of Appointment and Dismissal of the Head of IAU

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners with due consideration of a recommendation from the Audit Committee.

Head of Internal Audit Unit Profile

Pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 39/DU/SKD/PPI/VIII/2024, dated August 30, 2024, Cahyadi was entrusted with the position of Head of the Internal Audit Unit.

Cahyadi

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat sejak 18 Januari 2021
Serving since January 18, 2021

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian citizens

Usia 41 tahun | 41 years old

Kelahiran 18 Mei 1983 | Born in May 18, 1983

Domisili | Domicile

Jl. H. Shibi 2 Kav Belimbing, RT 06 RW 02 No.37 Srengseng Sawah
Jakarta Selatan DKI Jakarta

Pendidikan | Education

Strata 1 Akuntansi | Bachelor of Accounting

Sertifikasi Profesi yang Masih Berlaku | Valid Professional Certification

- *Certified Risk Professional (CRP)*
- *Certified Fraud Examiner (CFE)*
- *Professional Internal Auditor*

Bergabung di PPI | Joined at PPI

18 Januari 2021 | January 18, 2021

Riwayat Profesi | Professional Experience

Nomor Keputusan Direksi Board of Directors Decree Number	Posisi Position	Periode Period
125/DKSU/Int.K/PPI/XII/2020	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	18 Januari 2021 – 17 Juli 2021 January 18, 2021 – July 17, 2021
11/DU/SKD/PPI/VII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	19 Juli 2021 – 1 Agustus 2021 July 19, 2021 – August 1, 2021
14/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	2 Agustus 2021 – 13 Desember 2021 August 2, 2021 – December 13, 2021
52/DU/SKD/PPI/XII/2021	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	14 Desember 2021 – 5 Maret 2023 December 14, 2021 – March 5, 2023
19/DU/SKD/PPI/III/2023	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	6 Maret 2023 – 1 September 2024 March 6, 2023 – September 1, 2024
39/DU/SKD/PPI/VIII/2024	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	2 September 2024 – Sekarang September 2, 2024 - Present

Keanggotaan SPI

Kecukupan jumlah auditor internal atau personil SPI yang profesional dan memiliki kompetensi andal sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. Penentuan jumlah dan komposisi auditor Perseroan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan ideal organisasi SPI dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga auditor.

Per 31 Desember 2024, jumlah auditor internal Perseroan tercatat sebanyak 11 orang termasuk Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas Pengawasan Intern meliputi seluruh unit kerja PT PPI dan Anak Perusahaan sesuai Tata Kelola yang berlaku untuk menilai kecukupan kualitas pengendalian

IAU Membership

Sufficient numbers of internal auditors or IAU personnel who are professional and have reliable competence are highly needed to assist in the implementation of IAU functions and duties. Determining the number and composition of Company auditors always considers the ideal needs of the IAU organization, taking into account the auditor workforce requirements.

As of December 31, 2024, the number of the Company's internal auditors was recorded at 11 personnel including the Head of the Internal Audit Unit, which responsible for carrying out Internal Audit activities covering all work units of PT PPI and Subsidiaries in accordance with the applicable Governance to assess the adequacy of the

intern, manajemen risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan dalam rangka membantu Perusahaan mencapai Visi, Misi, dan tujuannya.

Sertifikasi Personil SPI

SPI menyusun rencana kerja pengembangan profesi secara berkelanjutan baik dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal ataupun sebagai wujud implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi auditor yang merupakan bagian dari kegiatan rutin SPI sebagaimana tertuang di dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pada akhir 2024, SPI memiliki sejumlah sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal perseroan, antara lain:

quality of internal control, risk management, and Corporate Governance processes to support the Company achieve its Vision, Mission, and objectives.

Certification of IAU Personnel

IAU develops a continuous professional development work plan both to obtain relevant professional certifications in the field of internal auditing and as an implementation of capacity development programs for auditors, which is part of IAU's routine activities as outlined in the Annual Audit Work Program (PKPT).

At the end of 2024, IAU held several relevant certifications to support the implementation of its duties and responsibilities as the Company's internal auditors, including:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Cahyadi	Kepala Divisi Head of Division	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE) 3. <i>Professional Internal Auditor</i>
David Nicholson	Manager Assurance 1 Assurance Manager 1	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Chartered Accountant</i> (CA)
Daeng Achmad Ardiansyah	Manager Consulting Consulting Manager	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO)
Dedy Alamsyah	Fungsional Madya Intermediate Functional	1. <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) 2. <i>Certified Cyber Security Associate</i> (CCSA) 3. <i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) 4. <i>Computer Hacking Forensic Investigator</i> (CHFI) 5. <i>Ec-Council Certified Incident Handler</i> (ECIH) 6. <i>PMI Project Management Ready</i> (PMI PM Ready)
Dian Auliawati Purnama	Asisten Manager Assurance 1 Assurance Assistant Manager 1	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)
R. Aditya Indra Pratama	Asisten Manager Assurance 2 Assurance Assistant Manager 2	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)
Bani Gusti Pradini	Officer	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)

Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas dan tanggung jawab SPI, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi Pengawasan *Intern* sesuai dengan Standar Profesional Pengawasan *Intern* dan Kode Etik Pengawasan *Intern*;
2. Melakukan penyusunan dan pengkajian *Internal Audit Charter* secara periodik;
3. Melakukan penyusunan rencana pengawasan tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Pengawasan *Intern*;
4. Merancang mekanisme penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) termasuk jadwal dan mekanisme pembahasan dengan Anak Perusahaan

Duties and Responsibilities

The scope of duties and responsibilities of IAU, among others, is as follows:

1. Ensure the implementation of the Internal Audit function in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Conduct;
2. Conduct periodic preparation and review of the Internal Audit Charter;
3. Conduct preparation of the annual audit plan and budget allocation for the implementation of the Internal Audit function;
4. Develop a mechanism for preparing the Annual Audit Work Program (PKPT), including the schedule and mechanism for discussion with Subsidiaries that

- yang selaras dengan penyusunan RKAP;
5. Memastikan pelaksanaan Pengawasan *Intern* sesuai dengan rencana;
 6. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Pengendalian *Intern*, Manajemen Risiko dan Proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
 7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 8. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;
 9. Melaporkan temuan signifikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu cepat;
 10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
 12. Sebagai SPI PT PPI Induk Perusahaan:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan Pengawasan *Intern* Anak Perusahaan yang belum mempunyai Unit Satuan Pengawasan *Intern*;
 - b. Merumuskan prinsip Pengawasan *Intern* yang mencakup metodologi pemeriksaan dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - c. Memantau pelaksanaan Pengawasan *Intern* pada masing-masing Anak Perusahaan.
 13. Memantau pelaksanaan Pengawasan *Intern* pada masing-masing Anak Perusahaan dalam kelompok usaha Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, SPI melakukan antara lain:
 - a. *Monitoring* dan evaluasi rencana atau kebijakan Pengawasan *Intern* Anak Perusahaan dalam PPI Group dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Induk Perusahaan;
 - b. Evaluasi (pengukuran kinerja audit dan pengelolaan risiko) pelaksanaan PKPT oleh unit Pengawasan *Intern* Anak Perusahaan beserta tindak lanjutnya.
 14. Melaksanakan pengawasan:
 - a. Kepada Anak Perusahaan yang tidak mempunyai SPI;
 - b. Melakukan audit bersama (*joint audit*) dengan SPI Anak Perusahaan;
 - c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari SPI Anak Perusahaan.
- align with the preparation of the RKAP;
5. Ensure the implementation of the Internal Audit runs according to the plan;
 6. Evaluate the effectiveness of the implementation of Internal Control, Risk Management and Corporate Governance Process, in accordance with laws and regulations and Company policies;
 7. Examine and assess the efficiency and effectiveness in the fields of finance, commercial, operations, human capital, information technology, and other activities;
 8. Provide consultation and assurance regarding strategic matters both during planning and during the implementation of operational activities;
 9. Report significant findings in accordance with applicable mechanisms to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for immediate corrective action;
 10. Monitor corrective actions on significant findings;
 11. Report the follow-up monitoring of improvements to significant findings to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee;
 12. As IAU of PT PPI Parent Company:
 - a. Determine the strategy for implementing Internal Audit of Subsidiaries with no Internal Audit Unit;
 - b. Formulate Internal Audit principles that include inspection methodology and Implementation steps for quality control; and
 - c. Monitor the implementation of Internal Audit in each Subsidiary.
 13. Monitor the implementation of Internal Audit in each Subsidiary in the Company's business group. In its practice, IAU carries out, among others:
 - a. Monitoring and evaluating the Internal Audit plan or policy of the Subsidiary in the PPI Group to align with the policies established by the Parent Company;
 - b. Evaluation (measurement of audit performance and risk management) of the PKPT implementation by the Subsidiary's Internal Audit unit, with its follow-up.
 14. Conduct Supervision:
 - a. To Subsidiaries with no Internal Audit Unit;
 - b. Conduct joint audits with the Subsidiary's IAU;
 - c. Based on the supervision report from the Subsidiary's IAU.

- | | |
|---|--|
| <p>15. SPI melaporkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi PKPT di lingkungan PPI Group kepada Direksi PT PPI setiap tiga bulan dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi bahan rapat Direksi dan/atau bahan <i>Business Review</i> bersama Direksi Anak Perusahaan;</p> <p>16. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan, seminar, sertifikasi dan aktivitas pengembangan kompetensi lainnya yang sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;</p> <p>17. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Pengawasan <i>Intern</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara; b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan c. Pihak eksternal mematuhi <i>Internal Audit Charter</i> Perusahaan; <p>18. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan <i>Intern</i> kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;</p> <p>19. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat yang lamanya sesuai sebagaimana disepakati pada dokumen <i>non-disclosure agreement</i> (NDA) atau peraturan yang berlaku.</p> | <p>15. IAU reports the results of monitoring and evaluation of PKPT within the PPI Group to the Board of Directors of PT PPI every three months and/or as required, which serves as the material for the Board of Directors meeting and/or material for Business Review with the Board of Directors of Subsidiaries;</p> <p>16. Ensure that IAU members participate in continuous professional development as well as training, seminars, certification and other competency development activities in accordance with the development of the complexity and business activities of the Company;</p> <p>17. Ensure that in the event of the use of external party services for Internal Audit activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ensure knowledge transfer from external parties to IAU members, given that the engagement of external experts is temporary; b. The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the IAU function; and c. External parties comply with the Company's Internal Audit Charter; <p>18. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of Internal Audit duties and responsibilities unless permitted by laws and regulations and/or court decisions;</p> <p>19. Maintain confidential information obtained during their term, for a period as agreed in the non-disclosure agreement (NDA) document or applicable regulations.</p> |
|---|--|

Hak dan Kewenangan

SPI PT PPI memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentik dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal;
5. Melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SPI;

Rights and Authorities

IAU of PT PPI has the rights and authorities to:

1. Access all relevant information about the Company related to the IAU duties and functions;
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
4. Coordinate activities with the External Auditor;
5. Through the Human Capital and General Affairs Division, employ competent human capital according to the needs in carrying out IAU duties;

Independensi, Objektivitas, Kecakapan dan Profesionalisme

Pengawas *Intern* harus independen, objektif, cakap dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Untuk lebih terlaksananya independensi Pengawas *Intern*, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya.

1. Independensi

Pengawas *Intern* memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Pengawasan *Intern* dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Kepala SPI bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran kegiatan pengawasan serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit.

Unit SPI harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas Pengawasan *Intern* dan aktivitas investigasi.

Dalam menegakkan independensinya:

- Pengawas *Intern* mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- Pengawas *Intern* memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, lingkup, cara, teknik dan pendekatan pengawasan yang akan dilakukan.
- Pengawas *Intern* dan Investigator tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas Pengawasan *Intern* dan aktivitas investigasi.
- Pengawas *Intern* dan Investigator tidak melakukan perangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan dan afiliasinya maupun Anak Perusahaan.

2. Objektivitas

- Pengawas *Intern* dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Pengawasan *Intern* dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Pengawas *Intern* dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila

Independence, Objectivity, Competence and Professionalism

Internal Auditors are required to be independent, objective, competent, and professional in carrying out their duties. This allows them to express their opinions and thoughts without influence or pressure from other parties and deliver added value to the Company. To encourage the implementation of the Internal Auditors' independence, the President Director must fully support it, and the Audit Committee must supervise and guide its implementation.

1. Independence

Internal Auditors have independence in carrying out Internal Audit activities and investigative activities, expressing opinions and thoughts according to their profession and applicable standards. The Head of IAU is responsible to the President Director. To support independence and ensure smooth supervision activities and authority in monitoring follow-up, the Head of IAU may communicate directly with the Board of Commissioners and/or through the Audit Committee.

The IAU Unit must be free from interference from any party in determining the scope, implementation and reporting of the results of Internal Audit and investigative activities.

In upholding its independence:

- Internal Auditors are capable of expressing their opinions and thoughts without influence or pressure from any other party.
- Internal Auditors are free to determine the method, scope, technique, and approach of supervision to be conducted.
- Internal Auditors and Investigators do not carry out operational activities outside of their Internal Auditor and investigation activities.
- Internal Supervisors and Investigators do not carry out concurrent duties and positions in the Company's operational activities and its affiliates or Subsidiaries.

2. Objectivity

- Internal Auditors and Investigators must have an independent mental attitude in conducting Internal Audit and investigation activities. This mental attitude is reflected in complete, objective reports that are carefully and impartially analysis-based.
- Internal Auditors and Investigators are free from conflicts of interest regarding the examined objects or activities. Suppose they have conflicts

Pengawas *Intern* dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap objek atau kegiatan dimaksud.

- c. Untuk menjaga objektivitas, Pengawas Intern dan Investigator yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas Pengawasan Intern di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (*cooling-off period*).

3. Kompetensi

Pengawas *Intern* harus memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas Pengawasan *Intern*, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kecakapan merupakan istilah kolektif yang menunjukkan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) lain yang diperlukan Pengawas Intern untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap aktivitas saat ini, tren dan permasalahan-permasalahan yang berkembang untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan.

- a. Kepala SPI harus memberikan bantuan saran dan asistensi yang kompeten apabila Pengawas *Intern* tidak memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang memadai untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.
- b. Pengawas *Intern* harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat mengevaluasi risiko kecurangan (*fraud risk*), dan cara organisasi mengelola risiko tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.
- c. Pengawas *Intern* harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian kunci/utama, serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Namun tidak seluruh Pengawas *Intern* diharapkan memiliki keahlian sebagaimana layaknya Pengawas *Intern* yang tanggung jawab utamanya adalah mengaudit teknologi informasi.
- d. Kepala SPI harus menolak penugasan pengawasan atau mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten, jika auditor internalnya tidak memiliki

of interest. In that case, the person concerned must declare their involvement and not be assigned to supervise the objects or activities in question.

- c. To maintain objectivity, newly recruited Internal Auditors and Investigators from certain units must avoid Internal Audit activities in areas that were previously their responsibility for at least one year (*cooling-off period*).

3. Competence

Internal Auditors shall have other competencies (knowledge, skills, attitudes) to carry out their duties and responsibilities. Internal Audit Activities must collectively have or obtain other competencies (knowledge, skills, attitudes) required to carry out their responsibilities. Competence is a collective term that indicates other competencies (knowledge, skills, attitudes) required by Internal Auditors to carry out their responsibilities effectively. This includes consideration of current activities, trends and emerging issues to make relevant advice and recommendations.

- a. The Head of IAU must provide competent advice and assistance in the event that the Internal Auditors lack adequate competence (knowledge, skills, attitude) to carry out all or part of the assignment.
- b. The Internal Auditor must have adequate knowledge to evaluate the fraud risk, and how the organization manages the risk, but is not expected to have the expertise of someone who is mainly responsible for detecting and investigating fraud.
- c. The Internal Auditor must have adequate knowledge of key/main risks and controls, as well as information technology-based audit techniques to carry out his/her duties. However, not all Internal Auditors are expected to have the expertise of those who are mainly responsible for auditing information technology.
- d. If the internal auditor lacks the competence (knowledge, skills, attitude) to carry out all or part of the supervisory assignment, the head of

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut.

IAU must reject it or obtain competent advice and assistance.

4. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Pengawas *Intern* dan Investigator dalam melaksanakan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi. Untuk itu Pengawas *Intern* dan Investigator secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai:

- a. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Pengawas Intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan (*confidentiality code*).
- b. Kompetensi sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan.
- c. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- d. Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.
- e. Kewajiban mematuhi Kode Etik Pengawas Intern dan Standar Profesi Pengawas Intern bagi Pengawas Intern serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator
- f. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas *Intern* kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

5. Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas

Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Kode Etik dan Standar yang mempengaruhi ruang lingkup operasi aktivitas Pengawasan Intern secara umum, Kepala SPI Perusahaan harus mengungkapkan langsung dan/atau melalui Komite Audit atas ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

4. Professionalism

Professionalism serves as a reference for Internal Auditors and Investigators in internal audit and investigation activities. Thus, Internal Auditors and Investigators individually or collectively have:

- a. Integrity, an independent, honest, objective, diligent mental attitude, and upholding the ethics and profession of Internal Auditors, including being wise and prudent in using information obtained in carrying out duties and not using confidential information for personal gain or other matters that cause losses to the Company (*confidentiality code*).
- b. Competence in accordance with the required competency profile.
- c. Ability to interact and communicate effectively both verbally and in writing.
- d. Willingness and ability to improve the quality of competence, both behavioral and technical.
- e. Obligation to comply with the Internal Audit Code of Ethics and Internal Audit Professional Standards for Internal Auditor and the Investigator Code of Conduct and Investigator Professional Standards for Investigators.
- f. Obligation to maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of the Internal Auditor's duties and responsibilities unless required by laws and regulations or Court decision/ determination.

5. Obstacles to the Principles of Independence and Objectivity

Suppose there is a non-conformity with the Code of Conduct and Standards that affects the scope of operations of Internal Audit activities in general. In that case, the Head of IAU must disclose directly and/or through the Audit Committee on the non-conformity and its impact to the President Director and the Board of Commissioners.

Kode Etik

Seluruh personil SPI wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pokok-pokok Kode Etik profesi auditor internal sebagaimana telah ditetapkan Perseroan, antara lain:

Code of Conduct

All IAU personnel are required to act and behave in accordance with the principles of the Code of Conduct for the internal auditor profession as determined by the Company, including:

1. Integritas (*Integrity*)

Pengawas Intern memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

- Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab.
- Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan/atau dapat melanggar hukum.
- Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi Pengawas Intern maupun Perusahaan.
- Memiliki sikap hormat dan berperan dalam pencapaian tujuan Perusahaan.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Pengawas Intern menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Pengawas Intern melakukan penilaian (*professional judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

- Pengawas Intern tidak boleh terlibat dalam penugasan, apabila ditengarai akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila terlibat maka harus membuat dokumen Pakta Integritas.
- Pengawas Intern harus mengungkapkan semua fakta penting yang dimiliki, yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah isi maupun interpretasi laporan hasil penugasan.
- Pengawas Intern tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Pengawas Intern menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

- Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi serta data yang diperoleh selama melaksanakan tugas;
- Tidak menggunakan informasi yang diperoleh

1. Integrity

Internal Auditors have integrity by building trust as the basis for making reliable judgments.

- Performing duties in an honest, careful, cautious, and responsible manner.
- Comply with applicable laws and regulations, reveal the truth according to existing facts, and do not hide any issues that harm the Company and/or violate the law.
- Not being involved in activities that can violate the law or actions that harm the image of the Internal Audit or the Company.
- Having a respectful attitude and playing a role in achieving the Company's objectives.

2. Objectivity

Internal Auditors demonstrate high objectivity in accordance with professional standards in collecting, evaluating, and communicating information about the examined activities or processes. Internal Auditors make balanced professional judgments with due consideration of all relevant circumstances and are not influenced by personal/other people's interests.

- Internal Auditors may not be involved in assignments if they are suspected of causing a conflict of interest, or they must create an Integrity Pact document.
- Internal Auditors shall disclose all important facts they have; otherwise, the content or interpretation of the assignment report could be changed.
- Internal Auditors may not receive anything in any form that could be suspected of influencing their professional judgment.

3. Confidentiality

Internal Auditors respect the value and ownership of information received and do not disclose it without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to do so.

- Be careful in using and maintaining information and data obtained while carrying out duties;
- Do not use information obtained for personal

untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi perusahaan;

- c. Tidak mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas sebagai Pengawas Intern kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan dan prosedur yang berlaku.

4. Kompetensi (*Competency*)

Pengawas Intern menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.

- a. Aktivitas Pengawasan Intern harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- b. Pengawas Intern senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan serta efektivitas dan pelaksanaan tugasnya.

interests or benefits or for any other reason that may cause material or non-material losses to the Company;

- c. Refrain from disclosing any information acquired during Internal Audit duties to any unauthorized party, except as mandated by applicable regulations and procedures.

4. Competency

Internal Auditors use the necessary knowledge, skills, and experience to perform their audit responsibilities.

- a. Internal Audit activities must be executed with professional expertise and proficiency, encompassing the required knowledge, skills, and other competencies to fulfill their duties.
- b. Internal Auditors continuously enhance their competency through continuous professional education and the effectiveness and execution of their duties.

Program Pengembangan Kompetensi

Agar SPI selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, perkembangan Perseroan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, PPI memfasilitasi SDM yang tergabung dalam SPI untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala SPI di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan yang tergabung dalam unit SPI di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

To ensure IAU keep abreast of developments related to the business world, the Company's development, and relevant laws and regulations, PPI facilitates IAU personnel to participate in competency development programs, such as seminars, workshops, or other activities that improve their knowledge and competence.

The competency development activities participated in by the Head of IAU throughout 2024 are available in the Company Profile chapter of this annual report.

The competency development programs participated in by employees who are members of the IAU in 2024 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Educational and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
R. Aditya Indra Pratama, Asisten <i>Manager Assurance 2</i> Assurance Assistant Manager 2	<i>Public Training</i>	Skill Up: ISO 37001 2016	Daring, 19 November 2024 Online, November 19, 2024	PT RNI (Persero)
Dian Auliawati Purnama, Asisten <i>Manager Assurance 1</i> Assurance Assistant Manager 1	<i>Public Training</i>	Skill Up: ISO 37001 2016	Daring, 19 November 2024 Online, November 19, 2024	PT RNI (Persero)
Bani Gusti Pradini, <i>Officer</i>	<i>Public Training</i>	Skill Up: ISO 37001 2016	Daring, 19 November 2024 Online, November 19, 2024	PT RNI (Persero)

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Educational and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Karnika Sari, Pjs Asisten <i>Manager Consulting</i> Acting Manager Consulting Assistant	<i>In-house Training</i>	Skill Up: Manajemen Risiko Skill Up: Risk Management	Daring, 28 November 2024 Online, November 28, 2024	PT RNI (Persero)
Pungky Suharjo, <i>Officer</i>	<i>In-house Training</i>	Skill Up: Manajemen Risiko Skill Up: Risk Management	Daring, 28 November 2024 Online, November 28, 2024	PT RNI (Persero)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2024

Brief Report on the Implementation of IAU Duties in 2024

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

IAU's 2024 Annual Audit Work Program is as follows:

No.	Kegiatan Activity	Tahun 2024 In 2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Balikpapan Performance Audit of Business Activities at Balikpapan Branch					1							
2	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Manado Performance Audit of Business Activities at Manado Branch					1							
3	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Banda Aceh Performance Audit of Business Activities at Banda Aceh Branch								1				
4	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Medan Performance Audit of Business Activities at Medan Branch								1				
5	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Malang Performance Audit of Business Activities at Malang Branch										1		
6	Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di Cabang Purwokerto Performance Audit of Business Activities at Purwokerto Branch										1		
7	Audit Tematik Pengelolaan SDM Thematic Audit of HC Management				1								
8	Audit Tematik ERP dan Teknologi Informasi Thematic Audit of ERP and Information Technology											1	
9	Audit Tematik Perdagangan Non Bahan Pokok Thematic Audit of Non-Staple Trade	1											
10	Audit Tematik Pengelolaan Aset Tetap Thematic Audit of Fixed Asset Management		1										
11	Audit Kinerja/Operasional PT PPI Industri Performance/Operational Audit of PT PPI Industri						1						
12	Pendampingan Audit KAP KAP Audit Assistance	1											
13	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation			1									
14	Evaluasi/Monitoring P3DN P3DN Evaluation/Monitoring												1
15	Pengembangan Manajemen Dep. SPI (IACM, CACM, Pelatihan Perbaikan SOP, dan lain-lain) Management Development of IAU Department (IACM, CACM, SOP Improvement Training, and others)				1			1			1		1
16	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Internal Audit Follow-up Monitoring	1			1			1			1		
17	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal External Audit Follow-up Monitoring	1			1			1			1		

No.	Kegiatan Activity	Tahun 2024 In 2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
18	Kegiatan Konsultasi Consultation Activities												
19	Desk Reviu Kegiatan Cabang Usaha Business Branch Review Desk		2					2		2			
20	Penugasan Khusus dari Manajemen Special Assignment from Management	1			1			1			1		
21	Pemeriksaan Khusus/PDPT Special Examination/PDPT						1						

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, SPI telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan audit kantor cabang yaitu Cabang Balikpapan dan Cabang Manado;
2. Kegiatan audit tematik yaitu Audit tematik Pengadaan Barang dan Jasa Non Barang Dagangan dan audit tematik Kinerja Operasional Divisi Perdagangan Non Bahan Pokok pada Komoditas Pupuk Subsidi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
3. Kegiatan audit operasional anak Perusahaan PT PPI Industri;
4. Kegiatan pendampingan audit KAP;
5. Kegiatan validasi yaitu validasi risk manajemen Index tahun 2022 dan tahun 2023 serta data P3DN;
6. Kegiatan pengembangan manajemen Divisi SPI yaitu Pembaharuan Pedoman Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Laporan Kinerja SPI dan Penyusunan PKPT 2025;
7. Kegiatan monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal (Hasil Audit KAP dan BPK) triwulan 1 s.d. 4;
8. Kegiatan konsultasi antara lain:
 - a. Arahan Perihal Audit Khusus Wilayah Mojokerto dan Probolinggo a.n Haidzer Ali Al Azizi;
 - b. Pembahasan Pelepasan Aset Tidak Tercatat;
 - c. Pembahasan Pembuatan Kajian Hukum Atas 3 (Tiga) Aset di Jl. Talang Semut, Jl. Blitar, dan Jl. Proklamasi;
 - d. Pembahasan Perluasan Pengelolaan Dana PMKM (Swakelola) di Kantor Cabang;
 - e. Arahan Permasalahan PT Bisma Belis;
9. Kegiatan desk reviu RKAP kantor Cabang Manado, Malang, Banda Aceh, Balikpapan, Purwokerto, Medan, Yogyakarta, Bengkulu dan evaluasi proje Project Penjualan Divisi Komoditas Pangan dan Produk Konsumen Tahun 2023 serta reviu Permintaan Pembayaran Proyek Pekerjaan Pengadaan Listrik 865 KVA Ex PT BGR (Persero) oleh PT Bisma Belis;

As of the Fourth Quarter of 2024, IAU has performed audit activities, including the following:

1. Branch office audit activities, namely Balikpapan Branch and Manado Branch;
2. Thematic audit activities, namely the thematic Audit of Procurement of Non-Trade Goods and Services and the thematic audit of Operational Performance of the Non-Staple Trade Division on Subsidized Fertilizer Commodities at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
3. Operational audit activities of PT PPI Industri's subsidiary;
4. Audit assistance activities for KAP;
5. Validation activities, namely validation of the 2022 and 2023 risk management Index and P3DN data;
6. IAU Division management development activities, namely Updates to the Gratuity Control Program (PPG) Guidelines, IAU Performance Reports, and Preparation of the 2025 PKPT;
7. Monitoring activities for follow-up to internal and external audit results (KAP and BPK Audit Results), in first to fourth quarters;
8. Consultation activities include:
 - a. Guidance on Special Audit of Mojokerto and Probolinggo Regions on behalf of Haidzer Ali Al Azizi;
 - b. Discussion on Disposition of Unrecorded Assets;
 - c. Discussion on Making Legal Studies on 3 (Three) Assets on Jl. Talang Semut, Jl. Blitar, and Jl. Proklamasi;
 - d. Discussion on Expansion of PMKM Fund Management (Swakelola) at Branch Offices;
 - e. Guidance on PT Bisma Belis Issues;
9. Desk review activities for the RKAP of Manado, Malang, Banda Aceh, Balikpapan, Purwokerto, Medan, Yogyakarta, Bengkulu Branch Offices, and evaluation of the Food Commodity and Consumer Products Division Sales Project for 2023, as well as review of the Payment Request for the 865 KVA Electricity Procurement Project Ex PT BGR (Persero) by PT Bisma Belis.

10. Kegiatan penugasan khusus dari manajemen antara lain:
 - a. Pelaksanaan Pendampingan Asesment ICORPAX oleh BPKP;
 - b. Diseminasi Media Sosial dan Surat Edaran Anti Gratifikasi Hari Raya;
 - c. Pendampingan Audit BPK;
 - d. Pembentukan Tim Unit Pengengali Gratifikasi (SK Tim UPG).
 11. Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari:
 - a. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pembelian dan Penjualan Tepung Gatotkaca Tahun 2022/2023 pada Warung Pangan;
 - b. Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo PT PPI Cabang Surabaya;
 - c. Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Jember di PT PPI Cabang Surabaya;
 - d. Audit Tujuan Tertentu atas Penjualan Divisi Komoditas Pangan dan Produk Konsumen Kantor Pusat Tahun 2023;
 - e. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Perusahaan untuk Kepentingan Pribadi dan Pelanggaran Peraturan PT PPI Cabang Pekanbaru;
 - f. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Klaim Fiktif Kacamata Serta Rawat Inap Tahun 2024;
 - g. Audit atas Dugaan Pemalsuan dan/atau Penyalahgunaan Dokumen atas nama PT PPI;
 - h. Audit Insiden Vaksin Beku pada PT PPI Cabang Madiun;
 - i. Audit Tindak Lanjut Cabang Gorontalo;
 - j. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Permasalahan pada Komoditi Pupuk Subsidi, Pupuk Non subsidi, Pestisida dan Absensi Personil di Cabang Pratama Pekanbaru di PT PPI Tahun 2024;
 - k. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan pada Divisi Perdagangan Pangan dan Proyek Khusus (Eks Divisi Komoditas Pangan dan Produk Konsumen) PT PPI Tahun 2022-2024;
 - l. Pemeriksaan Pengelolaan Piutang dan Persediaan Komoditas Pupuk Subsidi, Pupuk Non Subsidi dan Bahan Pokok.
10. Special assignment activities from management include:
 - a. Assistance in the ICORPAX Assessment by BPKP.
 - b. Dissemination of Social Media and Anti-Gratuity Circular Letter for Holidays.
 - c. Assistance with BPK Audit.
 - d. Formation of the Gratuity Control Unit Team (UPG Team Decree).
 11. Specific purpose examination activities consisting of:
 - a. Audit with Specific Purpose on the Purchase and Sale of Gatotkaca Flour in 2022/2023 at Warung Pangan;
 - b. Special Audit on Receivables and Inventory of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizers in Mojokerto and Probolinggo Regencies of PT PPI in Surabaya Branch.
 - c. Special Audit on Receivables and Inventory of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizers in Jember Regency at PT PPI, Surabaya Branch;
 - d. Audit with Specific Purpose on Sales of the Food Commodity and Consumer Products Division of Headquarters for 2023;
 - e. Audit with Specific Purpose on Alleged Misuse of Company Facilities for Personal Gain and Violation of PT PPI Pekanbaru Branch Regulations.
 - f. Audit with Specific Purpose on Alleged Fictitious Claims for Eyeglasses and Inpatient Care in 2024;
 - g. Audit on Alleged Forgery and/or Misuse of Documents on behalf of PT PPI;
 - h. Audit of Frozen Vaccine Incident at PT PPI Madiun Branch;
 - i. Follow-up Audit of Gorontalo Branch;
 - j. Audit with Specific Purpose on Alleged Issues with Subsidized Fertilizers, Non-Subsidized Fertilizers, Pesticides, and Personnel Absences in Pratama Pekanbaru Branch at PT PPI in 2024;
 - k. Examination with Specific Purpose on Sales in the Food Trade and Special Projects Division (Ex-Food Commodity and Consumer Products Division) of PT PPI in 2022-2024;
 - l. Examination of Receivables and Inventory Management of Subsidized Fertilizers, Non-Subsidized Fertilizers, and Staple Foods.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Hingga akhir tahun 2024, PPI tidak memiliki komite-komite di bawah Direksi. Semua tugas dan kewenangan yang umumnya ada pada komite direksi dapat ditangani langsung oleh Direksi. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi transparansi, etika, dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan Perusahaan. Selain itu, PPI juga memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap menjadi prioritas utama.

AKUNTAN PUBLIK/AUDITOR EKSTERNAL

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (“KAP”) sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Akuntan Publik dan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS Tahunan.

Mekanisme penunjukan KAP dimuat di dalam *Board Manual* serta sudah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait penunjukan calon Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dengan melibatkan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap calon Auditor Eksternal dalam proses penunjukannya.

Fungsi Audit Eksternal

Penetapan KAP dan Akuntan Publik Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

As of the end of 2024, PPI did not have committees under the Board of Directors. All duties and authorities typically vested in directorial committees could be handled directly by the Board of Directors. However, this does not diminish transparency, ethics, and compliance in the Company’s decision-making. Additionally, PPI ensures that shareholder interests remain the top priority.

PUBLIC ACCOUNTANT/EXTERNAL AUDITOR

Mechanism of Appointment of Public Accounting Firm (KAP)

The Company utilizes the services of a Public Accountant Firm (“KAP”) as an independent external party to provide opinions regarding the compliance of the Company’s financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Public Accountants and the KAP that will audit the Consolidated Financial Statements and the PKBL Financial Statements are proposed by the Board of Commissioners and subsequently submitted for approval by shareholders through the mechanism of the Annual GMS.

The mechanism for appointing the KAP is included in the Board Manual and has been established as part of the Board of Commissioners’ Work Program. In practice, the Board of Commissioners discusses the appointment of potential External Auditors who will audit the Company’s financial statements involving the Audit Committee and the Risk Management Committee.

Through the Audit Committee, the Board of Commissioners evaluates the potential External Auditor in the appointment process.

External Audit Function

The appointment of the Company’s Public Accountant Firm and Public Accountants refers to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, article 3 paragraph 1, which states that general audit services for financial statements of an entity are conducted by a Public Accountant Firm for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komunikasi yang terjalin di antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen senantiasa berjalan efektif dan efisien. Selama proses audit berlangsung, KAP berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Oleh karena itu, auditor eksternal dan Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Pada saat menjalankan kegiatan audit, Komite Audit dan KAP melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan menyampaikan hasil auditnya saat *exit meeting*.

Lingkup Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Eksternal

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Akuntan Publik tahun 2024

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Coordination Between External Auditor and Audit Committee

Communication between the Public Accountant Firm (KAP), the Audit Committee, and Management always runs effectively and efficiently. During the audit process, the KAP coordinates with the Audit Committee to request input/advice on areas of special concern from the Audit Committee. Therefore, the external auditor and the Audit Committee regularly hold meetings to discuss significant important issues.

During the audit activities, the Audit Committee and the KAP discuss the findings obtained by the KAP and present the audit results during the exit meeting.

Scope of Responsibilities of Management and External Auditor

Management is responsible for preparing and presenting financial statements in accordance with the principles of SAK as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Meanwhile, the external auditor is responsible for providing an audit opinion on the financial statements prepared by management based on audit standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Public Accountant in 2024

The Public Accounting Firm appointed by the Company to audit the Company's consolidated financial statements for the 2024 fiscal year and the PKBL Financial Statement for the fiscal year ending December 31, 2024, was Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Akuntan Publik Tahun 2024 | Public Accountant in 2024

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Registrasi: KMK No.477/KM.1/2015 Registration No.: KMK No.477/KM.1/2015
Akuntan Accountant	:	Dewi Novita Sari; No. Izin: AP.1154 Permission No.: AP.1154
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year
Periode Penugasan Assignment Period	:	12 Desember 2024 s.d. 30 April 2025 December 12, 2024 to April 30, 2025
Tanggal Laporan Report Date	:	28 Juli 2025 July 28, 2025
Jasa Service	:	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2024 Audit of Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and PKBL Financial Statements for the 2024 Fiscal Year

Jasa Lainnya Other Services	:	Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan capaian Key Performance Indicator (KPI), Audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) General audit of compliance with laws and regulations, application of agreed procedures to Key Performance Indicator (KPI) achievement reports, General audit of financial statement of micro and small business funding (PUMK) programs
Biaya Fee	:	Rp750.000.000

Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2024 “Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PPI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Daftar Akuntan Publik

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perseroan 5 (lima) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2017 hingga 2022 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The audit results stated that the Financial Statements and PKBL Financial Statements for the 2024 Fiscal Year “Present fairly, in all material respects, the financial position of PPI and its subsidiaries as of December 31, 2024, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on those date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”.

List of Public Accountants

To prioritize transparency, the following is the Public Auditor of the Company’s Financial Statement for 5 (five) consecutive years for the 2017 to 2022 fiscal years can be seen in the table below:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Registrasi: KMK No.477/KM.1/2015 Registration No.: KMK No.477/KM.1/2015	Dewi Novita Sari No. Izin: AP.1154 Permission No.: AP.1154	a. Audit umum Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 b. Audit umum atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan capaian Key Performance Indicator (KPI) c. Audit umum atas laporan keuangan program pendanaan usaha mikro dan kecil (PUMK) a. General audit of the Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year b. General audit of compliance with laws and regulations, application of agreed procedures for Key Performance Indicator (KPI) achievement reports c. General audit of financial statement of micro and small business funding (PUMK) programs	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Present fairly, in all material respects	750.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Sikanto Pawiroatmodjo No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Pengendalian Intern c. Evaluasi Capaian Key Performance Indicator (KPI) d. Audit Laporan Program Pendanaan Mikro dan Kecil (PUMK) a. Audit of PPI and Subsidiary Financial Statements b. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control c. Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) Achievement d. Audit of Micro and Small Funding (PUMK) Program Reports	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	750.000.000
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Bandana No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Pengendalian Intern c. Evaluasi Capaian Key Performance Indicator (KPI) d. Audit Laporan Program Pendanaan Mikro dan Kecil (PUMK) a. Audit of PPI and Subsidiary Financial Statements b. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control c. Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) Achievement d. Audit of Micro and Small Funding (PUMK) Program Reports	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	874.090.000
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan No. Registrasi: B55/ KM.1/2017 Registration No.: B55/KM.1/2017	Bandana No. Izin: AP.1655 Permission No.: AP.1655	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern c. Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja d. Audit Laporan Keuangan PKBL a. Audit of PPI and Subsidiary Financial Statements b. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control c. Review services for Performance Evaluation Reports d. Audit of PKBL Financial Statements	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	485.000.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2020	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("Kreston HHES") No. Registrasi: 678/KM.1/2017 Registration No.: 678/KM.1/2017	Welly Adrianto No. Izin: AP. 0060 Permission No.: AP. 0060	a. Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern c. Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja d. Audit Laporan Keuangan PKBL a. Audit of PPI and Subsidiary Financial Statements b. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control c. Review services for Performance Evaluation Reports d. Audit of PKBL Financial Statements	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	660.000.000

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Kebijakan Manajemen Risiko

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, PT PPI menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko disetiap aktivitas kegiatan Perusahaan, maka identifikasi dan penanganan terhadap tantangan, hambatan maupun kendala – kendala dalam pelaksanaan dalam rencana kerja perusahaan dapat termitigasi dengan baik agar dampak dari risiko yang timbul terhadap aktivitas Perusahaan dapat diminimalisasi. Dalam penerapannya, PT PPI mengacu pada prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 : 2018, sebagai upaya untuk memastikan proses pengelolaan risiko yang sistematis, terstruktur, dan efektif. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkelanjutan, dalam mendukung integritas, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Dengan demikian, misi Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan visi Perusahaan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Direksi telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan konteks dan kriteria risiko, melakukan penilaian risiko, *monitoring*, evaluasi hingga pelaporan manajemen

Risk Management Policy

As a company engaged in the trading sector, PT PPI recognizes that risk is an integral part of every operational activity and can impact the Company's business results and performance. By implementing risk management in every activity of the Company, the identification and handling of challenges, obstacles, and constraints in the implementation of the Company's work plan can be properly mitigated, enabling the impact of risks that arise in the Company's activities to be minimized. In its practice, PT PPI refers to the principles, frameworks, and processes of risk management based on ISO 31000: 2018, as part of an effort to ensure a systematic, structured, and effective risk management process. In addition, the implementation of risk management is also an essential part of the implementation of sustainable Good Corporate Governance (GCG), in supporting integrity, accountability, and the achievement of the Company's strategic objectives. Thus, the Company's mission can be effectively implemented, and its vision can be achieved according to the set targets.

The Board of Directors has established the Corporate Risk Management Guidelines, which are intended to guide the establishment of risk contexts and criteria, conduct risk assessments, monitor, evaluate, and report on risk

risiko yang bertujuan untuk mencapai sasaran Perusahaan sebagai wujud komitmen penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi. Pedoman manajemen risiko tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT PPI.

Pedoman Manajemen Risiko dituangkan secara umum sebagai berikut:

- Semua unit kerja di lingkungan PT PPI wajib melaksanakan manajemen risiko untuk semua aktivitas bisnis dan untuk kepentingan Perusahaan;
- Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan wajib menerapkan manajemen risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*);
- Manajemen risiko merupakan bagian dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik;
- Semua unit kerja agar terlibat dalam proses penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian serta monitoring risiko, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiap tahun anggaran;
- Pengelolaan risiko merupakan salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* semua unit kerja di lingkungan PT PPI.

Kebijakan Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2018.

management, aimed at achieving the Company's objectives, as a form of its commitment to implementing risk management across the organization in a comprehensive and integrated manner. These risk management guidelines are outlined in Board of Directors Regulation Number 36/PERDIR/PPI/XII/2024 concerning Strategic Management Guidelines for PT PPI's Risk Management.

The Risk Management Guidelines are generally outlined as follows:

- All work units within PPI are required to implement risk management for all business activities and for the benefit of the Company.
- The Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees are required to implement integrated risk management (*Enterprise Risk Management*);
- Risk Management is an integral part of the implementation of *Good Corporate Governance (GCG)*.
- All work units are to be involved in the process of identifying, analyzing, evaluating, controlling, and monitoring risks, integrated with the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for each fiscal year;
- Risk Management is one of the *Key Performance Indicators (KPIs)* for all work units within PT PPI.

Risk Management Policy

The Risk Management Principles applied by PPI refer to ISO 31000:2018.

01

Terintegrasi Integrated

Manajemen Risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan aktivitas Perusahaan. | Risk Management is an integrated part of all Company activities.

02

Terstruktur dan Komprehensif Structured and Comprehensive

Dalam pelaksanaannya Perusahaan melakukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. | In its practice, the Company takes a structured and comprehensive approach to deliver consistent and comparable outcomes.

03

Dapat Disesuaikan Dapat Disesuaikan

Kerangka kerja Manajemen Risiko dan prosesnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Perusahaan terkait sasarannya. | The Risk Management framework and processes can be tailored and adapted to the Company's external and internal context related to its objectives.



Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerja manajemen risiko. Untuk itu, Perseroan telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif.

Kerangka kerja manajemen risiko diperlukan sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas manajemen risiko di semua tingkatan perusahaan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerangka kerja manajemen untuk menyediakan pedoman yang diterapkan pada keseluruhan level perusahaan.

Kerangka kerja memastikan informasi tentang risiko yang diturunkan dari proses manajemen risiko dilaporkan secara layak dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

Risk Management Framework

The success of implementing risk management depends on the effectiveness of risk management work. Therefore, the Company has developed a risk management framework to ensure that risk management implementation can proceed effectively.

The risk management framework is necessary as the basis for implementing all risk management activities at all levels of the Company. The success of risk management implementation depends on the effectiveness of the management framework to provide guidelines applied at all levels of the Company.

The framework ensures that information about risks derived from the risk management process is reported appropriately and used as the basis for decision-making

serta akuntabilitas pada seluruh tingkatan perusahaan.

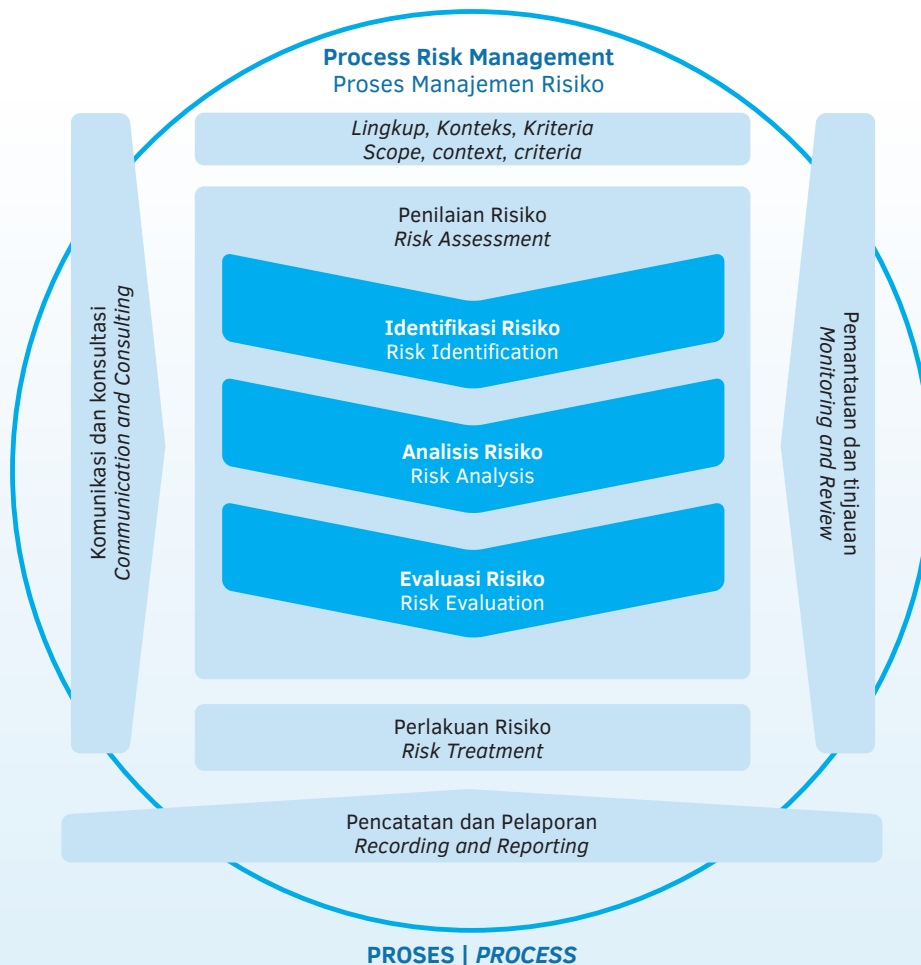
and accountability at all levels of the Company.

Adapun skema kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's Risk Management Framework scheme is as follows:



Proses Manajemen Risiko | Process of Risk Management



Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko di PPI dimulai dari penetapan konteks dengan mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan sekitar sasaran yang akan dicapai, *stakeholder* yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Kemudian dilakukan asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko serta perlakuan risiko yang dilakukan dengan perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Adapun proses komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Selanjutnya, proses *monitoring* dan *review* dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan serta dengan audit manajemen risiko. Proses monitoring dan review dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari kebijakan pelaksanaan manajemen sehingga Manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko.

Strategi Risiko

A. Risk Appetite Statement

Selera risiko (*risk appetite*) adalah keputusan penerimaan/penolakan terhadap risiko yang masih ada setelah dilakukannya suatu penanganan risiko tertentu (*residual risk*). Keputusan terkait selera risiko (*risk appetite*) adalah kewenangan Direksi yang didelegasikan kepada para risk owner. Risk appetite statement terdiri dari:

Process of Risk Management

The risk management process at PPI starts from setting the context by identifying and disclosing organizational goals, the environment around the targets to be achieved, interested stakeholders and the diversity of risk criteria. Then it is conducted a risk assessment consisting of identification, analysis and evaluation of risks and risk treatment carried out by planning for mitigating risks to obtain alternative solutions, allowing them to be applied effectively and efficiently.

The process of communication and consultation is conducted to ensure the availability of adequate support for each risk management activity and to enable each activity to achieve its targets precisely.

Furthermore, the monitoring and review process is performed through evaluation and examination of ongoing business processes as well as by risk management audits. The monitoring and review process can be done by internal and external parties with the aim of finding out the weaknesses of management implementation policies so that management can make updates to risk management policies.

Risk Strategy

A. Risk Appetite Statement

Risk appetite is the decision to accept or reject risks that remain after certain risk management (residual risk) has been implemented. Decisions regarding risk appetite are the responsibility of the Board of Directors and delegated to the risk owners. The risk appetite statement consists of:

Sikap Terhadap Risiko Attitude Towards Risk	Pernyataan Selera Risiko (<i>Risk Appetite Statement "RAS"</i>) PT PPI
Tidak Toleran Intolerant	- Perusahaan tidak memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. The Company does not tolerate violations of laws and regulations, including environmental damage and negligence in cybersecurity and personal data protection. - Perusahaan menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi The Company runs its business by implementing good corporate governance and integrated risk management. - Perusahaan menjunjung tinggi <i>core value</i> AKHLAK sebagai budaya Perusahaan The Company upholds the core value of AKHLAK as a corporate culture.
Konservatif Conservative	- Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. The Company meets its financial obligations and maintains a healthy financial structure, and maintains sustainable business continuity. - Perusahaan menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik. The Company carries out its main business activities in a timely manner, on target, and in good faith.
Moderat Moderate	Perusahaan melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makro ekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur. The Company optimizes the management of market and macroeconomic volatility by accepting the consequences of the burden in a measured manner.

Sikap Terhadap Risiko
| Attitude Towards Risk

Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement "RAS")
PT PPI

Strategis | Strategic

Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek *Environmental, Social dan Governance* (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) | The Company actively and by considering mature risk calculations to create value through business model innovation, exploration and development, optimization of portfolio arrangement, and inorganic growth that considers Environmental, Social and Governance (ESG) aspects by accepting the consequences of increasing additional capital expenditures (CAPEX).

B. Metrik Strategi Risiko | Risk Strategy Metrics

No	Kategori Risiko BUMN State-Owned Enterprise Risk Categories	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN State-Owned Enterprises T2 & T3 Risk Category	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Attitude Towards Risk	Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan/ Limit Limit Value
1	Risiko Keuangan Financial Risk	Risiko Industri Umum – Keuangan General Industry Risk - Finance	Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan The Company meets its financial obligations and maintains a healthy financial structure, and maintains sustainable business continuity.	Konservatif Conservative	Cashflow	%	90
2	Risiko Portofolio Portfolio Risk	Risiko Restrukturisasi & Reorganisasi - Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemisahan, Pembubaran, Likuidasi, Kemitraan dan Restrukturisasi Restructuring & Reorganization Risks - Mergers, Acquisitions, Consolidation, Separations, Dissolutions, Liquidations, Partnerships, and Restructurings	Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) The Company actively and by considering mature risk calculations to create value through business model innovation, exploration and development, optimization of portfolio arrangement, and inorganic growth that considers Environmental, Social and Governance (ESG) aspects by accepting the consequences of increasing additional capital expenditures (CAPEX).	Strategis Strategic	Progress restrukturisasi Restructuring progress	%	75
3	Risiko Strategis Strategic Risk	Risiko Fiskal - Subsidi dan Kompensasi Fiscal Risk - Subsidies and Compensation	Perusahaan menjalankan penugasan untuk kemanfaatan umum sebaik mungkin dengan tetap mempertimbangkan keuntungan bagi Perusahaan The Company carries out assignments for the public benefit as best as possible while still taking into account the benefits for the Company.	Konservatif Conservative	Keberhasilan penyerapan program penugasan CPP Successful absorption of the CPP assignment program	%	80
4	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko Industri Umum – Operasional General Industry Risk – Operational	Perusahaan melakukan optimalisasi volatilitas pasar dan makro ekonomi dengan menerima beban konsekuensi secara terukur dalam rangka pencapaian KPI dan RKAP The Company optimizes market and macroeconomic volatility by accepting the consequences in a measurable manner to achieve KPI and RKAP.	Moderat Moderate	Deviasi pencapaian gross profit Deviation in gross profit achievement	%	15

No	Kategori Risiko BUMN State-Owned Enterprise Risk Categories	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN State-Owned Enterprises T2 & T3 Risk Category	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Attitude Towards Risk	Parameter	Satuan Ukuran Unit of Measurement	Nilai Batasan/ Limit Limit Value
5	Risiko Hukum dan Kepatuhan Legal and Compliance Risks	Risiko Kebijakan – Sektoral Policy Risk – Sectoral	Perusahaan tidak memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan The Company does not tolerate any violations of statutory regulations.	Tidak toleran Intolerant	Tingkat kejadian <i>fraud</i> Fraud incident rate	Jumlah Total	0
6	Risiko Makro, Geopolitik, dan Pasar Macro, Geopolitical, and Market Risks	Risiko Industri Umum – Pasar & Makroekonomi General Industry Risks - Markets and Macroeconomics	Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek <i>environmental</i> , <i>social</i> dan <i>governance</i> (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) The Company actively and by considering mature risk calculations to create value through business model innovation, exploration and development, optimization of portfolio arrangement, and inorganic growth that considers Environmental, Social and Governance (ESG) aspects by accepting the consequences of increasing additional capital expenditures (CAPEX).	Strategis Strategic	Inovasi baru New innovation	Jumlah Total	3
7	Risiko Strategis Strategic Risk	Risiko Restrukturisasi & Reorganisasi - Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemisahan, Pembubaran, Likuidasi, Kemitraan dan Restrukturisasi Restructuring & Reorganization Risks - Mergers, Acquisitions, Consolidation, Separations, Dissolutions, Liquidations, Partnerships, and Restructurings	Perusahaan melakukan optimalisasi volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima beban konsekuensi secara terukur dalam rangka pencapaian KPI dan RKAP The Company optimizes market and macroeconomic volatility by accepting the consequences in a measurable manner to achieve KPI and RKAP.	Strategis Strategic	Deviasi EBITDA EBITDA deviation	%	25
8	Risiko Keuangan Financial Risk	Risiko Industri Umum – Keuangan General Industry Risk - Finance	Perusahaan melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makro ekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur. The Company optimizes the management of market and macroeconomic volatility by accepting the consequences of the burden in a measurable manner.	Moderat Moderate	Optimalisasi asset Asset optimization	%	70

Peta Risiko

Terdapat 8 (delapan) risiko utama perusahaan pada tahun 2024 yang dituangkan dalam peta risiko sebagaimana penilaian risiko sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Risk Map

There were 8 (eight) main risks of the Company in 2024, outlined in the risk map, as outlined in the risk assessment as of December 2024, as follows:

Peristiwa Risiko Risk Events

- 1 Kegagalan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan portofolio produk | Company failure in managing product portfolio
- 2 Penjualan komoditi tidak dapat mencapai target RKAP, baik secara volume maupun profitabilitas | Commodity sales failed to reach the RKAP target, either in terms of volume or profitability.
- 3 Risiko struktur pendanaan jangka pendek | Short-term funding structure risk
- 4 Pencapaian optimalisasi aset di bawah target | Asset optimization achievement below target
- 5 Kehilangan hak atas aset yang dimiliki oleh Perusahaan | Losing Rights to Company-Owned Assets
- 6 Pembekuan atau tidak terbitnya perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan | Suspension or non-issuance of business permits
- 7 Kurangnya kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas SDM | Lack of human resources capacity, competence, and capability
- 8 Rendahnya tingkat akurasi dan/atau kehandalan data dalam sistem informasi ERP | Low levels of accuracy and/or reliability of data in ERP information systems

Probabilitas Probability		Dampak Impact				
		Sangat Rendah Very Low 1	Rendah Low 2	Moderat Moderate 3	Tinggi High 4	Sangat Tinggi Very High 5
Probabilitas Probability	Hampir Pasti Terjadi Almost Certain to Happen 5	7	12	17	22	25
	Sangat Mungkin Terjadi Very Likely to Happen 4	4	9	14	19	24
	Bisa Terjadi May Happen 3	3	8	13	18	23
	Jarang Terjadi Rarely Happens 2	2	6	11	16	21
	Sangat Jarang Terjadi Very Rare 1	1	5	10	15	20
Rendah Low						
Rendah – Menengah Low – Medium						
Menengah Medium						
Menengah-Tinggi Medium – High						
Tinggi High						

Level Risiko Inheren | Inherent Risk Level
 Level Risiko Residual | Residual Risk Level

1. Kegagalan Perusahaan dalam melakukan Pengelolaan Produk

Perusahaan memiliki berbagai macam kategori produk yang diperdagangkan, kategori produk yang berbeda tersebut memiliki karakteristik bisnis yang tidak saling terkait di masing – masing kategori usahanya. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan gagal dalam melakukan portofolio produk yang disebabkan oleh belum adanya strategi bisnis yang memadai di masing – masing kategori produk. Per Triwulan IV tahun 2024, Perusahaan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp2.162,73 M (dua triliun seratus enam puluh dua miliar koma tujuh tiga rupiah) atau 73,23% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama.

2. Penjualan komoditi tidak dapat mencapai target RKAP, baik secara volume maupun profitabilitas

Perusahaan telah menetapkan target atas kegiatan usaha, namun berpotensi tidak tercapainya target tersebut sehingga penilaian kinerja Perusahaan akan berdampak kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya kegiatan operasional, serta sales and marketing Perusahaan atas pencapaian target gross profit yang telah ditetapkan. Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi gross profit Perusahaan sebesar Rp313,03 M (tiga ratus tiga belas miliar koma nol tiga rupiah) atau 78,50% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama.

3. Risiko struktur pendanaan jangka pendek

Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran dari customer kepada Perusahaan dilakukan secara kredit. Namun masih kurangnya customer yang melakukan

1. Company Failure to Manage Products

The Company trades in a variety of product categories, each with distinct and unrelated business characteristics. This poses a risk of a failed product portfolio due to the lack of a suitable business strategy for each product category. In Q4 2024, the Company recorded consolidated revenue of Rp2.162.73 billion (two trillion one hundred sixty two billion point seventy three rupiah), or 73.23% of the set target for the same period.

- Commodity sales failed to reach the RKAP target, either in terms of volume or profitability.

The Company has set targets for its business activities; however, there is a risk that these targets may not be met, which could negatively impact the Company's performance appraisal. This is affected by the Company's suboptimal operational activities, as well as the Company's sales and marketing efforts, in achieving the set gross profit target. In Q4 of 2024, the Company's gross profit realization amounted to Rp313.03 billion (three hundred thirteen billion point zero three rupiah), or 78.50% of the set target for the same period.

3. Short-term funding structure risk

In certain situations, customer payments to the Company are made on credit. However, a lack of customers is not settling their debts within the agreed-

pelunasan hutang sesuai dengan tempo pembayaran yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan terkait penjualan secara kredit tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan adanya keterlambatan koleksi piutang/piutang tak tertagih.

upon payment terms. This is caused by the credit sales policy not being properly enforced, and delays in accounts receivable/uncollectible accounts.

4. Pencapaian Optimalisasi Aset di bawah Target
 Pada Triwulan IV tahun 2024, Perusahaan mencatatkan pendapatan dari optimalisasi aset sebesar Rp29,26 M (dua puluh sembilan koma dua enam miliar rupiah) atau 71,15% dibandingkan dengan target periode yang sama tahun 2024.

4. Asset Optimization Achievement Below Target
 In Q4 2024, the Company recorded revenue from asset optimization of Rp29.26 billion (twenty nine point two six billion rupiah) or 71.15% compared to the target for the same period in 2024.

5. Kehilangan Hak atas Aset yang dimiliki oleh Perusahaan
 Perusahaan memiliki ratusan titik aset yang tersebar di seluruh Indonesia, beberapa di antaranya diperuntukkan sebagai kantor dan juga gudang penyimpanan. Namun banyak juga aset yang dimiliki tersebut tidak ditempati maupun dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya mantan karyawan, masyarakat, dan juga instansi Pemerintahan. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan kehilangan hak atas aset yang dimiliki apabila tidak dilakukan pengamanan terhadap aset tersebut, terutama yang dikuasai oleh pihak ketiga.

5. Losing Rights to Company-Owned Assets
 The Company owns hundreds of assets across Indonesia, with some designated as offices and warehouses. However, many of these assets are not occupied or are being controlled by third parties, including former employees, the community, and government agencies. This creates a risk that the Company will lose its rights to these assets if it fails to secure them, particularly those controlled by third parties.

6. Pembekuan atau Tidak Terbitnya Perizinan yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perusahaan
 Realisasi pencapaian gross profit atas komoditi yang membutuhkan perizinan atas pengadaannya yaitu sebesar Rp71,46 M (tujuh puluh satu koma empat enam miliar rupiah) atau sebesar 72,36% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

6. Suspension or Non-Issuance of Business Permits
 The realization of gross profit achievement on commodities that require permits for their procurement amounted to Rp71.46 billion (seventy one point four six billion rupiah) or 72.36% compared to the set target.

7. Kurangnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas SDM
 Salah satu faktor penting dalam pencapaian target Perusahaan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang ahli atau terampil. Ketidakmampuan Perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan pegawai yang ahli atau terampil dan/atau kegagalan untuk mengembangkan talenta internal serta struktur organisasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas dan efisiensi kerja.

7. Lack of Human Resources Capacity, Competence, and Capability
 A critical factor in achieving the Company's targets is the availability of skilled and expert human resources. The Company's inability to recruit or retain skilled or expert employees and/or failure to develop internal talent and an inadequate organizational structure, could lead to low productivity and work efficiency.

8. Rendahnya tingkat kehandalan ERP dan/atau kehandalan jaringan dalam sistem informasi
 Sistem informasi digunakan untuk dapat meningkatkan kapabilitas perdagangan yang terdigitalisasi. Namun apabila tingkat kehandalan ERP dan/atau kehandalan jaringan dalam sistem informasi masih rendah, maka akan berpotensi terjadinya kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.

8. Low Reliability of ERP and/or Information System Networks
 Information systems are used to enhance digitalized trade capabilities. However, suppose the level of ERP reliability and/or network reliability in the information system remains low. In that case, there is the potential for errors in planning and decision-making by Management.

Risiko Utama Perseroan dan Mitigasinya | The Company's Main Risks and Their Mitigations

No.	Risiko & Penjelasan Risk & Explanation	Mitigasi yang Dilakukan Mitigation Actions
1	Risiko Kegagalan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan portofolio produk. Risk of Company Failure in product portfolio management Penjelasan Explanation: Perusahaan memiliki berbagai macam kategori produk yang diperdagangkan, kategori produk yang berbeda tersebut memiliki karakteristik bisnis yang tidak saling terkait di masing – masing kategori usahanya. Hal tersebut berpotensi bahwa Perusahaan akan gagal dalam melakukan portofolio produk yang disebabkan oleh belum adanya strategi bisnis yang memadai di masing – masing kategori produk. Company trades various product categories, with different business characteristics that are not interrelated across their respective business segments. This poses a risk that the Company may fail in managing its product portfolio due to the lack of adequate business strategies for each product category.	Menyusun strategi penjualan dengan memperhatikan karakteristik bisnis pada setiap komoditi untuk meningkatkan realisasi GPM konsolidasi, ikut serta dalam program penjualan Pemerintah/Kementerian dan program lain yang relevan untuk dapat memperbesar <i>market share</i>, pengembangan <i>channel</i> penjualan ke <i>modern trade</i>, <i>e-commerce</i>, horeka, <i>General Trade</i>, Institusi (koperasi, pesantren, BUMD), dan trader, mengembangkan pola/strategi kedistributuran komoditi di seluruh Kantor Cabang, menyusun program <i>marketing</i> sebagai bagian strategi Perseroan untuk penguatan portofolio komoditi, melakukan <i>Joint Business Plan</i> (JBP) bersama <i>principal</i>, penguatan aliansi klaster pangan untuk mendapatkan produk kompetitif, R&D <i>value-added</i> komoditi dengan cara makloon/<i>repack</i>. Formulating sales strategies that consider the business characteristics of each commodity to increase consolidated Gross Profit Margin (GPM) realization, participating in Government/Ministry sales programs and other relevant programs to expand market share, developing sales channels to modern trade, e-commerce, HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe), General Trade, Institutions (cooperatives, Islamic boarding schools, BUMD), and traders, developing commodity distribution patterns/strategies across all Branch Offices, formulating marketing programs as part of the Company's strategy for strengthening commodity portfolios, conducting Joint Business Plans (JBP) with principals, strengthening food cluster alliances to obtain competitive products, R&D of value-added commodities through manufacturing/<i>repacking</i>.
2	Risiko Penjualan komoditi tidak dapat mencapai target RKAP, baik secara volume maupun profitabilitas Risk of commodity sales not meeting RKAP targets, both in volume and profitability Penjelasan: Explanation: Perusahaan telah menetapkan target atas kegiatan usaha, namun berpotensi tidak tercapainya target tersebut sehingga penilaian kinerja Perusahaan akan berdampak kurang baik. The Company has determined targets for its business activities. However, there is a potential for these targets not to be met, which could negatively impact the Company's performance appraisal.	a. Melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan SDM pada posisi komersial di Kantor Cabang menyesuaikan dengan target RKAP yang telah disetujui; Evaluating and mapping Human Capital (HC) needs for commercial positions in Branch Offices in accordance with approved RKAP targets; b. Ikut serta dalam program penjualan Pemerintah/Kementerian dan program lain yang relevan untuk dapat memperbesar <i>market share</i>; Participating in Government/Ministry sales programs and other relevant programs to expand market share; c. Melakukan <i>Joint Business Plan</i> (JBP) bersama <i>principal</i>; Conducting Joint Business Plans (JBP) with principals; d. Meningkatkan dan/atau memperluas market; Increasing and/or expanding the market; e. Melakukan evaluasi harga jual secara berkala agar dapat bersaing dengan kompetitor; Conducting regular selling price evaluations to remain competitive with competitors; f. <i>Sourcing strategic</i> untuk menjaga kontinuitas supply, penambahan SKU dan pengembangan produk; Strategic sourcing to maintain supply continuity, adding SKUs, and product development; g. Penguatan infrastruktur pergudangan (perbaikan gudang sesuai ISO) untuk standarisasi pergudangan; Strengthening warehouse infrastructure (warehouse improvements in accordance with ISO) for warehousing standardization; h. Memenuhi kebutuhan penyediaan atau peremajaan armada dalam mendukung kegiatan operasional Kantor Cabang; Meeting the needs for provision or rejuvenation of fleet to support Branch Office operational activities; i. Pemenuhan persyaratan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kategori <i>Cold Chain Product</i> (CCP) bagi unit kerja Komersial yang menjalankan bisnis farmasi; Fulfilling certification requirements for Good Drug Distribution Method (CDOB) for Cold Chain Product (CCP) category for Commercial work units engaged in the pharmaceutical business; j. Melakukan pengurusan perizinan terkait TDG, SLF, NIB sesuai yang dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan. Managing permits related to TDG, SLF, NIB as required for the Company's business activities.
3	Risiko struktur pendanaan jangka pendek Risk of short-term funding structure Penjelasan: Explanation: Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran dari customer kepada Perseroan dilakukan secara kredit. Namun masih kurangnya customer yang melakukan pelunasan hutang sesuai dengan tempo pembayaran yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan terkait penjualan secara kredit tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan adanya keterlambatan koleksi piutang/piutang tak tertagih. Under certain conditions, customer payments to the Company are made on credit. However, there is	a. Melakukan sosialisasi kembali terhadap ketentuan penjualan kredit dan penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan Perusahaan; Re-disseminating credit sales terms and enforcing sanctions for violations of Company policies; b. Penurunan tingkat piutang usaha dengan melakukan soft dan hard collection atas piutang jatuh tempo; Reducing accounts receivable levels through soft and hard collection of overdue receivables; c. Recovery piutang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) melalui strategi yang disusun oleh bagian piutang; Recovering the Allowance for Impairment Losses (CKPN) receivables through a strategy formulated by the receivables; d. Menyempurnakan ketentuan/SOP terkait pemilihan vendor; Improving terms/SOPs related to vendor selection; e. Melakukan business matching komoditi dengan fasilitas perbankan atau lembaga keuangan serta perbaikan rasio likuiditas Perseroan; Conducting commodity business matching with banking facilities or financial institutions

No.	Risiko & Penjelasan Risk & Explanation	Mitigasi yang Dilakukan Mitigation Actions
	still a lack of customers settling debts according to the agreed payment terms. This is due to credit sales terms not being implemented properly and delays in accounts receivable collection/bad debt expenses.	and improving the Company's liquidity ratio; f. Menyusun financial modelling (cash to cash cycle) untuk setiap komoditi yang diperdagangkan. Developing financial modeling (cash-to-cash cycle) for each traded commodity.
4	Risiko Pencapaian Optimalisasi Aset di bawah Target Risk of Asset Optimization Achievement Below Target	Pada Triwulan IV tahun 2024, Perseroan mencatatkan pendapatan dari optimalisasi aset sebesar Rp34,39 M (tiga puluh empat koma tiga puluh sembilan miliar rupiah) atau 57,93% dibandingkan dengan target periode yang sama tahun 2024. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 telah dilakukan penandatanganan sewa menyewa aset sebanyak 32 titik aset. In the Fourth Quarter of 2024, the Company recorded revenue from asset optimization of Rp34.39 billion (thirty-four point thirty-nine billion Rupiah) or 57.93% compared to the target for the same period in 2024. As of the Fourth Quarter of 2024, lease agreements for 32 asset points have been signed.
5	Risiko Kehilangan Hak atas Aset yang dimiliki oleh Perseroan Risk of Losing Rights to the Company's Assets Penjelasan: Explanation: Perseroan memiliki ratusan titik aset yang tersebar di seluruh Indonesia, beberapa di antaranya diperuntukkan sebagai kantor dan juga gudang penyimpanan. Namun banyak juga aset yang dimiliki tersebut tidak ditempati maupun dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya mantan karyawan, masyarakat, dan juga instansi Pemerintahan. Hal tersebut berpotensi bahwa Perseroan akan kehilangan hak atas aset yang dimiliki apabila tidak dilakukan pengamanan terhadap aset tersebut, terutama yang dikuasai oleh pihak ketiga. The Company owns hundreds of asset points spread across Indonesia, some of which are designated as offices and warehouses. However, many of these assets are unoccupied or controlled by third parties, including former employees, communities, and government agencies. This poses a risk that the Company will lose rights to its assets if security measures are not taken, especially for those controlled by third parties.	Perseroan melakukan berbagai upaya pengamanan aset seperti persiapan dokumen legalitas, koordinasi pihak eksternal dan internal, penyampaian surat rencana pengosongan kepada penghuni, sosialisasi kepada penghuni, negosiasi dengan penghuni, dan pengosongan. The Company undertakes various asset security efforts such as preparing legal documents, coordinating with external and internal parties, delivering letters of intent for vacating premises to occupants, socializing with occupants, negotiating with occupants, and vacating.
6	Risiko Pembekuan atau Tidak Terbitnya Perizinan yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perusahaan Risk of Freezing or Non-Issuance of Permits Related to the Company's Business Activities	Perseroan telah melakukan aktivitas untuk meminimalisasi kejadian risiko sebagai berikut: The Company has undertaken activities to minimize risk as follows: a. Bahan Kimia Berbahaya: Hazardous Chemicals: - Telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan untuk 11 produk B2; Import approval has been obtained from the Ministry of Trade for 11 B2 products; - Dalam proses evaluasi oleh Kementerian Perindustrian untuk satu produk B2; One B2 product is under evaluation by the Ministry of Industry; - Dalam proses evaluasi oleh surveyor untuk 4 produk B2; 4 B2 products are under evaluation by surveyors; b. Bahan Kimia Non B2, dalam proses evaluasi oleh surveyor untuk dua produk non B2; Non-B2 Chemicals, two non-B2 products are under evaluation by surveyors; c. Beras Khusus: Specialty Rice: Telah mendapatkan persetujuan impor oleh Kementerian Perdagangan untuk empat produk beras khusus dan telah bekerja sama dengan buyer. Import approval has been obtained from the Ministry of Trade for four specialty rice products, and cooperation with buyers has been established.
7	Kurangnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas SDM Lack of Human Capital Capacity, Competence, and Capability Penjelasan: Explanation: Salah satu faktor penting dalam pencapaian target Perseroan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang ahli atau terampil. Ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut atau mempertahankan pegawai yang ahli atau terampil dan/atau kegagalan untuk mengembangkan talenta internal serta struktur organisasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas dan efisiensi kerja. A key factor in achieving the Company's targets is the availability of expert or skilled human capital. The Company's inability to recruit or	a. Melakukan evaluasi atas kebutuhan man power planning menyesuaikan dengan target pada tahun 2024; Evaluating manpower planning needs in accordance with 2024 targets; b. Melakukan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan Man Power Planning; Recruiting employees according to Manpower Planning needs; c. Melakukan pelatihan kepada pegawai di antaranya: Providing employee training, including: • Staff Development Program (SDP); • Young Talent Development Program (YTDP); • Group Development Program (GDP); • Public Training and certification; • Inhouse Training; • Program PPIjar (PPI Belajar); PPIjar (PPI Learning) Program; • Program Extra (Expert Berbicara); Extra (Expert Speaking) Program; d. Melaksanakan engagement program. Implementing engagement programs.

No.	Risiko & Penjelasan Risk & Explanation	Mitigasi yang Dilakukan Mitigation Actions
	retain expert or skilled employees and/or failure to develop internal talent, as well as an inadequate organizational structure, can lead to low productivity and work efficiency.	
8	Risiko rendahnya tingkat kehandalan ERP dan/atau kehandalan jaringan dalam sistem informasi Risk of low ERP reliability and/or network reliability in information systems Penjelasan: Explanation: Sistem informasi digunakan untuk dapat meningkatkan kapabilitas perdagangan yang terdigitalisasi. Namun apabila tingkat kehandalan ERP dan/atau kehandalan jaringan dalam sistem informasi masih rendah, maka akan berpotensi terjadinya kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen. Information systems are used to enhance digitized trading capabilities. However, if the reliability of ERP and/or network reliability in information systems remains low, there is a potential for errors in planning and decision-making by Management.	a. Melakukan rekonsiliasi data transaksi baik terhadap unit kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang; Reconciling transaction data for both Head Office and Branch Office work units; b. Melakukan integrasi sistem informasi antara Induk - Anak Perusahaan PPI; Integrating information systems between the PPI's Parent Company and Subsidiaries; c. Penguatan SDM Kantor Pusat maupun Kantor Cabang di antaranya: Strengthening Head Office and Branch Office Human Capital, including: - Pemenuhan SDM terkait personil ERP baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar dapat menjalankan fungsi three ways matching dalam operasional sistem ERP terutama dalam hal karyawan resign maupun pensiun; Fulfilling HC needs related to ERP personnel at both Head Office and Branch Offices to enable three-way matching functions in ERP system operations, especially in cases of employee resignation or retirement; - Peningkatan kompetensi seluruh SDM Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam menerapkan sistem ERP; Increasing the competence of all Head Office and Branch Office HC in implementing the ERP system; d. Penyempurnaan ERP dan sosialisasi penerapan ERP untuk mengurangi human error dan meningkatkan akurasi data; Improving ERP and socializing ERP implementation to reduce human error and increase data accuracy; e. Peningkatan performa jaringan serta penguatan infrastruktur pendukung IT di Kantor Cabang agar sistem ERP dapat berjalan optimal. Improving network performance and strengthening IT supporting infrastructure at Branch Offices to ensure optimal ERP system operation.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif sangat penting bagi Perseroan karena sistem ini melindungi aset, memitigasi risiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan berkelanjutan sambil meminimalkan potensi ancaman dan kerentanan.

Salah satu upaya Perseroan dalam mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur Perseroan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Aktivitas pengendalian internal pada lingkup Perseroan secara garis besar bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di

Internal Control System Policy

Implementing a comprehensive Internal Control System is vital for the Company as it safeguards assets, mitigates risks, ensures compliance, enhances operational efficiency, and fosters trust among stakeholders. This system enables organizations to effectively and sustainably achieve their objectives while minimizing potential threats and vulnerabilities.

One of the Company's efforts to support the achievement of operational effectiveness and efficiency is by implementing a comprehensive Internal Control System involving elements of the Company, such as the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees.

Internal control activities within the scope of the Company broadly aim to assist management in supporting the achievement of the Company's performance objectives, providing adequate assurance regarding the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, risk management, operational effectiveness and efficiency, and to safeguard company assets at every

setiap level organisasi. Komitmen Direksi dan manajemen akan hal tersebut tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan telah memiliki Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal, disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tanggal 15 September 2017. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja Perseroan dalam menjalankan tata laksana sistem pengendalian internal pada lingkup Perseroan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan sistem deteksi dini Perseroan.

Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta pengelolaan risiko. Bagi Perseroan, hasil evaluasi pengendalian internal tersebut berguna sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan Perseroan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan PPI mengadopsi pendekatan standar internasional – COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) yang dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Efektivitas dan Efisiensi Operasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan PPI.
2. Keandalan Pelaporan Keuangan
PPI menjamin ketersediaan laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepatuhan Terhadap Perundangan-Undangan
PPI memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh PPI.

Berlandaskan pada kerangka COSO, maka unsur- unsur pengendalian internal Perseroan mencakup 5 (lima) komponen berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian
Komponen ini menjadi landasan utama bagi komponen pengendalian yang lain karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian

level of the organization. The commitment of the Board of Directors and management to this matter is stated in the Company's Governance Guidelines.

The Company has a General Internal Control System Guideline, ratified through Director's Decree Number: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 dated September 15, 2017. This guideline serves as a reference for all company units in implementing the internal control system within the Company's scope and to encourage the enhancement of the Company's responsibility implementation and early detection systems.

The Company regularly evaluates the effectiveness of internal controls at all levels, both in terms of policy implementation, procedures, internal supervision, and risk management. For the Company, the results of these internal control evaluations are useful as one of the bases for determining the improvement and refinement measures that the Company must undertake.

Alignment of the Internal Control System with the Coso Framework

The internal control activities implemented by PPI adopt an international standard approach - COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) designed to achieve 3 (three) main objectives, namely:

1. Effectiveness and Efficiency of Operations
These activities are intended to enhance the effectiveness and efficiency of the Company's resource management in order to achieve PPI's objectives.
2. Reliability of Financial Reporting
PPI ensures the availability of fair, timely, and relevant reports as the basis for making appropriate and accountable decisions.
3. Compliance with Laws and Regulations
PPI ensures that all activities carried out consistently comply with applicable laws and regulations, as well as internal procedures established by PPI.

Based on the COSO framework, the elements of the Company's internal control comprise the following 5 (five) components:

1. Control Environment
This component serves as the primary foundation for other control components as it significantly influences the effectiveness of internal control and

internal serta mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

2. **Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko**
Kegiatan ini mengawali proses pengendalian internal secara keseluruhan karena sangat menentukan bentuk design sistem pengendalian yang dibutuhkan serta menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak bagi perusahaan.
3. **Aktivitas Pengendalian**
Pada lingkup aktivitas pengendalian, manajemen memastikan bahwa Perseroan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis baik berupa kebijakan ataupun prosedur yang harus ditaati oleh seluruh insan PPI. Aktivitas pengendalian melibatkan semua tingkatan manajemen mulai level Direksi sampai dengan individu (*first line of defence*) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
4. **Sistem Informasi dan Komunikasi**
PPI menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi *first line of defence*. Selain itu, komponen ini juga mendorong Perseroan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal PPI secara keseluruhan.
5. **Pemantauan**
Aktivitas pemantauan merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian internal perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh *first line of defence* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Auditor Internal/ Eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa berjalan efektif.

reflects the commitment, behavior, and awareness of the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing the internal control system.

2. **Identification, Measurement and Management of Risk**
These activities initiate the overall internal control process as they determine the design of the required control system and determine whether a control is necessary for the Company.
3. **Control Activities**
In the scope of control activities, management ensures that the Company has taken appropriate actions to prevent a risk event. These control activities are documented in written form, either as policies or procedures to be followed by all PPI personnel. Control activities involve all levels of management from the Director level to individuals (first line of defense) responsible for carrying out daily operational activities.
4. **Information and Communication Systems**
PPI ensures the availability of relevant, accurate, and timely information for all levels of management down to individuals in the first line of defense. Additionally, this component also encourages the Company to ensure the reliability of financial reporting and compliance with applicable regulations. The information and communication component are a vital part of PPI's overall internal control system.
5. **Monitoring**
Monitoring activities are a crucial component of the Company's overall internal control system. These activities are carried out routinely by the first line of defense and their superiors, as well as separate evaluations by the Board of Directors, Board of Commissioners, or Internal/External Auditors. This aims to ensure that the internal control system operates effectively at all times.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PPI mencakup aspek Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan. Implementasi pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Selain itu, PPI juga melakukan

Financial and Operational Control System

The internal control activities carried out by PPI cover Operational, Accounting/Financial, and Compliance aspects. The implementation of internal controls from the operational perspective is further detailed in various policies such as Guidelines, Operational Procedures, and Work Instructions. Additionally, PPI also conducts strict

pemeriksaan fisik aset secara ketat guna mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan. Sementara itu, upaya pengendalian internal pada aspek Akuntansi/Keuangan dilakukan dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pemborosan.

PPI juga menggunakan software Akuntansi yang dapat diandalkan untuk menjamin akurasi pencatatan atas transaksi yang terjadi serta menyiapkan dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

Selain menguji pengendalian pada aspek Operasional dan Akuntansi/Keuangan, PPI juga menjaga derajat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan lini bisnisnya sebagai entitas BUMN yang bergerak di sektor perdagangan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan Perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Penjelasan mengenai hasil penilaian/*assessment*/review yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.

physical asset inspections to secure and protect its assets. Meanwhile, internal control efforts in the Accounting/Financial aspect are performed by segregating functions, duties, and responsibilities to prevent fraud and wastage.

PPI also utilizes reliable Accounting software to ensure the accuracy of transaction recording and to prepare good documentation of control events and transactions.

In addition to testing controls in Operational and Accounting/Financial aspects, PPI also maintains its compliance with relevant laws and regulations pertaining to its line of business as a state-owned enterprise operating in the trading sector.

Financial And Operational Controls

Financial Domain

The implementation of internal financial controls focuses on accounting and reporting financial transactions, including commitments, authorizations, as well as receipts and disbursements of funds.

Operational Domain

The implementation of internal operational controls focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient manner to fulfill the Company's mission and objectives.

Compliance with Legislation

The implementation of internal compliance controls focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies, and procedures.

Evaluation of the Effectiveness of the Company's Internal Control System

Description of the results of the assessment/review conducted on the implementation of the internal control system in the fiscal year.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan SPI telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan di sepanjang tahun 2024.

Statement From the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors considers that the units under its supervision have performed their functions and roles properly and have achieved effective and efficient performance outcomes. The Corporate Secretary and Internal Audit Unit (IAU) have carried out their duties effectively as supporting units for the Board of Directors and have assisted the Board of Directors in managing and administering the Company throughout 2024.

PERKARA PENTING LEGAL CASES

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana. Demikian pula Entitas Anak PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

Legal Issues

Throughout 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI were not involved in any legal cases, whether civil or criminal. Thus, PPI's subsidiary was not involved in any legal cases, whether civil or criminal.

Sanksi Administratif

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat sanksi administrasi dalam bentuk apa pun yang dikenakan pihak regulator kepada PPI.

Administrative Sanctions

As of the end of 2024, there was no administrative sanctions of any kind imposed by the regulator on PPI.

KODE ETIK CODE OF CONDUCT

Komitmen Perseroan untuk menerapkan kode etik bermanfaat dalam banyak hal, berdampak pada segala hal mulai dari budaya internal dan semangat kerja karyawan hingga reputasi eksternal dan kepercayaan pelanggan. Kode etik yang terdefinisi dengan baik menetapkan harapan dan pedoman yang jelas bagi perilaku karyawan, menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Hal ini mengarah pada lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Memiliki kerangka perilaku etis membantu karyawan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang menantang. Hal ini dapat mengurangi risiko perilaku tidak etis dan konsekuensinya.

The Company's commitment to implementing a code of ethics is beneficial in many ways, impacting everything from its internal culture and employee morale to its external reputation and customer trust. A well-defined code of conduct establishes clear expectations and guidelines for employee behavior, fostering a culture of honesty, integrity, and respect. This leads to a more positive and productive work environment. Having a framework for ethical behavior helps employees make informed and responsible decisions, even when faced with challenging situations. This can reduce the risk of unethical conduct and its consequences.

PPI telah menyusun Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan standar perilaku bagi setiap insan PPI yang disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan mengarahkan tingkah laku termasuk saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga tercapai *outcome* yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya PPI.

Pokok-Pokok Kode Etik

Secara garis besar, pokok-pokok Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PPI memuat hal-hal berikut ini:

PPI has formulated a Business Ethics and Code of Conduct Guidelines, established through Board of Directors Decree Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Gift Acceptance and Provision Policy, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

The Code of Conduct comprises a set of commitments consisting of business ethics and behavioral standards for every individual within PPI, designed to influence, shape, regulate, and direct behavior, including interactions with stakeholders, to achieve desired outcomes in line with PPI's cultural values.

Key Points of the Code of Conduct

In essence, the main points of PPI's Business Ethics and Conduct Policy include the following:

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
I	Pendahuluan Introduction	Bab ini berisikan: 1. Latar Belakang 2. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan 3. Pengertian 4. Maksud Dan Tujuan 5. Daftar Istilah This chapter contains: 1. Background 2. Vision, Mission and Corporate Values 3. Understanding 4. Purpose and Objective 5. Glossary
II	Etika Usaha Perusahaan Company Business Ethics	Bab ini mengatur hubungan dan komitmen Perseroan dalam berhubungan dengan <i>stakeholders</i>, yaitu: 1. Hubungan Dengan Pemegang Saham 2. Hubungan Dengan Pekerja 3. Hubungan Dengan Pelanggan 4. Hubungan Dengan Pesaing 5. Hubungan Dengan Penyedia Barang dan Jasa 6. Hubungan Dengan Mitra Kerja 7. Hubungan Dengan Kreditur 8. Hubungan Dengan Investor 9. Hubungan Dengan Pemerintah 10. Hubungan Dengan Masyarakat 11. Hubungan Dengan Media Massa 12. Hubungan Dengan Organisasi Profesi. This chapter regulates the Company's relationship and commitment in dealing with stakeholders, namely: 1. Relations with Shareholders 2. Relations with Employees 3. Relations with Costumers 4. Relations with Competitors 5. Relations with Goods and Service Providers 6. Relations with Partners 7. Relations with Creditors 8. Relations with Investors 9. Relations with the Government 10. Relations with Community 11. Relations With Mass Media 12. Relations With Professional Organizations.

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
III	Standar Tata Perilaku Code of Conduct	Bab ini menjelaskan standar perilaku terbaik bagi Insan PPI yang berlandaskan pada prinsip - prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya Budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan. This chapter describes the best standard of behavior for PPI's personnel based on the principles of GCG to encourage the establishment of a Corporate Culture which is expected to, either directly or indirectly, increase the value of the Company. Bab ini antara lain memuat: This chapter includes: 1. Hubungan Kerja Working Relationship - Hubungan Dan Kerjasama Antar Pekerja Relations and Cooperation among Employees - Hubungan Atasan Dan Bawahan Boss and Subordinate Relationship 2. Integritas Dan Komitmen Integrity and Commitment 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Compliance with Laws and Legislation 4. Kerahasiaan Data dan Informasi Confidentiality of Data and Information 5. Penggunaan Komunikasi Elektronik Use of Electronic Communication 6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan Conflict of Interest and Abuse of Position 7. Hadiah/Cinderamata, Jamuan Bisnis/Hiburan dan Lainnya (Gratifikasi) Gifts/Souvenirs, Business Meals/Entertainment and Others (Gratuities) 8. Penyuapan Bribery 9. Aktivitas Politik Political Activities 10. Aktivitas Sosial Social Activities 11. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan Protection and Use of Company Assets 12. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health and Safety (OHS) 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi Data Recording, Reporting and Documentation 14. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian Abuse of Narcotics, Drugs, Alcohol and Gambling 15. Citra Perusahaan Company Image
IV	Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku Implementation of business ethics and code of conduct	Bab ini mengatur Organisasi, Penegakan Pedoman Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelaporan, Penanganan Dan Sanksi Pelanggaran. This chapter regulates the Organization, Code of Conduct Enforcement, Dissemination and Internalization, Reporting, Handling and Sanctions for Violations.
V	Penutup Closing	Berisikan penjelasan terkait pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku dan Penjelasan Pernyataan Pegawai. This provides an explanation regarding the update/revision of business ethics and code of conduct and an explanation of employee statements.

Penerapan Code of Conduct

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, penerapan dan pengawasan atas penegakan *Code of Conduct* di lingkungan Perseroan, namun dalam praktiknya, penerapan *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab seluruh karyawan PPI.

Sementara, para Kepala Divisi, Kepala Cabang, Manager dan pejabat setingkatnya bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pernyataan bahwa Code of Conduct Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

PPI menegaskan bahwa pokok-pokok *Code of Conduct* berlaku setara bagi seluruh insan PPI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Dengan adanya *Code of*

Implementation of the Code of Conduct

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the formulation, implementation, and oversight of the enforcement of the Code of Conduct within the Company. However, in practice, the implementation of the Code of Conduct becomes the responsibility of all PPI employees.

Meanwhile, Division Heads, Branch Managers, Managers, and their equivalents are responsible for implementing the Code of Conduct within their respective work units.

Statement that the Code of Conduct Applies to All Organizational Levels

PPI emphasizes that the principles of the Code of Conduct apply equally to all individuals within PPI, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees.

Conduct, PPI berharap setiap individu semakin memiliki kesadaran tinggi untuk bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan membawa dampak positif terhadap citra PPI.

Komitmen Perseroan akan hal ini ditunjukkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *Code of Conduct* dan menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang dilakukan secara berkala atau setiap tahun. Pada tahun 2024, penandatanganan lembar pernyataan tersebut telah dilakukan pada tanggal 31 Januari 2024.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi pokok-pokok *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab Tim GCG. PPI berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Insan Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Pejabat dan Pegawai Perseroan mendapatkan sosialisasi dan menerima satu salinan *Code of Conduct*, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct*;
3. *Code of Conduct* diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh Pejabat dan Pegawai Perseroan, serta didokumentasikan oleh Tim GCG sebagai koordinator dan penanggung jawab;
4. Mengevaluasi pencapaian atau pemahaman seluruh Insan Perseroan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja; dan
5. Mengkaji *Code of Conduct* secara berkala dalam rangka mengembangkan *Code of Conduct* dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

Pelaporan, Penanganan, dan Sanksi Pelanggaran

PPI mendorong seluruh karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan setiap tindakan atau dugaan pelanggaran terhadap kebijakan yang dikembangkan oleh Perseroan sebagai bagian integral dari penegakan *Code of Conduct* di PPI.

Perseroan telah menetapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar *Code of Conduct*. Jenis dan mekanisme pemberian sanksi mengacu pada kebijakan kepegawaian yang berlaku di Perseroan.

With the existence of the Code of Conduct, PPI expects that each individual will have a heightened awareness to behave in accordance with good ethical values, thereby supporting the creation of harmonious work relationships and positively impacting PPI's image.

The Company's commitment to this is demonstrated by requiring every employee to read, understand, and comply with the provisions set forth in the Code of Conduct and to sign the Commitment Statement Sheet of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's Individuals, which is carried out periodically or annually.

In 2024, the signing of this statement sheet was conducted on January 31, 2024.

Dissemination and Internalization

The dissemination and internalization of the key points of the Code of Conduct are the responsibility of the GCG Team. PPI is committed to conducting effective and comprehensive dissemination activities with the following provisions:

1. Conducting Code of Conduct dissemination for all Company Individuals, Customers, and Business Partners and conducting periodic refreshers;
2. Each Officer and Employee of the Company receives dissemination and a copy of the Code of Conduct, and signs a commitment form to comply with and implement the Code of Conduct;
3. The Code of Conduct is renewed and re-signed annually by Officers and Employees of the Company, and documented by the GCG Team as the coordinator and responsible party;
4. Evaluating the achievement or understanding of all Company Individuals during both the orientation and working periods; and
5. Reviewing the Code of Conduct periodically to develop it further and, if necessary, elaborate it further in various company policies and regulations.

Reporting, Handling, and Sanctions for Violations

PPI encourages all employees or external parties to report any actions or suspected violations of the policies developed by the Company as an integral part of the Code of Conduct enforcement at PPI.

The Company has established strict sanctions for anyone found to violate the Code of Conduct. The types of sanctions and the mechanisms for imposing sanctions refer to the applicable personnel policies in the Company.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak menemukan adanya laporan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh insan Perseroan.

Number of Violations in 2024

Throughout 2024, the Company did not receive any reports of complaints regarding violations of the Code of Conduct committed by the Company's employees.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Latar belakang dan kebijakan WBS

Sebagai badan usaha milik negara yang berkomitmen menegakkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan terus berupaya meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap peraturan serta standar etika yang berlaku, sekaligus secara proaktif mencegah potensi pelanggaran.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah mengembangkan dan menerapkan mekanisme pelaporan yang disebut *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang mencakup perubahan pada Board Manual, Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi, Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Kode Etik, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Whistleblowing system (WBS) berfungsi sebagai platform untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kode etik, kebijakan perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dilaporkan adalah tindakan yang dilakukan oleh insan PPI dan berpotensi merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingannya.

Penerapan WBS menegaskan komitmen PPI dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparan, dan bebas dari praktik tata kelola yang tidak etis.

Secara umum, Kebijakan WBS perseroan mengatur hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran
2. Kebijakan Perlindungan Pelapor
3. Apresiasi Pelapor
4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
5. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
6. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
7. Administrasi Pelaporan

WBS background and policies

As a state-owned enterprise committed in upholding good corporate governance, the Company is dedicated to continuously enhancing employees' adherence to applicable regulations and ethical standards, while proactively averting potential violations.

To support this effort, the Company has developed and implemented a reporting mechanism called the *Whistleblowing System* (WBS). This policy is established by the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, which includes amendments to the Board Manual, Policies on Information Classification and Management, Gift Acceptance and Provision, Code of Conduct, *Whistleblowing System*, and GCG Guidelines.

The *Whistleblowing System* (WBS) serves as a platform for reporting any violations of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Code of Conduct, company policies, and applicable laws and regulations. The reported violations are actions committed by PPI personnel that could potentially harm the Company and its stakeholders.

The implementation of WBS underscores PPI's commitment to fostering a conducive, transparent work environment and free from unethical governance practices.

In general, the Company's WBS Policy regulates the following:

1. Policy on Receiving and Resolving Violation Reports
2. Whistleblower Protection Policy
3. Whistleblower Appreciation
4. Whistleblowing Team
5. Receipt of Violation Reports
6. Process for Handling Violation Reports
7. Reporting Administration

8. Pemantauan Tindak Lanjut
9. Penyampaian Tanggapan
10. Publikasi dan Sosialisasi

Melalui penerapan WBS, PPI berupaya mendorong seluruh karyawan untuk lebih berani dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan pelanggaran, atau dugaan pelanggaran terhadap etika dan peraturan, tanpa rasa takut atau keraguan. Tentunya, setiap pelaporan harus didukung dengan bukti awal yang memadai, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan WBS PPI dapat diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.ptppi.co.id/governance>.

Lingkup Pelaporan WBS PPI

Sebagaimana diatur dalam Kebijakan WBS, berikut ini adalah jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain:

- Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
- *Code of Conduct*
- Prinsip-prinsip GCG
- Kecurangan
- Gratifikasi
- Peraturan Perusahaan
- Peraturan Perundang-Undangan
- Regulasi normatif lain yang relevan dengan bidang usaha PPI.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

PPI secara konsisten berupaya memastikan bahwa sosialisasi kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan serta pemangku kepentingan eksternal.

Untuk internalisasi kebijakan WBS di lingkungan karyawan, Perseroan membagikan buku saku mengenai kebijakan WBS ke seluruh unit kerja. Sementara itu, sosialisasi bagi pemangku kepentingan eksternal dilakukan dengan mencantumkan kebijakan WBS di situs web Perseroan serta mengoptimalkan fungsi media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pekerja ditujukan kepada Direksi.

8. Follow-up Monitoring
9. Submission of Feedback
10. Publication and Dissemination

Through the implementation of the WBS, PPI strives to encourage all employees to be more courageous and proactive in preventing and reporting violations, or alleged violation of ethics and regulations, without fear or hesitation. Naturally, each report must be substantiated with adequate strong and accountable initial evidence.

Further information regarding the WBS Policy of PPI can be downloaded from the Company's website: <https://www.ptppi.co.id/governance>.

Scope of the Company's WBS System

As stipulated in the WBS Policy, the following are the types of alleged violations that can be reported through WBS, including:

- Corruption, Collusion, Nepotism (KKN)
- Code of conduct
- GCG principles
- Cheating
- Gratuities
- Company regulations
- Legislation
- Other normative regulations relevant to PPI's line of business.

Dissemination of the Whistleblowing System

PPI consistently strives to ensure that the dissemination of the Whistleblowing System (WBS) policy is well-received and understood by all employees and external stakeholders.

To internalize the WBS policy in the employee environment, the Company distributes pocketbooks regarding the WBS policy to all work units. Meanwhile, dissemination for external stakeholders is conducted by including the WBS policy on the Company's website and optimizing social media to increase stakeholder awareness and understanding.

Violation Reporting Mechanism

1. Reports of suspected violations committed by employees are directed to the Board of Directors.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>3. Perseroan menerima setiap pelaporan pelanggaran dari pihak eksternal (<i>stakeholders</i>), baik secara lisan maupun tertulis.</p> <p>4. Tim GCG Perseroan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian laporan pelanggaran kepada pihak eksternal (<i>stakeholders</i>) yang mengajukan pelaporan.</p> <p>5. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pekerja dapat dilakukan melalui mekanisme berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau dikirim melalui pos ke alamat berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Direksi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Disampaikan melalui e-mail wbs_ptppi@ptppi.co.id</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Disampaikan melalui situs web PPI (www.ptppi.co.id)</p> <p>6. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui mekanisme berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung atau dikirim melalui pos ke alamat berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Dewan Komisaris
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Disampaikan melalui e-mail wbs_ptppi@ptppi.co.id</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Disampaikan melalui situs web PPI (www.ptppi.co.id)</p> <p>7. Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.</p> | <p>2. Reports of suspected violations committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are directed to the Board of Commissioners.</p> <p>3. The Company accepts any reports of violations submitted by external parties (<i>stakeholders</i>), whether verbally or in writing.</p> <p>4. The Company's GCG team explains the policy and procedures for resolving violation reports to external parties (<i>stakeholders</i>) who submit reports.</p> <p>5. Reports of suspected violations committed by employees can be made using the following mechanism:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:</p> <p style="margin-left: 40px;">Board of Directors
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
C/o Good Corporate Governance (GCG)
Grha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Submitted via email to wbs_ptppi@ptppi.co.id</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Submitted via the PPI website (www.ptppi.co.id)</p> <p>6. Reports of suspected violations committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners can be made using the following mechanism:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:</p> <p style="margin-left: 40px;">Board of Commissioners
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
C/o Good Corporate Governance (GCG) Team
Grha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Submitted via email to wbs_ptppi@ptppi.co.id</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Submitted via the PPI website (www.ptppi.co.id)</p> <p>7. Written reports of violations should preferably be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported.</p> |
|--|--|

8. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelanggaran yang akan disampaikan.

8. Written reports of violations without identification (anonymous) must be supplemented with supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported.

Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

1. Tim GCG melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Selanjutnya, Tim GCG akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana disebut pada poin 1 di atas menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak memiliki kecukupan bukti maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Sementara itu, pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja akan ditindaklanjuti diinvestigasi oleh Tim GCG melalui jalur Direksi.
5. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Tim Pengelola Pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.

Perlindungan bagi Pelapor

PPI berkomitmen akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.

Process for Handling Violation Reports

1. The GCG Team verifies incoming reports. Subsequently, the GCG Team will decide whether an investigation into the reported violation is necessary within 30 (thirty) days, extendable up to a maximum of 30 (thirty) working days.
2. If the verification results as mentioned in point 1 above indicate that the reported violation is unsubstantiated and lacks sufficient evidence, the report will not be further processed.
3. If the verification results indicate indications of a violation accompanied by sufficient evidence, the report may proceed to the investigation stage.
4. Meanwhile, reports of violations involving Employees will be investigated by the GCG Team through the Board of Directors' channel.
5. Regarding reports of violations involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners that require investigation, they will be followed up and investigated by the Violation Management Team through the Board of Commissioners' channel.
6. Violators proven guilty based on investigation results will be processed according to applicable regulations.
7. If a violation report occurs at the Branch Office level, the Branch Office's role is limited to verification, while further processing is handled by the GCG Team.
8. If the investigation results reveal violations that lead to criminal acts, legal proceedings may be pursued with law enforcement agencies.

Protection for Whistleblower

PPI is committed to maintaining the confidentiality of the Whistleblower identity and providing assurance of protection to well-intentioned Whistleblower and their families. Protection for Whistleblower includes:

1. Assurance of reporting channels (telephone, facsimile, mail, email) or an independent, free, and confidential Ombudsman.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan. 3. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau PPI. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga Pelapor. 4. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Assurance of confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report. This protection is provided if the Whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them. While allowed, anonymous reporting is not recommended. Anonymous reporting complicates communication for follow-up actions. 3. Assurance of protection against retaliation from the accused or PPI. Protection from pressure, delayed promotions, dismissal, legal action, asset seizure, to physical harm and other detrimental treatment. This protection is not only for the Whistleblower but can also extend to the Whistleblower's family members. 4. Assurance of confidentiality of communication/information channels with the Whistleblower. Information on the follow-up actions, including when and how and to which institution the follow-up actions are submitted, is communicated confidentially to the Whistleblower who provides complete identity. |
|---|--|

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja:
 - a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
 - c. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja PPI.
2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan

Whistleblowing Team

1. Authority of the Board of Directors and the Alleged Employee Violation Reporting Management Team:
 - a. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Policy on Alleged Employee Violation Reporting Management as stipulated in this Decision.
 - b. The Board of Directors appoints the GCG Team as the Alleged Employee Violation Reporting Management Team. This team is also referred to as the Violation Reporting Management Team through the Board of Directors' channel.
 - c. The Violation Reporting Management Team through the the Board of Directors' channel is responsible for following up on reports of violations allegedly committed by PPI Employees.
2. The authorities of the Board of Commissioners and Whistleblowing Team for Reporting Violations Allegedly Committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are as follows:
 - a. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Management Policy for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, as stipulated in this Decision.
 - b. The Board of Commissioners establishes a Management Team for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors,

Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.

- c. Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
- d. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties as required in accordance with their competence and expertise based on the decisions of the Board of Commissioners. This team is also known as the Whistleblowing Team for Board of Commissioners.

- c. The Chairman of the Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is the Chairman of the Audit Committee.
- d. The Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is assigned to follow up on reports of violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Jenis Sanksi yang Diberikan

Apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PPI, maupun secara umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Pelaporan dan Hasil Penanganan Pengaduan WBS tahun 2024

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media Whistleblowing System sehingga tidak terdapat proses penanganan atau tindak lanjut.

Evaluasi Penerapan WBS

PPI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap implementasi WBS untuk memastikan bahwa fungsi WBS senantiasa berjalan dengan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta terbebas dari tindak kecurangan atau hal-hal lain yang berpotensi merugikan Perseroan di kemudian hari. PPI juga terus memperkuat kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mensosialisasikan menyosialisasikan pilar-pilar WBS kepada seluruh karyawan.

Types of Sanctions Imposed

If the Accused is found guilty of committing a violation, the sanctions imposed will refer to the regulations applicable to PPI, as well as generally in accordance with prevailing laws and regulations.

Number of Reports and Results of WBS Complaint Handling In 2024

Throughout 2024, there were no reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System, thus there were no processing or follow-up actions.

Evaluation of WBS Implementation

PPI consistently evaluates the implementation of the WBS to ensure that the WBS functions effectively to foster a safe and comfortable working environment and is free from fraudulent activities or other potential harm to the Company in the future. PPI also continues to strengthen cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in disseminating the pillars of the WBS to all employees.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ANTI-CORRUPTION AND GRATUITY CONTROL POLICY

Dalam pengelolaan bisnisnya, PPI tetap teguh berupaya memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini ditegakkan melalui peningkatan praktik bisnis sehat yang mengedepankan persaingan sehat, sportivitas, dan profesionalisme, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PPI telah menyusun Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dan diperbarui dengan Peraturan Direksi Nomor 24/PERDIR/PPI/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kebijakan ini menegaskan dedikasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memegang teguh pedoman utama pengendalian gratifikasi di lingkungan PPI.

Ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan tersebut menguraikan parameter pengelolaan gratifikasi antara karyawan dan entitas eksternal terkait dengan aktivitas bisnis, yang mencakup penerimaan, penyediaan, dan permintaan gratifikasi, serta pembentukan unit manajemen dan mekanisme pelaporan.

Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PPI berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

In its business management, PPI remains steadfast in its pursuit to eliminate all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This commitment is upheld through the promotion of sound business practices that prioritize fair competition, sportsmanship, and professionalism, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG).

To actualize this commitment, PPI has prepared a Gratuity Control Policy as outlined in the Board of Directors' Decree Number: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 and amended by the Board of Directors' Regulation Number 24/PERDIR/PPI/VII/2024 dated July 8, 2024 concerning the Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. This policy underscores the dedication of both the Board of Commissioners and the Board of Directors to uphold the primary guidelines for controlling gratuities within PPI.

Signed on July 10, 2020, by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the policy delineates the parameters for managing gratuities between employees and external entities in relation to business activities, encompassing the receipt, provision, and solicitation of gratuities, alongside the establishment of management units and reporting mechanisms.

Legal Basis

The preparation of PPI's Gratuity Control Guidelines refers to the following laws and regulations:

1. Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
2. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and its latest amendment, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
9. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan;
10. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018;
11. Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di BUMN;
12. Akta pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Niaga Nomor 03 tanggal 09 Juni 2003 dibuat dihadapan Sri Rahayu H. Prasetyo, SH, notaris di Tangerang berikut pengesahannya;
13. Akta Perubahan Anggaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan berikut pengesahannya;
14. Keputusan Direksi Nomor 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, berikut perubahannya;
15. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan Persyaratan dengan panduan penggunaan.
4. Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
5. Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Preventing Corruption;
6. Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Action to Prevent and Eradicate Corruption;
7. The Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
8. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 02 of 2019 concerning Reporting of Gratuity;
9. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-2/MBU/07/2019 concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the Implementation of Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism and Handling of Conflicts of Interest and Strengthening of Supervision;
10. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 concerning the Implementation of the Anti-Bribery Management System in State-Owned Enterprises as an Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018;
11. Letter from the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number S-17/S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020, concerning ISO 37001 Certification of Anti-Bribery Management Systems in State-Owned Enterprises;
12. Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Cipta Niaga Number 03 dated June 9, 2003, made before Sri Rahayu H. Prasetyo, SH, a notary in Tangerang, with its ratification;
13. Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number 12 dated March 21, 2024, made before Nanda Fauz Iwan SH, M.KN., a notary in South Jakarta, with its ratification;
14. Decree of the Board of Directors Number 13/DU/SKD/PPI/II/2023 dated February 28, 2023, concerning the Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, with its amendments;
15. Indonesian National Standard (SNI) ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Requirements with guidance for use.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, terdiri dari:

1. Pendahuluan
2. Kategori Gratifikasi
3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
4. Implementasi
5. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan
6. Sanksi atas Pelanggaran
7. Perlindungan Pelaporan
8. Ketentuan Tambahan
9. Lampiran

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Perseroan menunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk melakukan pengendalian Gratifikasi yang memiliki tugas dan fungsi utama yaitu melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana berikut:

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Insan PT PPI wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Insan PT PPI melalui Unit Pengendalian Gratifikasi dengan diketahui oleh atasannya minimal setingkat Kepala Divisi/Unit Kerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat -

Guidelines for Gratuity Control

The scope of the Gratuity Control Guidelines within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia consists of:

1. Introduction
2. Categories of Gratuities
3. Management of Gratuity Control
4. Implementation
5. Reporting Mechanisms and Procedures
6. Sanctions for Violations
7. Protection of Reporting
8. Additional Provisions
9. Appendix

Management of Gratuity Control

The Company has appointed a Gratuity Control Unit, which is responsible to the President Director to carry out Gratuity control, whose primary duties and functions are to monitor and control gratuity within the Company.

The mechanism and procedures for reporting the receipt of gratuities are as follows:

1. If a gratuity is received that must be reported, PT PPI personnel are required to report the following matter and hand over the money or goods received to the Gratuity Control Unit, which will then be forwarded to the Corruption Eradication Commission (KPK) if necessary, as stipulated in the Gratuity Control Guidelines;
2. Reporting of gratuities is carried out by PT PPI personnel through the Gratuity Control Unit, with the knowledge of their superior, at least at the Head of Division/Work Unit level, no later than 5 (five) working days from the date of receipt, by submitting a gratuity receipt form in accordance with the sample format as stipulated in the Attachment to the Gratuity Control Guidelines;
3. For receipts of perishable/rotten or expired goods (e.g., food and beverages), these goods shall be handed over to the Gratification Control Unit no later than one business day after receipt, using Attachment 1 of these

lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut;

4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah kedaluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Unit Pengendalian Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Sekretaris Perusahaan dan Divisi Legal;
5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan, penerima melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kedaluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 3.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Setiap tahun, PPI mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan PPI, di antaranya dengan memuat imbauan mengenai larangan gratifikasi dalam bentuk *pull up banner* dan poster yang dipasang di lingkungan PPI. Selain itu, PPI juga membagikan buku saku tentang Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah kepada seluruh karyawan sebagai salah satu upaya internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi pada lingkup PPI.

Guidelines. The Gratuity Control Team will determine the distribution of the received gratuities;

4. For receipts of expired goods, these goods shall be submitted to the Gratuity Control Unit (UPG) no later than one business day after receipt, using Attachment 1 of the Gratuity Control Guidelines. The Gratuity Control Unit will destroy the gratuity, witnessed by the Corporate Secretary and the Legal Division;
5. For receipts of gratuities for official purposes, the recipient shall report to the Gratuity Control Unit in accordance with the sample format set out in Attachment 1 of the Gratuity Control Guidelines;
6. Reporting of gratuities other than perishable/rotten or expired goods and gratuities in official duties shall be carried out using the format issued by the Corruption Eradication Commission (KPK) as shown in Attachment 3.

Gratuity Policy Dissemination

Annually, PPI communicates and disseminates the gratuity control policy to all PPI personnel, including by displaying reminders about the prohibition of gratuities in the form of pull-up banners and posters placed within the PPI premises. Moreover, PPI distributes pocketbooks on the Policy for Receiving and Giving Gifts to all employees as part of the internalization efforts for the gratuity control guidelines within PPI's scope.

KEBIJAKAN KICKBACKS DAN ANTI PENYUAPAN

KICKBACKS AND ANTI-BRIBERY POLICY

Kebijakan Suap dan Anti Penyuapan adalah seperangkat pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Perseroan untuk mencegah karyawan, kontraktor, dan agen terlibat dalam praktik korupsi seperti penyuapan, sogokan, atau bentuk perilaku tidak etis lainnya. Kebijakan Anti-Suap menguraikan sikap Perseroan terhadap penyuapan dan korupsi, dengan menekankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini biasanya mencakup ketentuan yang melarang karyawan menawarkan, meminta, atau menerima suap dalam bentuk apa pun, baik uang maupun non uang.

PPI telah memiliki kebijakan Anti-Penyuapan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020. Penyusunan Kebijakan Anti-Penyuapan berpedoman pada perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Anti-Penyuapan ini menjadi salah satu bentuk upaya dan mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. PPI berharap seluruh karyawan dengan kesadaran penuh dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalamnya.

A Kickbacks and Anti-Bribery Policy is a set of guidelines and rules established by the Company in order to prevent employees, contractors, and agents from engaging in corrupt practices such as bribery, kickbacks, or other forms of unethical behavior. An Anti-Bribery Policy outlines the Company's stance against bribery and corruption, emphasizing compliance with applicable laws and regulations. It usually includes provisions prohibiting employees from offering, soliciting, or accepting bribes in any form, whether monetary or non-monetary.

The PPI has adopted an Anti-Bribery Policy as ratified through the Board of Directors Decree No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 6, 2020. The formulation of the Anti-Bribery Policy refers to the following laws and regulations:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
3. Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

This Anti-Bribery Policy serves as one of the Company's efforts and mitigations to prevent undesirable actions. PPI hopes that all employees will fully comply with the provisions outlined therein.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

PPI tidak pernah memberikan dana atau hibah untuk kepentingan kegiatan politik atau kepada partai politik, namun bersedia memberikan dana untuk kepentingan sosial selama hal itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

PPI has never provided funds or grants for political activities or to political parties, but is willing to provide funds for social purposes as long as it is done in accordance with applicable regulations.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORTS

LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, adalah laporan wajib yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaannya pada awal masa jabatan, saat pergantian, kenaikan pangkat, dan pada saat pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah pernyataan harta kekayaan dan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan harta kekayaan. Tujuan dibuatnya LHKPN adalah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

Definisi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut undang-undang ini, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham mewajibkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Surat Keputusan Direksi PT RNI (Persero) Nomor: 13/SK/RNI.01/III/2018 tanggal 16 Maret 2024 perihal Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LHKPN, or *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, is a mandatory report to be submitted by state officials regarding their wealth at the beginning of their term, during any changes, promotions, and upon retirement. Another obligation accompanying the LHKPN is the declaration of wealth and willingness to undergo examinations of their assets. The purpose of creating the LHKPN is as part of the authority held by the Corruption Eradication Commission (KPK) to take preventive measures against corruption, including by registering and examining the LHKPN.

The definition of state officials is regulated in Article 1 paragraph 1 of Law No. 28 of 1999 concerning the Administration of the State Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. According to this law, state officials are government officials who perform executive, legislative, or judicial functions, as well as other officials whose main functions and duties are related to the administration of the state in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Shareholders require the Board of Commissioners and the Board of Directors to submit a report on their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

Legal Basis

1. Law Number 28 of 1999 concerning Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free State Administrators.
2. Decree of the Board of Directors of PT RNI (Persero) Number: 13/SK/RNI.01/III/2018 dated March 16, 2024 concerning the State Officials' Wealth Report Management Unit (LHKPN) within PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
3. Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 5. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 6. Surat Direksi PT RNI (Persero) Nomor 3/SPMB/PA.09/RNI.01/27/XII/2024 tentang Wajib Lapo Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024. | <ol style="list-style-type: none"> 4. KPK Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports. 5. Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter Number: SE-12/MBU/10/2021 concerning the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises. 6. Letter from the Board of Directors of PT RNI (Persero) Number 3/SPMB/PA.09/RNI.01/27/XII/2024 concerning the Mandatory Reporting of State Officials' Wealth (LHKPN) for 2024. |
|--|--|

Wajib Lapo LHKPN

Berdasarkan dasar hukum di atas, pejabat yang wajib lapo LKHPN adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Per 31 Desember 2024, jumlah pejabat yang wajib lapo sebanyak 7 orang, dan sebanyak 7 orang telah melakukan pelaporan LHKPN.

LHKPN Mandatory Reporting

Based on the legal basis above, officials required to report their Report on Wealth and Treasures of the State Officer (LHKPN) are the Board of Commissioners and the Board of Directors.

As of December 31, 2024, there were 7 officials required to report, and all of them had already submitted their reports.

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

Dalam kegiatan operasionalnya, PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, dan memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup Perseroan, yang berkaitan dengan:

1. Pencemaran lingkungan;
2. Pelanggaran hukum;
3. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pajak;
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; dan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

In its operational activities, PPI always complies with applicable rules and regulations, and ensures that there are no bad corporate governance practices in the Company, which relates to:

1. Environmental pollution;
2. Violation of the law;
3. Non-compliance with tax obligations;
4. Violation of employee rights; and
5. Non-compliance of financial reporting with applicable regulations.

Laporan Mengenai Pencemaran Lingkungan

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan pencemaran lingkungan yang disebabkan, atau terkait dengan aktivitas PPI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PPI senantiasa mematuhi perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal perpajakan sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan PPI tidak pernah memiliki kasus yang berkaitan dengan pepajakan.

Pada tahun 2024, PPI membayar pajak sebesar Rp71,13 miliar, menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp79,97 miliar.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa dan pembahasan kinerja di dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PPI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Laporan Keuangan PPI Tahun 2024 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Report on Environmental Pollution

Throughout 2024, there were no reports of environmental pollution caused by, or related to PPI activities.

Fulfillment of Tax Obligations

PPI always complies with applicable laws including in terms of taxation so that until this Annual Report is published, PPI has never had a case related to taxation.

In 2024, PPI paid taxes amounting to Rp71.13 billion, a decrease compared to the previous year of Rp79.97 billion.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All information presentation, analysis, and performance discussions within this annual report are based on the PPI Financial Statements for the years ending December 31, 2024, and December 31, 2023, which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Kontribusi Perpajakan tahun 2024 dan 2023 | Tax Contribution in 2024 & 2023

Uraian Description	2024 (Rp- juta) (Rp-million)	2023 (Rp- juta) (Rp-million)
Kontribusi Pajak Tax Contribution		
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	688	498
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	6.705	8.469
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	4.191	7.347
PPh Pasal 22 Import Income Tax Article 22 Import	1.590	7.533
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	457	798
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	6.480	17.534
PPN VAT	19.754	1.837
PPN – WAPU VAT-WAPU	16.498	25.955
Jumlah Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	56.362	69.970
Kontribusi pajak Lainnya Other Tax Contribution		
Pajak Bumi & Bangunan Property Tax	4.901	4.831

Uraian Description	2024 (Rp- juta) (Rp-million)	2023 (Rp- juta) (Rp-million)
Pajak Kendaraan Vehicle Tax	400	1.070
Bea Masuk Customs	9.472	4.101
Jumlah Kontribusi Pajak Lainnya Total Other Tax Contribution	14.772	10.002
JUMLAH TOTAL	71.134	79.972

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Company’s consolidated Financial Statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Financial Accounting Standards Statement (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Standards Board (“DSAK”) and applicable Capital Market Regulations, including Regulation No. VIII.G.7 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) regarding Financial Statements Presentation Guidelines, Chairman of Bapepam-LK Decree No. KEP- 347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

KEBIJAKAN KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PERUSAHAAN

POLICY ON COMPANY INFORMATION CLASSIFICATION AND MANAGEMENT

PPI telah menerapkan Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang bertujuan untuk mengkategorikan informasi dan menetapkan mekanisme pengungkapan internal dan eksternal. Inisiatif ini selaras dengan kepentingan PPI, persyaratan pemegang saham, dan harapan para pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan informasi PPI dilakukan secara profesional dan *prudent* oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat. Divisi ini yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

PPI has implemented a Company Information Classification and Management Policy aimed at categorizing information and establishing mechanisms for internal and external disclosure. This initiative aligns with PPI’s interests, the requirements of shareholders, and the expectations of other stakeholders.

PPI’s information management is carried out professionally and prudently by the Corporate Secretary and Public Relations Division. This division is directly responsible to the President Director.

Namun demikian, seluruh Pejabat PPI tetap bertanggung jawab terhadap keamanan informasi PPI yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan atas informasi Perseroan di unit kerja masing-masing.

Perseroan memiliki Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi yang ditujukan sebagai panduan yang jelas bagi seluruh Insan PPI. Panduan ini mengatur klasifikasi dan mekanisme dalam memperlakukan informasi perusahaan agar pengungkapan informasi perusahaan dilakukan dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan Perseroan.

However, all PPI Officers remain responsible for PPI's information security which includes the arrangement, implementation and management of the Company's information in their respective work units.

The Company has an Information Classification and Management Policy which serves as a clear guide for all PPI personnel. This guideline regulates the classification and mechanism in treating corporate information so that the disclosure of corporate information is carried out by always complying with applicable laws and regulations and does not harm the Company.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

Kebijakan

PPI memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditetapkan berdasarkan Nomor 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Pedoman Perdagangan PT PPI dan Kebijakan terkait pengadaan barang dagangan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 23/PERDIR/PPI/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa bukan dagangan PT PPI.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang

PPI senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terlaksana secara sistematis, efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel dalam proses pengadaan.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Tahun 2024

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa Perseroan selama tahun buku 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Tidak ditemukan adanya temuan terkait aspek pengadaan barang dan jasa oleh auditor internal dan eksternal yang signifikan.

Policy

PPI adopted a policy related to the procurement of goods and services as stipulated in Number 10/PERDIR/PPI/IV/2024 dated April 1, 2024 concerning the Trade Guidelines of PT PPI and a Policy related to the procurement of merchandise as stipulated in the Board of Directors Regulation Number 23/PERDIR/PPI/VII/2024 dated July 5, 2024 concerning the Guidelines for the Procurement of Non-Trade Goods and Services of PT PPI.

Principles of Procurement

PPI always refers to the principles, making the procurement of goods and services to be carried out systematically, effectively, efficiently, competitively, transparently, fairly and reasonably, openly and accountably in the procurement process.

Implementation of the Procurement Process in 2024

In general, the Company's procurement process for goods and services during the 2024 fiscal year has proceeded in accordance with established regulations. There were no significant findings related to aspects of the procurement of goods and services by internal and external auditors.

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Perseroan memiliki kebijakan terkait hubungan dengan kreditur sebagaimana telah dijelaskan di dalam:

1. Pedoman GCG, pada bagian Pedoman bagi *Stakeholder*, aspek Kreditur; dan
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada bagian Etika Usaha Perusahaan, aspek Hubungan dengan Kreditur.

Dalam kebijakan tersebut antara lain dijelaskan bahwa Perseroan memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. PPI melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukannya serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal dalam upaya menjaga kepercayaan kreditur.

Kebijakan Seleksi Pemasok

PPI memiliki kebijakan dan pedoman yang digunakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan dengan pemasok, antara lain diatur dalam:

1. Peraturan Direksi Nomor: 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Pedoman Perdagangan PT PPI dan Kebijakan terkait pengadaan barang dagangan: dan
2. Peraturan Direksi Nomor 23/PERDIR/PPI/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa bukan dagangan PT PPI.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa bukan dagangan dan pengadaan barang dagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PPI, mulai dari analisa kebutuhan, proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian.

PPI melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemasok/rekanan (*vendor performance*) untuk melihat keterlibatan pemasok/rekanan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas dan kebutuhan Perseroan serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Perseroan untuk menggunakan kembali rekanan/pemasok yang bersangkutan.

Commitment to Fulfilling the Rights of Creditors

The Company has policies regarding relationships with creditors as described in:

1. GCG Guidelines, in the Stakeholder Guidelines section, regarding Creditors; and
2. Business Ethics and Code of Conduct in the Company's Business Ethics section, regarding Relationships with Creditors.

These policies outline the Company's commitment to honoring creditors' rights as stipulated in the agreed-upon agreements. PPI manages loan funds effectively according to their purposes and strives for optimal repayment rates in an effort to maintain creditor trust.

Supplier Selection Policy

PPI has policies and guidelines that are used as guidance for building relationships with suppliers, including those regulated in:

1. the Board of Directors Regulation: Number 10/PERDIR/PPI/IV/2024 dated April 1, 2024 concerning the Trade Guidelines of PT PPI and Policies related to the procurement of merchandise: and
2. The Board of Directors Regulation Number 23/PERDIR/PPI/VII/2024 dated July 5, 2024 concerning the Guidelines for the Procurement of Non-Trade Goods and Services of PT PPI.

The procurement of non-commercial goods and services, as well as the procurement of commercial goods, shall be carried out in accordance with the applicable provisions and procedures at PPI, starting from the analysis of needs, the process and stages of procurement of goods/services, up to payment in accordance with the requirements in the agreement.

PPI conducts assessments and evaluations of suppliers/vendors (*vendor performance*) to observe the involvement of suppliers/vendors in supporting the Company's activities and needs and is used as consideration for the Company to reuse the respective vendors/suppliers.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara optimal sangat penting bagi perusahaan, antara lain untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Untuk itu, PPI terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi di Perseroan guna mempercepat pertumbuhan bisnis, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di industri di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, PPI juga memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dengan efektif. Memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan pemberian layanan dan memitigasi risiko operasional secara efisien. Dengan memanfaatkan perangkat dan sistem TI, organisasi dapat merampingkan proses, meningkatkan saluran komunikasi, dan memastikan akses tepat waktu ke data penting, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan daya tanggap. Selain itu, solusi TI menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat dan protokol manajemen data, mengurangi kemungkinan gangguan dan meningkatkan ketahanan secara keseluruhan terhadap potensi ancaman dan kerentanan.

PPI telah memiliki kebijakan dan tata kelola Teknologi Informasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan Teknologi Informasi telah sesuai dengan pencapaian tujuan PPI. Tata kelola Teknologi Informasi terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan Teknologi Informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya Teknologi Informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait Teknologi Informasi.

Information Technology Policy and Governance

Optimal utilization of Information Technology (IT) is very important for the Company, among others, to increase its competitiveness in the market. For this reason, PPI continues to strive to develop the Information Technology infrastructure in the Company to accelerate business growth, as well as accommodate various changes in the industry in which PPI conducts its business activities.

In addition, PPI utilizes Information Technology to provide the best service and minimize business operational risks faced effectively. Utilizing Information Technology (IT) infrastructure enables businesses to optimize service delivery and mitigate operational risks efficiently. By leveraging IT tools and systems, organizations can streamline processes, enhance communication channels, and ensure timely access to critical data, thereby improving service quality and responsiveness. Furthermore, IT solutions offer robust security measures and data management protocols, reducing the potential disruptions and enhancing overall resilience against potential threats and vulnerabilities.

PPI has an Information Technology policy and governance that serves as a reference in managing and developing the Company's Information Technology. The reference aims to ensure that the application of Information Technology is in accordance with the achievement of PPI's objectives. Information Technology governance consists of a policy structure and a collection of processes that are useful for optimizing Information Technology benefits and opportunities, controlling the use of Information Technology resources, and managing Information Technology-related risks.

Landasan Hukum Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi
Secara garis besar, pengelolaan sistem Teknologi Informasi PPI mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-03/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Direksi Nomor: 33/PERDIR/PPI/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
4. Surat Edaran Direksi nomor: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pengembangan Kompetensi SDM Teknologi Informasi

Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Teknologi Informasi sehingga dapat menunjang perkembangan Teknologi Informasi di dalam perusahaan. Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki.

Selain keterampilan teknis, Perseroan menekankan pembelajaran mandiri dan pencarian informasi sebagai kompetensi dasar bagi sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi (TI). Pendekatan ini menumbuhkan budaya perbaikan dan kemampuan beradaptasi yang berkelanjutan, memberdayakan para profesional TI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri. Dengan memprioritaskan kemampuan belajar mandiri dan mencari informasi, Perseroan memastikan tenaga kerja TI tetap gesit, inovatif, dan siap menghadapi tantangan yang terus berkembang di bidang teknologi yang dinamis.

Legal Basis for Information Technology System Management
Broadly speaking, the management of the PPI Information Technology system refers to:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number: PER-03/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 concerning Information Technology Governance Principles of the Ministry of State-Owned Enterprises;
3. Board of Directors Regulation Number: 33/PERDIR/PPI/XI/2024 dated November 11, 2024 concerning the General Policy for Information Technology Governance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. Circular Letter of the Board of Directors Number: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 dated April 22, 2022, concerning Information Technology Policies and Procedures of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Information Technology HC Competency Development

The rapid development of the Information Technology world must be accompanied by an enhancement of the quality and competence of IT human resources to support the Company's Information Technology advancements. Therefore, PPI is committed to continuously providing internal and external training, especially technical training tailored to the Company's needs, with the aim of enhancing the competence of its IT workforce.

In addition to technical skills, the Company emphasizes self-learning and information-seeking as fundamental competencies for Information Technology (IT) human resources. This approach fosters a culture of continuous improvement and adaptability, empowering IT professionals to stay abreast of emerging technologies and industry trends. By prioritizing self-learning and information-seeking abilities, the Company ensures its IT workforce remains agile, innovative, and equipped to tackle evolving challenges in the dynamic field of technology.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Di tengah dinamika lanskap bisnis modern, Teknologi Informasi (TI) berfungsi sebagai katalisator penting, atau *business enabler*, bagi kesuksesan bisnis suatu perusahaan, dengan memungkinkan perusahaan tersebut untuk berinovasi, merampingkan proses, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Infrastruktur dan solusi TI harus terintegrasi secara mulus dengan operasi bisnis, memfasilitasi komunikasi yang efisien, manajemen data, dan proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, peran TI sebagai penggerak bisnis terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan kemampuan teknologi dengan tujuan strategis, mendorong pertumbuhan dan menumbuhkan ketahanan di dunia yang semakin terdigitalisasi.

Menyadari hal tersebut, PPI memberi perhatian serius dalam pemilihan dan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang tepat agar dapat mendukung kelancaran bisnisnya. Seluruh kegiatan pengelolaan TI mulai dari *plan & organize, acquire & implement, delivery & support*, sampai dengan *monitor & evaluate* senantiasa dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi maksimal bagi PPI.

Teknologi Informasi & ERP (Divisi TI & ERP) memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan strategi implementasi sistem informasi yang mendukung tujuan jangka panjang PPI. Selain itu, Divisi TI & ERP juga memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan, implementasi sistem informasi jangka panjang, dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi PPI.

Penanggung Jawab Pengelola Teknologi Informasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ditetapkan bahwa Divisi Teknologi Informasi & ERP adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan prosedur standar TI, *roadmap*, dan strategi yang mencakup seluruh aspek pengembangan aplikasi, pengelolaan infrastruktur, keamanan data, implementasi dan integrasi ERP, pemenuhan fasilitas pendukung sistem TI perusahaan, serta memberikan solusi atas permasalahan strategis mengenai TI pada konsolidasi induk dan anak perusahaan.

Per 31 Desember 2024, jumlah personil Divisi Teknologi Informasi adalah sebanyak 10 orang PKWTT, 2 orang PKWT dan 3 orang *Outsourcing*.

Scope and Responsibility

Amidst the dynamic business landscape, Information Technology (IT) serves as a critical catalyst, or business enabler, for business success, enabling the Company to innovate, streamline processes, and gain competitive advantages. IT infrastructure and solutions should seamlessly integrate with business operations, facilitating efficient communication, data management, and decision-making processes. Ultimately, IT's role as a business enabler lies in its ability to align technological capabilities with strategic objectives, driving growth and fostering resilience in an increasingly digitalized world.

Recognizing this, PPI pays serious attention to the selection and management of Information Technology (IT) to ensure smooth business operations. All IT management activities, from planning & organizing, acquiring & implementing, delivering & supporting, to monitoring & evaluating, are consistently managed properly to provide maximum contribution to PPI.

Information Technology & ERP (IT & ERP Division) is responsible for planning and developing the implementation strategy of information systems that support PPI's long-term goals. Additionally, the IT & ERP Division provides guidance in formulating policies, implementing long-term information systems, and innovating in the management of PPI's information systems.

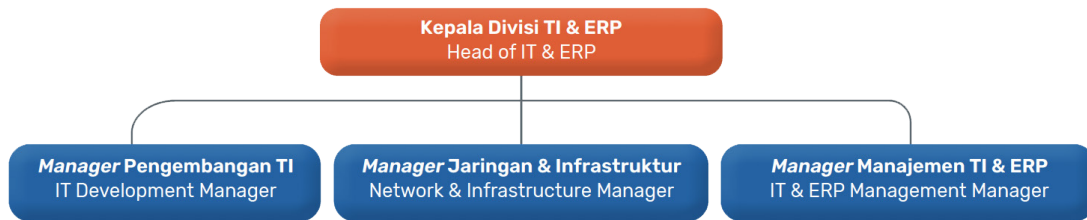
Head of Information Technology Management

In accordance with Board of Directors Decree No. 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 concerning the Organizational Structure of the Head Office and Branch Offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the Information Technology & ERP Division is the work unit responsible for developing IT standard policies and procedures, roadmaps, and strategies covering all aspects of application development, infrastructure management, data security, ERP implementation and integration, provision of supporting facilities for the Company's IT systems, and providing solutions to IT strategic issues within the consolidation of the parent company and its subsidiaries.

As of December 31, 2024, the number of personnel in the Information Technology Division was 10 permanent employees, 2 contract employees, and 3 outsourcing employees.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi di Perseroan.

The following is the organizational structure of the Information Technology management in the Company.



Investasi di Bidang Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2024, Divisi Teknologi Informasi & ERP telah merealisasikan sejumlah investasi yang bertujuan untuk menunjang Bisnis proses di PPI, di antaranya:

1. Pemenuhan perangkat kerja
2. Pemenuhan infrastruktur TI untuk GSP DKI Jakarta

Investments in the Field of Information Technology

Throughout 2024, the Information Technology & ERP Division has implemented several investments aimed at supporting business processes at PPI, including:

1. Fulfillment of work equipment
2. Fulfillment of IT infrastructure for GSP DKI Jakarta

Realisasi Program Teknologi Informasi tahun 2024

1. Sentralisasi *support services* bidang IT dengan melakukan Pemenuhan dan tindak lanjut terhadap kebutuhan layanan IT melalui helpdesk
2. Pemenuhan, evaluasi dan pembaharuan atas Tata Kelola Divisi TI & ERP, meliputi Pembentukan Komite Pengarah TI, Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), Pembaharuan Tata Kelola TI, Pembentukan *Tim Disaster Recovery Plan* (DRP) dan Penyusunan kebijakan DRP
3. Integrasi ERP ke non ERP (Aplikasi Samantha, Warung pangan, Arlita VA (*invoice*), Salma
4. Penyempurnaan sistem ERP dengan melakukan pemenuhan terhadap ITCR ERP dari pemilik sistem/ pengguna
5. Digitalisasi Gudang Stock point dengan melakukan pemenuhan infrastruktur IT (cctv, jaringan internet dan perangkat kerja) untuk Gudang stockpoint Jakarta
6. Penguatan aplikasi Komersial dengan melakukan pengembangan Aplikasi Jual Beli Minyak Jelantah (Woles), Penambahan modul stockist untuk pengelolaan B2 (Arlita B2), Migrasi Aplikasi Warung Pangan dan Pengembangan Sales Management System (Salma).

Realization of Information Technology Programs In 2024

1. Centralization of IT support services by fulfilling and following up on IT service needs through the helpdesk.
2. Fulfillment, evaluation, and update of IT & ERP Division Governance, including the establishment of an IT Steering Committee, establishment of a Computer Security Incident Response Team (CSIRT), update of IT Governance, establishment of a Disaster Recovery Plan (DRP) Team, and preparation of DRP policies.
3. Integration of ERP to non-ERP (Application of Samantha, Warung Pangan, Arlita VA (*invoice*), Salma).
4. Improvement of the ERP system by fulfilling ERP ITCRs from system owners/users.
5. Digitalization of Stock point Warehouses by fulfilling IT infrastructure (CCTV, internet network, and work equipment) for the Jakarta stock point warehouse.
6. Strengthening of Commercial applications by developing the Used Cooking Oil Buy-Sell Application (Woles), adding a stockist module for B2 management (Arlita B2), migrating the Warung Pangan Application, and developing a Sales Management System (Salma).

7. Penguatan aplikasi Operasional dengan melakukan pengembangan Aplikasi Rantai Pasok Logistik Terintegrasi (Arlita CPP), Aplikasi tracking armada (myGPS) dan aplikasi pengajuan proses pengadaan barang dagangan (SIOPPA).
8. Penguatan aplikasi Supporting dengan melakukan pengembangan Aplikasi Pengelolaan Aset (MONALISA), Pengelolaan Virtual Account (ARLITA VA), Website Corporate PPI, Aplikasi TJSL (ITA), Dashboard EIS (SAMANTHA), Aplikasi Kepegawaian (MySISKA), E-Learning (PPIjar) dan Aplikasi Surat Menyurat (ADINDA)
9. Monitoring dan maintenance terhadap infrastruktur dan sistem dengan melakukan Pemantauan berkala terhadap kinerja infrastruktur dan sistem serta melakukan tindakan pemeliharaan secara berkala untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan
10. Pemenuhan kebutuhan DRC, dengan melakukan Pembentukan Tim DRP, Pembentukan Kebijakan Disaster Recovery Plan, Pengajuan Proposal DRC, Evaluasi Risiko, Pemilihan Lokasi.
11. Optimalisasi Digitalisasi Sistem pada Fungsi Utama (ERP) dengan melakukan implementasi Finconsol dan Penyusunan Chart of Account (CoA) Konsolidasi, integrasi data keuangan dan operasional

7. Strengthening of Operational applications by developing the Integrated Logistics Supply Chain Application (Arlita CPP), fleet tracking application (myGPS), and merchandise procurement process submission application (SIOPPA).
8. Strengthening of Supporting applications by developing the Asset Management Application (MONALISA), Virtual Account Management (ARLITA VA), PPI Corporate Website, CSR Application (ITA), EIS Dashboard (SAMANTHA), Human Resources Application (MySISKA), E-Learning (PPIjar), and Correspondence Application (ADINDA).
9. Monitoring and maintenance of infrastructure and systems by conducting periodic monitoring of infrastructure and system performance and performing regular maintenance actions to prevent disruptions or damage.
10. Fulfillment of DRC needs, by establishing DRP Team, Disaster Recovery Plan Policy, Submission of a DRC Proposal, Risk Evaluation, and Location Selection.
11. Optimization of System Digitalization in Main Functions (ERP) by implementing Finconsol and preparing Consolidated Chart of Accounts (CoA), financial and operational data integration.

Rencana Fokus Pengembangan Teknologi Informasi tahun 2025

1. Implementasi DRC untuk mendukung BCP
2. Implementasi GPS terhadap 7 Cabang
3. Optimalisasi ERP
4. Penguatan Infrastruktur dan keamanan data (intranet/internet gateway)
5. Integrasi Sistem (sistem utama dan sistem pendukung)
6. Pengembangan dan Penguatan Aplikasi (baru dan existing)
7. Digitalisasi GSP Surabaya
8. Pemenuhan Tata Kelola (BCP, SMKI, ITML, PDP)
9. Monitoring dan maintenance terhadap infrastruktur dan sistem
10. Pemenuhan kebutuhan layanan IT (*Helpdesk*)

Focus Plan for Information Technology Development in 2025

1. Implementation of DRC to support BCP
2. Implementation of GPS to 7 Branches
3. ERP Optimization
4. Strengthening Infrastructure and data security (intranet/internet gateway)
5. System Integration (main system and supporting system)
6. Development and Strengthening of Applications (new and existing)
7. Digitalization of GSP Surabaya
8. Fulfillment of Governance (BCP, SMKI, ITML, PDP)
9. Monitoring and maintenance of infrastructure and systems
10. Fulfillment of IT service needs (*Helpdesk*)

KESESUAIAN PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

CONFORMITY OF IMPLEMENTATION OF THE GENERAL GUIDELINES OF INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE (PUGKI)

Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

The following are the Recommendations and Guidelines in the 2021 General Guidelines of Indonesian Corporate Governance (PUGKI) and their implementation by the Company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners				
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Role and Responsibilities of the Board of Directors				
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; To achieve the creation of sustainable values, the Board of Directors carries out its leadership roles and endeavors to achieve the following governance results: a. competitive and focusing on long term performance; b. ethical and responsible in carrying out businesses; c. positive contribution to the public and the environment;			✓	
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the missions, visions, objectives, targets, strategies, and annual and medium-term plans, are consistent with the long-term objectives, by utilizing innovations and technologies effectively.			✓	
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporate applies appropriate and effective risk management and internal control system in line with the corporate's visions, missions, objectives, targets, and strategies as well as complies with the prevailing laws and regulations and standards.			✓	
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the corporate's accounting integrity and financial reporting system in a timely manner and accurately over all material information regarding the corporation.			✓	
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures the sustainable reporting has been composed accordingly.			✓	
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors develops outline for the corporate's information technology (IT) governance which is in line with the corporate's business needs and priorities, supporting business opportunities and performance, strengthening risk management, as well as supporting the corporate's objectives and strategies.			✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	1.1.7		Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter covers, among others, the distribution of the Director's individual roles can be stipulated in the Board of Directors' Charter or by means of the decree of the Board of Directors.	✓	
	1.1.8		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has policies related to the resignation of the members of the Board of Directors if they are involved in financial criminal offenses and are proven guilty.	✓	
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment - the Board of Directors and its Members				
	1.2.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners carries out annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and every individual Director.	✓	
	1.2.2		Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the considerations of the Nomination and Remuneration Committee, will be responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	✓	
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners				
	1.3.1		Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategies at least every year and approves the corporate missions, visions, and strategies formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advices, and approves the corporate's business plans and long-term financial plans and short-term financial plans. The Board of Commissioners provides advices and carries out monitoring to the Board of Directors over the management of its implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, stipulated in the corporate's articles of associations.	✓	
	1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan Types of resolutions requiring the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	✓	
	1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. With due regards to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the, and to be resolved by, the GMS, the appointment and/or dismissal of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. In proposing the abovementioned matter, the Board of Commissioners will have due regards towards the diversity, non-discriminative elements, and will give the same opportunity without discriminating ethnic groups, religions, races, inter-groups, and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election processes of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners are formal and transparent.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee carrying out the nomination function will compose the succession policy in the nomination process of the members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners observes the reporting on the implementation of development and succession plans to be delivered to President Director.	✓	
	1.3.5		Dewan Komisaris: a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners: a) submits to the GMS, which can be preceded by the proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which is in line with the corporate's sustainable development and the long-term interests of the corporation and the shareholders; b) periodically reviews the remuneration system of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✓	
	1.3.6		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policy and its implementation as well as proposes changes, if necessary.	✓	
	1.3.7		Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to apply the appropriate and effective risk management and internal control system in line with the corporation's objectives, targets, and strategies as well as complies with the prevailing laws and regulations, code of conduct, and standards.	✓	
	1.3.8		Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs for the achievement of the corporate's accounting integrity and financial reporting system, as well as the independence of internal and external audit function.	✓	
	1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporate's annual report and sustainability report as well as ensures its integrity as well as supervises the corporate's disclosure and communication process.	✓	
	1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners' Charter will be reviewed periodically.	✓	
	1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has policies related to the resignation of the members of the Board of Commissioners if they are involved in financial criminal offenses and proven of committing the faults.	✓	
	1.3.12		Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. The Independent Commissioner is highly expected to contribute in fair, objective, active, and constructive discussions during the meeting of the Board of Commissioners.	✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	1.3.13		Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner has the role as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages the culture of openness and constructive dialogue which enable the disclosure of various perspectives, including coordinating the stipulation of the appropriate agenda for the board's meeting, and ensuring the sufficient time is available to discuss all agenda. In addition, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management level.	✓	
1.4	Pembentukan Komite Formation of Committee				
	1.4.1		Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners which are at least consisting of: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.	✓	
	1.4.2		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that the entire members of the Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are majority from independent parties, and all members of the committees have competence, are committed, as well as have the sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	✓	
	1.4.3		Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure the monitoring over the implementation of the duties of the Audit Committee runs objectively and independently, the President Commissioner may not become the chairman of the Audit Committee, unless in extraordinary condition which must be explained in the annual report.	✓	
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - the Board of Commissioners and its Members				
	1.5.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners carries out annual formal evaluation objectively to determine the Board's effectiveness, committee, and every individual Commissioner.	✓	
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest				
	1.6.1		Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. The member of the Board of Directors serving concurrent office outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting new appointment as the Director or Commissioner of a public corporation, other office as director or other position with significant time commitment.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	1.6.2		Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages the potential conflict of interest of the management, the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the shareholders, including the abuse of corporate assets and the abuse in affiliated party transactions. A Commissioner with conflict of interest will not participate in the monitoring and the adoption of resolution over the potential conflict of interest involving the relevant Commissioner or the affiliated Commissioner.	✓	
	1.7		Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Improvement of Competence of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
	1.7.1		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the corporate characteristics and operations, the relevant laws and regulations and standards as well as other prevailing obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in upgrading and refreshing their skills and knowledges which are required to carry out their roles in the Board.	✓	
2			Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
	2.1		Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		
	2.1.1		Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunersi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining the candidate nominee for the Director, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee will not only rely on the recommendation from the Board of Commissioners, the management or the majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine the qualified candidate.	✓	
	2.1.2		Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria in selecting the members of the Board of Directors cover at least knowledge, capability, and expertise which are required to appropriately fulfill the roles of the Board of Directors as well as take into account the fulfillment of diversity of the Board of Directors.	✓	
	2.1.3		Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policy regarding diversity in the Board of Directors and the Board of Commissioner is disclosed in the Annual Report.	✓	
	2.1.4		Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policy and procedure for the selection and nomination of the Commissioners are clear and transparent, therefore, can result in the desired composition of the Board. The Board of Commissioners use independent sources to determine the qualified candidates.	✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function stipulates nomination procedure and criteria which is consistent with the expertise matrix of the Board of Commissioners which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the profile of the qualified candidate which has been stipulated in the expertise matrix and nomination criteria.		✓	
	2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The Composition of the Board of Commissioner must be formed in such a manner, therefore, their members in collegial manner reflect diversity in terms of capability, expertise, knowledge, age, cultural background, and gender required to appropriately fulfill the roles of the Board of Commissioners.		✓	
	2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners in providing advices and independently supervising the Board of Directors and for the roles containing potential conflict of interest, the Board of Commissioners will consist of Independent Commissioners in sufficient number, with restricted term of office, and there should be a disclosure on the term of membership of the Board of Commissioners as well as their independence from the perspective of the corporation.		✓	
	2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners effectively and in order to improve the trust of the investors and the stakeholders, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict, and transparent process for the designation and appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		✓	
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Remuneration policy for the members of the Board of Directors consists of remuneration structure oriented on sustainable development of the corporation and encourage the achievement of long term objectives. The remuneration of the Board of Directors must be proposed, can be through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS aforesaid will be stipulated by considering the roles of every member of the Board of Directors and the economic situation as well as performance of the corporation.		✓	
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
			posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. Remuneration policy for the members of the Board of Commissioners consists of remuneration structure oriented on sustainable development of the corporation and encourages the achievement of long term objectives. Remuneration amount proposed by the Board of Commissioners to the GMS aforesaid will be stipulated by considering the role of every member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as performance of the corporation. In addition, must also be considered, his position as the President Commissioner and the chairman as well as his membership in the committees.		
	2.2.3		Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration package is stipulated based on achievement, qualification, and competence of the Directors and the Commissioners with due regards towards the performance of corporate operations, individual performance, and market condition, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is fair and transparent procedure to stipulate remuneration policy for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✓	
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	3.1	Sifat Hubungan Kerja Characteristics of Work Relationship			
	3.1.1		Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is an open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as among the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. However, it is important to maintain the confidentiality of information in order to prevent the leaking of confidential information.	✓	
	3.1.2		Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors will cooperate with the Board of Commissioners in formulating the missions, visions, and strategies of the corporation and regularly discuss their implementations.	✓	
	3.1.3		Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate Secretary has important role in supporting the effectiveness of work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, in encouraging the implementation of good corporate governance, including effective communication with the shareholders and other stakeholders.	✓	
	3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access to information of the Board of Commissioners			
	3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring the Board of Commissioners receives access to information which is accurate, relevant and in a timely manner. The Board of Commissioners itself ensures that it receives sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without postponement, and comprehensively regarding all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners at any time can request the Board of Directors to provide additional information.	✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners over the Impact of Ownership Structure towards the Corporation				
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure towards the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of share ownership structure and relationship among the shareholders of the corporation which might have impact towards the management and operations of the corporation.			✓	
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and Responsible Behaviors				
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Ethical and Behavioral Guidelines				
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set out in the Business and Ethical Conduct Guidelines which must clearly disclose the expectations of the corporation that every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the employees will: - Act for the best interest of the corporation; - Act truthfully and with high level integrity; - Act independently and act based on complete information, in good faith, with due diligence and with caution. - Comply with the prevailing laws and regulations for the corporation and its operations; - Avoid actions violating the laws and regulations or unethical actions based on the ethical guidelines of the corporation; - Not be involved or participate in any activity whatsoever which will give rise to conflict of interest for the best interest of the corporation or which will have negative impact on the reputation of the corporation; - Not exploit the property or information owned by the corporation, other asset ownership or its customers for his own personal interest or which could inflict losses to the corporation and its customers. - Not use his position or the opportunity generated by his position for his own personal interest. - Avoid the act of requesting or receiving from the third party, payment, gratification or other benefits for himself or for other party which could give rise to conflict of interest/give benefit to the third party in violation of the laws and regulations.			✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
			j. Respect difference of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the employees. k. Ensure disclosure in a complete, fair, accurate, timely, and understandable manner in the reports and documents submitted by the corporation to the regulator and in other public communication.		
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors stipulates policies and practices of anti-money laundering and terrorism funding, antibribery, anti-corruption, antifraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, antifraud or other related standards.		✓	
	4.2	Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture			
	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi The Corporation articulates, grows and disclose corporate culture and values.		✓	
	4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture			
	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Corporate conduct and ethic code guidelines must be effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, as well as the entire employees, must be integrated into the corporate strategies and operations, including risk management system and remuneration structure, as well as being enforced.		✓	
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance				
	5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance			
	5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out periodic review over design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and compliance of the corporation and report the carrying out and result of review to the shareholders through the annual report of the Corporation.		✓	
	5.2	Manajemen Risiko Risk Management			
	5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategies and risks constitute one integral part, are disclosed transparently, included in the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in the discussions in the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.		✓	
	5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of duties of the Board of Commissioners by creating transparent, focused, and independent mechanism in risk management supervisory of the corporation.		✓	
	5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Governance Integration, Risk Management, and Compliance			
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors develops integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.		✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division supervising the compliance function does not concurrently carry out function which is having the potential of giving rise to conflict of interest.		✓	
	5.4.	Audit Internal Internal Audit			
	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee will monitor and ensure that the internal audit function is assisting the corporation to achieve its objectives by taking objective approach and discipline to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.		✓	
6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency				
	6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy			
	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has policy and procedure for disclosure and transparency which are ensuring the disclosure of material information and safeguarding sensitive as well as confidential information of the corporation.		✓	
	6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The right of the shareholders to receive, regularly and in a timely manner, relevant material information regarding the corporation must be fulfilled.		✓	
	6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial Statement and Sustainability Report			
	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses the system and procedure to ensure that the interim financial statement which is not audited or reviewed by external auditor is materially accurate, complete, and provide, to the investor, the appropriate information to make the appropriate investment decision.		✓	
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the audit quality of the financial statement carried out by the external auditor. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor.		✓	
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report must be prepared and disclosed accurately and composed in accordance with the national or international sustainability reporting framework.		✓	
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Corporations issued integrated annual reports that put historical performance into context and describe the corporation's risks, opportunities, and future prospects, thereby assisting shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.		✓	
	6.3	Diseminasi Informasi Dissemination of Information			
	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. The channel for the dissemination of information must provide access which is equivalent, in a timely manner, and relatively cheap for information which is relevant for the user.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection towards the Rights of the Shareholders				
7.1	Hak Pemegang Saham The Rights of the Shareholders				
7.1.1			Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy which facilitating and encouraging the participation of the shareholders or investor.	✓	
7.1.2			Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation who constitutes the parent company will ensure that its corporate governance policy will be applicable to the subsidiary entity and the controlling entity in which the investment of the corporation is significant.	✓	
7.1.3			Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures stipulating the acquisition take over, and extraordinary transaction, such as merger and the sale of substantial assets of the corporation to ensure the transaction takes place transparently and in fair condition and it protects the rights of all shareholders in accordance with their classes.	✗	Prinsip 7.1.3 tidak terpenuhi (<i>explain</i>) dikarenakan PT PPI selaku induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan, belum memiliki prosedur akuisisi. Sedangkan untuk aturan akuisisi perusahaan telah tertuang di dalam Anggaran Dasar PT PPI Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan berikut pengesahannya. Principle 7.1.3 was unfulfilled (<i>explain</i>) because PT PPI, the parent company with subsidiaries, did not yet have an acquisition procedure. Meanwhile, the Company's acquisition regulations were outlined in the Articles of Association of PT PPI Number 12 dated March 21, 2024, which was made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.KN., Notary in South Jakarta, with its ratification.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment towards the Shareholders				
7.2.1			Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a) semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b) pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedure to ensure: a) all shareholders from the same series in the same class of share must be treated equally; b) the disclosure of the rules and procedure aforesaid as well as the disclosure of the capital structure and the arrangement which enables certain shareholder to obtain influence or control which is not proportional to its share ownership.	✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
	7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedure which ensure that the affiliated party transactions are approved and carried out in such a manner which can assure that conflict of interest has been properly managed, and protect the interest of the corporation and the shareholders.		✓	
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders				
	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation gives the summoning for the GMS with the agenda and materials of the GMS as complete and as early as possible (at the latest 28 days prior to the GMS) to give sufficient time and materials for the shareholders to properly review the agenda of the meeting. The invitees of the meeting and the entire information of the GMS are disclosed through electronic means, such as via the website of the corporation.		✓	
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedure facilitating the shareholders in participating and casting votes effectively in the GMS.		✓	
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The shareholders effectively participate in determining the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		✓	
	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor in the GMS.		✓	
	7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The presentation of the result of voting and the summary of the minutes of the GMS in a complete manner will be published to the public on the subsequent working day.		✓	
8	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders				
	8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)	Stakeholder Engagement	✓	
	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent, and effective communication with the key stakeholders as well as engages them to understand their hopes and complaints as well as the impact of corporation towards them.		✓	
	8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainable Integration in Business Model			
	8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable, and transparent over the sustainable governance, including stipulating sustainable strategies, priority, and targets of the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners include the sustainable considerations when performing his roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategies, business plan, main action plan, and risk management.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection towards the Stakeholders				
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the corporate operations reflect the application of high ethical standards, social and environmental responsibility throughout the corporation, and ensures that the appropriate policies and procedures are applied to respect as well as comply with the rights of the stakeholders.			*	Prinsip 8.3.1 tidak terpenuhi (<i>explain</i>) karena Peraturan Direksi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang saat ini telah diterbitkan oleh PT PPI yaitu Peraturan Direksi PT PPI Nomor 5/PERDIR/PPI/II/2023 belum dilakukan pemutakhiran merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Maret 2023 dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PPI Nomor 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023. Principle 8.3.1 was unfulfilled (<i>explain</i>) due to the Board of Directors Regulation on Social and Environmental Responsibility that has currently been issued by PT PPI, namely the Board of Directors Regulation of PT PPI Number 5/PERDIR/PPI/II/2023 has not been revised



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidance	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Application Description
					referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 stipulated in Jakarta on March 3, 2023 and promulgated in Jakarta on March 24, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. Although its practice was based on the Decree of the Board of Directors of PT PPI Number 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 dated November 30, 2023, concerning the Establishment of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Committee has referred to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-1/MBU/03/2023.
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages the employees to work for the long term interest of the corporation to put forward sustainability.		✓	



06

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Di PPI, kami percaya bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan bagian integral dari misi kami untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat yang kami layani. | At PPI, we believe that responsible business practices are an integral part of our mission to drive sustainable growth while contributing to environmental management and the well-being of our employees and communities.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, Perseroan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan. Namun demikian, Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan Perseroan.

Dengan mengacu pada GRI Standard, Laporan Keberlanjutan 2024 yang diterbitkan Perseroan memuat berbagai informasi yang elaboratif dan komprehensif mengenai kinerja keberlanjutan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Perseroan pada tahun 2024. Selain itu, Laporan Keberlanjutan Perseroan juga memuat pernyataan komitmen dan strategi keberlanjutan Perseroan. Melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkannya, PPI ingin membuktikan komitmennya atas transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta untuk membantu Perseroan dalam mengelola risiko keberlanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan Perseroan tersedia pada situs web Perseroan <https://www.ptppi.co.id/> yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

Referring to POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports, the Company also publishes a Sustainability Report in a separate book from the Annual Report. However, the Sustainability Report is an integral part of the Company's Annual Report.

In accordance with GRI Standards, the Company's 2024 Sustainability Report contains various elaborative and comprehensive information regarding sustainability performance and the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs in 2024. Additionally, the Company's Sustainability Report also includes statements of commitment and sustainability strategies. Through the publication of its Sustainability Report, the Company aims to demonstrate its commitment to transparency, accountability, and responsible business practices, as well as to assist the Company in managing sustainability risks and creating long-term value for all stakeholders.

The Company's Sustainability Report is available on the Company's website <https://www.ptppi.co.id/>, which serves as an integral part of this Annual Report.





07

Laporan Keuangan

Financial Report

